

Prosiding Seminar Nasional Economic Outlook 2016 Dan Call Papers:

Strategi Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Global



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2015



PENYUSUN

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Trunojoyo Madura

ISBN

978-602-73555-0-7

PENYUNTING

Dr. Sutikno, SE., ME

Dr. Mohtar Rasyid, SE., MS.i

Dr. Kurniyati Indahsari, MS.i

Dr. Diah Wahyuningsih, MS.i

Dr. Eni Sri Rahayuningsih, ME

TATA LETAK & PERWAJAHAN

Selamet Joko Utomo

Trio Ahmad Fajar

PENERBIT

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO

REDAKSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendakNya Prosiding Seminar Nasional *Economic Outlook 2016 dan Call for Papers* dengan tema “**Strategi Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Global**” ini dapat terselesaikan. Seminar Nasional *Economic Outlook* adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (FE UTM) dalam rangka memberikan wadah bagi *stakeholders* pembangunan ekonomi untuk saling berbagi informasi, pengetahuan maupun pengalaman. Secara umum, tujuan acara ini adalah mengevaluasi kinerja perekonomian, baik nasional dan regional, di tahun berjalan dan mendiskusikan prospek dan tantangannya di tahun berikutnya. Seminar juga menjadi ajang bertemunya para akademisi, peneliti, profesional dan praktisi yang tertarik dan peduli terhadap perkembangan terkini serta prospek perekonomian ke depan. Pertemuan tersebut akan lebih berarti jika ada forum lanjutan yang memberikan kesempatan luas kepada peserta untuk mengungkapkan dan mendiskusikan pemikiran, hasil penelitian, maupun pengalamannya, serta memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti bagi pembangunan ekonomi regional dan nasional.

Di tahun 2015, Seminar *Economic Outlook 2016* diteruskan dengan sesi paralel (*parallel session*) yang mendiskusikan hasil tulisan dari peserta. Untuk itu, seminar kali ini disertai dengan *Call for Papers* dari para akademisi, peneliti, profesional dan praktisi di Indonesia. Prosiding ini berisi seluruh artikel yang dipresentasikan dalam *parallel session* seminar nasional tersebut yang telah terselenggara pada hari Rabu, 25 November 2015 bertempat di Gedung Rektorat Terpadu Universitas Trunojoyo Madura. Terdapat 18 artikel yang dipresentasikan dalam sesi tersebut oleh para penulisnya yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan semuanya disajikan dalam prosiding ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara tersebut dapat terselenggara dan prosiding ini dapat terselesaikan. Semoga acara maupun prosiding ini dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi pengembangan diri dan institusi peserta, maupun pembangunan ekonomi regional dan nasional.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan acara seminar nasional maupun penyajian prosiding ini masih jauh dari sempurna. Karenanya, kami menerima dengan senang hati segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Bangkalan, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Fenomena Ricardian Equivalence Pada Kebijakan Defisit Fiskal Di Indonesia Tahun 1990-2013
Agus Ferdianto, M. Abd. Nasir, Adhitya Wardhono, Ciplis Gema Qori'ah dan Yulia Indrawati1-11

Efektivitas Pemberian In-Kind Dan *Cash Transfer* Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Albertus Girik Allo12-37

Efektifitas Program Revitalisasi Industri Gula Nasional (*rign*) terhadap Pencapaian Produksi Gula Kristal Putih (gkp) dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Perkebunan Tebu di Jawa Timur (pendekatan model dinamis)
Duwi Yunitasari.....38-57

The Analysis of Leading Economic Activity Categories In the Kediri District
Faisol.....58-81

Kelembagaan Keuangan Informal Di Kabupaten Jember Dan Strategi Pengembangannya
Handriyono, Sebastiana Viphindrartin dan Silvi Asna Prestianawati82-97

Struktur Pasar Dan Kinerja Industri Perbankan Di Indonesia: Pendekatan Data Panel
Ika Nurjannah, Adhitya Wardhono, Ciplis Gema Qori'ah, M. Abd Nasir, dan Yulia Indrawati.....98-110

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Pendekatan Vector Error Correction Model)
Imam Mukhlis dan Nora Ria Retnasih 111-119

Determinasi Nilai Tukar Dalam Konsep Teori Efek Fisher Internasional: Studi Kasus Indonesia-Jepang
Lailatul Maghfiroh, Ciplis Gema Qori'ah, Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati dan M. Abd. Nasir 120-142

Pola Kelembagaan Usaha Tani Kedelai Lokal Di Jawa Timur
Lailatul Maghfiroh, Zainuri, Adhitya Wardhono dan M. Abd. Nasir..... 143-166

Implikasi Kebijakan Pengembangan Industri Gula Tebu Melalui Implementasi Sistem Informasi Geografis Di Jawa Timur
Lilis Yuliati dan Regina Niken W...... 167-179

Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (Lkmm) Kabupaten Jember
Lilis Yuliati dan Teguh Hadi P...... 180-195

Kekuatan Industri Perbankan (Pendekatan Bresnahan Lau Oligopoli) Muhammad Sholeh, Diah Wahyuningsih dan Rifai Afin	196-205
Model Penguatan Pasar Tradisional Di Indonesia Berbasis Modal Sosial (Studi Pada Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan) Noor Rahmin, M. Pudjihardj, Arif Hoetor dan Asfi Manzilati	206-218
Apakah Migrasi Merupakan Salah Satu Cara Keluar dari Kemiskinan ? Rini Setyastuti	219-234
Potensi Dan Strategi Pengembangan Sektor Perbankan Di Jawa Timur Ris Yuwono Yudo Nugroho	235-253
Hubungan Sun Dan Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sa'adah Yuliana	254-263
Quo Vadis Privatisasi Di Indonesia Sebagai Solusi Ketahanan Ekonomi Nasional (Kajian Empiris, Permasalahan Dan Solusinya) Sari Narulita	264-278
Probabilitas Kemiskinan Penduduk Daerah Bantaran Sungai dan Bukan Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin Ika Chandriyanti, Muzdalifah, Ahmad Yunani dan Dewi Rahayu	279-296
Analisis Konflik Lahan Dan Keberlanjutan Kelembagaan Lokal (Studi Kasus Konflik Tanah Di Kabupaten Jember*) Rafael Purtomo Somaji dan Aisah Jumiati	297-310
Desa Industri Mandiri Pertanian Organik Kemitraan Universitas Negeri Gorontalo Dan Gorontalo Utara Herwin Mopangga	311-318
Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur Siswoyo Hari Santosa	319-329
Grand Desaign Food Estate sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara Menjadi Garis depan Ekonomi Nasional Terhadap Pasar Asia Timur Dalam Sektor Perikanan Ambo Wonua Nusantara, Baheri, Dan Buyung Sarita	330-348

FENOMENA RICARDIAN EQUIVALENCE PADA KEBIJAKAN DEFISIT FISKAL DI INDONESIA TAHUN 1990-2013

Agus Ferdianto, M. Abd. Nasir, Adhitya Wardhono, Ciplis Gema Qori'ah dan Yulia Indrawati

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

e-mail: aferdianto2210@yahoo.com, abdulnasir1705@gmail.com,
a_wardhono@gmail.com, ciplis_qorih@yahoo.com,
yuliaindrawati2012@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan konsumsi menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi konsumsi domestik dilakukan melalui kebijakan defisit fiskal yang terdiri dari defisit anggaran, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, dan pajak. Kebijakan defisit fiskal yang berdampak netral terhadap konsumsi domestik Indonesia dikarenakan adanya fenomena Ricardian equivalence pada perekonomian Indonesia. Determinasi konsumsi lainnya yaitu Gross Domestic Product (GDP) dan tingkat tabungan masyarakat. Disamping itu, terdapat perbedaan kebijakan defisit fiskal sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997/1998. Paper ini bertujuan untuk mengetahui adanya fenomena Ricardian Equivalence di Indonesia, dengan mengestimasi determinasi konsumsi Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model fungsi konsumsi yaitu Ordinary Least Square (OLS) dan Two Stage Least Square (TSLS), dengan menggunakan data time series dari tahun 1990 sampai 2013. Alasan penggunaan TSLS yaitu karena komponen kebijakan defisit fiskal dipengaruhi oleh variabel dummy masa sebelum dan setelah krisis ekonomi 1997/1998. Hasil estimasi dengan metode OLS dan TSLS menunjukkan bahwa kebijakan defisit fiskal tidak signifikan terhadap konsumsi domestik, artinya kebijakan defisit fiskal berdampak netral terhadap konsumsi domestik Indonesia, sedangkan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi domestik, dan tabungan masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi domestik. Perbedaan masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997/1998 tidak mempengaruhi komponen kebijakan defisit fiskal Indonesia.

Kata Kunci: konsumsi, kebijakan defisit fiskal, ricardian equivalence, TSLS

ABSTRACT

Growth in consumption is a barometer of economic growth in Indonesia. Government policies in influencing domestic consumption was done via the fiscal deficit policy consisting of budget deficits, government expenditure, government debt, and taxes. Policy fiscal deficit neutral impact on domestic consumption in Indonesia due to the phenomenon of Ricardian equivalence on the Indonesian economy. Other consumption determination that Gross Domestic Product (GDP) and the level of private savings. In addition, there were differences in fiscal deficit policy before and after the economic crisis of 1997/1998. This paper aims to investigate the phenomenon of Ricardian Equivalence in Indonesia, with a determination to estimate the consumption of Indonesia. The method used to

estimate models of consumption function was Ordinary Least Square (OLS) and Two Stage Least Square (TSLS), using time series data from 1990 to 2013. The reason for that was because the TSLS uses fiscal deficit policy component is influenced by a dummy variable period before and after the economic crisis of 1997/1998. The estimation results by OLS and TSLS indicated that the fiscal deficit was not significant policy toward domestic consumption, which means that the fiscal deficit policy neutral impact on Indonesia's domestic consumption, while the GDP was significant positive effect on domestic consumption, and saving society significant negative effect on domestic consumption. Differences in the period before and after the economic crisis of 1997/1998 did not affect the policy component of Indonesia's fiscal deficit.

Keywords: Consumption, Fiscal Deficit Policy, Ricardian Equivalence, TSLS

PENDAHULUAN

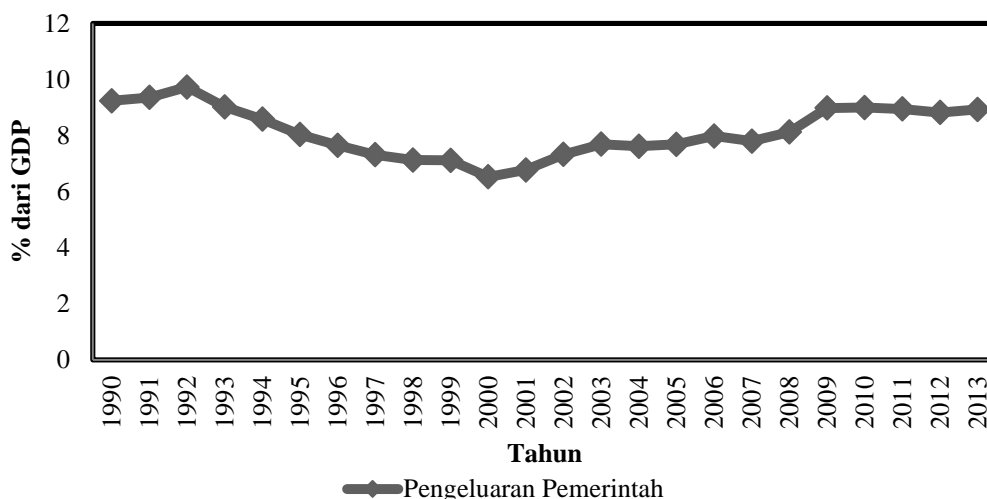
Teori *Ricardian Equivalence* muncul karena adanya perbedaan antara prediksi ekonom dan fenomena ekonomi yang terjadi di Amerika pada tahun 1982, dimana para ekonom memprediksikan bahwa defisit anggaran yang terjadi di Amerika akan berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu defisit anggaran akan menyebabkan tingginya tingkat suku bunga, menurunkan *saving*, melemahnya pertumbuhan ekonomi, dan membesarkan defisit anggaran, tetapi perekonomian Amerika saat itu menunjukkan keadaan yang sebaliknya, dimana tingkat suku bunga riil dan nominal mengalami penurunan, pengeluaran investasi meningkat, menurunnya angka pengangguran, dan pertumbuhan GNP riil meningkat (Barro, 1989). Perbedaan prediksi dan fenomena tersebut ditanggapi oleh Barro dengan mengangkat kembali teori yang sebelumnya dicetuskan oleh David Ricardo, sehingga muncul *Barro - Ricardo Proposition* yang sering disebut sebagai *Ricardian Equivalence* (RE).

Ricardian Equivalence (RE) berdasarkan studi Gruber (2013) menyimpulkan bahwa defisit anggaran berdampak netral terhadap perekonomian, dimana pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh utang tidak dapat meningkatkan konsumsi, hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh utang akan meningkatkan pajak dimasa depan, sehingga konsumen akan lebih memilih menyimpan pendapatannya untuk membiayai pajak yang lebih besar dimasa depan. Seater (1993) memaparkan bahwa RE merupakan terusan dari teori *permanent income/life cycle hypothesis* (PILCH), dimana hipotesis ini dapat dijelaskan melalui logika pengeluaran pemerintah, pajak, dan utang yang mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam melakukan konsumsi.

Fenomena RE ini dapat terjadi dengan beberapa asumsi seperti *infinite horizon*, pasar modal sempurna, kepastian pendapatan dan pajak masa depan, *lump-sum*, dan *full employment* (Barro, 1989). Asumsi *Ricardian Equivalence* tersebut secara umum terdapat pada Negara maju, dengan demikian RE terjadi pada Negara maju, tetapi RE juga dapat terjadi pada Negara berkembang, berdasarkan penelitian Giorgioni dan Holden (2010) RE terjadi pada Negara berkembang, hal ini terjadi karena Negara berkembang memiliki tingkat utang yang tinggi. Hasil penelitian Giorgioni dan Holden menyimpulkan bahwa RE terjadi pada 10 negara berkembang.

Logika RE di Indonesia dapat dilihat pada kebijakan pemerintah yang diimplementasi kedalam APBN, dimana dalam APBN terdapat komponen

kebijakan defisit fiskal yang diterapkan dalam bentuk pengaturan defisit, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, dan penerimaan pajak. Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu menerapkan defisit anggaran, dimana pengeluaran pemerintah selalu lebih besar dari pada penerimaan pemerintah, disamping itu pengeluaran pemerintah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997/1998 terjadi perbedaan, dimana pengeluaran pemerintah sebelum krisis ekonomi mengalami penurunan, tetapi setelah krisis ekonomi mengalami peningkatan, perbedaan tersebut menggambarkan adanya perbedaan kebijakan pemerintah sebelum dan sesudah krisis ekonomi.



Sumber: Nota Keuangan dan APBN Indonesia, diolah.

Gambar 1
Pengeluaran Pemerintah (%)

Komponen defisit fiskal menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997/1998. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perbedaan masa sebelum dan setelah krisis ekonomi terhadap komponen defisit fiskal yang terdiri dari defisit anggaran, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, dan pajak, dengan mengestimasi *Instrumental Variable* (IV) terhadap variabel bebas dari fungsi konsumsi menggunakan *Two Stage Least Square* (TSLS) tahap pertama. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui determinasi konsumsi domestik Indonesia dengan mengestimasi fungsi konsumsi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan *Two Stage Least Square* (TSLS) tahap kedua. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah fenomena *Ricardian equivalence* terjadi di Indonesia.

DASAR TEORI

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya fenomena *Ricardian Equivalence* di negara maju maupun negara berkembang. Penelitian pada negara maju salah satunya dilakukan oleh Reitschuler dan Cuaresma (2004), Reitschuler dan Cuaresma meneliti RE pada 26 negara OECD, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 10 dari 26 negara OECD mendukung teori RE, 9 dari 10 negara tersebut adalah negara eropa. Membenarkan hasil penelitian Reitschuler dan Cuaresma, Pozzi et. al (2003) menemukan adanya sensitifitas konsumsi pada negara Eropa dan Amerika. Lebih lanjut Kooij (tanpa tahun)

meneliti RE pada 11 negara Eropa, hasil dari penelitian tersebut, 2 dari 11 negara eropa mendukung RE, 2 negara tersebut yaitu Belanda dan Spanyol.

Kesimpulan yang berbeda dihasilkan oleh penelitian Heijdra dan Dalen (1996), dimana menurut Heijdra dan Dalen konsumen belanda sejalan dengan pemikiran Keynes, yaitu kebijakan defisit fiskal dapat meningkatkan konsumsi secara signifikan. Penelitian di Amerika sendiri dilakukan oleh beberapa ekonom, yaitu Rockerbie, Hatzinikolaou, Mohabbat dan Khan, Cardia, dan Sachsida et. al.

Rockerbie (2010) melakukan penelitian RE dengan memasukkan kendala likuiditas kedalam model, hasilnya menunjukkan bahwa RE terjadi pada Amerika, berbeda dengan Rockerbie, penelitian Hatzinikolaou (2013) menyimpulkan bahwa konsumen Amerika sejalan dengan pemikiran Klasik, kesimpulan yang berbeda juga dihasilkan oleh Mohabbat dan Khan (2003), dimana 4 negara Amerika selatan sejalan dengan pemikiran Keynes.

Perbedaan kesimpulan pada pengujian RE di amerika sebelumnya telah dijelaskan oleh Cardia (1997), dimana menurut Cardia tes RE pada negara Amerika menghasilkan kesimpulan yang tidak jelas. Memperkuat hasil penelitian Cardia, Sachsida et.al (2010) meneliti RE dengan mengadopsi metode Cardia, hasilnya tes RE pada Amerika mendukung kesimpulan Cardia dengan lebih kuat.

Penelitian RE pada negara berkembang juga dilakukan, penelitian pertama RE pada negara berkembang dilakukan oleh Easterly dan Hebbel (1993), hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa RE tidak terjadi pada 10 negara berkembang, penelitian pada 10 negara berkembang juga dilakukan oleh Giorgione dan Holden (2001), hasil penelitian Giorgioni dan Holden menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dimana RE terjadi pada 10 negara berkembang. Dalam penelitian Giorgioni dan Holden, Negara Pakistan merupakan salah satu negara yang mendukung RE, tetapi penelitian khusus yang dilakukan Waqas dan Awan (2011) menyimpulkan bahwa konsumen Pakistan sejalan dengan teori Keynes, sedangkan penelitian Saeed dan Khan (2012), yang juga meneliti Pakistan menyimpulkan bahwa konsumen Pakistan sejalan dengan pemikiran Klasik. Penelitian di Indonesia sebagai negara berkembang dilakukan oleh Adji (2007), dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen Indonesia sejalan dengan pemikiran Keynes.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) dan *Two Stage Least Square* (TSLS). OLS digunakan untuk mengestimasi fungsi konsumsi yang tidak memasukkan *Instrument variabel* (IV) kedalam model, sedangkan TSLS digunakan untuk mengestimasi fungsi konsumsi dengan memasukkan IV kedalam model.

Two Stage Least Squared (TSLS) berdasarkan Greene (2012), dan Wooldridge (2004) merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi persamaan yang teridentifikasi, atau model yang memiliki variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak ada dalam persamaan. Model fungsi konsumsi yang dibentuk terdiri dari konsumsi domestik (Cdom), GDP sebagai proksi dari pendapatan, pertumbuhan defisit anggaran (PRDF), pertumbuhan pengeluaran pemerintah (PG), pertumbuhan utang (PU), penerimaan pajak (Tx), simpanan domestik (W), serta variabel *dummy* masa (Dm) yang terdiri dari masa sebelum krisis ekonomi yang berlangsung dari tahun 1990-1998, yang dinotasikan dengan nol (0), dan masa setelah krisis ekonomi

yang berlangsung sejak tahun 1999-2013, yang dinotasikan dengan angka satu (1). Model Fungsi konsumsi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$C_{dom} = a + \beta_1 GDP + \beta_2 PRDF + \beta_3 PG + \beta_4 PU + \beta_5 Tx + \beta_6 W \dots\dots\dots (1)$$

Dalam persamaan ditemukan bahwa PRDF, PG, PU, dan Tx berkorelasi dengan u_1 , dan PRDF, PG, PU, dan Tx berkorelasi dengan Dm, tetapi variabel Dm tidak muncul dalam persamaan dan tidak berkorelasi dengan residual u_1 , maka Dm merupakan *Instrument Variable* (IV) dari variabel PRDF, PG, PU, dan Tx. Dengan demikian, persamaan yang dibentuk yaitu:

$$PRDF = a + \lambda_1 GDP + \lambda_2 PG + \lambda_3 PU + \lambda_4 Tx + \lambda_5 W + \lambda_6 DM + v_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$PG = a + \lambda_9 GDP + \lambda_{10} RDF + \lambda_{11} PU + \lambda_{12} Tx + \lambda_{13} W + \lambda_{14} DM + v_3 \dots\dots\dots (3)$$

$$PU = a + \lambda_{17} GDP + \lambda_{18} PRDF + \lambda_{19} PG + \lambda_{20} Tx + \lambda_{21} W + \lambda_{22} DM + v_4 \dots\dots\dots (4)$$

$$Tx = a + \lambda_{25} GDP + \lambda_{26} PRDF + \lambda_{27} PG + \lambda_{28} PU + \lambda_{29} W + \lambda_{30} DM + v_5 \dots\dots\dots (5)$$

Dm adalah valid sebagai IV dari PRDF, PG, PU, dan Tx, dan variabel lain dapat dianggap nol. Dalam hal ini, variabel selain Dm dimasukkan sebagai IVs, untuk itu, daftar dari variabel bebas yang digunakan disebut sebagai *list of instrumental variables*. Pada titik ini kita harus memastikan bahwa Dm signifikan dalam persamaan (2, 3, 4, dan 5). Setelah memiliki \widehat{PRDF} , \widehat{PG} , \widehat{PU} , dan \widehat{Tx} , maka kita dapat menggunakannya sebagai IV untuk PRDF, PG, PU, dan Tx dan untuk mengestimasi C_{dom} , kita dapat menggunakan model:

$$C_{dom} = a + b_1 GDP + b_2 \widehat{PRDF} + b_3 \widehat{PG} + b_4 \widehat{PU} + b_5 \widehat{Tx} + b_6 W \dots\dots\dots (6)$$

dengan kata lain, kita dapat mengestimasi TSLS dengan dua tahap, tahap pertama dengan meregres persamaan (2, 3, 4, dan 5), dimana kita akan mendapatkan nilai dari \widehat{PRDF} , \widehat{PG} , \widehat{PU} , dan \widehat{Tx} , dan tahap kedua dengan melakukan regresi OLS pada persamaan (6). Karena kita mengganti nilai PRDF, PG, PU, dan Tx dengan \widehat{PRDF} , \widehat{PG} , \widehat{PU} , dan \widehat{Tx} , maka hasil estimasi dengan menggunakan TSLS secara substansial berbeda dengan hasil estimasi OLS.

Analisis determinasi konsumsi dilakukan dengan menggunakan data Indonesia tahun 1970 sampai tahun 2013, yang didapat dari Nota Keuangan dan APBN Indonesia, *World Bank*, Seki Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pertama yang digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan masa kebijakan berpengaruh terhadap komponen kebijakan defisit anggaran adalah metode TSLS tahap pertama, metode ini digunakan untuk mengestimasi model yang memiliki variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, hasil estimasi terdapat pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil estimasi TSLS tahap I

VD \ Estimasi	β_1 d(Loggd p)	β_2 d(PRDF)	β_2 d(PG)	β_3 d(PU)	β_4 d(Tx)	β_5 d(LogW)	β_7 d(Dm)
d(\widehat{PRDF})	55.37 (0,99)	-	-4.13 (0,59)	0,2 (0,84)	2,11 (0,96)	824,2 (0,78)	-13,1 (0,9)
d(\widehat{PG})	101,25 (0,71)	-0,004 (0,59)	-	0,04 (0,1)**	-2,5 (0,06)	-50,4 (0,06)**	2,39 (0,8)
d(\widehat{PU})	4658,8 (0,01)*	0,01 (0,84)	2,84 (0,1)**	-	27,7 (0,00)*	-919,5 (0,2)	-56,3 (0,5) 5
d(\widehat{Tx})	-71,2 (0,1)**	6,9 (0,9)	-0,07 (0,06)**	0,01 (0,00) *	-	32,18 (0,05)*	0,09 (0,9)

Keterangan

() probabilitas

* Signifikan pada $\alpha=5\%$, ** Signifikan pada $\alpha=10\%$

Hasil estimasi TSLS tahap pertama menunjukkan bahwa pertumbuhan defisit anggaran negatif tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel *dummy*, dengan nilai koefisien -13,1, artinya setelah terjadi krisis defisit anggaran sedikit lebih kecil dari pada sebelum terjadi krisis, tetapi nilai tersebut tidak signifikan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh perbedaan masa terhadap defisit anggaran. Hasil estimasi pertumbuhan pengeluaran pemerintah Positif tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel *dummy*, dengan nilai koefisien 2,39, artinya pengeluaran pemerintah setelah krisis ekonomi 1997/1998 lebih besar dari pada sebelum terjadinya krisis, pengeluaran pemerintah yang lebih besar tersebut digunakan untuk memulihkan perekonomian pasca krisis, tetapi nilai tersebut tidak signifikan, karena kenaikan pengeluaran pemerintah tidak terlalu besar. Variable pertumbuhan utang pemerintah menunjukkan bahwa variabel *dummy* negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan utang, dengan nilai koefisien -56,3 persen, yang berarti pertumbuhan utang setelah krisis ekonomi lebih kecil dari pada sebelum krisis ekonomi, hal ini terjadi karena setelah pemerintahan Soeharto, pemerintah berusaha menekan utang luar negeri. tetapi besaran pengurangan utang tidak terjadi secara signifikan, karena pemerintah Soeharto meninggalkan utang yang sangat besar.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh hasil estimasi pajak, yang menunjukkan bahwa variabel *dummy* positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, yang berarti penerimaan pajak setelah krisis ekonomi meningkat, hal ini terjadi karena keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi peningkatan pajak tidak terjadi secara signifikan. Hasil estimasi pengaruh variabel *dummy* terhadap variabel komponen defisit fiskal tidak signifikan, hal ini berarti variabel *dummy* tidak dapat menjadi penjelas variabel pertumbuhan defisit anggaran, pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan utang pemerintah, dan penerimaan pajak.

Tahap estimasi selanjutnya yaitu melakukan TSLS tahap kedua, pada tahap ini estimasi dilakukan pada model fungsi konsumsi, dengan memasukkan hasil estimasi TSLS tahap pertama kedalam variabel *independent*. Hasil estimasi TSLS tahap kedua seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil estimasi OLS TSLS tahap II

Variabel	Metode	
	OLS	TSLS
$\beta_1 d(\text{Loggdp})$	1,05 (0,00)*	0,88 (0,00)*
$\beta_2 d(\text{PRDF})$	4,47 (0,41)	2,14 (0,5)**
$\beta_3 d(\text{PG})$	-3,48 (0,83)	0,0005 (0,1)**
$\beta_4 d(\text{PU})$	3,41 (0,1)**	2,42 (0,37)

$\beta_5d(Tx)$	-0,0009 (0,31)	9,94 (0,22)
$\beta_6d(LogW)$	-0,22 (0,00)*	-0,19 (0,03)*
Adjusted R ²	0,81	0,82

Keterangan:

PRDF, PG, PU, Tx pada model TSLS adalah $\widehat{PRDF} \widehat{PG} \widehat{PU} \widehat{Tx}$

() probabilitas

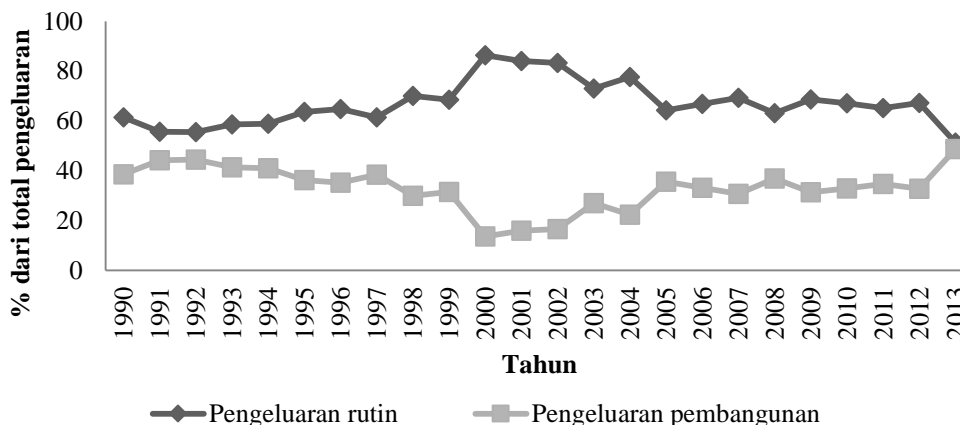
* Signifikan pada $\alpha=5\%$, ** Signifikan pada $\alpha=10\%$

dimana:

- Cdom = Konsumsi domestic
- GDP = *Gross Domestic Product*
- PRDF = Pertumbuhan Defisit anggaran
- PG = Pertumbuhan Pengeluaran pemerintah
- PU = Pertumbuhan Utang
- Tx = Pajak
- W = Tabungan nasional

Hasil Estimasi TSLS tahap kedua dan OLS menunjukkan bahwa perubahan pendapatan positif signifikan mempengaruhi perubahan konsumsi domestik, artinya setiap terjadi perubahan pendapatan sebesar 1 triliun, akan meningkatkan perubahan konsumsi domestik, hasil estimasi tersebut sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan konsumsi, dalam hal ini kenaikan pendapatan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan konsumsi. Variabel pertumbuhan defisit anggaran positif tidak signifikan terhadap konsumsi domestik, artinya defisit anggaran tidak dapat menstimulus konsumsi domestik, meskipun pertumbuhan defisit dapat meningkatkan perubahan konsumsi domestik, pertumbuhan defisit positif mempengaruhi konsumsi domestik karena defisit anggaran meningkatkan konsumsi pemerintah, tetapi tidak dapat meningkatkan konsumsi swasta.

Variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah dengan TSLS adalah positif tidak signifikan mempengaruhi perubahan konsumsi domestik, sedangkan estimasi dengan OLS negatif tidak signifikan, untuk menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi domestik menggunakan hasil estimasi dari OLS. Penggunaan TSLS tidak disarankan karena hasil estimasi *instrument variable* pada estimasi TSLS tahap pertama tidak signifikan mempengaruhi komponen kebijakan defisit fiskal. Pengeluaran pemerintah tidak signifikan mempengaruhi konsumsi domestik karena sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan ke dalam pengeluaran rutin, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

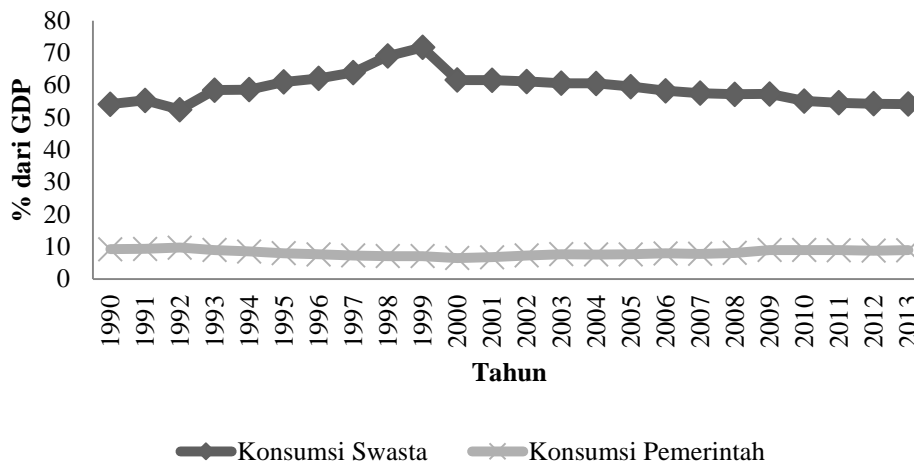


Sumber: Nota Keuangan dan APBN Indonesia, (diolah).

Gambar 2
Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah (%)

Pengalokasian pengeluaran pemerintah kedalam pengeluaran rutin tidak dapat meningkatkan konsumsi swasta, karena pengeluaran pemerintah yang dialokasikan kedalam pengeluaran rutin akan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.

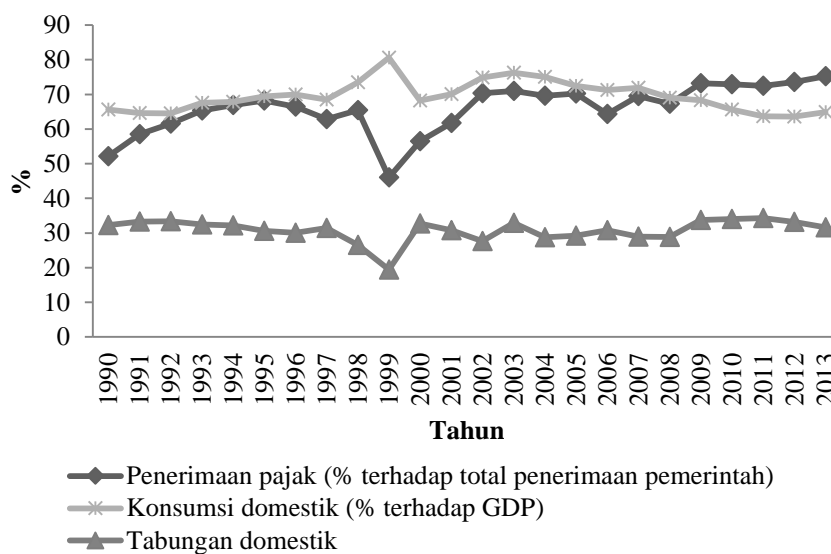
Hasil estimasi variabel pertumbuhan utang positif tidak signifikan, artinya ketika terjadi kenaikan pertumbuhan utang konsumsi domestik meningkat, tetapi pertumbuhan utang tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan konsumsi domestik, hal ini terjadi karena utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat, pengeluaran pemerintah lebih didominasi oleh pengeluaran rutin, sehingga peningkatan utang yang meningkatkan pengeluaran pemerintah tidak dapat meningkatkan konsumsi swasta, dengan demikian utang pemerintah hanya meningkatkan konsumsi pemerintah, tetapi tidak meningkatkan konsumsi swasta, secara keseluruhan konsumsi domestik tidak mengalami peningkatan, karena konsumsi domestik lebih didominasi oleh konsumsi swasta, seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Sumber: Nota Keuangan dan APBN Indonesia, diolah.

Gambar 3
Pengeluaran Konsumsi Swasta Dan Pemerintah (%)

Variabel penerimaan pajak negatif tidak signifikan, artinya penerimaan pajak pemerintah berpengaruh negatif terhadap perubahan konsumsi, penerimaan pajak yang semakin tinggi menggambarkan beban pajak yang semakin besar, beban pajak yang semakin besar menurunkan pendapatan *disposable*, menurunnya pendapatan dapat menurunkan konsumsi, tetapi penerimaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan karena konsumen menggunakan simpanannya untuk memenuhi konsumsinya, yang pada periode sebelumnya, pemotongan pajak tidak digunakan untuk meningkatkan konsumsi, tetapi digunakan untuk meningkatkan tabungan, seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Sumber: Nota Keuangan dan APBN dan *World Bank*, diolah

Gambar 4
Konsumsi Domestik dan Penerimaan Pajak

Hasil estimasi variabel perubahan simpanan domestik negatif signifikan terhadap perubahan konsumsi domestik, hasil estimasi tersebut dapat dilogikakan bahwa pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan *saving* akan mengurangi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, sehingga meningkatnya tabungan dapat menurunkan konsumsi.

KESIMPULAN

1. Perbedaan masa sebelum dan setelah krisis ekonomi 1997/1998 signifikan mempengaruhi komponen kebijakan defisit fiskal, yang terdiri dari pertumbuhan defisit anggaran, pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan utang pemerintah dan penerimaan pajak.
2. Perubahan GDP sebagai proksi dari perubahan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan konsumsi domestik, yang berarti kenaikan pendapatan dapat meningkatkan konsumsi domestik, sedangkan perubahan tabungan domestik berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan konsumsi, hal ini wajar terjadi, karena pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan *saving* secara otomatis menurunkan konsumsi. komponen kebijakan defisit fiskal tidak signifikan mempengaruhi konsumsi domestik, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui defisit fiskal tidak dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi.
3. Efek netral dari kebijakan defisit fiskal terhadap konsumsi menggambarkan terjadinya *Ricardian equivalence* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A. 2007. *Essays on Ricardian Equivalence: are Indonesian Consumers Ricardian?*.Atlanta: Georgia State University.
- Barro, R. J. 1989. *The Ricardian Approach to Budget Deficits*.*The Journal of Economic Perspectives*, 3 (2): 37-54.
- Cardia, E. 1997. *Replicating Ricardian Equivalence Test With Simulated Series*. *The American Economic Review*, 87 (1): 65-79.
- Easterely, W., & Hebbel, K. S. 1993. *Fiscal Deficit and Macroeconomic Performance in Developing Countries*. *The World Bank Research Observer*, 8 (2): 211-237.
- Giorgioni, G., Holden, K. 2003. *Does Ricardian Equivalence Proposition Hold in Less Developed Countries?*. *International Review of Applied Economics*, 17 (2): 209-221.
- Greene, W. H.2012. *Econometric Analysis, 7th edition*. Boston: Person Education, Inc. Prentice Hall Publishing
- Gruber, N. 2013. *The Role of Social Expenditures in Budget Consolidation – An Analisis of The Fiscal and Macroeconomic Effects*. Austria: Vienna University.

- Hatzinikolaou, D. 2013. *A Simple Approach to Testing the Potency of Government Purchases to Stimulate Agregate Demand. Journal of Reviews on Global Economics*, 2: 177-122.
- Heijdra, B, J., Dalen, H, P. 1996. *Is The Dutch Consumer a True Ricardian. De Economist*, 144 (4): 591-615.
- Kooij, A. Tanpa tahun. *Ricardian Equivalence in the 21st Century*. Belgium: *Erasmus School of Economic*.
- Mohabbat, K, A., Ashraf, M. 2003. *Ricardian Equivalence: Evidence from South American Countries, International Business and Economic Research Journal*, 2 (10): 73-79.
- Pozzi, L., et al. 2004. *Government Debt and The Excess Sensitivity of Private Consumption to Current Income: an Empirical Analysis for OECD Countries. Economic Inquiry*, 42 (4): 618-633.
- Reitschuler, G., & Cuaresma, J, C. 2004. *Ricardian Equivalence Revisited: Evidence from OECD countries, Economic Bulletin*, 5 (16): 1-10
- Rockerbie, D, W. 2010. *Are Consumers Ricardian When Some Are Liquidity Constrain? Evidence for The United States. Applied Economics*, 26 (6): 821-827.
- Sachsida, A., et.al. 2010. *Ricardian Equivalence and Lucas Critique: An Alternative Test of Ricardian Equivalence Using Super Exogeneity Test in Simulated Series. Brasilia: Revista EconomiA*, 11 (4): 15-26.
- Saeed, S., Khan, M, A. 2012. *Ricardian Hpothesis and Budgetary Deficits: The Case of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Conemporary In Business*, 3 (9): 1432-1446.
- Seater J. J. 1993. *Ricardian Equivalence. Journal of Economic Literature*, 31 (1): 142-190
- Waqas, M., & Awan, M. S. 2011. *Are Pakistani Consumers Ricardian?. Economic and Business Review*, 13 (3): 161-177.
- Woolridge. J. M. 2002. *Introduction Econometric: Modern Approach 2nd Edition*. SouthWestern: MIT Press.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN IN-KIND DAN CASH TRANSFER TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Albertus Girik Allo
Universitas Papua

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM Yogyakarta)

e-mail: albertusgirikallo@yahoo.co.id

ABSTRACT

The debate on the safety net program which is more appropriate in alleviating poverty, whether in-kind or cash transfers. This study attempts to answer this question using data IFLS 3 and IFLS 4, the estimation method used is the difference-in-difference combined with a fixed effect. The analysis showed that the in-kind transfer program (Raskin) is more effective in reducing poverty than the cash transfer program (BLT program). However, the results of the interaction of both programs have a negative impact on the level of poverty.

Keywords: in-kind transfer, cash transfer, poverty, difference –in-difference

ABSTRAK

Perdebatan mengenai program perlindungan sosial mana yang lebih tepat dalam mengentaskan kemiskinan, apakah in-kind atau cash transfer. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan data IFLS 3 dan IFLS 4, dengan metode estimasi yang digunakan adalah difference-in-difference yang dikombinasikan dengan fixed effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa program in-kind transfer (Program Raskin) lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan program cash transfer (Program BLT). Namun, hasil interaksi kedua program memberikan dampak yang negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: in-kind transfer, cash transfer, kemiskinan, difference –in-difference

PENDAHULUAN

In-kind dan cash transfer merupakan dua kelompok program penanggulangan kemiskinan (anti-poverty) yang dilakukan di berbagai negara, baik pada negara miskin, berkembang, maupun negara maju. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa program in-kind transfer memiliki keuntungan, yaitu: mendorong konsumsi (Besley, 1988); sebagai daya tarik bagi penerima program untuk tetap berada dalam program (Bearse et al, 2000;

Blomquist *et al*, 2010); penurunan harga pada tingkat lokal (Cunha *et al*, 2011); lebih layak secara politik (Epple and Romano, 1996). Sedangkan, program *cash transfer* memberikan keuntungan berupa: efektivitas biaya (Currie and Gahvari, 2008; Grosh *et al*, 2008); stabilisasi pendapatan rumahtangga dan meningkatkan tingkat kesehatan serta partisipasi sekolah anak (Duflo, 2003; ILO, 2013).

Program *in-kind* di negara maju tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan program *cash*. Sedangkan, di negara berkembang, dampak dari program *cash transfer* lebih baik dibandingkan dengan program *in-kind transfer* (Devereux, 2006). Hal ini disebabkan karena program *in-kind transfer* pada negara-negara berkembang memiliki biaya yang tinggi dibandingkan dengan negara maju (Hidrobo *et al*, 2012). Namun, *in-kind transfer* dapat menurunkan harga pada tingkat lokal terutama wilayah yang terisolir, sehingga akan menguntungkan konsumen (Cunha *et al*, 2011).

Program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu: *in-kind* dan *cash transfer*. Pemberian *in-kind transfer* dalam bentuk beras mulai dilaksanakan pada tahun 1998 dengan program OPK (Operasi Pasar Khusus) yang kemudian berubah nama menjadi program Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin) pada tahun 2002. Pada awalnya, program ini bertujuan sebagai program darurat pada saat terjadi krisis, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program ini kemudian menjadi program perlindungan sosial untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin agar memperoleh cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Selain program *in-kind transfer*, pemerintah Indonesia juga memberikan program *cash transfer* yang terdiri dari dua jenis, yaitu: *conditional cash transfer* (program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Siswa Miskin/BSM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *unconditional cash transfer* (program Bantuan Langsung Tunai/BLT). Program BLT merupakan respon pemerintah atas kenaikan harga minyak dunia dan pemotongan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) pada tahun 2004. Dampak dari pemotongan subsidi adalah kenaikan harga BBM dalam negeri, kondisi ini memicu kenaikan harga bahan pokok di pasar domestik. Tujuan dari pemberian BLT adalah agar keluarga miskin (jumlah target keluarga yang memperoleh BLT dari Oktober

2005-Desember 2006 sebanyak 19,2 juta keluarga miskin) tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Efektivitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan pada indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) menunjukkan hasil yang relatif masih rendah (Hastuti *et al*, 2007; Hastuti *et al*, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak RTS-PM yang belum menerima program karena alasan tidak mampu membeli dan sistem pembagian yang tidak sesuai dengan sasaran dari program (sistem bagi rata). Untuk aspek tepat jumlah, menunjukkan bahwa jumlah beras Raskin yang diterima oleh RTS-PM lebih kecil dari ketentuan. Aspek harga memperlihatkan bahwa RTS-PM membayar beras Raskin lebih tinggi dari ketentuan karena ada tambahan biaya transportasi dari titik distribusi dan biaya pembagian yang dibebankan ke RTS-PM. Sedangkan untuk aspek ketepatan waktu dalam distribusi menunjukkan bahwa frekuensi penerimaan Raskin oleh RTS-PM berkisar antara 1-10 kali per tahun. Kualitas dari beras Raskin masih rendah di beberapa daerah distribusi. Terakhir, terkait dengan sistem administrasi, menunjukkan bahwa sistem pengawasan hanya sampai pada titik distribusi dan tidak sampai pada titik pembagian ke RTS-PM.

Rosfadhila *et al* (2011) melakukan evaluasi terhadap program BLT dengan aspek yang diteliti, yaitu: kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan BLT memiliki kelemahan dalam koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar tingkat. Selain itu, berbagai lembaga non pemerintah mendorong agar program ini diganti dengan program pemberdayaan masyarakat. Program BLT dapat mendorong konflik yang terjadi dalam masyarakat karena kurangnya penekanan terhadap beberapa aspek (apa itu BLT, latar belakang, dan tujuan pemberian BLT, serta kriteria penerima BLT) pada waktu melakukan sosialisasi. Sedangkan untuk verifikasi dan ketepatan sasaran menunjukkan bahwa program ini masih belum masih terdapat rumah tangga tidak miskin yang memperoleh program. Penyaluran dana program BLT masih memiliki persolan terkait dengan lokasi penerima sasaran, dimana semakin jauh lokasi desa maka semakin lama dana diterima oleh rumah tangga sasaran. Pengaduan dari masyarakat terkait program BLT

belum tertangani dengan baik karena tidak terdapatnya unit khusus penanggulangan aduan masyarakat pada tingkat desa. Untuk aspek tingkat kepuasan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan elite pada tingkat desa/kelurahan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang di atasnya terkait dengan pembagian kartu. Sedangkan untuk level rumah tangga sasaran menunjukkan bahwa dana yang mereka terima cukup membantu meringankan ekonomi rumah tangga.

Secara umum, program Raskin (*in-kind transfer*) dan program BLT (*cash transfer*) merupakan bentuk dari kebijakan penanggulangan kemiskinan (*anti-poverty*). Pertanyaan yang muncul adalah program mana yang lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan. Rosfadhila *et al* (2011) menunjukkan bahwa program BLT merupakan program yang lebih baik dibandingkan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang ada di Indonesia berdasarkan pada persepsi masyarakat. Namun, rumah tangga penerima program BLT memiliki kecenderungan penurunan pertumbuhan pengeluaran per kapita, peningkatan dalam pemanfaatan jasa layanan kesehatan, tingginya tingkat putus sekolah, dan berkurangnya penawaran tenaga kerja dalam keluarga penerima program (Bazzi *et al*, 2012). World Bank (2012a) mengemukakan bahwa dana BLT yang diterima oleh masyarakat miskin sekitar 15 persen dari total pengeluaran perbulan mereka pada tahun 2005 dan 12 persen pada tahun 2008. Pada sisi yang lain, program Raskin merupakan program yang sangat berguna bagi wilayah yang rawan pangan dimana pasar regular tidak dapat diandalkan untuk pasokan yang konsisten. Harga pangan yang tinggi (beras) akan cenderung meningkatkan rumah tangga miskin, sehingga program Raskin yang memiliki harga lebih murah dibandingkan harga pasar/kios akan membantu rumah tangga untuk tidak jatuh dalam kemiskinan (World Bank, 2012b).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pemberian *in-kind transfer* (Program Raskin) dan *cash-transfer* (Program BLT) terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang 3 (tahun 2000) dan gelombang 4 (tahun 2007). Pada kedua gelombang tersebut terdapat program Raskin, dimana pada tahun 2000 bernama Program Operasi Pasar Khusus (OPK) dan pada tahun 2007 disebut sebagai Program Raskin. Sedangkan untuk

Program BLT hanya terdapat pada tahun 2007, karena pelaksanaan program baru dilakukan pada tahun 2005.

PERKEMBANGAN PROGRAM RASKIN DAN BLT

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan awal dimulainya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia karena pada saat itu hampir seperempat penduduknya (23.43 persen) berada dalam kategori miskin. Pelaksanaan program kemiskinan pada periode 1999-2009 masih bersifat sektoral, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara optimal. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tonggak sejarah bagi program penanggungan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menyebabkan dibentuknya lembaga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini dibagi dalam 3 (tiga) klaster, yaitu: (1) klaster I terkait dengan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

(2) klaster II terkait dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (3) klaster III terkait dengan program kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program pada Klaster I bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program yang termasuk dalam Klaster I, antara lain: Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program pada Klaster II bertujuan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Program yang termasuk dalam kelompok ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan program pada Klaster III bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam klaster ini. Program Raskin merupakan program yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada saat menghadapi krisis keuangan di Asia pada tahun akhir tahun 1990. Program ini pada

awalnya bernama Program Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan komoditi utama adalah beras. Program ini merupakan program subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia (petama kali dilakukan pada bulan July 1998) untuk mencegah penurunan konsumsi energi dan protein rumah tangga karena dampak krisis keuangan Asia. Program ini berubah nama menjadi Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) pada tahun 2002, dimana program ini bukan lagi sebagai program darurat melainkan program perlindungan sosial. Pada awal program, setiap Rumah Tangga Miskin (RTM) menerima 10 kg dan kemudian berkembang menjadi 20 kg, dan pada tahun 2014 menjadi 15 kg per bulan. Frekuensi penyaluran juga bervariasi mulai dari 10 kali menjadi 12 kali per tahun.

Distribusi Raskin mencapai 100 persen kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan 50.000 titik distribusi dengan pelaksana program adalah Perum BULOG. Penyaluran Raskin diawali dari permintaan alokasi dari pemerintah kabupaten/kota (penetapan RTS berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan), kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal penyaluran dan pengiriman beras ke titik distribusi. Setelah itu, dari titik distribusi akan diberikan ke masyarakat langsung yang ada disekitar atau di distribusikan ke titik bagi yang lokasinya di RT/RW yang telah disepakati. Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memperoleh atau menggunakan program OPK/Raskin baik yang diterima secara gratis dan yang membayar lebih rendah dari harga pasar pada tahun 2000 sebanyak

3.291 rumah tangga (34.03 persen). Pada tahun 2007, jumlah RTS yang menerima program Raskin mengalami peningkatan sebanyak 4,693 rumah tangga (42.66 persen).

Program BLT merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005 sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia yang dimulai sejak tahun 2004 yang menyebabkan besarnya *share* subsidi BBM terhadap total pengeluaran naik dari 13 persen pada tahun 2002-2003 menjadi 29 persen di tahun 2005. World Bank (2012a) memperlihatkan bahwa antara tahun 1998 hingga 2005, jumlah subsidi BBM berkisar 75 persen dari total subsidi dan transfer yang diberikan kepada masyarakat. Namun, peruntukan subsidi tersebut tidak tepat sasaran karena sebagian besar penerima program subsidi tersebut adalah mereka yang berada pada kelompok menengah dan atas. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM sebesar 150

hingga 185 persen dari harga semula. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan tersebut maka pemerintah memberikan Program Bantuan Langsung Tunai bagi rumah tangga sasaran. BPS (2008) mengungkapkan bahwa RTS adalah rumah tangga sangat miskin dan miskin yang didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga buka dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*) yang terdiri dari 14 (empat belas) variabel. Sehingga diperoleh jumlah RTS pada tahun 2005 sebanyak 19.1 juta rumah tangga. Selain itu, mereka yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga menerima program BLT.

Program BLT diberikan kepada RTS melalui PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak Rp. 300.000 per 3 (tiga) bulan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS. Pemberian dana BLT didasarkan pada Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang diwakili oleh kepala keluarga, dimana KKB berisikan 2 (dua) kupon yang dapat ditukarkan saat pengambilan dana. Data IFLS tahun 2007 menunjukkan bahwa rumah tangga penerima program BLT sebanyak 2.325 rumah tangga (21.14 persen).

Tabel 1. Distribusi Program Raskin dan BLT berdasarkan Wilayah berdasarkan hasil IFLS 2000 dan 2007

Program	2000		2007	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Sebaran populasi (%)	52.49	47.51	57.54	42.46
Beras untuk Masyarakat Miskin/Raskin (% RTS)	40.47	59.53	43.62	56.38
Bantuan Langsung Tunai/BLT (% RTS)	-	-	41.78	58.22

Sumber: IFLS 3 dan IFLS 4.

DATA DAN METODE ESTIMASI

Data

Evaluasi terhadap Program Raskin (*in-kind transfer*) dan Program BLT (*cash transfer*) terkait dengan efektivitas program dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan data tahun 2000 dan 2007 yang diperoleh dari IFLS, yang dapat menangkap perubahan sebelum dan sesudah adanya program serta yang menerima dan tidak menerima program. IFLS sering juga disebut dengan Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) yang berisikan data mikro rumah tangga yang bersifat *longitudinal*.

Strauss *et al* (2009) mengungkapkan bahwa IFLS pertama (IFLS-1) yang dilakukan pada tahun 1993 mencakup responden sebanyak 7.244 rumah tangga, yang kemudian dilakukan survey lagi pada tahun 1997 yang dikenal sebagai IFLS-2 dengan sampel yang sama. Kemudian survey IFLS dilakukan lagi pada tahun 2000 dengan sampel yang sama pada tahun sebelumnya (IFLS-3), dan survey terakhir IFLS dilakukan pada tahun 2007 (IFLS-4) dengan jumlah rumah tangga sebanyak 12.977.

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga penerima program Raskin dan BLT maupun yang tidak menerima. Kriteria rumah tangga yang masuk dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang ada pada survey IFLS gelombang 3 dan 4, sehingga dapat diestimasi dampak dari program. Outcome dalam penelitian ini terkait dengan kemiskinan yang dibedakan berdasarkan cara pengukuran kemiskinan. Pertama, *kemiskinan absolut* (Chen dan Ravallion, 2011), merupakan pengkategorian kemiskinan yang menggunakan suatu ambang batas, seperti konsumsi makanan yang minimum harus dipenuhi atau kebutuhan dasar dari seseorang (mis: Indonesia, 2100 kkal/hari). Orang juga dikatakan miskin apabila berada dibawah suatu matrik uang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (mis: Indonesia, US \$ 1 per hari dan sekarang US \$ 1.25 dolar per hari). Kedua, *kemiskinan relative* (Atkinson dan Bourguignon, 2001), merupakan pengkategorian kemiskinan berdasarkan pada kondisi lingkungan tempat tinggalnya, jika berada dibawah rata-rata kebutuhan hidup tempat tinggalnya, maka dia dikatakan miskin. Menggunakan perhitungan 50% dari nilai rata-rata atau nilai tengah dari wilayah tempat tinggalnya. Ketiga, *kemiskinan subjektif* (Niemietz, 2011), merupakan pengkategorian kemiskinan berdasarkan pada pendapat dari orang itu sendiri, apakah dia berpendapat bahwa ia berada dalam kategori miskin atau tidak.

Pada Tabel 2, memberikan informasi bahwa kemiskinan absolut berdasarkan pada PPP untuk US \$ 1 dollar per hari dan US \$ 1.25 dollar per hari akan memberikan hasil yang paling rendah dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan yang lainnya. Sedangkan pengukuran kemiskinan subjektif merupakan pengukuran kemiskinan yang memberikan nilai yang tinggi. Hasil ini sama dengan yang ditemukan oleh Dartanto dan Otsubo (2013), dimana pengukuran kemiskinan secara objektif (absolut dan relative) secara signifikan memiliki hasil yang berbeda dengan pengukuran secara subjektif. Perbedaan tersebut

menunjukkan bahwa tingkat disparitas pendapatan didalam masyarakat sangat tinggi. Selain itu, rendahnya akses terhadap fasilitas publik, seperti: air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat kemiskinan mereka.

Tabel 2
Data Kemiskinan berdasarkan pengukuran kemiskinan absolut, relative, dan subjektif tahun 2000 dan 2007.

Outcome	2000		2007	
	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin
Kemiskinan Absolut				
- US \$ 1 dollar	9,107	564	10,812	216
- US \$ 1.25 dollar	8,717	954	10,631	397
- US \$ 2 dollar	7,086	2,585	9,658	1,370
- BPS	8,105	1,566	9,460	1,568
Kemiskinan Relatif				
- Rata-rata	7,502	2,169	9,051	1,977
- Nilai tengah	8,509	1,162	9,865	1,163
Kemiskinan Subjektif	2,144	7,527	2,598	8,430
Jumlah Observasi	9,671		11,028	

Keterangan: US \$ yang digunakan adalah Purchasing Power Parity (PPP), yang pada tahun 2000

sebesar Rp. 1.509,79 dan tahun 2007 sebesar Rp. 2.554,84. Kategori BPS menggunakan garis kemiskinan pada tiap provinsi, dimana dalam IFLS terdapat 13 provinsi survey dan tambahan beberapa provinsi akibat pemekaran pada IFLS (4). N=20,699 untuk gabungan data tahun 2000 dan 2007.

Dinamika perubahan masyarakat miskin keluar dari kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk melihat hal tersebut, maka data tahun 2000 akan dipanelkan dengan tahun 2007, sehingga dapat diketahui dinamika perubahan masyarakat miskin. Hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa probability orang menjadi miskin (tahun 2000 tidak miskin) berdasarkan pengukuran objektif (absolut dan relative) sangat kecil, berkisar antara 2.21 persen hingga 17.50 persen. Sedangkan probability orang menjadi tidak miskin (tahun 2000 miskin) berdasarkan pada pengukuran objektif lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tetapi miskin. Namun, hal ini berbeda dengan pengukuran subjektif, dimana probabilitas persepsi rumah tangga menjadi miskin (tahun 2000 tidak miskin) lebih besar. Hal yang

sama untuk kondisi dimana

pada tahun 2000 rumah tangga tersebut berada dalam kategori miskin, dimana persepsi mereka terhadap kategori keluarga mereka yang berada dalam kemiskinan lebih besar dari mereka yang menganggap bawah mereka dapat keluar dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian besar masyarakat yang secara ekonomi dapat dikatakan tidak berada dalam kondisi miskin tetapi tidak secara psikologi. Kondisi lingkungan tempat tinggal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi psikologi rumah tangga.

Tabel 3
Dinamika Perubahan Penduduk Tahun 2000 dan 2007

Outcome	Tahun 2000 Tidak Miskin (%)		Tahun 2000 Miskin (%)	
	Tetap Tidak Miskin	Menjadi Miskin	Menjadi Tidak Miskin	Tetap Miskin
Kemiskinan Absolut				
- US \$ 1 dollar	97.79	2.21	93.06	6.94
- US \$ 1.25 dollar	95.97	4.03	89.12	10.88
- US \$ 2 dollar	87.91	12.09	76.20	23.80
- BPS	84.17	15.83	76.52	23.48
Kemiskinan Relatif				
- Rata-rata	82.50	17.50	78.90	21.10
- Nilai tengah	89.58	10.42	87.25	12.75
Kemiskinan Subjektif	40.52	59.48	18.48	81.52

Keterangan: N=7,228 (keluarga yang sama disurvei pada tahun 2000 dan 2007).

Dinamika perubahan penduduk sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini akan menyebabkan output yang dihasilkan suatu analisis akan menjadi bias. Untuk mengatasinya maka karakteristik lingkungan harus dikontrol dengan *fixed effect* dalam analisis. Artinya, perbedaan karakteristik lingkungan tempat tinggal yang menyebabkan dinamika penduduk (miskin dan tidak miskin) adalah tetap. Sehingga perubahan dinamika penduduk hanya disebabkan oleh adanya intervensi program Raskin dan BLT yang diberikan oleh pemerintah.

Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dimotivasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Skoufias dan Gonzalez-Cassio (2008) serta Cunha *et al* (2011) yang

melihat

dampak dari program *anti-poverty* (*in-kind* dan *cash transfer*) terhadap konsumsi, penawaran tenaga kerja dan harga yang dilakukan oleh pemerintah Mexico. Penelitian ini menggunakan outcome penurunan kemiskinan yang diukur berdasarkan pada tiga jenis pengukuran, yaitu: absolute poverty, relative poverty, dan subjective poverty. Rumah tangga diasumsikan akan memaksimalkan utilitas yang dimilikinya dengan adanya tambahan pendapatan yang bersumber dari *in-kind* (Program Raskin) dan/atau *cash transfer* (Program BLT). Hal ini akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Program Raskin dan Program BLT merupakan program yang tidak dirancang secara *randomize* sehingga tidak dapat membandingkan secara langsung antara kelompok penerima manfaat (*treatment*) dengan kelompok yang tidak menerima (*control*). Untuk mengatasi masalah tersebut maka digunakan model *difference in difference* dalam mengestimasi dampak program terhadap outcome (kemiskinan).

Dimana, adalah variabel yang menggambarkan kemiskinan dari rumah tangga i pada tahun t . Outcome kemiskinan diukur berdasarkan absolute poverty (US \$ 1 dollar per hari, US \$ 1.25 dollar per hari, dan US \$ 2 dollar per hari), relative poverty (50% dibawah *mean* dan 50% dibawah *median*), serta subjective poverty (persepsi dari rumah tangga i terhadap status kemiskinannya). Variabel adalah dummy variable, yaitu: 1=untuk rumah tangga i yang menerima program Raskin pada tahun t , dan 0=untuk lainnya. Variabel adalah dummy variable, yaitu: 1=untuk rumah tangga i yang menerima program BLT pada tahun t , dan 0=untuk lainnya. Sedangkan variabel merupakan dummy variable, dimana 1=untuk tahun 2007 dan 0=untuk tahun 2000. Variabel merupakan kumpulan dari variabel karakteristik rumah tangga (umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, angkatan kerja dalam keluarga, pekerja dalam keluarga, dan anak umur < 5 tahun) dan karakteristik komunitas (status wilayah dan jarak desa ke pasar terdekat). Sedangkan adalah *error term* untuk rumah tangga ke- i pada tahun t .

Interaksi antara variabel Raskin dan Tahun akan menghasilkan parameter () yang menunjukkan besarnya dampak dari program Raskin terhadap kelompok *treatment* (rumah tangga miskin). Sedangkan dampak dari program BLT dapat dilihat dari parameter , tanpa harus ada interaksi dengan variabel tahun. Hal ini disebabkan, program BLT baru dilaksanakan pada tahun 2005, sehingga pada tahun dasar (tahun 2000) program tersebut tidak ada. Sehingga, hasil interaksi antara variabel BLT dengan tahun akan menghasilkan variabel yang berkolerasi secara sempurna.

Program Raskin dan BLT merupakan program jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa ada persyaratan khusus dan dirancang non-randomize. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan satu rumah tangga memperoleh dua program pada waktu yang sama. Dengan demikian, akan terjadi potensi bias dari program terhadap outcome yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ditambah satu variabel interaksi antara variabel Raskin dan BLT.

Parameter pada persamaan (2) mengukur besarnya perubahan rumah tangga penerima manfaat kedua program yang berada pada kelompok *treatment* relatif terhadap rumah tangga yang berada pada kelompok kontrol. Dengan demikian, potensi bias pada persamaan (1) yang diakibatkan adanya rumah tangga yang menerima kedua program dapat diatasi dengan menginteraksikan kedua variabel program. Namun, masih terdapat potensi bias lainnya, dimana ada kemungkinan beberapa karakteristik rumah tangga dan komunitas yang tidak dapat diobservasi (*unobserved*) dan bersifat *time invariant* yang akan mempengaruhi *outcome*. Selain itu, pilihan rumah tangga untuk mengikuti program Raskin dan/atau BLT akan menyebabkan adanya masalah *endogeneity*. Untuk mengatasi masalah ini, maka akan digunakan metode *fixed effects* pada tingkat rumah tangga.

Dimana, merupakan koefisien yang menangkap adanya heterogenitas pada level rumah tangga yang berbeda antar rumah tangga namun bersifat tetap antar waktu. Dengan demikian, hasil estimasi dampak dari program terhadap outcome menjadi tidak bias.

Tabel 4
Deskripsi statis

	<u>Mean 2000</u> (Std.dev.)	<u>Mean 2007</u> (Std.dev.)
<i>Rumah tangga</i>		
Umur	45.46 (16.01)	45.23 (16.12)
Jenis Kelamin	0.84 (0.37)	0.85 (0.36)
Status Perkawinan	0.94 (0.24)	0.93 (0.25)
Pendidikan Kepala Keluarga	1.61 (1.22)	1.85 (1.22)
Status Pekerjaan Kepala Keluarga	0.84 (0.36)	0.85 (0.36)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	4.33 (2.05)	4.07 (1.89)
Angkatan Kerja dalam Keluarga	3.23 (1.96)	3.33 (2.09)
Pekerja dalam Keluarga	3.23 (1.96)	2.55 (1.75)
Anak umur < 5 tahun	0.54 (0.71)	0.49 (0.66)
Ln pengeluaran per kapita per bulan (Rp.)	11.91 (0.81)	12.77 (0.76)
<i>Komunitas</i>		
Status Tempat Tinggal	0.52 (0.50)	0.58 (0.49)
Jarak Tempat Tinggal ke Pasar Terdekat (km)	2.89 (2.41)	3.51 (3.69)
Jumlah Observasi	9,671	11,028

Keterangan: N=20,699 untuk gabungan data tahun 2000 dan 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Raskin merupakan suatu program *in-kind transfer* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan) mereka dalam kondisi krisis ekonomi (terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan). Dalam jangka panjang, program ini tidak hanya sebagai program perlindungan pada saat terjadi krisis tetapi menjadi program jaring pengaman sosial (*safety net program*). Dengan demikian, tujuan dari program ini menjadi luas dan termasuk salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program Raskin didesain tidak randomize dan tidak adanya counterfactual dengan karakteristik yang idektik antara kelompok yang menerima program dan yang tidak menerima program, maka strategi estiamsi yang digunakan adalah *difference-in-difference* yang kemudian digabungkan dengan fixed effect pada level rumah tangga, sebagai berikut:

Dimana, merupakan parameter yang dapat menjelaskan dampak program Raskin terhadap kelompok treatment. Dimana kelompok treatment dalam tulisan ini adalah rumah tangga yang berada kategori miskin berdasarkan berbagai pengukuran.

Hasil estimasi pada persamaan (4) dapat dilihat pada Tabel 5 pada kolom 2 (DID) dan kolom 3 (FE pada tingkat rumah tangga). Berdasarkan 7 (tujuh) kriteria pengukuran kemiskinan diperoleh baha 6 (enam) jenis pengukuran menunjukkan bahwa program Raskin dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, nilai DID berkisar antara -0.003 point hingga -0.057 point. Pengukuran kemiskinan relative (*median*) dan kemiskinan absolut (US \$ 1 dollar perhari, US \$ 1.25 dollar perhari, US \$ 2 dollar perhari) secara statistik signifikan, tetapi untuk pengukuran kemiskinan relative (*mean*) dan pengukuran absolut (BPS) secara statistik tidak signifikan. Sedangkan pengukuran yang menggunakan pengukuran subjektif (berdasarkan pada persepsi rumah tangga itu sendiri dengan melihat kondisi lingkungan tempat tinggalnya) menunjukkan bahwa program Raskin menyebabkan masyarakat “terjerat” dalam kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang positif (0.114) dan secara statistik signifikan. *Fixed effect* pada level rumah tangga

yang digunakan dalam model menyebabkan nilai estimasi menjadi *robustness*. Hasil analisis menunjukkan arah hubungan antara program Raskin dan kemiskinan yaitu negative pada pengukuran kemiskinan relative dan absolut (signifikan untuk pengukuran: US \$ 1 dollar sehari, US \$ 1.25 dollar sehari, US \$ 2 dollar sehari) sedangkan pada pengukuran subjektif bernilai positif (signifikan).

Tabel 5
Perbandingan Dampak antara Program Raskin dan BLT terhadap berbagai Pengukuran Kemiskinan

Outcome	Raskin		BLT	
	DID	FE (HH)	FD	FE (HH)
Kemiskinan Relatif				
- Rata-rata	-.017 (-1.43)	-.002 (-0.18)	.008 (0.66)	.033*** (2.66)
- Nilai tengah	-.022** (-2.25)	-.007 (-0.68)	.005 (0.47)	.025** (2.36)
Kemiskinan Absolut				
- US \$ 1 dollar	-.034*** (-5.47)	-.038*** (-5.08)	-.003 (-0.49)	.003 (0.49)
- US \$ 1.25 dollar	-.036*** (-4.76)	-.042*** (-4.65)	.004 (0.47)	.014* (1.68)
- US \$ 2 dollar	-.057*** (-5.59)	-.055*** (-4.62)	-.027** (-2.35)	-.008 (-0.70)
- BPS	-.003 (-0.24)	-.015 (-1.23)	-.017 (-1.47)	.008 (0.71)
Kemiskinan Subjektif	.114*** (8.29)	.054*** (3.62)	.039*** (2.73)	.037*** (2.64)
Observasi	14,480	14,480	7,240	14,480

Keterangan: DID=Difference-in-Difference; FE(HH)=Fixed Effect pada level Rumah Tangga; FD=First Difference. (*), (**), (***) mengindikasikan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1% (secara berturut-turut). Nilai koefisien dan signifikansi dari variabel kontrol dapat dilihat pada lampiran. Tanda dalam kurung merupakan nilai t-hitung.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, program Raskin berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Namun, secara kualitatif, program ini tidak berhasil untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil berbagai temuan sebelumnya (LP3ES, 2000; Hastuti dan Maxwell, 2003; Hastuti *et al*, 2007) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat mulai dari tingkat paling rendah (rumah tangga penerima program) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) sangat rendah. Sebagian Pemda merasa

apatis terhadap program Raskin karena realisasi dari program yang masih jauh dari tujuannya. Selain itu, pada tingkat aparat desa juga merasakan ketidakpuasan terhadap program karena akan berpengaruh terhadap sikap gotong royong dan kreativitas masyarakat. Untuk rumah tangga penerima program, mereka merasa tidak puas karena jumlah beras yang diterima masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbentuk *cash transfer* di Indonesia adalah program Bantuan Langsung Tunai. Program ini merupakan program bantuan pemerintah kepada masyarakat sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi BBM yang terjadi pada tahun 2005. Saat ini, Program BLT merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang berada pada klaster pertama. Program ini baru dilaksanakan pada tahun 2005, sehingga pada tahun 2000 dalam data IFLS program ini belum dimasukkan sebagai program pengentasan kemiskinan. Sehingga untuk melihat dampak dari program digunakan pendekatan first difference (FD), dengan model estimasi sebagai berikut:

Dimana, nilai parameter menggambarkan dampak dari program BLT terhadap outcome (kemiskinan dengan tujuh kategori pengukuran). Hasil analisis menunjukkan bahwa program BLT memberikan dampak yang positif terhadap kemiskinan untuk kategori pengukuran kemiskinan relative (*mean* dan *median*), kemiskinan absolut (US \$ 1.25 dollar per hari) dan kemiskinan subjektif. Sedangkan pengukuran dengan menggunakan kemiskinan absolut (US \$ 1 dollar per hari, US \$ 2 dollar per hari, dan BPS) menunjukkan hubungan yang negatif. Hal yang sama ditunjukkan oleh analisis yang menggunakan fixed effect pada level rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa penggunaan first difference dan fixed effect akan memberikan hasil yang sama pada saat $T=2$ (periode pengamatan selama 2 periode) (Gertler *et al*, 2011). Nilai estimasi menunjukkan bahwa dampak program BLT terhadap kemiskinan berkisar antara -0.003 hingga -0.027 (untuk dampak negatif) dan 0.005 hingga 0.039 (untuk dampak positif). Metode fixed effect menunjukkan bahwa dampak positif dari program BLT terhadap kemiskinan secara statistik signifikan (untuk pengukuran: kemiskinan relatif, kemiskinan

absolut pada US \$1.25 dollar per hari, dan kemiskinan subjektif), sedangkan untuk dampak negatif secara statistik tidak signifikan pada semua level pengukuran. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bazzi *et al* (2012) yang menggunakan data Susenas tahun 2005, 2006, dan 2007, dimana program BLT (*Unconditional Cash transfer/UCT*) menurunkan tingkat kesejahteraan relative terhadap kelompok yang tidak menerima (*counterfactual*).

Kebijakan *cash transfer* (program BLT) akan menyebabkan peningkatan harga pada tingkat lokal karena dengan adanya tambahan pendapatan rumah tangga, maka permintaan akan barang normal akan meningkat (mengeser kurva permintaan ke sebelah kanan) (Cunha *et al*, 2011). Jumlah tambahan pendapatan yang diterima oleh tiap rumah tangga adalah Rp. 100.000,- per bulan dan diterima per tiga bulan sekali untuk sembilan bulan dalam setahun (periode 2005-2006 dan 2008-2009). Tingkat inflasi pada tahun 2005 sebesar 14.57 persen dan 2006 sebesar 11.05 persen. Dengan demikian, tambahan pendapatan yang diperoleh rumah tangga sasaran hanya digunakan untuk bertahan dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Hasil kajian yang dilakukan oleh Rosfadhila *et al* (2011) menunjukkan bahwa dana BLT yang diterima oleh rumah tangga sasaran (RST) tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup RTS, karena jumlah dana yang diterima tidak dapat mengimbangi kenaikan harga yang terjadi saat itu.

Efektivitas pelaksanaan program anti-poverty tidak hanya dipengaruhi oleh satu program saja tetapi oleh berbagai program dimana satu kelompok treatment bisa memperoleh dua atau lebih program. Hal ini akan menyebabkan bias dalam estimasi dampak satu program (misl: Raskin atau BLT) terhadap tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut maka program Raskin dan BLT kemudian diinteraksikan untuk melihat dampak dari kedua program terhadap penurunan kemiskinan. Metode estimasi yang digunakan untuk melihat hal ini merujuk pada persamaan (3) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa program raskin lebih efektif menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan program BLT untuk pengukuran secara relatif dan absolut. Sedangkan, pengukuran subjektif memberikan hasil yang sama, dimana kedua program tersebut menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga

mereka berada dalam kemiskinan. Namun, jika kelompok rumah tangga sasaran menerima program Raskin dan BLT secara bersamaan, maka dampak dari kedua program adalah negatif (signifikan) terhadap satu kemiskinan seseorang (pengukuran subjektif dan pengukuran kemiskinan dari BPS). Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak dapat dijalankan secara parsial tetapi simultan, sehingga dampak yang ditimbulkan akan lebih baik.

Karakteristik rumah tangga yang berpengaruh secara signifikan dan negatif pada semua jenis pengukuran kemiskinan adalah pengeluaran per kapita rumah tangga. Artinya, jika terjadi kenaikan pendapatan rumah tangga maka akan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga. Sedangkan, untuk karakteristik komunitas, variabel lokasi tempat tinggal merupakan variabel yang pada semua kelompok pengukuran berpengaruh signifikan, namun arah hubungan berbeda pada setiap pengukuran kemiskinan. Hubungan negatif ditunjukkan oleh pengukuran kemiskinan subjektif dan kemiskinan objektif (BPS). Hal ini merupakan indikasi bahwa untuk memperbaiki kehidupan (keluar dari kemiskinan) maka rumah tangga akan melakukan migrasi ke wilayah perkotaan, dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan. Namun, jika menggunakan pengukuran kemiskinan relatif (*mean* dan *median*) serta pengukuran absolut (US \$ 1 dollar per hari), hubungan antara wilayah tempat tinggal dengan kemiskinan adalah positif. Artinya, bahwa dengan melakukan perpindahan tempat dari desa ke kota belum tentu akan membuat rumah tangga tersebut keluar dari kemiskinan, karena rumah tangga tersebut gagal dalam memperoleh keuntungan dari melakukan migrasi. Dengan demikian, migrasi dapat menjadi penyebab kemiskinan atau menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan (Skeldon, 2012).

Tabel 6

Dampak Interaksi dari Program Raskin dan BLT pada Pengukuran Kemiskinan Relatif dan Subjektif

	Kemiskinan Relatif				Kemiskinan Subjektif	
	Mean		Median		DID	FE(HH)
	DID	FE(HH)	DID	FE(HH)		
<i>Program Anti-Poverty</i>						
BLT	-0.035 (-1.62)	0.026 (0.89)	-0.012 (-0.64)	0.030 (1.21)	0.240*** (9.30)	0.065* (1.95)
Raskin	-0.063*** (-7.36)	-0.006 (-0.47)	-0.039*** (-5.55)	-0.003 (-0.31)	0.067*** (6.63)	0.005 (0.34)
Tahun	0.219*** (25.34)	0.236*** (11.80)	0.171*** (24.18)	0.186*** (11.16)	- (-7.43)	-0.038* (-1.68)
Raskin*Tahun	-0.024* (-1.84)	-0.005 (-0.33)	-0.023** (-2.17)	-0.007 (-0.58)	0.101*** (6.61)	0.055*** (3.22)
Raskin*BLT	0.047* (1.88)	-0.017 (-0.52)	0.013 (0.65)	-0.026 (-0.92)	- (-5.84)	-0.062* (-1.66)
<i>Karakteristik RT</i>						
Umur	0.000* (1.95)	0.000 (0.10)	0.000* (1.93)	0.000 (-0.15)	0.000 (1.07)	0.000 (-0.02)
Jenis Kelamin	0.012 (1.43)	0.057 (0.12)	0.006 (0.89)	0.043 (0.11)	-0.021** (-2.02)	0.045 (0.09)
Status Pernikahan	-0.084*** (-4.41)	-0.025 (-0.69)	-0.052*** (-3.35)	0.038 (1.27)	-0.012 (-0.55)	-0.063 (-1.58)
Status Bekerja	-0.017* (-1.78)	0.003 (0.17)	0.000 (-0.03)	0.022* (1.75)	0.021* (1.89)	0.003 (0.17)
Jumlah Anggota Keluarga	-0.036*** (-22.45)	-0.045*** (-13.06)	-0.026*** (-19.28)	- (-11.14)	0.003* (1.68)	0.012*** (3.12)
ln Pengeluaran per Kapita	-0.307*** (-74.56)	-0.347*** (-57.76)	-0.212*** (-62.86)	- (-48.37)	- (-6.54)	-0.012* (-1.72)
<i>Karakteristik Komunitas</i>						
Lokasi Tempat Tinggal	0.116*** (18.70)	0.051** (2,84)	0.069*** (13.53)	0.023 (1.53)	- (-4.37)	-0.020 (-0.99)
Jarak ke Pasar Terdekat	-0.003*** (-3.62)	0.001 (0.90)	-0.001 (-1.15)	0.003** (2.38)	0.001 (1.00)	-0.005*** (-2.78)

Keterangan: DID=Difference-in-Difference; FE(HH)=Fixed Effect pada level Rumah Tangga. (*),(**), (***) mengindikasikan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1% (secara berturut-turut). Nilai koefisien dan signifikansi dari variabel kontrol dapat dilihat pada lampiran. Tanda dalam kurung merupakan nilai t-hitung.

Tabel 7
Dampak Interaksi dari Program Raskin dan BLT pada Pengukuran Kemiskinan Absolut

	Kemiskinan Absolut							
	US \$ 1 per hari		US \$ 1.25 per hari		US \$ 2 per hari		BPS	
	DID	FE(HH)	DID	FE(HH)	DID	FE(HH)	DID	FE(HH)
<i>Program Anti-Poverty</i>		Lokasi		0.010				0.002
BLT	-0.019 (-1.59)		-0.016 (-0.99)	(0.98)	T- e 0.031**	0.006 (1.35)	-0.030 (-1.49)	(0.13)
Raskin	0.012*** (2.60)		0.017** (2.36)		m(-2.16) p 0.005		0.015* (1.74)	
Tahun	0.071*** (15.36)		0.083*** (7.35)		a (0.85) t 0.099***		0.120*** (8.75)	
Raskin*Tahun	-0.039*** (-5.63)		-0.050*** (-5.83)		T i -0.043***		- 0.064***	
Raskin*BLT	0.026** (1.96)		0.040** (2.14)		n (-5.11) g g 0.041**		0.074*** (3.23)	
<i>Karakteristik RT</i>					a (2.53) l			
Umur	0.000** (2.11)		-0.001 (-0.53)		0 0.000**		-0.001 (-0.89)	
Jenis Kelamin	0.003 (0.70)		0.017 (0.07)		. (2.00) 0 0.011*		0.029 (0.09)	
Status Pernikahan	-0.048*** (-4.71)		-0.009 (-0.45)		0 (1.95) 7 -0.069***		-0.025 (-1.01)	
Status Bekerja	-0.003 (-0.64)		-0.007 (-0.77)		* (-5.52) *		0.012 (1.14)	
Jumlah Anggota Keluarga	0.006*** (7.16)		0.010*** (5.44)		(-0.26) 2 0.008***		0.010*** (4.19)	
In Pengeluaran per Kapita	-0.119*** (-53.75)		-0.125*** (-36.86)		. (7.05) 0 -0.180***		- 0.188***	
<i>Karakteristik Komunitas</i>					7 (-66.56))		(-45.82)	

				1.72
-0.018	-0.025	0.240***	0.06)
(-0.92)	(-0.93)	(9.30)	5*	
0.024*** (3.26)	0.026**	0.067***	(1.9	
0.181*** (23.92)	(2.30)	(6.63)	5)	-0.020
	0.195***	-	0.005	(-0.99)
-	(10.77)	0.076***	(0.34)	
0.057*** (-5.03)		(-7.43)	-	
0.015	-	0.101***	0.03	
(0.70)	0.056***	(6.61)	8* (-	
	(-4.07)		1.68	
	0.024	-)	
0.000* (1.85)	(0.78)	0.171***		
-0.005		(-5.84)	0.055***	
(-0.68)			(3.22)	
-	-0.002	0.000		
0.075*** (-4.51)	(-0.94)	(1.07)	-	
0.010	-0.004	-0.021**	0.06	
(1.19)	(-0.01)	(-2.02)	2* (-	
0.010*** (6.82)	-0.009	-0.012	1.66	
-	(-0.27)	(-0.55))	
0.358*** (-99.30)				
	0.003	0.021*		
0.002	(0.20)	(1.89)	0.000	
(0.36)	0.008***	0.003*	(-0.02)	
	(2.74)	(1.68)	0.045	
	-	-	(0.09)	
	0.357***	0.032***	-0.063	
	(-65.78)	(-6.54)	(-1.58)	
	0.021	-	0.003	
	(1.30)	0.032***	(0.17)	
			0.012***	
			(3.12)	
			-	
			0.01	
			2* (-	

	Kemiskinan Absolut							
	US \$ 1 per hari		US \$ 1.25 per hari		US \$			
	DID	FE(HH)	DID	FE(HH)	DID	DID		
Jarak ke Pasar Terdekat	0.000 (-0.61)	-0.001 (-1.00)	-0.001 (-0.95)	-0.001 (-0.75)	-0.001 (-0.92)	-0.001 (-0.50)	(-4.37) 0.001 (1.00)	- 0.005*** (-2.78)

Keterangan: DID=Difference-in-Difference; FE(HH)=Fixed Effect pada level Rumah Tangga. (*), (**), (***) mengindikasikan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1% (secara berturut-turut). Nilai koefisien dan signifikansi dari variabel kontrol dapat dilihat pada lampiran. Tanda dalam kurung merupakan nilai t-hitung.

KESIMPULAN

Perdebatan mengenai mana yang lebih baik apakah program *in-kind transfer* atau *cash transfer* merupakan hal sering ditanyakan oleh para pengambil kebijakan dan lembaga donor. Cunha *et al* (2011) menyebutkan bahwa program *in-kind transfer* akan menyebabkan peningkatan konsumsi barang-barang tertentu karena harga pada tingkat lokal akan menurun. Sedangkan, program *cash transfer* akan menyebabkan peningkatan harga pada tingkat lokal. Namun, jika dilihat dari efektifitas penggunaan biaya, maka program *cash transfer* lebih baik dibandingkan dengan *in-kind transfer* (Currie and Gahvari, 2008; Grosh *et al*, 2008). Dengan demikian, pertanyaan mana yang lebih baik antara *in-kind transfer* atau *cash transfer*, sangat tergantung dampak program terhadap outcome yang ingin dilihat.

Penelitian ini mencoba membandingkan antara Program Raskin (*in-kind transfer*) dan Program BLT (*cash transfer*) terkait dengan tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan pada tujuh kriteria yang tergabung dalam tiga kelompok, yaitu: kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan subjektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Raskin memberikan dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, jika menggunakan pendekatan pengukuran relatif dan absolut. Namun, program ini akan memberikan hasil yang positif jika menggunakan pengukuran subjektif. Hal ini memperlihatkan bahwa program Raskin belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan program ini menjadi rendah (Hastuti, 2007). Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh program BLT, dimana program tersebut memberikan dampak yang positif bagi tingkat kemiskinan. Artinya, rumah tangga yang menerima program BLT memiliki kecenderungan berada dalam kategori miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima program. Interaksi antara Program Raskin dan Program BLT memberikan dampak yang negatif terhadap tingkat kemiskinan jika pengukurannya kemiskinan menggunakan pengukuran subjektif dan pengukuran absolut (BPS). Namun, jika menggunakan pengukuran kemiskinan absolut (US \$ 1 dollar per hari dan US \$ 1.25 dollar per hari) maka dampak dari kedua program adalah positif.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, karena jika dilakukan secara parsial maka dampak dari program tidak akan mencapai tujuannya. Program *in-kind transfer* (Program Raskin) dan program *cash-transfer* (Program BLT) memiliki dampak yang berbeda terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun, hasil interaksi antara kedua program tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A.B., dan F. Bourguignon. 2001. *Poverty and Inclusion from a World Perspective*. In *Governance, Equity and Global Markets*, ed. J. Stiglitz and P.A. Muet, New York: Oxford University Press.
- Bazzi, S., S. Sumarto., dan A. Suryahadi. 2012. *Evaluating Indonesia's Unconditional Cash Transfer Program, 2005-6: Final Report*. International Initiative for Impact Evaluation (3IE).
- Bearse, P.M., G. Glomm., dan E. Janeba. 2000. *Why Poor Countries Rely Mostly on Redistribution In-Kind*. *Journal of Public Economics*, 75(3): 463-481.
- Besley, T.J. 1988. *A Simple Model for Merit Good Arguments*. *Journal of Public Economics*, 35(3): 371-383.
- Blomquist, S., V. Christiansen., dan L. Micheletto. 2010. *Public Provision of Private Goods and Nondistortionary marginal Tax Rates*. *American Economic Journal: Economic Policy*, 2(2): 1-27.
- Chen, S., and M. Ravallion. 2010. *The Developing World is Poorer Than We Thought but No Less Successful in the Fight Against Poverty*. *Quarterly Journal of Economics*, 125(4): 1577-1625
- Cunha, J.M., G. De Giorgi., dan S. Jayachandran. 2011. *The Price Effects of Cash Versus In- Kind Transfers*. NBER Working Paper Serries, 17456.
- Currie, J. M., dan F. Gahvari. 2008. *Tranfers in Cash and In-Kind: Theory Meets the Data*. *Journal of Economic Literature*, 46(2): 333-383.
- Dartanto, T., dan S. Otsubo. 2013. *Measurements and Determinants of Multifaceted Poverty: Absolute, Relative, and Subjective Poverty in Indonesia*. JICA-RI Working Paper No. 54. JICA Research Institute.
- Devereux, S. 2006. *Cash Transfer and Social Protection*. Paper presented at The Regional Workshop on Cash Transfer Activities in Southern Africa, Johannesburg, South Africa, Oktober.
- Duflo, E. (2003). *Grandmothers and Granddaughters: Old Age Pension and Intra-household Allocation in South Africa*. *World Bank Economic Review* 17(1), 1-25.
- Epple, D., dan R.E. Romano. 1996. *Public Provision of Private Goods*. *Journal of Political Economy*, 104(1): 57-84.
- Gertler, P.J., S. Martinez, P. Premand, L.B. Rawlings., dan C.M.J. Vermeersch. 2011. *Impact Evaluation in Practice*. World Bank.
- Grosh, M., C. Del Ninno, E. Tesliuc., dan A. Ouerghi. 2008. *For Protection and Promotion: The Design and Implementation of Effective Safety Nets*. World Bank.
- Hastuti dan J. Maxwell. 2003. *Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Hastuti, S. Mawardi, B. Sulaksono, Akhmadi, S. Devina, R.P, Artha., dan R. Dewi. 2007. *Efektivitas Pelaksanaan Raskin*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.

- Hastuti, Sulaksono B., dan Mawardi S. 2012. *Kertas Kerja: Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*. Lembaga Penelitian SEMERU, Jakarta
- Hidrobo, M., J. Hoddinott, A. Paterman, A. Margolies., dan V. Moreira. 2012. *Cash, Food, or Vouchers?: Evidence from a Randomized Experiment in Northern Ecuador*. IFPRI Discussion Paper 01234. International Food Policy Research Institute.
- ILO. 2013. *Cash Transfer Programmes, Poverty Reduction and Empowerment of Woman: A Comparative Analysis: Experiences from Brazil, Chile, India, Mexico and South Africa*. Working Paper 4/2013. International Labor Office.
- LP3ES. 2000. *Studi Evaluasi JPS-OPK Beras di Daerah Pedesaan Tahun Anggaran 1999/2000*. Jakarta: LP3ES.
- Niemietz, K. 2011. *A New Understanding of Poverty*. London: Institute of Economic Affairs.
- Rosfadhila, M., N. Toyamah, B. Sulaksono, S. Devina, R.J. Sodo, dan M. Syukri. 2011. *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Skeldon, R. 2012. *Going Round in Circles: Circular Migration, Poverty Alleviation and Marginality*. International Organization Migration.
- Skoufias, E, dan T. Gonzalez-Cassio. 2008. *The Impacts of Cash and In-Kind Transfers on Consumption and Labor Supply: Experimental Evidence from Rural Mexico*. Policy Research Working Paper, 4778. World Bank.
- Strauss, J., F. Witoelar, B. Sikoki and A.M. Wattie. 2009. *The Fourth Wave of the Indonesian Family Life Survey (IFLS4): Overview and Field Report*. RAND Labor and Population Working Paper Series.
- World Bank. 2012a. *BLT Temporary Unconditional Cash Transfer: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2*. World Bank-Jakarta.
- World Bank. 2012b. *Raskin Subsidized Rice Delivery: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2*. World Bank-Jakarta.

**EFEKTIFITAS PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL
(RIGN) TERHADAP PENCAPAIAN PRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH
(GKP) DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR
PERKEBUNAN TEBU
DI JAWA TIMUR
(Pendekatan Model Dinamis)**

Duwi Yunitasari
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
e-mail: duwiyunita_16@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jawa Timur sebagai penghasil gula terbesar di Indonesia diharapkan dapat mendukung program swasembada gula nasional. Di satu sisi sebagai penghasil GKP terbesar, Jawa timur mengalami fluktuasi dalam produksi GKP dan penurunan penyerapan tenaga kerja (TK) sektor perkebunan. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji kebijakan RIGN terhadap peningkatan produksi GKP dalam upaya pencapaian target swasembada gula Nasional, 2) mengkaji kebijakan RIGN terhadap besarnya penyerapan TK di sektor perkebunan tebu, dan 3) mengkaji efektivitas kebijakan RIGN. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang dianalisis dengan pendekatan dinamika sistem. Hasil analisis menunjukkan kebijakan dengan skenario 3 (peningkatan rendemen) memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan skenario 1 (peningkatan luas lahan) dan skenario 2 (peningkatan produktivitas) dalam meningkatkan produksi GKP. Kebijakan dengan skenario 1 (peningkatan luas lahan) memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan skenario 2 (peningkatan produktivitas) dan skenario 3 (peningkatan rendemen) dalam menyerap TK. Sehingga kebijakan RIGN melalui skenario 3 (peningkatan rendemen) efektif meningkatkan produksi GKP, tetapi belum mampu memenuhi target produksi GKP. Sedangkan penyerapan TK melalui peningkatan luas lahan efektif menyerap TK lebih banyak.

Kata kunci: Produksi GKP, swasembada, RIGN, penyerapan TK, model dinamis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pergulaan merupakan salah satu industri pertanian yang paling maju dan paling lengkap di Indonesia, mulai dari *research and development* hingga industri pengolahannya (Zaini, 2011). Gula merupakan salah satu bahan pangan pokok strategis. Tidak hanya di Indonesia, gula juga termasuk bahan kebutuhan pangan dunia. Sebagai salah satu kebutuhan pangan dunia, ketersediaan dari stok komoditas gula harus mencukupi. Tabel 1 menunjukkan bahwa proyeksi produksi, konsumsi, dan stok komoditi pangan utama di dunia (beras, jagung, gandum dan gula) menunjukkan stok negatif, kecuali untuk komoditas kedelai. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi yang hampir sebanding dengan peningkatan produksi tiap-tiap komoditi. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara permintaan (dari sisi konsumsi) dan penawaran (dari sisi produksi). Jika hal ini tidak ditanggulangi dengan segera, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis pangan.

Laju pertumbuhan salah satu komoditi pangan utama dunia yakni, produksi gula selama ini menunjukkan tren yang berbanding terbalik dengan laju

pertumbuhan penduduk dan industri makanan-minuman. Peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan laju produksi. Jika laju kebutuhan konsumsi tidak dapat diimbangi dengan kenaikan produksi, maka untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dilakukan dengan mengimpor gula dari negara-negara penghasil gula di dunia.

Tabel 1
Proyeksi Produksi, Konsumsi, dan Stok Komoditi Pangan Utama Dunia Tahun 2000-2050

Komoditi	% Peningkatan			
	Areal Tanam	Produksi	Konsumsi	Stok
Beras	1,0	48,0	49,0	-22,0
Jagung	23,0	111,0	105,0	-14,0
Gandum	-2,0	57,0	56,0	-5,0
Gula	49,0	93,0	93,0	-18,0
Kedelai	69,0	155,0	153,0	56,0
Total Produksi Pangan	16,0	86,0	84,0	-8,0

Sumber: Kruse (2010) dalam Kementerian Pertanian, 2013

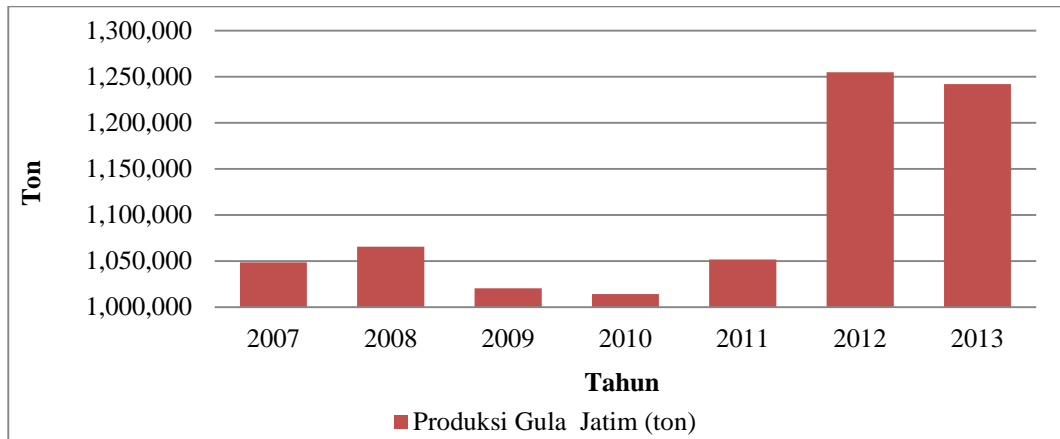
Hampir setiap pemerintahan mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mencapai swasembada gula. Gula selain memiliki peran penting sebagai salah satu bahan makanan pokok yang harganya sangat terjangkau dan kepraktisan bentuknya, tapi juga menyumbang dalam penyediaan lapangan kerja, pendapatan rumah tangga dan nilai output yang dihasilkan bagi wilayah (Yunitasari et al. 2015).

Pemerintah sejak tahun 1999 berupaya mencapai swasembada gula. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung program swasembada gula membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu program pemerintah untuk mendukung swasembada gula yaitu melalui Revitalisasi Industri Gula Nasional (RIGN). Adapun kebijakan yang terdapat dalam RIGN, yaitu: 1. Peningkatan luas areal tebu sebesar 3,2%, 2. Peningkatan produktivitas tebu sebesar 1,6%, dan 3. Peningkatan rendemen sebesar 2,41% (Kementerian BUMN, 2011). Sebagai rencana jangka panjang, RIGN sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan produksi gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. RIGN diharapkan dapat meningkatkan produksi gula untuk konsumsi langsung yaitu jenis Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 3,54 juta ton pada tahun 2014 yang terdiri dari perkebunan besar negara (PBN) sebanyak 2,32 juta ton, dan perkebunan besar swasta (PBS) sebanyak 1,22 juta ton. Target swasembada pada tahun 2014 tersebut belum tercapai.

Jawa Timur sebagai produsen gula mempunyai kontribusi terhadap gula nasional sebesar 51,58% (2012) dan 51,32% (2013) (DGI, 2014). Jumlah kontribusi yang sangat besar, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa daerah penghasil gula, seperti Sumatera (Lampung), Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Barat), dan Sulawesi. Hal ini membuat Jawa Timur tercatat mempunyai kontribusi lebih dari separuh terhadap kontribusi gula di Indonesia.

Perkembangan produksi gula dari tahun ke tahun berfluktuasi. Produksi gula di Jawa Timur dari tahun 2007 sampai tahun 2013 (Gambar 1) mengalami pertumbuhan sebesar 2,80 persen per tahun. Produksi gula pada tahun 2007 sebesar 1,048 juta ton, pada tahun 2008 sebesar 1,065 juta ton, pada tahun 2009 sebesar 1,020 juta ton dan pada tahun 2010 sebesar 1,014 juta ton atau terjadi penurunan 0,61 persen. Penurunan pada tahun 2010 diakibatkan karena kondisi iklim yang tidak mendukung. Peningkatan produksi gula yang cukup mencolok pada tahun 2012 di Jawa Timur sebesar 1,254 juta ton. Peningkatan

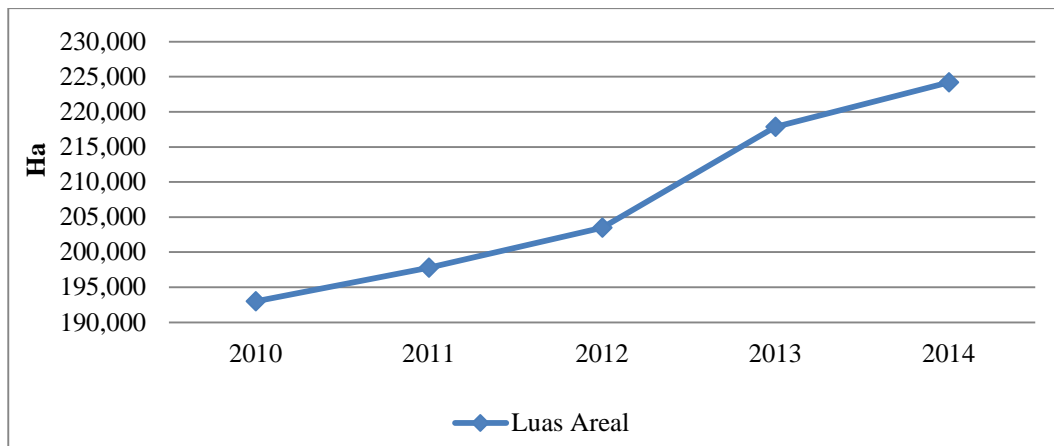
produksi disebabkan oleh areal dan produktivitas yang meningkat. Pada tahun 2013 produksi gula sebesar 1,241 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 1,04 persen.



Sumber: DGI, 2014

Gambar 1
Produksi Gula Jawa Timur tahun 2007-2013

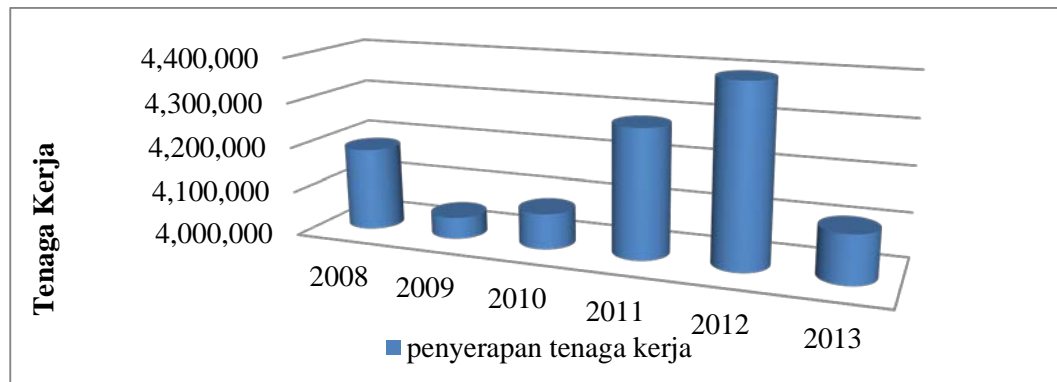
Tebu sebagai salah satu sub sektor perkebunan membutuhkan ketersediaan lahan untuk meningkatkan produksinya. Luas areal tebu pada tahun 2010-2014 tercatat berturut-turut (Gambar 2): 192.970 ha (2010), 197.762 ha (2011), 203.484 ha (2012), 217.843 ha (2013) dan 224.201 ha (2014) (Disbun Jatim, 2015). Pertumbuhan luas areal tebu dari tahun 2010-2014 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat untuk menanam tebu masih dimiliki oleh petani tebu. Pertumbuhan luas areal tebu tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 7,06%. Hal ini terjadi karena adanya pengembangan luas areal tanaman perkebunan. Pengembangan luas areal tebu merupakan program dari pemerintah di Madura, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban (Disbun Jatim, 2014).



Sumber: Disbun Jatim, 2015

Gambar 2
Luas Areal perkebunan Tebu di Jawa Timur tahun 2010-2014

Jawa Timur sebagai penghasil tebu terbanyak dan areal tebu terluas di Indonesia (Gambar 3) didukung dengan penyerapan tenaga kerja (TK) yang berfluktuasi dari tahun 2008-2012 pada sektor perkebunan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.183.729 TK, tahun 2009 sebanyak 4.048.372 TK, tahun 2010 sebanyak 4.079.600 TK, tahun 2011 sebanyak 4.283.936 TK, tahun 2012 sebanyak 4.394.068 TK, dan penyerapan TK tahun 2013 sebanyak 4.107.569 TK. Penyerapan tenaga kerja tertinggi pada tahun 2012. Secara keseluruhan penyerapan TK dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan sebesar 0,28 %.



Sumber: Disbun Jatim, 2015

Gambar 3
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor perkebunan tahun 2008-2013

Walaupun penyerapan TK di sektor perkebunan di Jawa Timur dalam kurun waktu 2007-2013 menunjukkan penurunan, sektor perkebunan tebu diharapkan dapat menyerap banyak TK dan menopang kebutuhan gula secara nasional. Mengingat kebutuhan gula saat ini masih dipenuhi dari impor gula.

Permasalahan

Target swasembada gula dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah melalui program RIGN berusaha untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. Selama ini kebutuhan gula di dalam negeri dicukupi oleh pemerintah melalui impor gula. Guna mendukung swasembada di Indonesia, pemerintah pusat memberikan target bagi Jawa Timur untuk meningkatkan produksi gula menjadi 1,65 juta ton (Disbun Jatim, 2011). Data produksi gula hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa produksi gula Jawa Timur belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan program RIGN diharapkan dapat meningkatkan produksi gula Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur merupakan sentra produksi gula terbesar di Indonesia. Peningkatan dalam produksi gula diharapkan dibarengi dengan peningkatan/ pembukaan areal lahan tebu baru sesuai dengan program RIGN. Pembukaan areal lahan tebu baru diharapkan menyerap tenaga tebang-muat-angkut semakin banyak.

Perkebunan tebu tidak bisa dipisahkan dengan pabrik gula (PG) sebagai tempat untuk menggilingkan hasil dari perkebunan tebu menjadi gula. Baik perkebunan tebu dan PG mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Tebu membutuhkan PG sebagai tempat untuk menggilingkan tebu, dan PG membutuhkan tebu sebagai bahan baku untuk operasional mesin PG agar tidak

terjadi *idle capacity*. Jumlah TK yang terserap pada masing-masing pabrik gula (PG) menunjukkan jumlah yang tidak sedikit.

Pentingnya peran gula sebagai salah satu kebutuhan pokok tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan di sektor pertanian. Peningkatan produksi GKP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor gula, menghemat devisa, peningkatan penyerapan TK, peningkatan pendapatan TK, dan petani.

Berdasar data dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah: 1) bagaimana skenario dan kebijakan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan target produksi gula di Jawa Timur?, 2) apakah kebijakan RIGN dapat meningkatkan penyerapan TK di sektor perkebunan tebu?, dan 3) bagaimana efektifitas kebijakan RIGN dalam meningkatkan produksi GKP dalam rangka mendukung swasembada gula dan penyerapan TK?

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika produksi gula Jatim dan penyerapan TK dalam rangka memenuhi target swasembada gula Nasional. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) mengkaji kebijakan RIGN terhadap peningkatan produksi GKP dalam upaya pencapaian target swasembada gula Nasional, 2) mengkaji kebijakan RIGN terhadap besarnya penyerapan TK sub sektor perkebunan tebu, dan 3) mengkaji efektivitas kebijakan RIGN.

LANDASAN TEORI

Swasembada Gula

Gula merupakan salah satu komoditi pertanian yang diharapkan mampu swasembada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai swasembada dibutuhkan dukungan dari banyak pihak, sehingga program pemerintah yang digulirkan dapat berjalan dengan baik. Ginanjar (2012) menyatakan bahwa swasembada gula bisa terwujud jika ketergantungan akan gula impor bisa dikurangi dan ditunjang dengan meningkatkan produksi gula dalam negeri yang didukung dengan perluasan lahan tebu.

Hasil penelitian Cahyani (2008) menunjukkan bahwa swasembada gula tidak bisa tercapai jika kebutuhan konsumsi selalu mengalami peningkatan. Penelitian Zaini (2011) menyatakan bahwa kebijaksanaan yang protektif dalam industri gula telah menimbulkan rente dalam industri pergulaan di Indonesia. Penerimaan rente terbesar diterima oleh pemerintah/negara, diikuti importir, dan pabrik gula swasta. Hasil regresi yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan positif antara lobi yang dilakukan dengan besarnya biaya sosial perburuan rente, dan terdapat hubungan negatif dengan pencapaian swasembada.

Priyono (2008) menyatakan bahwa untuk mencapai program swasembada gula, maka diperlukan pembukaan lahan tebu dan pendirian pabrik gula baru di seluruh wilayah. Sejalan dengan penelitian Nugrahapsari (2013) yang menyatakan bahwa tercapainya swasembada gula kristal putih (GKP) dipengaruhi faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan bahan baku, pengolahan, perdagangan, kebutuhan gula baik secara parsial maupun interaksi antara faktor-faktor tersebut. Analisis mengenai dampak kebijakan RIGN terhadap pencapaian swasembada gula menunjukkan bahwa peningkatan rendemen mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan kebijakan RIGN lainnya yakni peningkatan luas areal dan peningkatan produktivitas tebu. Dengan

menggunkan model dinamik, maka skenario kebijakan alternatif yang dapat membuat Indonesia mencapai swasembada adalah peningkatan rendemen dan pengelolaan penduduk. Hal ini dikarenakan rendemen merupakan peubah yang *very sensitive* dan penduduk merupakan peubah yang *highly sensitiv* yang berpengaruh terhadap kinerja model.

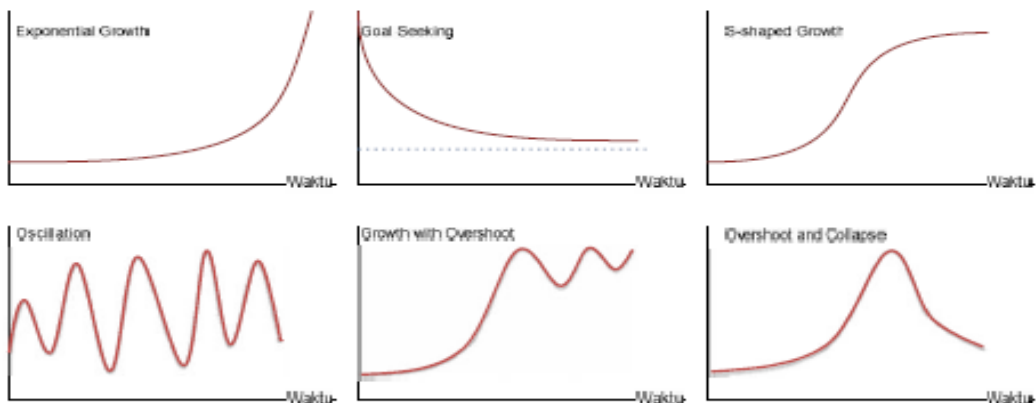
Model Dinamik

Menurut Eriyanto (1999) Model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu obyek atau situasi yang aktual. Dalam model terdapat hubungan langsung maupun tidak langsung serta terdapat keterkaitan timbal balik atau sebab-akibat. Model adalah abstraksi dari realitas, maka wujudnya kurang kompleks dari realitas yang ada. Model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang dikaji.

Sistem adalah interaksi antar unsur dari sebuah obyek dalam batas lingkungan tertentu secara keseluruhan yang bekerja mencapai tujuan (Muhammadi *et al*, 2001). Sterman (2000) menyebutkan bahwa alam dan manusia memiliki tingkat kompleksitas dinamis. Dinamika muncul dari interaksi antara antar pelaku dari waktu ke waktu. Sistem yang kompleks berada dalam ketidak seimbangan dan berkembang. Banyak tindakan yang dilakukan menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Keberadaan masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan baik untuk keadaan sekarang. Dinamika sistem adalah metode untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam kompleksitas dinamis dan kebijakan yang resisten.

Sejalan dengan pernyataan Sterman (2000), langkah-langkah dalam membuat model dinamik; (1) mendefinisikan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) merumuskan model simulasi, (4) pengujian, dan (5) desain kebijakan dan melakukan evaluasi.

Sterman (2000) menyatakan bahwa pola umum perilaku dasar dinamika system adalah *exponential growth*, *goal seeking* dan *oscillation*. Masing-masing bentuk tersebut berasal dari struktur umpan balik yang sederhana, di mana *growth* diperoleh dari umpan balik yang positif, *goal seeking* dari umpan balik negatif, dan *oscillation* dari umpan balik negatif dengan *delay* waktu. Bentuk umum tersebut seperti pada Gambar 4.



Sumber: Sterman 2000

Gambar 4
Pola umum perilaku dinamika sistem

METODE PENELITIAN

Cakupan Penelitian

Penelitian untuk mengetahui pencapaian target pemerintah pusat dalam rangka mendukung program swasembada terhadap peningkatan produksi gula di Jawa Timur dan jumlah TK yang terserap pada PG maupun di areal/lahan tebu. Dianalisis menggunakan pendekatan sistem dinamis. Model yang disusun menggunakan tahun 2010-2025 sebagai tahun dasar dan sesuai dengan dimulainya kebijakan RIGN.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data primer dan data skunder. Data primer meliputi: banyaknya tenaga tebang muat angkut (TMA) pada lahan perkebunan tebu, dan jumlah TK (karyawan tidak tetap) pada PG. Data skunder meliputi: luas areal tebu, jumlah tenaga kerja di PG, jumlah PG, penggolongan kelas PG, produktivitas tebu, rendemen, jumlah produksi Gula Kristal Putih (GKP), nilai susut tebu, dan kapasitas terpakai dari PG.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dan simulasi terhadap pencapaian target pemerintah pusat atas peningkatan produksi gula di Jawa Timur, menggunakan sistem dinamik. Begitu pula dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, baik jumlah karyawan di PG maupun tenaga kerja di lahan tebu. Perumusan skenario kebijakan dalam pencapaian target produksi gula menggunakan target Revitalisasi Industri Gula Nasional (RIGN) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai swasembada gula nasional.

Validasi Model

Uji validitas kinerja/output model dilakukan apakah kinerja output tersebut sudah dapat mewakili dunia nyata. Uji validitas untuk mengukur keakuratan output simulasi, menggunakan *Root Mean Square Percentage Error* (RMSPE), *Absolute Mean error* (AME) dan *Absolute Variance Error* (AVE).

Persamaan Matematikanya:

$$RMSPE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_{1i} - Y_{2i}}{Y_{1i}} \right)^2}{n}}$$

$$AME = \frac{Y_{2i} - Y_{1i}}{Y_{1i}} \dots\dots\dots$$

$$AVE = \frac{Ss - Sa}{Sa} \dots\dots\dots$$

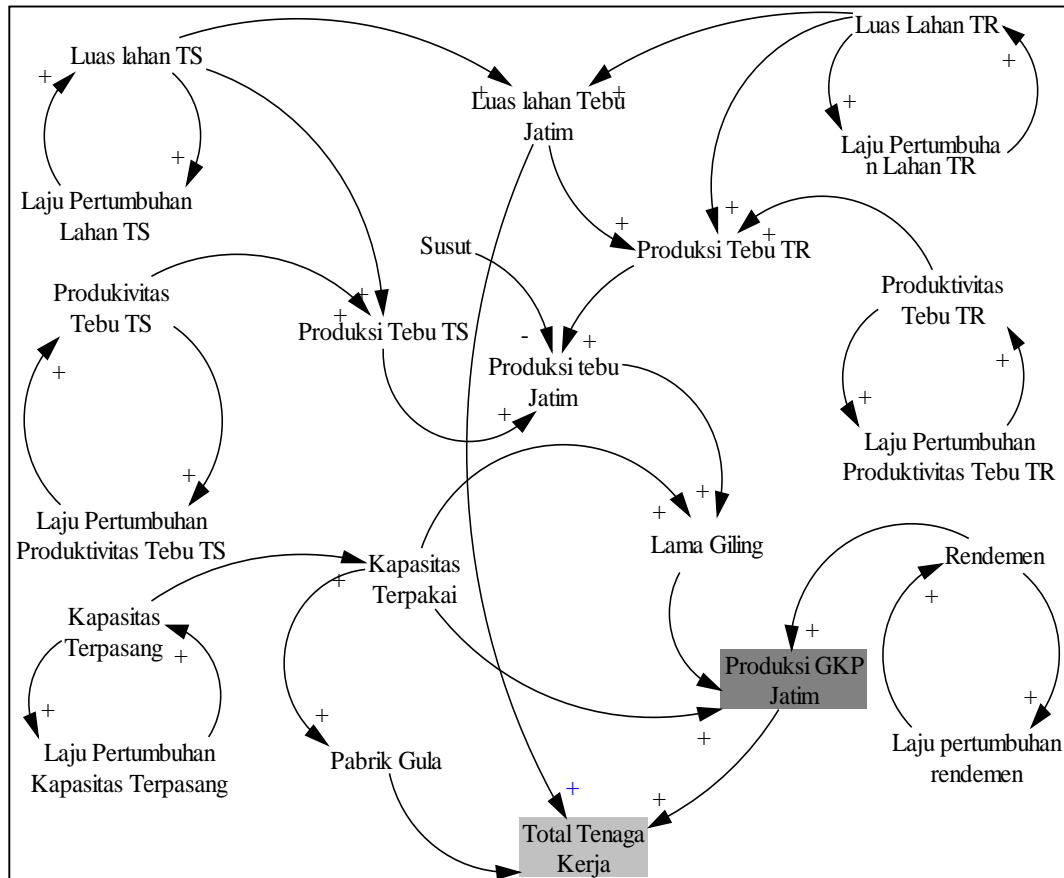
Dimana:

- Y_{1i} = nilai data aktual periode ke-i
- Y_{2i} = nilai simulasi model periode ke-i
- n = jumlah periode
- $\frac{Y_{1i}}{Y_{1i}}$ = Y_{1i}/n
- $\frac{Y_{2i}}{Y_{2i}}$ = Y_{2i}/n
- Sa = ((Y_{1i} - $\frac{Y_{1i}}{n}$)²/n)
- Ss = ((Y_{2i} - $\frac{Y_{2i}}{n}$)²/n)

Diagram Lingkar sebab Akibat (Causal loop diagram)

Diagram sebab akibat menggambarkan keterkaitan hubungan antar elemen dalam sistem. Terdapat hubungan yang bertanda positif dan negatif.

Hubungan yang bertanda positif menyebabkan penambahan pada variabel lain. Hubungan yang bertanda negatif, di mana penambahan pada satu variabel menyebabkan pengurangan pada variabel yang lain.



Gambar 5
Diagram alir sebab akibat model peningkatan produksi gula dan penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan tebu di Jawa Timur

Diagram sebab akibat pada Gambar 5 untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel/elemen dalam sistem peningkatan produksi GKP dan TK yang terserap di Jawa Timur. Apakah jumlah produksi GKP sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau tidak. Diagram sebab akibat pada Gambar 5, dimulai dari luas lahan. Baik lahan TS (tebu sendiri) maupun lahan TR (tebu rakyat). Pengusahaan tebu di Jawa Timur, diusahakan/ dimiliki oleh PG (TS) dan rakyat (TR). Semakin luas lahan yang tersedia untuk tanaman tebu, maka produksi tebu juga semakin meningkat. Begitu pula dengan produktivitas tebu, semakin tinggi tingkat produktivitasnya, maka tebu yang dihasilkan juga semakin banyak. Sebelum tebu digiling menjadi gula (GKP), tebu mengalami susut selama proses dari perkebunan tebu menuju PG untuk digiling. Semakin tinggi susut, maka produksi tebu mengalami penurunan. Produksi gula (GKP) dipengaruhi oleh rendemen, lama giling, dan kapasitas terpakai suatu PG. Semakin tinggi rendemen, maka jumlah GKP semakin banyak. Begitu pula lama giling dan kapasitas terpakai dari PG yang menunjukkan semakin banyak tebu yang dapat digiling oleh PG menjadi GKP.

Perkebunan tebu tidak bisa dipisahkan dengan pabrik gula (PG) sebagai tempat untuk menggilingkan hasil dari perkebunan tebu menjadi gula. Perkebunan tebu dan PG mempunyai hubungan yang saling membutuhkan.

Tebu membutuhkan PG sebagai tempat untuk menggilingkan tebu, dan PG membutuhkan tebu sebagai bahan baku untuk operasional mesin PG agar tidak terjadi *idle capacity*. Tenaga kerja mempunyai peran yang tidak kalah penting. Tenaga kerja sangat diperlukan dalam mekanisme proses produksi. Jumlah TK yang terserap pada masing-masing pabrik gula (PG) menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Begitupula dengan jumlah TK yang terserap pada perkebunan tebu untuk tenaga tebang muat angkut (TMA) terutama pada musim giling. Semakin luas areal tebu, maka jumlah tenaga kerja yang terserap semakin banyak.

Simulasi Kebijakan

Simulasi kebijakan yang dilakukan adalah simulasi kebijakan yang mengadopsi dari kebijakan Revitalisasi Industri Gula Nasional (RIGN). Simulasi kebijakan menggunakan skenario sebagai berikut: Skenario 1, peningkatan luas areal tebu sebesar 3,2%/tahun, Skenario 2, peningkatan produktivitas tebu sebesar 1,6%/tahun, Skenario 3, peningkatan rendemen sebesar 2,41% /tahun (Kementerian BUMN, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validasi Model

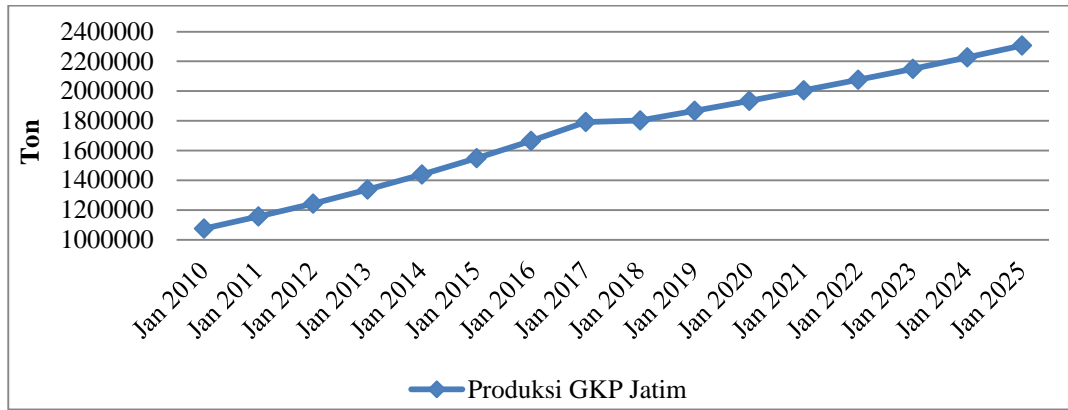
Hasil validasi model menggunakan RSMPE, AME, dan AVE pada Tabel 2, menunjukkan bahwa angka RSMPE, AME dan AVE masing-masing tidak lebih dari 5 persen. Masing-masing nilai RSMPE sebesar 3,86 persen, AME sebesar 0,77 persen dan AVE sebesar 1,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibuat dinyatakan valid.

Tabel 2
Hasil uji validasi kinerja model terhadap peningkatan produksi GKP dan penyerapan TK di Jawa Timur

Kriteria	Variabel
	Produksi GKP (%)
RSMPE (Root Mean Square Percentage Error)	3,86
AME (Absolute Mean Error)	0,77
AVE (Absolute Variance Error)	1,56

Model Produksi GKP di Jawa Timur dan penyerapan TK pada kondisi aktual

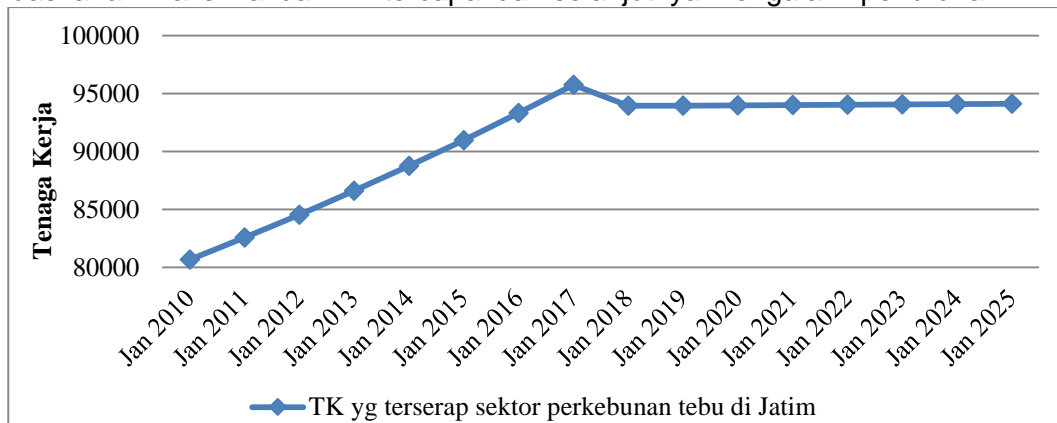
Produksi gula pada kondisi aktual (Gambar 6) menunjukkan bahwa pada periode simulasi terjadi kenaikan produksi GKP. Pada tahun 2010, produksi GKP sebanyak 1,07 juta ton dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 2,30 juta ton. Produksi GKP pada tahun 2015 tercatat sebesar 1,54 juta ton. Produksi GKP pada kondisi aktual tahun 2015 menunjukkan bahwa target produksi GKP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka mendukung swasembada GKP tidak tercapai.



Gambar 6
Produksi gula (GKP) di Jawa Timur pada kondisi aktual tahun 2010-2025

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan salah satu indikatornya, yakni penyerapan TK. Sub sektor perkebunan tebu merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, mengingat tebu merupakan bahan baku utama gula. Di Indonesia, gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dan masuk dalam barang strategis. Pentingnya peran strategis gula seharusnya diikuti tidak hanya dengan ketersediaan gula, tapi juga ketersediaan data mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di sub sektor perkebunan tebu. Data TK diperoleh dari data yang diperoleh pada pengambilan sample di beberapa pabrik gula, wawancara dengan petani tebu dan wawancara dengan salah satu petugas dari dinas perkebunan Jawa Timur.

Hasil simulasi pada kondisi aktual menunjukkan bahwa penyerapan TK pada tahun 2010 berjumlah 80.660 TK dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan penyerapan TK sebesar 94.098 TK (Gambar 7). Kenaikan TK disumbang dari peningkatan luas lahan tebu akibat pembukaan lahan baru di Madura, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan (Disbun Jatim, 2014). Pada tahun 2017 TK yang terserap mengalami peningkatan tertinggi, hal ini terjadi karena luas lahan maksimal dari TR tercapai dan selanjutnya mengalami penurunan.

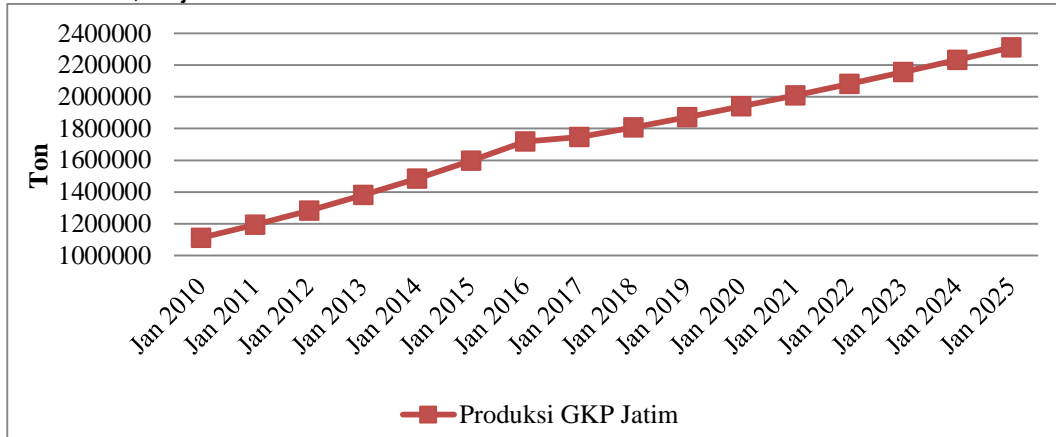


Gambar 7
Penyerapan TK di Jawa Timur pada kondisi aktual tahun 2010-2025

Dampak Kebijakan RIGN terhadap produksi GKP dan penyerapan TK pada sub sektor perkebunan tebu

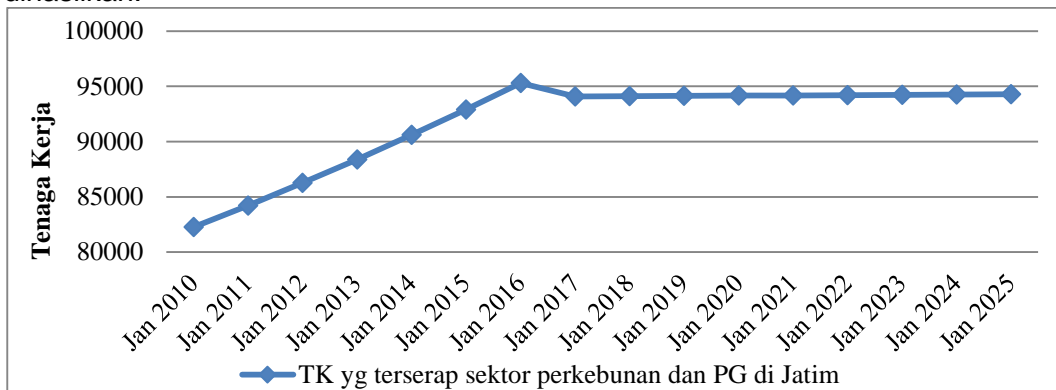
Skenario 1: Peningkatan Luas Areal sebesar 3,2 persen

Skenario 1 merupakan skenario yang diambil dari kebijakan RIGN. Kebijakan dalam peningkatan luas areal sebesar 3,2 persen memberi dampak pada peningkatan produksi GKP (Gambar 8). Peningkatan produksi GKP pada tahun 2010 sebesar 1,10 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 2,31 juta ton. Hasil simulasi menggunakan skenario 1 ternyata belum mampu membuat produksi GKP seperti yang ditargetkan. Produksi GKP pada tahun 2015 sebesar 1,59 juta ton. Tercatat produksi GKP akan memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2016 dengan produksi GKP sebesar 1,71 juta ton.



Gambar 8
Produksi gula (GKP) di Jawa Timur pada skenario 1 tahun 2010-2025

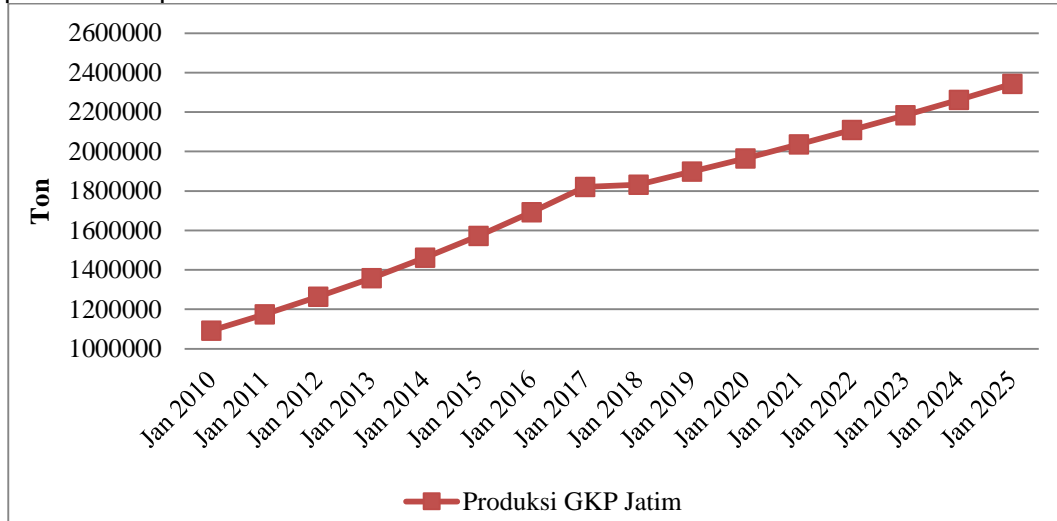
Simulasi yang dilakukan pada model dengan menggunakan skenario 1 menunjukkan bahwa penyerapan TK mengalami peningkatan (Gambar 9). Pada tahun 2010 penyerapan TK sebesar 82.256 TK dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 94.284 TK. Pada tahun 2016 menunjukkan penyerapan TK tertinggi sebesar 95.302 TK. Penyerapan TK tertinggi terjadi karena perhitungan TK yang terserap berdasar pada luasan lahan yang tersedia. Baik untuk TK disektor perkebunan (*on farm*) maupun TK di sektor *off farm* (pabrik gula). Semakin luas lahan perkebunan tebu, maka TK tebang-muat-angkut (TMA) pada musim giling yang terserap akan semakin banyak. Begitu pula TK pada pabrik gula juga akan semakin banyak. TK pada PG meliputi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Dimana karyawan tidak tetap jumlahnya berfluktuasi menyesuaikan dengan banyaknya jumlah tebu giling yang dihasilkan.



Gambar 9
Penyerapan TK di Jawa Timur pada skenario 1 tahun 2010-2025

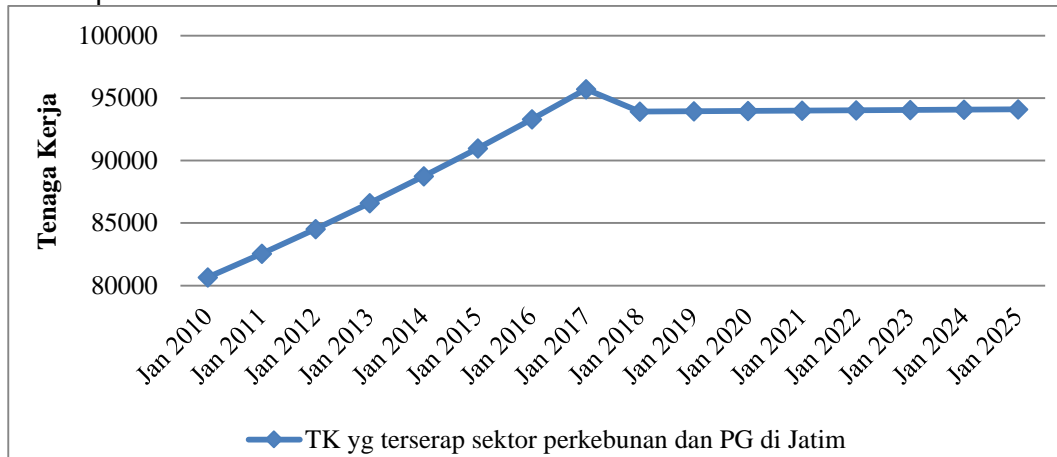
Skenario 2: Peningkatan Produktivitas tebu sebesar 1,6 persen

Peningkatan dalam produksi tebu sebesar 1,6 persen mengakibatkan peningkatan dalam produksi GKP Jawa Timur (Gambar 10). Produksi GKP pada tahun 2010 tercatat sebesar 1,09 juta ton dan mengalami peningkatan sebesar 2,34 juta ton pada tahun 2025. Produksi GKP pada tahun 2015 tercatat sebesar 1,57 juta ton. Sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi GKP pada tahun yang sama (2015) dengan menggunakan skenario 1. Simulasi dengan menggunakan skenario 2 juga menunjukkan bahwa target produksi GKP pada tahun 2015 masih belum mampu memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Gambar 10
Produksi gula (GKP) di Jawa Timur pada skenario 2 tahun 2010-2025

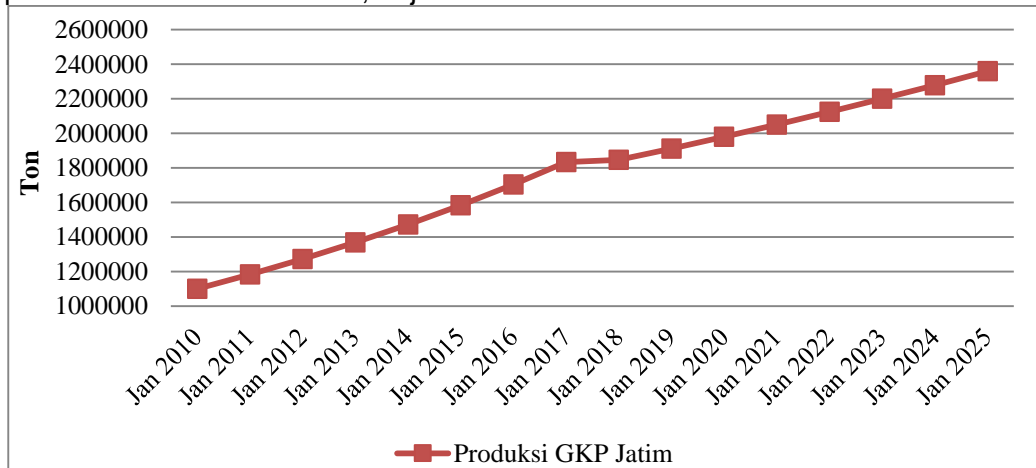
Jumlah TK yang terserap pada sektor perkebunan tebu tahun 2010-2025 menunjukkan peningkatan (Gambar 11). Jumlah TK yang terserap pada tahun 2010 sebesar 80.660 TK dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 94.098 TK. Pada tahun 2017 TK yang terserap mencapai jumlah terbesar, hal ini dikarenakan jumlah TK yang terserap berdasarkan pada luas lahan. Di mana peningkatan produktivitas pada tahun 2017 meningkatkan jumlah TK yang terserap.



Gambar 11
Penyerapan TK di Jawa Timur pada skenario 2 tahun 2010-2025

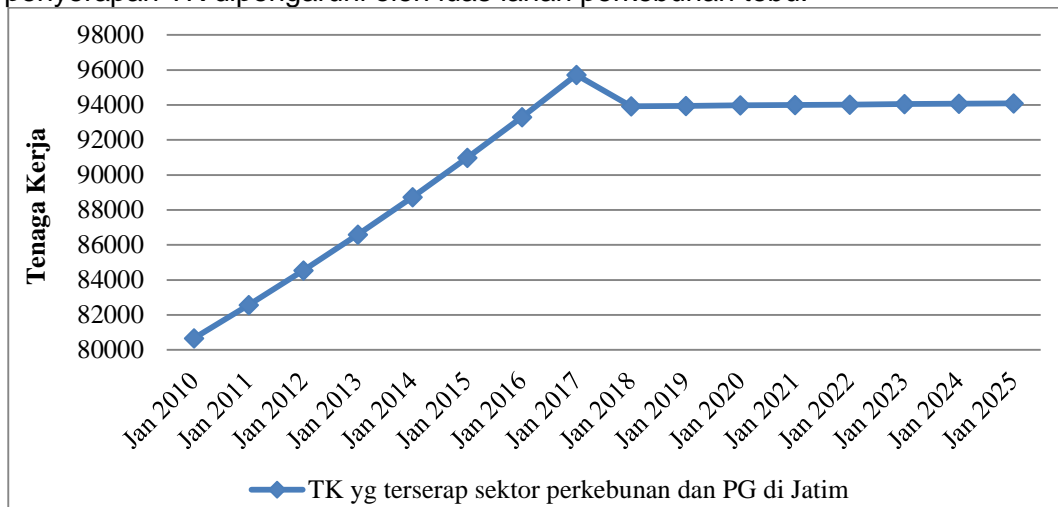
Skenario 3: Peningkatan Rendemen 2,41%

Produksi GKP pada skenario 3 (Gambar 12) menunjukkan bahwa produksi GKP pada tahun 2015 masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan angka produksi GKP pada tahun 2015 sebesar 1,58 juta ton. Di satu sisi dengan adanya peningkatan rendemen, maka jumlah GKP dapat memenuhi target. Walaupun dengan simulai menggunakan skenario 3, target produksi GKP belum tercapai, produksi GKP secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah GKP pada tahun 2025 sebesar 2,36 juta ton.



Gambar 12
Produksi gula (GKP) di Jawa Timur pada skenario 3 tahun 2010-2025

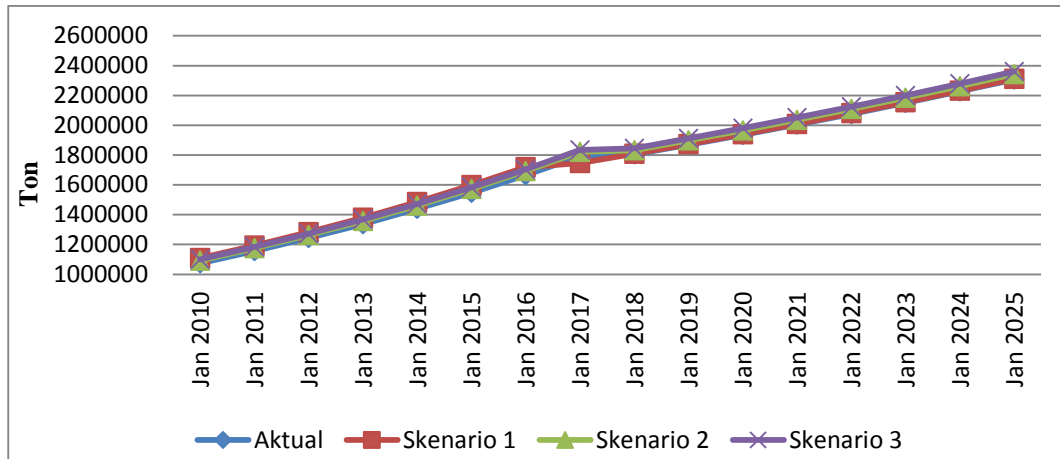
Penyerapan TK (Gambar 13) menunjukkan bahwa penyerapan TK dari tahun 2010-2025 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah TK yang terserap pada tahun 2010 sebesar 80.660 TK dan pada tahun 2025 terserap sebesar 94.098 TK. Penyerapan TK menunjukkan penyerapan terbanyak pada tahun 2017 yakni sebesar 95.727 TK. Hal ini disebabkan luas lahan (TR) mencapai target maksimal. Seperti penjelasan di muka, bahwa penyerapan TK dipengaruhi oleh luas lahan perkebunan tebu.



Gambar 13
Penyerapan TK di Jawa Timur pada skenario 3 tahun 2010-2025

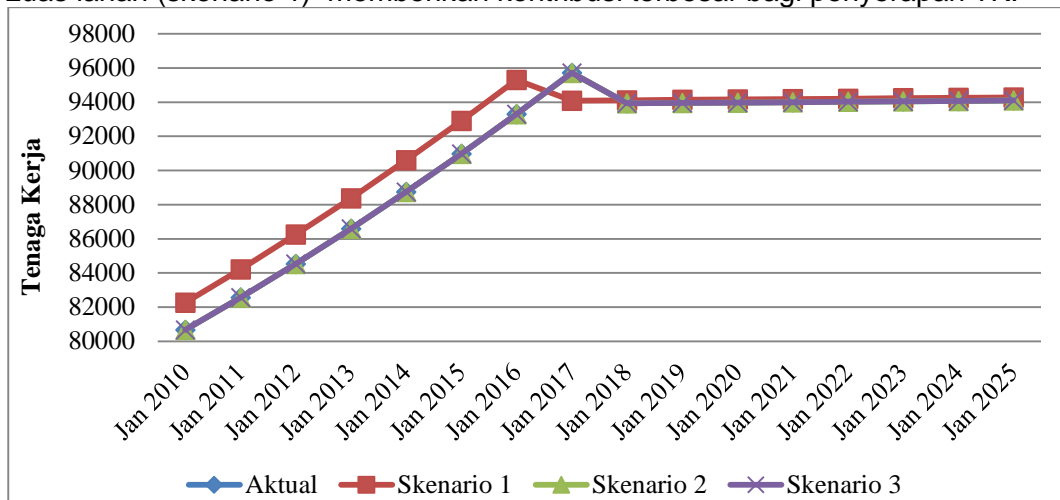
Perbandingan antara kondisi aktual, skenario 1, 2, dan 3

Perbandingan pada kondisi aktual, skenario 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa produksi GKP selama periode simulasi (tahun 2010-2025) menunjukkan peningkatan (Gambar 14). Produksi GKP pada tahun 2015 yang dihasilkan oleh Jawa Timur belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Target yang ditetapkan akan tercapai pada tahun 2016. Produksi GKP tertinggi ditunjukkan oleh simulasi pada skenario 3, yakni peningkatan rendemen sebesar 2,41 persen.



Gambar 14
Perbandingan produksi gula (GKP) di Jawa Timur pada kondisi aktual, skenario 1, 2, dan 3 tahun 2010-2025

Perbandingan penyerapan TK pada kondisi aktual, skenario 1, 2, dan 3 (Gambar 15) menunjukkan bahwa penyerapan TK terbanyak pada skenario 1. Penyerapan TK tertinggi pada tahun 2016 sebesar 95.302. Secara keseluruhan penyerapan TK (pada skenario 1) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 penyerapan TK sebesar 82.256 TK dan pada tahun 2025 sebesar 94.284 TK. Luas lahan (skenario 1) memberikan kontribusi terbesar bagi penyerapan TK.



Gambar 15
Perbandingan penyerapan TK di Jawa Timur pada kondisi aktual, skenario 1, 2, dan 3 tahun 2010-2025

Perspektif kebijakan terhadap Efektivitas Kebijakan RIGN

Kebijakan dan efektivitas dalam peningkatan produksi gula

Sebagai salah satu kebutuhan pokok, keberadaan gula diharapkan dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan GKP nasional dipenuhi dengan cara melakukan impor. Hal ini terjadi disebabkan ketidakseimbangan penyediaan dan kebutuhan gula. Mengingat permintaan gula diperkirakan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan industri makanan dan minuman sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan produksi GKP. Sejalan dengan penelitian Asmarantaka et al (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan permintaan gula yang tidak dibarengi peningkatan produksi pada masa yang akan datang akan mengancam industri gula nasional karena gula impor akan mengalahkan gula dalam negeri yang umumnya mempunyai kualitas lebih rendah. Jika produksi gula tidak ditingkatkan sesuai dengan permintaan gula di dalam negeri, maka negara kita akan tergantung pada gula impor dan bahkan hal itu akan mengancam industri gula nasional yang tidak efisien dalam memproduksi gula (Subiyono, 2013).

Berdasarkan hasil analisis dampak kebijakan RIGN terhadap peningkatan GKP, diperoleh bahwa peningkatan GKP tertinggi diperoleh dari simulasi dengan menggunakan skenario 3 (peningkatan rendemen 2,41%). Tercatat produksi GKP pada tahun 2025 dengan menggunakan skenario 3, diprediksi sebesar 2,36 juta ton. Lebih tinggi dibandingkan skenario 1 yakni sebesar 2,31 juta ton dan skenario 2 yakni sebesar 2,34 juta ton. Skenario peningkatan rendemen memiliki kinerja lebih baik dibandingkan skenario peningkatan lahan dan peningkatan produktivitas. Skenario peningkatan rendemen berhasil meningkatkan produksi gula lebih tinggi dibanding skenario 1 (peningkatan lahan) dan skenario 2 (peningkatan produktivitas). Hasil analisis menyatakan bahwa kebijakan RIGN melalui peningkatan rendemen efektif meningkatkan produksi GKP lebih tinggi dibanding kebijakan peningkatan lahan dan produktivitas, tetapi belum mampu memenuhi target produksi GKP.

Pentingnya peningkatan rendemen dalam upaya meningkatkan produksi gula ditunjukkan oleh penelitian (Nugrahapsari, 2013, Trisnawati et al. 2012, Yunitasari et al. 2015 dan Yunitasari, 2015). Didukung oleh penelitian Malian et al (2004) yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas dan rendemen tebu sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas gula dan pendapatan petani tebu.

Peningkatan rendemen bukan saja dilakukan hanya dari sisi *on farm*, tapi juga dari sisi *off farm*. Oleh karena itu, upaya peningkatan rendemen harus dilakukan secara bersama sama baik dari sisi *on farm* maupun *off farm*. Benih yang baik, cara tanam yang baik tapi tidak diikuti dengan proses tebang-muat-angkut yang dijadwalkan juga akan membuat rendemen mengalami susut. Begitu pula kapasitas giling (mesin) yang tidak memadai juga akan membuat rendemen menjadi turun. Upaya untuk meningkatkan rendemen, antara lain:

1. Perubahan teknologi melalui benih unggul dan mekanisasi diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan menghemat penggunaan sumberdaya (*input*) (Asmarantaka 2012).
2. Manajemen tebang, muat dan angkut (TMA) yang baik
Tujuan utama manajemen tebang, muat dan angkut adalah mendapatkan tebu giling yang masak, bersih dan segar (MBS) sebanyak banyaknya sejak ditebang hingga digiling dalam tempo yang secepatnya (P3GI 2008). Susutnya kadar gula terbesar adalah saat proses penebangan sampai pabrik. Semakin lama tersebut menunggu antrian, maka kadar susut semakin besar.

3. Peningkatan efisiensi pabrik
Susilohadi *et al.* (2012) menyatakan bahwa peningkatan efisiensi di tingkat usahatani dan pabrik merupakan hal yang harus diprioritaskan. Perbaikan sistem pabrik berkontribusi sebesar 30% terhadap peningkatan rendemen.
4. Secara konsisten meningkatkan keberlanjutan program perkreditan, subsidi atas bunga kredit atau Kredit ketahanan Pangan dan Energi Tebu Rakyat (KKPE-TR), dan bongkar keprasan (Suhada, 2012). Pemberian kredit dengan bunga rendah diharapkan dapat membantu petani dalam memelihara tanaman tebu dan melakukan bongkar keprasan. Mengingat biaya untuk melakukan bongkar keprasan dan tanam tebu baru, sangat tinggi.
5. Adanya jaminan harga minimal bagi petani. Perkebunan tebu di Jawa Timur sebagian besar pengusahaannya dilakukan oleh petani tebu (TR), sehingga dengan adanya jaminan harga minimal, petani tebu mendapatkan kepastian harga akan tebu yang dihasilkan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani dan produksi gula.
6. Menjaga agar harga gula petani diatas HPP. Fakta historis: Produktivitas dan produksi gula serta perkembangan area tebu sangat dipengaruhi oleh harga relatif gula (Tohariswan *et al.* 2013).

Kebijakan dan efektivitas dalam peningkatan penyerapan TK

Tanaman tebu sebagai salah satu penghasil gula merupakan tanaman semusim yang banyak ditanam di daerah pedesaan. Hal ini mengingat PG sebagai tempat untuk menggiling tebu (menghasilkan gula) berada di daerah pedesaan (perbatasan antar kabupaten). Kondisi ini untuk memudahkan transportasi dari lahan perkebunan tebu menuju PG, untuk meminimalisir susutnya kadar gula karena proses antrian yang panjang saat penggilingan, dan jarak yang terlalu jauh.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan TK tertinggi ditunjukkan melalui kinerja peningkatan luas lahan (skenario 1). Simulasi dengan menggunakan skenario 1 menunjukkan bahwa penyerapan TK pada tahun 2025 diprediksi sebesar 94.284 TK lebih tinggi dibanding skenario 2 (peningkatan luas lahan) dan skenario 3 (peningkatan rendemen) sebesar 94.098 TK.

Semakin lebar luas lahan, maka tenaga kerja yang bisa terserap juga semakin banyak. Begitu pula dengan penyerapan TK di PG. Selain karyawan tetap, kebutuhan akan karyawan tidak tetap dalam rangka menunjang proses produksi pada musim panen juga mengalami peningkatan. Hasil analisis menyatakan bahwa kebijakan RIGN melalui peningkatan luas lahan efektif menyerap TK lebih banyak dibanding peningkatan produktivitas dan rendemen. Peningkatan luas lahan akan lebih baik, jika ditunjang dengan serangkaian kebijakan pendukung dan upaya-upaya peningkatan luas lahan.

Untuk menunjang peningkatan luas lahan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pada saat ini peningkatan luas lahan telah dilakukan dengan pengembangan lahan tebu di pulau Madura, pembangunan PG di Glenmore- Banyuwangi yang akan beroperasi pada tahun 2016 (Detik a, 2015) dan investasi PG yang dilakukan oleh PT. Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Jawa Timur (Detik b, 2015). PT. KTM diprediksi membutuhkan TK baru sebesar 1200 orang.
2. Pemerintah melakukan Pelepasan Ex HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi), melalui tahap permohonan, persetujuan dan SK Pelepasan Menhut (Kementerian Pertanian, 2012).
3. Menetapkan Goal (target) luasan lahan tebu di Jawa Timur. Peningkatan luas areal memang selalu mengalami keterbatasan lahan. Oleh karena itu, perluasan areal tebu ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan

tersebut berupa target pada luas lahan di Jawa Timur. Selain dari sisi pemerintah, juga berasal dari sisi petani tebu. Jika petani tebu merasa apa yang diusahakannya mendatangkan hasil, maka pada masa yang akan datang, petani tebu akan mengusahakan tanaman tebu (Disbun Jatim, 2014). Hal ini berarti perluasan lahan perkebunan tebu. Sehingga kebijakan harga minimal perlu diterapkan.

Dampak jika pemerintah menerapkan kebijakan RIGN, yang terjadi: 1) peningkatan produksi gula meningkat. Hal ini berarti peningkatan bagi hasil antara petani tebu dan PG; 2) penyerapan TK juga meningkat, yang berarti terdapat aliran pendapatan dari sub sektor perkebunan tebu. Aliran pendapatan tersebut akan memberikan dampak pada pembangunan pertanian khususnya perkebunan tebu dan pada wilayah pedesaan. Terdapat efek pengganda dalam peningkatan pendapatan dan tanaman tebu sebagai penghasil gula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan dengan skenario 3 (peningkatan rendemen) memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan skenario 1 (peningkatan luas lahan) dan skenario 2 (peningkatan produktivitas) dalam meningkatkan produksi GKP. Tercatat produksi GKP pada tahun 2025 dengan menggunakan skenario 3, diprediksi sebesar 2,36 juta ton. Lebih tinggi dibandingkan skenario 1 yakni sebesar 2,31 juta ton dan skenario 2 yakni sebesar 2,34 juta ton.

Kebijakan dengan skenario 1 (peningkatan luas lahan) memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan skenario 2 (peningkatan produktivitas) dan skenario 3 (peningkatan rendemen) dalam menyerap TK. Simulasi dengan menggunakan skenario 1 menunjukkan bahwa penyerapan TK pada tahun 2025 diprediksi sebesar 94.284 TK lebih tinggi dibanding skenario 2 (peningkatan luas lahan) dan skenario 3 (peningkatan rendemen) sebesar 94.098 TK.

Kebijakan RIGN melalui skenario 3 (peningkatan rendemen) efektif meningkatkan produksi GKP, tetapi belum mampu memenuhi target produksi GKP. Sedangkan penyerapan TK melalui peningkatan luas lahan efektif menyerap TK lebih banyak.

Saran

1. Pemerintah perlu memperketat keseimbangan ketersediaan GKP agar tidak melakukan impor gula disaat terjadi penumpukan gula di Jawa Timur.
2. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan melakukan pengembangan model lebih detail dengan memasukkan variabel penduduk sebagai penyeimbang dalam sisi permintaan.
3. Jaminan dari pemerintah bahwa petani tebu (TR) mendapatkan jaminan harga minimal.
4. Ketersediaan data sangat penting dalam proses pembuatan model dalam suatu penelitian, khususnya data-data pada beberapa variabel/elemen kunci yang termasuk dalam sistem pergulaan di Jawa Timur. Diharapkan pihak-pihak terkait memiliki data yang representatif sebagai informasi untuk mengetahui kondisi pergulaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia [P3GI]. 2008. Konsep Peningkatan Rendemen Untuk Mendukung Program Akselerasi Industri Gula Nasional [Internet]. [diunduh 2012 Oktober 29]. Tersedia pada: <http://sugarresearch.org/index.php?s=Konsep+Peningkatan+Rendemen+Untuk+Mendukung+Program+Akselerasi+Industri+Gula+Nasional+&x=0&y=0>.
- Asmarantaka & Ratna, W. (Eds.). (2012). *Usaha tani tebu dan daya saing industri gula di Indonesia: ekonomi gula*. Jakarta: PT. Gramedia, 31-60.
- Cahyani, U,. 2008. Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Gula di Indonesia, Program Studi manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, IPB.
- Detik a. 2015. Proyek Pabrik Gula Terbesar di RI Siap Beroperasi 2016. <http://m.detik.com/finance/read/2015/10/05/175836/3036439/4/proyek-pabrik-gula-terbesar-di-ri-siap-beroperasi-2016>. Diunduh 5 Oktober 2015.
- Detik b. 2015. Pabrik Gula Baru Bakal Hadir di Jawa Timur. <http://m.detik.com/finance/read/2015/11/09/193836/3066334/1036/pabrik-gula-baru-bakal-hadir-di-jawa-timur>. Diunduh tanggal 11 November 2015.
- Dewan Gula Indonesia [DGI]. 2014. Produksi Gula di Indonesia tahun 2007-2013
- Dinas Perkebunan Jawa Timur [Disbun]. 2014. Jatim Capai Areal Tebu Tertinggi dalam Sejarah Pertebaran. Diperoleh tanggal 29 Juni 2015, dari <http://disbun.jatimprov.go.id/berita.php?id=250>.
- Dinas Perkebunan [Disbun]. 2011. Pembangunan Pabrik Gula Baru di Jawa Timur. Haruskah? Dinas Perkebunan Jawa Timur. <http://www.disbun.jatimprov.go.id/berita.php?id=59>. Diunduh 11 Februari 2015.
- Dinas Perkebunan Jatim [Disbun]. 2015. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan dalam Kurun Waktu 2010-2014. www.disbun.jati.prov.go.id/arealtanaman.php. Diunggah 1 November 2015.
- Dinas perkebunan Jatim [Disbun]. 2015. Penyerapan Tenaga Kerja dalam Kurun Waktu 2008-2013. www.disbun.jatimprov.go.id/tenagakerja.php. Diunduh 5 nop 2015.
- Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Ginandjar GR. 2012. Pengalihan Pabrik GKP Menjadi Pabrik GKM Sebagai Solusi Penanganan Permasalahan Gula Nasional. Di dalam: Bayu Krisnamurthi, editor. *Ekonomi Gula*. Jakarta (ID): PT Gramedia. Hlm 259-270.
- Kementerian BUMN. 2011. Revitalisasi Industri Gula BUMN tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian Pertanian. 2013. Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045: Pertanian BioIndustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan, Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian: Jakarta.

- Muhammadi, et al. 2001. Analisis Sistem Dinamis: Lingkungan Hidup, Sosial Ekonomi, Manajemen, UMJ Press, Jakarta.
- Nugrahapsari, R.A. 2013. Model swasembada Gula Kristal Putih (GKP) Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamik. Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Priyono. 2008. Analisis Kebijakan Industri Gula Nasional Dengan Model Ekonometrika. *Jurnal Perencanaan Iptek BPPT* [Internet]. [diunduh 2012 Oktober 29]; 2 (8): 1-11. Tersedia pada: [http://isjd.pdii.lipi.go.id / index.php / Search.html?act = tampil&id = 71466&id = 72](http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=71466&id=72).
- Sterman, John D. 2000. *Business Dynamics: System Thinking and Modelling for a Complex World*. USA (US): Mcgraw-Hill.
- Subiyono, 2013. Strategi terpadu Membangun Kembali Kejayaan Industri Berbasis Tebu di Indonesia. Disampaikan pada Kuliah Umum "Integrasi Industri Gula Nasional" di Institute Pertanian Bogor. 12 Juni 2013.
- Suhada, B. (2012). Strategi peningkatan produktivitas dalam mendukung kebijakan kluster industri gula tebu di Indonesia. *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor, IPB.
- Susilohadi, G., Herawati, Budiarti, N., Feryanto (Eds.). (2012). *Integrasi antara kebijakan sosial ekonomi dan aplikasi teknologi proses produksi di industri gula: ekonomi gula*. Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta, 337-360.
- Toharisman, A., Triantarti., Hasan, F. (2013). Rise and fall of the Indonesian sugar industri. *Proc. Intl. Soc. Sugar Cane Technol.*, Vol. 28.
- Trisnawati N, Febrianah L, Asrina N, Hidayat R. 2012. Pemetaan Luas Kebun Produksi dan Penentuan Varietas Tebu untuk Optimasi Kinerja Pabrik gula. Di dalam: Bayu Krisnamurthi, editor. *Ekonomi Gula*. Jakarta (ID): PT Gramedia. hlm 361-376.
- Yunitasari D, DB Hakim, B Juanda, R Nurmalina. 2015. Menuju Swasembada Gula Nasional: Model kebijakan untuk meningkatkan Produksi gula dan Pendapatan Petani tebu di Jawa Timur (Achieving National Sugar Self Sufficiency: A Policy Model to Increase Sugar production and Boost Sugar Cane Farmer's). JEKP No. 10/JEKP/VII/2015. Jakarta.
- Yunitasari, D. 2015. Model Pengembangan Agroindustri Gula Tebu sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Wilayah di Jawa Timur, Disertasi, Institut Pertanian Bogor.
- Zaini A. 2011. Analisis ekonomi politik swasembada gula Indonesia: kombinasi model oligopolistik dinamik dan fungsi preferensi politik. *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

THE ANALYSIS OF LEADING ECONOMIC ACTIVITY CATEGORIES IN THE KEDIRI DISTRICT

Faisol

Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

e-mail:

ABSTRAK

This study aims to identify any economic sector that includes the leading sectors (base) and not leading sectors (nonbasis), analyze the growth and competitiveness of the economic sectors in the regency of Kediri, and formulate government policies in the district of Kediri in prioritizing and improving leading economic activity category. This study uses time series data of PDRB Kediri Regency East Java. The analytical tools used in this study are the Location Quotient (LQ), and Shift Share.

Results of Location Quotient (LQ), shows that the sectors of the economy included in the leading sectors in Kediri in the period 2010-2014 are eight sectors, namely agriculture, forestry and fishing sector, construction sector, retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles sector, real estate sector, the sector of administration, defense and compulsory social security, education sector, the sector of human health and social work activities, and other service activities sectors.

While the economic sectors which includes nonbasis sectors are nine sectors, namely mining and quarrying sector, manufacturing, the water supply, sewerage, waste management, waste and remediation activities sector, transportation and storage sector, accommodation and food service activities, information and communication sector, financial and insurance activities, and business activities sector.

Results of the analysis of the Shift Share indicate that the economic sectors that experienced progressive growth and have competitiveness are in the construction sector, the sector of retail trade, repair of vehicles and motorcycles, transportation and storage sector, and the sector of information and communication.

The Result of the comparison between net shift (PB) and competitiveness (PPW), also the result of LQ, the formulation of government policy of Kediri district is able to prioritize and develop the construction sector and the sector of retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, because in addition to having a shift that is progressive , the sector also has a good competitiveness.

Keywords: Growth, Leading sector, Location Quotient and Shift Share.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. (Susanti et al, 2007)

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Selanjutnya Susanti menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam era otonomi daerah, banyak kabupaten/kota yang memfokuskan pada pemanfaatan potensi unggulan sebagai ladang peningkatan pendapatan asli dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah (Buhana dan Masyhuri dalam Yeni Marlina, 2014).

Pembangunan daerah selalu memprioritaskan usaha-usaha yang mendukung guna membangun serta memperkuat sektor-sektor ekonomi di setiap wilayahnya. Menurut Badan Pusat Statistik, merujuk pada KBLI 2009 sektor ekonomi tersebut terbagi menjadi 17 kategori kegiatan ekonomi (BPS Kabupaten Kediri, 2015)

Dalam hal laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara keseluruhan maupun per sektor dapat dilihat dari data PDRB suatu daerah yang disajikan atas harga konstan. Pergerakan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh 17 kategori kegiatan ekonomi yang telah dibahas diatas. Berbagai kategori kegiatan ekonomi saling berkaitan antara satu sama lain guna memajukan perekonomian pada suatu daerah tertentu.

Adanya keanekaragaman kondisi geografi dan fisiknya pada suatu daerah menyebabkan perbedaan pada potensi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik masing-masing daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, seharusnya pemerintah daerah harus lebih leluasa untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya agar tercapai pembangunan nasional yang nantinya akan memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. Pemerintah daerah serta masyarakatnya harus memiliki niat yang kuat, semangat serta usaha yang keras agar dapat meningkatkan pembangunan daerahnya yang berlandaskan pada aturan yang berlaku. Hal itulah yang terlihat dan seharusnya ditingkatkan di daerah Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan angka sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2011 tercatat sebesar

1.478.103 jiwa, terdiri dari laki-laki 731.222 jiwa atau 49,47% dan perempuan 746.881 jiwa atau 50,53%. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2014 hasil susenas sebesar 1492.585 jiwa dengan rincian 755.628 jiwa penduduk laki-laki dan 736.957 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 103 %, serta tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.076 jiwa/Km².

Secara administrasi Kabupaten Kediri termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan kedudukannya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, sekaligus pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan peranan berbagai pelaku ekonomi yang ada di wilayahnya. Perekonomian Kabupaten Kediri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu peningkatan tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1. Menunjukkan peningkatan PDRB Kabupaten Kediri atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Kediri Atas Harga Konstan 2010 menurut
Lapangan Usaha 2010-2014 (dalam Juta rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kediri				
	2010	2011	2012	2013	2014
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,875,423.1	5,160,573.1	5,456,381.7	5,562,745.8	5,729,986.5
B Pertambangan dan Pengalihan	332,985.3	354,499.3	359,025.7	364,896.0	372,303.8
C Industri Pengolahan	3,589,198.6	3,788,373.3	3,958,273.7	4,138,138.0	4,392,590.6
D Pengadaan Listrik dan Gas	14,589.7	15,895.5	17,172.9	17,533.2	17,554.6
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,623.4	11,366.6	12,019.4	12,865.5	13,217.9
F Konstruksi	1,676,606.3	1,791,683.3	1,924,867.8	2,081,708.6	2,205,395.2
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,501,885.5	3,761,107.4	4,063,983.0	4,421,628.0	4,673,195.8
H Transportasi dan Pergudangan	299,531.2	324,434.3	352,074.7	385,587.6	422,548.7
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	224,734.4	241,060.1	256,179.3	274,804.3	293,634.6
J Informasi dan Komunikasi	871,545.3	949,180.2	1,050,559.3	1,176,449.2	1,300,912.2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	295,021.7	320,182.5	350,194.7	388,479.1	414,005.6
L Real Estate	357,707.6	388,025.0	414,768.7	444,911.3	474,695.1
M,N Jasa Perusahaan	52,913.3	55,689.5	59,091.7	64,173.7	68,828.9
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792,851.6	821,262.7	847,271.4	868,278.9	876,004.3
P Jasa Pendidikan	887,592.8	915,848.5	978,650.2	1,041,021.7	1,105,194.7
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,786.6	147,351.5	161,572.0	172,911.3	184,895.8
R,S,T,U Jasa lainnya	341,464.4	261,784.7	382,050.2	407,927.6	435,645.2
PDRB	18,254,460.8	19,308,317.5	20,644,136.4	21,824,059.8	22,980,609.5

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2015

Pada Tabel 1. PDRB Kabupaten Kediri selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, yaitu pada tahun 2010 atas harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 18,254,460.8 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan

menjadi sebesar 22,980,609.5 juta rupiah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin baiknya kondisi perekonomian Kabupaten Kediri.

PDRB Provinsi Jawa Timur pun selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, yaitu pada tahun 2010 atas harga konstan 2010 adalah sebesar Rp. 990,671,515,100 juta, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1,262,700,209,900. Jika kita melihat dari segi PDRB setiap tahunnya terus meningkat dan harapannya Pemerintah Daerah meningkatkan perekonomian Kabupaten Kediri per sektor atau per lapangan usahanya terutama dengan memprioritaskan sektor yang termasuk ke dalam sektor basis (unggulan).

Tabel 2
PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Provinsi Jawa Timur				
	2010	2011	2012	2013	2014
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	133,504,558,600	138,870,090,300	146,002,574,500	150,463,721,800	155,924,122,100
B Pertambangan dan Pengalihan	54,020,529,100	58,140,328,900	58,287,946,900	59,049,990,600	61,204,885,000
C Industri Pengolahan	292,708,387,300	306,072,358,200	326,681,766,400	345,794,556,200	372,267,099,200
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,491,977,300	4,404,965,600	4,259,039,300	4,382,315,400	4,489,614,700
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,075,880,800	1,171,307,900	1,182,012,000	1,231,047,200	1,234,130,900
F Konstruksi	89,693,031,600	95,157,734,800	102,250,924,900	110,485,451,600	116,498,229,900
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	174,755,502,200	190,771,670,600	206,433,668,700	172,584,453,600	229,303,836,100
H Transportasi dan Pergudangan	27,082,430,000	29,399,869,500	31,528,720,600	34,241,210,000	36,433,431,800
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,116,991,700	51,667,022,000	54,601,234,900	57,684,939,200	62,807,795,500
J Informasi dan Komunikasi	47,548,308,800	51,881,621,900	58,299,177,700	65,313,946,900	69,455,097,100
K Jasa Keuangan dan Asuransi	22,070,507,700	24,088,324,500	26,668,019,000	30,444,564,900	32,561,854,500
L Real Estate	16,306,301,000	17,737,706,400	19,153,832,800	20,565,057,900	21,998,293,500
M,N Jasa Perusahaan	7,774,011,700	8,156,661,600	8,416,878,100	9,044,149,900	9,815,001,200
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,536,090,600	27,823,812,200	28,210,088,400	28,564,749,000	28,729,584,500
P Jasa Pendidikan	24,944,810,800	26,494,054,700	28,789,366,700	31,265,455,400	33,290,687,000
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,408,941,900	6,353,041,600	7,033,055,900	7,592,820,900	8,212,849,800
R,S,T, U Jasa lainnya	15,633,254,000	16,211,203,300	16,666,332,500	17,517,933,500	18,473,697,100
PDRB	990,671,515,100	1,054,401,774,000	1,124,464,639,300	1,146,226,364,000	1,262,700,209,900

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

Hal untuk memprioritaskan sektor unggulan sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan yang efisien. Kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian wilayah dapat diperkirakan melalui serangkaian teori yang secara umum dikenal teori pembangunan wilayah. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori basis ekonomi yaitu teori LQ dan Analisis *Shift Share*.

Sektor perekonomian yang sangat beragam di Kabupaten Kediri adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. Peran dan fungsi setiap sektornya terus meningkat seiring peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Di Kabupaten Kediri itu sendiri memiliki potensi yang beraneka ragam. Dari mulai sektor pertaniannya yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, cabe kecil-besar, bawang merah, kacang panjang, terong dan lain lain. Produk

unggulan di Kabupaten Kediri adalah gula merah, madu, melinjo, nanas dan mangga podang.

Berbagai sektor masih tercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Dimungkinkan ada sektor-sektor ekonomi lainnya yang lebih unggul dan berpotensi dalam meningkatkan perekonomian selain hal-hal diatas. Perlu adanya spesifikasi antara sektor ekonomi yang termasuk ke dalam sektor unggulan (basis) dan nonunggulan (nonbasis).

Jika dilihat dari PDRB dari tahun ke tahunnya semua sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemajuan tersebut dan harapannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memajukan sektor-sektor ekonomi tersebut. Tetapi, jika kita melihat dari segi APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) Pemerintah tidak mungkin memajukan semua sektor ekonomi yang ada dengan keterbatasan anggaran yang ada pada APBD Kabupaten Kediri. Maka dari itu perlu adanya kebijakan untuk memprioritaskan sektor ekonomi yang termasuk kedalam sektor ekonomi unggulan yang harapannya akan meningkatkan pula sektor ekonomi nonunggulan lainnya.

Hal ini yang menyebabkan betapa pentingnya menspesifikasikan dan memprioritaskan sektor unggulan di Kabupaten Kediri sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan potensi sektor-sektor unggulan kita juga berfokus pada daya saing dan pertumbuhan sektor unggulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu perhitungan dan analisis potensi dan daya saing sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB periode 2010-2014. Dengan hal tersebut maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengidentifikasi sektor ekonomi apa saja yang termasuk sektor unggulan (basis) dan nonunggulan (nonbasis) di Kabupaten Kediri. Untuk menganalisis pertumbuhan dan daya saing sektor sektor ekonomi di Kabupaten Kediri.

LANDASAN TEORI

Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut Meier dalam Kuncoro (2010), Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolute" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakatnya. Sedangkan Arsyad (2011) menjelaskan pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Today dalam Arsyad (2011) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), 2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Selanjutnya Arsyad menjelaskan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Mankiw (2007:181) standar materi kehidupan telah meningkat secara mengesankan sepanjang waktu bagi sebagian keluarga di banyak Negara. Perkembangan standar materi ini berasal dari pendapatan yang terus menerus meningkat, yang memungkinkan orang mengonsumsi jumlah barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam jenisnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan perbandingan data produk domestik bruto (GDP), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian dari tahun yang dihitung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Tarigan (2014), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah yang digambarkan oleh kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini juga yang nantinya akan menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan pula dengan seberapa besar bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Setiap negara akan selalu menargetkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada setiap daerahnya, karena hal itu menggambarkan kemakmuran di daerah tersebut.

Teori Ekonomi Basis

Pada umumnya teori basis ekonomi menjelaskan bahwasannya faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi ini, mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besar kecilnya ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2014). Pengertian ekspor dalam ekonomi regional mencakup semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah, dan menjual produk atau jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara tersebut maupun ke luar negeri.

Teori basis ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu sektor basis (unggulan) dan sektor nonbasis (nonunggulan). Sektor basis (unggulan) adalah sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah tersebut dan wilayah lainnya. Sektor basis ini merupakan satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhannya alamiahnya, karena kegiatan ini adalah kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah (Tarigan, 2014).

Menurut Glasson dalam Hendriyani (2012) diperlukannya metode *Location Quotient* guna menentukan apakah sektor tersebut basis (unggulan) atau tidak. Menurutnya, semakin banyak sektor unggulan dalam suatu wilayah maka akan menambah arus pendapatan wilayah tersebut. Kemudian jika semakin banyak sektor unggulan dalam suatu daerah maka akan menimbulkan kenaikan pula dalam volume sektor nonunggulan.

Konsep Sektor Unggulan (Basis)

Sektor unggulan adalah satu grup kategori kegiatan ekonomi yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Menurut Tarigan (2014) menjelaskan sektor unggulan sangat berperan penting pada suatu pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat pada besar

kecilnya pengaruh serta peranannya terhadap pembangunan tersebut, diantaranya sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, Sektor unggulan tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, Sektor unggulan tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan Sektor unggulan tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Arsyad (2011) Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Potensi suatu daerah dapat menjadi faktor pembeda pada tingkat pembangunan suatu daerah yang berimbang terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Metode analisis LQ (*Location Quotient*)

Menurut Tarigan (2014), Metode LQ ini adalah metode yang membandingkan besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor /industri tersebut secara nasional. Analisis ini merupakan analisis yang sederhana dan manfaatnya juga tidak begitu besar yaitu hanya melihat nilai LQ yang berada diatas 1 atau tidak. Analisis ini sangat menarik bila dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Metode ini dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah atas terhadap pendapatan semua sektor di daerah atasnya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah atas terhadap pendapatan semua sektor di daerah atasnya.

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka sektor i dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan. Sedangkan jika nilai LQ < 1 maka sektor i dikategorikan sebagai sektor non-basis atau sektor nonunggulan.

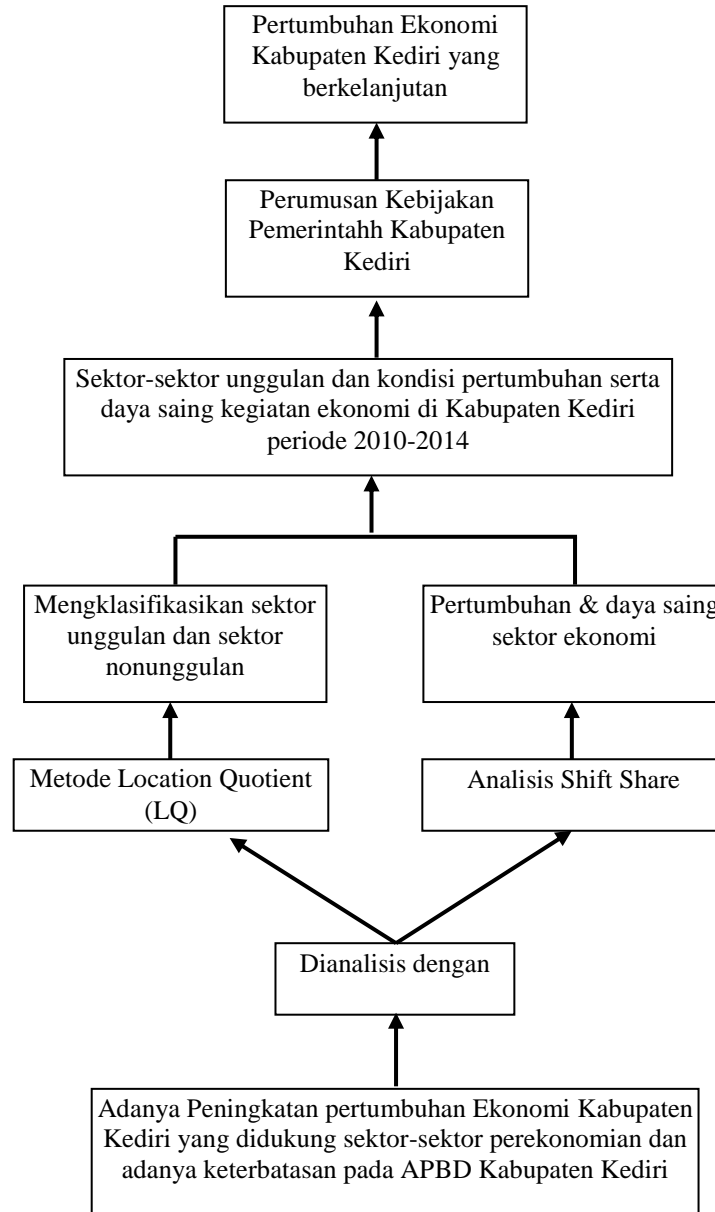
Metode analisis SS (*Shift Share*)

Tarigan (2014) menjelaskan bahwa analisis *Shift Share* membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor/industri di suatu daerah dengan wilayah nasional secara lebih tajam. Metode ini memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam metode LQ. Analisis SS menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Pada umumnya analisis *Shift Share* (SS) ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Selain itu, dapat juga melihat dalam daerah bawah (Kabupaten Kediri) sektor-sektor ekonomi mana saja yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling besar terhadap perekonomian daerah atasnya (Provinsi Jawa Timur) dan juga untuk mengetahui sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di masing-masing wilayah bawahnya. Kegunaan lainnya, yaitu dapat melihat perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya dan

melihat perbandingan laju sektor-sektor perekonomian disuatu wilayah dengan laju pertumbuhan nasional serta sektor-sektornya.

Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010 pada periode tahun 2010-2014, serta data-data lain yang mendukung. Data ini diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Kediri, instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, bahan-bahan lain dari perpustakaan dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode LQ (*Location Quotient*) dan analisis SS (*Shift Share*). Dalam penelitian ini, akan membahas sektor yang termasuk basis dan non-basis, juga membahas sektor-sektor mana saja yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan dan untuk mengetahui sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat dan memiliki daya saing di Kabupaten Kediri. Maka dari itu, analisis yang tepat untuk penelitian ini yaitu dengan metode LQ (*Location Quotient*) dan analisis SS (*Shift Share*) dan pengolahan datanya menggunakan program *Microsoft Excel 2007*.

Analisis LQ (*Location Quotient*)

Metode ini digunakan untuk melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Selain itu analisis ini merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah atasnya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara pendapatan di sektor *i* pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor *i* pada daerah atas terhadap pendapatan semua sektor di daerah atasnya. Secara matematis, rumus LQ dapat dituliskan:

$$LQ = \frac{Sib/Sb}{Sia/Sa} \quad (3.)$$

1.)

Keterangan :

Sib = Pendapatan sektor *i* pada daerah bawah (Kabupaten Kediri)

Sb = Pendapatan total semua sektor daerah bawah (Kabupaten Kediri)

Sia = Pendapatan sektor *i* pada daerah atas (Provinsi Jawa Timur)

Sa = Pendapatan total semua sektor daerah atas (Provinsi Jawa Timur)

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka sektor *i* dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan. Nilai LQ yang lebih dari satu tersebut menunjukkan bahwa pangsa pendapatan (tenaga kerja) pada sektor *i* di daerah bawah lebih besar dibanding daerah atasnya dan output pada sektor *i* lebih berorientasi ekspor. Artinya, peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten Kediri lebih besar daripada peranan sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Sebaliknya, apabila nilai LQ < 1 maka sektor *i* dikategorikan sebagai sektor non-basis atau sektor nonunggulan. Nilai LQ yang kurang dari satu tersebut menunjukkan bahwa pangsa pendapatan (tenaga kerja) pada sektor *i* di daerah bawah lebih kecil dibanding daerah atasnya. Artinya, peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten Kediri lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis LQ yaitu :

1. Pola konsumsi rumahtangga di daerah bawah (Kabupaten Kediri) identik sama dengan pola konsumsi rumahtangga di daerah atasnya (Provinsi Jawa Timur)
2. Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur sama besarnya.
3. Setiap penduduk di Kabupaten Kediri mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang sama terhadap pola permintaan barang dan jasa pada tingkat provinsi Jawa Timur.

Analisis SS (Shift Share)

Menurut Budiharsono dalam Marlina (2014), analisis *shift share* merupakan teknik analisis mengenai perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja. Teknik ini melihat perkembangan produksi ataupun kesempatan kerja di satu wilayah di suatu titik waktu. Tujuan analisis *Shift Share* adalah untuk menentukan produktifitas kerja perekonomian daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Pertumbuhan sektor perekonomian di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu:

1. Komponen Pertumbuhan Regional (PR). Komponen PR adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi regional secara umum, perubahan kebijakan, ekonomi regional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau sektor. Bila diasumsikan tidak ada perubahan karakteristik antar sektor dan antar wilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya.
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP). Komponen PP terjadi karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri, dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.
3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Komponen PPW timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan regional pada wilayah tersebut.

Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut dapat ditentukan dan diidentifikasi perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah. Apabila $PP + PPW > 0$ maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke-i di wilayah ke-j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sementara itu, $PP + PPW < 0$ menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ke-i pada wilayah ke-j termasuk pertumbuhannya lambat.

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis *Shift Share* (SS), yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan wilayah yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, wilayah yang akan dianalisis adalah wilayah Kabupaten Kediri.
2. Menentukan indikator kegiatan ekonomi dan periode analisis. Indikator kegiatan ekonomi yang digunakan disini adalah pendapatan yang dicerminkan dari nilai PDRB Kabupaten Kediri dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Sedangkan periode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Menentukan sektor ekonomi yang akan dianalisis. Sektor ekonomi yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah terfokus pada semua sektor ekonomi berdasarkan lapangan usahanya yang terdiri dari 17 kategori kegiatan ekonomi menurut KBLI 2009 yaitu: A). Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B). Pertambangan dan Penggalian C). Industri Pengolahan D). Pengadaan Listrik dan Gas E). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F). Konstruksi G). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H). Transportasi dan Pergudangan I). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J). Informasi dan Komunikasi K). Jasa Keuangan dan Asuransi L). Real Estate. M,N) Jasa Perusahaan. O). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. R,S,T,U) Jasa lainnya yang ada di Kabupaten Kediri

4. Menghitung perubahan indikator ekonomi.

- a) PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor i pada tahun dasar analisis.

$$Y_i \sum_{j=1}^m Y_{ij} \quad (3.)$$

2)

Keterangan:

Y_i = PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor i pada tahun dasar

analisis

Y_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun dasar

analisis

- b) PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor i pada tahun akhir analisis.

$$Y'_i \sum_{j=1}^m Y'_{ij} \quad (3.)$$

3)

Keterangan:

Y'_i = PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor i pada tahun akhir analisis

Y'_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun akhir analisis

- c) Perubahan indikator kegiatan ekonomi dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij} \quad (3.)$$

4)

- d) Persentase perubahan PDRB

$$\% \Delta Y_{ij} = \frac{Y'_{ij} - Y_{ij}}{Y_{ij}} \quad (3.)$$

5)

5. Menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi

Rasio ini digunakan untuk melihat perbandingan PDRB sektor perekonomian disuatu daerah tertentu. Rasio tersebut terdiri dari r_i , R_i dan R_a .

- a) r_i (Rasio PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri)

$$r_i = \frac{Y'_{ij} - Y_{ij}}{Y_{ij}} \quad (3.)$$

6)

Keterangan:

Y_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun dasar analisis

Y'_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun akhir analisis

- b) R_i (Rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Jawa Timur)

$$R_i = \frac{Y'_i - Y_i}{Y_i} \quad (3.)$$

7)

Keterangan:

Y_i = PDRB sektor i wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun dasar analisis

Y'_i = PDRB sektor i wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun akhir analisis

c) Ra (Rasio PDRB pada wilayah Provinsi Jawa Timur)

$$Ra = \frac{Y'_{...} - Y_{..}}{Y_{...}} \quad (3.)$$

8)

Keterangan

$Y_{...}$ = PDRB wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun dasar analisis

$Y'_{..}$ = PDRB wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun akhir analisis

6. Menghitung komponen pertumbuhan wilayah

a) Komponen Pertumbuhan Regional (PR)

$$PR_{ij} = (R_a) Y_{ij} \quad (3.)$$

9)

Keterangan:

PR_{ij} = komponen pertumbuhan regional sektor i untuk wilayah Kab. Kediri

R_a = rasio PDRB pada wilayah Provinsi Jawa Timur

Y_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun dasar analisis

b) Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

$$PP_{ij} = (R_i - R_a) Y_{ij} \quad (3.)$$

10)

Keterangan:

PP_{ij} = komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah Kab. Kediri

R_i = rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Jawa Timur

R_a = rasio PDRB pada wilayah Jawa Timur

Y_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kab. Kediri pada tahun dasar analisis

Ketentuan setelah menghitung komponen PP, yaitu sebagai berikut:

a) Jika, $PP_{ij} < 0$ maka menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri laju pertumbuhan lambat

b) Jika $PP_{ij} > 0$ maka menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri laju pertumbuhan cepat.

c) Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

$$PPW_{ij} = \frac{(r_i - R_i)}{R_i} Y_{ij} \quad (3.)$$

11)

Keterangan:

PPW_{ij} = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah Kabupaten Kediri

r_i = rasio PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri

R_i = rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Jawa Timur

Y_{ij} = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Kediri pada tahun dasar analisis

Jika:

$PPW_{ij} > 0$, maka sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

$PPW_{ij} < 0$, maka sektor i pada wilayah Kabupaten Kediri mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

7. Rumus – rumus lainnya

a) Perubahan PDRB sektor i pada wilayah ke j (Kabupaten Kediri), dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y_{ij} = PR_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij} \quad (3.12)$$

$$\Delta Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij} \quad (3.13)$$

b) Dalam persamaan matematik menjadi:

$$\begin{aligned} \Delta Y_{ij} &= PR_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij} \\ Y'_{ij} - Y_{ij} &= Y_{ij}(R_a) + Y_{ij}(R_i - R_a) + Y_{ij}(r_i - R_i) \end{aligned} \quad (3.14)$$

c) Persentase ketiga pertumbuhan wilayah dirumuskan sebagai berikut:

$$\%PR_{ij} = R_a \quad (3.15)$$

$$\%PP_{ij} = R_i - R_a \quad (3.16)$$

$$\%PPW_{ij} = r_i - R_i \quad (3.17)$$

atau

$$\%PR_{ij} = (PR_{ij})/Y_{ij} * 100\% \quad (3.18)$$

$$\%PP_{ij} = (PP_{ij})/Y_{ij} * 100\% \quad (3.19)$$

$$\%PPW_{ij} = (PPW_{ij})/Y_{ij} * 100\% \quad (3.20)$$

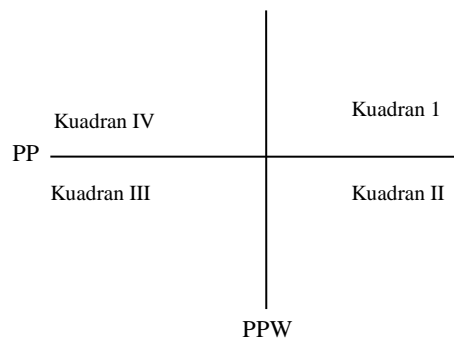
8. Menentukan kelompok sektor ekonomi yang ditentukan berdasarkan pergeseran bersih (PB)

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij} \quad (3.21)$$

21)

9. Menganalisis profil pertumbuhan sektor perekonomian

Untuk menganalisis profil pertumbuhan sektor perekonomiannya dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan empat kuadran yang terdapat pada garis bilangan yaitu:



Gambar 2
Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian

Pada gambar diatas, terdapat garis vertical (PPW) dan garis horizontal (PP) yang mengidentifikasi sektor kegiatan ekonomi dalam Kuadran 1 hingga Kuadran IV yang membentuk 45°. Penjelasan Kuadran I, II, III dan IV, adalah sebagai berikut:

- 1) **Kuadran I**, merupakan kuadran dimana PP dan PPW sama-sama bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat (dilihat dari nilai PP-nya) dan memiliki daya saing yang lebih baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya (dilihat dari nilai PPW-nya).
- 2) **Kuadran II**, menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang ada di wilayah yang bersangkutan pertumbuhannya cepat (PP-nya bernilai positif), tetapi daya saing wilayah untuk sektor tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya kurang baik (dilihat dari PPW yang bernilai negatif).
- 3) **Kuadran III**, merupakan kuadran dimana PP dan PPW nya bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain.
- 4) **Kuadran IV**, menunjukkan bahwa sektor ekonomi pada wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat (dilihat dari PP yang bernilai negatif), tetapi daya saing wilayah untuk sektor tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (dilihat dari PPW yang bernilai positif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Menurut Tarigan (2014), kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis (sektor basis) dan kegiatan non basis (sektor non basis). Sektor basis adalah sektor yang mengekspor barang dan jasa ataupun tenaga kerja ke tempat-tempat di luar batas perekonomian daerah yang bersangkutan. Sektor nonbasis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas-batas daerah itu sendiri. Sektor basis ini merupakan satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhannya, karena kegiatan ini adalah kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah.

Pendekatan metode *Local Quotient* biasanya digunakan untuk mengetahui sektor basis dan sektor non basis di suatu wilayah. Pada penelitian ini, metode LQ dipakai untuk mengetahui sektor basis dan non basis di Kabupaten Kediri. Nilai LQ merupakan indikator untuk menyatakan sektor basis dan nonbasis. Ketika suatu sektor memiliki nilai LQ lebih besar dari satu maka sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis, yaitu artinya peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten Kediri lebih besar daripada peranan sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Hasil Perhitungan analisis LQ menurut pendekatan pendapatan seluruh sektor (KBLI 2009) yaitu ada 17 kategori kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai LQ Sektor Perekonimian Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Ket
		2010	2011	2012	2013	2014	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.98	2.03	2.04	1.94	2.02	B
B	Pertambangan dan Penggalian	0.33	0.33	0.34	0.32	0.33	NB
C	Industri Pengolahan	0.67	0.68	0.66	0.63	0.65	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.20	0.22	0.21	0.21	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.54	0.53	0.55	0.55	0.59	NB
F	Konstruksi	1.01	1.03	1.03	0.99	1.04	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.09	1.08	1.07	1.35	1.12	B
H	Transportasi dan Pergudangan	0.60	0.60	0.61	0.59	0.64	NB
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	NB
J	Informasi dan Komunikasi	0.99	1.00	0.98	0.95	1.03	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	0.73	0.72	0.67	0.70	NB
L	Real Estate	1.19	1.19	1.18	1.14	1.19	B
M,N	Jasa Perusahaan	0.37	0.37	0.38	0.37	0.39	NB
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.62	1.61	1.64	1.60	1.68	B
P	Jasa Pendidikan	1.93	1.89	1.85	1.75	1.82	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.30	1.27	1.25	1.20	1.24	B
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.19	0.88	1.25	1.22	1.30	B

Sumber : BPS Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur, 2015 (diolah)
Keterangan : B (basis) NB (non basis)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat delapan kegiatan ekonomi basis dan sembilan kegiatan ekonomi non basis. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai nilai LQ paling tinggi sebesar 2,002 pada tahun 2014.

Pertumbuhan Total PDRB Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur

Nilai riil PDRB Kabupaten Kediri pada tahun 2010 atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar Rp 18,254,460.8 juta dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp 22,980,609.5 juta sehingga pada periode 2010-2014 terjadi peningkatan dengan pertumbuhan sekitar Rp 4,726,148.7 juta. Persentase pertumbuhan semua sektor perekonomian di Kabupaten Kediri pada periode 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan kontribusi sebesar 27,58 persen (Tabel 5).

Pada Tabel 5 jelas terlihat bahwa presentase pertumbuhan perekonomian tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 49,27 persen. Pada tahun 2010 kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi yang diberikan terhadap PDRB Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp 871,545.3 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp 1,300,912,2 juta, sehingga pada periode 2010 hingga 2014 sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar Rp 429,366.9 juta. Maka dari itu sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Kediri tumbuh pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya penambahan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi, seperti wesel, paket, giro, jasa tabungan, telepon seluler. oleh pemerintah

Kabupaten Kediri. Adapun tabel pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Perubahan PDRB Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usahanya
Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2010 dan 2014 (juta rupiah)

	Lapangan Usaha	2010	2014	△PDRB	Persen
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,875,423.1	5,729,986.5	854,563.4	17.53
B	Pertambangan dan Penggalian	332,985.3	372,303.8	39,318.5	11.81
C	Industri Pengolahan	3,589,198.6	4,392,590.6	803,392.0	22.38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,589.7	17,554.6	2,964.9	20.32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,623.4	13,217.9	2,594.5	24.42
F	Konstruksi	1,676,606.3	2,205,395.2	528,788.9	31.54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,501,885.5	4,673,195.8	1,171,310.3	33.45
H	Transportasi dan Pergudangan	299,531.2	422,548.7	123,017.5	41.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	224,734.4	293,634.6	68,900.2	30.66
J	Informasi dan Komunikasi	871,545.3	1,300,912.2	429,366.9	49.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,021.7	414,005.6	118,983.9	40.33
L	Real Estate	357,707.6	474,695.1	116,987.5	32.70
M,N	Jasa Perusahaan	52,913.3	68,828.9	15,915.6	30.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792,851.6	876,004.3	83,152.7	10.49
P	Jasa Pendidikan	887,592.8	1,105,194.7	217,601.9	24.52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,786.6	184,895.8	55,109.2	42.46
R,S,T,U	Jasa lainnya	341,464.4	435,645.2	94,180.8	27.58
	Total PDRB	18,254,460.8	22,980,609.5	4,726,148.7	27.58

Sumber: BPS Provinsi Kabupaten Kediri, 2015 (diolah)

Persentase pertumbuhan perekonomian terendah adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 10,49 persen. Pada tahun 2010 kontribusi sektor (O) terhadap PDRB Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp. 792,851.6 juta dan meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 876,004.3 juta. Selama periode 2010 hingga 2014 sektor ini meningkat sebesar 83,152.7 juta.

Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Jawa Timur, Pada tahun 2010 nilai riil PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar Rp. 990,671,515,100 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 1,262,700,209,900 (Tabel 6). Sedangkan pada pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar Rp. 272,028 triliun.

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan perekonomian tertinggi adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini pada tahun 2010 memiliki PDRB sebesar Rp. 5,408,941,900 dan meningkat menjadi Rp. 8,212,849,800 di tahun 2014. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah bahkan menurun terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas. Selama periode 2010 hingga 2014 sektor ini menurun sebesar Rp. -2,362 milyar.

Adapun sektor yang memiliki perubahan PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp. 79,55 triliun. Nilai ini didapatkan dari selisih antara PDRB sektor industri pengolahan tahun 2014 sebesar Rp. 372,26 triliun dengan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2010 sebesar Rp. 292,70 triliun.

Tabel 6
Perubahan PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2010 dan 2014 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2014	△PDRB	Persen
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	133,504,558,600	155,924,122,100	22,419,563,500	16.79
B Pertambangan dan Penggalian	54,020,529,100	61,204,885,000	7,184,355,900	13.30
C Industri Pengolahan	292,708,387,300	372,267,099,200	79,558,711,900	27.18
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,491,977,300	4,489,614,700	-2,362,600	-0.05
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,075,880,800	1,234,130,900	158,250,100	14.71
F Konstruksi	89,693,031,600	116,498,229,900	26,805,198,300	29.89
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	174,755,502,200	229,303,836,100	54,548,333,900	31.21
H Transportasi dan Pergudangan	27,082,430,000	36,433,431,800	9,351,001,800	34.53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,116,991,700	62,807,795,500	15,690,803,800	33.30
J Informasi dan Komunikasi	47,548,308,800	69,455,097,100	21,906,788,300	46.07
K Jasa Keuangan dan Asuransi	22,070,507,700	32,561,854,500	10,491,346,800	47.54
L Real Estate	16,306,301,000	21,998,293,500	5,691,992,500	34.91
M Jasa Perusahaan	7,774,011,700	9,815,001,200	2,040,989,500	26.25
N ,O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,536,090,600	28,729,584,500	2,193,493,900	8.27
P Jasa Pendidikan	24,944,810,800	33,290,687,000	8,345,876,200	33.46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,408,941,900	8,212,849,800	2,803,907,900	51.84
R, S, T, U Jasa lainnya	15,633,254,000	18,473,697,100	2,840,443,100	18.17
TOTAL PDRB	990,671,515,100.0 0	1,262,700,209,900 .00	272,028,694,800	27.49

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2015 (diolah)

Rasio PDRB Total dan Sektoral Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

Dalam setiap sektor perekonomian memiliki rasio yang berbeda-beda baik pada PDRB Kabupaten Kediri maupun Provinsi Jawa Timur. Rasio yang dimiliki tiap sektor biasanya terlihat dari nilai R_a , R_i dan r_i . Nilai R_a diperoleh dari selisih antara jumlah PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dengan jumlah PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2010 dibagi dengan jumlah PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2010. Antara tahun 2010-2014, nilai R_a adalah sebesar 0,27 (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 0,27.

Nilai R_i diperoleh dari selisih antara PDRB Provinsi Jawa Timur sektor i pada tahun 2014 dengan PDRB Provinsi Jawa Timur sektor i pada tahun 2010 kemudian dibagi dengan PDRB Provinsi Jawa Timur sektor i pada tahun 2010. Kontribusi pada setiap sektor perekonomian mengalami peningkatan kecuali sektor Pengadaan listrik dan gas, sehingga seluruh sektor perekonomian memiliki nilai R_i yang positif.

Nilai R_i paling besar terdapat pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 0,52. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan sektor kesehatan dan kegiatan sosial adalah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan nilai R_i terkecil bahwa 0 (nol) terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas.. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Rasio PDRB Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur

	Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.27	0.17	0.18
B	Pertambangan dan Penggalian	0.27	0.13	0.12
C	Industri Pengolahan	0.27	0.27	0.22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.27	0.00	0.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	0.15	0.24
F	Konstruksi	0.27	0.30	0.32
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.27	0.31	0.33
H	Transportasi dan Pergudangan	0.27	0.35	0.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.33	0.31
J	Informasi dan Komunikasi	0.27	0.46	0.49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.27	0.48	0.40
L	Real Estate	0.27	0.35	0.33
M,N	Jasa Perusahaan	0.27	0.26	0.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.27	0.08	0.10
P	Jasa Pendidikan	0.27	0.33	0.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.27	0.52	0.42
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.27	0.18	0.28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kab. Kediri, 2015 (diolah)

Dalam hal nilai r_i , ini diperoleh dari selisih antara PDRB sektor i di Kabupaten Kediri tahun 2014 dengan PDRB sektor i di Kabupaten Kediri tahun 2010 dibagi dengan PDRB sektor i di Kabupaten Kediri tahun 2010. Nilai r_i terbesar terdapat pada sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan nilai r_i terkecil terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014.

Analisis *Shift Share* terdiri dari tiga komponen yaitu komponen pertumbuhan regional (PR), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Komponen pertumbuhan regional merupakan pengaruh pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Timur sektor i di Kabupaten Kediri. Pertumbuhan Proporsional (PP) menggambarkan tentang kecepatan pertumbuhan. Semakin tinggi nilai positif PP maka semakin cepat pertumbuhannya. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) memberikan gambaran tentang daya saing. Semakin tinggi nilai PPW maka semakin tinggi daya saingnya. Hasil analisis *shift share* tujuh belas sektor perekonomian Kabupaten Kediri tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Analysis Shift Share 17 sektor perekonomian Kab. Kediri tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha	PR _{ij}	PP _{ij}	PPW _{ij}
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,316,364.24	-520,008.41	35,828
B	Pertambangan dan Penggalian	89,906.03	-47,149.77	-4,966
C	Industri Pengolahan	969,083.62	-10,007.58	-172,159
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,939.22	-4,013.86	2,973
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,868.32	-1,354.50	1,032
F	Konstruksi	452,683.70	40,682.27	27,727
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	945,509.09	131,498.12	78,229
H	Transportasi dan Pergudangan	80,873.42	21,173.58	19,596
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60,678.29	13,130.72	-5,940
J	Informasi dan Komunikasi	235,317.23	162,226.62	27,822
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	79,655.86	59,230.25	-21,256
L	Real Estate	96,581.05	26,640.94	-7,876
M,N	Jasa Perusahaan	14,286.59	-637.61	2,024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	214,069.93	-152,171.55	17,615
P	Jasa Pendidikan	239,650.06	53,240.87	-79,363
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,042.38	31,641.14	-12,170
R,S,T,U	Jasa lainnya	92,195.39	-31,721.30	32,139
	Total	4,928,704.42	-227,600.08	-58,747

Sumber: BPS Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Timur mampu menambah pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kediri sebesar Rp. 4,928,704.4 juta. Nilai PR tertinggi terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 1,316,364.24 juta, yang berarti apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pertumbuhan Provinsi Jawa Timur maka sektor yang paling terpengaruh adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara sektor yang paling kecil terpengaruh oleh perubahan kebijakan Provinsi Jawa Timur atau pertumbuhan Provinsi Jawa Timur adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. sebesar Rp 2,686.32 juta.

Dalam hal pertumbuhan proporsional (PP), diperoleh dari hasil kali antara PDRB Kabupaten Kediri sektor I tahun 2010 dengan selisih antara R_i dan R_a . Sektor yang memiliki nilai PP yang positif ($PP_{ij} > 0$) adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai PP yang tertinggi dengan jumlah Rp. 162,226,2 juta dan mempunyai nilai PPW positif sebesar Rp. 27,822 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi mempunyai pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan sektor lain di Kabupaten Kediri dan termasuk kedalam sektor yang mempunyai daya saing. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai nilai PP yang paling rendah, yaitu negatif Rp. 520,008.41 juta tetapi memiliki PPW yang positif dengan jumlah Rp. 35,828 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain di Kabupaten Kediri tetapi termasuk kedalam sektor yang juga mempunyai daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain pada wilayah Propinsi Jawa Timur.

Nilai PPW yang paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai Rp. 78,229 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain pada wilayah Propinsi Jawa Timur, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, sektor jasa lainnya, sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa perusahaan dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kabupaten Kediri

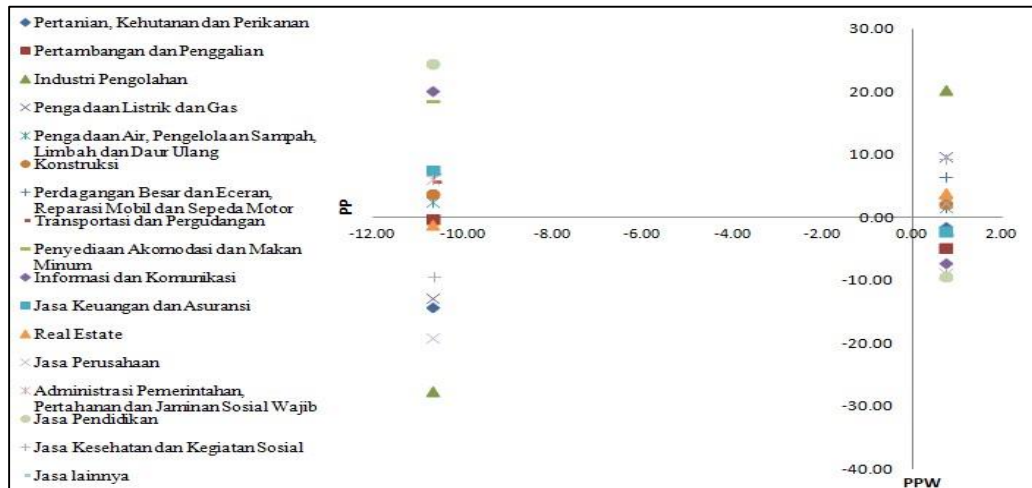
Profil pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Kediri pada tahun 2010-2014 dapat dilihat dengan bantuan empat kuadran yang terdapat pada Gambar 2 / (tabel 9). Nilai yang terdapat pada empat kuadran tersebut diperoleh dari nilai presentase pertumbuhan proporsional (PP) dan nilai presentase pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

Berdasarkan empat kuadran yang berada dalam profil pertumbuhan menurut tujuh belas sektor perekonomian, terdapat empat sektor perekonomian yang berada pada kuadran I yaitu sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat sektor dari tujuh belas sektor perekonomian di Kabupaten Kediri yang mempunyai pertumbuhan cepat sekaligus mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain pada wilayah Provinsi Jawa Timur.

Terdapat lima sektor yang berada pada kuadran II, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor yang berada pada kuadran II berarti mempunyai pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Kediri tetapi mempunyai daya saing yang kurang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain pada wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pada kuadran III terdapat 2 sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang terdapat pada kuadran ini mempunyai pertumbuhan sektor yang lambat dibandingkan dengan sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Kediri dan juga mempunyai daya saing yang kurang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Sementara pada kuadran IV terdapat enam sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa lainnya. Keenam sektor ini mempunyai pertumbuhan yang lambat jika dibandingkan dengan sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Kediri tetapi mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3 berikut menunjukkan profil pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kediri berdasarkan tujuh belas sektor ekonomi.



Gambar 3
Profil Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Kediri
berdasarkan 17 Sektor Ekonomi

Tabel 9
Nilai Persentase PP dan PPW di Kabupaten Kediri

Lapangan Usaha	% PP	% PPW	Kuadran
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-10.67	0.73	IV
Pertambangan dan Penggalian	-14.16	-1.49	III
Industri Pengolahan	-0.28	-4.80	III
Pengadaan Listrik dan Gas	-27.51	20.37	IV
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-12.75	9.71	IV
Konstruksi	2.43	1.65	I
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.76	2.23	I
Transportasi dan Pergudangan	7.07	6.54	I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.84	-2.64	II
Informasi dan Komunikasi	18.61	3.19	I
Jasa Keuangan dan Asuransi	20.08	-7.21	II
Real Estate	7.45	-2.20	II
Jasa Perusahaan	-1.21	3.82	IV
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-19.19	2.22	IV
Jasa Pendidikan	6.00	-8.94	II
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.38	-9.38	II
Jasa lainnya	-9.29	9.41	IV

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri, 2015 (diolah)

Pergeseran Bersih (PB) Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Kediri

Pergeseran bersih (PB) adalah hasil penjumlahan antara nilai pertumbuhan proporsional dan nilai pertumbuhan pangsa wilayahnya pada semua sektor perekonomian. Jika suatu sektor memiliki nilai $PB > 0$ atau nilai positif, maka sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang progressive (semakin meningkat). Sedangkan sektor yang memiliki nilai $PB < 0$ atau bernilai negative, maka sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak progressive. nilai yang negatif.

Tabel 10
Nilai Pergeseran Bersih (PB) 17 sektor perekonomian Kabupaten Kediri
tahun 2010-2014.

	Lapangan Usaha	PB _{ij}	% PB _{ij}
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-484,180	-9.93
B	Pertambangan dan Penggalian	-52,116	-15.65
C	Industri Pengolahan	-182,167	-5.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,041	-7.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-323	-3.04
F	Konstruksi	68,409	4.08
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	209,727	5.99
H	Transportasi dan Pergudangan	40,769	13.61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,190	3.20
J	Informasi dan Komunikasi	190,049	21.81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,974	12.87
L	Real Estate	18,764	5.25
M,N	Jasa Perusahaan	1,386	2.62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-134,557	-16.97
P	Jasa Pendidikan	-26,122	-2.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,471	15.00
R,S,T,U	Jasa lainnya	418	0.12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri , 2015 (diolah)

Melihat pergeseran bersih dari tujuh belas sektor perekonomian terdapat sepuluh sektor perekonomian yang memiliki pertumbuhan progressive (semakin meningkat) yaitu sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Rumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dari hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil metode *Location Quotient* (LQ) diperoleh sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Dalam upaya peningkatan peranan sektor-sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri, Pemerintah seharusnya memprioritaskan sektor unggulan. Sektor unggulan yang perlu diprioritaskan Pemerintah dapat dilihat dalam analisis lanjut yaitu perbandingan pergeseran bersih dan daya saingnya.

Tabel 11
Perbandingan Pergeseran Bersih dan Daya saing Sektor Ekonomi di
Kabupaten Kediri tahun 2010-2014

	Sektor	Peringkat Sektor Basis (LQ)	Dayasaing (PPW)	Pergeseran Bersih (PB)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1	73%	-9.93%
B	Pertambangan dan Penggalian	non basis	-149%	-15.65%
C	Industri Pengolahan	non basis	-480%	-5.08%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	non basis	2037%	-7.14%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	non basis	971%	-3.04%

	Limbah dan Daur Ulang			
F	Konstruksi	9	165%	4.08%
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8	223%	5.99%
H	Transportasi dan Pergudangan	non basis	654%	13.61%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	non basis	-264%	3.20%
J	Informasi dan Komunikasi	non basis	319%	21.81%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	non basis	-721%	12.87%
L	Real Estate	5	-220%	5.25%
M,N	Jasa Perusahaan	non basis	382%	2.62%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	222%	-16.97%
P	Jasa Pendidikan	2	-894%	-2.94%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4	-938%	15.00%
R,S,T,U	Jasa lainnya	6	941%	0.12%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri, 2015 (diolah)

Sektor nonunggulan yang memiliki pergeseran bersih *progressive* dan memiliki daya saing yang baik yaitu sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor unggulan yang memiliki pergeseran *progressive* dan memiliki daya saing yang baik adalah sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa lainnya. Berdasarkan Tabel 11 rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Kediri adalah lebih memprioritaskan dan mengembangkan sektor unggulan konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, karena selain memiliki pertumbuhan yang *progressive*, sektor tersebut juga memiliki daya saing yang baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), sektor-sektor perekonomian yang termasuk kedalam sektor unggulan (basis) di Kabupaten Kediri pada periode 2010-2014 ada sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kediri yang termasuk sektor nonunggulan (non basis) ada delapan sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa perusahaan.
2. Dengan metode analisis *shift share* diperoleh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang *progressive* (semakin meningkat) dan daya saing adalah terdapat pada sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi. (*memiliki PPij > 0 dan PPW > 0*). Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan *progressive* tapi daya saing yang kurang baik adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan

sosial. Sementara sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan lambat tapi mempunyai daya saing adalah sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya.

3. Dengan melihat perbandingan PB dan PPW, juga hasil LQ, maka rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Kediri adalah dapat memprioritaskan dan mengembangkan sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, karena selain memiliki pergeseran yang *progressive*, sektor tersebut juga memiliki daya saing yang baik.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan dapat lebih memprioritaskan sektor basis, juga sektor yang memiliki pertumbuhan yang *progressive*, dan daya saing, yang ada di Kabupaten Kediri guna mengupayakan peningkatan sektor-sektor perekonomian tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan dengan cara mengalokasikan dana yang tepat kepada sektor-sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kediri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan. Pengembangan dan pemanfaatan sektor perekonomian unggulan harus dilakukan dengan maksimal. Penelitian lebih lanjut tentang sektor perekonomian perlu dilakukan dengan data terbaru untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi dan sub sektor unggulan di Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, (2011), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta, BPF.
- Daryanto Arief, Hafizrianda Yundy, (2010), Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan Pertama, Bogor, Penerbit IPB Press.
- Hendriyani, AS Utami, (2012), Analisis Sektor-sektor unggulan pada perekonomian Kabupaten Cirebon, Bogor, IPB.
- Kuncoro, Mudrajad, (2010), Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad, (2014), Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta,
- Mankiw, N. Gregory (2007) Makroekonomi, Edisi keenam, Penerbit Erlangga
- Marliana, Yeni, (2014), Analisis Sektor Unggulan dalam Perekonomian Kota Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik, (2015), Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur 2010-2014, Surabaya, BPS
- _____, (2015), Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri 2010-2014, Kediri, Badan Pusat Statistik
- Tarigan, Robinson, (2014). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Cetakan Ketujuh, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Susanti Hera, et.al, (2007), Indikator-indikator Makkroekonomi, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

KELEMBAGAAN KEUANGAN INFORMAL DI KABUPATEN JEMBER DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

Handriyono, Sebastiana Viphindrartin dan Silvi Asna Prestianawati
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
e-mail: pipin_center@yahoo.com

ABSTRACT

Study on an informal institution in agricultural bases, fisheries and plantation using review of various assessment empirical which have taken place in Jember regency over the past five years. Using the institutional economy approach. Informal financial institutions in villages is very help rural economic activities, because until now this accessibility farmers and servant to formal financial institutions is still difficult. A number of problems generally all activities have to be regulated at a cost of monetary that large enough, do not even affordable. Ethics subsistence still in place for farmers and fishermen. A discovery that can explored among them: (1) in economy institutional with the opportunity cost and benefit approach, namely not only with financial but also the costs and benefits of social in a transaction approach. Concluded that between micro financial institution and depositors there are relationship pattern win-win not win lost. (2) The relationship characteristic is contractual.

Keywords: *micro financial institution, opportunity cost, transaction cost*

ABSTRAK

Kajian mengenai Lembaga Keuangan informal di basis-basis pertanian, perikanan dan perkebunan menggunakan telaah berbagai kajian empiris yang telah dilakukan di Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir. Pendekatan yang dipakai adalah ekonomi kelembagaan. Kelembagaan keuangan informal di pedesaan sangat membantu aktivitas ekonomi pedesaan, karena hingga saat ini aksesibilitas petani dan nelayan ke lembaga keuangan formal masih sulit. Beberapa kendala umumnya semua aktivitas harus diregulasi dengan biaya moneter yang cukup besar, bahkan tak terjangkau. Umumnya etika subsisten masih berlaku bagi petani dan nelayan. Temuan yang bisa dieksplorasi antara lain bahwa: (1) ekonomi kelembagaan dengan pendekatan opportunity cost dan benefit, yakni bukan hanya dengan pendekatan financial tetapi juga biaya dan manfaat sosial dalam transaksi keduanya. Disimpulkan bahwa antara lembaga keuangan mikro dan nasabah terdapat pola hubungan win-win bukan win lost, (2) Karakteristik hubungan adalah kontraktual

Kata kunci: *LKI Pedesaan, Biaya transaksi, Opportunity Cost*

PENDAHULUAN

Secara faktual keberadaan Lembaga Keuangan Informal (LKI) di masyarakat Indonesia baik secara ekonomi bahkan sosial tidak bisa dipungkiri. LKI tersebut secara ekonomi sudah menyatu secara ekonomi dan sosial di masyarakat. Secara factual saat lembaga keuangan Informal ini sudah hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat seiring dengan sejarah ekonomi di pedesaan. Lembaga ini mampu secara elastic menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat. Secara tradisional LKI ini bisa

berupa lembaga keuangan rentenir, pengijon, arisan, Pengambek di kaqwasan nelayan, bahkan di era orde baru muncul pula Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), suatu lembaga keuangan milik pribadi yang menggunakan bentuk koperasi karena mengikuti tatacara lembaga koperasi dan memang sampai saat ini diamini oleh Dinas Koperasi di masing-masing daerah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal terdiri dari bank dan nonbank. LKM formal bank diantaranya Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, mandiri unit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan BRI Unit. Sementara LKM formal nonbank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian. Adapun LKM informal terdiri dari berbagai kelompok seperti rentenir (*money lender*), Arisan, Pengijon, Pengambek dan sebagainya.

Ashari (2006: 152) menyatakan bahwa "Potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar." Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu:

1. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa.
2. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
3. Karakteristik umumnya membutuhkan platfond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM.
4. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah.
5. Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa bentuk LKM dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Perbedaan mendasar kedua LKM tersebut karena LKM formal memiliki badan hukum, sementara LKM informal berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan hukum. LKM formal terdiri dari bank yaitu BPR dan bank-bank konvesional yang khusus menangani kredit usaha seperti Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM informal diantaranya adalah LSM, rentenir, dan arisan.

Keberadaan LKM menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Menurut Krishnamurti (2003) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2006: 153) menyebutkan peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui:

1. Tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi
2. Mengelola risiko dengan lebih baik
3. Secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset

4. Mengembangkan kegiatan usaha mikronya
5. Memperkuat kapasitas perolehan pendapatannya
6. Dapat merasakan tingkathidup yang lebih baik.

Tanpa akses yang cukup pada LKM, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak atau pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti kita ketahui bahkan peran lembaga keuangan sangat penting dalam perekonomian bahkan menjadi salah satu indikator maju mundurnya perekonomian, tetapi hamper mayoritas masyarakat khususnya menengah ke bawah sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal, yang umumnya dilindungi oleh sistem regulasi pemerintah. Adalah sulit untuk dibantah bahwa kemampuan lembaga keuangan nasional dalam mengakses ekonomi rakyat secara keseluruhan lebih banyak didominasi oleh lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan data yang ada bahwa lembaga keuangan mikro ini mampu mengakses sekitar 70 persen aktivitas ekonomi rakyat di Indonesia. Kabupaten Jember juga merupakan bagian dari ekonomi nasional yang mempunyai potensi yang cukup prospektif bagi tumbuhnya perekonomian rakyat khususnya berbasis agribisnis dan agroindustri. Sehingga dalam kajian ini akan mengangkat masalah : (a) profil lembaga keuangan informal dilihat dari kemampuan finansial, maupun non financial; (b) strategi pengembangan lembaga keuangan mikro sehingga mampu mengoptimalkan pengembangan ekonomi rakyat. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka penulis bermaksud mengkaji Lembaga Keuangan Informal (LKI) di Kabupaten Jember untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi pengembangannya sehingga mampu berfungsi secara optimal. Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi LKI di Kabupaten Jember dan strategi pengembangan yang nantinya diharapkan mampu menjadi acuan pengambilan kebijakan serta pelaksanaan pengoptimalan LKI di Kabupaten Jember.

LANDASAN TEORI

Pada umumnya kelembagaan dimaknai sebagai aturan main (*rules of the game*). Mantzavinos, (2001:83) mengartikan kelembagaan adalah aturan sosial, yakni aturan main di masyarakat, yang diterapkan melalui mekanisme dari pengendalian sosial yang membentuk interaksi manusia. Sedangkan menurut Yeager (dalam Yustika, 2008:35) secara ringkas menjelaskan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Bardhan (1989:3) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan sosial, ketentuan dan unsur lainnya dari kerangka struktur sosial. Hakekatnya, Ekonomi kelembagaan mampu menjembatani dan meminimalisi perilaku menyimpang manusia dan mengurangi ketidakpastian.

Kelembagaan sendiri dapat di klasifikasikan menjadi lembaga formal dan informal.

Tabel 1

Klasifikasi Kelembagaan		
Aturan Informal	Ketentuan	Pelaku kebijakan
	Aturan Moral	Pihak Pertama
	Norma Sosial	Pihak ketiga :Paksaan sosial, Individu dalam kelompok
Aturan Formal	Hukum	Pihak ketiga : Negara

Sumber : Mantzavinos, 2001:85, *Individuals, Institutionals, and Market*

Aturan Formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh peraturan pemerintah. Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia dimana mereka hidup Pejovich (dalam Yustika, 2008:34).

Ekonomi kelembagaan muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap aliran ekonomi klasik/neoklasik (*mainstream*) yang diterapkan hampir di seluruh negara di dunia. Dalam pandangan klasik/neoklasik menganggap, untuk mencapai efisiensi menyerahkan seluruh mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi dan menganggap kondisi semua pasar sama dengan mengabaikan dinamika perilaku individu yang sangat dipengaruhi oleh beragam aspek, seperti sosial, politik, budaya, hukum dan lain sebagainya.

Namun dalam prakteknya, tidak semua bisa diselsaikan dengan pasar seperti *moral hazard*. Untuk itulah dibutuhkan sebuah aturan untuk melindungi dari perilaku yang menyimpang. Pada kedudukan inilah ekonomi kelembagaan (*Institutional*) muncul.

Dalam perkembangannya, terdapat 2 aliran Ekonomi Kelembagaan yaitu, Ekonomi Kelembagaan lama (*Old Institutional Economics/OIE*) dan Ekonomi Kelembagaan baru (*NIE Institutional Economics/NIE*). Ekonomi kelembagaan pertama kali di pelopori oleh Thorstein Veblen dan John R. Commons atau yang biasa disebut aliran Ekonomi Kelembagaan lama (*Old Institutional Economics/OIE*). Ekonomi Kelembagaan lama (*Old Institutional Economics/OIE*) berasumsi bahwa insitusi faktor kunci dalam menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi (Manzilati, 2011:24). Ekonomi Kelembagaan lama (*Old Institutional Economics/OIE*) menolak semua asumsi aliran klasik/neoklasik, dan bekerja di luar kerangka ekonomi klasik/neoklasik.

Sementara itu, Ekonomi kelembagaan baru/*NIE* masih dapat menerima beberapa asumsi klasik/neoklasik. Seperti diungkapkan Yustika, (2008:45) :

“...NIE masih memakai dan menerima asumsi dasar neoklasik mengenai ‘kelangkaan’ dan ‘kompetisi’, tetapi menanggalkan asumsi rasionalitas instumental (*instumental rationality*); di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi ‘teori bebas/nir-kelembagaan’ (*institutional-free theory*). Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menjalankan itu, NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar (hak kepemilikan, kontrak, parati revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk mengompensasi kegagalan pasar (*market failure*). Dalam pendekatan NIE, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternaslitas produksi

(*production externalities*), dan barang-barang publik (*public goods*) diidentifikasi sebagai sumber terpenting (*key sources*) terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar.”

Dalam hal ini NIE mencoba menggabungkan pentingnya peran kelembagaan (*institutional*) dengan menggunakan kerangka ekonomi klasik/neoklasik. Pada kajian ini, penulis akan menguraikan tentang LKI dalam sudut pandang kelembagaannya. LKI sendiri dalam buku Totok Budisantoso (2005:121) menyatakan bahwa “kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp.250 juta untuk membiayai usaha produktif”.

METODE PENULISAN

Kajian ini bersifat deskripsi, yakni mendata atau mengelompokan sederet unsur yang terlibat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada secara sistematis, faktual dan akurat Dalam konteks kajian Lembaga Keuangan informal, akan didiskripsikan berbagai indikator seperti karakteristik finansial, aksesibilitas terhadap pelanggan maupun. Lokasi kajian di Kabupaten Jember yang diambil secara sampling di wilayah mewakili wilayah kota Jember dan pedesaan dengan rentang satu tahun yakni 2015 ke belakang. Kawasan kajian yang mewakili sentra aktivitas ekonomi yang cukup tinggi karena aktivitas ekonomi pertanian dan perkebunannya. Sampling diambil secara *snowballing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga Keuangan Informal di Kabupaten Jember

Di kawasan pedesaan yang diamati terdapat indikasi bahwa basis pekerjaan yang berbeda akan memunculkan keragaman jenis lembaga keuangan informal yang berbeda. Desa-desa berbasis pertanian tanaman pangan keragaan LKI berbeda dengan basis nelayan bahklan perdagangan. Dugaan kuat karakteristik LKI tersebut mempunyai dua fungsi pokok yakni : (1) kesinambungan hidup usaha dan pemiliknnya, (2) distribusi resiko. Sehingga bagi basis usaha pertanian dan nelayan dua fungsi ini mendukung dugaan bahwa usaha mereka cenderung bersifat subsistem dari aktivitas ekonomi yang ada. Dalam hal keragaan mata pencaharian nasabah terlihat bahwa pekerjaan nasabah LKI di pedesaan didominasi petani dan buruh tani, di daerah kota didominasi pedagang (umumnya infromal) dan buruh, Yang mencolok pegawai PNS juga menjadi nasabah cukup besar dan relatif merata di tiga daerah tersebut.

Tabel 2
Profil LKI Di Kawasan Kota Jember

No	Jenis	Nasabah	Bunga	Sistem
1	Money lender "kelas Formal" Misal Kosipa dengan komodeiti Uang dan barang	PNS/Guru SD Idem Idem	15 % /bln 5% / bln 3 %/bln	- bayar bunga 15 %/bln - bunga ber bunga - Jaminan 60 %
2	Simpin "guru"	PNS/guru SD	10 %/(3- 10) - 2,5 %/bln	sis (90 %)/(3- 10) bln 3 bln - mak 10 thn

				0,5 s/d 2 juta
3	Money Lender Pasar	-Ped. Pasar	Pot adm (7,5 –10) % sisa /20 hari sisa/10 minggu 104 kali	harian max 30 hari max 1 jt ada TK dep collector (2 tk) mingguan 10 minggu 1,5 jt ada TK dep Collector (2) 104 hari 2 s/d 3 jt ada TK dept collector
4	Kosipa	-ped. Informal - RT biasa	Pot adm(7,5 – 10) % sisa /20 hari	Harian max 30 hari Ada TK collector (bonus sekian tagihan 1
5	Kedit daging Kredit Kue	- Ped. Pasar	- bebas bunga harian 0,5 – 1, ribu	- dapat daging/kuwe sesuai harga pasar /hari raya
6	arisan Ngepyuh	-warga RT -kel prof, etn -kel prof	-tanpa bunga -gambling	siapa dapat dulu - di beli dapatnya (berani angsur lbh tinggi
7	Arisan kaget	- kel etnis	tab. tak bunga	siapa dapat duluan tak bayar arisan batas waktu skn /kaalisyarat Σ minimal
8	Pertanian : sewa, gadei, ijon, tebasan	Tan. Pangan Sawah Tan pangan /kebun - idem	- tanpa bunga Main harga Speku kwantitas produksi	petani pemilik & petani pemoda)pedagang)l - idem

Sumber: Data primer, 2015

Di kawasan pedesaan fenomenanya relative secara substansi sama tetapi berbeda dalam keragaan kelembagaannya baik struktur kepemilikan, metode untuk mengelola resiko dan keberlanjutan kelembagaan. Dalam konteks ini lembaga atau institusi merupakan kumpulan aturan yang dibuat, disepakai, dipatuhi dan dilaksanakan. Jika kelembagaan ini kelompok tentu ada tambahan suatu hirarki organisasi yang membagi peran siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab kepada apa dan siapa.

Tabel 3
Profil LKI Di Pedesaan Kabupaten Jember

No	Jenis	Nasabah	Bunga	Sistem
1	Money lender "kelas Formal" Uang barang Paguyuban.	PNS/Guru SD Idem Idem	15 % /bln 5% / bln 3 %/bln	- bayar bunga 15 %/bln - bunga ber bunga - Jaminan 60 %
2	Simpin "guru"	PNS/guru SD (mayoritas SD)	10 %/(3- 10) - 2,5 %/bln	sisa (90 %)/(3- 10) bln 3 bln - mak 10 thn 0,5 s/d 2 juta
3	Money Lender Pasar	-Ped. Pasar	Pot adm (7,5 –10) % sisa /20 hari	harian max 30 hari max 1 jt

			sisa/10 minggu 104 kali	ada TK dep collector (2 tk) mingguan 10 minggu 1,5 jt ada TK dep Collector (2) 104 hari 2 s/d 3 jt ada TK dept collector (2)
4	Kosipa	-ped. Informal - RT biasa	Pot adm(7,5 – 10) % sisa /20 hari	Harian max 30 hari Ada TK collector (bonus sekian tagihan 1)
5	Kedit daging Kredit Kue	- Ped. Pasar	- bebas bunga harian 0,5 – 1, ribu	- dapat daging/kuwe sesuai harga pasar /hari raya
6	arisan Ngepyuh	-warga RT -kel prof, etn -kel prof	-tanpa bunga -gambling	siapa dapat dulu - di beli dapatnya (berani angsur lbh tinggi)
7	Arisan kaget	- kel etnis	tab. tak bunga	siapa dapat duluan tak bayar arisan batas waktu skn /kaali syarat Σ minimal
8	Peartanian : sewa gade ijon tebasan	Tan. Pangan Sawah Tan pangan /kebun - idem	- tanpa bunga Main harga Speku kuantitas produksi	petani pemilik & petani pemoda (pedagang) - idem

Sumber: data primer, 2014

Lembaga keuangan nonbank yang menjalankan aktivitas di wilayah pedesaan sangat bervariasi. Variasi tersebut bisa dilihat dari persyaratan kredit, bentuk kredit, bentuk jaminan, biaya administrasi kredit, bunga, periode pengembalian serta aturan main lainnya.

Lembaga Milik Perorangan

Kategori lembaga kredit perorangan adalah mereka yang dalam prakteknya dapat berupa pemilik mempunyai toko sarana produksi pertanian atau tidak mempunyai toko. Populasi lembaga tersebut jumlahnya cukup banyak dan domisilinya mayoritas di pedesaan dan sentra-sentra pasar tradisional di perkotaan dan desa. Wilayah operasional usaha perseorangan ini biasanya dalam lingkup terbatas, yaitu hanya di sekitar dimana lembaga tersebut berdomisili.

Bentuk kredit yang diberikan bisa dalam bentuk uang tunai atau natura yang umumnya sarana produksi pertanian/perikanan. Penilaian calon debitur hanya didasarkan pada pendekatan tradisional, yaitu karena sudah dikenal atau dipercaya (kepercayaan) atau karena adanya rekomendasi dan/atau jaminan dari orang kepercayaan kreditor.

Tengkulak/Penebas/Ijon

Umumnya aktivitas tengkulak atau penebas atau pengijon diarahkan pada sektor pertanian dan perdagangan. Pemberian kredit lebih banyak ditujukan kepada pedagang atau mereka yang secara khusus memiliki faktor produksi. Tujuan pemberian kredit adalah memberikan ikatan jaringan pasar oleh Tengkulak/Penebas. Bentuk kredit umumnya berupa sarana produksi atau berbentuk uang tunai. Bentuk jasa pinjaman bukan berupa bunga tetapi dominasi penentuan harga jual oleh tengkulak. Dalam sistem ijon biasanya yang terjadi adalah bahwa sawah yang disewakan adalah pada saat padi sedang berbunga (kurang lebih berumur 1,5-2 bulan). Perkiraan pemilik sawah bahwa 1 Hektar bila panen bisa menghasilkan sekitar 5 ton gabah kering sawah kotor. Biasanya Pengijon akan memberi harga separo dari nilai perkiraan petani. Selama satu musim, dan biasanya jangka waktu sewa tersebut minimal satu tahun. 1 Kwintal di hargai Rp 300 ribu kering sawah, dan ini untuk jenis padi super.

Pada sistem gadai, biasanya sawah yang digadaikan adalah sawah yang oleh pemiliknya dinilai sudah tidak produktif lagi, namun tidak menutup kemungkinan sawah yang digadaikan adalah sawah yang masih produktif. Dalam arti bahwa, karena terdesak oleh kebutuhan terpaksa, petani akan menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya, si A butuh uang sebesar 5 juta, maka sawahnya digadaikan pada si B dengan perjanjian bahwa selama hutang tersebut belum lunas maka si B tetap berhak untuk menggarap sawah tersebut tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Bahkan pernah ada kasus dimana sawah yang digadaikan tersebut sampai berlangsung selama 7 tahun dan selama tujuh tahun tersebut pihak yang menggadaikan tidak menggunakan sawahnya untuk keperluan pertanian.

Secara sederhana contoh perhitungan dalam praktek pengijonan dan atau penggadaian lahan pertanian (sawah) adalah sebagai berikut.

Dalam setiap kali panen raya biasanya petani dapat menghasilkan 5,3 ton gabah bersih. Sehingga apa bila 1 kwintal gabah kering sawah di hargai Rp 300.000,-, maka hasil perhitungan keseluruhan akan sebagai berikut:

53 Kwintal X Rp 400.000 = Rp 15.300.000,-

Biaya- biaya : investasi sekitar 4 – 5 juta rupiah

Sehingga keuntungan bersih petani selama satu musim panen adalah kurang lebih Rp 9.000.000,- sampai 10 juta rupiah.

Penyedia sarana Produksi

Pinjaman diberikan untuk berbagai aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat (pertanian, perdagangan, perikanan/Nelayan). Umumnya, jasa yang diberikan tidak menggunakan istilah bunga (atau bahkan tidak ada sama sekali), tetapi harga bahannya yang relatif diperbesar. Metode pelaksanaannya adalah penyedia sarana akan memberikan kebutuhan para nasabah, tetapi pembayaran dilakukan saat nasabah memperoleh penghasilan (dengan harga yang telah disepakati di depan). Praktek penyedia sarana produksi ini banyak dijumpai di masyarakat karena kemudahan dalam praktek pelaksanaannya.

Sistem pembelian pupuk, petani bisa membeli pupuk secara kredit melalui Koperasi yang dimiliki perorangan atau juga pada perorangan. Bila membeli pada koperasi harga 1 kwintal Rp 150.000,- secara kredit dengan jangka waktu 4 bulan. Sedangkan harga di toko Rp 120.000/Kw Bila membeli

pada perorangan harga tersebut bisa dua kali lipatnya dari harga toko dengan jangka waktu 4 bulan (satu musim panen). Di daerah Perikanan (Puger), umumnya sarana produksi yang diperlukan oleh nelayan secara rutin adalah bahan bakar Solar. Sistem pembeliannya adalah para nelayan menerima bahan bakar yang dibutuhkan dengan pembayaran dilakukan setelah nelayan memperoleh penghasilan dari melaut. Kesepakatan harga ditentukan sebelum solar diterima. Rata rata harga yang terjadi lebih tinggi dari harga pasar. Penerimaan penjual bukan berupa bunga, tetapi berupa margin keuntungan.

Kredit Konsumsi

Adalah bentuk alternatif pemberian pinjaman oleh perseorangan di suatu wilayah tertentu, dengan tujuan konsumsi. Pinjaman umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Peminjam mengutarakan maksudnya untuk membeli barang tertentu (Kursi, misalnya). Kemudian Pemberi kredit akan menghitung harga + jumlah bunga yang harus dibayar, kemudian dibagi masa pinjaman, kemudian hasilnya dibulatkan keatas.

Dasar pemberian pinjaman adalah referensi calon peminjam yang diperoleh melalui pantauan langsung kehidupan ekonominya, serta barang yang dibeli sebagai agunan. Nilai pinjaman diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-

Lembaga Keuangan Informal yang Terorganisasi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kategori LSM meliputi Perkumpulan Pengajian/Arisan, Kelompok Tani, dan Kelompok Binaan (Plasma) LSM dari Kota Jember. Sumber keuangan/modal pada perkumpulan pengajian didapat dari para anggota, bisa dalam bentuk simpanan wajib dan sukarela. Modal tersebut digunakan usaha simpan pinjam antar para anggota. Sedangkan sumber modal kelompok tani juga dari para anggota dan kredit yang diberikan dalam bentuk natura/sarana produksi pertanian.

Sumber modal kelompok binaan LSM dari LSM pembina (domisili di Kota Jember). Modal tersebut dipinjamkan kepada masyarakat desa, dimana kelompok binaan tersebut berada. Pengelolaannya ditangani oleh ibu-ibu dan sasarannya terbatas pada ibu-ibu yang punya usaha perdagangan atau pertanian.

Koperasi Kredit/Simpan Pinjam/Lembaga Kredit

Lembaga pemberi kredit yang dimaksud bisa dalam bentuk koperasi, Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya. Lembaga ini berkedudukan di luar Kecamatan, antara lain dari Kabupaten Bondowoso, Kota Jember, Lumajang dan Probolinggo. Berbagai macam lembaga tersebut wilayah operasionalnya juga di wilayah kecamatan. Pengorganisasian lembaga ini cukup rapi, pembagian tugas jelas, mobilitasnya tinggi karena ditunjang sarana sepeda motor, sehingga dapat menjangkau wilayah pasar yang luas (sistem jemput bola).

Badan Kredit Desa (BKD)

BKD merupakan kelanjutan dari Lumbung Desa yang sebelumnya beroperasi di wilayah pedesaan Kabupaten Jember. Status hak milik BKD masih mengambang, artinya siapa pemiliknya masih belum jelas. Kewenangan

pengelola masih didominasi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan dibantu oleh tenaga dari desa setempat, yang meliputi Kepala Desa (Komisi I) selaku pemberi rekomendasi dan 2 (dua) orang lainnya dan berfungsi sebagai penagih dan pembantu administrasi. Organisasi BKD sudah baik, karena penanganannya langsung di bawah lembaga kredit yang profesional, yakni BRI. Besaran kredit yang diberikan bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai dengan maksimum dua juta rupiah. Pinjaman lebih besar dari dua juta rupiah disarankan ke BRI Cabang.

Untuk memberikan gambaran ringkas tentang ciri-ciri keempat kategori lembaga kredit tersebut dapat diikuti pada Tabel 4.1 dan 4.2 di atas.

Berdasarkan pada informasi yang terdapat di Tabel 4.1, ada indikasi kuat bahwa kebiasaan masyarakat/nasabah dalam skala mikro di pedesaan tidak menginginkan penarikan kredit dengan syarat-syarat yang rumit. Kebiasaan berfikir pragmatis ini sebagai akibat sumberdaya yang dimiliki relatif terbatas, baik dari sisi pendidikan maupun dari pemilikan kekayaan. Hal ini dapat dilihat dari syarat kredit yang lunak, baik dari sisi administrasi/ persyaratan kredit dan jaminan kredit.

Rata-rata bunga yang dikenakan kepada debitur cukup tinggi terutama kredit yang diberikan oleh perorangan dan koperasi kredit (7-5% - 10%/bln). Kebijakan biaya kredit tinggi diakibatkan oleh adanya kemudahan syarat kredit, misalnya tanpa jaminan, toleransi pengembalian kredit yang tinggi, yang mana hal tersebut berimplikasi resiko kredit yang diberikan. Biaya kredit yang tinggi sebagai akibat dari kreditor yang memasukkan unsur resiko tertundanya pengembalian kredit atau paling ekstrim terjadinya kredit macet, karena syarat kredit yang mudah. BKD merupakan usaha yang biaya kreditnya paling murah (4,16%), dan unsur pendidikannya juga jelas, misalnya besaran potongan di muka sebagai tabungan terealisasi dikembalikan pada nasabah yang bersangkutan pada akhir tahun.

Hasil pengamatan didapatkan informasi bahwa periode pengembalian kredit harian tidak disenangi oleh nasabah dan periode mingguan lebih digemari (kecuali pengembalian pasca panen), karena ; *pertama* disamping biaya bunganya lebih murah dan *kedua* dianggap meringankan nasabah yang *rata-rata periode perputaran usahanya tidak mesti harian*. Tingkat pengembalian kredit lebih dari seminggu juga tidak disenangi karena besaran uang angsuran memberatkan. Tertundanya angsuran sudah menjadi kebiasaan bagi nasabah, sehingga pola yang diterapkan oleh kreditor hanyalah tetap menagih dengan sabar. Peran kepala desa sangat kuat jika terjadi kelambatan angsuran, sehingga dilakukan pemanggilan kepada nasabah yang punya tunggakan.

Dari sisi organisasi pengelola (lembaga kredit), nampaknya kebiasaan masyarakat desa sudah terbaca cukup baik, sehingga pola yang diterapkan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan teori, yang menyatakan bahwa "*keberhasilan organisasi tergantung kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan/kebiasaan lingkungan*". Pada saat peluang pasar kredit cukup tinggi di wilayah pedesaan dan pada saat BKD memberikan biaya kredit yang lebih murah dari usaha lembaga kredit pesaingnya, tetapi masyarakat nasabah tidak berlomba-lomba untuk mencari kredit yang lebih murah.

Hal ini bisa dibuktikan dari perkembangan BKD di Kabupaten Jember yang perkembangan jumlahnya nasabahnya relatif statis. Dengan demikian pragmatisme masyarakat pedesaan sebagai calon nasabah kredit mikro semakin kelihatan, semuanya menginginkan serba instan dan mereka harus dilayani atau

dilayani dengan cara mendekati diri ke tempat domosili calon nasabah. Wajar jika lembaga kredit seperti koperasi kredit/simpan pinjam menggunakan sistem *jemput bola* dalam hal menjual jasa kreditnya dan akhirnya memetik hasilnya juga. Keadaan ini bisa dibuktikan melalui argumentasi bahwa meskipun bunga kredit yang dibebankan lebih tinggi (7,5%-10%/bln), tetapi pasarnya tetap eksis. Begitu juga yang terjadi pada lembaga penyalur kredit, usahanya tetap eksis dan jumlah lembaga kredit yang bergerak dalam pasar yang sama juga tetap banyak.

Kalau hanya dilihat dari jumlah kreditor yang cukup banyak (terutama pada koperasi kredit) dan masing-masing sudah mematok harga kredit dan jumlah konsumen yang banyak, tetapi konsumen tersebut tidak bisa menentukan harga, maka struktur pasar cenderung mengarah ke bentuk *oligopoli*. Struktur pasar tersebut diduga mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen/nasabah. Oleh karena itu, konsumen yang rasional dan yang merasa berat dengan biaya kredit pada akhirnya mengelompokkan diri untuk mengatasi dirinya sendiri melalui kelompok yang dibangun, seperti yang terjadi pada Kelompok Tani dan kelompok pengajian.

Untuk mengetahui lingkungan bisnis lembaga keuangan mikro (non bank) di pedesaan Kabupaten Jember, digunakan analisis SWOT. Untuk menunjang analisis tersebut, terlebih dahulu diidentifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknes), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threath) yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan mikro. Oleh karena kelembagaan dan dinamika serta pola operasional lembaga keuangan mikro bervariasi, maka dalam penyajian variabel SWOT diupayakan dapat mencakup atau menjangkau pada variasi masing-masing lembaga.

Identifikasi variabel SWOT Kekuatan LKI

Beberapa kekuatan lembaga keuangan mikro yang berhasil diidentifikasi meliputi:

1. Kemudahan Syarat Untuk Penarikan Kredit.

Secara umum, penarikan kredit mikro di pedesaan Kabupaten Jember tidak memerlukan syarat yang rumit, seperti yang dilakukan di lembaga perbankan. Hal ini dilandasi oleh adanya karakteristik masyarakat pedesaan yang pragmatis, sumberdaya manusia yang lemah dan struktur bisnis yang menghendaki dana segar yang senantiasa tersedia. Syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam menarik kredit biasanya hanya Kartu Tanda penduduk (KTP) dan sedikit informasi tentang usahanya serta skala usaha yang menyangkut kemampuan membayar kredit. Bahkan yang paling ekstrim hanya memerlukan rekomendasi pihak perorangan, misalnya kredit pupuk yang dilakukan oleh pihak swasta.

2. Pengalaman Dalam Pengelolaan Resiko

Lembaga keuangan Informal pedesaan yang sudah terbiasa beroperasi, paling tidak sudah tahu karakter masyarakat pedesaan, kebiasaan yang dilakukannya, termasuk nasabah. Bahkan mereka mempunyai hubungan emosi. Hal ini penting untuk mengelola resiko kegagalan kredit. Dengan demikian pengalaman tersebut merupakan guru yang baik untuk melakukan sesuatu yang akan datang, untuk menghindari apa yang seharusnya tidak dilakukan serta apa yang boleh dilakukan. Khususnya dalam penyaluran kredit, baik dalam bentuk natura

maupun innatura, strategi penagihan maupun cara-cara penanganan kredit macet, rata-rata lembaga keuangan sudah paham dan kondisi tersebut merupakan asset bagi lembaga.

Kelemahan

Kelemahan lembaga keuangan mikro adalah kurangnya inovasi produk atau variasi sistem kelembagaan penyaluran kredit. Yang dimaksud dengan kelemahan tersebut adalah bahwa yang dijual oleh masing-masing lembaga keuangan cenderung hanya *menjual satu macam produk*. Misalnya, suatu lembaga tertentu hanya menyalurkan kredit modal kerja saja dan lembaga lain ada yang hanya memberikan kredit kebutuhan pertanian (sarana produksi). Kondisi ini merupakan kelemahan bagi bisnis lembaga keuangan. Sebaliknya, jika lembaga keuangan menginginkan pengembangan usaha, seharusnya lembaga melayani kebutuhan masyarakat yang bervariasi, sehingga segmen pasar yang berbeda dilayani dengan cara atau produk yang berbeda pula.

Peluang

Peluang lembaga keuangan mikro yang berhasil diidentifikasi meliputi hal-hal berikut:

1. Kebutuhan Modal Besar

Kenyataan di lapang, memberikan indikasi banyaknya pengusaha yang masih membutuhkan modal (terutama modal kerja), terutama masyarakat petani. Begitu juga pada pengusaha lainnya, seperti para pedagang perantara dalam bidang produksi hasil pertanian, masih membutuhkan modal kerja. Di Kecamatan Jember masih banyak pedagang yang butuh modal kerja untuk membiayai perdagangan tembakau dan buah-buahan. KUD di wilayah tersebut yang diharapkan mampu berperan untuk menopang berkreditan pedesaan justru tidak berfungsi. Kondisi ini memberikan indikasi pula bahwa peluang bisnis bagi lembaga keuangan mikro di pedesaan masih terbuka luas.

2. Sumber Keuangan Eksternal Besar

Terutama sumber keuangan dari bank, jumlahnya cukup besar untuk mendukung keuangan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di pedesaan. Disamping itu, dengan perbedaan bunga antara kreditor (bank) dengan yang diterapkan lembaga keuangan mikro masih memungkinkan bagi lembaga keuangan mikro dapat eksis. Kondisi ini merupakan peluang bagi lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan usahanya.

3. Kemudahan Mencari Tenaga yang Legitimate di Lokasi Sasaran

Banyak lembaga keuangan mikro yang menerapkan pemberian kredit bagi pihak tertentu dengan jalan kerjasama dengan perorangan di lokasi sasaran dan sekaligus posisi orang tersebut sebagai perekomendasi pemberian kredit. Misalnya, petani mendapatkan kredit pupuk dari lembaga tertentu harus direkomendasi oleh orang tertentu, kredit modal kerja harus direkomendasi orang tertentu. Mendapatkan orang-orang yang legitimate yang bisa diajak kerjasama masih mudah.

4. Inovasi Pengembangan Kelembagaan yang Kapabel

Bentuk kelembagaan dan variasi jenis produk yang bisa dijual oleh masing-masing pengusaha cukup bervariasi, akan tetapi secara umum yang dijual olehnya hanya satu macam. Oleh karena itu peluang untuk

mengembangkan berbagai macam bentuk kelembagaan beserta berbagai macam produk yang dijual (uang maupun sarana produksi) yang lebih cocok dengan kondisi pebisnis di wilayah pedesaan masih terbuka luas.

5. Upah Tenaga Kerja yang Murah

Upah tenaga kerja di pedesaan cukup murah dan rata-rata di bawah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). Upah tenaga kerja yang rendah merupakan peluang bagi pebisnis untuk berkompetisi dengan menekankan biaya tenaga kerja yang murah.

6. Dukungan Pemerintah Terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Kuat

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan lembaga keuangan kuat dapat di jelaskan melalui keikutsertaannya dalam andil mendirikan lembaga keuangan (BKD), program pemerintah lainnya melalui Koperasi, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), meskipun untuk sementara berhenti. Dengan demikian siapapun yang akan mendirikan atau mengoperasionalkan lembaga keuangan mikro di pedesaan tanpa ada hambatan dari pihak pemerintah.

Ancaman

Ancaman lembaga keuangan mikro yang berhasil diidentifikasi meliputi hal-hal berikut:

1. Keterbatasan Jaminan yang Dimiliki Nasabah

Keterbatasan jaminan yang dimiliki nasabah merupakan tantangan bagi pebisnis lembaga kredit untuk tetap memberikan kredit, tetapi jaminan sebagai persyaratan yang umum di lingkungan perbankan tidak harus ada. Kondisi ini merupakan ancaman jika terjadi kredit macet.

2. Resiko kredit macet

Sebagai akibat lemahnya jaminan yang dimiliki nasabah, rentannya bisnis nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian, juga mencakup moral nasabah, merupakan resiko terjadinya kredit macet.

3. Persepsi Masyarakat yang Negatif Terhadap Kredit yang Melalui Pemerintah Desa

Legitimasi organisasi pemerintah yang lemah dan kebiasaan kurang tegasnya dalam menerapkan aturan main serta sering terjadinya kecurangan menyebabkan masyarakat menirunya. Sebagai akibatnya, maka segala bentuk bantuan lunak maupun kredit yang melalui pemerintahan desa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bantuan, sehingga tidak perlu dikembalikan.

4. Banyak Pesaing dengan Persyaratan Kredit yang Mudah

Sebagai akibat lemahnya pemilikan asset sebagai jaminan kredit, menyebabkan banyaknya lembaga kredit yang menyalurkan kredit dengan jaminan seadanya/tanpa jaminan, dengan kompensasi biaya bunga yang tinggi. Kompetisi yang cukup kuat dengan keringanan bentuk jaminan merupakan ancaman bagi pebisnis lembaga kredit.

Alternatif Strategi Lembaga Keuangan Mikro

Langkah awal operasional analisis SWOT yang bertujuan untuk menentukan strategi dilakukan dengan mentransfer masing-masing variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada lembaga keuangan mikro ke dalam Matriks SWOT (Gambar 5.2). Langkah selanjutnya, memadukan masing-masing kategori variabel, yakni variabel kekuatan dan peluang, variabel kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman serta kelemahan dan ancaman. Pemaduan dari masing-masing kategori variabel tersebut,

menghasilkan strategi tersendiri. Berbagai macam strategi yang dapat dimunculkan dari matriks SWOT pada akhirnya pemilihan strategi yang akan digunakan tergantung pada pihak/lembaga tertentu yang akan menggunakannya.

Tabel 4
Matriks Analisis SWOT

EKSTERNAL	INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)			
Kebutuhan modal besar Sumber keuangan ekster nal besar Kemudahan mencari tenaga yang legitimate di lokasi sasaran Inovasi pengembangan kelembagaan yg kapabel Upah tenaga kerja yang murah Dukungan pemerintah terhadap keberadaan lembaga keuangan kuat	Kemudahan syarat utk penarikan kredit Pengalaman dalam penyaluran kredit mikro	Kurangnya inovasi produk (variasi sistem kelembagaan penyalur- an kredit)	
	STRATEGI (S – O)	STRATEGI (W – O)	
	<i>Pengembangan penyaluran kredit dgn syarat mudah</i> <i>Pengembangan kelembagaan yang kapabel</i>	<i>kan kelembagaan keuangan mikro dengan tenaga lokal yang legitimate</i>	
ANCAMAN (T)	STRATEGI (S – T)	STRATEGI (W – T)	
Keterbatasan jaminan yang dimiliki nasabah Resiko kredit macet Persepsi masyarakat yang negatif terhadap kredit yang melalui Pemerintah Desa Banyak pesaing dgn persyaratan kredit yang mudah	<i>Reorientasi biaya kredit yang kompetitif dan saling menguntungkan</i> <i>Reorientasi sistem penyaluran kredit yang sesuai dengan dinamika masyarakat</i>	<i>Memantapkan sistem kelembagaan yang ada</i> <i>Sosialisasi kredit yang mantap</i>	

Strategi Pengembangan

Beberapa alternatif strategi yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga keuangan mikro, meliputi hal-hal berikut.

1. Pengembangan penyaluran kredit dengan syarat mudah

Pengembangan jumlah kredit yang disalurkan dengan kemudahan syarat kredit memang merupakan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dilandasi oleh adanya kredit program dari pemerintah praktis sudah tidak ada. Penambahan penyaluran kredit, disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diharapkan juga untuk mengatasi pengijon, meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

2. Pengembangan kelembagaan yang kapabel

Lembaga kredit perlu adanya penguatan. Mekanisme kerja seperti yang terjadi pada Koperasi simpan pinjam perlu dijadikan contoh, artinya dengan syarat kemudahan pengambilan kredit dan melakukan sitem jemput bola.

3. Strategi pemberian iklim usaha yang memadai
4. Pendampingan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat
5. Pengembangan jaringan bisnis antar LKM sejenis dan Bank atau Bank BI

PENUTUP

Simpulan

LKI memiliki dua fungsi pokok, yaitu: kesinambungan hidup usaha dan pemiliknnya, dan distribusi resiko. Umumnya Lembaga ini terbentuk melalui proses *trial and error* dan membutuhkan waktu relatif lama. Jenis-jenis LKI meliputi: (a) perorangan, terdiri dari; tengkulak/pengijon/ penebas, penyedia saprodi, pengambek, dan kredit konsumsi, (b) lembaga/organisasi, terdiri dari; LSM, koperasi kredit/simpin/lembaga kredit, dan BKD. Analisis SWOT menghasilkan beberapa strategi pengembangan LKM, antara lain: (a) strategi SO, yaitu; pengembangan penyaluran kredit dengan syarat mudah, dan pengembangan kelembagaan yang capable, (b) strategi WO, yaitu; perbaikan kelembagaan keuangan mikro dengan melakukan aliansi dengan tenaga lokal yang legitimate, (c) strategi ST, yaitu; reorientasi biaya kredit yang kompetitif dan saling menguntungkan, dan reorientasi sistem penyaluran kredit yang sesuai dengan dinamika masyarakat, dan (d) strategi WT, yaitu; memantapkan sistem kelembagaan yang ada, dan sosialisasi kredit yang mantap.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan dalam rangka menunjang eksistensi lembaga keuangan mikro dalam jangka panjang, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasi, terutama dari sisi pemerintah. Mengingat fungsi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator (UU Otonomi Daerah), maka sebaiknya pemerintah tidak menangani langsung terhadap keberadaan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di wilayah pedesaan, tetapi bisa berperan sebagai lembaga yang menciptakan situasi yang kondusif, sebagai wasit yang adil serta mendukung tersedianya data.

Mengembangkan BKD secara bertahap untuk menjadi milik masyarakat desa, dikelola masyarakat serta diawasi oleh masyarakat sendiri. Untuk itu perlu adanya revitalisasi kelembagaan BKD yang mantap sesuai dengan dinamika masyarakat desa, dan tanpa meninggalkan profesionalisme bisnis jasa kredit. Unsur sementara, peran BRI tidak boleh lepas, yang berfungsi sebagai pembina teknis.

Perlunya menggalakkan lembaga swadaya masyarakat (kelompok tani, Arisan) dalam rangka untuk mengatasi perorangan secara gotong royong dengan biaya yang murah. Perlu upaya pendampingan dengan sistem teknologi P2KP, yaitu dengan upaya perkuatan kelembagaan atau bahkan pengembangan kelembagaan baru tanpa menggusur kelembagaan yang ada bahkan memanfaatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rozany Nurmanaf, 2007 Lembaga Pembiayaan Informal Mikro Lebih Dekat ke Petani, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 99-109 Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor

- Ashari, 2015 Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakannya Makalah diambil dari Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Depantermen Pertanian Vol 4 Nomer 4 Juni 2006: 146-164.
- Mantazavinos, Chysostomos. 2001. *Individuals, Institutional, and Market*. Cambridge: Cambridge University Press
- Rachmat Hendayana dan Sjahrul Bustaman, 2010 Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Depantermen Pertanian Vol 2 Nomer 3 Juni 2007 Bogor.
- Yustika, Ahmad Erani. 207. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia

STRUKTUR PASAR DAN KINERJA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA: PENDEKATAN DATA PANEL

Ika Nurjannah, Adhitya Wardhono, Ciplis Gema Qori'ah, M. Abd Nasir, dan Yulia Indrawati
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121- Jawa Timur, Indonesia
e-mail:

ABSTRAK

Reformasi keuangan, globalisasi dan perkembangan teknologi telah berkontribusi besar dalam mempengaruhi perubahan struktural dan kinerja industri perbankan di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk menganalisis kondisi struktur pasar dan hubungannya dengan kinerja industri perbankan serta menguji eksistensi hipotesis kekuatan pasar yang terdiri dari structure-conduct-performance (SCP) hypothesis dan relative market power (RMP) hypothesis pada industri perbankan di Indonesia. Paper ini menggunakan pendekatan data panel dari sepuluh bank terbesar di Indonesiaselama periode 2001-2013. Hasil studi menunjukkan derajat konsentrasi industri perbankan Indonesia berada pada tingkat Persaingan I dengan konsentrasi tertinggi di pasar dana pihak ketiga (DPK), dan konsentrasi terendah di pasar kredit. Selain itu, studi ini membuktikan bahwa SCP hypothesis tidak eksist sedangkan RMP hypothesis ditemukan keberadaannya di Indonesia.

Kata Kunci: struktur pasar, kinerja perbankan, SCP hypothesis, RMP hypothesis

ABSTRACT

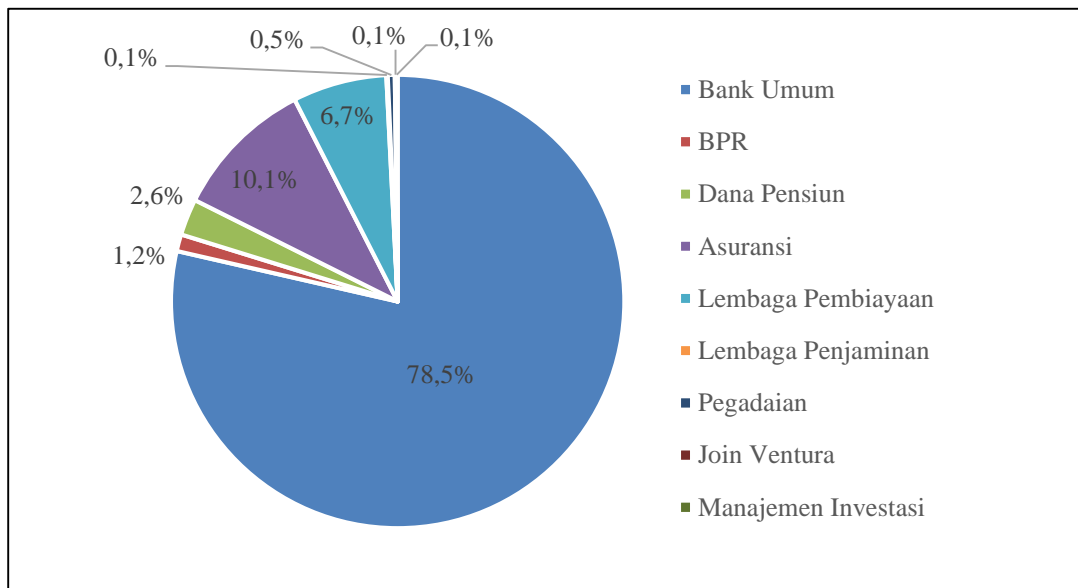
Financial reform, globalization and technological advances had contributed greatly to influence the structural changes and performances of banking industry in Indonesia. This paper aims to analyze the condition of market structure and the relationship between market structure and performance of the banking industry, and also test the existence of Market Power Hypothesis that consist of structure-conduct-performance (SCP) hypothesis and the relative market power (RMP) hypothesis on the banking industry in Indonesia. Panel data approach of the ten largest banks in Indonesia during 2001 to 2013 was used in this study. The results showed the degree of concentration of Indonesian banking industry was at level Competition I with the highest level of concentration in the third party funds (DPK) market, and the lowest concentration in the credit market. In addition, this study proved that the SCP hypothesis didn't exist but RMP hypothesis exist in Indonesia.

Keyword: market structure, banking performance, SCP hypothesis, RMP hypothesis

PENDAHULUAN

Dalam tatanan sistem keuangan suatu negara, efisien sistem keuangan menjadi salah satu prasyarat untuk menghasilkan profitabilitas lembaga keuangan yang semakin tinggi, meningkatkan aliran dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana,

serta pemberian pelayanan dengan kualitas yang lebih baik bagi konsumen keuangan (Hoffman, 2011). Se jauh ini, tidak dapat dipungkiri bahwa peran sektor keuangan terutama sektor perbankan sangat besar dalam mendukung kegiatan perekonomian sebagaimana terlihat dari penguasaan pangsa aset perbankan yang mencapai 78,5% dari total aset keuangan di Indonesia. Pangsa tersebut jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti dana pensiun yang hanya sebesar 2,6%, perusahaan asuransi 10,1% dan lembaga pembiayaan sebesar 6,7% (lihat Gambar 1). Oleh karenanya, bukan suatu keanehan apabila reformasi sektor keuangan ditempatkan sebagai sentral dalam reformasi perekonomian suatu negara yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

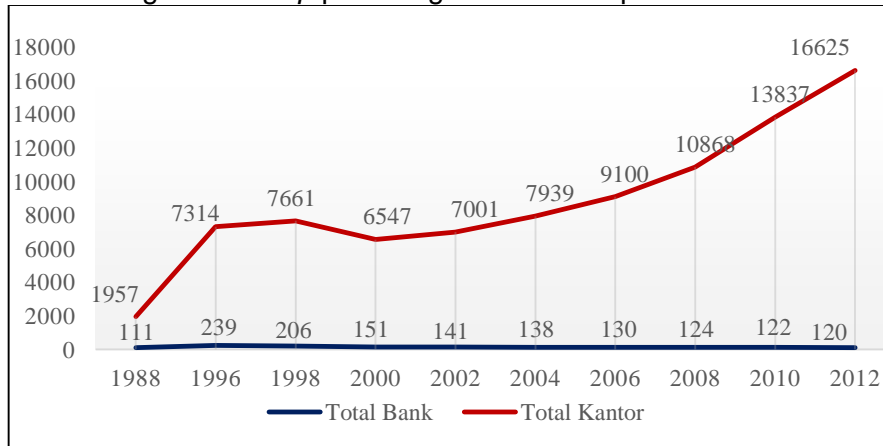


Sumber: Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, 2014

Gambar 1
Penguasaan aset perbankan terhadap total aset lembaga keuangan tahun 2013

Reformasi keuangan, globalisasi dan perkembangan teknologi telah berkontribusi besar dalam mempengaruhi perubahan struktural dan kinerja industri perbankan. Perubahan tersebut misalnya terjadi pada jumlah bank dan kantor cabang, kegiatan operasional bank, teknologi yang digunakan, struktur kelembagaan serta kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki bank (Seelanatha, 2010). Untuk kasus Indonesia, dikeluarkannya berbagai paket kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank pada tahun 1980an telah menandai awal mula perubahan struktural pada industri perbankan di Indonesia (Mulyaningsih dan Daly, 2011; Widyastuti dan Armanto, 2013). Dengan menghilangkan hambatan masuk pada industri perbankan telah meningkatkan jumlah bank dan kantor cabang bank secara signifikan sehingga mendorong kinerja pasar lebih kompetitif dan efisien (Sathye & Sathye, 2004; Bhatti & Hussain, 2010). Jumlah bank di Indonesia meningkat pesat dari 111 bank menjadi 239 bank pada akhir tahun 1996, kemudian terus berkurang hingga mencapai 120 bank tahun 2013. Berkurangnya jumlah bank tersebut

dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004 sebagai *road map* pembangunan industri perbankan di Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2
Perkembangan jumlah Bank Umum di Indonesia

Tingkat persaingan dalam industri perbankan secara otomatis akan berubah seiring dengan perubahan jumlah bank yang beroperasi dalam industri. Begitu pula dengan struktur pasar yang terbentuk dan tingkat profitabilitas yang akan diterima setiap individu bank dalam industri. Malik (2008) menyebutkan bahwa secara alamiah, karakteristik industri perbankan adalah persaingan oligopolistik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian terbaru seperti Fu dan Hefferman (2009); Zhengchao dan Qin (2012), Macit (2012) Titilayo dan Victor (2014) yang menghasilkan kesimpulan sama bahwa struktur pasar industri perbankan adalah oligopolistik. Namun, untuk kasus Indonesia, dengan menggunakan Concentration Ratio (CRk) dan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Malik (2008) dan Sutardjo, *et al* (2011) menyimpulkan bahwa industri perbankan Indonesia masih didominasi oleh empat bank terbesar dengan tingkat konsentrasi yang semakin menurun selama periode pengamatan. Di sisi lain, dengan menggunakan PRH Statistik, Mulyaningsih dan Daly (2011) menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia memiliki struktur monopoli selama periode konsolidasi.

Widyastuti dan Armanto (2013) menjelaskan bahwa terjadi pergeseran struktur persaingan bank sebelum dan sesudah penerbitan API. Bank-bank komersial secara keseluruhan berada di persaingan monopolistik dalam periode konsolidasi, kemudian berubah menjadi monopoli atau oligopoli kolusif setelah API dirilis. Hasil tersebut selaras dengan Yudaruddin (2014) yang berpendapat bahwa API telah menyebabkan meningkatnya konsentrasi industri perbankan di Indonesia, namun peningkatan konsentrasi tersebut bukan merupakan bentuk tindakan yang anti kompetisi melainkan dianggap sebagai konsekuensi dari efisiensi dalam rangka meningkatkan kinerja bank.

Martin (1994: 3) memaparkan bahwa paradigma SCP meyakini bahwa struktur pasar mempengaruhi perilaku dan kinerja. Apabila tingkat konsentrasi suatu industri semakin tinggi maka struktur pasar industri tersebut akan semakin mendekati monopoli. Bank yang memiliki kemampuan memonopoli memiliki kesempatan lebih besar untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang bersaing pada pasar yang lebih kompetitif. Laba

pada industri perbankan ditentukan oleh jumlah pinjaman bank, sehingga kredit dapat dianggap sebagai perilaku, dan keuntungan perbankan sebagai kinerja. Dengan demikian, konsentrasi industri perbankan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kinerja bank. Fokus makalah ini adalah menganalisis kondisi struktur pasar industri perbankan Indonesia dan melihat bagaimana hubungan struktur pasar dan kinerja untuk membuktikan eksistensi hipotesis kekuatan pasar pada industri perbankan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Hubungan antara struktur dan kinerja pada industri perbankan dijelaskan oleh dua paradigma yang saling bertentangan yaitu Hipotesis Kekuatan Pasar (*Market Power Hypothesis/MP*) dan Hipotesis Efisien-Struktur (*Efficient-Structure Hypothesis/ES*). Hipotesis MP terdiri dari dua hipotesis utama yaitu hipotesis *Structure-Conduct-Performance* (SCP) dan hipotesis *Relative Market Power* (RMP) (Ayadi dan Ellouze, 2013). Penelitian ini berusaha untuk menguji keberadaan kedua hipotesis tersebut pada industri perbankan di Indonesia. Keberadaan hipotesis SCP biasanya diuji dengan menganalisis hubungan antara profitabilitas dan tingkat konsentrasi bank. Apabila terbentuk suatu hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut menunjukkan adanya perilaku tidak kompetitif dan pasar yang terkonsentrasi (Goldberg & Rai, 1996; Bikker dan Haaf, 2002; Sathye & Sathye, 2004; Seelanatha, 2010).

Hipotesis SCP meyakini bahwa dengan memiliki kekuatan pasar, suatu bank pada pasar yang terkonsentrasi dapat membebaskan bunga pinjaman yang lebih tinggi, membayar bunga deposito dan biaya kolusi yang lebih rendah untuk memperoleh keuntungan diatas normal profit (Evanoff & Fortier, 1988; Park & Weber, 2004). Hipotesis RMP menyatakan bahwa bank dengan pangsa pasar yang relatif besar dan beberapa produk yang terdiferensiasi akan memiliki kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan superior (Fu dan Hefferman, 2009; Behame, 2012). Terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar diantara kedua hipotesisi ini yaitu SCP lebih menekankan tingkat konsentrasi sebagai penentu profitabilitas bank, sedangkan RMP menekankan bahwa profit yang lebih tinggi merupakan hasil dari pangsa pasar individu bank yang semakin besar tetapi tidak berasal dari perilaku kolusif antar bank (Gajurel & Pradhan, 2011)

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk membuktikan eksistensi hipotesis-hipotesis tersebut. Molyneux dan Forbes (1995) meneliti hubungan antara struktur pasar dan kinerja pada 18 negara di Eropa selama periode 1986-1989 dengan menggunakan data panel periode tahunan. Pada penelitian ini, ROA digunakan sebagai variabel dependen yang mewakili kinerja bank. Variabel independen yang digunakan meliputi variabel karakteristik pasar dan karakteristik bank yaitu rasio konsentrasi sepuluh bank terbesar (CR10) untuk mengukur struktur pasar dan pangsa pasar (MS) untuk melihat efisiensi bank. Beberapa variabel kontrol seperti variabel risiko, biaya, ukuran dan kepemilikan juga disertakan dalam model. Hasil penelitian ini membuktikan eksistensi pendekatan SCP tradisional di 18 negara Eropa tersebut.

Chirwa (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara profitabilitas dan struktur pasar pada industri perbankan di Malawi. Eksistensi hipotesis SCP pada industri perbankan Malawi terbukti secara kuat sebagaimana ditunjukkan oleh hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat konsentrasi dan profitabilitas bank umum di Malawi. Beberapa penelitian lain seperti Berger, et al (1997), Bhatti & Hussain (2010) dan Gajurel & Pradhan

(2011) membuktikan eksistensi SCP bahwa peningkatan konsentrasi industri perbankan akan menurunkan tingkat kompetisi dan meningkatkan profitabilitas bank.

Pada beberapa studi sebelumnya, telah ditemukan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara pangsa pasar dan profitabilitas bank, sementara hubungan positif antara konsentrasi pasar dan kinerja bank belum ditetapkan. Temuan tersebut telah menghasilkan dua interpretasi yang berbeda. Dengan menggunakan pangsa pasar sebagai proxy dari efisiensi, Smirlock (1985) dan Evanoff & Fortier (1988) berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat konsentrasi dan profitabilitas, melainkan dengan pangsa pasar. Pangsa pasar yang besar memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensinya sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas perbankan. Dengan kata lain temuan ini menganggap efisiensi sebagai faktor utama yang menentukan profitabilitas suatu bank. Namun, hal ini mengundang pertanyaan dari beberapa peneliti lain mengenai validitas penggunaan pangsa pasar sebagai proxy efisiensi. Selain itu temuan ini dianggap lebih mendukung hipotesis RMP yang merupakan bagian dari hipotesis kekuatan pasar dibandingkan dengan hipotesis efisiensi-struktur yang menekankan peran efisiensi pada kinerja bank.

Penolakan terhadap eksistensi SCP hypothesis ditunjukkan pula pada penelitian Sathye & Sathye (2004), Park & Weber (2004), Mensi & Zouari (2010) dan Yudaruddin (2014) yang menyebutkan bahwa peningkatan profitabilitas bank disebabkan oleh efisiensi bank, bukan karena meningkatnya konsentrasi pada industri perbankan, yang berarti pula mendukung eksistensi *efficiency structure hypothesis* dalam menjelaskan hubungan antara struktur pasar dan kinerja bank.

Zheangchao dan Qin (2010) menganalisis hubungan antara struktur pasar perbankan Cina dan kinerja digunakan data panel dari 14 bank komersial utama di Cina dari tahun 2000 hingga 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar dari pasar perbankan Cina adalah oligopoli dan derajat oligopoli mengalami penurunan secara bertahap. Penelitian mereka juga menyimpulkan bahwa tingkat oligopoli memiliki korelasi negatif dengan kinerja, tetapi rasio pinjaman terhadap deposito dan rasio kecukupan modal memiliki korelasi positif dengan kinerja. Selain itu, variabel kontrol yang terdiri dari pangsa pasar, PDB per kapita dan porsi pertumbuhan industri tersier di PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank.

Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi struktur pasar dan membuktikan eksistensi dua hipotesis yang menjadi bagian dari Hipotesis Kekuatan Pasar yaitu hipotesis SCP dan RMP pada industri perbankan di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan perbankan di Indonesia. Goldberg & Rai (1996) dan Sathye & Sathye (2004) berpendapat bahwa apabila hipotesis SCP terbukti keberadaannya pada industri perbankan, maka otoritas pengawas harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin merger terutama yang melibatkan bank-bank berukuran besar karena akan semakin mengurangi tingkat kompetisi pada industri perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel dari 10 bank umum yang memiliki pangsa aset terbesar di Indonesia selama rentang waktu 2001-2013. Data perbankan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan bank yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan. Data variabel lain seperti pertumbuhan GDP yang dikumpulkan dari Bank Dunia.

Untuk mempelajari hubungan antara struktur perbankan dan kinerja, penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menguji dua hipotesis yang merupakan bagian dari teori kekuatan pasar, yaitu struktur perilaku kinerja (SCP) hipotesis dan kekuatan pasar relatif (RMP) hipotesis. Model regresi dan variabel yang digunakan dalam makalah ini berdasarkan metode yang diadopsi oleh studi dari Seelanatha (2010); Ayadi dan Ellouze (2013). Fungsi estimasi dinyatakan sebagai berikut:

$$ROA_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 HHI_t + \beta_2 MS_{i,t} + \beta_3 BOPO_{i,t} + \beta_4 Size_{i,t} + \beta_5 Risk + \beta_6 GDP_t + \varepsilon_{i,t}$$

dimana ROA adalah kinerja bank, β adalah koefisien estimasi, dan ε adalah *error term*. Pada penelitian ini, pengukuran kinerja bank dilakukan berbasis pada profitabilitas. Oleh karena itu variabel ROA akan digunakan sebagai variabel dependen yang menggambarkan kinerja bank. Pemaparan mengenai variabel-variabel yang disertakan pada fungsi estimasi diatas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Table 1
Description of Variable

Variabel	Simbol	Keterangan
Kinerja	$ROA_{i,t}$	Variabel yang menggambarkan kinerja bank i pada tahun ke-t, dihitung menggunakan <i>return on assets</i>
Konsentrasi Pasar	HHI_t	Variabel struktural yang menggambarkan tingkat konsentrasi pasar pada tahun t, dihitung menggunakan Herfindahl-Hirschman Index untuk total assets
Pangsa Pasar	$MS_{i,t}$	Variabel struktural yang menggambarkan pangsa pasar DPK bank i pada tahun t
Efisiensi	$BOPO_{i,t}$	Variabel kontrol yang menggambarkan efisiensi bank, diwakili oleh rasio biaya operasional dan pendapatan operasional bank i pada tahun t
Karakteristik Bank	$size_{i,t}$	Variabel kontrol yang menggambarkan ukuran bank, diwakili oleh Log total assets bank i pada tahun t
Risiko Bank	$risk_{i,t}$	Variabel kontrol yang menggambarkan risiko yang dihadapi bank, diwakili oleh LDR bank i tahun t
Makroekonomi	GDP_t	Variabel kontrol yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada tahun t, diproxy dengan GDP growth

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif naratif dan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel melingkupi uji-uji yang dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Panel Least Square (PLS) dan Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara PLS dan FEM sedangkan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model FEM dan REM. Tapi, untuk menentukan model tersebut juga dimungkinkan dari asumsi lain, sebagai contoh apabila

jumlah cross section (N) kurang dari waktu (T) maka sudah dipastikan model tersebut tidak sesuai dengan Random Effect Model (Gujarati, 2004:650).

Untuk membuktikan keberadaan hipotesis SCP dan RMP, tanda koefisien untuk variabel yang mewakili konsentrasi (HHI) dan pangsa pasar (MS) harus signifikan dan positif. Variabel yang digunakan untuk mewakili struktur pasar dalam penelitian ini adalah Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Selain HHI, *k bank Concentration Ratio* (CRk) biasanya juga digunakan untuk mewakili struktur pasar, tapi CRk adalah indeks mutlak yang hanya mewakili pangsa pasar k bank terbesar dan tidak dapat mencerminkan seluruh perusahaan dalam industri. Sebaliknya, HHI didefinisikan sebagai jumlah dari kuadrat pangsa pasar dari semua bank yang dalam industri dan dirumuskan:

$$HHI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i}{Q}\right)^2 = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Untuk persamaan ini, n merupakan jumlah bank, qi mewakili skala bank i dan Q merupakan skala total pasar, sehingga qi / Q mewakili pangsa pasar bank i. Mengacu pada bekerja pada Zhengchao dan Qin (2012), Tabel 2 menunjukkan klasifikasi tipe struktur pasar menggunakan HHI.

Table 2
Klasifikasi struktur pasar berdasarkan HHI

	Tipe	Rentang HHI
	Oligopoli tinggi I	HHI ≥ 3000
Tipe Oligopoli HHI ≥ 1000	Oligopoli tinggi II	3000 > HHI ≥ 1800
	Oligopoli rendah I	1800 > HHI ≥ 1400
	Oligopoli rendah II	1400 > HHI ≥ 1000
Tipe Persaingan HHI < 1000	Persaingan I	1000 > HHI ≥ 500
	Persaingan II	500 > HHI

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Struktur Pasar Industri Perbankan di Indonesia

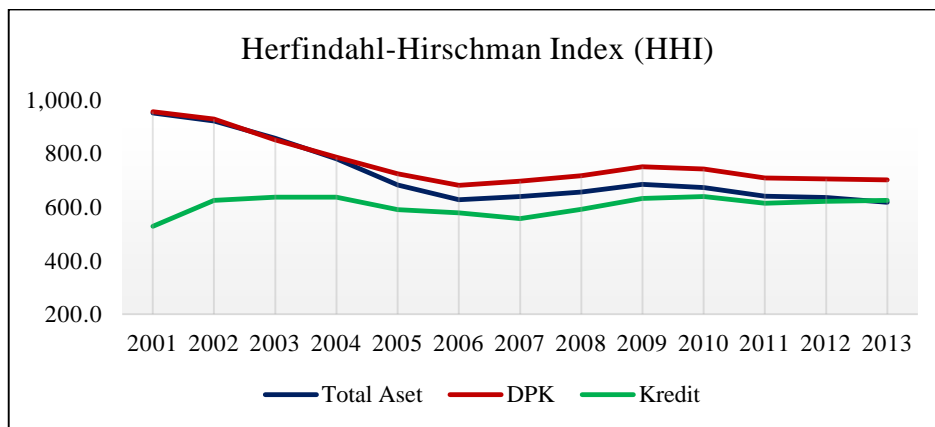
Perhitungan menggunakan HHI merupakan pendekatan struktural yang diartikan sebagai penjumlahan kuadrat pangsa pasar yang dimiliki oleh setiap bank dalam industri untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan. Perhitungan HHI tidak hanya menggunakan beberapa bank terbesar saja, melainkan menggunakan seluruh bank yang ada dalam industri. Hasil perhitungan HHI berdasarkan pasar aset, DPK dan kredit industri perbankan Indonesia selama periode 2001-2013 dipaparkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil perhitungan HHI

HHI	Tahun												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aset	949,2	920,0	855,3	779,1	681,9	626,7	638,8	654,9	683,2	671,5	639,4	635,2	617,0
DPK	954,4	926,7	849,0	785,0	723,5	680,4	696,1	716,5	749,7	741,6	707,1	704,4	700,5
Kredit	528,1	624,5	635,5	635,7	589,4	578,0	556,3	590,4	631,6	638,5	613,1	621,0	624,4

Hasil perhitungan HHI aset, DPK dan kredit menunjukkan nilai yang berfluktuasi setiap tahunnya selama periode pengamatan. Tabel 3 menunjukkan terjadi penurunan nilai HHI aset dari tahun 2002 sebesar 920 menjadi 626,7 tahun

2006 (terjadi penurunan sebesar 31,88%), kemudian kembali meningkat selama kurun waktu tiga tahun menjadi 683,2 tahun 2009, dan kembali turun hingga mencapai 617 pada tahun 2013. Hasil perhitungan HHI DPK menunjukkan tren perubahan yang sama dengan HHI aset yaitu mengalami penurunan sebesar 28,71% dari 954,4 pada 2001 menjadi 680,4 pada 2006. HHI DPK kembali meningkat menjadi 749,7 pada tahun 2009, kemudian kembali turun menjadi 700,5 pada tahun 2013. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh HHI kredit dimana terjadi peningkatan nilai HHI di awal periode pengamatan hingga tahun 2004, kemudian turun sebesar 12,5% menjadi 556,3 tahun 2007 dan kembali meningkat hingga mencapai 624,4 pada tahun 2013. Mengacu pada klasifikasi struktur pasar yang dipaparkan oleh Zhengchao dan Qin (2012), maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar industri perbankan di Indonesia berada pada tipe Persaingan I dengan besaran HHI kurang dari 1.000 ($1000 > HHI \geq 500$) yaitu berkisar antara 528,1 - 954,4. Gambar 3 berikut akan memaparkan fluktuasi nilai HHI selama periode 2001-2013.



Gambar 3
Fluktuasi nilai HHI pasar aset, DPK dan kredit periode 2001-2013

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa HHI pasar aset dan DPK memiliki tren menurun selama periode pengamatan, sebaliknya HHI pasar kredit menunjukkan tren yang meningkat. Turunnya nilai HHI pasar aset dan DPK mengindikasikan bahwa konsentrasi di pasar aset dan DPK semakin menurun atau dengan kata lain kondisi persaingan di kedua pasar tersebut menjadi semakin kompetitif. Namun sebaliknya, tren meningkat yang ditunjukkan oleh HHI pasar kredit menunjukkan bahwa pasar semakin terkonsentrasi selama periode pengamatan. Selain itu, melalui Gambar 2 tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pasar DPK merupakan pasar dengan derajat konsentrasi tertinggi, sedangkan pasar kredit memiliki derajat konsentrasi terendah dan merupakan pasar yang paling kompetitif dibandingkan kedua pasar lainnya.

Penurunan tingkat konsentrasi dan ketimpangan yang terjadi di pasar aset dan DPK tersebut tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting dalam industri perbankan mulai dari dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan kebijakan *single presence policy*, hingga peraturan kepemilikan modal minimum yang pada akhirnya diikuti oleh keputusan beberapa bank untuk melakukan merger. Selama periode 2004-2006 terjadi tiga proses merger yang melibatkan 5 bank berukuran kecil dan 2 bank berukuran besar. Kemudian pada periode 2007-2011 kembali terjadi 7 merger yang melibatkan 2 bank berukuran

besar, 5 bank sedang dan 8 bank kecil. Merger yang sebagian besar dilakukan oleh bank berukuran kecil dan sedang menghasilkan ukuran aset yang dimiliki bank-bank tersebut menjadi lebih besar sekaligus meningkatkan kemampuan bank dalam menghimpun DPK yang lebih besar pula. Hal tersebut melatarbelakangi terjadinya penurunan derajat konsentrasi dan ketimpangan di pasar aset dan DPK karena distribusi pangsa aset dan DPK antara bank besar, sedang dan kecil menjadi lebih merata dari sebelumnya. Sebaliknya, peningkatan derajat konsentrasi di pasar kredit terjadi karena meningkatnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara keseluruhan, namun kredit yang disalurkan oleh bank-bank besar (bank-bank dominan) mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank berukuran kecil dan sedang sehingga menyebabkan konsentrasi di pasar kredit memiliki tren yang meningkat selama periode pengamatan.

b. Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Penilaian baik atau tidaknya kualitas persebaran data pada sebuah variabel dapat diketahui melalui perbandingan nilai standar deviasi dan nilai rata-rata (mean). Sebuah variabel dikatakan memiliki persebaran data yang baik apabila nilai standar deviasinya lebih kecil dibanding nilai rata-rata. Hal ini dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga apabila nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias. Tabel 3 memaparkan hasil deskriptif statistik data yang digunakan dan menunjukkan bahwa dari tujuh variabel yang dimasukkan dalam model, 5 diantaranya memiliki persebaran data yang baik, sedangkan 2 sisanya kurang baik.

Tabel 3
Hasil analisis statistik deskriptif

	ROA	HHI	MS	BOPO	SIZE	RISK	GDP
Std. Dev	3.1988	112.5114	0.0529	55.2211	0.9131	33.6292	0.7913
Mean	2.9899	719.3902	0.0675	127.3549	18.4338	96.2015	5.3953
Maximum	10.8100	949.2112	0.2331	309.7000	20.2881	177.3100	6.3450
Minimum	-13.4000	616.9604	0.0000	1.7400	16.5844	25.3400	3.6435
Persebaran Data	Baik	Kurang baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Apabila ditinjau dari nilai maksimum dan minimumnya, ROA memiliki nilai minimum sebesar -13,40 dan nilai maksimum sebesar 10,81. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh, menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan profitabilitas bank tidak jauh berbeda setiap tahunnya namun cenderung positif. Variabel HHI memiliki nilai terendah sebesar 616,96 dan nilai maksimum 946,21. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persaingan yang ada pada industri perbankan tidak beranjak dari level Persaingan 1 selama periode pengamatan. Begitu pula dengan variabel pangsa pasar. Selisih yang tidak jauh berbeda antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa fluktuasi pangsa pasar DPK cukup lambat namun tetap positif.

Variabel BOPO menunjukkan perkembangan yang cukup besar, dengan nilai minimum sebesar 1,74 dan nilai maksimum 309,7 serta rata-rata sebesar 127,35 mengindikasikan bahwa industri perbankan semakin efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan BOPO, variabel risiko

juga memiliki perbedaan yang cukup besar antara nilai minimum dan maksimumnya, yang berarti bahwa bank semakin berani untuk mengambil risiko tinggi dalam menjalankan usahanya demi memperoleh profitabilitas yang semakin besar. Variabel aset memiliki nilai minimum dan maksimum yang tidak terlalu jauh berbeda, sehingga diketahui bahwa perkembangan aset perbankan cukup lambat namun tetap tumbuh positif. Variabel pertumbuhan GDP bernilai minimum sebesar 3,64 sedangkan nilai maksimumnya adalah 6,34 dengan rata-rata sebesar 5,39. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia berada pada kondisi cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan yang positif.

Uji stationeritas data pada penelitian ini dilakukan dengan uji akar-akar unit (*unit root test*) melalui estimasi Philips Peron. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4 dan terlihat bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, HHI, MS dan BOPO telah stasioner pada level, sedangkan size, risk dan GDP stasioner pada 1st difference pada tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05).

Tabel 4
Hasil Uji Stasioneritas Data

Variabel	Level		1 st Difference	
	PP Statistic	PP Prob	PP Statistic	PP Prob
ROA	40.4428	0.0044**	122.907	0.0000**
HHI	50.3033	0.0002**	53.5833	0.0001**
MS	42.0081	0.0028**	122.353	0.0000**
BOPO	104.479	0.0000**	144.556	0.0000**
Size	0.03081	1.0000 ^x	36.2328	0.0144**
Risk	11.2052	0.9407 ^x	104.333	0.0000**
GDP	2.65673	1.0000 ^x	168.234	0.0000**

Ket: ^x) tidak stasioner, *) signifikan pada $\alpha = 1\%$, **) signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, karena data yang digunakan adalah data panel, maka perlu dilakukan uji-uji untuk menentukan model terbaik antara PLS, FEM maupun REM. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai F test maupun chi-square signifikan ($p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$) sehingga model FEM lebih baik dibandingkan model PLS. Gujarati (2004:650) memaparkan bahwa apabila jumlah *cross section* (N) kurang dari waktu (T) maka sudah dipastikan model tersebut tidak sesuai dengan REM. Berdasarkan asumsi tersebut karena jumlah cross section pada penelitian ini kurang dari waktu, maka model yang digunakan adalah model FEM.

Tabel 5
Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

	C	HHI	MS	BOPO	SIZE	RISK	GDP
Coefficient	40.38742	0.001098	52.23368	-0.03759	-2.46323	0.065786	0.399354
Probability	0.0065	0.7877	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000	0.2792
	R-Square	Adj. R ²	S.E.of Regression		F. Stat	Prob (F-Stat)	
	0.736272	0.701571	1.747478		21.21755	0.00000	

Berdasarkan Tabel 5, koefisien variabel HHI bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan derajat konsentrasi akan disertai dengan peningkatan profitabilitas bank, namun dalam kasus ini tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa HHI yang mewakili struktur pasar tidak memiliki pengaruh

terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan hipotesis SCP yang meyakini bahwa tingkat konsentrasi atau struktur pasar menjadi faktor penentu utama profitabilitas bank tidak terbukti di Indonesia. Penolakan terhadap eksistensi hipotesis Sp pada penelitian ini mendukung temuan dari Sathye & Sathye (2004), Park & Weber (2004), Mensi & Zouari (2010) dan Yudaruddin (2014), sebaliknya bertentangan dengan Moleyneux dan Forbes (1995), Berger, et al (1997), Chirwa (2003), Bhatti & Hussain (2010) dan Gajurel & Pradhan (2011).

Koefisien estimasi pangsa pasar dalam model ini secara statistik lebih besar dari nol dan signifikan. Hasil ini berarti bahwa pangsa pasar DPK sebagai proxy dari kekuatan pasar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas/kinerja bank. Semakin luas pangsa pasar DPK yang dimiliki maka semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh suatu bank. Dengan demikian, temuan ini mendukung keberadaan hipotesis RMP pada industri perbankan di Indonesia dan mendukung hasil penelitian Smirlock (1985) dan Evanoff & Fortier (1988) yang meyakini bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat konsentrasi dan profitabilitas, melainkan dengan pangsa pasar.

Hasil estimasi beberapa variabel kontrol yang disertakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien BOPO yang merupakan rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional bernilai negatif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan terbalik antara BOPO dan ROA yaitu semakin kecil BOPO atau semakin efisien kegiatan usaha perbankan, maka semakin tinggi ROA atau profitabilitas yang diterima bank. Dengan ini, diketahui bahwa tingkat efisiensi usaha bank juga berpengaruh besar dalam menentukan besarnya keuntungan yang diterima bank.

Efisiensi kegiatan suatu bank juga tidak dapat dipisahkan dari karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini diwakili oleh besarnya aset yang dimiliki bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin besar suatu bank biasanya akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dibandingkan dengan bank-bank kecil dengan modal dan aset yang terbatas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank berbanding terbalik dengan profitabilitas, tetapi berpengaruh signifikan. Sebaliknya, variabel resiko yang diproxy dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya yaitu penelitian Seelanatha (2010) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi bank dapat mendorong bank untuk memperoleh *superior profit*.

Variabel kontrol terakhir yang disertakan adalah pertumbuhan GDP untuk mewakili variabel makroekonomi. Meskipun peran sektor perbankan cukup vital dalam pendorong perputaran perekonomian suatu negara, namun dalam kasus ini pertumbuhan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank.

PENUTUP

Paper ini bertujuan untuk menganalisis kondisi struktur pasar dan melihat hubungan antara struktur pasar dan kinerja industri perbankan serta menguji eksistensi hipotesis kekuatan pasar yang terdiri dari *structure-conduct-performance* (SCP) *hypothesis* dan *relative market power* (RMP) *hypothesis* pada industri perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan data panel

terhadap sepuluh bank terbesar di Indonesiaselama periode 2001-2013, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi struktur pasar industri perbankan di Indonesia ditinjau dari pasar aset, DPK dan kredit masih tergolong pada tipe kompetisi 1 yaitu dengan nilai HHI kurang dari 1000. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasar DPK merupakan pasar dengan tingkat konsentrasi tertinggi sedangkan pasar kredit memiliki tingkat konsentrasi terendah.

Hasil kedua menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan antara struktur pasar dengan kinerja bank. Hal ini berarti bahwa hipotesis SCP ditolak keberadaannya di Indonesia, sebaliknya hipotesis RMP dibuktikan eksistensinya karena terdapat hubungan positif dan signifikan antara pangsa pasar dengan kinerja perbankan.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat semakin mendorong kebijakan merger dan akuisisi untuk meningkatkan konsolidasi perbankan terutama bagi bank berukuran kecil dan sedang, mengingat program merger di Indonesia masih berjalan cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya, serta jumlah bank di Indonesia yang masih cukup banyak dan didominasi oleh bank kecil-sedang dengan struktur permodalan yang masih lemah. Penolakan terhadap eksistensi hipotesis SCP dan struktur pasar yang masih tergolong pada tipe Persaingan 1 mengindikasikan bahwa peluang melakukan merger antar bank di Indonesia masih terbuka lebar. Namun, kebijakan tersebut harus disertai pula dengan kebijakan-kebijakan lainnya untuk menanggulangi masalah pasca merger dilakukan, terutama yang berkaitan dengan nasib karyawan bank yang melakukan merger.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayadi, I. & Ellouze, A. (2013). Market Structure and Performance of Tunisian Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(2): 345-354
- Bhatti, G.A. & Hussain, H. (2010). Evidence on Structure Conduct Performance Hypothesis in Pakistani Commercial Banks. *International Journal of Business and Management*, 5(9): 174-187
- Bikker, J.A. and Haaf, K. (2002). Competition, Concentration and Their Relationship: An Empirical Analysis of the Banking Industry. *Journal of Banking & Finance*, 26(11): 191-214
- Chirwa, E.W. (2003). Determinants of commercial bank's profitability in Malawi: a Cointegration Approach. *Applied Financial Economics*, 13(8):565-571
- Evanoff, D.D & Fortier, D.L(1988). Reevaluation of the Structure-Conduct-Performance Paradigm in Banking. *Journal of Financial Services Research*, 1: 277-294
- Fu, X. (Maggie) dan Hefferman, S. (2009). The Effect of Reform on China's Bank Structure and Performance. *Journal of Banking & Finance* 33(2009): 39-52
- Gajurel, D.P & Pradhan, R.S. (2011). Structure-Performance Relation in Nepalese Banking Industry
- Goldberg, L.G. & Rai, A. (1996). The Structure-performance Relationship for European Banking. *Journal of Banking & Finance*, 20(4): 745-71.

- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometric*, fourth edition. New York: The McGraw-Hill Companies Ltd.
- Hoffmann, P.S. (2011). Determinants of Profitability of the US Banking Industry. *International Journal of Business and Social Science*, 2(22): 255-269
- Malik, N. (2008). Struktur Pasar dan Perilaku Kompetitif Industri Perbankan Indonesia Pasca Implementasi API 2004. *Ekonomika-Bisnis* 1(1): 93-110
- Martin, S. (1994). *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy Second Edition*. New York: Macmillan Publishing Company
- Maudos, J. (1998). Market Structure and Performance in Spanish Banking using a Direct Measure of Efficiency. *Applied Financial Economics*, 8: 191-200
- Mensi, S. & Zouari, A. (2010). Efficient Structure versus Market Power: Theories and Empirical Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 2(4):151-166
- Molyneux, P. & Forbes, W. (1995). Market Structure and Performance in European Banking. *Applied Economics*, 27 (2): 155-59.
- Mulyaningsih, T dan Daly A. (2011). Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration in the Indonesia Banking Industry between 2001 and 2009. *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, 14(2):151-186
- Park, K.H & Weber, W.L. (2004). Profitability of Korean Banks: Test of Market Structure versus Efficient Structure. *Journal of Economics and Business* 58(2006): 222-239
- Sathye, S. & Sathye, M. (2004). Structure, Conduct and Performance Relationship in Indian Banking. *Journal of Indoan School of Political Economy*, 16(1): 1-11
- Seelanatha, L. (2010). Market Structure, Efficiency and Performance of Banking Industry in Sri Lanka. *Banks and Bank Systems*, 5(1): 20-31
- Smirlock, M. (1985). "Evidence on the (Non) Relationship between Concentration and Profitability in Banking". *Journal of Money, Credit and Banking*, 17(1): 69-83
- Sutardjo, Daryanto, Arifin dan Priyarsono. (2011). Struktur Pasar Persaingan Perbankan Indonesia dalam Periode Konsolidasi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 8(2):115-128
- Widyastuti, S. dan Armanto B. 2013. Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. *BuletinEkonomi Moneter dan Perbankan*, 15(4):418-436
- Yudaruddin, R. 2014. Dampak Tingkat Konsentrasi Terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan di Indonesia Tahun 2003-2013. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2): 278-286

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
(Pendekatan *Vector Error Correction Model*)**

Imam Mukhlis dan Nora Ria Retnasih
Prodi Ilmu Ekonomi PPS
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
e-mail : imm_mkl@yahoo.com dan rhaarianto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1990-2013. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan model linier dinamis sebagai alat analisis data penelitian. Alat analisis tersebut meliputi ; uji stasionaritas data, uji koitegrasi dengan menggunakan Uji Johanson dan Uji Vector Error Correction Model (VECM). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun dokumen yang digunakan adalah data publikasi yang disediakan ASEAN Development Bank (ADB). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) dalam jangka panjang dipengaruhi secara signifikan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam jangka pendek variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berkenaan dengan hasil tersebut pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek didorong melalui pengembangan ekonomi di sektor riil melalui pengembangan sektor UMKM. Dengan kegiatan ini, maka diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi seperti ; konsumsi, investasi dan produksi.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Pengeluaran Pemerintah, Uji Kointegrasi, Vector Error Correction Model

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors affecting Indonesian economic growth for 1990-2013. The type of this research is quantitative with dynamic approach as tools of the data analyze. The tools of analyze are ; stationary test, cointegration test, and Vector Error Correction Model (VECM). The result of analyze show that in the long run, consumption, investment, government expenditure, and net export have significant effect to Indonesian economic growth. Although in the short run those variable have not significant effect to the Indonesian economic growth. Based on the result, achieving economic growth in the short run can support by improving economic activity in small medium enterpris. By doing so, it hope improve the economic activity like consumption, investment and production.

Keywords : Economic Growth, Government Expenditure, Cointegration Test, Vector Error Correction Model

PENDAHULUAN

Kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara, selalu bergantung pada naik turunnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas output yang dapat dihasilkan perekonomian dalam periode waktu tertentu. Menurut Sitepu, dkk (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran negara tersebut. Dalam perhitungannya pertumbuhan ekonomi diukur melalui perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat tercermin melalui peningkatan nilai PDB dari waktu ke waktu. PDB yang tinggi tersebut dapat dicapai manakala *Agregate demand* dalam perekonomian mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam hal ini PDB dapat dibentuk melalui kegiatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih.

Komponen konsumsi dalam *Agregate Demand* dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat (Nurhuda, dkk., 2013). Kegiatan konsumsi tersebut dapat dilakukan oleh kelompok rumah tangga. Semakin besar penduduk membawa implikasi pada kebutuhan konsumsi yang besar. Pemenuhan konsumsi ini akan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi suatu negara. Menurut teori neo klasik Solow Swan dalam Nurhuda, dkk (2013) pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor produksi. Sehingga semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula jumlah produksi yang dilakukan di negara tersebut. Terjadinya peningkatan produksi ini akan sekaligus meningkatkan konsumsi masyarakatnya, karena peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat selalu diimbangi pula oleh peningkatan daya beli masyarakat tersebut.

Komponen selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu investasi. Dalam perspektif Teori Harrod Domar, investasi dipandang sebagai faktor endogen pertumbuhan ekonomi. Investasi yang semakin besar semakin mendorong perluasan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini investasi pada suatu negara terdiri dari investasi pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah dijalankan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, sedangkan investasi swasta dapat berasal dari dalam maupun luar negeri (Nizar, dkk, 2013). Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan juga kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan juga taraf kemakmuran masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk membiayai kegiatan perekonomian yang tersusun dalam anggaran belanja negaranya. Menurut Sitaniapessy (2013) pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian. Pada umumnya sektor fundamental dari pengeluaran pemerintah adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena tujuan utama adanya kebijakan pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin besarnya anggaran pengeluaran pemerintah, maka besar kapasitas kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendorong kegiatan ekonomi.

Komponen *aggregate demand* yang terkait kegiatan ekonomi luar negeri adalah ekspor dan impor. Dalam era perekonomian global, kegiatan ekonomi luar negeri ini memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Menurut Millia (2013) ekspor *netto* merupakan sektor eksternal yang

dapat mempengaruhi sektor internal suatu negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dalam negara tersebut. Aktifitas ekspor merupakan insentif bagi pertumbuhan dan kemajuan sektor ekonomi lainnya. Perkembangan ekspor menciptakan permintaan baru dimana perluasan ekspor mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui rangsangan permintaan terhadap sektor lain. Semakin tinggi nilai ekspor terhadap impor mengindikasikan hasil surplus dalam perdagangan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia memiliki beban berat dalam rangka mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya. Perekonomian global yang mengalami volatilitas dalam perkembangannya, memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu tahun 1990-2013 telah terjadi serangkaian peristiwa ekonomi luar negeri yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam hal ini krisis keuangan yang terjadi di negara-negara maju sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian di negara-negara *emerging market* seperti di Indonesia. Pada saat yang sama Indonesia semakin terintegrasi perekonomiannya dengan negara lain, seperti dalam komunitas ekonomi ASEAN, kerjasama ekonomi Asia Pasifik dan kerjasama ekonomi ASEAN China. Namun demikian, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanannya ditengah turbulensi perekonomian global. Dalam hal ini ketahanan perekonomian nasional sangat ditopang oleh jumlah penduduk, sumber daya alam, dan lokasi strategis Indonesia pada jalur perdagangan dunia.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1990-2013. Faktor-faktor tersebut seperti ; konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Pada masa tersebut Indonesia dihadapkan pada krisis ekonomi yang berkepanjangan, yaitu krisis moneter pada tahun 1997 dan juga krisis global pada tahun 2008. Dampak dari adanya krisis ini tentunya dapat menggoncang perekonomian dalam negeri dan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dimana data diperoleh melalui dinas atau instansi terkait, yaitu ASEAN Development Bank (ADB). Seluruh data diambil pada kurun waktu dari tahun 1990-2013.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan analisa kuantitatif berupa pengolahan data yang diperoleh dengan berdasarkan metode statistik dan matematika ekonomi. Jenis data yang digunakan merupakan data runtun waktu sehingga sebelum melakukan analisa, data harus di Uji stasioneritasnya terlebih dahulu untuk menghindari adanya data yang bersifat lancung. Uji stasioneritas menggunakan Uji Augmented Dickey Fuller dengan model estimasi sebagai berikut.

$$\Delta y_t = (\rho - 1)y_{t-1} + \alpha_i \sum_{i=1}^m \Delta y_{t-1} + \mu_t$$

Selanjutnya dilakukan analisis kointegrasi dengan menggunakan uji Johansson untuk melihat pengaruh jangka panjang dari variabel yang diteliti.

$$\lambda_{\text{Trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^g \ln(1 - \lambda_i)$$

$$\lambda_{\text{Max}}(r, r + 1) = -T \ln(1 - \lambda_{r+1})$$

Uji VECM digunakan untuk melihat adanya hubungan jangka pendek antar variabel.

$$\Delta Z_t = \alpha\beta Z_{t-1} \sum_1^{p-1} \Gamma_1 \Delta Z_{t-1} + \delta\emptyset + E_t$$

Secara keseluruhan analisis ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Konsumsi, Investasi, pengeluaran pemerintah, dan Ekspor bersih di Indonesia pada tahun 1990-2013. Selanjutnya hasil analisis dijelaskan secara deskriptif dengan dibandingkan dengan teori yang ada.

Hasil

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Eviews. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih memiliki data yang stasioner pada derajat derajat 1.

Tabel 1
Hasil Uji Stasioner

Variabel	Level		First Difference	
	ADF test	Critical Value (1%)	ADF test	Critical Value (1%)
Y	0.146905	-3.752946	-4.805095	-3.769597
C	-0.134862	-3.752946	-4.803058	-3.769597
I	0.683563	-3.752946	-4.728505	-3.769597
G	0.331643	-3.752946	-4.483439	-3.769597
XN	-0.110819	-3.752946	-5.638118	-3.769597

Sumber : Hasil Olah data

Berdasarkan hasil uji stasioneritas yang tertera pada tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini memiliki kestasioneran pada derajat yang sama, yaitu derajat 1. Stasioneritas data dapat diukur dengan membandingkan nilai dari ADF test dan *Critical value*. Data dikatakan stasioner apabila hasil dari uji ADF lebih besar dari nilai *critical value*-nya.

Selanjutnya, data dilakukan uji kointegrasi dengan menggunakan uji Johansson untuk melihat adanya hubungan jangka panjangnya dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Kointegrasi Johansson

Ho:r	Eigen Value(λ_i)	Trace Statistic	λ_{Trace} (95%)	Probability
None*	0.875045	106.3182	69.81889	0.0000
At Most 1*	0.840650	60.56252	47.85613	0.0021
At Most 2	0.446438	20.15612	29.79707	0.4123
At Most 3	0.275389	7.145728	15.49471	0.5608
At Most 4	0.002682	0.059074	3.841466	0.8079

Sumber : Hasil Olah data E-views 7

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih memiliki hubungan jangka panjang selama kurun waktu 1990-2013, hal ini dibuktikan dengan hasil probabilitas uji Johansson yang menunjukkan nilai kurang dari signifikansi 5%.

Untuk melihat hubungan jangka pendek dilakukan uji VECM dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Vector Error Correction Model

	Y	C	I	G	NX
Y(-1)	-1.497195 (6.09986) [-0.24545]	-1.528580 (3.50651) [-0.43593]	-0.411529 (1.27924) [-0.32170]	-0.223550 (0.43273) [-0.51660]	-0.219314 (0.95626) [-0.22935]
Y(-2)	-4.585390 (8.86664) [-0.51715]	-2.274950 (5.09700) [-0.44633]	-0.570997 (1.85948) [-0.30707]	0.125121 (0.62901) [0.19892]	-0.730779 (1.39000) [-0.52574]
C(-1)	3.325635 (9.51556) [0.34949]	3.120527 (5.47003) [0.57048]	0.751411 (1.99557) [0.37654]	0.359886 (0.67505) [0.53313]	0.579909 (1.49173) [0.38875]
C(-2)	4.280751 (13.3951) [0.31958]	1.950094 (7.70019) [0.25325]	0.246350 (2.80917) [0.08769]	-0.203729 (0.95027) [-0.21439]	0.548524 (2.09992) [0.26121]
I(-1)	0.153523 (8.37616) [0.01833]	0.079995 (4.81504) [0.01661]	0.454484 (1.75662) [0.25873]	0.089269 (0.59422) [0.15023]	-0.367692 (1.31311) [-0.28002]
I(-2)	6.027561 (6.84571) [0.88049]	3.433219 (3.93526) [0.87242]	0.915724 (1.43566) [0.63784]	-0.026074 (0.48564) [-0.05369]	1.218637 (1.07318) [1.13553]
G(-1)	0.373361 (15.3396) [0.02434]	-0.338218 (8.81801) [-0.03836]	-0.172833 (3.21697) [-0.05373]	0.481497 (1.08822) [0.44246]	0.486326 (2.40476) [0.20224]
G(-2)	5.913365 (15.0790)	2.946074 (8.66816)	2.406450 (3.16231)	0.274896 (1.06972)	0.886728 (2.36389)

	[0.39216]	[0.33987]	[0.76098]	[0.25698]	[0.37511]
NX(-1)	2.283085 (6.36205)	1.412741 (3.65723)	0.505926 (1.33423)	0.198942 (0.45133)	0.122823 (0.99736)
	[0.35886]	[0.38629]	[0.37919]	[0.44079]	[0.12315]
NX(-2)	5.486741 (7.17830)	2.939219 (4.12645)	0.968177 (1.50541)	-0.021938 (0.50924)	1.033137 (1.12532)
	[0.76435]	[0.71229]	[0.64313]	[-0.04308]	[0.91808]
C	159.8916 (264.873)	100.6853 (152.262)	44.05723 (55.5481)	6.177048 (18.7904)	-22.16522 (41.5234)
	[0.60365]	[0.66126]	[0.79314]	[0.32873]	[-0.53380]

Sumber : Hasil Olah data

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih tidak memiliki hubungan jangka pendek selama kurun waktu tahun 1990-2013. Hal ini ditunjukkan pada nilai t statistik seluruh variabel yang kurang dari 1,96.

PEMBAHASAN

Terjadinya peningkatan dalam konsumsi mencerminkan terjadinya pula peningkatan dalam produktivitas barang dan jasa. Hal ini akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksinya akibat dari peningkatan permintaan dalam masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut, begitu pula sebaliknya (Ningsih, et al:2013).

Investasi memberikan peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, dimana investasi dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dan juga alat untuk memperbesar kapasitas produksi. Peningkatan dalam investasi mencerminkan kenaikan penanaman modal baik itu dari dalam maupun luar negeri. Pertambahan jumlah modal yang ada di dalam negeri ini akan menstimulus sektor-sektor ekonomi di dalam negeri untuk memproduksi menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Sehingga pertambahan investasi dapat menyebabkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi negara pada suatu periode tertentu. Selain atas dasar teori tersebut, peningkatan investasi di Indonesia juga sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui berbagai kemudahan baik itu untuk sektor riil maupun sektor keuangan. Hal ini dilakukan karena dampak adanya investasi ini dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan.

Tujuan utama pemerintah melakukan belanja negara adalah untuk membiayai sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peranan pemerintah ditunjukkan melalui pengeluaran rutin dan pembangunan. Pada umumnya sektor unggulan yang diutamakan oleh pemerintah adalah pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berhubungan dengan anggaran belanja negara baik itu tingkat nasional maupun daerah. Pengeluaran ini digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan nasional. Peranan pemerintah dalam mengelola pendapatannya digunakan untuk menggerakkan

perekonomian sehingga akan memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Integrasi ekonomi yang telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan nasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Era perdagangan bebas yang terjadi di kawasan ASEAN sejak tahun 2000 an membawa konsekuensi akan pentingnya strategi untuk mendorong ekspor komoditi Indonesia ke negara-negara ASEAN. Dalam hal ini peningkatan ekspor mengindikasikan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Apabila barang dan jasa yang dihasilkan pelaku ekonomi dalam negeri dapat bersaing merebut pasar luar negeri, permintaan ekspor akan terus meningkat. Apabila proporsi ekspor lebih besar dari pada impor, maka neaca perdagangan akan menjadi surplus. Surplus ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan dalam menstimulus pelaku ekonomi yang berbasis ekspor dengan kebijakan tarif maupun pajak ekspor atau impor yang bersaing dengan tarif di negara lain.

Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini memberikan penegasan bahwa efek kebijakan ekonomi tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek. Dalam hal ini ada sebuah time lag yang dibutuhkan oleh pasar dalam menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang. Respon terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pada dasarnya merupakan representasi dari kesediaan dari pelaku ekonomi di pasar dalam menentukan keputusan bisnisnya. Adanya pengaruh signifikan variable konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor *netto* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang mengindikasikan sebuah proses yang melibatkan banyak pihak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikembangkan oleh Keynes dalam Mankiew (2006) yang menyatakan bahwa kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih dapat mengakibatkan kenaikan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik brutonya (PDB).

Durasi waktu dalam jangka panjang ini juga merepresentasikan kebutuhan waktu penyesuaian pelaku ekonomi dalam merespon kebijakan ekonomi dan dinamika perekonomian yang berkembang. Sebagaimana diketahui dalam periode waktu 1990-2013, situasi perekonomian luar negeri menunjukkan adanya volatilitasnya. Diantara durasi waktu tersebut perekonomian luar negeri mengalami krisis ekonomi yang kemudian berdampak pada penurunan terhadap *aggregate demand* dunia. Perlambatan perkembangan perekonomian dunia ini memiliki andil terhadap kontraksi ekonomi di negara-negara *emerging market* seperti Indonesia. Turbulensi perekonomian dunia membawa koreksi yang besar terhadap indikator perekonomian seperti ; inflasi, nilai tukar mata uang, tingkat bunga, indeks harga saham dan harga minyak dunia. Dalam hal ini keputusan pelaku pasar sangat rentan terhadap dinamika perekonomian yang berkembang sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam penyesuaiannya.

PENUTUP

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya perekonomian suatu negara. Jika ditinjau dari sudut makroekonomi pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Brutonya (PDB). Jika merujuk pada teori Harrod Domar, pertumbuhan ekonomi dapat ditopang dari Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan ekspor bersih yang

terjadi di negara tersebut pada suatu periode tertentu. Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan ekspor bersih memiliki hubungan jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia periode 1990-2013, namun tidak memiliki hubungan yang signifikan pada jangka pendek.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peranan pemerintah menjadi sangat penting melalui instrumen kebijakan baik fiskal maupun moneter untuk meningkatkan investasi baik itu dari dalam maupun luar negeri. Kemajuan investasi memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan juga pengetahuan, sehingga produktivitas barang dan jasa dalam negeri akan meningkat dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekspor. Hal ini akan membawa perubahan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena peningkatan produktivitas dalam negeri akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya pula. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif karena daya belinya menjadi meningkat. Sehingga pada akhirnya seluruh indikator yang telah dijelaskan di atas memiliki perannya masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain dalam menopang pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Development Banks. *Statistic ASEAN and Pasific*. (online) (<http://adb.org.id>), diakses Desember 2014.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro ekonomi . Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Millia, Heppi. 2013. *Pengaruh Ekspor Netto dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (analisis panel antar Provinsi)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 11(6) Juni 2013 (online) (lemlit.uho.ac.id/jtt/225.pdf) diakses Desember 2014.
- Ningsih, Efrida, dkk. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, dan Tabungan di Sumatra Barat*. Jurnal Kajian Ekonomi 1(2) Januari 2013 (online) (download.portalgaruda.org/article.php?article=24342&val=1489) diakses Desember 2014.
- Nizar, Chairul dkk. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi 1(2) Mei 2013 (online) (prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmie/images/Jurnal/.../1.1.8.chairul.nizar.pdf) diakses Desember 2014.
- Nurhuda, Sentosa, dan Idris. 2013. *Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat*. Jurnal Kajian Ekonomi 2(3) Juli 2013 (online) (ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/2740/2337) diakses Desember 2014.
- Sitaniapessy, Harry A. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD*. Jurnal Economia 9(1) April 2013 (online) (journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/download/1375/1180) diakses Desember 2014.

Sitepu, Wilsa dkk. 2009. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Singapura*. Jurnal Ekonomi Pembangunan (online) (repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34824/1/Appendix.pdf) diakses Oktober 2014.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta:Raja Grafindo Pustaka

DETERMINASI NILAI TUKAR DALAM KONSEP TEORI EFEK FISHER INTERNASIONAL: Studi Kasus Indonesia-Jepang

Lailatul Maghfiroh, Ciplis Gema Qori'ah, Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati dan M. Abd. Nasir

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

e-mail: mlmfiroh@gmail.com, ciplis_qoriah@yahoo.com, adhitya71@gmail.com, yuliaindrawati2012@gmail.com dan abdulnasir1705@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan perdagangan internasional Indonesia dalam berbagai skala telah menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan dalam mengeksplorasi sumber daya. Di samping keuntungan yang diperoleh atas kegiatan tersebut, Indonesia perlu menyiapkan spekulasi sebagai antisipasi dalam menjaga perekonomiannya. Antisipasi tersebut dapat menggunakan variabel moneter untuk memonitor perekonomian Indonesia. Variabel yang dimaksud diantaranya adalah nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi yang disatukan dalam konsep teori Efek Fisher Internasional yang mana diperoleh gambaran pergerakan nilai tukar rupiah atas perdagangan internasional. Oleh karena itu paper ini bertujuan untuk mengetahui perilaku tingkat suku bunga Indonesia, inflasi Indonesia, nilai tukar yen terhadap nilai tukar rupiah berdasarkan teori efek fisher internasional. Data paper menggunakan data runtut waktu dengan rentang waktu Juli 2005 sampai November 2011. Analisis dalam paper ini menggunakan metode Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) dan Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menggunakan estimasi DOLS berdasarkan pengukuran lag menunjukkan bahwa variabel independen yaitu tingkat suku bunga Indonesia, nilai tukar yen, dan inflasi Indonesia dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah pada jangka pendek. Pada aras lain estimasi ECM jangka pendek menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan aksi-reaksi sehingga determinasi nilai tukar rupiah didominasi oleh variabel nilai tukar yen. Selanjutnya hasil estimasi ECM jangka panjang diketahui tingkat suku bunga Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah dideterminasi oleh variabel moneter yang terkait dekat dengan perdagangan internasional sesuai dengan teori efek fisher internasional.

Kata Kunci: Teori Efek Fisher Internasional, DOLS, ECM

ABSTRACT

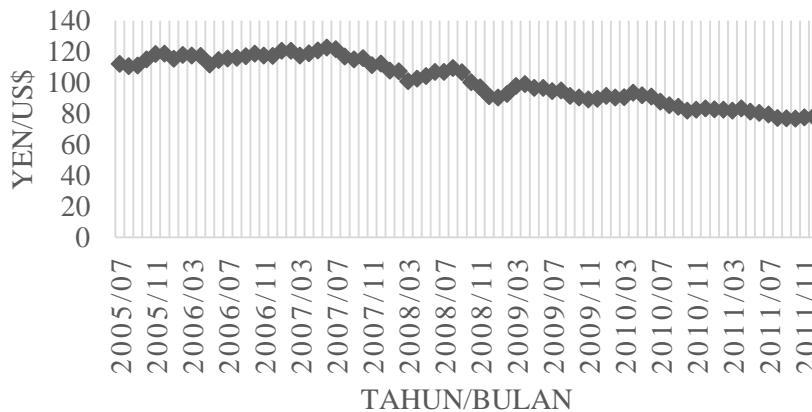
Indonesia's international trade relations in a variety scales have demonstrated Indonesia has the ability to explore resources. In addition to the profits earned on these activities, Indonesia needs to prepare speculation in anticipation in keeping the economy. Anticipation can use monetary variables to monitor the economy of Indonesia. The variables in question included exchange rates, interest rates, and inflation are united in the concept of the International Fisher Effect theory which obtained a description of exchange rate movement on international trade. Therefore, this paper aims to determine the behavior of Indonesian interest rates, Indonesian inflation, and yen exchange rate against rupiah exchange rate based on the theory of international fisher effect. Data paper used was time series data with period on July 2005 to November 2011. The analysis in this paper uses Dynamic Ordinary Least Square method (DOLS) and Error Correction Model (ECM). The results using estimates based on measurements lag DOLS indicated that the independent variable are Indonesian interest rate, yen exchange rate, and Indonesian inflation may affect exchange rate of rupiah in the short term. At another level of short-term ECM estimates indicated that there were gaps of action-reaction so that the determination of the rupiah was dominated by yen exchange rate variable. Furthermore, the estimation of ECM long-term Indonesian interest rate known no significant effect on rupiah exchange rate. It can be concluded that rupiah exchange rate determined by the monetary variables were closely related to the theory of international trade in accordance with international fisher effect.

Keywords: Theory of International Fisher Effect, DOLS, ECM

PENDAHULUAN

Penerapan sistem perekonomian terbuka di Indonesia memberikan suatu gambaran bahwa terdapat hubungan ekonomi internasional yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi ekonomi melalui variabel moneter terkait kegiatan perdagangan internasional(Kause, 2008; Jakaitiene dan Déés, 2009). Hubungan tersebut terealisasi melalui ekspor-impor Indonesia yang cukup mengagumkan karena terdapat persaingan yang cukup kuat antar negara relasi secara fluktuatif. Data pemerintah Indonesia yang menunjukkan bahwa dari 10 negara teratas destinasi ekspor Indonesia dan 10 negara teratas Pengimpor Indonesia menunjukkan hanya terdapat satu negara yang dapat menyeimbangkan harmonisasi hubungan ekspor-impor yaitu, Jepang. Namun harmonisasi hubungan perdagangan internasional tersebut tidak begitu saja berjalan dengan mudah dan lancar, berbagai gejolak ekonomi domestik dan asing memberikan dampak yang cukup besar terdapat fluktuasi ekspor-impor antara Indonesia dan Jepang.

Kondisi nyata perekonomian Jepang yang bergejolak dapat berdampak pada perekonomian Indonesia melalui variabel moneternya seperti nilai tukar dan inflasinya (Dono, 2010). Keterpengaruhannya tersebut akibat hubungan langsung antara dua negara saat hubungan ekonomi internasional masih terjalin. Dampak ekonomi tersebut dapat dilihat melalui pergerakan nilai tukar yen per dolar Amerika seperti pada gambar yang tersaji dibawah ini.

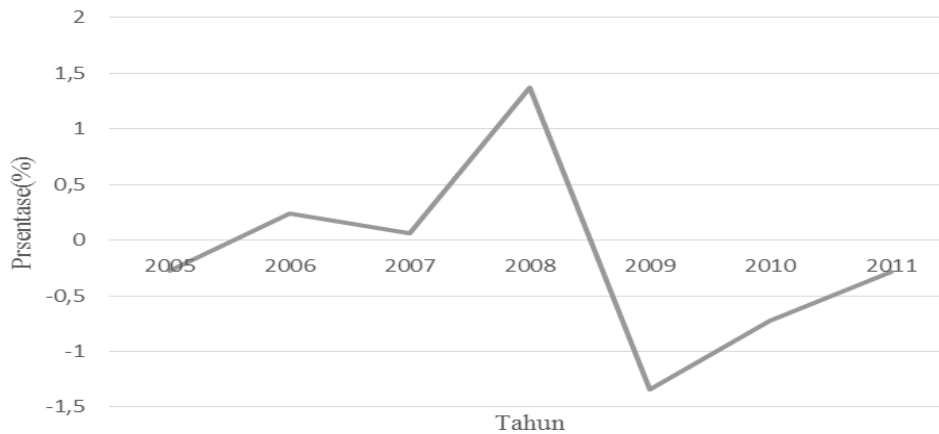


Sumber: *Bank of Japan*, diolah, 2011

Gambar 1
Perkembangan Nilai Tukar Yen/US\$ Tahun 2005-2007.

Gambar 1. menjelaskan fluktuasi data kurs Yen/US\$ yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai tukar Yen karena adanya dampak krisis dunia sehingga industri Jepang menurun dan berdampak pada kondisi perekonomian Jepang (*Bank of Japan*, 2011). Penurunan nilai tukar Yen dimulai dari gejolak inflasi yang dialami oleh Jepang (*Bank of Japan, World Bank, 2011*). Meskipun pemerintah Jepang menerapkan *Zero Interest Rate Policy (ZIRP)* yang

diharapkan dapat mengontrol pergerakan tingkat inflasi namun inflasi Jepang tetap mengalami dampak dari krisis moneter pada tahun 2007-2008 dan musibah alam yang menimpa pada tahun 2011 (*Bank of Japan, 2011*). Hantaman eksternal yang dialami tersebut tidak terelakkan berdampak pada perekonomian Jepang melalui pelaksanaan industrinya sehingga mengalami kendala yang dapat merugikan secara besar-besaran. Kerugian yang berdampak pada kerugian perekonomian negara diketahui dari fluktuasi inflasi.



Sumber: Bank of Japan, 2011, diolah.

Gambar 2
Laju Inflasi Jepang dilihat dari *Consumer Price Index* 2005-2011

Hubungan perdagangan internasional Indonesia ke Jepang terus mengalami peningkatan yang membantu peningkatan perekonomian Indonesia melalui cadangan devisa, tingkat nilai tukar rupiah, peningkatan industri ekspor dalam beberapa komoditi utama ekspor (Badan Pusat Statistik 2002-2012; Dono, 2010). Indonesia merupakan negara pengekspor barang migas dan non-migas yang memiliki berbagai tujuan negara ekspor yang telah berlaku sejak lama tetapi penelitian ini berusaha mengestimasi kuantitas ekspor untuk mengukur tingkat inflasi melalui *Consumer Price Index* dan nilai tukar rupiah. Data ekspor menunjukkan beberapa negara bagian Asia sendiri merupakan negara yang banyak menyumbang peningkatan perekonomian Indonesia melalui fluktuasi ekspor yang cukup memiliki nilai rata-rata relatif tinggi (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2002-2012). Posisi Asia sebagai eksportir yang semakin kuat dapat member sumbangsih besar dalam perbaikan beberapa sektor Indonesia terutama sektor yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor-impor.

Berbagai gejala ekonomi tersebut sebaiknya direspon pemerintah dua negara melakukan antisipasi agar tidak terjadi suatu hal yang dapat memberikan signifikansi dampak negatif yang cukup besar. Kontrol ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan memegang kendali melalui variabel moneter yang menempati ujung tombak pada kegiatan perdagangan internasional, yakni tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah (Frenkle *et al*, 2008; Fujiwara *et al*, 2011). Akan tetapi faktanya, dengan beberapa alasan di atas, Jepang merupakan negara relasi yang dapat memberikan sumbangsih terdapat upaya kontrol

ekonomi tersebut maka nilai tukar yen juga harus dipertimbangkan sebagai variabel moneter yang digunakan. Secara sadar atau tidak, upaya pemerintah tersebut sebenarnya telah mendasarkan pada satu teori ekonomi internasional yang menggambarkan hubungan aksi-reaksi variabel-variabel moneter tersebut (Ball dan McCulloch, 2000). Teori efek Fisher internasional merupakan teori yang dikembangkan menggunakan kombinasi teori paritas terutama teori efek Fisher dan teori *purchasing power parity* (Sundqvist, 2002). Berdasarkan teori ini, perekonomian Indonesia dapat dikontrol melalui nilai tukar rupiah yang dideterminasi oleh sisi domestik dan asing yaitu tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah perilaku tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar yen per dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah berjalan sesuai teori efek Fisher internasional dalam upaya mengontrol stabilitas ekonomi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Sebelum era globalisasi umumnya negara di dunia menerapkan sistem perekonomian tertutup sehingga seluruh kegiatan ekonominya hanya berlaku dalam kawasan negara sendiri (Frank dan Bernanke, 2001). Sistem perekonomian tertutup berusaha memenuhi kebutuhannya dengan menghubungkan dua sektor ekonomi yakni masyarakat dan perusahaan (Bordo, 1993; Kohn, 1997). Selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan sektor pemerintah sehingga lebih dikenal dengan perekonomian tiga sektor. Setelah perkembangan jaman yang diiringi dengan pesatnya tumbuh kembang pengetahuan dan teknologi, sistem perekonomian negara dunia ikut serta melakukan perbaikan, yakni sistem perekonomian yang mengaitkan dengan hubungan luar negeri (Enke dan Salera, 1957; Ball dan McCulloch, 2000).

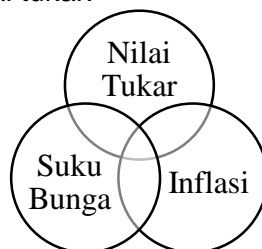
Secara teoritis perkembangan sistem perekonomian di atas searah dengan perkembangan teori yang menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan jaman (Krugman dan Obstfeld, 1988). Perekonomian tertutup yang searah dengan teori Efek Fisher menjelaskan seluruh kegiatan ekonomi hanya dilakukan dalam lingkup domestik yang digambarkan melalui hubungan tingkat suku bunga dengan inflasi yang dapat berdampak pada pergerakan nilai tukar mata uang domestik (Ikhsan dan Tuwo, 1997; Nikhbaht, 2009). Selanjutnya sistem perekonomian terbuka yang banyak digunakan di berbagai negara dunia, secara teoritis searah dengan teori yang menjelaskan kaitan perekonomian domestik dan perekonomian asing (Ikeda dan Saito, 2012). Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) menyatakan perekonomian suatu negara dideterminasi oleh fluktuasi nilai tukar mata uangnya.



Gambar 3
Hubungan Teori Ekonomi Perdagangan Internasional

Teori PPP memiliki ranah lebih luas daripada teori efek fisher karena dalam PPP dinyatakan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara juga dipengaruhi oleh perekonomian luar negeri (Mionel, 2012). Pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan inflasi dari domestik maupun asing akibat dari hubungan kerjasama ekonomi internasional. Perekonomian dua negara juga memiliki andil yang cukup signifikan, apabila luar negeri sedang mengalami gejolak seperti inflasi maka kemungkinan besar gejolak tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian domestik (Falianty, 2011). Hal tersebut terjadi karena hubungan transaksi hubungan ekonomi terjadi melalui perbankan. Kedua teori sebelumnya, kini berusaha untuk disempurnakan dengan adanya teori yang mengkombinasikan dua teori di atas (Ersan, 2008). Penyempurnaan teori bertujuan menemukan suatu teori yang dapat diadaptasikan dengan kondisi ekonomi dunia yang telah mengalami perkembangan dan berbagai perbaikan. Kombinasi teori juga berupaya untuk saling melengkapi kelemahan dari teori efek fisher dan PPP yang memiliki batasan kawasan dalam mengontrol pergerakan nilai tukar mata uang negara (Macchiarelli, 2011).

Teori efek fisher internasional (EFI) menggambarkan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang negara dipengaruhi oleh kondisi perekonomian domestik dan perekonomian luar negeri melalui variabel moneter tertentu akibat penerapan sistem perekonomian terbuka (Sundqvist, 2002). Berdasarkan Shirota (2007), variabel moneter yang terkait dalam teori ini merupakan variabel yang terkait dengan dampak hubungan perdagangan internasional, seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar.



Gambar 2
Hubungan Aksi-Reaksi Antar Variabel Moneter Berdasarkan Teori EFI

Hubungan aksi-reaksi variabel terkait dengan perdagangan internasional tersebut dimulai dari pergerakan tingkat suku bunga riil yang berfluktuatif berpengaruh pada inflasi karena adanya efek keputusan masyarakat menggunakan uangnya (Lestari, 2008). Adanya fluktuasi tingkat inflasi, pastinya dapat berpengaruh pada perubahan tingkat nilai tukar karena inflasi merupakan salah satu determinasi pertumbuhan ekonomi. Konsep dasar perbedaan teori efek fisher, teori PPP, dan teori EFI diproyeksikan tabel berikut:

Tabel 1
Konsepsi Dasar Teori EF, PPP, dan EFI

No.	Teori	Keterangan	Rumusan	Kontrol
	PPP	-	-	-
1.	Absolut	Penentuan harga barang domestik diperoleh dari perbandingan harga barang domestik dan harga barang luar negeri yang bertujuan untuk menentukan besaran nilai tukar	$P_h = P_f \times \text{Spot}$	Arbitrase pada barang
	Relatif	Nilai tukar suatu negara ditentukan melalui perbandingan harga barang domestik dan harga barang luar negeri	$\text{Spot} = P_h - P_f$	Arbitrase pada barang
2.	EF (Ekonomi Tertutup)	Tingkat suku bunga nominal merupakan penjumlahan dari tingkat suku bunga riil dan nilai ekspektasi inflasi yang diterapkan pada ekonomi domestik	$i_h = i_r + E$	Arbitrase antara aset riil dan nominal
3.	EFI (Ekonomi Terbuka)	Selisih tingkat suku bunga domestik dan tingkat suku bunga luar negeri merupakan rumusan untuk mengetahui perubahan nilai tukar	$i_h - i_d = E$ (Spot)	Arbitrase antara dua mata uang

P: Harga Barang, i: Tingkat Suku Bunga, E: Nilai Tukar h: Domestik, f: Asing.
Sumber: Levich, New York University diolah.

Dasarnya tabel di atas menyajikan gambaran bagaimana setiap teori memiliki perbedaan mendasar tentang rumusan variabel moneter untuk mengontrol ekonominya melalui rumusan kesamaan yang dibuat (Sundqvist, 2002). Setiap teori juga menjelaskan batasan kawasan dalam mengontrol ekonomi dengan mengendalikan variabel yang digunakan (Mionel, 2012). Selain itu tiga teori tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan teori pada kebijakan ekonomi. Dengan demikian penulisan karya tulis ini mengkomparasikan variabel moneter terkait dengan transaksi perdagangan internasional dengan teori efek fisher internasional yang memberikan penekanan bahwa teori PPP relatif sebagai *backbone*. Penekanan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa teori efek fisher internasional dalam penulisan ini lebih memfokuskan pada hubungan perekonomian domestik dan asing.

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap fenomena ekonomi dengan menggunakan konsep teori efek fisher internasional/*International Fisher Effect Theory* untuk mengetahui bagaimana pemecahan fenomena tersebut dan dapat berdampak positif pada peronomian negara. Berbagai negara digunakan sebagai

studi kasus dalam penelitian untuk mengetahui eksistensi penerapan teori ini (Sundqvist, 2002; Atmadja, 2002; Ersan, 2008). Salah satu contoh, Indonesia telah digunakan sebagai salah satu negara studi kasus karena perekonomian Indonesia yang tidak stabil sehingga memiliki fluktuasi yang menarik untuk penelitian (Wibowo dan Amir, 2005; Triyono, 2008). Namun tiap penelitian memiliki tujuan dan hasil yang berbeda sehingga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan konsep teori ini.

Hopper (1997) memberikan hasil penelitian tentang bagaimana hubungan nilai tukar dipengaruhi oleh dua faktor yang dihipotesa dapat berpengaruh kuat terhadap pergerakan nilai tukar. Faktor keterpengaruhan *Market sentiment* signifikan berpengaruh terhadap nilai tukar dalam jangka pendek dari pada *economics factor*. Namun Sundqvist (2002) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dalam jangka pendek pergerakan nilai tukar dapat dipengaruhi oleh besaran R^2 dari tiap perhitungan tingkat nilai tukar negara Asia yang terpilih. Pendapat yang berbeda menurut Atmadja (2002) menggambarkan bahwa nilai tukar suatu negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang bebas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi faktor non-ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan sehingga patut untuk diperhitungkan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat nilai tukar dapat dikontrol dari hubungan perdagangan internasional yang dapat melihat bagaimana fluktuasi tingkat nilai tukar dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait sesuai arah tujuan bahasan nilai tukar (Wibowo dan Amir, 2005; Triyono, 2008). Penelitian Ersan (2008) menghasilkan bahwa tingkat nilai tukar di Turki mengalami perubahan pergerakan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang telah diterapkan dalam suatu negara. Fluktuasi tingkat suku bunga tersebut membuat perubahan tingkat inflasi yang dapat berdampak pada tingkat nilai tukar. Selain itu perubahan nilai tukar yang terjadi di Turki juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi.

Keterpengaruhan faktor ekonomi maupun non-ekonomi terhadap nilai tukar ternyata tidak hanya terjadi pada aksi-reaksi domestik saja, tetapi terdapat hubungan keterpengaruhan dari sisi luar negeri sebagai relasinya (Panopoulou dan Pantelidis, 2011). Aksi-reaksi kondisi domestik dan luar negeri terjadi karena adanya kegiatan transaksi ekonomi internasional terutama melalui alat pembayaran yang digunakan (Hara dan Kamada, 1999). Uang sebagai alat pembayaran yang digunakan tersebut akan masuk pada lembaga perbankan akan memberikan kemudahan bertransaksi yang disesuaikan dengan suku bunga bank (Murdayanti, 2012). Tingginya kuantitas perdagangan internasional, nyatanya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian negara melalui kontrol laju inflasinya (Mionel, 2012). Kondisi perekonomian tersebut akhirnya juga akan berdampak pada pergerakan nilai tukar mata uang dalam kegiatan transaksi baik perdagangan domestik maupun internasional (Ersan, 2008). Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang terkait dekat dengan transaksi perdagangan memiliki hubungan aksi-reaksi yang tinggi.

Asumsi penelitian merupakan salah satu gambaran penelitian sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan penulisan hasil penelitian pada periode Juli 2005-November 2011 sehingga memiliki pemahaman yang searah. Asumsi yang digunakan antara lain:

1. Stabilitas nilai tukar dipengaruhi oleh variabel moneter yang terkait dekat dengan kegiatan transaksi perdagangan internasional yakni tingkat suku bunga dan inflasi pada sektor riil.
2. Kondisi perekonomian Indonesia dan Jepang yang memiliki perbedaan sistem ekonomi membuat penelitian ini mengkombinasikan kajian empiris dengan teori ekonomi internasional yang menggambarkan integrasi ekonomi perdagangan internasional. Dengan demikian tiga variabel moneter yang saling terkait menurut teori internasional fisher efek menjadi ujung tombak dalam kendali kontrol stabilitas ekonomi Indonesia dan diasumsikan variabel moneter lain tidak berpengaruh signifikan, *ceteris paribus*.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan sebagian diolah dari Bank Indonesia (BI), *Bank of Japan*, *World Bank*, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Asian Development Bank (ADB)*, dan beberapa literatur terkait. Jenis data menggunakan data sekunder yang berupa *time series* dan data variabel yang digunakan merupakan data pada rentang waktu Juli 2005 sampai November 2011. Fenomena ekonomi pada rentang waktu ini menggambarkan fluktuasi variabel moneter yang terkait penelitian sehingga memiliki daya tarik permasalahan yang dapat digunakan sebagai fenomena masalah ekonomi dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan teori efek fisher internasional yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, nilai tukar yen terhadap dolar Amerika, inflasi, dan tingkat suku bunga.

Penyusunan model dalam penelitian ini menggunakan rujukan penelitian yang dilakukan oleh Sundqvist (2002), Ersan (2008), dan Mionel (2012). Ketiga peneliti tersebut menggunakan teori yang sesuai dengan teori efek fisher internasional yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut teori efek fisher internasional (teori EFI)/*International Fisher Effect Theory (IFE theory)* yang didukung oleh *Fisher Effect Theory (FE theory)* dan *Purchasing Power Parity (PPP)* dapat disimpulkan bahwa model dapat dibentuk dengan runtutan turunan teori dalam rumusan sebagai berikut:

$$(1+r) = (1+R)(1+E(i))$$

$$\frac{(1+rh,f)}{(1+rf,t)} = \frac{(1+E(ih,t))}{(1+E(if,t))} \quad (1)$$

Adanya asumsi bahwa pengaruh luar negeri negatif signifikan berpengaruh pada perekonomian negara domestik sehingga rumusan kesamaan menjadi:

$$r_h - r_f = E(i_h) - E(i_f)$$

keterangan:

- r : tingkat suku bunga
- R : nilai tukar mata uang
- E : ekspektasi inflasi
- h : negara domestik
- f : negara asing (luar negeri)

Namun, pada konteks penelitian ini digunakan PPP relatif karena jenis ini berkaitan dengan teori EFI yang terfokus pada bahasan perdagangan internasional, sehingga:

$$\frac{(St + 1 - St)}{St} = \frac{(i_{h,f} - i_{f,t})}{(1 + i_{f,t})}$$

$$\frac{(St+1 - St)}{St} = ih - if \quad (2)$$

Keterangan:

- S : nilai tukar mata uang
- i : tingkat suku bunga
- h : negara domestik
- f : negara asing (luar negeri)

Kombinasi dua teori sebelumnya dapat digunakan untuk melihat bagaimana teori EFI menjelaskan dari hubungan ekonomi internasional negara. Perubahan nilai tukar negara yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga riil dari dampak perdagangan internasional yang mempengaruhi tingkat suku bunga nominal dan mengakibatkan ekspektasi inflasi naik (Sundqvist, 2002; Ersan, 2008; dan Mionel, 2012). Penjelasan tersebut dapat dinotasikan dengan mengkombinasikan dua rumusan kesamaan (1) dan (2) dari teori sebelumnya, yakni sebagai berikut:

$$\frac{(St+1 - St)}{St} = \frac{(i_{h,f} - i_{f,t})}{(1 + i_{f,t})} \quad (1)$$

$$\frac{(1+r_{h,t})}{(1+r_{f,t})} = \frac{(1+E(i_{h,t}))}{(1+E(i_{f,t}))} \quad (2)$$

kombinasi dua rumusan di atas dapat disederhanakan:

$$\frac{(St+1 - St)}{St} = \frac{(r_{h,t} - r_{f,t})}{(1+r_{f,t})} \quad (3)$$

keterangan:

- S : nilai tukar mata uang
- i : tingkat suku bunga nominal
- r : tingkat suku bunga riil
- h : negara domestik
- f : negara asing (luar negeri)
- E : ekspektasi inflasi

Penyesuaian bentuk model dari notasi rumusan kesamaan kombinasi teori FE dan PPP dalam teori efek fisher internasional, dapat diaplikasikan dalam persamaan model penelitian dengan menyesuaikan adaptasi pada penelitian sebelumnya (Atmadja, 2002; Wibowo dan Amir, 2005; Triyono, 2008), sehingga dapat digunakan model sebagai berikut:

$$\text{LOGERRP}_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{INF}_t + \alpha_2 \text{IR}_t + \alpha_3 \text{LOGERY}_t + \mu_t$$

Keterangan :

LOGERRP	: Nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika
INF	: Inflasi Indonesia (%)
IR	: Tingkat suku bunga Indonesia (%)
LOGERY	: Nilai tukar Yen Jepang per Dolar Amerika
$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien
μ	: Residu (Penggangu)
t	: Data Time Series

Model yang digunakan merupakan kombinasi studi kasus dua negara yang disesuaikan dengan teori efek fisher internasional. Pada dasarnya, model di atas bertujuan untuk mengetahui perekonomian Indonesia melalui nilai tukar rupiah dalam sistem terbuka yang berhubungan dengan Jepang melalui Yen per Dolar Amerika.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dan pembahasan akan menjawab pertanyaan empiris yakni perilaku inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yen per dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah per dolar Amerika sesuai dengan teori efek fisher internasional akibat dampak penerapan sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia. Selanjutnya, akan membahas bagaimana perilaku tiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan hasil analisis kausal melalui metode yang digunakan. Setiap metode analisis akan memberikan hasil yang berbeda tetapi memiliki arah bahasan yang sama sehingga memiliki kekuatan akurasi hasil estimasi.

a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada subbab ini akan membahas hasil analisis statistik deskriptif yang akan memberikan gambaran umum penggunaan data dalam penelitian ini untuk mewakili tiap variabel yang digunakan pada model penelitian. Analisis statistik deskriptif akan menunjukkan perilaku tiap variabel independen dalam mempengaruhi pergerakan variabel dependen. Variabel dependen merupakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dapat digunakan dalam pengukuran dan kontrol stabilitas ekonomi Indonesia dalam proses kegiatan perdagangan internasional. Sedangkan, variabel independen adalah tingkat suku bunga Indonesia, inflasi Indonesia, dan nilai tukar yen terhadap dolar terkait dalam transaksi ekonomi internasional yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

Tabel 2
Nilai Mean, Median, Maximum, Minimum, dan Standard Deviasi tiap variabel

	ERRP	ERY	INF	IR
Mean	9431.115	101.1581	8.053896	8.548701
Median	9172.905	100.8300	6.600000	8.250000
Maximum	11875.15	122.6400	18.38000	12.75000
Minimum	8531.667	76.72000	2.410000	6.000000

Std. Dev.	737.9672	14.45261	4.254916	2.187374
Observations	77	77	77	77

Tabel 2. menunjukkan perilaku nilai tukar rupiah yang memiliki nilai maksimum sebesar 11875.15 dan nilai minimum 8531.667. Interval angka maksimum dan minimum yang cukup jauh pada variabel nilai tukar menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah memiliki variasi daya saing. Begitu pula gambaran perilaku nilai tukar yen yang memiliki daya saing variatif. Hal tersebut dapat diketahui dari besaran nilai maksimum variabel nilai tukar yen yaitu 122.6400 dan nilai minimumnya yang mencapai nilai 76.72000. Namun hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh fluktuasi nilai inflasi Indonesia yang dapat berpengaruh pada pergerakan nilai tukar. Nilai maksimum inflasi sebesar 18.38000 dan nilai minimumnya sebesar 2.410000 menunjukkan bahwa inflasi memiliki laju yang fluktuatif. Meskipun nilai maksimum dan minimumnya tidak jauh seperti rentan nilai maksimum dan minimum nilai tukar rupiah dan nilai tukar yen, kondisi tersebut tetap dapat berpengaruh pada daya saing nilai tukar rupiah dalam transaksi ekonomi internasional.

Namun pada dasarnya fluktuasi laju inflasi yang dapat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah, masih terdapat satu variabel yang memiliki peran penting pada rentetan aksi-reaksi keterpengaruhan antar variabel yakni tingkat suku bunga. Rentan interval yang cukup jauh antara nilai maksimum dan minimum yang memiliki nilai sebesar 12.75000 dan 6.000000 dapat menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memiliki variasi tingkat suku bunga yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Peran tingkat suku bunga menjadi sangat penting karena segala pembiayaan transaksi ekonomi internasional dilakukan melalui lembaga perbankan yang dianggap dapat mempermudah pelaksanaan transaksi.

Hasil estimasi yang disajikan diatas juga dapat memberikan gambaran tentang persebaran data yang digunakan dalam penelitian ini mewakili tiap variabelnya. Mulai dari gambaran data nilai tukar rupiah yang memiliki persebaran data yang baik. Penilaian tersebut dapat diketahui melalui perbandingan nilai standard deviasi dan nilai rata-rata variabel nilai tukar rupiah yang memiliki nilai 737.9672 dan 9431.115 yang menunjukkan nilai standar lebih kecil dari nilai rata-rata. Persebaran data yang baik juga dimiliki oleh dua variabel lain dari sisi domestik (Indonesia) yakni inflasi dan tingkat suku bunga. Estimasinya menunjukkan bahwa standard deviasi dua variabel ini lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Nilai standard deviasi inflasi sebesar 4.254916 dan nilai rata-ratanya sebesar 8.053896 dan nilai standard deviasi tingkat suku bunga sebesar 2.187374 dan nilai rata-rata sebesar 8.548701. Akan tetapi kondisi sebaliknya terjadi pada variabel nilai tukar yen yang memiliki persebaran data tidak baik daripada tiga variabel lainnya. Sebab hasil estimasi menunjukkan bahwa standard deviasinya lebih besar dari nilai rata-rata yaitu sebesar 14.45261 dan 101.1581.

Pemaparan hasil estimasi yang menunjukkan perilaku setiap variabel dan kualitas data yang diukur dari persebaran data dapat disimpulkan bahwa berdasarkan variabel yang diamati yaitu nilai tukar rupiah, nilai tukar yen, inflasi, dan tingkat suku bunga atas kegiatan ekonomi perdagangan internasional Indonesia dan Jepang lebih didominasi oleh variabel inflasi dalam periode tertentu dalam estimasi. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa inflasi mengalami pergerakan fluktuatif yang cukup signifikan.

b. Hasil Estimasi *Dynamic Ordinary Least Square* (DOLS)

Metode analisis *Dynamic Ordinary Least Square* (DOLS) merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku tiap variabel dalam jangka pendek. Hasil estimasi metode DOLS akan menjelaskan bagaimana hubungan keterpengaruhan variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek. Estimasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku jangka pendek yang kemudian untuk melihat perilaku tiap variabel dalam jangka panjang pada metode selanjutnya. Pemaparan perilaku variabel-variabel tersebut dilakukan uji coba pada beberapa lag dan membandingkan hasil estimasinya seperti pada table 4.6.

Tabel 3
Estimasi Lag pada Model dengan Metode DOLS

Lag	<i>Akaike info criterion</i>
1	-4.164477
2	-4.090250
3	-4.019206
4	-3.936866
5	-3.864268
6	-3.841621

Hasil estimasi tiap lag pada model menunjukkan perbedaan hasil yang dilihat dari besaran *Akaike info criterion* (AIC). Nilai AIC tiap hasil estimasi dibandingkan untuk melihat nilai AIC pada lag ke berapa yang paling kecil. Perbandingannya menghasilkan bahwa pada lag 1 memiliki besaran nilai AIC yang paling kecil diantara lag yang diuji coba. Pengukuran besar-kecil angka harus diteliti karena perbedaan angka setelah koma dapat memberikan dampak perhitungan. Simbol pada angka seperti plus dan minus juga harus digunakan sebagai perbandingan. Kesimpulannya, pada lag 1 inilah variabel pada model penelitian diduga memiliki fluktuasi data yang signifikan pada jangka pendek. Hasil estimasi juga dapat digunakan sebagai pembentukan model dengan menggunakan angka-angka koefisiennya sebagai berikut:

$$DLOGERP = -0.003584 - 0.124879DLOGERY + 0.000300DINF + 0.001682DIR - 0.334706DLOGERY(-1) + 0.000857DINF(-1) - 0.001018DIR(-1)$$

Nilai koefisien dari hasil estimasi pada model penelitian di atas, memberikan gambaran seberapa besar hubungan keterpengaruhan variabel independen terhadap dependen baik berdasarkan lag atau tidak. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial pada lag 1 dapat diinterpretasikan sesuai besaran nilai koefisiennya. Apabila diasumsikan nilai koefisien tiap variabel tidak memiliki nilai maka nilai tukar rupiah akan dipengaruhi oleh nilai konstanta sebesar 0.003584 dengan arah yang berlawanan. Artinya, jika konstanta naik sebesar koefisiennya maka nilai tukar rupiah akan terdepresiasi sebesar koefisien konstanta tersebut pada jangka pendek. Searah dengan pengaruh nilai konstanta, variabel inflasi dan tingkat suku bunga dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah sebesar koefisiennya yaitu, 0.000300 dan 0.001682. Jika nilai tukar terdepresiasi dan tingkat suku bunga sedang turun maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi sebesar nilai

koefisien masing-masing variabel dan sebaliknya. Di samping itu nilai tukar yen memiliki arah positif terhadap nilai tukar yang ditunjukkan dengan simbol inflasi yang bertanda plus sehingga bila nilai tukar yen meningkat maka diduga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan terapresiasi sebesar 0.124879 pada jangka pendek. Selain itu bila laju inflasi turun sebesar 0.124879 maka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan terdepresiasi sebesar nilai koefisien nilai tukar yen.

c. Hasil Estimasi *Error Corection Model* (ECM)

Estimasi metode ECM ini digunakan untuk mengetahui perilaku tiap variabel independen model penelitian dalam mempengaruhi stabilitas perilaku nilai tukar sebagai variabel dependen dalam periode waktu jangka pendek dan jangka panjang. Variabel independen yang dianggap dapat menjadi determinasi utama berdasarkan teori efek fisher internasional terhadap variabel dependen yaitu tingkat suku bunga dan inflasi dari sisi domestik (Indonesia) serta nilai tukar mata uang asing dari sisi luar negeri (Jepang). Pada estimasi ini terdapat beberapa uji penting yang harus dilakukan untuk melaksanakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Error Corection Model* (ECM).

1) Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data sangat penting dilakukan untuk melihat fluktuasi data tiap variabel, terlebih lagi data yang bersifat runtut waktu (*time series*). Pelaksanaan uji stasioneritas data juga penting dilakukan untuk pemenuhan data yang sesuai dengan prasyarat pelaksanaan estimasi model penelitian dengan metode *Error Corection Model* (ECM). Estimasi uji stasioneritas data dilakukan dengan uji akar-akar unit (*unit root test*) melalui estimasi uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Penentuan stasioneritas dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai ADF dengan nilai kritis Mackinnon pada hasil estimasi. Suatu data dikatakan berstasioner apabila pada hasil estimasi menunjukkan nilai *Augmented Dickey Fuller* (ADF) lebih besar daripada nilai kritis MacKinnon. Uji stasioneritas data dilakukan dengan menguji tiap variabel melalui estimasi data pada tingkat uji tertentu sampai data bersifat stasioner. Terdapat beberapa tingkat seperti tingkat level, tingkat *difference* yang dibandingkan dengan perbandingan pergerakan data. Setelah dilaksanakan estimasi melalui uji akar-akar unit dapat diketahui bahwa pengujian awal pada tingkat level semua data variabel tidak stasioner. Sebab, besaran perbandingan nilai ADF statistik lebih kecil daripada nilai kritis ADF (1%=-4.085092, 5%=-3.470851, 10%=-3.162458) dan nilai probabilitas ADF yang tidak signifikan. Hasil estimasi uji akar-akar unit yang menunjukkan stasioneritas data disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Estimasi Uji Akar-akar Unit

Variabel	Tingkat Level			Tingkat <i>First Difference</i>		
	ADF statistik	Prob. ADF	Ket	ADF statistik	Prob. ADF	Ket
LogERRP	-0.437696	0.5216	x	-6.983925	0.0000	*
ERY	-1.599380	0.1029	x	-7.320544	0.0000	*
IR	-0.715932	0.4034	x	-4.046778	0.0001	*
INF	-0.918809	0.3153	x	-7.128291	0.0000	*

signifikan pada $\alpha=5\%$, ***) signifikan pada $\alpha=10\%$

Oleh karena itu estimasi data dilanjutkan dengan melakukan estimasi melalui uji akar-akar unit pada tingkat *first difference*. Hasil estimasi menunjukkan data telah mengalami perubahan besaran nilai pada ADF statistik. Nilai ADF statistik menunjukkan kenaikan nilai sehingga melebihi nilai kritis ADF (1%=-2.596160, 5%=-1.945199, 10%=-1.613948) dan didukung oleh probabilitas ADF yang signifikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semua variabel pada model penelitian yakni variabel nilai tukar rupiah, variabel inflasi, variabel tingkat suku bunga, dan variabel nilai tukar yen memiliki derajat keyakinan 1%. Derajat keyakinan ini diperoleh dari estimasi pada tingkat *first difference* sehingga data semua variabel dapat dikatakan telah stasioner dan dapat dilakukan estimasi selanjutnya.

2) Uji Kointegrasi

Pemaparan hasil estimasi uji akar-akar unit pada uji stasioneritas data menunjukkan bahwa pada tingkat level data tidak stasioneritas kemudian pengujian dilanjutkan pada tingkat *first difference* yang menunjukkan data telah stasioner. Data yang telah stasioner kemudian dilakukan uji lanjutan yang akan melihat bagaimana perilaku data tiap variabel dalam periode berjangka. Uji selanjutnya yang dilakukan untuk melihat perilaku tersebut adalah uji kointegrasi. Selain itu uji kointegrasi juga akan memberikan gambaran perilaku stasioneritas residual. Estimasi uji kointegrasi diharapkan data pada tingkat level yang tidak stasioner dapat tidak mengalami regresi lancung. Seperti halnya uji stasioneritas, estimasi uji kointegrasi dengan menggunakan uji *Unrestricted Cointegration Rank Test*. Hasil estimasi uji kointegrasi (Lampiran F) menunjukkan bahwa adanya derajat kointegrasi pada variabel-variabel yang digunakan pada model penelitian. Derajat kointegrasi variabel model terjadi pada level kritis 5%.

3) Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Pendek

Metode kuantitatif estimasi *Error Corection Model* (ECM) merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data variabel model penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku variabel independen dan variabel dependen dalam periode jangka pendek dan jangka panjang. Hasil estimasi metode ECM dapat diketahui dari perbandingan nilai t-statistik dan t-tabel yang dihubungkan dengan besaran koefisien tiap variabel independen terhadap variabel dependen pada model penelitian. Selain itu hasil estimasi juga dapat diketahui dan diinterpretasikan melalui *adjustment R-square*, probabilitas F-statistik, dan nilai ET (*error correction term*). Besaran angka dari tiap perbandingan nilai hasil estimasi terhadap nilai koefisien variabel dapat menunjukkan seberapa besar hubungan keterpengaruhannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Hasil estimasi yang tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan hanya satu yang berpengaruh pada variabel dependen yakni nilai tukar yen pada model penelitian berdasarkan teori efek fisher internasional. Secara parsial, jika nilai tukar yen terhadap dolar Amerika mengalami apresiasi maka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan terdepresiasi dan berlaku juga sebaliknya. Bila, nilai tukar yen terdepresiasi sebesar 0.001849 maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi sebesar nilai koefisien nilai tukar yen tersebut. Sedangkan, variabel independen lain tidak dapat berpengaruh kuat karena tiga variabel lain memiliki nilai probabilitas $> \alpha$ (5%).

Akan tetapi, variabel independen masih mampu menjelaskan variabel dependen secara kuat.

Tabel 5
Hasil Estimasi ECM Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilistik
C	0.105508	1.449968	0.1521
DLOGERY	-0.200657	-2.886374	0.0054
DINF	0.002013	1.449286	0.1523
DIR	0.000361	0.086177	0.9316
LOGERY(-1)	-0.026396	-1.490437	0.1412
INF(-1)	0.000432	0.564371	0.5745
IR(-1)	0.001320	0.703568	0.4843
ET	0.994537	16.19969	0.0000
Adjusted R-Squared		0.799109	
Prob. F-Statistik		0.000000	

T-tabel: α^* : 5 % = 1.725 ; α^{**} : 10% = 1.325

Sumber: Lampiran H, diolah.

Hal tersebut diketahui dari nilai probabilitas F-statistik yang memiliki angka sebesar 0.000000. Pada aras lain, tabel di atas dapat memberikan gambaran perilaku variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nilai koefisien konstanta (C) sebesar 0.105508 menunjukkan bahwa apabila variabel lain diasumsikan tidak memiliki nilai (bernilai nol) tukar rupiah akan terapresiasi sebesar 0.105508 satuan. Apresiasi nilai tukar rupiah diketahui dari besaran nilai konstanta yang tidak diikuti oleh tanda minus. Searah dengan nilai konstanta, inflasi dan tingkat suku bunga berdampak positif sehingga jika inflasi dan tingkat suku bunga naik sebesar 0.002013 dan 0.000361 maka nilai tukar rupiah akan terdepresiasi secara parsial sebesar nilai koefisien tersebut. Namun, tingkat suku bunga memiliki hubungan positif secara parsial terhadap nilai tukar rupiah. Apabila tingkat suku bunga naik sebesar 0.000361 maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi sebesar koefisien tingkat suku bunga.

Perilaku variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yang tidak searah memiliki satu gambaran umum yang menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki proporsi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai proporsi variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yang tergambar pada besaran adjusted R² yakni sebesar 0.799109 sehingga variasi variabel independen 79% mampu menjelaskan variabel dependen. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen tersebut didukung kuat oleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 yang menunjukkan bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama.

4) Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Panjang

Gambaran hasil estimasi ECM pada periode jangka pendek menimbulkan pembentukan model dinamis yang memiliki besaran dan simpangan baku regresi jangka panjang. Hasil estimasi jangka pendek yang memberikan gambaran pergerakan data tiap variabel mengakibatkan penyesuaian terhadap kondisi fenomena riil yang menyebabkan adanya perubahan. Adanya hasil estimasi ECM jangka pendek tiap variabel model penelitian memberikan satu pandangan yang lebih jauh akan pergerakan datanya dalam estimasi ECM jangka panjang. Hasil estimasi ECM pada periode jangka panjang pada Tabel 6.

Tabel 6. menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen pada satu arah yang ditunjukkan dengan tidak adanya simbol minus pada tiap koefisien variabel model penelitian. Jika diasumsikan tiga variabel independen lain tidak memiliki nilai koefisien maka tiap variabel dapat mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Nilai koefisien konstanta sebesar 0.10608755 menunjukkan bahwa setiap konstanta naik sebesar nilai koefisien tersebut maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi sebesar nilai koefisien konstanta dan akan terdepresiasi sebesar koefisien konstanta. Hal yang sama terjadi pada variabel independen yang menunjukkan bahwa jika terdapat pergerakan peningkatan nilai tukar yen terhadap dolar sebesar 0.99987029 maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi sebesar nilai koefisien nilai tukar yen dan berlaku sebaliknya.

Tabel 6
Tabel Hasil Estimasi ECM Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-Statistik
C	0.10608755	0.588433441
LOGERY	0.99987029	2.186599959
IR	1.00042192	3.537849516
INF	1.00004343	-2.441508253

Sisi domestik yang ditunjukkan oleh nilai tukar rupiah juga akan dipengaruhi oleh pergerakan tingkat suku bunga dan inflasi secara positif. Jika tingkat suku bunga dan inflasi mengalami peningkatan nilai besaran sebesar 1.00042192 dan 1.00004343 maka nilai tukar rupiah akan mengalami apresiasi sebesar nilai koefisien variabel tersebut. Hasil lain menggambarkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang tidak sesuai dengan syarat perbandingan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Variabel tingkat suku bunga merupakan satu-satunya variabel yang tidak dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara parsial dengan signifikan. Gambaran tersebut diperoleh dari perbandingan nilai uji t yang menghasilkan bahwa nilai t-statistik tingkat suku bunga lebih kecil daripada t-tabel. Akan tetapi konsepsi teori efek fisher internasional masih tetap dapat menjaga eksistensinya karena hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah masih dideterminasi oleh tingkat inflasi Indonesia dan dipengaruhi oleh nilai tukar yen terhadap dolar Amerika secara parsial. Pengolahan data variabel pada penelitian ini menunjukkan berbagai hasil yang menggambarkan perilaku variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu hasil olah data juga dapat digunakan untuk mengetahui perilaku variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, secara bersama-sama, dan kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Preskripsi Determinasi Nilai Tukar dalam Konsep Efek Fisher Internasional (EFI)

Hasil analisis deskriptif menggambarkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan nilai tukar yen terhadap dolar Amerika mengalami pergerakan data yang lebih variatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang dua negara memiliki kegiatan transaksi yang cukup tinggi sehingga jumlah uang dalam kegiatan internasional memiliki andil besar. Pergerakan nilai tukar mata uang dua negara yang fluktuatif membuat dua negara didiagnosa telah melaksanakan banyak transaksi ekonomi internasional. Realitanya kondisi tersebut didukung adanya publikasi data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2012) menginformasikan transaksi ekspor-Impor kedua negara meningkat pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terjadi setelah adanya perbaikan ekonomi tahun 2010 akibat adanya dampak krisis global 2007-2008. Sejalan dengan publikasi data tersebut, Galati *et al*(2005) menyatakan nilai tukar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh tingkat kegiatan transaksi perdagangan internasional negara domestik dan negara relasinya.

Hopper (1997) juga sependapat dengan argumentasi di atas, nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi negara, baik kegiatan ekonomi domestik maupaun kegiatan ekonomi internasional. Berdasarkan penelitiannya digambarkan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat dikontrol dari bagaimana, kapan, dan seberapa banyak intensitas kegiatan transaksi ekonomi dilakukan. Keuntungan pelaksanaan transaksi internasional dijelaskan pula oleh Klitgaard (1999), dimana kegiatan ekonomi internasional yang dilaksanakan melalui ekspor-impor dapat memberikan keuntungan ekonomi meskipun terdapat konsekuensi ekonomi yang harus dihadapi. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan strategi dalam mengantisipasi atas keputusan pelaksanaan transaksi ekonomi internasional (Liu, 2007). Dengan demikian dapat diketahui cara menghadapi permasalahan atas kegiatan ekonomi internasional dengan berbagai relasi negara tanpa memberikan efek negatif terhadap kondisi perekonomian domestik.

Namun hasil analisis deskriptif penelitian ini menggambarkan terdapat satu variabel moneter memiliki pergerakan yang lebih variatif. Variabel moneter yang dimaksud adalah variabel inflasi Indonesia yang memberikan gambaran pergerakan data yang lebih fluktuatif. Pada dasarnya inflasi merupakan salah satu variabel moneter yang lebih sensitif atas perubahan ekonomi yang terjadi baik perubahan ekonomi domestik maupun ekonomi internasional. Hasil penelitian Shirota (2007) menunjukkan laju inflasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara melalui kegiatan transaksi ekonomi. Sifat sensitif yang dimiliki inflasi membuat pemerintah berbagai negara memikirkan penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi negaranya agar dapat mengontrol gerak inflasi (Fuchi *et al*, 2007). Kontrol tersebut dilakukan untuk meminimalisir kondisi ekonomi yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pada aras lain hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara variabel independen terhadap variabel dependen tetapi terdapat dominasi hubungan yang terjadi antara nilai tukar yen per dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah per dolar Amerika. Artinya estimasi analisis kuantitatif menghasilkan satu kesenjangan integrasi antar variabel independen. Sundqvist (2002) menjelaskan dari seluruh negara komparasi yang digunakan terdapat kesenjangan antara hasil estimasi negara satu yang lainnya.

Kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dimana kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen secara parsial.

Sedangkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan kesenjangan yang terjadi pada hubungan jangka pendek dapat diminimalisir sehingga nilai tukar rupiah per dolar yang didominasi oleh pengaruh nilai tukar yen per dolar dapat dikurangi. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan estimasi yang signifikan karena pada estimasi jangka panjang masih terdapat kesenjangan determinasi terhadap variabel dependen. Kesenjangan tersebut terjadi ketika tingkat suku bunga tidak mampu memenuhi syarat statistik sehingga tidak dapat dikatakan berpengaruh secara parsial. Kondisi tingkat suku bunga yang tidak memiliki kemampuan menjelaskan nilai tukar rupiah per dolar Amerika secara parsial membuat kepincangan pada kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen. Nikhbakht (2009) memaparkan determinasi nilai tukar mata uang suatu negara tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel moneter yang terkait dekat dengan sektor perbankan. Hal tersebut dipengaruhi oleh stabilisasi perbankan. Pandangan lain menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat suku bunga yang dianut perbankan dalam proses kegiatan ekonomi memiliki kemampuan yang signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi negara (Shirakawa, 2001). Pendapat tersebut didukung oleh Harvey (2006) yang menyatakan tingkat suku bunga memiliki kemampuan untuk berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara melalui variabel-variabel moneter tertentu. Bahkan Macchiarelli (2011) menyatakan bahwa tingkat suku bunga memiliki signifikansi pengaruh terhadap ekonomi negara secara makro pada sektor keuangan.

Secara agregat hasil estimasi data yang dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menunjukkan hubungan aksi-reaksi antara variabel independen dan variabel dependen. Meskipun secara bersama-sama terdapat kepincangan pada variabel independen dalam mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen, secara parsial variabel independen masih dapat menjelaskan variabel dependen secara signifikan. Kemampuan variabel independen tersebut menggambarkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori efek fisher internasional.

PENUTUP

Pembahasan tentang preskripsi hubungan perdagangan internasional melalui perbandingan teoritis, empiris, dan hasil estimasi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional melalui transaksi ekspor-impor antar Indonesia dan Jepang pada periode Juli 2005-November 2011 dapat digunakan sebagai kontrol ekonomi Indonesia. Kendali ekonomi Indonesia yang dikaitkan dengan nilai tukar rupiah secara empiris sesuai dengan teori efek fisher internasional yang dideterminasi oleh variabel moneter. Variabel moneter yang digunakan merupakan variabel yang terkait dekat dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu tingkat suku bunga dan inflasi Indonesia serta nilai tukar yen terhadap dolar Amerika sebagai wujud integrasi ekonomi internasional Indonesia. Pemaparan lebih jelas dapat diketahui dari hasil estimasi data melalui estimasi analisis kuantitatif yang telah dilakukan dengan dua analisis dinamis memberikan dua gambaran yang berbeda terkait dominasi variabel moneter yang berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

- a. Analisis *Dynamic Ordinary Least Square* (DOLS) yang dilakukan dengan menguji coba pada interval lag yang ditentukan, memberikan gambaran bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Secara

agregat variabel independen dapat berpengaruh terhadap kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tetapi hanya variabel inflasi yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah. Artinya jika inflasi mengalami peningkatan fluktuasi maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi dan berlaku sebaliknya.

- b. Analisis *Error Correction Model* (ECM) merupakan metode analisis kuantitatif yang memberikan gambaran perilaku variabel independen terhadap variabel dependen pada jangka pendek dan jangka panjang. Hasil analisis ECM jangka pendek menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Akan tetapi hubungan aksi-reaksi dalam determinasi nilai tukar rupiah didominasi oleh besaran nilai tukar yen terhadap dolar Amerika. Sedangkan hasil estimasi ECM jangka panjang menunjukkan bahwa terdapat satu variabel moneter yang ternyata tidak data memberikan pengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, yakni tingkat suku bunga.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas ekonomi Indonesia yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan pada variabel moneter yang terkait dekat perdagangan internasional ternyata memberikan sinyal positif dalam proses pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam kegiatan perdagangan internasional antara lain dengan melakukan perbaikan kebijakan ekonomi pada sektor moneter yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Perbaikan kebijakan tersebut akan memberikan dampak pada kuantitas ekspor-impor sehingga memberikan energi baru bagi produktivitas masyarakat domestik dalam perindustrian. Akan tetapi upaya perbaikan tersebut akan lebih baik apabila pemerintah juga meningkatkan pengetahuan tentang kondisi perekonomian negara relasi ekonomi internasional agar dapat mengendalikan kegiatan ekonomi internasional terutama negara destinasi teratas ekspor-impor Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Adwin Surja. 2002. *Analisa Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Setelah Diterapkannya Kebijakan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 69 – 78. Universitas Kristen Petra
- Ball, Donal. A & McCulloch, Wendell. H. 2000. *Bisnis Moneter*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bordo, Michael D. 1993. *The Bretton Woods International Monetary System: A Hystorical Overview*. University of Chicago Press.
- Dono, Anjar Dinar. 2010. *Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia Melalui Japan International Cooperation Agency (2008)*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 6, No. 2, September 2010.
- Enke, Stephen dan Salera, Virgil. 1957. *International Economics*. Prentice Hall, INC.

- Ersan, Eda. 2008. *International Fisher Effect: A Reexamination Within The Co-Integration and DSUR Framework*. The Department of Business Administration.
- Falianty, Telisa Aulia. 2011. *Desain Kebijakan Publik Dalam Menghadapi Krisis Global*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011.
- Frank, Robert dan Bernanke, Ben. 2001. *Principles of Macro Economics*. New York: Gary Burke.
- Frenkle, Rülke, dan Stadtmann. 2008. *Expectations on the Yen/Dollar Exchange Rate-Evidence from the Wall Street Journal forecast poll*. WHU-Otto Beisheim School of Management.
- Fuchi, Oda, dan Ugai. 2007. *The Costs and Benefits of Inflation: Evaluation for Japan's Economy*. Bank of Japan 2-1-1 Nihonbashi Hongoku-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8660.
- Fujiwara, Koerber, dan Nagakura. 2011. *How much Asymmetry is there in Bond Returns and Exchange Rates?*. Bank of Japan Working Paper Series.
- Galati, Melick, dan Micu. 2005. *Foreign Exchange Market Intervention And Expectations: The Yen/Dollar Exchange Rate*. *Journal of International Money and Finance* 24 (2005) 982e1011.
- Hara, Naoko dan Kamada, Koichiro. 1999. *Yen/Dollar Exchange Rate Expectations in the 1980-90's*. Working Paper 99-1 Research and Statistics Department Bank of Japan.
- Hopper, Grerory P. 1997. *What Determines the Exchange Rate: Economic Factors or Market Sentiment*. Business Review. The Research Departement of The Philadelphia Fed.
- Ikeda, Daisuke dan Saito, Masashi. 2012. *The Effects of Demographic Changes on the Real Interest Rate in Japan*. Bank of Japan 2-1-1 Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku, Tokyo 103-0021, Japan.
- Ikhsan, Mohammad dan Tuwo, Lukita Dinarsyah. 1997. *Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XLV, No. 2, 1997.
- Jakaitiene, Audrone dan Déés, Stéphane. 2009. *Forecasting The World Economy In The Short-Term*. Working PaPer SerieS no 1059 / June 2009 European Central Bank.
- Kause, Anthon Daniel. 2008. *Dampak Resesi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Dunia*. *Among Makarti* Vol 1, No. 1 Juli 2008.

- Klitgaard, Thomas. 1999. *Exchange Rates and Profit Margins: The Case of Japanese Exporters*. FRBNY Economic Policy Review.
- Kohn, Meir G. 1997. *Macroeconomics*. Ohio: South-Western College Publishing.
- Krugman, Paul R. dan Obstfeld, Maurice. 1988. *International Economics*. Scott, Foresman/Little, Brown College Division.
- Levich, Richard M. Tanpa Tahun. *International Parity Condition*. New York: New York University.
- Liu, Ching Hsueh. 2007. *Foreign Exchange Hedging and Profit Making Strategy Using Leveraged Spot Contracts*. Victoria University.
- Macchiarelli, Corrado. 2011. *A Var Analysis For The Uncovered Interest Parity And The Ex-Ante Purchasing Power Parity The Role Of Macroeconomic And Financial Information*. Working Paper Series No 1404 / December 2011 European Central Bank.
- Mionel, Oana. 2012. *The Influence of International Parity on The Exchange Rate: Purchasing Power Parity and International Fisher Effect*. Acta Universitatis Danubius Vol. 8 No. 1.
- Murdayanti, Yunika. 2012. *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Suku Bunga, Money Supply, Current Account Dan Capital Account Terhadap Nilai Kurs Rupiah Indonesia-Dollar Amerika*. Econosains Vol. X No.1.
- Nikbakht, Leli. 2009. *Oil Prices and Exchange Rates: The Case of OPEC*. Business Intelligence Journal – January, 2010 Vol. 3 No. 1.
- Panapoulou, Ekaterini dan Pantelidis, Theologos. 2011. *The Fisher Effect in The Presence of Time-Varying Coefficients*. Greece: University of Piraeus dan University of Crete.
- Shirakawa, Masaaki. 2001. *Monetary Policy Under the Zero Interest Rate Constraint and Balance Sheet Adjustment*. Bank of Japan.
- Shirota, Toyochiro. 2007. *Optimal Trend Inflation and Monetary Policy under Trending Relative Prices*. Bank of Japan 2-1-1 Nihonbashi Hongoku-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8660.
- Sundqvist, Emil. 2002. *An Empirical Investigation of The International Fisher Effect*.
- Triyono. 2008. *Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9, No. 2, Desember 2008, Hal: 156-167.
- Wibowo, Tri dan Amir, Hidayat. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Departemen Keuangan Vol. 9 No. 4, Desember 2005.

Internet

Asian Development Bank. 2012. Data Statistik. <http://www.adb.org/data/statistics>

Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia. 2012. Data Ekspor. <http://badanusaha.com/gabungan-perusahaan-eksportir-indonesia-gpei>

Bank of Japan. 2012. Data Statistik. <http://www.boj.or.jp/en/>

Bank Indonesia. 2012. Statistik Data. <http://www.bi.go.id/>

Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Data. <http://www.bps.go.id/>

Kementerian Perdagangan. 2012. Data Statistik. <http://www.kemendag.go.id/>

Kementerian Perindustrian. 2012. Statistik Data. <http://www.kemenperin.go.id/>

World Bank. 2012. Statistik Data. <http://www.worldbank.org/>

POLA KELEMBAGAAN USAHA TANI KEDELAI LOKAL DI JAWA TIMUR

Lailatul Maghfiroh, Zainuri, AdhityaWardhono dan M. Abd. Nasir
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
e-mail: mlmfiroh@gmail.com, aznrjbr@gmail.com, adhitya71@gmail.com dan
abdulnasir1705@gmail.com

ABSTRAK

Liberalisasi perdagangan memberikan peluang dan tantangan baru dalam pengembangan suatu komoditas pertanian, termasuk komoditas kedelai. Kenaikan harga komoditas kedelai karena kelangkaan pada sisi penawaran terbukti mampu membuat pemerintah menelusuri akar permasalahan untuk memikirkan pemecahannya. Paper ini bertujuan untuk mengetahui pola kelembagaan daya saing kedelai di Jawa Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui analisis Delphi yang diperoleh dari data primer melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Lokasi penelitian ditentukan dengan *purposive sampling* terhadap sentra-sentra produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pasuruan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pelaku usaha tani yang berpartisipasi pada kegiatan kelompok tani menggambarkan pola manajemen kelompok tani yang belum sesuai dengan harapan pelaku usaha tani. Dengan demikian kondisi eksisting kelembagaan kedelai di Provinsi Jawa Timur patut untuk dinotasi ulang sehingga pola kegiatan ataupun transaksi pelaku usaha tani dapat terestimasi dengan valid. Pola kelembagaan kedelai yang tercipta memiliki banyak tipe alur distribusi yang digunakan oleh pelaku usaha tani. Formulasi kebijakan yang diharapkan oleh pelaku usaha tani kedelai lokal Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan pada pasca panen yaitu subsidi harga jual kedelai lokal dan integrasi kemitraan antar pelaku usaha tani melalui kelembagaan yang dinaungi pemerintah.

Kata Kunci: Kelembagaan, Kedelai Lokal, Kemitraan.

ABSTRACT

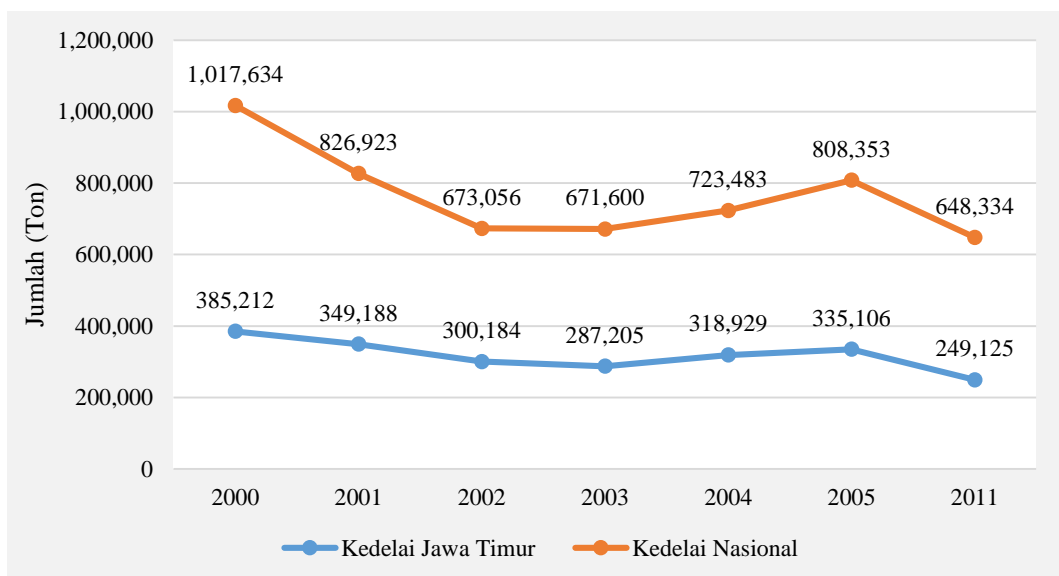
Trade liberalization provided new opportunities and challenges in the development of agricultural commodities, including commodity soybeans. Soybean commodity price increase due to the scarcity of the supply side proved capable of making the government trace the root causes to think of a solution. This paper aims to determine patterns of institutional competitiveness of soybean in East Java. The analysis used in this study using a qualitative analysis through Delphi analysis of primary data obtained through Focus Group Discussions (FGD). The research location was determined by purposive sampling of soybean production centers in East Java provinces which Banyuwangi, Jember, and Pasuruan. The result showed that the low number of businesses participating in the activities of peasant farmer groups describe patterns of management of farmers' groups who have not been in line with expectations farm businesses. Thus the existing condition of institutional soybean in East Java province deserves to be recording that patterns of activity or transactions can estimated farm businesses with valid. Soy created institutional patterns have many types of distribution channel used by the perpetrators of farming. Policy formulation which is expected by the business local soybean farmer East Java is in post-harvest policies that subsidize the price of local soybean and integration partnerships between actors farming through shaded institutional government.

Keywords: Institutional, Local Soybean, Partnership.

PENDAHULUAN

Kenaikan harga komoditas kedelai terbukti mampu membuat pemerintah menelusuri akar permasalahan untuk memikirkan pemecahannya. Jelas bahwa kenaikan harga kedelai tersebut dikarenakan adanya unsur kelangkaan pada sisi penawaran atau produksi kedelai dalam negeri tidak sebanding dengan permintaan (Elizabeth, 2007; Zakaria *et al*, 2010). Signifikansi dampak negatif tersebut menimbulkan keheranan bagi penduduk Indonesia karena negaranya yang berpredikat Negara agraris ternyata mengalami kekurangan dalam memenuhi permintaan kedelai (Adisarwanto, 2008; Prajanti & Waridin, 2010). Berbagai upaya dirancang untuk meningkatkan produksi kedelai yang dilakukan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Selain itu juga diperlukan kajian yang lebih memperkaya pengetahuan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menanam kedelai sangat diperlukan bagi penentuan kebijakan. Liberalisasi perdagangan yang ada telah memberikan peluang dan tantangan baru dalam pengembangan suatu komoditas pertanian, termasuk komoditas kedelaisoybean (Ahmad and Tawang, 1999; Firdaus *et al*, 2012). Secara teoritis, keunggulan kompetitif suatu komoditas merupakan hasil dari faktor-faktor yang ditentukan keunggulan komparatif dengan faktor-faktor kunci berupa dimensi struktur (*structure*), perilaku (*conduct*) dan kinerja (*performance*) pasar.

Dalam kaitan tersebut maka diperlukan kajian yang mendalam terhadap kelembagaan usaha kedelai karena diduga menurunnya motivasi petani untuk tanam kedelai dipengaruhi oleh kesepakatan pelaku pasar dan regulasi yang tidak berdampak positif langsung kepada petani kedelai (Rante, 2013; Huang & Rozelle, 2004). Purnamawati (2009) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyuplai produksi kedelai terbesar Indonesia dari tahun 2000-2009. Sebagai gambaran dapat disajikan dalam Gambar 1. berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (2012), diolah.

Gambar 1
Perbandingan Produksi Kedelai Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 1. di atas dapat dikatakan bahwa periode 2000-2005 bahwa rata-rata produksi kedelai nasional sebesar 757.784,6 ton dan Jawa Timur menyumbang produksi rata-rata sebesar 317.849,9 ton (42,76 %). Provinsi Jawa Timur mampu berkontribusi sebesar 42,76 %/tahun, tetapi pada tahun 2011 kontribusi Jawa Timur berkurang hingga pada angka 38,43 %. Sedangkan sentra produksi kedelai Jawa Timur tersebar di delapan Kabupaten, yakni Banyuwangi, Pasuruan, Lamongan, Sampang, Ponorogo, Jember, Bojonegoro dan Nganjuk. Kelangkaan kedelai akan menjadi masalah nasional mengingat lahan pertanian yang semakin menyusut dan tanaman kedelai cenderung berkurang. Kondisi tersebut akan diperkeruh, karena pada tahun 2012 luasan tanaman kedelai menurun hingga sebesar 8 % secara nasional.

Liberalisasi perdagangan memberikan peluang dan tantangan baru dalam pengembangan suatu komoditas pertanian, termasuk komoditas kedelai (Ahmad dan Tawang, 1999; Firdaus *et.al.*, 2012). Peluang baru tersebut disebabkan karena pasar semakin luas dan penghapusan berbagai hambatan perdagangan antar negara. Signifikansi dampak liberalisasi perdagangan juga akan menimbulkan permasalahan apabila komoditas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar dunia. Dengan demikian maka petani merasa kurang bahkan tidak dilindungi oleh kondisi eksternalnya. Paper ini bertujuan untuk mengetahui pola kelembagaan daya saing kedelai di Jawa Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui analisis Delphi yang diperoleh dari data primer melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

LANDASAN TEORI

Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (*rule of the game*) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang membentuk perekonomian yang efisien. Deliarnov (2006) menjelaskan kelembagaan sebagai aturan permainan sedangkan organisasi adalah wadah sebagai tempat bermain bagi sekumpulan orang. Setiap pemain mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memenangkan permainan tetapi mempertimbangkan norma-norma dan aturan yang berlaku. Penyimpangan aturan main akan menyebabkan sistem berjalan tidak normal karena kelembagaan yang baik dapat menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi. Sebab masalah koordinasi dan produksi terkait dengan motivasi para aktor, lingkungan dan kemampuan pemain dalam mengkondisikan lingkungan yang menghubungkan pilihan dengan hasil. Sementara itu North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai "*the rules of game*" memandang bahwa dalam pengambilan suatu bentuk norma sosial atau "*legal rule*" yang disebutnya sebagai "*external constraints*" dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan hal terbaik yang dipilihnya secara optimal. Kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota – anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitori oleh otoritas luar (*external authority*).

Pendapat lain menyatakan kelembagaan berisi serangkaian batasan-batasan atau perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi; serangkaian prosedur untuk mendeteksi deviasi dari aturan dan regulasi sehingga didalamnya berisi serangkaian norma etika berperilaku dan moral sebagai pertimbangan pokok untuk melakukan interaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Meski

sifatnya tidak linier namun cenderung menjadi kebutuhan individu anggotanya berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (*safe*), kebutuhan hubungan sosial (*social affiliation*), pengakuan (*esteem*), dan pengembangan pengakuan (*self actualization*) (Elizabeth, 2003).

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah (Djogo, *et al*, 2003):

1. institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat;
2. norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur;
3. peraturan dan penegakan aturan/hukum;
4. aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota;
5. kode etik;
6. kontrak;
7. pasar;
8. hak milik (*property rights* atau *tenureship*);
9. organisasi;
10. insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan dapat memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Sebab ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang dapat hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Hira dan Hira (2000) proses perubahan kelembagaan dapat terjadi karena dua hal. Pertama, perubahan kelembagaan terjadi sebagai reaksi dari faktor ekonomi baru, yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Kedua, wirausahawan (organisasi maupun individu) mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan, dimana pada akhirnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif. Dalam pandangan Yustika (2008) terdapat dua faktor yang dapat dipetakan sebagai penyebab perubahan kelembagaan (*institutional change*) permintaan dari pelaku dan penawaran dari lembaga yang memiliki otoritas spesifik. Pada kasus kedua, pemerintah memiliki iktikad untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja dalam bidang komoditas tertentu melalui penerapan harga tertentu guna melindungi penduduk yang ada di sektor tersebut.

Yustika (2008) yang bersumber dari pendapat Manig (1991) menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan di dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan di dalam regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju ke peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan, prinsip-prinsip dan pola-pola umum didalam kelembagaan yang saling berhubungan, sementara pada waktu yang bersamaan terdapat peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi di dalam sistem sosial yang kompleks.

Perubahan kelembagaan itu mendorong kepada perubahan-perubahan kondisi-kondisi, kemudian membuat penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor-faktor eksternal (proses umpan balik permainan). Oleh karena itu, perubahan kelembagaan menjadi bagian transformasi permanen dari pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasi potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya, selanjutnya secara simultan menciptakan keseimbangan baru misalnya keadilan sosial.

Berbeda dengan Dharmawan (2001), dimana perubahan kelembagaan bisa terjadi secara gradual dan kadang-kadang secara cepat karena individu mengembangkan pola-pola perilaku alternatif (tindakan ekonomi dan sosial) sebagai respons atas proses evaluasi biaya dan keuntungan baru yang dirasakan. Terdapat lima proposisi yang mendefinisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan menurut Yustika (2008) dengan menyederhakan pendapat North (1995) yaitu:

1. Interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam *setting* ekonomi kelangkaan, dan kemudian diperkuat oleh kompetisi, merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan. Kelangkaan tidak sekedar persoalan keterbatasan sumber daya (ekonomi) yang tersedia, namun juga keterbatasan aturan main yang mengakibatkan pelaku ekonomi tidak memiliki akses untuk melakukan transaksi secara sepadan.
2. Kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan ketrampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan kemudian pilihan yang akan mengubah kelembagaan.
3. Kerangka kelembagaan mendikte jenis ketrampilan dan pengetahuan dan pengetahuan yang dianggap memiliki pertukaran maksimum (*maximum pay-off*).
4. Persepsi berasal dari konstruksi/konstruksi mental para pemain/pelaku (*mental construct of the players*).
5. Cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan (*path dependent*).

Kesimpulan dari argumen di atas bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya oleh interaksi dalam organisasi tersebut, melainkan kompetisi baik berdasarkan ekonomi maupun kompetisi dari eksternal kelembagaan tersebut. Perubahan kelembagaan yang terjadi tidak lepas dari aspek kelembagaan yang dapat dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan maupun ekonomi pedesaan. Adapun aspek kelembagaan memiliki 5 (lima) syarat pokok dalam struktur pedesaan maju diantaranya kelembagaan pada pasar, kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan perkreditan. Sedangkan kelembagaan pertanian mempunyai delapan jenis kelembagaan yaitu kelembagaan penyedia input, kelembagaan penyedia modal, kelembagaan penyedia tenaga kerja, kelembagaan penyedia lahan dan air, kelembagaan usahatani, kelembagaan pengolah hasil usaha tani, kelembagaan pemasaran, serta kelembagaan penyedia informasi. Pada hakikatnya sifat kelembagaan yang ada berbeda tiap aspek seperti perbedaan yang ada pada kelembagaan pasar dan kelembagaan pertanian. Namun ada beberapa kesamaan dalam kelembagaan yang ada dimasing-masing struktur.

Relevansi kebijakan publik dengan kelembagaan ekonomi adalah pada titik temu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas warga negara melalui kemampuannya untuk dapat meningkatkan daya saing dalam koridor norma, aturan permainan dan perilaku yang normal dari para actor/pelaku ekonomi. Jika terdapat perubahan kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negara melalui intervensi negara masuk dalam ranah pasar maka sangat mungkin sekali akan mendorong terjadinya perubahan kelembagaan ekonomi, karena di pasar terjadi apa yang disebut kelangkaan dalam persepsi pemerintah sebagai representasi dari negara. Dengan demikian, apabila pemerintah mempersepsi bahwa di pasar terdapat kelangkaan komoditas maka negara dapat saja untuk melakukan revisi kebijakan publik jika kebijakan yang dijadikan acuan kini akan menimbulkan kerugian negara dan atau merugikan warga negaranya.

Deliarnov (2006) kebijakan publik sendiri terkait dengan transaksi institusional yang mendefinisikan kembali domain pilihan keputusan. Transaksi institusional adalah sebuah kelas tentang perilaku ekonomi sehubungan dengan pengaturan kelembagaan, dan dengan demikian juga terkait dengan perangkat pilihan, yang membatasi arena pilihan bagi agen-agen atau pelaku-pelaku ekonomi yang memaksimalkan keputusan individu. Dalam hal ini, ada empat jenis transaksi institusional yang menentukan domain pilihan keputusan pelaku ekonomi. Pertama, terkait dengan hal-hal dimana perubahan institusi akan meningkatkan efisiensi produktif ekonomi. Kedua, terkait dengan hal-hal dimana distribusi pendapatan secara sengaja ditingkatkan, apapun alasannya. Ketiga, terkait dengan relokasi kesempatan ekonomi. Keempat, terkait dengan redistribusi keuntungan ekonomi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika terdapat perubahan kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, maka salah satu pemicunya adalah adanya perubahan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penduduk atau setidaknya memfasilitasi penduduk untuk mampu meningkatkan daya saing komoditas yang dihasilkan. Intervensi negara dengan membuat kebijakan publik tersebut dapat dengan merelokasi dan meredistribusikan keuntungan ekonomi, yang bisa saja pada level pusat maupun daerah dengan tujuan meningkatkan kesempatan ekonomi dan mampu meningkatkan daya warga negara untuk berinteraksi secara ekonomi.

Penelitian tentang Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan Dan Kebijakan Pemerintah Pada Agribisnis Kedelai oleh Soetriono, 2010, dengan metode yang digunakan *Policy Analysis Matrix* menyatakan bahwa profitabilitas privat dan profitabilitas sosial usahatani kedelai di wilayah penelitian (Desa Paleran dan Crahlele Kabupaten Jember) memiliki efisiensi dan memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dapat diartikan usahatani kedelai mempunyai daya saing. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap *inputoutputtradable* dan *input non tradable* tetap memberikan dampak negatif, sedangkan dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap *input* dan *output tradable* secara bersama-sama tetap memberikan dampak yang positif pada usahatani. Dalam mengatasi keterpurukan petani kedelai dilakukan upaya berdasarkan analisis FFA dari sub sistem hulu sampai dengan hilir. Penelitian Soetriono lebih fokus pada skala mikro dengan mempertimbangan faktor eksternal, sehingga ada mata rantai yang kurang mendapat perhatian, yaitu kelembagaan dan desain kelembagaan baru yang cocok dengan perubahan kebijakan dan perubahan lingkungan. Penelitian Soetriono memasukkan faktor

subsidi pengenaan biaya impor sebesar 5 % - 10 % untuk perlindungan produk nasional.

Handayani *et. al.* (2009) menelitian tentang simulasi kebijakan daya saing kedelai lokal pada pasar domestik menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam meningkatkan daya saing dan produksi kedelai domestik melalui peningkatan produktivitas dengan menerapkan teknologi usaha tani serta program daerah penanaman diperpanjang guna meningkatkan indeks pertanaman. Tetapi program peningkatan produktivitas juga harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan harga oleh pemerintah untuk dapat memperkuat daya saing kedelai domestik. Berbeda dengan penelitian Rante (2013) menganalisis strategi pengembangan tanaman kedelai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat pedesaan di Kabupaten Keerom bahwa secara finansial usahatani kedelai lokal layak diusahakan. Strategi yang digunakan dalam peningkatan produksi kedelai lokal dan pengembangan industri pengolahan berbasis kedelai lokal adalah dengan bantuan permodalan peran lembaga permodalan bank maupun non bank.

Kemudian Zakaria *et al* (2010) tentang analisis daya saing komoditas kedelai menurut agro ekosistem: kasus di tiga provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa usahatani kedelai masih memiliki keunggulan kompetitif yang memadai sebagai komoditas substitusi impor. Turunnya produksi kedelai lantaran rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai yang disebabkan kurangnya motivasi dan kemampuan petani dalam mengelola usahatani. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam usahatani kedelai perlu diupayakan mengatasi kendala seperti kurang tersedia bibit unggul, resiko petani yang cukup tinggi serta tidak adanya intensif harga jual kedelai yang layak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan referensi baru terkait pola kelembagaan usaha tani kedelai dengan lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Timur, sedangkan penentuan obyek penelitian dengan mempergunakan *multi stage cluster sampling* terhadap sentra-sentra produksi kedelai, misalnya Banyuwangi, Jember, dan Pasuruan. Unit analisis penelitian ini berada pada tingkat individu (mikro), organisasi (meso) dan masyarakat (makro). Sehubungan dengan hal tersebut maka responden yang dipilih adalah perwakilan petani kedelai, pelaku tata niaga perkedelai, dan *stakeholders* dari unsur pemerintah yang berkepentingan, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian Perdagangan di masing-masing kabupaten terpilih.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa data runtut waktu. Data primer diperlukan sebagai input penelitian yang diperoleh dari para pelaku (aktor) dalam kelembagaan kedelai. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari survei lapangan terhadap responden berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku kelembagaan usaha tani kedelai, dinas/institusi pertanian, dan *stakeholder* lainnya yang terkait langsung dengan pengembangan usaha tani kedelai. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, buku, jurnal, kajian penelitian serta data dari internet. Tahap awal yang dilakukan adalah menggali kondisi eksisting kelembagaan produksi dan produktivitas kedelai. Secara bertahap penelitian ini berangkat dari fakta-fakta yang ditemui di lapangan dalam

berbagai kasus untuk mendapatkan 'garis besar' bagi berbagai kondisi yang memiliki karakteristik sama. Setelah itu peneliti menggali pola-pola kelembagaan kedelai dari hulu ke hilir, kemudian diikuti oleh penentuan strategi pengembangan kedelai.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini diambil secara purposif (*purposive sampling*), disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam teknik purposif ini, sampel (nara sumber) yang diambil lebih bersifat selektif, yakni peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan, karakteristik empiris yang dihadapi, dan sebagainya. Sampel ini tidak digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau sekadar mewakili populasinya, tetapi lebih mengarah pada generalisasi teoritis. Sumber data digunakan tidak sebagai yang mewakili populasinya, namun lebih cenderung mewakili informasinya (Sutopo, 2003). Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini tidak terlalu menjadi prioritas, melainkan ditekankan kepada sampel yang mendukung bagi keperluan analisis (Masyhuri, 2008). Singkatnya, nara sumber dalam penelitian ini adalah individu-individu yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial di kelembagaan usaha tani kedelai di Jawa Timur.

Selanjutnya analisis menggunakan Analisis Delphi yang mana merupakan metode yang menggunakan panel para pakar yang tidak bertemu antara satu dengan yang lain dan umumnya digunakan untuk peramalan jangka panjang, memperkirakan perubahan teknologi atau permintaan pasar atas prosuk baru di masa yang akan datang (Kuncoro, 2001). Metode Delphi menekankan pada 5(lima) prinsip dasar, yaitu:

1. Anonimitas, yaitu semua pakar atau orang yang berpengetahuan memberikan tanggapan secara terpisah dan anonim (saling tidak mengenal satu dengan yang lainnya).
2. Iterasi, yaitu penilaian setiap individu dihimpun dan dikomunikasikan kembali kepada semua pakar yang ikut berkomentar dalam dua putaran atau lebih, sehingga berlangsung proses belajar sosial dan dimungkinkan berubahnya penilaian awal.
3. Tanggapan-balik yang terkontrol, yaitu pengkomunikasian penilaian dilakukan dalam bentuk rangkuman jawaban yang diaplikasikan pada kuesioner.
4. Jawaban statistik, yaitu rangkuman dari tanggapan setiap orang disampaikan dalam bentuk ukuran tendensi sentral (biasanya median), dispersi (interkuartil) dan distribusi frekuensi (histogram dan poligon frekuensi).
5. Konsensus pakar, yaitu sebagai suatu benang merah dari pendapat para pakar dengan beberapa asumsi sehingga tercipta generalisasi pendapat dari para pakar.

Berdasarkan kelima prinsip Delphi tersebut, kemudian dibuat analisis Delphi melalui beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi isu. Peneliti memberikan spesifikasi isu yang harus dikomentari oleh para pakar atau advokat. Pendekatan yang digunakan dapat berupa in-depth interview maupun dalam bentuk kuesioner terbuka.
2. Menyeleksi advokat. Peneliti menyaring beberapa *stakeholder* berdasarkan kepentingan yang berbeda baik posisi mereka maupun juga pengaruh relatifnya, wewenang formal dan afiliasi kelompok ada.

3. Membuat kuesioner. Isu-isu strategis diformulasikan dalam kuesioner yang disebarkan kepada *stakeholder* melalui beberapa kali iterasi.
4. Analisis hasil putaran pertama. Ketika kuesioner diperoleh kembali pada putaran pertama, peneliti berusaha untuk menentukan posisi awal para *stakeholder* tentang permasalahan isu, tujuan dan pilihan kebijakan. Secara khusus, beberapa item yang dipercaya penting layak atau tidak layak sehingga memerlukan skala kur agar dapat diunakan menyeleksi isu-isu pada pertanyaan putaran berikutnya.
5. Pengembangan kuesioner selanjutnya. Kuesioner dibuat lagi untuk putaran berikutnya sampai direduksi bias perasaan *stakeholder* karena Delphi memberikan suatu dapat logis dan memaksimalkan probabilitas hilangnya deviasi input dari *stakeholder*.
6. Mengorganisasi pertemuan kelompok. Mempertemukan para *stakeholder* dengan melakukan perenungan atas posisi pendapat mereka maupun pendapat orang lain.

Menyiapkan laporan akhir. Terkadang tidak ditemukan consensus bersama, maka analisis Delphi terakhir haruslah mengemuka dan menjelaskan secara apa adanya semua posisi konflik dan argument yang melandasinya.

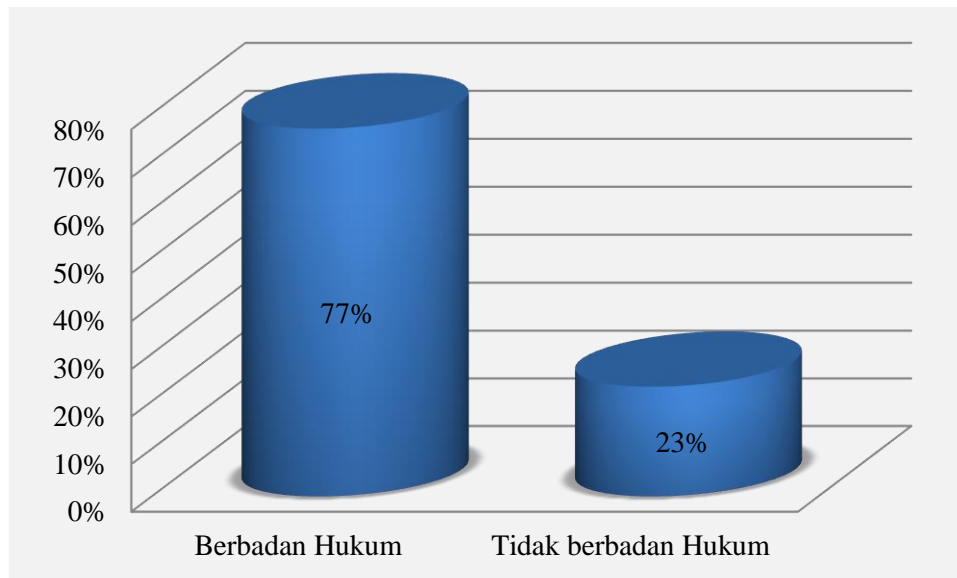
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan usaha tani kedelai tidak lepas dari kehidupan komunitas petani. Kelembagaan usaha tani merupakan wadah sosial dimana terdapat interaksi sosial antar petani yang bernaung dalam suatu komunitas (Suradisastra, 2008). Adanya komunitas atau kelompok dalam kelembagaan usaha tani kedelai memberikan kontribusi positif terhadap sektor pertanian. Kontribusi kelompok tani tersebut antara lain dapat menyelesaikan permasalahan pertanian yang dengan cara dimusyawarahkan bersama, mendapatkan informasi budidaya penanaman, serta memudahkan dalam akses sarana produksi pertanian. Hal tersebut senada dengan pemaparan Swastika dan Hermanto (2011) bahwa keikutsertaan petani dalam kelompok tani dapat memberi pemahaman konsep penanamann yang baik, sehingga secara tidak langsung kegiatan budidaya dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan pentingnya kelompok usaha tani terhadap kelembagaan pertanian maka peneliti ini juga memaparkan gambarkan kondisi kelompok usaha tani kedelai di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 85 responden diperoleh informasi bahwa sebagian responden sebesar 76% telah mengikuti kelompok usaha tani kedelai yang berada di lokasi tempat usaha sedangkan sisanya 24% tidak mengikuti kelompok usaha tani. Rata-rata petani kedelai telah mengikuti usaha tani kedelai selama kurang lebih dari 15 tahun. Responden yang mengikuti kelompok usaha tani kedelai paling baru adalah 1 tahun dan petani kedelai yang paling lama mengikuti kelompok usaha tani kedelai adalah 34 tahun.

Rata-rata petani yang mengikuti kelompok usaha tani kedelai adalah petani yang sudah memiliki pengalaman di bidang budidaya kedelai sejak lama. Tidak hanya faktor lama pengalaman petani dalam budidaya kedelai tetapi juga faktor pendidikan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani dalam mengikuti kelompok usaha tani kedelai atau tidak. Rata-rata pendidikan terakhir

petani yang mengikuti kelompok usaha tani kedelai adalah SMA. Hal ini dikarenakan jenjang pendidikan terakhir tersebut mampu memberikan pemahaman dalam menanggapi apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan usaha tani kedelai kedepan.



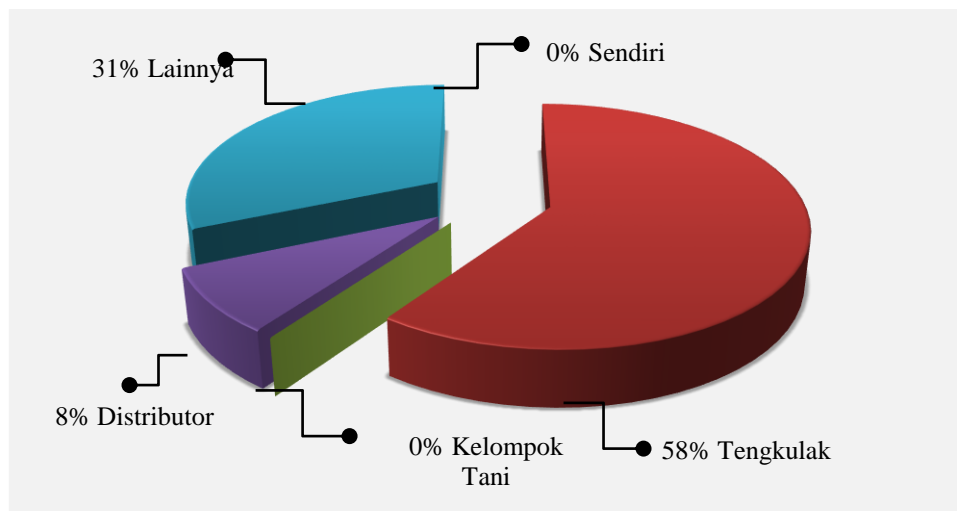
Sumber: Data Primer, diolah.

Gambar 2
Status Kelompok Tani Kedelai di Provinsi Jawa Timur

Pemahaman terhadap konsep lembaga atau kelembagaan lebih terfokus kepada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi nonformal (Swastika dan Hermanto, 2011). Dari 85 responden diperoleh informasi bahwa sebagian responden sebesar 66 kelompok usaha tani sudah memiliki status berbadan hukum sedangkan sisanya sebesar 19 kelompok merupakan kelompok usaha tani tidak berbadan hukum. Dengan adanya status kelompok tani kedelai yang sudah berbadan hukum memudahkan akses kelompok tani kedelai tersebut dalam mendapatkan bantuan sarana produksi dari pemerintah dan modal usaha dari lembaga keuangan. Selain itu, secara keseluruhan bahwa kelompok tani dalam kegiatan operasional sehari-hari tidak membebankan biaya operasional kepada petani kedelai. Kebijakan yang diambil kelompok tani tersebut berdampak kepada meningkatnya perhatian petani dalam berpartisipasi dengan kelompok tani yang dicerminkan oleh makin bertambahnya jumlah anggota kelompok tani. Berbeda halnya dengan pemaparan responden Barak Latif di dusun Watu Kebo, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember bahwa kontribusi petani untuk bergabung dengan kelompok tani kedelai tidak dilakukan secara sukarela melainkan ada kebijakan kelompok tani yang mewajibkan simpanan pokok kepada anggotanya

Berbagai manfaat yang dirasakan petani dalam berpartisipasi menjadi anggota kelompok tani diantaranya adalah adanya kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi (benih, pupuk, dan obat) yang cukup signifikan sebagai dampak positif. Disamping itu adanya bantuan informasi dalam memecahkan permasalahan hama tanaman kedelai serta menambah ilmu

pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya kedelai lokal. Sekitar 76,47% kelompok tani kedelai mengaku adanya pembinaan dari pemerintah daerah setempat dalam melakukan aktivitas usaha tani kedelai. Pembinaan usaha tani yang dibicarakan dalam pertemuan lebih banyak membahas pengendalian penanggulangan hama dan penyakit (69,5%) dan waktu tanam serentak(30,5%).



Sumber: Data Primer

Gambar 3
Tujuan Penyaluran Hasil Panen Kedelai Provinsi Jawa Timur

Tujuan pemasaran penelitian memiliki berbagai macam pilihan untuk distribusi pemasaran hasil tanam kedelai lokal di wilayah penelitian ini yakni diolah sendiri seluruhnya, dijual ke tengkulak, kelompok tani, pedagang besar, dan opsi lainnya. Akan tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah penelitian menunjukkan bahwa 58% responden menyatakan bahwa penjualan hasil panen ditujukan pada tengkulak. Sedangkan 33% responden penelitian menyatakan bahwa petani kedelai menjual hasil panen pada lainnya dan 8% responden menjual kepada distributor. Opsi lain yang dimaksud responden merupakan alternatif tujuan penjualan hasil panen yang biasa dilakukan oleh responden yakni memasarkan pada industri. Industri yang menjadi tujuan ini merupakan industri pengolahan dan industri pembibitan atau budidaya kedelai. Alasan responden memilih opsi lain diantaranya adalah penawaran harga jual yang lebih tinggi, adanya hubungan kemitraan, kemudahan akses, dan sebagainya. Alasan lain dari alasan responden dalam menentukan tujuan pemasaran pada tengkulak dan pedagang besar adalah *capital social* yang telah terbangun sejak lama, kemudahan akses, dan efisiensi biaya. *Capital social* yang dimaksud responden adalah hubungan yang telah terjalin terkait proses penanaman kedelai baik dalam kondisi menguntungkan atau tidak.

Keputusan dalam menentukan harga jual menjadi penting karena dapat mempengaruhi laba sehingga dapat menjaga kontinuitas proses tanam atau produksi kedelai lokal. Oleh karena itu *price maker* harga jual dalam transaksi jual-beli hasil panen kedelai lokal di wilayah penelitian menjadi ujung tombak penentu margin petani atas hasil panennya. Data yang diperoleh dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa 58% dan 31% responden penelitian memaparkan bahwa harga jual kedelai lokal petani ditentukan oleh pembeli utamanya yakni tengkulak dan industri baik industri pengolahan maupun industri industri pembibitan. Pembeli tersebut memiliki kekuatan dalam penentuan harga disebabkan oleh struktur pasar yang sebenarnya mudah dikuasai oleh pembeli tersebut. Jumlah tengkulak dan industri yang jauh lebih sedikit dibandingkan petani menyebabkan terjadi pasar monopsoni. Selain itu 8% dan 3% responden menyatakan bahwa harga jual kedelai lokal petani ditentukan oleh distributor (pedagang besar) dan petani sendiri. Penentuan harga jual yang ditentukan oleh petani sendiri dapat terjadi diduga karena petani juga mempunyai kekuatan pada pasar melalui kelompok tani atau lembaga pemerintahan.

Tabel 1
Harga Jual Hasil Panen Kedelai di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Sampel	Tingkat Harga			
	5.100-6.000	6.100-7.000	7.100-8.000	8.100-9.000
Kab. Jember	4	12	3	
Kab. Banyuwangi	7	21	2	1
Kab. Pasuruan	9	23	3	
Total Responden	20	56	8	1

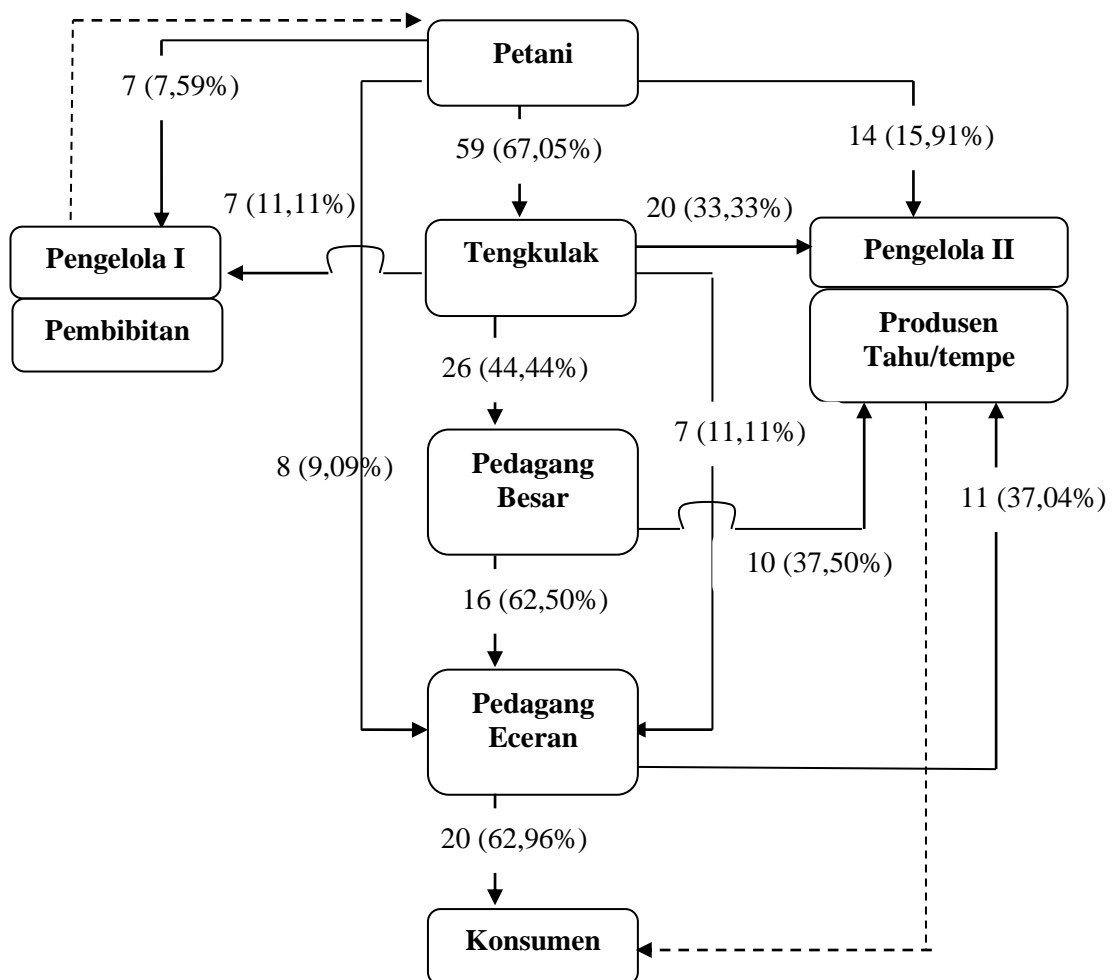
Sumber: data primer

Harga jual yang ditentukan dalam pasar kedelai lokal memiliki tingkatan berdasarkan kualitas hasil panen petani kedelai Provinsi Jawa Timur. Kualitas kedelai lokal meliputi kedelai basah dengan harga jual sebesar 5100-6000 sejumlah 20 responden dan kedelai semi kering dengan harga jual sebesar 6100-7000 sejumlah 56 responden. Sedangkan kedelai kering dengan harga jual sebesar 7100-8000 sejumlah 8 responden dan kualitas super dengan harga jual sebesar 8100-9000 sejumlah 1 responden. Penentuan harga jual yang diterima petani oleh pembeli dilakukan melalui kualitas kedelainya. Data di atas menunjukkan bahwa menurut pedagang mayoritas petani menjual kedelai dengan kualitas mamel sehingga harga yang ditentukan sebesar 6100-7000. Akan tetapi menurut petani kualitas hasil panen kedelai sudah memenuhi kualitas kedelai kering sehingga harga jual yang seharusnya diterima petani adalah 7100-8000. Permasalahan harga tersebut yang sering menjadi masalah pelaku usaha tani yang pada dasarnya pemicu utamanya adalah asimetri informasi.

Pelaku distribusi pemasaran hasil panen kedelai terakhir di wilayah Provinsi Jawa Timur kini telah mampu mengikuti peraturan pemerintah pusat yang telah mengatur peraturan tentang Harga Pokok Penjualan (HPP) melalui Peraturan Menpan No.82 tahun 2013. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penjualan hasil panen kedelai dihargai dengan 7500/Kg sehingga pedagang harus menerapkan transaksi jual-beli dengan menggunakan patokan tersebut. Akan tetapi realita yang terjadi mayoritas pedagang masih melakukan kecurangan dengan membeli hasil panen kedelai petani dengan harga di bawah HPP yakni berkisar pada harga 6500 – 7000 dan harga penjualannya berkisar pada 6700 – 7500. Dengan demikian bila pedagang menerapkan harga beli yang berada pada batas bawah harga beli kisaran dan batas atas harga jual kisaran

maka pedagang akan memperoleh margin yang semakin besar. Ironisnya petani tidak mampu menolak harga tersebut dengan alasan agar cepat dapat mengembalikan modal tanam.

Kedelai memiliki perbedaan karakteristik dan pengetahuan jalur distribusi. Oleh karena itu, kontribusi persentase tidak secara keseluruhan saluran distribusi tetapi dari tiap pelaku agribisnis tanaman kedelai tersebut dikeluarkan. Data dianalisis dari persepsi petani tentang jalur distribusi komoditas kedelai. Jumlah petani kedelai dalam penelitian ini yang diteliti sebanyak 88 responden. Komoditas yang dihasilkan oleh petani kedelai dapat diserap melalui 4 saluran. Saluran yang pertama adalah melalui pengelola1 (pembibitan), kedua melalui pedagang pengecer, ketiga melalui tengkulak serta yang keempat langsung melalui pengelola ii (produsen tahu/tempe).



Gambar 4
Rantai Pemasaran Komoditas Kedelai Pasca Panen

Distribusi kedelai dari petani sampai ke konsumen melalui beberapa jalur. Jalur I yaitu PETANI→PENGELOLA I (PEMBIBITAN) →PETANI yang

merupakan jalur terpendek. Jalur II komoditas kedelai yaitu PETANI → PEDAGANG ECERAN → KONSUMEN yang merupakan jalur terpendek kedua. Komoditas yang diserap pedagang eceran dari petani sebesar 9,09%. Pada jalur ini para petani biasanya mengupas sendiri secara manual biji kedelai dan ada pula yang membayar biaya pengolahan kepada penggilingan (pengelupas kulit). Jalur III dari komoditas ini yaitu PETANI → PENGELOLA II (PRODUSEN TAHU/TEMPE) → KONSUMEN yang merupakan jalur terpendek ketiga sebesar 15,91%. Jalur IV komoditas kedelai adalah PETANI → TENGKULAK → PEDAGANG BESAR → PEDAGANG ECERAN → KONSUMEN. Tengkulak menyerap komoditas kedelai dari petani sebesar 67,05%. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini terjadi karena kebanyakan petani kedelai masih belum banyak yang mengetahui jalur pemasaran produk kedelainya. Dari Tengkulak didistribusikan ke pedagang besar sejumlah 44,44%. Sedangkan dari pedagang besar ke pedagang eceran sebesar (62,50%).

Jalur V dari komoditas kedelai adalah PETANI → TENGKULAK → PEDAGANG ECERAN → KONSUMEN dimana kontribusi distribusi kedelai dari tengkulak ke pedagang eceran adalah sebesar 28,57%. Kondisi pada jalur ini biasanya para tengkulak memiliki sendiri alat pengupasannya, sehingga dapat langsung dijual ke pedagang pengecer. Jalur berikutnya adalah Jalur VI yaitu PETANI → TENGKULAK → PENGELOLA I (PEMBIBITAN) → PETANI sebesar 11,11%. Jalur VII komoditas kedelai mirip dengan jalur VI yaitu PETANI → TENGKULAK → PENGELOLA II (PRODUSEN TAHU/TEMPE) → KONSUMEN. Kontribusi dari tengkulak ke produsen tahu/tempe adalah sebesar 33,33%.

Jalur berikutnya adalah Jalur VIII yaitu PETANI → TENGKULAK → PEDAGANG BESAR → PENGELOLA II (PRODUSEN TAHU/TEMPE) → KONSUMEN. Distribusi dari pedagang besar kepada pengelola ii (produsen tahu/tempe) sebesar 37,50%. Jalur lain adalah jalur IX yaitu PETANI → TENGKULAK → PEDAGANG BESAR → PEDAGANG ECERAN → PENGELOLA II (PRODUSEN TAHU/TEMPE) → KONSUMEN. Pada jalur ini kontribusi yang diberikan oleh pedagang eceran ke pengelola II (produsen tahu/tempe) adalah sebesar 37,04% dan merupakan jalur mata rantai distribusi kedelai terpanjang dibandingkan jalur lain, panjangnya mata rantai menyebabkan besarnya biaya transaksi yang keluar semakin tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, panen kedelai yang dihasilkan petani sangat sulit untuk langsung masuk ke pedagang besar. Hal ini dikarenakan otoritas non-yuridis (kesepakatan sosial) dari pelaku pasar bahwa produk harus disetor ke tengkulak sebagai kepanjangan tangan dari pedagang besar. Pihak pedagang besar sendiri merasa bahwa jika harus mengambil langsung ke petani maka akan merugikan tengkulak sebagai mitra yang telah lama menyambungkan saluran distribusi dari petani. Apabila pedagang besar mengambil hasil panen kedelai langsung dari petani kedelai merasa dirugikan karena pedagang besar harus mengeluarkan biaya tambahan untuk persortiran kualitas dan jenis kedelai. Beberapa petani kedelai yang masih menggunakan jasa tengkulak untuk memasarkan hasil panen kedelai disebabkan adanya kedekatan emosional antara petani kedelai dengan para tengkulak, apabila petani kedelai mengalami masalah modal untuk bercocok tanam, pihak tengkulak mampu membantu permasalahan petani tanpa ada persyaratan administrasi berbelit seperti lembaga keuangan lainnya. Tetapi sebagai balas jasa telah dibantu, hasil panen kedelai wajib di setorkan kepada tengkulak.

Pada dasarnya, petani tidak merasa keberatan dengan adanya tengkulak. Selain sudah tidak memerlukan mencari pasar untuk distribusi produknya, biaya pengiriman, biaya kemas kedelai (karung) juga lebih banyak (hampir 98%) ditanggung oleh tengkulak. Akan tetapi, efek yang diakibatkan oleh adanya tengkulak adalah selisih margin yang terlalu besar antara harga di pihak petani dan pedagang eceran sehingga harga jual kedelai menjadi tinggi karena harga yang diberlakukan pedagang besar tidak dapat menekan ke atas tetapi menekan ke bawah, yaitu kepada para konsumen.

Proses analisis Delphi memiliki kunci pada iterasi pertanyaan kepada responden. Pada tahap awal, penentuan isu kelembagaan agribisnis harus dilemparkan kepada para *stakeholder*. Kelembagaan usaha tani kedelai yang muncul sebagai isu dijabarkan kepada para *stakeholder* yang ada. Isu kelembagaan yang akan diambil diajukan kepada 12 responden melalui wawancara yang terdiri dari 2 orang tenaga pengajar di Universitas Jember, 2 orang dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta 8 orang dari para petani pelaku usaha tani kedelai yang concern pada perkembangan sektor usaha tani kedelai. 12 *stakeholder* tersebut diberikan kuesioner iterasi pertama secara terpisah. Sedangkan kuesioner kedua dibuat setelah mendapatkan hasil kuesioner pertama.

Pada tatanan peramalan, 12 *stakeholder* merasa yakin bahwa kelembagaan usaha tani kedelai secara partisipatif memiliki kehandalan dalam upaya mengembangkan sektor pertanian kedelai di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isu mengenai pembentukan kelembagaan usaha tani kedelai yang paling relevan adalah kelompok usaha tani kedelai juga dirasa sangat penting bagi perkembangan kelembagaan usaha tani kedelai dan sektor usaha tani kedelai itu sendiri. Pertentangan muncul pada kajian tujuan kelembagaan usaha tani kedelai. Berdasarkan fungsinya, tujuan yang muncul untuk diperdebatkan adalah bentuk kelembagaan usaha tani kedelai itu sendiri yang mengacu pada kemitraan, tujuan kedua mengacu pada kelembagaan keuangan, sedangkan ketiga mengacu pada aspek penyuluhan atau fasilitator bagi pelaku usaha tani kedelai.

Tabel 2
Jawaban Delphi Stakeholder

Stakeholder	Tujuan 1		Tujuan 2		Tujuan 3	
	Keperluan	Fisibilitas	Keperluan	Fisibilitas	Keperluan	Fisibilitas
1	4	2	4	4	4	4
2	4	2	4	4	3	3
3	4	3	3	2	3	2
4	4	2	4	4	4	4
5	4	1	3	3	2	1
6	4	2	4	4	3	3
7	3	2	3	3	3	3
8	4	2	4	3	3	4
9	4	2	4	4	3	3
10	4	3	3	2	2	2

11	3	1	4	4	3	4
12	4	4	3	2	2	3

Sumber: data primer, diolah

Pemaparan tabel 2. di atas mengindikasikan bahwa jawaban para *stakeholder* lebih mengarah pada tujuan 1 yaitu pada kemitraan. Tujuan kemitraan lebih banyak dipilih oleh para *stakeholder* disebabkan dengan adanya kemitraan harga jual kedelai pasca panen menjadi jelas, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa diuntungkan apabila bermitra sesuai dengan kontrak. Tahapan berikutnya adalah mencoba mendatangi kembali para *stakeholder* dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait aspek tersebut. Wawancara berikutnya ini menggunakan kuesioner yang lebih bersifat terbuka. Pada tahap iterasi ke-2 ini, para *stakeholder* diajukan pertanyaan terkait dengan alasan, asumsi dan argumentasi untuk mendukung pendapatan mereka sebelumnya.

Bedasarkan iterasi yang kedua, para *stakeholder* hampir semuanya memberikan alasan yang sama. Hal ini mungkin dikarenakan isu kemitraan sudah lama muncul ke permukaan namun masih belum memiliki konsep riil yang tepat guna sehingga terasa mengambang di permukaan saja tanpa ada pijakan yang jelas. Dengan adanya kemitraan diharapkan terdapat kejelasan dalam input produksi dan output produksi. Berikut ini tabulasi jawaban responden pada iterasi ke-2 :

Tabel 3
Tabulasi Jawaban responden pada iterasi ke-2 Delphi

Stakeholder	Alasan	Asumsi	Argumentasi
1	Adanya kemitraan memberikan kepastian harga jual kedelai melalui mekanisme tawar-menawar	Adanya kepercayaan satu dengan yang lain. atau dengan asumsi adanya jaminan	Memudahkan adanya bantuan melalui kelompok tani kedelai
2	Memberikan & menjaga kestabilan harga pasca panen.	Adanya keterbukaan / transparansi & tidak ada birokrasi berbelit	Memudahkan adanya pemasaran melalui kelompok tani kedelai.
3	Untuk meningkatkan / mempertahankan harga jual hasil produksi kedelai.	Adanya kepercayaan, dukungan dan jaminan kepastian harga, pengurusannya mudah.	Kelompok usaha tani kedelai yang saling menguntungkan.
4	Untuk memutus mata rantai panjang kedelai pasca panen.	Mekanismenya menanam kepercayaan.	Mitra kelompok usaha kedelai.
5	Agar supaya ada kepastian harga dalam pemasaran.	Harus ada komitmen antara pelaku dengan para mitranya,	Mitra kerja melalui, kontrak barang, kontrak harga, kontrak bagi hasil.

6	Menyeragamkan komoditi sehingga hama penyakit tidak mudah menyerang.	konsekuen, dan saling menguntungkan. Subsidy Pemodalan serta adanya kontak hitam diatas putih.	Mitra kontrak kerja.
7	Merupakan bentuk paling logis yang menjembatani berbagai pelaku usaha tani kedelai.	Bekerja pada kepentingan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku.	Kelompok usaha tani kedelai.
8	Untuk saling berkesinambungan hubungan kerja dan informasi.	Asumsi saling percaya dan mempercayai	Mitra Kerja
9	Semua pihak mendapatkan keuntungan.	Keterbukaan dan kepercayaan satu sama lain.	Kelompok tani dengan bantuan modal
10	Memotong mata rantai panjang pemasaran kedelai serta efisiensi finansial dan kerja.	Aturan yang jelas dan komitmen yang kuat.	Kemitraan input dan output
11	Semua pihak mendapatkan keuntungan dan memutus mata rantai tengkulak serta membeli harga diatas harga pengepul dan tengkulak.	Aturan yang tidak menyulitkan petani, kontrak tertulis, dipercaya petani, menguntungkan petani.	Kemitraan yang menguntungkan petani dan berpihak kepada petani.
12	Memberikan Kemudahan dalam mengembangkan usaha secara bersama-sama dan pengembangan komunitas yang lebih nyata.	Mekanisme terkontrol dan tidak terlalu menekan pihak yang lemah.	Peningkatan kelompok usaha tani kedelai atau koperasi petani kedelai.

Sumber: data primer, diolah

Bedasarkan tanggapan para *stakeholder* maka dapat diketahui bahwa kemitraan merupakan suatu konsep strategis dalam pengembangan sektor usaha tani kedelai maupun sektor agribisnis yang sinergi antara berbagai elemen. Konsep sinergi yang dimaksud bukanlah bermakna integrasi atau keterpaduan semata tetapi dalam kaitan konsepsi pembangunan yang tidak penedekatan secara terpusat. Bapenas (2010) memaparkan bahwa sinergi menunjukkan pada pengertian proses pengembangan secara bersama diantara berbagai pihak yang mengandung dimensi keadilan. Jika dilihat dari hasil analisis delphi, secara keseluruhan *stakeholder* dalam menjawab soal yang diberikan lebih menitik beratkan kepada stabilisasi harga jual pasca panen kedelai. Harga jual pasca panen kedelai yang tidak menentu menyebabkan sebagian petani memilih menanam hasil tanaman pangan lainnya seperti jagung maupun sayur mayur. Penentuan harga kedelai pasca panen dirasa kurang dapat mensejahterakan petani karena antara modal yang dengan hasil yang diterima adalah sama atau impas. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah maupun dinas terkait untuk menanggulangi harga kedelai pasca panen yang menurun.

Hasil analisis delphi juga diperkuat oleh FGD di beberapa kelompok mengenai prespektif para pelaku usaha tani kedelai di Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi terhadap kelembagaan pasca panen kedelai. Berdasarkan presepsi peserta FGD, mereka diminta untuk menyebutkan kegiatan kelembagaan petani yang berada di daerah mereka masing-masing. Keseluruhan peserta FGD mengatakan bahwa di daerahnya pernah ada kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani. Namun eksistensi kelompok tani tersebut sudah banyak yang berkurang atau meskipun masih ada tetapi sudah tidak berfungsi lagi. Salah satu petani, Bapak Tukimin dari Kecamatan Tegaldlimo mengatakan bahwa:

“Ya gimana lagi pak... sebenarnya kelompok tani kedelai di Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kelompok tani yang aktif (parsitipatif). *Senajan* (sebenarnya) beberapa anggota kelompok sudah ndak lagi murni jadi petani kedelai, malah jadi petani buah-buahan seperti jeruk, semongko dan buah naga.”

Namun, tidak semua petani mengalami hal tersebut. Beberapa kelompok tani kedelai yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen terhadap usaha tani yang dilakukannya, secara tidak langsung mendapatkan keuntungan yang lebih dari kegiatan kelompok tani yang aktif. Sehingga kelembagaan petani kedelai dapat berdaya guna bagi anggotanya. Beberapa kasus menyebutkan bahwa para pelaku agribisnis kedelai yang memanfaatkan kelompok tani tidak hanya mendapatkan bantuan berupa saprodi dari pemerintah, tetapi juga mendapatkan informasi budidaya kedelai dan informasi kepastian harga pasca panen. Kasus yang dialami oleh pak tukimin terkait kondisi eksisting kelembagaan usaha tani kedelai lebih disebabkan karena harga hasil panen kedelai tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh petani selama proses produksi.

Pengetahuan perubahan lingkungan bisnis secara keseluruhan kurang dipahami oleh beberapa kelompok usaha tani kedelai. Perubahan lingkungan bisnis dapat diproyeksikan melalui informasi harga pasar rujukan di tingkat para petani. Hasil diskusi FGD mengindikasikan bahwa di kalangan petani informasi

pasar tidak dapat ditransferkan secara penuh. Artinya beberapa pelaku usaha tani kedelai seringkali mengetahui harga yang berlaku di antara para pelaku usaha tani kedelai. Kebanyakan dari petani yang tidak mengetahui harga dipasar rujukan selalu memberikan hasil pertaniannya kepada “pengepul / tengkulak”. Keberadaan pengepul biasanya menetapkan harga hasil panen kedelai dibawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh salah satu petani, Bapak Rahman Hakim dari Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari mengatakan bahwa:

“harga kedelai pas panen di pengepul sama harganya gitu dengan harganya pemerintah, pasti banyak petani yang jual hasil panen kedelai ke pengepul/juragan. Lha wong sudah prosesnya pembiayaan mudah dan cepat. Malah dibantu pengambilan hasil panen plus sak karunge gratis pula. Kalo gag punya uang juragan ya bisa bantu dengan tanpa syarat dan birokrasi mudah. Lha wong isinlah petani kalau gag jual hasil panen kedele ke juragan.hehehe...”.

Bedasarkan uraian pak Hakim tersebut maka keberadaan akses informasi harga dan *stakeholder* pasca panen kedelai sangat dibutuhkan oleh petani kedelai. Hasil panen kedelai dijual ke pengepul selanjutnya dijual ke pedagang besar dibeberapa kota besar. Kondisi ini menyebabkan pasokan kedelai lokal tidak merata atau pada saat tidak panen kedelai lokal tidak dapat memenuhi permintaan beberapa daerah yang kebutuhan terus meningkat. Selain pemaparan beberapa pelaku usaha tani di atas, pelaku industry pengolahan kedelai pun turut berargumentasi yaitu Bapak Ahmad dari Kecamatan Purwoharjo yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kualitas kedelai petani di lingkungan sekitar itu dapat dipakai dan harganya rendah tapi kedelai impor itu lebih bagus lo Pak. Kenapa? Karena kedelai impor itu meskipun harganya lebih tinggi tapi jumlah tempe yang dihasilkan itu lebih banyak juga dan kegagalan fermentasi tempe sangat kecil. Itulah kenapa saya lebih pilih kedelai impor Pak. Ya meskipun saya juga sering pake kedelai petani sini tapi saya lebih seing pake kedelai luar karena proses pembuatan tempe lebih cepat. Kalau pun saya punya stok kedelai sini (lokal) dan luar mendingan saya campur aja Pak, biar prosesnya enggak lama-lama”.

Namun ada juga beberapa penjelasan berbeda oleh pelaku industry pengolahan kedelai dalam pemenuhan bahan baku sampai proses pemasaran produk olahan kedelai yang terkait dengan kondisi eksisting kelembagaan pasca panen kedelai. Contohnya adalah Bapak Qosim dari Kecamatan Tegaldlimo. Beliau mengatakan bahwa:

“kalau saya selama ini pakenya kedelai petani sini-sini aja, saya pake sistem tukar, maksudnya saya jual tempe dan tahu di daerah Kedungasri, saya juga ambil Kedelai dari petani daerah situ juga. Jadi kalau pagi setelah taruh tempe dan tahu di warung atau toko saya juga sekalian mampir ke petani yang punya stok kedelai.

Makanya saya jarang keabisan stok kedelai untuk proses buat tempe dan tahu besoknya. Apalagi harga kedelainya lebih murah”.

Pak Qosim adalah salah satu contoh dari pelaku industri yang sudah memiliki jaringan terkait usaha pengolahan kedelai. Hal ini mungkin dikarenakan Pak Qosim adalah sosok pelaku industri yang menerapkan konsep kemitraan sederhana yang dijalankan melalui proses kedekatan emosional dengan petani kedelai. Sehingga dengan pola kemitraan antar *stakeholder*, petani merasa diuntungkan dengan kepastian harga kedelai dan pemasaran pasca panen, industri diuntungkan dengan stok kebutuhan kedelai lokal yang siap sedia dengan harga kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hasil analisis delphi juga diperkuat oleh FGD di beberapa kelompok mengenai prespektif para pelaku usaha tani kedelai di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi terhadap kelembagaan pasca panen kedelai. Dari hasil wawancara delphi dan FGD yang dilakukan kepada *stakeholder* menghasilkan dua kebijakan yang saling menguntungkan di semua pihak. Kebijakan pertama adalah kebijakan subsidi harga oleh petani di tingkat output produksi hasil panen kedelai. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan adanya kemitraan antara petani melalui kelompok tani dengan *stakeholder* terkait seperti kemitraan dengan industri manufaktur kedelai dan kemitraan dengan bulog. Adanya dua kebijakan tersebut secara tidak langsung petani usaha tani kedelai memiliki gairah untuk menanam kedelai dan meningkatkan daya saing kedelai lokal. Kebijakan tersebut berdampak pada terpenuhinya permintaan akan kedelai lokal sehingga kedelai lokal mempunyai daya saing berbasis ketahanan pangan nasional.

Keadilan dalam kesejahteraan merupakan tujuan utama dari kemitraan usaha tani kedelai. Konsep keadilan tersebut memberikan makna pengembangan suatu komunitas sehingga tidak hanya berlandaskan sistem birokratik seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan kemitraan sebagai suatu konsep pengembangan komunitas harus memiliki peran sentral sebagai pencipta partisipasi aktif suatu komunitas, khususnya profesi agribisnis.

PENUTUP

Pemaparan penelitian Kebijakan Pengembangan Daya Saing Kedelai Lokal Berbasis Keadilan Untuk Kedaulatan Pangan Nasional di Provinsi Jawa Timur yang diinterpretasi atas data yang telah terkumpul telah memberikan titik terang permasalahan. Hasil analisis data sementara dapat menunjukkan beberapa hal penting terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni:

1. Keberadaan kelompok usaha tani yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan informasi, tingkat kepercayaan masyarakat atas fungsional kelembagaan kelompok usaha tani, dan sosialisasi kegiatan dan manfaat kelompok usaha tani. Rendahnya jumlah pelaku usaha tani yang berpartisipasi pada kegiatan kelompok tani menggambarkan pola manajemen kelompok tani yang belum sesuai dengan harapan pelaku usaha tani. Faktor lainnya adalah pengetahuan pelaku usaha tani yang tidak seirama diduga berdampak pada penentuan harga dan biaya produksi yang dibutuhkan pada proses tanam kedelai. Dengan demikian kondisi eksisting kelembagaan kedelai di Provinsi Jawa Timur patut untuk dinotasi ulang sehingga pola kegiatan ataupun transaksi pelaku usaha tani dapat terestimasi dengan valid. Meskipun pada realitanya pola kelembagaan yang

tercipta memiliki banyak tipe alur distribusi yang digunakan oleh pelaku usaha tani. Ironinya mayoritas masyarakat acuh tak acuh atas alur distribusi yang digunakan karena prioritas pelaku usaha tani adalah tingkat keuntungan dan kemudahan akses pemasaran. Oleh karena itu harmonisasi hubungan kerjasama antar pemerintah dan kelompok usaha tani akan memberikan kemudahan dalam pemutusan kebijakan terkait kedelai lokal.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan atas gambaran eksisting dan pola kelembagaan kedelai lokal Provinsi Jawa Timur pada dasarnya membutuhkan dua poin penting. Formulasi kebijakan yang diharapkan oleh pelaku usaha tani kedelai lokal Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan pada pasca panen yaitu subsidi harga jual kedelai lokal dan integrasi kemitraan antar pelaku usaha tani melalui kelembagaan yang dinaungi pemerintah. Oleh karena itu keserasian antara kualitas hasil panen dan kebutuhan pasar dapat tercipta sehingga kedelai lokal Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan bersaing pada komoditas kedelai regional sampai internasional.

Berdasarkan kesimpulan penelitian terkait kelembagaan kedelai lokal guna mempertahankan daya saingnya maka saran yang dapat disampaikan bagi pihak terkait yaitu:

1. Peremajaan notulen kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha tani di tiap wilayah Provinsi Jawa Timur melalui transparansi kelompok usaha tani sehingga dapat menarik pelaku usaha tani untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas yang diperoleh kelompok tersebut. Di samping itu pola kelembagaan yang sudah terakan pada penelitian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk dapat memotong dan menyederhanakan mata rantai distribusi pemasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan rasa enggan petani untuk berbudidaya kedelai untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha tani kedelai lokal. Dengan demikian kontrol pemerintah guna memperbaiki permasalahan kelembagaan kedelai lokal melalui penentuan kebijakan dapat terlaksana secara riil dan tepat guna.
2. Formulasi kebijakan yang disajikan pada pembahasan merupakan formulasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha tani dan proporsi pemerintah. Selain itu dibentuk penguatan komunikasi antar kelembagaan pelaku usaha tani dari hulu sampai hilir diharapkan dapat memberikan suasana baru sehingga menimbulkan kepercayaan antar elemen pelaku usaha tani. Harapan dan upaya baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing kedelai lokal Provinsi Jawa Timur pada pangsa pasar nasional bahkan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adisarwanto. 2008. *Budidaya Kedelai Tropika*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Ahmad, T. M. A., Tawang, A. 1999. Effect of Trade Liberalization on Agriculture in Malaysia: Commodity Aspect. *CGPRT Working Paper Series* 46, 1999.

Dharmawan, Arya Hadi. 2001. Form Household Livelihood Strategies and Socio-Economy Changes in Rural Indonesia: A Comperative Study.

Socioeconomics Study on Rural Development, Vol 124, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.

- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Gelora Akasara Pratama.
- Elizabeth, R. 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. *Proceedings of Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Bogor, p. 165-173
- Firdaus, M., Semaoen, M. I., Hanani, N. dan Syafrial. 2012. The Impact of Trade Liberalization on the Soybean Economic Performance in Indonesia. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*.
- Handayani, D., Bantacut, T., Munandar, J. M., dan Budijanto, S. 2009. Simulasi Kebijakan Daya Saing Kedelai Lokal pada Pasar Domestik. *Jurnal teknologi Industri Pertanian* Vol. 19 (1).
- Hira, A. & Hira, R. 2000. The Institutionalism: Contradictory Notions of Change. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol 59 No 2, April: 267-282.
- Huang, J., Rozelle, S. 2004. Trade Liberalization, Rising Import and China's Food Economy: The Case of Soybean. *Report Submitted to the American Soybean Association*, Freeman Spogli Institute (FSI) Stanford.
- Manig, Winfried. 1991. Rural Social and Economic Structures and Social Development. In: Winfried Manig. (ed.). *Stability and Change in Rural Institutions in North Pakistan. Socio-economic Studies on Rural Development*. Vol. 85. Alano. Aachen.
- Masyhuri. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- North, 1995. *The New Institutional Economics and Third World Development*. In: John Harris, Janet Hunter, and Colin M. Lewis. (eds.). *The New Institutional Economics and Third World Development*. Routledge. London
- Prajanti, S., Waridin. 2010. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost: Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 11, No.1, Hal. 13-29.
- Purnamawati, P. H. 2009, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Ungul*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Rante, Yohanis. 2013. Strategi Pengembangan Tanaman Kedelai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. *JMK*, Vol. 15, No. 1, Maret 2013, 75-88.

- Soetriono, 2010. *Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan Dan Kebijakan Pemerintah Pada Agribisnis Kedelai*. Balitbang: Malang.
- Sutopo, H.B. 2003. Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Masykuri Bakri. (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dan Visipres. Malang
- Wahab, Sholichin A.W. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Yustika, A. E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Zakaria, Amar. K, Wahyuning K., dan Reni Kustiari. 2010. Analisis Daya Saing Komoditas Kedelai Menurut Agro Ekosistem: kasus di Tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, (28) No.1.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA TEBU MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI JAWA TIMUR

Lilis Yuliati dan Regina Niken W.
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
e-mail: lilis_yuliati@yahoo.co.id dan reginanikenw@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian terdahulu, Produk Derivat Tebu (PDT) yang dikembangkan oleh industri gula (PG dan petani tebu) masih sedikit sekali, bahkan nyaris tidak ada bagi petani tebu. Padahal industri gula di luar negeri, PDT sudah dikembangkan secara optimal. Tujuan riset ini adalah 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan PDT tidak memberikan nilai tambah seperti yang diharapkan; serta 2) memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah PDT pada PG dan petani tebu.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif, yaitu bermaksud menjelaskan suatu fenomena melalui berbagai aspek, dengan tujuan ditemukan kesimpulan umum terkait fenomena yang akan diteliti. Metode analisisnya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari riset ini: 1) dari aspek sarana dan prasarana, pengolahan PDT harus dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (nilai bobot 37%); 2) dari aspek teknologi dan inovasi, pangsa pasar memegang peranan penting (33%). Secara implisit masalah dalam menentukan perusahaan mitra yang akan memproduksi produk turunan tebu adalah pangsa pasar. Apakah perusahaan dapat menghasilkan produk yang dikehendaki pasar; 3) dari aspek sumberdaya, mereka lebih menghendaki adanya jaminan harga input (43%); 4) dari aspek permodalan, apabila ada pasar yang jelas, maka hal ini dapat dijadikan jaminan bagi investor untuk melakukan penanaman modal (21%); 5) dari aspek tenaga kerja, upah yang tinggi akan menarik minat tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan produk turunan tebu (bobot 37%). Ditinjau dari aspek pemasaran, pembentukan industri kecil dan dikelola oleh kelompok usaha bersama akan membantu meningkatkan nilai tambah produk turunan tebu.

Based on previous studies, PDT developed by the sugar industry (PG and sugar cane farmers) are still very little, almost nothing for the farmers. Whereas the sugar industry abroad, PDT has been developed. The purpose of this research is 1) to identify the factors that cause PDT do not provide added value as expected, and 2) provide appropriate policy recommendations to enhance the added value PDT in PG and sugarcane farmers.

Type of research is quantitative descriptive, which is intended to explain a phenomenon through various aspects, with the goal of general conclusions related discovered the phenomenon to be studied. Methods of analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP).

The resulting conclusions and recommendations: 1) from the aspect of infrastructure, PDT treatment should be able to increase employment (value weighted 37%); 2) from the aspect of technology and innovation, market share plays an important role (33%). Implicitly problem in determining a partner

company that will produce sugarcane derived products are the market share. Is the company able to produce the desired product markets; 3) from the aspect of resources, they prefer a guaranteed input prices (43%); 4) from the capital, where there is a clear market, then it can be used as collateral for the investors to make investments (21%); 5) from the aspect of employment, higher wages will attract labor to work in sugar cane derivative product company (weighting 37%). Judging from the marketing aspect, the establishment of small industries and managed by the joint venture will help increase the added value of sugarcane derived products.

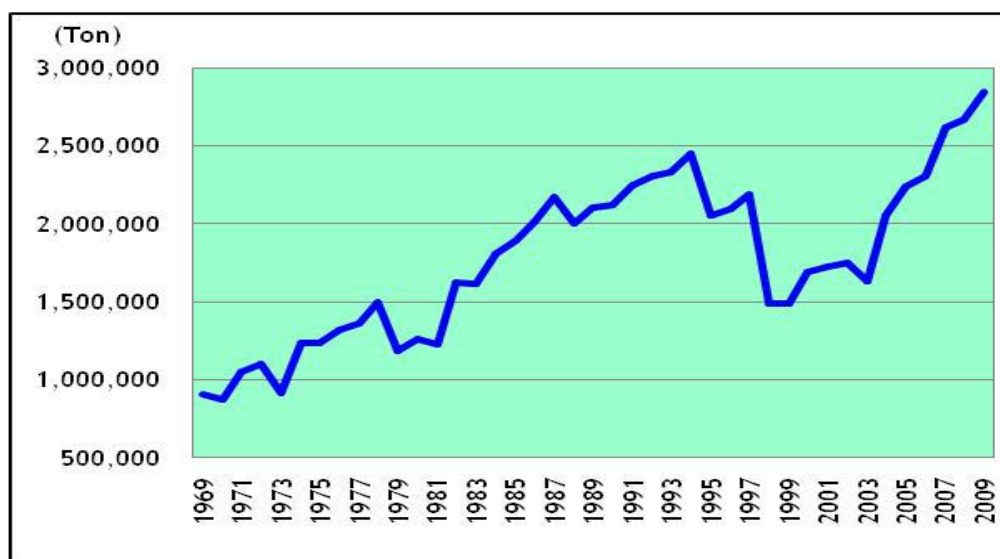
Keywords: Sugarcane Derived Products, PG, Sugarcane Farmers, Experts, Analytical Hierarchy Process

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok yang memegang peranan strategis adalah gula. Walau telah muncul berbagai varian pemanis sebagai pengganti gula, pada kenyataannya masyarakat masih memilih gula sebagai pilihan utama karena alasan kepraktisan, ketersediaan dan berbagai kelebihan lainnya.

Di sisi lain, sebagian sektor industri telah mensubstitusi gula dengan pemanis buatan namun dengan porsi yang sangat kecil. Dengan demikian, sektor industri masih mengandalkan gula tebu sebagai pilihan utama (*Capricorn Indonesia Consult*, 1998). Dengan masih pentingnya peranan gula dalam kehidupan masyarakat dan berbagai industri beberapa tahun mendatang kebutuhan akan gula akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat dan bertambahnya industri yang menggunakan bahan baku gula tebu.

Gula sebagai produk “utama” berbahan baku tebu merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Selain fungsinya sebagai kalori, sehari-hari gula dimanfaatkan sebagai pemanis. Meskipun sumber pemanis lain cukup banyak, namun budaya masyarakat Indonesia lebih menyukai gula yang dihasilkan tebu yang dianggap sebagai bahan makanan alami. Pada tahun 2002, penggunaan gula sebagai pemanis meningkat 10 – 15% dibanding tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2002).

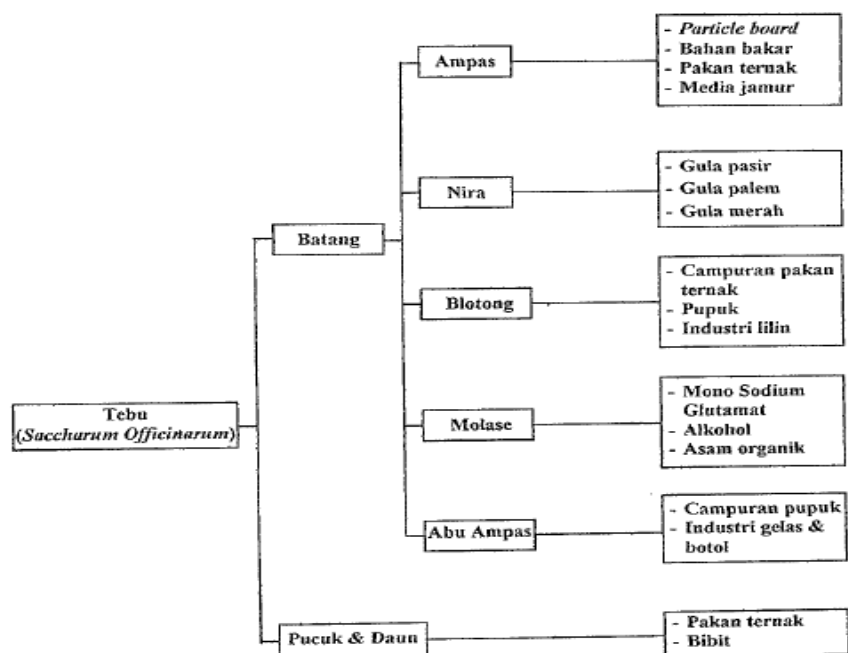


Sumber: KPPU, 2010

Gambar 1
Perkembangan Produksi Gula Hablur di Indonesia, 1969 – 2009

Dinamika produksi gula dapat dilihat pada Gambar 1.1. Perkembangan produksi gula hablur di Indonesia pada tahun 1969 – 2009 cenderung meningkat walaupun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 1998 dan 1999. Hal tersebut dikarenakan semakin menurunnya luas areal dan tak kunjung meningkatnya produktivitas tebu. Namun setelah periode tersebut produksi tebu sedikit demi sedikit mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan luas areal dan produktivitasnya. Pada tahun 2002 dari total produksi gula sebesar 1,76 juta ton sebesar 62% dihasilkan di Jawa, sedangkan sisanya 38% dihasilkan di Luar Jawa. Di antara produsen gula di Jawa, Jawa Timur menghasilkan 76% dari total produksi gula di Jawa, sedangkan propinsi Lampung memproduksi hampir 80% dari total produksi di Luar Jawa. Produktivitas yang tinggi kemungkinan disebabkan peralatan pabrik gula di Propinsi Lampung relatif baru jika dibanding dengan pabrik gula di Jawa yang sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Penyebab lain adalah tersedianya tanah yang relatif luas di Luar Jawa menurunkan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas tanaman pangan seperti yang terjadi di Jawa, dimana petani lebih memilih untuk menanam padi dibandingkan dengan menanam tebu.

Pada umumnya Pabrik Gula (PG) di Indonesia mengolah tebu untuk menghasilkan gula pasir sebagai produk tunggal (*single product industry*). Padahal tebu juga dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai produk turunan (produk *derivate*) seperti pupuk, makanan ternak, jus, molasses dan bagasse. Di banyak negara, produsen gula telah melakukan diversifikasi produk gula guna menyaingi penurunan harga gula, menekan ongkos produksi, memperluas pasar, serta mengurangi resiko kerugian PG (Mardianto, dkk, 2005).



Gambar 2
Diversifikasi Produk dari Tanaman Tebu

Walaupun saat ini sudah ada perkembangan di industri gula namun penambahan yang terjadi belum signifikan. Keberhasilan peningkatan nilai perolehan tebu tidak hanya memperkokoh daya saing perusahaan, tetapi juga akan menggairahkan petani tebu. Berdasarkan data perindustrian dan pengamatan yang dilakukan tahun 2000, nilai Produk Derivat Tebu (PDT) yang dikembangkan industri gula hanya sekitar 3,4% saja dari total nilai PDT di Indonesia (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005).

Selama ini tanaman tebu lebih difokuskan untuk diproses menjadi produk gula dalam skala besar di pabrik-pabrik gula. Kemudian disadari bahwa tanaman tebu memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan banyak hal dari mulai bahan makanan hingga pakan ternak. Dengan memanfaatkan tanaman tebu untuk diversifikasi produk selain gula (Gambar 2), maka produktivitas perusahaan dalam pengolahan tebu akan meningkat, secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan produktivitas perusahaan secara umum dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Solomon dan Singh dalam Prihandana (2005) menyatakan bahwa ada 64 bagian yang dapat dimanfaatkan dari batang tebu. Namun, hampir tidak ada pabrik gula di Indonesia yang memanfaatkan seluruh hasil tebu tersebut secara optimal. Di Indonesia hanya 13 bagian tebu yang bisa diolah di pabrik gula. Tetes tebu yang diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula dan masih mengandung gula 50 – 60%, asam amino, serta mineral, bisa dibuat sebagai etanol dan bumbu masak MSG. Pucuk daun tebu juga sebatas dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Blotong yang merupakan hasil sampingan proses penjernihan

ternyata baru dibuat sebagai pupuk, dan bahan baku cat. Bahan organik ini bisa juga dipakai untuk campuran bahan baku semen dan *masonry cement*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dari riset ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan PDT tidak memberikan nilai tambah seperti yang diharapkan, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan apa yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah PDT pada PG dan petani tebu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, yaitu bermaksud menjelaskan tentang suatu fenomena melalui berbagai aspeknya dengan tujuan ditemukannya kesimpulan umum yang menunjukkan deskripsi yang jelas terkait fenomena yang hendak diteliti.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil observasi dan wawancara. Pengumpulan data dari wawancara merupakan hasil penggalian pendapat atau informasi dari pelaku, aparat pemerintah, pakar, PG, serta orang/masyarakat yang *expert* dalam bidang "pertebuan/bergulaan" di Jawa Timur dan dianggap faham serta terkena dampak langsung maupun tidak terkait dengan bergulaan/pertebuan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti buku referensi, internet, dan buku atau informasi dari instansi terkait. Wawancara dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel dalam studi AHP, sehingga responden yang terpilih merupakan *key person*. *Purposive Sampling* dengan pengambilan sampel secara kuota (*Quota Samples*) adalah teknik pengambilan sampel yang bertujuan memperoleh sejumlah unsur-unsur tertentu yang memiliki beberapa karakteristik dalam sampelnya (Walizer, M. H dan Wienir, P. L. 1991: 140-141). Sementara data sekunder diambil dari sumber: 1) Badan Perencanaan Kabupaten; 2) Dinas Pendapatan Daerah; 3) P3GI; 4) PTPN IX dan PTPN X.

Luaran penelitian yang diharapkan adalah kebijakan yang mendukung peningkatan nilai tambah PDT. Untuk memperoleh sebuah kebijakan yang bagus, proses penyusunannya harus melibatkan banyak *stakeholder* yang berkaitan dengan pertebuan, sehingga semua aspirasi dari stakeholder dapat tercover. Metode analisis yang digunakan untuk membuat sebuah kebijakan digunakan disebut Analitik Hirarki Proses (*Analytical Hierarchy Process/AHP*), yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Saaty, 1991:03). AHP merupakan model pemilihan prioritas dalam penentuan kebijakan yang unik karena keunggulannya yang mampu memetakan alternatif dengan hirarki yang tidak terbatas. Ciri khas dari model AHP proses analitis berjenjang ini adalah penentuan skala prioritas atas alternatif pilihan berdasarkan suatu proses analitis berjenjang, terukur, atas variabel keputusan.

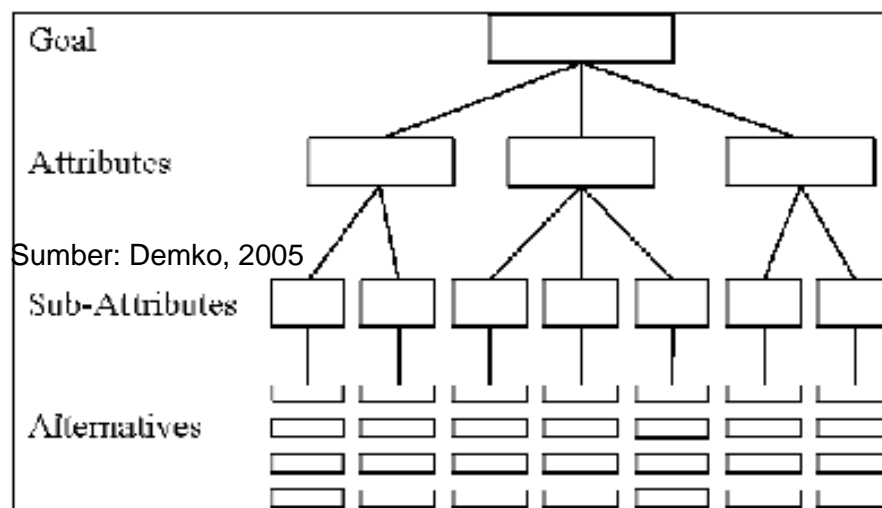
AHP memiliki beberapa aksioma yang mendasari penyusunan skala preferensi serta konsep dasar dalam penyusunan hierarki.

1. Resiprokal: jika A adalah sebesar x lebih penting dari B, maka B adalah sebesar $1/x$ lebih penting daripada A
2. Homogeniti: hanya variabel setara yang dapat diperbandingkan. Kesetaraan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan perbandingan,

kesalahan penilaian akan semakin besar ketika masing-masing variabel yang diperbandingkan memiliki perbedaan cukup besar.

3. Independensi: masing-masing variabel adalah bersifat bebas/tidak terikat pada variabel yang berada pada level di bawahnya.
4. Ekspektasi: struktur hirarki harus lengkap dan menunjukkan semua kriteria dan alternatif yang menjadi subjek kajian dalam penelitian.

Dalam studi AHP digunakan suatu hirarki untuk memudahkan dalam analisis dan pemetaan permasalahan. Penyusunan hirarki AHP dimulai dengan mendefinisikan fokus/tujuan dari permasalahan. Kemudian mengidentifikasi alternatif secara berhirarki. Selanjutnya, melakukan pilihan prioritas tingkat kepentingan yang mempengaruhi fokus/tujuan. Terakhir, alternatif terbaik akan diperoleh dari sejumlah alternatif yang telah dipetakan dalam model (Gambar 3).



Gambar 3
Contoh Penyusunan Hirarki dalam Studi AHP

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Unsur terpenting dalam proses hirarki analitik adalah perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Ada prinsip-prinsip yang harus dipahami:

1. *Decomposition*, setelah mendefinisikan permasalahan, maka dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur, sampai yang sekecil-kecilnya.
2. *Comparative judgement*, berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison*.
3. *Synthesis of priority*, dari setiap matrik *pairwise comparison vector eigen* (ciri)-nya untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis di antara prioritas lokal.

4. *Logical consistency*, konsistensi mempunyai dua makna. *Pertama* adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. *Kedua*, adalah tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari bobot 1 – 9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting”, sedangkan bobot 9 menggambarkan atribut yang “penting absolut” dibanding dengan yang lainnya.

Beberapa keuntungan menggunakan AHP adalah (Saaty, 1991:25):

1. Kesatuan: AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
2. Kompleksitas: AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3. Saling ketergantungan: AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear.
4. Penyusunan hirarki: AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat
5. Pengukuran: AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
6. Konsistensi: AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7. Sintesis: AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
8. Tawar menawar: AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
9. Penilaian dan konsensus: AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Adapun tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan, dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Penyusunan struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Teknik perbandingan berpasangan didasarkan “*judgement*” para responden yang dianggap sebagai “*key person*”.
4. Matriks pendapat individu, formulasinya disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Contoh Matriks Perbandingan

		C ₁	C ₂	C ₃
A= (a _{ij})	C ₁	1	a ₁₂	a _{1n}
	C ₂	1/a ₁₂	1	a _{2n}

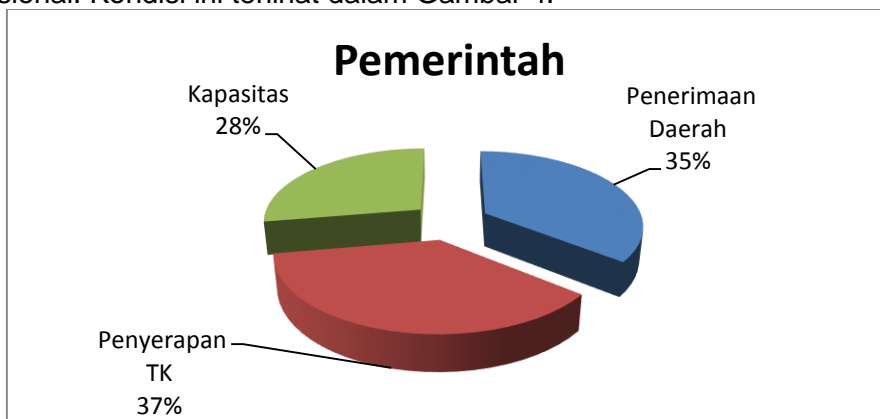
.....
C_3	$1/a_{1n}$	$1/a_{2n}$	1

Dalam hal ini C_1, C_2, \dots, C_n adalah set elemen pada satu tingkat dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks $n \times n$. nilai a_{ij} merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan C_i terhadap C_j .

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat.
6. Pengolahan horizontal, yaitu 1) perkalian baris; 2) perhitungan vektor ciri (*eigen vector*); 3) perhitungan akar ciri (*eigen value*) maksimum, dan 4) perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden
7. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.
8. Revisi pendapat, dilakukan apabila rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ($> 0,1$), beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil riset di lapangan, berikut beberapa point penting dari pemecahan masalah. Gabungan pendapat dari sisi pemerintah mengenai produk turunan tebu, yaitu pengolahan produk turunan tebu harus dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (nilai bobot 37%) adalah aspek yang paling penting untuk diperhatikan. Artinya pabrik olahan derivatif tebu hendaknya mampu membuka lapangan kerja baru disamping berperan sebagai sarana penunjang operasional. Kondisi ini terlihat dalam Gambar 4.

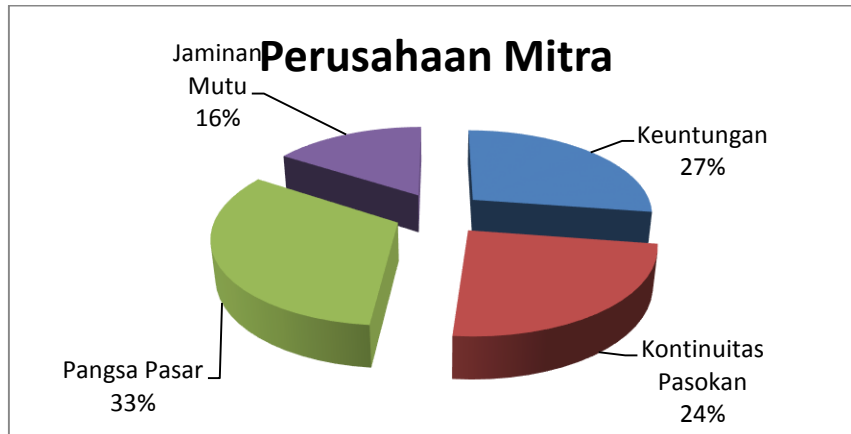


Sumber: Data Mentah Diolah

Gambar 4
Hasil Analisis AHP Aspek Sarana Prasana

Gambar 4. menunjukkan bahwa aspek penerimaan daerah merupakan aspek kedua yang perlu mendapat perhatian (bobot 35%), sedangkan aspek yang ketiga adalah kapasitas produksi (bobot 28%). Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa produk turunan tebu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan atau penerimaan daerah. Responden mempunyai

harapan bahwa dibutuhkan suatu peningkatan kapasitas produksi atau meningkatkan output yang dihasilkan, sehingga pendapatan pabrik dari hasil olahan turunan tebu meningkat yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi petani.



Sumber: Data Mentah Diolah

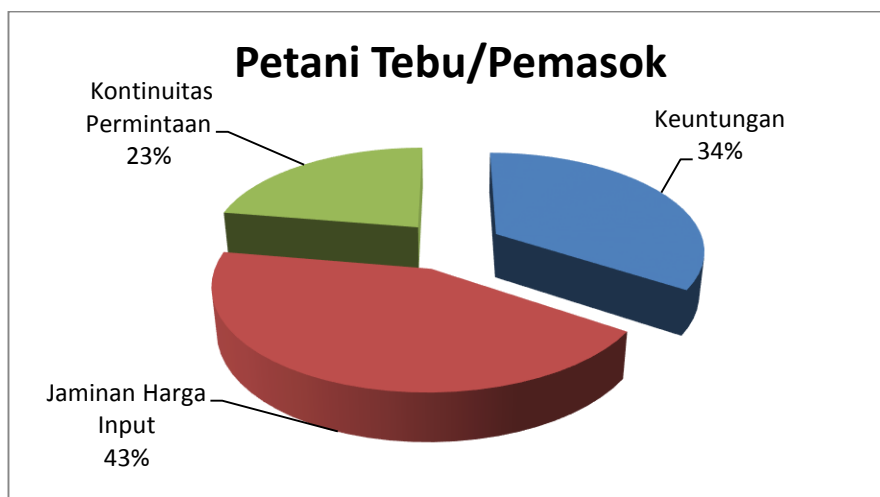
Gambar 5
Hasil Analisis AHP Aspek Teknologi dan Inovasi

Pada Gambar 5 menunjukkan hasil analisis tentang pendapat dari perusahaan mitra yang terdiri atas empat kriteria yaitu jaminan mutu, keuntungan, pangsa pasar, dan kontinuitas pasokan. Dari empat kriteria tersebut, kriteria yang dipandang paling utama oleh responden adalah pangsa pasar (nilai bobot 33%). Kriteria selanjutnya, berturut-turut dari bobot yang paling tinggi ke bobot yang paling rendah adalah, keuntungan (nilai bobot 27%), kontinuitas pasokan (24%), dan jaminan mutu (nilai bobot 16%).

Secara implisit masalah dalam menentukan perusahaan mitra yang akan melakukan produksi dalam produk turunan tebu adalah pangsa pasar. Apakah perusahaan dapat menghasilkan suatu produk yang dikehendaki pasar. Artinya jika produk yang dihasilkan memiliki pangsa pasar yang jelas, maka akan meningkatkan keuntungan bagi para pengusaha mitra, tetapi jika tidak maka yang terjadi sebaliknya, yaitu akan merugikan perusahaan mitra.

Kriteria yang kedua adalah keuntungan, artinya keuntungan adalah salah satu prioritas bagi perusahaan mitra untuk ikut berinvestasi dalam menghasilkan produk turunan tebu. Kriteria selanjutnya adalah kontinuitas pasokan, stabilitas kontinuitas pasokan adalah salah satu syarat untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dan terakhir adalah jaminan mutu, dari produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjaga stabilitas produk yang dihasilkan oleh produsen dalam hal ini produk turunan tebu.

Aspek yang ketiga adalah petani tebu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan petani tebu untuk ikut andil dalam menghasilkan produk turunan tebu adalah keuntungan, jaminan harga input, dan kontinuitas permintaan. Nilai bobot setiap kriteria dapat dilihat dalam Gambar 6, dimana kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah jaminan harga input (nilai bobot 43%). Selanjutnya adalah kriteria keuntungan (bobot 34%) dan kontinuitas permintaan (nilai bobot 23%).



Sumber: Data Mentah Diolah

Gambar 6
Hasil Analisis AHP Aspek Sumber Daya

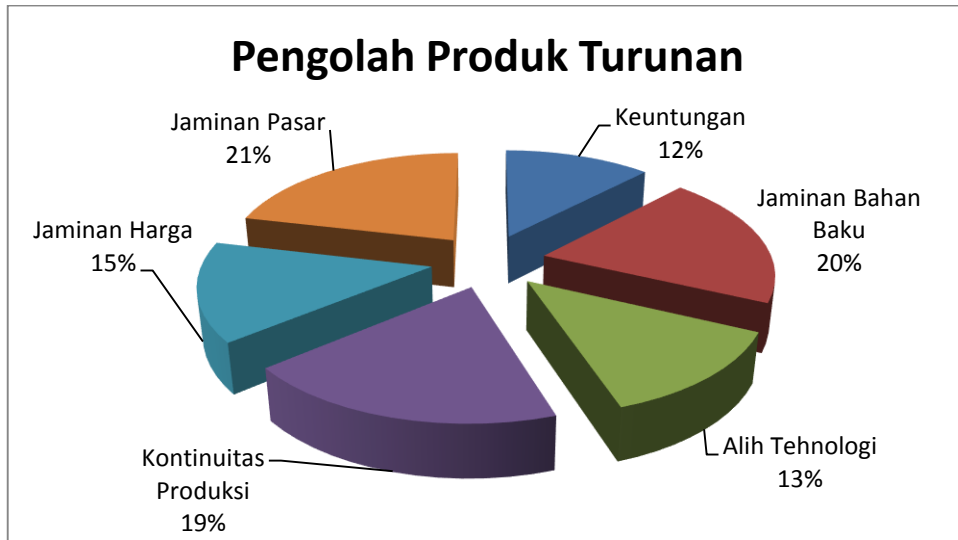
Berdasarkan hasil analisis, secara implisit responden menginginkan bahwa ada jaminan harga input dalam hal ini harga tebu bagi para petani. Dengan adanya jaminan harga input dalam hal ini adalah harga tebu yang menguntungkan bagi para petani maupun bagi produsen, maka diharapkan dapat meningkatkan hasil dari produk turunan tebu.

Kriteria yang menempati urutan kedua adalah keuntungan. Jika dalam menanam tebu yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan produksi produk turunan tebu memberikikan keuntungan bagi petani, maka petani akan tergerak untuk memperluas lahan yang digunakan untuk menanam tebu

Kriteria yang menempati rangking terakhir adalah kontinuitas permintaan. Kontinuitas permintaan terhadap tebu, menunjukkan adanya stabilitas permintaan produk tersebut, sehingga petani akan terdorong untuk menjaga ketersediaan tebu bagi produksi produk turunan tebu.

Aspek selanjutnya adalah pengolah produk derivatif yang terdiri dari enam kriteria yaitu keuntungan, jaminan bahan baku, alih teknologi, kontinuitas produksi, jaminan harga, dan jaminan pasar. Berdasarkan hasil analisis berturut-turut dari peringkat terbesar sampai dengan terkecil adalah sebagai berikut: kriteria yang menduduki peringkat pertama adalah jaminan pasar (nilai bobot 21%), peringkat kedua jaminan bahan baku (nilai bobot 20%), kontinuitas produksi (nilai bobot 19%), jaminan harga (nilai bobot 15%), alih teknologi (nilai bobot 13%) dan peringkat terakhir adalah keuntungan (nilai bobot 12%).

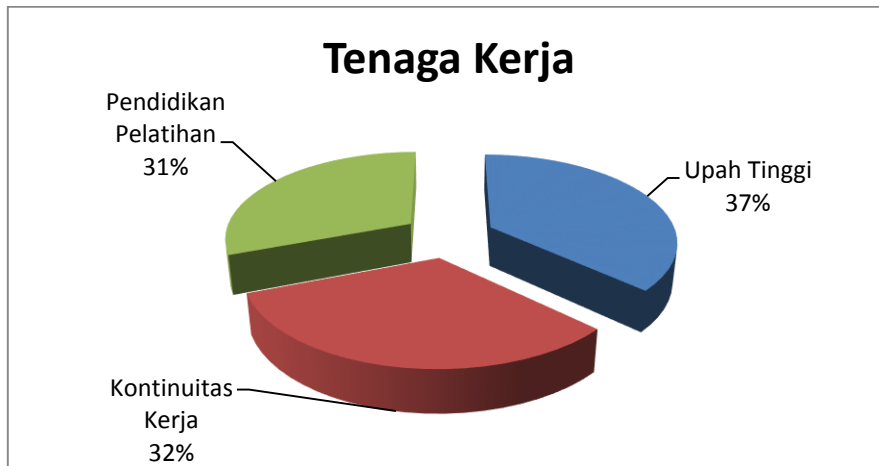
Berdasarkan hasil dari pendapat responden menunjukkan bahwa jaminan pasar menentukan bagi keputusan seorang produsen dalam memproduksi produk turunan tebu (Gambar 7). Adanya pasar yang jelas bagi produk turunan tebu yang dihasilkan maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain jaminan pasar, ketersediaan bahan baku juga menentukan keputusan penanaman modal bagi seorang investor. Ketersediaan bahan baku merupakan salah satu indikator dari keberlangsungan proses produksi.



Sumber: Data Mentah Diolah

Gambar 7
Hasil Analisis AHP Aspek Permodalan

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi produksi PDT adalah aspek tenaga kerja. Dalam aspek ini terdapat tiga kriteria yaitu pendidikan pelatihan, upah tinggi, dan kontinuitas kerja. Hasil analisis (Gambar 8) menunjukkan bahwa upah yang tinggi akan menarik minat tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan produk turunan tebu (bobot 37%). Hal ini sesuai dengan teori penawaran tenaga kerja, semakin tinggi upah yang diberikan maka penawaran tenaga kerja semakin meningkat.



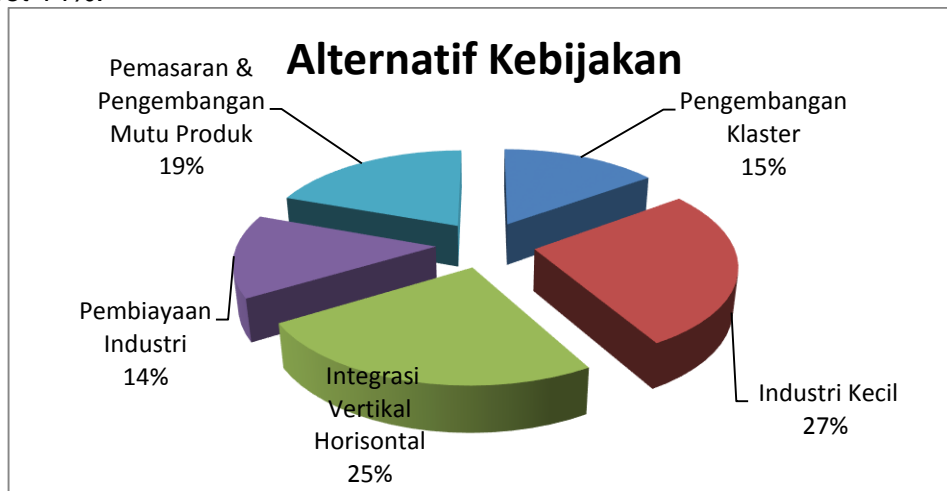
Sumber: Data Mentah Diolah

Gambar 8
Hasil Analisis AHP Aspek Pemasaran

Berdasarkan gabungan dari pendapat seluruh responden maka alternatif kebijakan yang paling utama adalah industri kecil (bobot 27%) bahwa pembentukan industri kecil dan dikelola oleh kelompok usaha bersama akan

membantu meningkatkan nilai tambah PDT (Gambar 9). Kriteria selanjutnya yang menempati rangking kedua adalah penguatan integrasi vertikal dan horizontal (bobot nilai 25%), artinya integrasi antara usaha produk turunan tebu harus terjaga agar rantai pasokan dapat terus terjaga.

Kriteria yang menempati rangking ketiga adalah pengembangan dan pemasaran mutu produk (bobot 19%). Dengan strategi pengembangan dan pemasaran produk turunan yang sesuai dan tepat sasaran akan mendorong peningkatan nilai tambah PDT. Pengembangan *cluster* menempati urutan keempat dengan bobot 15% dan terakhir strategi pembiayaan industri dengan bobot 14%.



Sumber: Data Mentah Diolah

Gambar 9
Hasil Analisis AHP Alternatif Kebijakan

PENUTUP

Berdasarkan hasil riset, berikut ini adalah beberapa kesimpulannya:

1. Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana: proses pengolahan PDT harus dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (nilai bobot 37%), artinya pabrik PDT hendaknya mampu membuka lapangan kerja baru disamping berperan sebagai sarana penunjang operasional.
2. Aspek teknologi dan inovasi: pangsa pasar memegang peranan penting (33%). Secara implisit masalah dalam menentukan perusahaan mitra yang akan melakukan produksi dalam PDT adalah pangsa pasar. Apakah perusahaan dapat menghasilkan suatu produk yang dikehendaki pasar. Artinya jika produk yang dihasilkan memiliki pangsa pasar yang jelas maka akan meningkatkan keuntungan bagi para pengusaha mitra, begitu sebaliknya
3. Aspek sumberdaya (petani/pemasok): mereka lebih menghendaki adanya jaminan harga input (43%), dalam hal ini harga tebu.
4. Aspek permodalan: apabila ada pasar yang jelas, maka hal ini dapat dijadikan jaminan bagi investor untuk menanamkan modal (21%).
5. Aspek tenaga kerja: upah yang tinggi akan menarik minat tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan PDT (bobot 37%).
6. Aspek pemasaran: pembentukan industri kecil dan dikelola oleh kelompok usaha bersama akan membantu meningkatkan nilai tambah PDT.

DAFTAR PUSTAKA

- Capricorn Indonesia Consult Inc. (1998). *Prospek Industri Gula Tebu di Indonesia*. Jakarta: Indomercial. Laporan Bulanan 11 November 1998.
- Demko, D. (2006). *Tools for Multi-objective and multi-disciplinary Optimization in Naval Ship Design, Thesis Master of Science*. Blacksburg-Virginia: Virginia Polytechnic Institute. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd/unrestricted/Demko_Thesis_Final.pdf [26 Oktober 2006]
- Kementrian Pertanian. (2010), *Outlook Komoditas Pertanian dan Perkebunan*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian, <http://www.deptan.go.id/pusdatin/>.
- KPPU. (2010). *Position Paper KPPU terhadap Kebijakan dalam Industri Gula*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Litbang Deptan. (2005). *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Tebu*, www. Litbang, diunduh 10 Maret 2013
- Media Perkebunan. (2013). *Swasembada Gula Mustahil Diraih 2 Tahun Ini*. www. Media Swasembada Gula Mustahil diraih 2 tahun ini. Diunduh 16 Desember 2013
- Pambudy, R. (2003). Pengantar editor, *Ekonomi Gula: Kajian Komparasi dari Perspektif Indonesia*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, halaman viii-xx
- Saaty, L. T. (1991). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Terjemah. Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo

EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT (LKMM) KABUPATEN JEMBER

Lilis Yuliati dan Teguh Hadi P.

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

e-mail: lilis_yuliati@yahoo.co.id dan teguh_hadipriyo@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia mengalami segmentasi di antara sektor keuangan formal dan informal, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan sektor keuangan formal (perbankan) dalam memberikan fasilitas jasa keuangan bagi masyarakat lapisan bawah (miskin). Bank Gakin adalah sebutan untuk LKMM di Kabupaten Jember yang secara konseptual merupakan perpaduan antara konsep Grameen Bank oleh Muhammad Yunus dengan konsep koperasi oleh Bung Hatta. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi LKMM di Kabupaten Jember; 2) merumuskan langkah-langkah/strategi yang akan dicapai agar kinerja LKMM semakin meningkat; serta 3) memberikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja keuangan dan non keuangan LKMM.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya mencoba memahami dan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik-karakteristik yang melekat pada LKMM ditinjau dari kinerja keuangan dan non keuangan. Dengan mengetahui karakteristik yang ada, maka akan dapat diidentifikasi LKMM-nya dari sudut pandang internal dan eksternal, sehingga dapat dimunculkan strategi untuk mengatasi problema yang dihadapi agar upaya peningkatan kinerja LKMM di masa yang akan datang akan relatif lebih mudah dilakukan, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan daya saingnya agar tidak kalah dengan lembaga keuangan yang lain (SWOT Analysis).

Hasil penelitiannya adalah 1) permasalahan klise yang terjadi hampir di semua LKMM adalah, kurangnya modal yang dikucurkan oleh pemerintah daerah, padahal calon anggota banyak yang mengantre untuk menjadi anggota dengan cara meminjam. Hal ini terjadi karena dana yang ada posisinya masih berputar di anggota lama, sehingga anggota baru harus menunggu pinjaman yang dikembalikan oleh anggota lama; 2) ada perbedaan yang signifikan antara anggota LKMM di wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan terkait dengan kewajiban mengangsur pinjaman. Di Jember Utara kesadaran anggota LKMM dalam mengangsur pinjaman relatif kurang dibandingkan dengan di wilayah Jember Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang keliru oleh banyak anggota mengenai dana yang digulirkan oleh LKMM. Mereka beranggapan bahwa dana tersebut tak ubahnya seperti BLT, sehingga dianggap cuma-cuma dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan; 3) sistem rekrutmen pengurus LKMM saat pendirian tidak melalui proses seleksi secara langsung, akan tetapi dengan sistem grounded, yaitu fasilitator menunjuk langsung pengurus didasarkan atas informasi dari perangkat desa yang lebih paham terhadap karakteristik calon pengurus.

Kata Kunci: Bank Gakin, LKMM, kinerja LKMM

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor keuangan memiliki pengaruh yang luas dalam menstimulasi perekonomian sektor riil (*finance led growth*), dimana penyebaran kredit dapat terdistribusi secara merata melalui optimalisasi fungsi intermediasi

lembaga keuangan. Perkembangan sektor keuangan di Indonesia telah mengalami segmentasi di antara sektor keuangan formal dan informal, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan sektor keuangan formal (perbankan) dalam memberikan fasilitas jasa keuangan bagi masyarakat lapisan bawah (miskin). Terdapat berbagai alasan sosial dan ekonomis yang mendasari sektor formal kesulitan untuk mengakses sektor informal, seperti: tingginya risiko kredit dan ketidaktersediaan jaminan (*Collateral*) yang cukup untuk melapisi kredit. Selain itu tingginya biaya transaksi (*Transaction cost*) serta hambatan sosial dan budaya seperti: tingkat pendidikan yang rendah (ketidakmampuan melakukan *financial record* terhadap aktivitas ekonomi mereka) menyebabkan sektor formal semakin enggan untuk melakukan penetrasi di sektor informal. Namun keadaan inilah yang memicu berkembangnya sektor-sektor keuangan informal, yang populer dengan istilah *microfinance*, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan bagi masyarakat lapisan bawah.

Grameen bank, sebagai salah satu contoh konsep *microfinance* konvensional yang berhasil dalam mengembangkan *social capital* sebagai pengganti agunan (*Collateral*) dan dianggap telah mampu memecahkan permasalahan biaya transaksi (*transaction cost*) akibat tingginya *asymmetry information* (informasi asimetris) di sektor informal. Hal ini disebabkan karena penentuan biaya modal dilakukan lebih dahulu (*predetermined interest rate*) dengan hanya mempertimbangkan biaya modal/*cost of fund (internal side)*, dan kurang memperhatikan kemampuan finansial dari prospek usaha klien (*external side*), sehingga hal tersebut mengurangi insentif pihak yang meminjamkan (*lender*) untuk melibatkan diri secara langsung dalam pengembangan usaha klien karena pengembalian *return* riba yang sifatnya tetap.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan tahun 2012 sebagai tahun gerakan koperasi sedunia. Pencanangan ini sejalan dengan *buzzword* yang kini berkembang bahwa koperasi sebagai representasi ekonomi kerakyatan dianggap memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan mampu bersentuhan langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil. Secara objektif, koperasi perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu *engine* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (*social welfare*) sekaligus alat ampuh untuk lebih pemeratakan kue pembangunan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*).

Menurut rekapitulasi database koperasi nasional Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi sampai Maret 2010 sebanyak 175.102 unit, dengan anggota berjumlah 29,124 juta dan volume usaha sebesar Rp 77,514 triliun. Sayangnya, jumlah yang cukup signifikan ini belum memberi kontribusi yang optimal sebagaimana peran koperasi di sejumlah negara maju. Apalagi, sebanyak 51 ribu koperasi di antaranya tidak aktif. Fakta inilah yang kemudian mendorong pemerintah mencanangkan 2012 – 2017 sebagai periode revitalisasi koperasi.

Dalam upaya mendorong revitalisasi koperasi, sejak 2005, Dinas Koperasi Kabupaten Jember berinisiatif membuat konsep baru sebagai embrio koperasi masa depan melalui Program Bank Gakin atau Bank Keluarga Miskin. Bank Gakin merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) yang bertujuan untuk membumikan kembali semangat koperasi pada masyarakat, untuk kemudian mengukuhkannya secara institusi menjadi koperasi. Bank Gakin adalah sebutan yang diberikan oleh warga miskin yang menjadi anggotanya. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh beberapa pengurus dan anggota LKMM sebagai antitesis terhadap bank formal yang selama ini tidak mau peduli dengan ekonomi keluarga miskin.

Secara konseptual, Bank Gakin Jember merupakan perpaduan antara konsep *Grameen Bank* oleh M. Yunus, dengan konsep koperasi oleh Bung Hatta. Program yang berjalan sejak akhir 2005 ini berhasil meraih *MDGs Award* 2009 dan menjadi *role model* untuk daerah lain di tanah air. Target utama Bank Gakin adalah perempuan miskin dan produktif. Pada awalnya program ini akan diimplementasikan pada tingkat desa. Namun karena wilayah desa dianggap masih terlalu luas, wilayah kerja keuangan mikro masyarakat dipersempit di tingkat dusun. Semakin sempit wilayah kerja diprediksi akan semakin efektif.

Sekitar 90% pengurus Bank Gakin adalah perempuan dengan 46% di antaranya lulusan SD dan 5% tidak melewati pendidikan sekolah formal. Meski demikian, perkembangan Bank Gakin sangat menakjubkan. Hal ini tidak lepas dari usaha Dinas Koperasi yang telah melakukan sosialisasi dan program pelatihan terlebih dahulu terhadap masyarakat sebelum program ini diluncurkan. Di samping itu Dinas Koperasi juga melakukan pendampingan terhadap calon pengurus Bank Gakin. Upaya-upaya inilah yang menyebabkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dibentuk LKMM semakin meningkat sehingga menyebabkan perputaran modal dan jumlah anggotanya terus bertambah hingga mencapai 22.000 warga miskin pada akhir 2010. Terobosan ini dinilai sangat membantu kelompok usaha kecil dan menengah. Karenanya, minat masyarakat terhadap Bank Gakin kian hari semakin meningkat karena dinilai cukup efektif menghindarkan mereka dari praktik rentenir atau "bank thithil". Omzet Bank Gakin pada akhir 2011 ± Rp 17 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 260% setiap tahunnya. Hingga akhir 2011, sejumlah LKMM telah sukses bermetamorfosis menjadi 28 koperasi.

Hingga saat ini, LKMM yang sudah terbentuk mencapai 360 unit di 360 dusun. Dengan tambahan 160 unit LKMM baru itu, maka di Jember akan terbentuk 520 LKMM di 520 dusun. Hal ini berarti sudah tercapai 52% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu 1.000 LKMM di 1.000 dusun. Adapun mekanisme pemberian bantuan kepada LKMM baru ini adalah diberi bantuan modal sebesar Rp 25 juta. Dana itu diambilkan dari dana APBD Kabupaten Jember. Dana Rp 25 juta itu akan digunakan untuk kegiatan simpan pinjam di LKMM.

Keberlangsungan dan kemajuan institusi *microfinance* tidak terlepas dari pengorganisasian yang profesional, dan pengimplementasian strategi yang komprehensif dalam memposisikan Bank Gakin sebagai salah satu institusi intermediasi keuangan mikro yang praktis dan diminati oleh masyarakat. Hal ini merupakan stimulasi dalam pengembangan Bank Gakin ke depan agar konsisten dalam merealisasikan pembiayaan dan pendanaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah, sehingga eksistensi Bank Gakin tersebut, dapat melahirkan *image* positif masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengembangkan Bank Gakin sekaligus memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas. Proses inilah yang mendasari optimisme Pemerintah Daerah Jember untuk mengembangkan konsep Bank Gakin sebagai agen pembangunan, sekaligus sebagai institusi profit yang aktif dalam pendanaan bagi usaha kecil.

Tujuan dari studi ini antara lain untuk: 1) mengidentifikasi masalah yang dihadapi LKMM di Kabupaten Jember, 2) merumuskan langkah-langkah/strategi yang akan dicapai agar kinerja LKMM di Kabupaten Jember semakin meningkat; serta 3) memberikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja keuangan dan non keuangan LKMM di Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya mencoba memahami dan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik-karakteristik yang melekat pada LKMM ditinjau dari kinerja keuangan dan non keuangan. Dengan mengetahui karakteristik yang ada, maka akan dapat disusun identitas LKMM dari sudut pandang internal dan eksternal serta dari sisi positif dan negatifnya, sehingga dapat dimunculkan strategi yang mengkombinasi kondisi yang ada untuk mengatasi problema yang dihadapi, agar upaya peningkatan kualitas kinerja LKMM di masa yang mendatang relatif lebih mudah dilakukan, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan daya saingnya agar tidak kalah dengan lembaga keuangan lain.

Unit analisis dalam kajian ini adalah LKMM dengan semua aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kinerja keuangan maupun non keuangannya. Data yang digunakan adalah mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2010 hingga 2011 dengan alasan data tersebut adalah data yang tersedia dari sumber penyedia data.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah disediakan oleh lembaga penyedia data (Marzuki, 2000: 55). Data yang dibutuhkan berupa data kualitatif maupun kuantitatif, diperoleh dari Dinas Koperasi, Jember dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), *website*, perpustakaan, majalah, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer diusahakan oleh peneliti, digunakan sebagai bentuk konfirmasi dari data sekunder yang ada apabila dirasa belum memadai.

Hasil analisis dari data yang diperoleh akan dibahas dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: 1) pendekatan kelembagaan, dilakukan karena objek yang diteliti merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas dasar aturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 2) pendekatan perbandingan, dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi LKMM dengan cara membandingkan LKMM satu dengan lainnya, mengingat ada perbedaan capaian dari LKMM itu sendiri; 3) pendekatan sebab akibat, dilakukan untuk mengetahui terjadinya beberapa permasalahan di LKMM yang merupakan akibat dari sebab tertentu; 4) pencarian alternatif tindakan, dilakukan untuk mencari kemungkinan perbaikan kinerja keuangan dan non keuangan dari LKMM sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, digunakan Analisis SWOT (*Strength; Weakness; Opportunity; Threat*).

HASIL ANALISIS

a. Gambaran Umum

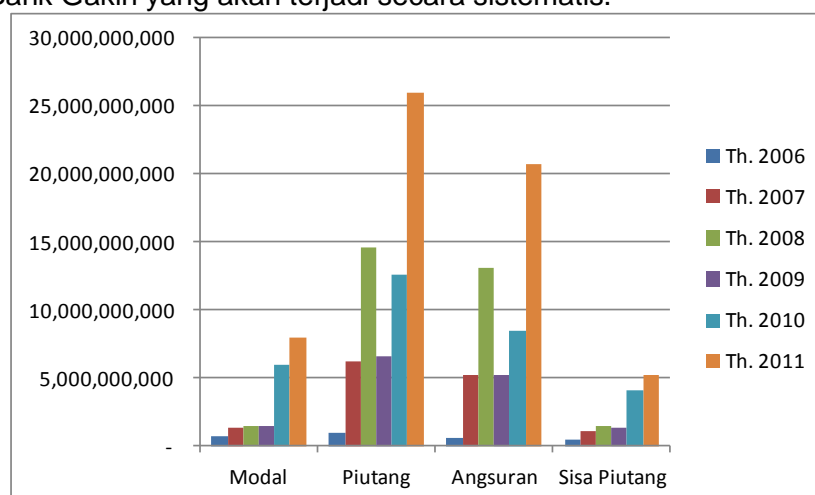
Dinas Koperasi UMKM selaku SKPD penanggung jawab kegiatan PUM-RTM mengerahkan SDM internal sebanyak 14 orang setiap tahun yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang pejabat eselon III, 1 orang pejabat eselon IV, 3 orang staf administrasi serta 8 orang staf lapangan yang berperan sebagai pendamping (*technical assistances*). Adapun SDM eksternal yang dikerahkan meliputi 186 orang yang terdiri dari para tokoh relawan pengurus Bank Gakin yang melayani 4.436 orang anggota Bank Gakin (data Mei 2008) yang tersebar di 31 dusun, 20 desa/kelurahan dan 14 kecamatan. Bank Gakin dikelola oleh 6 orang pengurus dengan tugas yang berbeda-beda di antaranya koordinator, juru buku, kasir, analis pinjaman, juru tagih dan pengawas.

Pada awal inovasi Tahun Anggaran 2005 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember sebesar Rp. 100 juta. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pembentukan 2 unit Bank Gakin pada 2 wilayah lingkungan, penguatan kelompok 12 Pokmas (60 orang) dan penyediaan modal usaha dalam

bentuk hibah sebesar Rp. 50 juta yang dikelola dengan pola simpan pinjam tanggung renteng. Pada Tahun Anggaran 2006 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 1,1 M yang dipergunakan untuk membentuk 11 unit Bank Gakin baru pada 11 dusun, penguatan kelompok 176 pokmas (880 orang) dan penyediaan modal usaha dalam bentuk hibah sebesar Rp. 590 juta. Pada Tahun Anggaran 2007 kegiatan PUM-RTM dibiayai APBD sebesar Rp. 1,5 M yang dipergunakan untuk membentuk 18 unit Bank Gakin baru pada 18 dusun, penguatan kelompok 180 pokmas (900 orang) dan penyediaan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak sebesar Rp. 685 juta. Pada Tahun Anggaran 2008 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 705 juta yang dipergunakan untuk membiayai pembentukan 3 unit Bank Gakin baru pada 3 dusun, penguatan kelompok 30 pokmas (150 orang), penyediaan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak sebesar Rp 75 juta serta peningkatan keterampilan khususnya bagi anggota 13 unit Bank Gakin yang telah operasional selama 1-2 tahun.

Terdapat perbedaan dalam pola pembiayaan permodalan Bank Gakin antara tahun 2005-2006 dengan tahun 2007-2008. Pada Tahun 2005-2006 Bank Gakin memperoleh bantuan hibah, sedangkan tahun 2007-2008 Bank Gakin memperoleh bantuan dalam bentuk pinjaman lunak yang harus dikembalikan dalam waktu 2 tahun. Menurut informasi perbedaan ini disebabkan oleh aturan pengelolaan APBD dari pemerintah pusat

Total investasi Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUM-RTM termasuk pengembangan Bank Gakin selama 4 tahun anggaran mencapai Rp. 3.382.141.700,- yang peruntukannya meliputi penguatan institusi sebesar Rp. 1.510.826.350,-; penguatan modal usaha sebesar Rp. 1.360.800.000,- yang sampai saat ini beredar dalam bentuk pinjaman lunak untuk pengusaha mikro anggota Bank Gakin serta peningkatan keterampilan sebesar Rp. 510.515.350,-. Apabila dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan sebanyak 4.423 orang (data Mei 2008) maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan menggunakan design PUM-RTM sebagai pola pengembangan Bank Gakin diperlukan dana sebesar Rp. 764.672,-/orang. Nilai rasio dimaksud akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan meningkatnya jumlah anggota Bank Gakin yang akan terjadi secara sistematis.

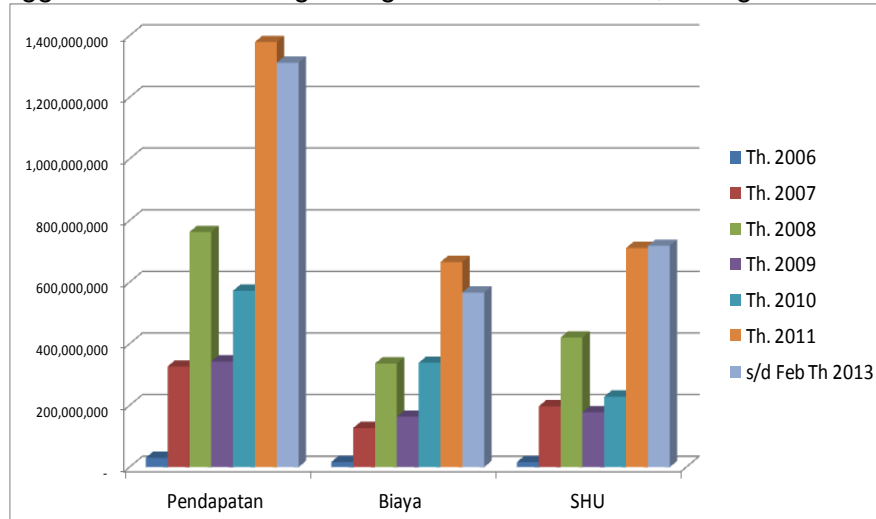


Gambar 1
Perkembangan LKMM di Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2011

Perkembangan modal, piutang, angsuran, dan sisa piutang LKMM di Kabupaten Jember tahun 2006 – 2011. Terlihat bahwa jumlah bantuan modal yang

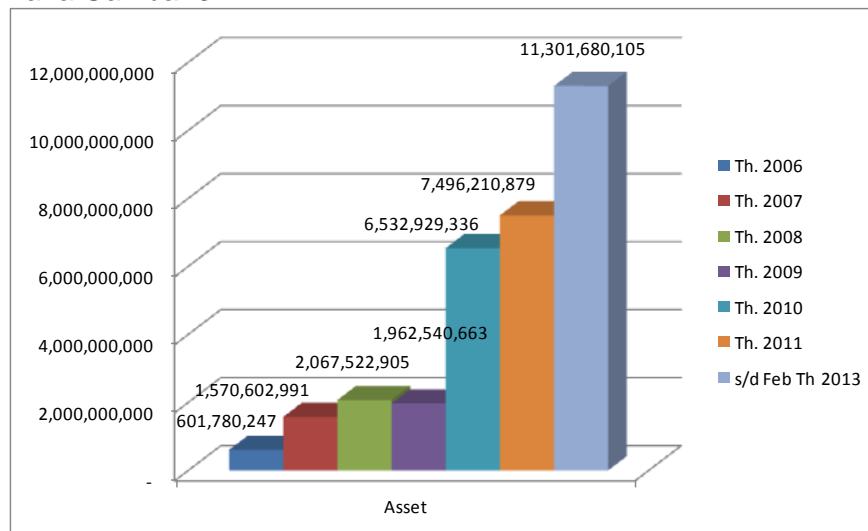
diterima oleh LKMM mulai tahun 2006 hingga 2011 selalu meningkat, terutama peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2010 sebagaimana Gambar 1.

Dalam melakukan usaha produktif, LKMM memperoleh pendapatan dari jasa dan pelayanan administrasi. Dari tahun 2006 - 2008 meningkat, turun kembali tahun 2009, hingga kemudian meningkat lagi tahun 2010 – 2011, sebagaimana Gambar 2



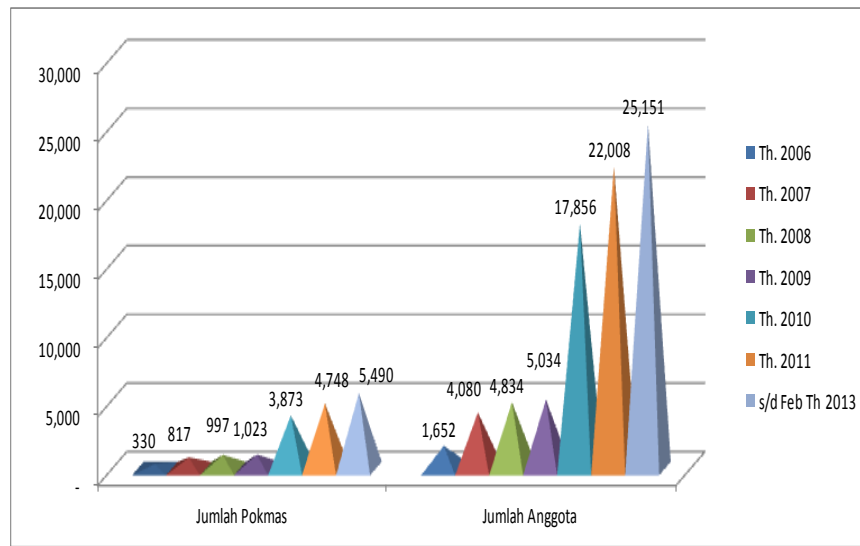
Gambar 2
Perkembangan Pendapatan, Biaya, dan SHU LKMM di Kabupaten Jember Tahun 2006 – Februari 2013

Data tentang asset Bank Gakin yang terhimpun sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3
Perkembangan Total Assets Bank Gakin Kabupaten Jember Tahun 2006 – Februari 2013

Banyaknya Pokmas dan Anggota LKMM di Kabupaten Jember tahun 2006 – Februari 2013. Tren dari pokmas selama kurun waktu tersebut selalu meningkat jumlahnya sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4

Banyaknya Kelompok Masyarakat dan Anggota di Kabupaten Jember Tahun 2006 – Februari 2013

b. Identifikasi Kondisi Internal dan Eksternal LKMM

Banyaknya LKMM yang ada di Kabupaten Jember hingga bulan Februari tahun 2013 mencapai 352 unit dengan anggota kurang lebih sebanyak 25.151 jiwa yang tersebar ke dalam 5.490 Pokmas. Hal ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibanding dengan awal dibentuknya LKMM itu sendiri, yang hanya berjumlah 13 unit dengan anggota sebanyak 1.652 jiwa serta tersebar dalam 330 Pokmas. Akan tetapi terlepas dari keberhasilan tersebut, masih ada kekurangan yang teridentifikasi sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Kuadran SWOT LKMM Di Kabupaten Jember

INTERNAL FAKTORS	EKSTERNAL FAKTORS	The SWOT Analisis
<p>STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasinya jelas dan sesuai dengan keberadaan LKMM 2. Keanggotaan bersifat sukarela 3. Baiknya citra LKMM di mata masyarakat 4. Resiko kurangnya anggota kecil 5. Biaya bunga relatif kecil dibanding dengan badan usaha lain 6. Kepengurusan dilakukan secara <i>grounded</i>. 7. Memungkinkan unit usaha yang dapat dikelola banyak 8. Komitmen pengurus untuk memajukan usaha LKMM 	<p>OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas perhatian dari pemerintah 2. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan masyarakat untuk lebih membangun LKMM. 3. Kondisi ekonomi masyarakat cukup mendukung eksistensi LKMM. 4. Industrialisasi membuka peluang diversifikasi usaha sesuai dengan struktur perekonomian Jember. 5. Adanya peluang pasar bagi produk yang dihasilkan LKMM. 	POSITIVE FACTORS
<p>WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berbadan hukum 2. kinerja LKMM masih banyak yang jauh dari harapan 3. Lemahnya struktur permodalan LKMM. 	<p>THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin ketatnya persaingan usaha 2. Terbatasnya jumlah kredit yang dialokasikan LKMM 3. Masih kurangnya kepercayaan untuk 	

4. Lemahnya pengelolaan atau manajemen usaha LKMM.	bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain	
5. Kurangnya pengetahuan bisnis dan ketrampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan	4. terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi informasi	
6. Kurang memadainya profesionalisme SDM di LKMM.	5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang LKMM	
7. Kurangnya inovasi dari pengelola LKMM.	6. Ancaman pasar bebas.	
8. Kurangnya penguasaan teknologi.	7. Kurang memadainya sarana dan prasarana	
	8. Menurunnya daya beli masyarakat.	

c. Strategi Kebijakan Peningkatan Kinerja LKMM

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan untuk mencapai berbagai sasaran di atas, disusun program peningkatan kinerja LKMM, terdiri atas program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh LKMM dan anggota. Program pokok meliputi program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus maupun anggota LKMM; program peningkatan dan perluasan usaha LKMM; program kerja sama antarLKMM dan kemitraanusaha; dan program pementapan kelembagaan LKMM. Adapun program penunjang meliputi program pembangunan LKMM di daerah tertinggal; program pengembangan informasi perLKMM-an; program penelitian dan pengembangan LKMM; program pembinaan dan pengembangan pemuda di bidang LKMM; program peranan wanita di bidang LKMM; dan program pengembangan status hukum di bidang LKMM.

Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, bertujuan meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, keterampilan dan wawasan para pengurus maupun anggota, termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya serta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang terbuka bagi pengembangan kegiatan usaha baru. Hal demikian akan mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi masyarakat luas, sehingga LKMM benar-benar mampu menjadi semangat usaha masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 1) menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, serta bimbingan dan konsultasi usaha yang memadai; 2) meningkatkan pemahaman tentang peran LKMM bagi anggota tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa LKMM, antara lain melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha; kegiatan ini didukung dengan penyempurnaan materi dan metode pelaksanaan pendidikan anggota agar lebih meningkatkan peran serta mereka; 3) meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui kelompok untuk mengoptimalkan potensi usaha perseorangan anggota; 4) meningkatkan pendidikan tentang LKMM bagi pengurus/pengelola usaha melalui penyuluhan, pelatihan manajemen, dan keterampilan usaha, praktek kerja (magang), studi banding, dan bimbingan penyusunan kelayakan usaha terapan yang memanfaatkan teknologi tepat guna; 5) meningkatkan pelatihan dan penataran perLKMM-an bagi fasilitator, kader, serta wanita, pemuda, dan kelompok strategis lainnya yang berpotensi menjadi motivator LKMM; 6) meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pembina LKMM, termasuk petugas konsultan lapangan; 7) meningkatkan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan teknis, serta penyediaan informasi teknologi dalam rangka alih teknologi; 8) meningkatkan pelayanan konsultasi manajemen bagi LKMM; 9) mengembangkan sistem balas jasa yang menarik bagi pengelola LKMM; 10)

mewujudkan proses kaderisasi yang sehat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang LKMM; 11) memasyarakatkan LKMM melalui penyuluhan tentang LKMM untuk mewujudkan LKMM menjadi gerakan nasional.

Program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan LKMM, bertujuan untuk meningkatkan pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal, dalam rangka menyehatkan struktur permodalan LKMM. Program ini ditempuh dengan cara: 1) meningkatkan fasilitas pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang dibutuhkan LKMM dan anggotanya; 2) mengembangkan lembaga keuangan LKMM, antara lain LKMM simpan pinjam, LKMM bank perkreditan rakyat, LKMM pembiayaan, dan LKMM asuransi; 3) memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota LKMM untuk meningkatkan pemupukan modal sendiri, terutama yang berasal dari simpanan anggota dan dana cadangan, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penyusunan kelayakan usaha dan pemanfaatan modal LKMM; 4) memberikan bimbingan dan kemudahan bagi LKMM yang telah berkembang dan maju untuk melakukan diversifikasi produk; dan 5) mendorong pemupukan modal penyertaan pada LKMM, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Program peningkatan dan perluasan usaha LKMM, bertujuan meningkatkan pelayanan LKMM kepada anggotanya, antara lain dengan meningkatkan promosi usaha, menyediakan informasi peluang usaha dan pasar, mengembangkan jaringan pemasaran, melaksanakan misi dagang, menyediakan sarana dan prasarana pemasaran, memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran, serta memantapkan sistem distribusi.

Program kerjasama antarLKMM dan kemitraan usaha, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan LKMM, baik dalam aspek kelembagaan, yaitu antara lain meningkatkan pendidikan dan pelatihan, maupun dalam aspek usaha, antara lain memperkuat jaringan usaha LKMM, meningkatkan keterkaitan usaha, mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kepastian usaha, serta memperluas pemasaran hasil produksi LKMM. Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan: 1) mengembangkan jaringan usaha LKMM yang lebih luas, antara lain di bidang konsumsi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan permodalan; 2) mengenali potensi usaha LKMM dan badan usaha lainnya, yang didukung oleh penyediaan informasi usaha dan upaya promosi untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha dalam berbagai bentuk/pola, yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang dan saling menguntungkan;

Program pemantapan kelembagaan LKMM, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi LKMM agar LKMM mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra LKMM menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi LKMM, akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan LKMM semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan LKMM semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik ber-LKMM yang baik (*best practice*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berikut: 1) peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan yang kurang kondusif bagi LKMM; 2) penyuluhan per-LKMM-an kepada masyarakat luas disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh LKMM sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi usaha; 3) peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan

hukum LKMM yang selama ini belum ada; 4) pemberian dukungan untuk membantu penguatan dan kemandirian gerakan LKMM; 5) pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan LKMM untuk melakukan penataan dan penguatan organisasi untuk meningkatkan pelayanan anggota; 6) pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan LKMM di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi, dan pemasaran; 7) pengembangan sisten pendidikan, pelatihan dan penyuluhan per-LKMM-an bagi anggota dan pengelola LKMM, calon anggota dan kader LKMM, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip LKMM dalam kehidupan, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan LKMM; 8) penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar-LKMM; 9) peningkatan kemampuan aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan, dan program pembangunan LKMM; 10) peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan LKMM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; 11) mengembangkan sistem akuntansi LKMM untuk memperkuat kelembagaan LKMM seiring dengan makin luasnya usaha LKMM sehingga manajemen LKMM lebih transparan dan dapat diaudit;

Program Pembangunan LKMM di Daerah Pinggiran. Peran serta LKMM dalam upaya pembangunan daerah adalah dengan mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat; serta meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah tersebut. Peningkatan kualitas dan kemampuan LKMM di daerah dilakukan terutama dengan kegiatan sebagai berikut: 1) meningkatkan kualitas SDM LKMM melalui pelatihan, magang, pendidikan, penyuluhan, dan studi banding; di samping itu, juga akan dilakukan penempatan tenaga kerja sukarela terdidik (TKST) serta tenaga sarjana dan terdidik lainnya pada LKMM di daerah, serta peningkatan dan pengembangan kemampuan tenaga penyuluh per-LKMM-an; 2) membangun prasarana dan sarana usaha LKMM, antara lain warung serba ada (waserda) untuk merangsang kegiatan ekonomi dan penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat; 3) menyediakan bantuan modal kerja untuk mendukung kelancaran dan pengembangan usaha LKMM dan anggotanya; 4) meningkatkan peran serta LKMM dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat daerah pinggiran; 5) menyediakan informasi peluang usaha dan pasar; dan 6) meningkatkan peran serta LKMM dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat daerah pinggiran, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk mendorong tumbuh kembangnya berbagai usaha produktif masyarakat.

Program Pengembangan Informasi Per-LKMM-an, bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan LKMM, berupa jaringan informasi kelembagaan dan usaha yang antara lain, meliputi informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh LKMM yang ada di tingkat dusun, desa, kecamatan, maupun kabupaten sehingga, informasi pemasaran tingkat kabupaten atau di tingkat lebih atas dapat diperoleh dengan mudah dengan penyediaan semacam portal LKMM. Hal ini akan mempermudah akses bagi LKMM untuk mengetahui pasar yang kosong terhadap produk yang

dihasilkannya.

Program Penelitian dan Pengembangan LKMM, bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan LKMM terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM LKMM; peningkatan akses dan pangsa pasar LKMM; peningkatan akses terhadap sumber permodalan dan struktur permodalan LKMM; peningkatan kemampuan dan akses terhadap teknologi; pemantapan kelembagaan, organisasi, dan manajemen; kemitraan usaha, baik antarLKMM maupun antara LKMM dengan pelaku ekonomi lainnya; serta melakukan pengkajian kebijakan untuk mewujudkan pembinaan LKMM secara otonom.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang LKMM, dimaksudkan untuk mengembangkan kepeloporangenerasi muda dalam pembangunan LKMM, serta pewarisan nilai, semangat, dan jiwa LKMM pada generasi penerus. LKMM bukan monopoli orang dewasa, sehingga para pemuda pun harus dibina sedini mungkin sehingga ada penerus di kemudian hari yang telah siap dengan kesadaran sendiri. Artinya mereka telah siap terjun dibanding dengan mereka yang tidak dibina sedini mungkin.

Program Peranan Wanita di Bidang LKMM, bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pengembangan LKMM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberian kesempatan yang luas kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan LKMM. Wanita pun perlu didorong untuk juga berkarya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat dari keluarga dengan cara melakukan kegiatan produktif di LKMM.

Program Pengembangan Hukum di Bidang LKMM. Mengingat LKMM belum merupakan lembaga yang berbadan hokum, maka program ini ditujukan untuk mengembangkan status hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan LKMM sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, berakar dalam masyarakat, serta mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Program ini meliputi pula kegiatan penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor yang mendukung pembangunan LKMM.

Akhirnya, peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan LKMM seyogyanya perlu memperhatikan kebebasan bagi LKMM untuk mengatur kehidupannya sendiri agar LKMM mampu mewujudkan pelaksanaan prinsip LKMM. Pemerintah turun tangan sebatas memberikan pengamanan, bimbingan dan pengarahan yang bertujuan agar LKMM mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pemerintah cukup pada tindakan yang sesuai asas “tut wuri handayani” (di belakang memberi kekuatan).

d. Analisis Kualitatif SWOT LKMM di Kabupaten Jember

Strategi kombinasi antara Kekuatan dan peluang (S-O), antara kekuatan dengan ancaman (S-T), antara kelemahan dengan peluang (W-O), serta antara kelemahan dengan ancaman (W-T) dapat disarikan ke dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T LKMM

EXTERNAL	OPPORTUNITY (O)	THREATS (T)
INTERNAL	(S-O)	(S-T)
STRENGTH (S)	- Program peningkatan dan perluasan usaha LKMM (penjabaran point a.3)	- Program pembangunan LKMM di daerah pinggiran (penjabaran point b.1)

	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan informasi LKMM (penjabaran point b.2) - Program penelitian dan pengembangan LKMM (penjabaran point b.3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan dan pengembangan (penjabaran point b.4) - Program peranan wanita di bidang LKMM (penjabaran point b.5)
WEAKNESS (W)	<p style="text-align: center;">(W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan LKMM (penjabaran point a.2) - Program pemantapan kelembagaan LKMM (penjabaran point a.5) 	<p style="text-align: center;">(W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LKMM (penjabaran point a.1) - Program kerjasama antar LKMM dan kemitraan usaha lain (penjabaran point a.4) - Program pengembangan hukum di bidang LKMM (penjabaran point b.6)

e. Analisis Kuantitatif SWOT Koperasi di Kabupaten Jember

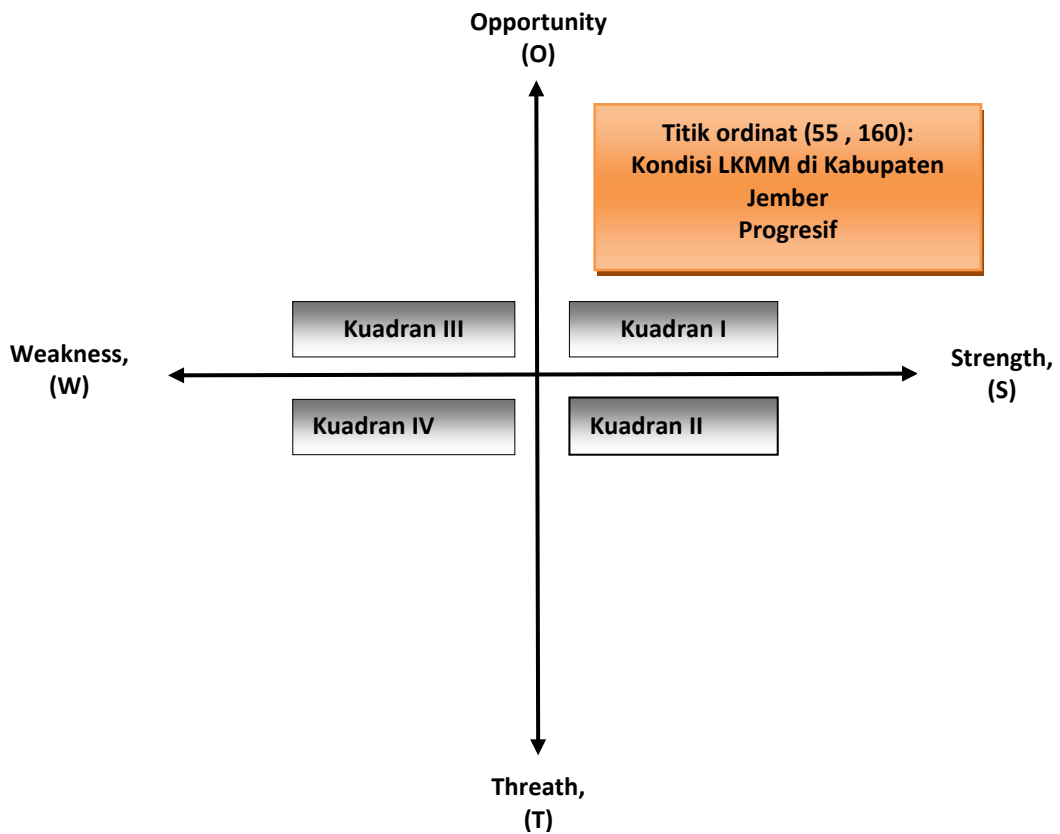
Berikut ini akan disajikan Tabel 3 tentang skor dan bobot LKMM di Kabupaten Jember

Tabel 3
Skor dan Bobot LKMM di Kabupaten Jember

No	STRENGTHS	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Struktur organisasinya jelas dan sesuai dengan	7	10	70
2.	Keanggotaan bersifat sukarela	8	15	120
3.	Baiknya citra LKMM di mata masyarakat	8	15	120
4.	Resiko kurangnya anggota kecil	7	10	70
5.	Biaya bunga relatif kecil dibanding dengan badan	8	10	80
6.	Kepengurusan dilakukan secara <i>grounded</i> .	7	15	105
7.	Memungkinkan unit usaha yang dapat dikelola banyak	7	10	70
8.	Komitmen pengurus untuk memajukan usaha LKMM	6	15	90
	Total Kekuatan		100	725
No	WEAKNESSES	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Belum berbadan hukum	6	15	90
2.	Kinerja LKMM masih banyak yang jauh dari harapan	7	15	105
3.	Lemahnya struktur permodalan LKMM	6	15	90
4.	Lemahnya pengelolaan atau manajemen usaha LKMM	7	15	105
5.	Kurangnya pengetahuan bisnis dan ketrampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan	7	10	70
6.	Kurang memadainya profesionalisme SDM di LKMM	7	10	70
7.	Kurangnya inovasi dari pengelola LKMM	7	10	70
8.	Kurangnya penguasaan teknologi.	7	10	70
	Total Kelemahan		100	670
Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = 725 – 670 = 55 (x)				
No	OPPORTUNITIES	SKOR	BOBOT	TOTAL

1.	Adanya perhatian yang diprioritaskan oleh pemerintah terhadap LKMM	8	10	80
2.	Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan masyarakat untuk lebih membangun LKMM.	7	15	105
3.	Kondisi ekonomi masyarakat cukup mendukung eksistensi LKMM.	8	15	120
4.	Industrialisasi membuka peluang diversifikasi usaha di bidang agrobisnis, agroindustri dan industri pedesaan sesuai dengan struktur perekonomian Jember.	6	10	70
5.	Adanya peluang pasar bagi produk yang dihasilkan	7	10	70
6.	Dukungan kebijakan dari pemerintah	8	15	120
7.	Daya beli masyarakat tinggi.	8	10	80
8.	Adanya investor yang ingin bekerjasama dengan	6	15	90
	Total Peluang		100	735
No.	THREATS	SKO	BOBO	TOTAL
1.	Semakin ketatnya persaingan usaha	7	10	70
2.	Terbatasnya jumlah kredit yang dialokasikan LKMM	6	15	90
3.	Masih kurangnya kepercayaan untuk bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain	6	15	90
4.	Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi informasi bagi LKMM	6	10	60
5.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang LKMM	6	15	90
6.	Ancaman pasar bebas.	7	10	70
7.	Kurang memadainya infrastruktur (sarana dan	7	15	105
8.	Menurunnya daya beli masyarakat.	7	10	70
	Total Ancaman		100	575
Selisih Total Peluang – Total Ancaman = O – T = 735 – 575 = 160 (y)				

Dari hasil analisis kuantitatif SWOT, ternyata secara makro keberadaan LKMM di Kabupaten Jember berada pada titik ordinat (55 , 160), berarti terdapat dalam kuadran I (progresif), artinya LKMM di Kabupaten Jember menandakan bahwa kinerjanya sudah bagus sekalipun belum mempunyai badan hukum. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah 'progresif', artinya kembangkan terus LKMM dengan menambahkan sarana dan prasarana atau instrument apapun yang dibutuhkan bagi LKMM untuk diversifikasi dan ekspansi usaha, tidak hanya terbatas simpan pinjam saja, serta menyambut segala peluang yang datang, sehingga LKMM mampu tampil terdepan dalam urusan pemberdayaan usaha mikro masyarakat utamanya rumah tangga miskin. Kondisi LKMM di Kabupaten Jember apabila digambarkan adalah sebagai berikut (Gambar 5).



Gambar 5
Kuadran Kondisi LKMM di Kabupaten Jember

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kondisi LKMM di Kabupaten Jember, yaitu.

1. Permasalahan klise yang terjadi hampir di semua LKMM yang disurvei adalah, kurangnya modal yang dikucurkan oleh pemerintah daerah, padahal calon anggota banyak yang mengantre untuk menjadi anggota dengan cara meminjam. Hal ini terjadi karena dana yang ada posisinya masih berputar di anggota lama, sehingga anggota baru harus menunggu pinjaman yang dikembalikan oleh anggota lama.
2. Ada perbedaan yang signifikan antara anggota LKMM di wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan terkait dengan kewajiban mengangsur pinjaman. Di Jember Utara kesadaran anggota LKMM dalam mengangsur pinjaman relatif kurang dibandingkan dengan di wilayah Jember Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang keliru oleh banyak anggota mengenai dana yang digulirkan oleh LKMM. Mereka beranggapan bahwa dana tersebut tak ubahnya

seperti BLT, sehingga dianggap cuma-cuma dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.

3. Sistem rekrutmen pengurus LKMM saat pendirian tidak melalui proses seleksi secara langsung, akan tetapi dengan sistem *grounded*, yaitu fasilitator menunjuk langsung pengurus didasarkan atas informasi dari perangkat desa yang lebih
4. paham terhadap karakteristik calon pengurus.

REFERENSI

Anonimus. 2005. *The Microfinance Institution*. Jakarta: Panitia Konggres Nasional LKMS BMT

Amalia, E. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Kelompok Swadaya Masyarakat*

Asian Foundation. 2002. *Microfinance Service in Indonesia: Survey of Institutions in 6 Provinces*

Berger and Udell, (2002) dikatakan bahwa dalam penyaluran kredit usaha kecil oleh lembaga keuangan

Booth, A. 1998. dalam kurun waktu 1800 – 2000, bangsa Indonesia telah mengalami ujian krisis ekonomi

Budiantoro, Setyo. 2003, *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat*, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember 2003, Jogjakarta

Darwin (Penyunting). 2003. *Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: LIPI

Madison, “*Jurnal Ekonomi Rakyat*”, dalam website www.ekonomirakyat.org.

Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Miles, Matthew B and Huberman, Michael B. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Source of New Methods*. London: Sage Publications.

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press

Pearce, J. A. II, and Robinson, R. B. Jr. 1998, *Cases in Strategic Management, 4th edition*. Chicago: Richard D. Irwin, Inc.

Retnadi, D. 2004. *Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia*, Kompas, Sabtu, 16 Oktober 2004 Iman Sugema, *The Next Revolution*, paper pada Diskusi Panel *Microfinance Revolution: 'Future Perspective for Indonesian Market'* Jakarta, 7 Desember 2004

Robinson, M. S. 1993. Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 -

- 1990, dalam *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan*, Sugianto (Ed.), Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia,
- 2002. *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, Vol. 1*. Washington: The World Bank, D. C. New York Open Society
- Rudjto. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, *Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003*
- Tara, A. D. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani
- Uchida, Udell dan Watanabe, (2007), dalam hasil studinya mengatakan bahwa sejalan dengan kondisi liberalisasi keuangan
- Waya, K. 2005. Kredit Mikro Bukan Hibah, *Harian Kompas*, Selasa, 1 Maret 2005
- Wahyudin, Didin. 2004. Key Succes Factors In Microfinancing, paper pada Diskusi Panel *Microfinance Revolution: 'Future Perspective for Indonesian Market'*, Jakarta, 7 Desember 2004
- Wono, W. W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, *Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus Desember 2005. Jakarta*.
- Yunus, M. 2007. *Bank Kaum Miskin, terjemahan Irfan Nasutioan*. Tangerang
- <http://www.gemari.or.id/file/edisi114/gemari11434.pdf>
- <http://induk-kud.com/en/revitalisasi-koperasi-ala-bank-gakin/>.
- <http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/02/02/umkm-jember-bentuk-160-bank-gakin-baru>
- 2008. *Jember dalam Angka Tahun 2010*. Jember: Badan Pusat statistik
- 2010. *Jember dalam Angka Tahun 2010*. Jember: Badan Pusat statistik
- 2012. *Jember dalam angka, 2012*. Jember: Badan Pusat statistik Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember, 2012).

KEKUATAN INDUSTRI PERBANKAN (PENDEKATAN BRESNAHAN LAU OLIGOPOLI)

Muhammad Sholeh, Diah Wahyuningsih dan Rifai Afin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
e-mail:

ABSTRACT

Muhammad Sholeh, Power Industry Banking in lending (credit market) on Conventional Bank in Indonesia with Bresnahan Lau oligopoly approach. Under the guidance of Mrs. Dr. Diah Wahyuningsih, SE., M.Si and Mr Rifai Afin, S.E., MSc.

The aim of this study is analyzing the structure of the banking industry in Indonesia, so that researchers can determine the position of structures (perfect competition, monopoly and oligopoly) and the market power of banks in Indonesia.

The approach used is a quantitative approach, data quarterly time series obtained from the website of BI, ADB, BPS, BI Library, national and international journals. In this study using Bresnahan lau oligopoly approach, which formulates the two equations (demand and supply), then continued with the Error Correction Model (ECM).

The conclusion of this study is based on the results of the analysis strength of the banking industry (market power) in Indonesia during 1999 to 2013, using the Bresnahan lau oligopoly approach, it can be deduced that the strength of the banking industry Indonesia in lending (credit market), especially commercial banks in Indonesia approach perfectly competition. The conclusion of this study is based on results of a mark-up (λ) on the model that has been built .

Keywords : Bresnahan Lau oligopoly, market power and Error Correction Model (ECM)

ABSTRAK

Muhammad Sholeh, Kekuatan Industri Perbankan (market power) dalam penyaluran kredit (pasar kredit) di Indonesia pada Bank Konvensional dengan pendekatan Bresnahan Lau Oligopoli. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si dan Bapak Rifai Afin, S.E., MSc.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis struktur industri perbankan di Indonesia, sehingga peneliti bisa mengetahui posisi struktur (persaingan sempurna, Monopoli dan Oligopoli) dan market power perbankan yang ada di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, data time series. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bresnahan lau oligopoli, yang memformulasikan dua persamaan (permintaan dan Penawaran), yang dianalisis dengan model Error Correction Model (ECM).

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis kekuatan industry perbankan (market power) di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan 2013, dengan menggunakan pendekatan Bresnahan lau oligopoly, kekuatan industry perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit (pasar kredit), khususnya bank umum yang ada di Indonesia mendektai pasar persaingan sempurna. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil mark up (λ) pada model yang telah dibangun.

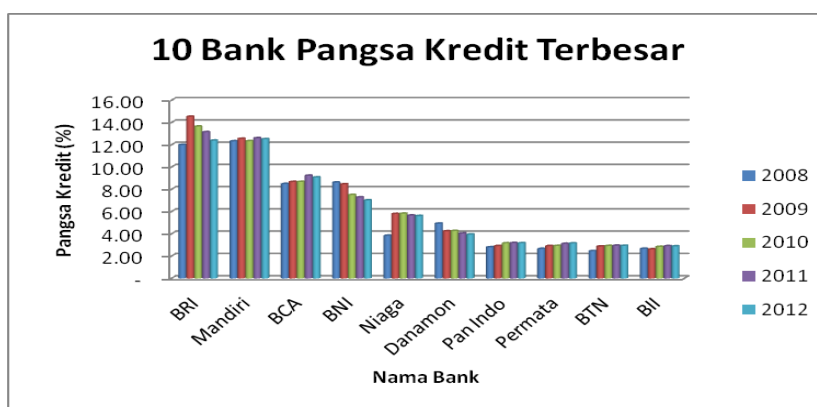
Kata kunci : Bresnahan Lau Oligopoli, market power dan Error Correction Model (ECM)

PENDAHULUAN

Kekuatan pasar adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan dapat meningkat-kan harga diatas biaya marjinal (Church dan Ware, 2000).

Kekuatan pasar ini bisa dilihat dari struktur yang ada dalam pasar tersebut, sedangkan perilaku pasar dapat kita lihat dari strategi untuk menetapkan harga dan strategi ber-saing yang digunakan. Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana terhadap pihak yang mem-butuhkan dana, dengan demikian akan terciptanya keseimbangan sirkulasi dana dalam masyarakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan sebagai intermediasi cukup efisien.

Kekuatan pasar pada bank umum bisa kita lihat pangsa pasar yang dimiliki oleh bank tersebut, berikut ini 10 bank berdasarkan pangsa asset terbesar:



Gambar 1
10 Bank Pangsa Kredit Terbesar

Banyak pendekatan yang di-gunakan untuk mengetahui market power pada perbankan, salah satu diantaranya adalah pendekatan SCP yang menggunakan struktur sebagai indikasi dari persaingan, namun belakangan ini muncul sebuah pendekatan baru yang menganalisi indikator tingkat persaingan ber-dasarkan perilaku perusahaan yang ada di pasar, yang dikenal dengan pendekatan NIE (*New Industrial Economic*). Dikenal dengan pen-dekatan *Bresnahan lau* oligopoli yang dikembangkan oleh Bresnahan (1982) dan Lau (1982). (Fahmi, 2012)

Pendekatan *bresnahan lau oligopoli* ini mencoba untuk mem-formulasikan antara permintaan dan penawaran, sehingga pendekatan ini sangat terlihat komplit, karena selain permintaan dan penawaran juga mempertimbangkan variabel *endogen* yang selama ini jarang digunakan oleh pendekatan-pendekatan lain untuk melihat “Kekuatan Industri Perbankan” yang ada di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana “Kekuatan Industri Per-bankan” yang ada di Indonesia bila diukur melalui Model pendekatan *Bresnahan Lau Oligopoli*.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis struktur industri perbankan di Indonesia, sehingga peneliti bisa mengetahui persaingan industry perbankan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Market Power

Market power adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan dapat meningkatkan harga diatas biaya marjinal (Church dan Ware, 2000). *Market power* adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar dan atau mengalahkan pesaing (Douglas F. Greer)

Pengukuran *market power* industri perbankan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yang pertama pendekatan SCP tradisional dan *New Industrial Economics* (NIE) dengan pendekatan bresnahan lau oligopoli. (Church dan Ware, 2000). (Lubis, 2012)

Bentuk Persaingan Pasar

Secara umum struktur pasar suatu industri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pasar persaingan sempurna (murni) dan struktur persaingan tidak sempurna (Monopoli dan Oligopoli). (Teguh, 2010)

Perilaku Memaksimalkan Profit

Model yang digunakan untuk me-ngukur market power di industri per-bankan yang ada di Indonesia peneliti mengutip dari *buletin ekonomi moneter 2012* dan *SURF-The European Money and Finance Forum 2005* (Jacob A. Bikker and Jaap W. B. Bos) yaitu menggunakan model bresnahan lau oligopoli yang meng-hubungkan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran.

Fungsi Permintaan

$$LKredit = \alpha_0 + \alpha_1 SKMK + \alpha_2 LPDB + \alpha_3 LSKMK * PDB + \alpha_4 BIRate + \alpha_5 SKMK * BIRate + \alpha_6 Inflasi$$

$$SKMK = -\lambda \frac{Kredit}{\alpha_1 + \alpha_3 PDB + \alpha_5 BIRate} + \beta_0 + \beta_1 LKredit + \beta_2 SDI + \beta_3 Inflasi + \mu_t$$

Dari kedua persamaan diatas sesuai dengan pendekatan bresna-han lau oligopoli, kita dapat menarik ke-simpulan kemampuan tentang industri perbankan

1. Industri perbankan yang berada di pasar persaingan sempurna, yang bersifat *price taker*, maka perubahan output suatu industri tidak akan berdampak terhadap output keseluruhan.

$$P = \sum C'(q, W) \frac{1}{n} \quad \text{atau } P = MC$$

2. Jika industri perbankan yang ada melakukan kolusi, maka peningkatan output industri tersebut diikuti peningkatan output industri yang lain, sehingga:

$$\lambda = \left(\frac{dq + d \sum q_{rest}}{dq} \right) \frac{1}{n} = \left(1 + \frac{Q - q}{q} \right) \frac{1}{n} = \frac{Q}{qn} = \frac{Q}{qn} = 1$$

3. Jika perusahaan bersaing dalam kerangka Cournot, perubahan output keseluruhan hanya ber-asal dari perubahan output satu perusahaan, tanpa adanya relasi dari perusahaan yang lain.

$$d \sum q_{rest} = 0 \quad \text{Sehingga } \lambda = \frac{1}{n}$$

Dengan demikian antara industri persaingan sempurna dan kolusi sempurna, nilai λ akan berkisaran 0 hingga 1. Studi empiris untuk mengetahui kekuatan pasar di industri perbankan dilakukan dengan cara mengestimasi variabel λ tersebut. Dengan demikian untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dengan mengestimasi nilai λ yang kami dapatkan dari model *Bresnahan Lau Oligopoli* (BL).

Hipotesis

Diduga bahwa struktur industri perbankan untuk bank umum di Indonesia dalam penyaluran kredit mendekati pasar persaingan sempurna.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berbentuk *time series*, mulai tahun 1990 *triwulan I* sampai dengan tahun 2013 *triwulan IV*. Sumber data yang digunakan diperoleh dari *website* bank Indonesia, *Asian development bank*, laporan triwulan kebijakan moneter bank Indonesia, serta berbagai macam jurnal terkait.

Variabel yang digunakan adalah kredit (total kredit pada bank umum), SKMK (Suku Bunga Kredit Modal Kerja), PDB (Produk domestik bruto), Inflasi (Laju Inflasi Indonesia), BI Rate (Bunga Acuan BI) dan SDI (Suku Bunga Deposito).

Teknik analisis pertama adalah uji stasioner. Pengujian stasioner dengan cara membandingkan ADF (*Augment-ed Dickey-Fuller*) dengan nilai kritis *Mackinnon*, jika ADF lebih besar (>) dari nilai kritis *Mackinnon* (pada α 1%, α 5% dan α 10%) maka data tersebut tidak stasioner dan sebaliknya. (Arief, 1993)

Kemudian uji kointegrasi. Jika hasilnya stasioner maka ada hubungan jangka pendek dan jangka panjang, begitu juga sebaliknya. Hasil uji kointegrasi yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan *Engle-Granger* (EG). (Widarjono, 2013).

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Uji Hipotesis yaitu uji simultan dan uji deferensial. Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel dependent dengan variabel independent, baik itu persamaan permintaan ataupun persamaan penawaran dan Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara

dependent variable dengan independent variable baik untuk persamaan permintaan atau-pun persamaan penawaran.

Struktur Industri Perbankan

Dengan memperhatikan nilai *mark up* (λ) pada persamaan penawaran struktur industri per-bankan di Indonesia dikatakan:

1. Pasar persaingan sempurna, jika *mark up* (λ)

$$P = \sum C'(q, W) \frac{1}{n} \quad \text{atau } P = MC$$

2. Industri monopoli jika *mark up* (λ),:

$$\lambda = \left(\frac{dq + d \sum q_{rest}}{dq} \right) \frac{1}{n} = \left(1 + \frac{Q - q}{q} \right) \frac{1}{n} = \frac{Q}{qn} = \frac{Q}{qn} = 1$$

3. Oligopoli kerangka Cournot jika *mark up* (λ),:

$$d \sum q_{rest} = 0 \quad \text{Sehingga } \lambda = \frac{1}{n}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji akar unit dilakukan untuk memastikan data di setiap variabel sudah stasioner, berikut ini hasil perhitungan akar unit:

Tabel 1
Perhitungan Akar Unit

Variabel	Eq. Test	Prob	Simpulan
Lkredit	Level	0,059	Stasioner
SKMK	Level	0,000	Stasioner
LSKMK*PDB	Level	0,015	Stasioner
BIRate	^{1st} Diff	0,000	Stasioner
SKMK*SBI	Level	0,073	Stasioner
LPDB	^{1st} Diff	0,000	Stasioner
SDI	Level	0,002	Stasioner

Uji kointegrasi merupakan salah satu uji untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen dengan variabel inde-penden, berikut ini hasil uji kointegrasi dengan menggunakan pendekatan *Engle-Granger*³ (EG):

Variabe	ADF	Prob	Simpulan
Qd	-2,681	0.083	Kointegrasi
Qs	6,554	0.000	Kointegrasi

Setelah mengetahui dua persamaan tersebut (Permintaan dan Penawaran) terintegrasi, langkah selanjutnya adalah *Error Correction Model* (ECM), berikut ini hasil analisis *Error Correction Model* (ECM)

Tabel 2
Hasil Estimasi Permintaan

Variabel	Lkredit	
	Coefficient	Teori
Lpdb	2.018.906	Sesuai
LskmkPdb	-0.798787	Sesuai
Inflasi	0.023886	Sesuai
BIRate	-0.083218	Sesuai
Skmk	0.034673	Tidak
SkmkBIRate	0.001692	Sesuai

Variabel SKMK seharusnya ketika bank menaikkan suku bunga kredit modal kerja, akan berdampak penurunan terhadap permintaan kredit oleh masyarakat. Namun sebenarnya masyarakat dalam meminjam uang di bank tidak melihat suku bunga kredit yang ditetapkan, dengan kata lain ketika suku bunga kredit modal kerja naik, masyarakat tetap akan meminjam uang di bank, bisa jadi hal ini disebabkan peraturan bank dalam memberikan kredit sangat mudah, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong untuk meminjam uang di bank meskipun suku bunga tinggi.

Nilai *R-Square* sebesar 0,99015 mendekati angka 1, hal ini menandakan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel Independen

Tabel 3
Hasil Estimasi Jangka Penawaran

Variabel	SKMK	
	Coefficient	Teori
λ	-4.59E-10	Sesuai
LKREDIT	-0.618309	Tidak
BUNGDEP	0.506843	Sesuai
INFLASI	-0.100500	Tidak

Jumlah Kredit tidak sesuai dengan hipotesis, ketika jumlah kredit naik maka suku bunga modal kerja juga naik, kemungkinan besar pengaruh negatif ini disebabkan karena bank berusaha untuk meminimalisir *non performing loans*, hal ini terbukti dari tahun 1999 sampai dengan 2013, *non performing loans* di tahun 1999 mencapai 32,9 persen menjadi 1,68 persen di tahun 2012.

Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penawaran SKMK, jika terjadi kenaikan terhadap variabel inflasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan penawaran terhadap SKMK sebesar 0,100500 persen. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, seharusnya inflasi berpengaruh positif terhadap penawaran SKMK, jika inflasi naik maka biaya yang dikeluarkan oleh bank akan meningkat, sehingga bank akan menaikkan SKMK untuk menambah pendapatannya yang dihasilkan dari pembiayaan kredit masyarakat. Namun hubungan kredit dan inflasi ini memang dapat berjalan searah atau berlawanan (Fahmi, 2012)

Dalam persamaan penawaran ini nilai *R-Square* sebesar 0,892111 mendekati angka 1, hal ini menandakan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan yang dibutuhkan oleh variabel Independen. Dalam jangka panjang untuk persamaan penawaran ternyata variabel bebas sangat berpengaruh terhadap variabel terikat.

Jangka pendek dalam penelitian ini sengaja tidak dibahas karena tidak ada hubungannya dengan kekuatan industri perbankan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis biasanya menggunakan uji simultan dan uji parsial,

Uji Simultan Dengan menggunakan Uji F atau serentak dari fungsi permintaan (SKMK, PDB, SKMK*PDB, BI Rate, SKMK*BIRate dan Inflasi) dan fungsi penawaran (Mark Up atau λ , total kredit, SDI dan Inflasi).

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel	Kesimpulan	
Kredit (Permintaan)	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
SKMK (Penawaran)	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1

dari fungsi permintaan dan penawaran diatas hasil Uji F membuktikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka menerima H_1 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel tergantung secara bersama - sama.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau parsial menguji dari fungsi permintaan (SKMK, PDB, SKMK*PDB, BI Rate, SKMK*BIRate dan Inflasi) dan fungsi penawaran (Mark Up atau λ , total kredit, SDI dan Inflasi) terhadap variabel terikat yaitu kredit dan SKMK selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar masing - masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Bebas	Kesimpulan	
SKMK	Tidak Signifikan	Menerima H_0 Menolak H_1
LPDB	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
BI Rate	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
SKMK*BIRate	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
Inflasi	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
LSKMK*PDB	Tidak Signifikan	Menerima H_0 Menolak H_1
PAS (λ)	Tidak Signifikan	Menerima H_0 Menolak H_1
Lkredit	Tidak Signifikan	Menerima H_0 Menolak H_1
SDI	Signifikan	Menolak H_0 Menerima H_1
Inflasi	Tidak Signifikan	Menerima H_0 Menolak H_1

Struktur Persaingan Pasar

Kembali pada asumsi yang telah dibangun, Perilaku Memak-simalkan Profit adalah sebagai be-rikut:

1. Industri perbankan yang berada di pasar persaingan sempurna,

$$P = \sum C'(q, W) \frac{1}{n} \quad \text{atau } P = MC$$

2. Jika industri perbankan yang ada melakukan kolusi, maka pe-ningkatan output industri ter-sebut diikuti peningkatan output industri yang lain, sehingga:

$$\lambda = \left(\frac{dq + d \sum q_{rest}}{dq} \right) \frac{1}{n} = \left(1 + \frac{Q - q}{q} \right) \frac{1}{n} = \frac{Q}{q} \frac{1}{n} = \frac{Q}{qn} = 1$$

3. Jika perusahaan bersaing dalam kerangka Cournot,

$$d \sum q_{rest} = 0 \text{ Sehingga } \lambda = \frac{1}{n}$$

Dengan demikian antara industri per-saingan sempurna dan kolusi sempurna, nilai λ akan berkisaran 0 hingga 1. Studi empiris untuk me-ngetahui kekuatan pasar di industri perbankan dilakukan dengan cara mengestimasi variabel λ tersebut.

Berikut ini hasil pengujian dengan menggunakan aplikasi *evIEWS* diperoleh hasil estimasi variabel λ adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Estimasi Bentuk Industri Perbankan

Variabel	Prob
λ	0.9670
LKREDIT	0.0573
BUNGDEP	0.0091
INFLASI	0.2527

Pada tabel diatas untuk variabel λ , dan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,9670 (Lebih besar dari 0,05) dengan kata lain tidak signifikan, sehingga nilai variabel $\lambda = 0$ atau mendekati 0 (Nol) bila mengacu pada persamaan diatas

$$P = \sum C'(q, W) \frac{1}{n} \text{ atau } P = MC \text{ maka dikatakan bahwa Market Power of Banking}$$

di Indonesia dalam penyaluran kredit (pasar kredit) khususnya bank umum mendekati Pasar Persaingan Sempurna, baik itu kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja.

Hasil penelitian ini juga di dukung dengan LDR pada bank umum di indonesia periode 2006 sampai dengan 2013, menjelaskan bahwa LDR (*Loans Deposit Ratio*) bank umum di Indonesia antara bank yang satu dengan yang lain masih berada pada interval yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski-pun ada sebagian kecil yang masih tidak sesuai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pe-nelitian tentang kekuatan industri perbankan (*market power*) di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan 2013, dengan meng-gunakan pendekatan *Bresnahan lau oligopoly*, yang menghubungkan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat ditarik kesimpul-an bahwa kekuatan industry per-bankan di Indonesia dalam penya-luran kredit (pasar kredit), khususnya bank umum yang ada di Indonesia mendektai pasar per-saingan sempurna. Kesimpulan pe-nelitian ini berdasarkan hasil *mark up* (λ) pada model yang telah dibangun.

Saran

Bagi regulator bank dan pemerintah sebaiknya memaksimal-kan lembaga yang bergerak di bidang pengawasan perbankan agar tidak terjadi monopoli pasar di industry perbankan, sehingga se-luruh bank yang ada di Indonesia berkembang,

baik itu bank kecil ataupun bank besar. Dengan demikian besar kecilnya aset bank bukan lagi menjadi kekuatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Bikker, J. ,A. , 2003. *Testing for Imperfect Competition on EU Deposit and Loan Markets with Bresnahan's Market power Model*. Research Series De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
- Bresnahan, T.F., 1982, *The oligopoly solution concept is identified*, Economic Letters10, 87-92.
- Church, J. , dan R. Ware, 2000. *Industrial Organization: A Strategic Approach*. Boston, Massachusetts, Irwin McGraw- Hill.
- Lubis, Andi F. , 2012. *Market Power Perbankan Indonesia* (Buletin Ekonomi Moneter dan Per-bankan). Volume 14, Nmor 3, Januari 2012.
- Teguh, Muhammad. 2010. *Ekonomi industri*. Cetakan1. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometri-ka pengantar dan Aplikasi-nya*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

www.suerf.org

www.bi.co.id

**MODEL PENGUATAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA
BERBASIS MODAL SOSIAL (STUDI PADA PASAR TERAPUNG LOK
BANTAN KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN)**

Noor Rahmin, M. Pudjihardj, Arif Hoetor dan Asfi Manzilati.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia
e-mail: noorrahmini@unlam.ac.id

ABSTRACT

Floating Market Lok Baintan as part of the traditional markets in Indonesia continue to exist until now. This condition is contrary to the traditional market conditions in general and some other floating market. Results of previous studies mention this is due to both internal and external factors. Therefore, this study seeks to examine more deeply, how Floating Market Lok Baintan still exist and growing views of economic and social relations are swathed in social capital between economic players in this market.

This study used a qualitative study using Phenomenology approach. Phenomenological study to look closely at the individual interpretation of her experiences and trying to understand the meaning of an experience from the perspective of the participants.

Floating Market Lok Baintan exist with all the problems through interaction relationship bonding, bridging and linking. This study further gives three types of conclusions kind of relationship (bonding, bridging and linking) there and attached to individual market participants, but as bridging social capital utilized more dominant economic players in the Floating Market Lok Baintan in increasing revenue. In this case the macro economic impact on the improvement Lok Baintan and surrounding communities.

Keywords: Floating Market Lok Baintan, social capital, bonding, bridging and linking

ABSTRAK

Pasar Terapung Lok Baintan sebagai bagian dari pasar tradisional di Indonesia tetap eksis hingga sekarang. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi pasar tradisional pada umumnya dan beberapa pasar terapung lainnya. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan hal ini disebabkan faktor intern maupun ekstern. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam, bagaimana Pasar Terapung Lok Baintan tetap eksis dan semakin berkembang dilihat dari hubungan ekonomi dan sosial yang terbalut dalam modal sosial antara pelaku ekonomi di Pasar ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Studi fenomenologi melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya dan berusaha memahami makna dari sebuah pengalaman dari perspektif partisipan.

Pasar Terapung Lok Baintan tetap eksis dengan segala permasalahan melalui interaksi hubungan bonding, bridging dan linking. Penelitian ini lebih lanjut menginsyaratkan ketiga jenis bentuk hubungan (bonding, bridging dan linking) ada dan melekat pada individu pelaku pasar, namun begitu modal sosial bridging yang lebih dominan dimanfaatkan pelaku ekonomi di Pasar Terapung

Lok Baintan dalam meningkatkan pendapatannya. Secara makro hal ini berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat Lok Baintan dan sekitarnya.

Kata kunci: Pasar Terapung Lok baintan, modal social, bonding, bridging dan linking

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yang erat dengan kehidupan manusia adalah keberadaan pasar. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli (Chourmain, 1994). Perkembangan penduduk yang semakin pesat membuat semakin besar pula tuntutan kebutuhan pasar, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.

. Dalam keberlangsungannya pasar tradisional menghadapi ancaman dari semakin berkembangnya pasar modern. Ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern yaitu menurunnya omset penjualan di pasar tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Menurut Dewi (2012) terdapat penurunan pendapatan pedagang karena pembangunan Supermarket dan Hypermart lebih besar dibandingkan pembangunan minimarket baru. Hal bertentangan yang sudah disampaikan peneliti sebelumnya, pasar tradisional mengalami penurunan eksistensi karena masalah intern dari pasar tradisional itu sendiri (Suryadharma, 2010).

Seiring dengan perdebatan hal apa yang menyebabkan penurunan peran pasar tradisional, nyatanya peran pasar tradisional semakin penting terkait dengan mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Pasar tradisional sebagai salah satu tempat utama untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Oleh sebab itu peran pasar tradisional menjadi sangat vital bagi masyarakat pedesaan.

Salah satu bagian pasar tradisional yang ada di Kalimantan Selatan adalah Pasar Terapung. Pasar terapung merupakan warisan budaya dan merupakan cerminan kuatnya budaya sungai masyarakat Kalimantan dimana semua aktivitas sehari-hari hampir semuanya dilakukan di sungai, salah satunya aktivitas ekonomi perdagangan.

Pasar Terapung Lok Baintan sebagai bagian dari pasar tradisional di Indonesia tetap eksis hingga sekarang. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi pasar tradisional pada umumnya dan beberapa pasar terapung lainnya. Berdasarkan data Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (2013) bahwa dalam rentang tahun 2013-2014 terjadi kenaikan 140%. Kenaikan yang signifikan mengisyaratkan ada geliat ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya sekitar kawasan Lok Baintan.

Pasar ini menawarkan beragam produk hasil pertanian yang di *supply* langsung dari petani yang berada di sekitar lokasi Pasar Terapung. Pasar Terapung tempat bertemunya petani, pedagang dan konsumen. Ada indikasi, aspek sosial dan biaya transaksi ikut terlibat dalam interaksi yang dilakukan oleh pelaku di Pasar Terapung, mengingat pasar ini memungkinkan pertemuan yang intensif masyarakat Banjar yang sudah saling mengenal yang terkait dalam berbagai hubungan sosial baik ikatan keluarga, agama dan tempat tinggal. Keterlibatan aspek sosial, juga mempengaruhi jalannya aktivitas ini dengan

aktivitas ekonomi lokal yang bersifat informal yang melandaskan pada kepercayaan.

Penelitian ini mengidentifikasi lebih lanjut modal sosial apa saja yang ada dan lebih dominan dalam mempengaruhi penguatan Pasar Terapung Lok Baintan sehingga Pasar Terapung Lok Baintan tetap eksis. Artikel ini dimulai dengan menyajikan gambaran konseptual dan teoritis singkat modal sosial dalam kaitannya dengan eksistensi pasar tradisional diikuti dengan presentasi metode yang diterapkan. Akhirnya, penulis mencoba untuk mengintegrasikan temuan dengan teori modal sosial dan menyajikan kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Modal Sosial

Ada beberapa tokoh yang berperan memperkenalkan konsep modal sosial dalam karya-karya mereka seperti Bourdieu, Coleman dan Putnam (Yustika, 2010). Modal sosial bagi Bourdieu (1986) sebagai sumber daya yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang dengan memanfaatkan jaringan, atau hubungan yang terlembaga dan ada saling mengakui antar anggota yang terlibat di dalamnya.

Konsep modal sosial tidak hanya didefinisikan oleh tiga tokoh diatas. Dalam perkembangannya konsep modal sosial juga disampaikan beberapa peneliti lain yang pada intinya memberikan makna yang sama. McElroy, Jorna, & Engelen (2006) menjelaskan modal sosial sebagian besar terdiri dari pengetahuan (kepercayaan, keyakinan, aturan, dan norma-norma) sedang menurut Lyon (2000) Modal sosial bertindak sebagai payung yang mencakup berbagai proses hubungan sosial yang terbentuk dan membentuk lembaga lain.

Diez (2013) memperkaya definisi dengan memahami modal sosial sebagai aktivitas manusia yang mengambil tempat di luar pasar moneter, namun dalam rumah tangga atau dalam interaksi dengan orang yang tinggal di rumah tangga lain, dan yang dapat memberikan dasar bagi pembentukan kepercayaan dalam masyarakat.

Modal sosial terdiri atas 5 unsur yaitu kepercayaan, jaringan, norma, nilai dan timbal balik. Fukuyama (2002) mengatakan bahwa kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan *social capital*. Kepercayaan memungkinkan para pedagang memiliki kesempatan untuk membangun reputasi kehandalan, membuat transaksi lebih murah dan lebih stabil. Reputasi yang baik menumbuhkan kepercayaan dan pada akhirnya akan menyebarkan informasi dengan cepat dan murah (Murshid, 2011). Pentingnya peran kepercayaan dalam suatu hubungan juga disampaikan Groenewald (2013) bahwa kepercayaan menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mudah "mengejar" peluang yang diciptakan oleh perluasan pasar, sementara yang lain tertinggal dalam kemiskinan.

Fukuyama (2002) mendefinisikan jaringan sebagai sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2003).

Putnam (1995) menjelaskan norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik

profesional. Penjualan tunai pada petani adalah salah satu bentuk norma (Murshid, 2011)

Menurut Fukuyama (1995), nilai-nilai selain dapat memperkuat modal sosial tetapi dapat pula memperlemah dengan demikian nilai-nilai harus dikelola ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Pengembangan Modal Sosial juga harus memperhatikan pengembangan kapasitas agar organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus.

Timbal Balik (*Reciprocity*) merupakan dimensi modal sosial dimana orang dapat dipastikan akan memberikan kebaikan kepadanya dan orang lain pun akan menerima kebaikan dari yang lainnya. Dalam prinsip ini ada semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain (Fukuyama, 1995).

Berdasarkan hubungan koneksi antara aktor yang terletak di tingkat yang berbeda, modal sosial telah disajikan sebagai ikatan (*bonding*), menjembatani (*bridging*), dan menghubungkan (*linking*). Putnam (2000) dalam Heenan (2010) menarik perbedaan antara ikatan dan modal sosial menjembatani. *Bonding* modal sosial hampir seluruhnya didasarkan pada ikatan solidaritas antara kelompok-kelompok yang sama orang dan bertujuan untuk membantu orang untuk mendapatkan sesuatu. Hubungan dalam keluarga dapat dianggap sebagai contoh dari ikatan modal sosial. Sedangkan *Bridging* modal sosial mengacu pada kepercayaan horisontal dan timbal balik hubungan antara individu yang beragam. Hal ini berarti modal sosial *bridging* secara inheren lebih berharga daripada ikatan modal sosial karena memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat luas.

Lain lagi Dufhuesa (2011) menjelaskan Ikatan lemah sebagai modal sosial yang menjembatani merupakan ciri khas dari interaksi jarang dan hubungan antara individu yang berbeda. Sedang Ikatan kuat merupakan ciri khas dari lingkaran sosial intim individu dengan karakteristik agak mirip, misalnya keluarga dan kelompok teman-teman dekat. Klasifikasi ketiga adalah modal sosial *linking*. Dimensi ini mengacu pada hubungan seseorang dengan orang dalam posisi otoritas, seperti perwakilan dari masyarakat (misalnya polisi) dan lembaga swasta (misalnya bank).

Bonding modal sosial seperti yang dikutip Mulunga (2014) mengacu pada ikatan *intracommunity* dimana anggota dapat bergantung pada saat situasi membutuhkan. Hubungan tersebut dapat menjadi sumber layanan berharga, seperti bantuan uang tunai darurat dan menemukan bahwa kelompok sosial menyediakan ikatan penting dan modal sosial menjembatani dalam bentuk perlindungan, manajemen risiko manajemen dan fungsi solidaritas, terutama di kasus masyarakat miskin di daerah pedesaan.

Modal Sosial Dalam Eksistensi Pasar Tradisional

Beberapa ahli mendefinisikan pasar dengan sudut pandangnya masing-masing. Uzuegbunam (2012) menjelaskan definisi pasar sebagai "tempat" dari perdagangan atau pertukaran barang dan jasa. Lebih lanjut Uzuegbunam menjelaskan suatu pasar harus dilihat sebagai tempat, sebuah unit fungsional dan keseluruhan. Sedangkan konsep pasar menurut Leksono (2009), pasar sebagai sebuah institusi yang memiliki paradigma, ideologi, nilai, norma dan bentuk keorganisasian tertentu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dalam Febrianty (2013) pasar terbagi menjadi 2 yaitu, pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern adalah pasar yang dibangun pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall*, *Hypermarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Shopping Centre*, dan *Minimarket*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi dengan harga pasti. Pasar

tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan disertai dengan proses tawar menawar.

Pasar dapat membantu membangun masyarakat karena pasar menyangkut semua hal-hal lokal. Pasar-pasar ini mempekerjakan masyarakat setempat dan biasanya menjual produk lokal, sehingga mereka menjaga uang itu dalam ekonomi lokal (Chamhuri, 2013). Oleh karenanya pasar sebagai alat yang sangat berharga untuk meningkatkan masyarakat berpenghasilan rendah, menciptakan lapangan kerja sendiri bagi penjual eceran, merupakan cara penting untuk membantu orang-orang dengan kebutuhan keuangan mereka (Marten, 2010).

Penelitian yang menjelaskan eksistensi pasar tradisional sudah dilakukan peneliti di Indonesia maupun di luar negeri seperti yang dilakukan Suryadarma, *et al.* (2010) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan pasar tradisional melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif diketahui penyebab utama penurunan pasar tradisional tidak oleh supermarket. Sebaliknya, pasar tradisional terganggu dengan masalah intern dan menghadapi persaingan yang semakin pahit dari pedagang kaki lima (PKL). Penelitian serupa juga dilakukan Dewi (2012), hasil penelitiannya pasar tradisional mengalami penurunan eksistensi dikarenakan persaingannya dengan pasar modern.

Penelitian yang mengaitkan modal sosial dengan pasar tradisional juga tercermin dari penelitiannya Syahyuti (2008) yang menjelaskan modal sosial dapat ditumbuhkan secara formal seperti melalui penumbuhan asosiasi pedagang, mengurangi dampak dari bisnis misal berbasis kesukuan, memfasilitasi komunikasi dan informasi yang baik. Penelitian lain menunjukkan pentingnya hubungan sosial untuk kelangsungan hidup usaha mikro pada kondisi dimana pelaku tidak bisa mengandalkan lembaga hukum formal tercermin dalam penelitian Lyon (2000).

Penelitian Fisher (2013) menjelaskan modal sosial menjembatani lebih banyak dimanfaatkan petani daripada modal sosial *linking* dikarenakan tingkat kepercayaan petani kepada pemerintah rendah disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakpercayaan dan kurangnya kepercayaan pada informasi yang diberikan. Modal sosial "Bonding" juga penting dalam mendorong pertukaran pengetahuan di kalangan petani, meskipun hubungan yang terlalu dekat terbukti berpotensi menyebabkan munculnya jaringan eksklusif dan berakibat pada perkembangan ketidakpercayaan. Sedang penelitian sebelumnya menjelaskan saat modal sosial *linking* diperkenalkan tanpa ditanamkan modal sosial *bonding* dan *bridging*, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan organisasi menjadi negatif (Kristof Titeca dan Thomas Vervisch, 2008).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan berupaya menggali lebih dalam modal sosial bagaimana pelaku didalamnya saling berinteraksi dalam modal sosial dan menarik kesimpulan modal sosial yang paling dominan digunakan pelaku sehingga tercipta keberlanjutan Pasar Terapung Lok Baintan melalui jaringan *bonding*, *bridging* dan *linking*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan strategi penelitian Fenomenologi yang dilakukan di Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Peneliti menghabiskan waktu yang panjang (Juli 2014-Juni 2015) di lokasi penelitian. Periode ini cukup untuk membenamkan peneliti ke dalam situasi dan aktivitas pelaku ekonomi di pasar ini. Khususnya dalam kaitannya dengan interaksi sosial dan ekonomi. Peneliti juga memiliki keuntungan dari wawancara dengan bahasa lokal (Banjar) sehingga dengan mudah bisa berkomunikasi dengan subjek penelitian maupun

mengembangkan pemahaman tentang perilaku ekonomi di Pasar Terapung Lok Baintan. Peneliti mengamati bagaimana orang berperilaku, berinteraksi, dan bagaimana keputusan dibuat di pasar ini.

Pertimbangan utama dalam penentuan informan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, bergelut dengan aktivitas Pasar Terapung Lok Baintan cukup lama, perintis koperasi "Tambangan Balarut" yang selama ini menjadi wadah mereka dalam menghadapi kekurangan modal yaitu pengurus dan kelompok atau individu sebagai pemanfaat dari koperasi "Tambangan Balarut". Informan yang terpilih dari hasil seleksi peneliti diharapkan akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada peneliti mengenai aktivitas di Pasar Terapung Lok Baintan. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam tentang nilai-nilai yang bisa menjadi faktor pendorong yang menjadikan Pasar Terapung Lok Baintan bisa bertahan. Informan penunjang yakni dari tokoh masyarakat, pemerintah lokal yang memiliki kepentingan dengan aktivitas di Lok Baintan yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar dan Bappeda Kabupaten Banjar.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terbagi dalam 2 sub bab pembahasan. Pembahasan pertama menyajikan analisis dan sub bab ke dua menyajikan pembahasan terkait Pasar Terapung Lok Baintan dan modal social dalam kaitannya dengan kajian teoritis dan empirik yang disajikan di atas.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan besar penelitian ini, jenis modal sosial manakah yang mendominasi interaksi pelaku di Lok Baintan sehingga pasar ini semakin berkembang, suatu hal bertolak belakang dengan pasar tradisional umumnya. karena sifat ikatan yang kuat antara pelaku pasar yang berasal dari suku Banjar, atau apakah itu juga karena *bridging* dan atau modal sosial *linking*. Bagian ini menyajikan analisis dari tiga jenis modal sosial yang berbeda diperkenalkan pada bagian sebelumnya: modal sosial *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Bagian ini dimulai dengan karakteristik pasar dan pelaku Pasar Terapung Lok Baintan.

HASIL ANALISIS

a. Karakteristik Pasar dan Pelaku Pasar Terapung Lok Baintan

Daerah sekitar kawasan Pasar Terapung Lok Baintan yang berada pada kecamatan Sungai Tabuk merupakan daerah penghasil utama penduduknya adalah hasil pertanian dan perkebunan. Sebagai daerah penghasil hasil pertanian, maka daerah ini memerlukan tempat untuk memasarkan hasil panennya sebagai tempat bertemunya petani dengan pembeli yang memerlukan hasil panen. Peran tersebut ada pada pasar tradisional.

Namun mengingat daerah Lok Baintan dan sekitarnya berada pada daerah pesisir sungai Martapura maka peran pasar tradisional digantikan oleh Pasar Terapung Lok Baintan sebagai pasar hasil pertanian bagi warga sekitar. Pasar Terapung Lok Baintan secara fisik berbeda dengan pasar tradisional umumnya. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Perbedaan Pasar Tradisional Darat dengan Pasar Terapung Lok Baintan

Perbedaan	Pasar Tradisional Darat	Pasar Terapung Lok Baintan
Fisik	Ada bangunan	Tidak ada bangunan
Tampilan	Kumuh, becek	Menarik dan unik sehingga menjadi destinasi wisata
Aktivitas	Pagi s/d siang hari bahkan ada yang 24 jam	Dari terbit matahari s/d jam 8 pagi
Transaksi	Penjual menunggu pembeli yang datang (pasif)	Penjual dan pembeli sama-sama aktif

Sumber: data diolah dari hasil lapang. 2014

Perbedaan ini yang membuat pelaku di Pasar Terapung Lok Baintan sedikit berbeda dengan pasar tradisional kebanyakan. Baik pedagang, pengunjung maupun pembeli untuk sampai di pasar ini bisa menggunakan jalur darat dan jalur sungai. Namun rata-rata dari mereka lebih memilih menggunakan jalur sungai. Memilih jalur sungai artinya harus menggunakan *jukung* dan atau *kelotok* untuk sampai ke tujuannya.



Gambar 1
Aktivitas Pasar-pasar Tradisional Darat yang Ada di Desa Sungai Lulut dan Pasar Terapung Lok Baintan

Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan didominasi para ibu rumah tangga. Hal ini menjadi argumen, pedagang yang berdagang di pasar ini dengan tujuan membantu keluarga memasarkan hasil kebunnya disamping kesibukannya ini tidak mengganggu peran mereka sebagai ibu rumah tangga.

Pedagang yang berdagang di pasar ini terdiri atas 2 kategori: kategori pertama yaitu *Dukuh* (pedagang pengumpul tingkat I) yaitu para pedagang wanita yang berperahu menjual hasil kebunnya sendiri atau hasil kebun tetangganya. Istilah lain dari *dukuh* adalah *penyambang* tingkat pertama (pengumpul barang dalam jumlah yang besar). Kategori kedua yaitu *Penyambangan* (pedagang pengumpul barang tingkat II) sebagai tangan kedua yang membeli barang dagangan dari para *dukuh* untuk dijual kembali baik dijual di Pasar Lok Baintan maupun membawanya lagi ke pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Pembelian dalam jumlah kecil biasanya dilakukan oleh warga sekitar Pasar Terapung. Pengunjung biasanya membeli dalam jumlah yang kecil dan kedatangannya lebih pada untuk berekreasi.

b. Peran *bonding* di Pasar Terapung Lok Baintan

Modal sosial *bonding* adalah ikatan modal sosial antara individu, terkait kesamaan karakteristik demografi, latar belakang dan profesi.

Peran *bonding* di pasar ini mencakup harga pertemanan, mendapat informasi harga, keberadaan dan kualitas barang yang diinginkan, serta calon konsumen, memperkecil biaya transaksi dan terciptanya hubungan langgan dan penguatan tradisi masyarakat berbudaya sungai.

Hubungan *bonding* ada kalanya menyebabkan harga pasar tidak berlaku. Hal ini disebabkan berperannya modal sosial dalam hubungan *bonding* diantara pelaku. Di saat pelaku kekurangan modal atau kekurangan uang maka dengan modal sosial yang terjalin maka kekurangan modal tersebut dapat diatasi. Seperti yang dialami acil Abasiah dan di ceritakan kembali kepada peneliti:

Waktu acil handak batukar barang mencukupi barang jualan acil. Duit ditangan kada cukup. Tapi karena batukar dua langganan jadi hakun ja inya mangurangi harga. Mun lawan urang lain kada mungkin hakun (Wawancara 1 Desember 2014).

(Sewaktu acil mau membeli barang buat mencukupkan barang dagangan sedang uang ditangan tidak mencukupi. namun karena membelinya dari langganan jadi mau saja mangurangi harga. Jika dengan orang lain tidak mungkin mau).

Pernyataan yang disampaikan acil Abasiah menginsyaratkan bahwa adanya modal sosial yang terjalin antara mereka dalam hubungan *bonding* menjadikan sesuatu yang secara konvensional tidak mungkin terjadi, namun dengan hubungan kekerabatan yang terjadi menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harga yang terjadi bukan lagi harga pasar, melainkan "harga pertemanan" yaitu harga yang didapat dari hubungan kekerabatan maupun pertemanan.

Pasar Terapung lok Baintan lahir juga tidak lepas dari budaya sungai yang "dianut" masyarakat di sekitar Pasar Terapung Lok Baintan. bagi masyarakat di sekitar Pasar Terapung Lok Baintan, pasar ini sebagai urat nadi perekonomian. Hubungan yang terlahir sejak adanya pasar ini sampai saat ini masih dipertahankan hingga sekarang yaitu transaksi bepanduk, tukar tambah.

c. Peran *Bridging* dalam Pasar Terapung Lok Baintan

Modal sosial *Bridging* adalah hubungan kerjasama yang menjembatani antara individu atau kelompok yang tidak memiliki persahabatan dekat melainkan terkait dalam hubungan dengan pihak lain yang terbangun secara kolektif membantu pembentukan modal dalam keterlibatan interaksi sosial dan ekonomi.

Hubungan *bridging* pedagang terjalin dengan koperasi Tambangan Balarut, BI Wilayah Kalimantan, dukungan modal dari pihak swasta (XL dan Telkomsel) dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Kompleksitas hubungan *bridging* yang terjalin antara pedagang dengan berbagai pihak membuktikan bahwa kehadiran mereka di pasar ini mendapat perhatian dari berbagai kelompok kepentingan di Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka.

Tergabungnya petani dan pedagang dalam sebuah wadah yang menampung aspirasi mereka seperti koperasi Tambangan Balarut menjadikan tiap anggota mendapatkan manfaat dari hubungan ini. Peran modal sosial *bridging* berupa bantuan modal di luar hubungan *bonding*, jaringan pelanggan yang lebih luas dan mengatasi asimetri information.

Pola hubungan *bridging* pedagang dengan pelaku lain seperti pihak swasta seperti XL dan Telkomserl, perbankan masih terbatas pada

pemberian modal fisik secara *temporary*, belum sampai pada perluasan jaringan hubungan pelanggan. Namun hubungan ini secara tidak langsung berdampak pada semakin semaraknya Pasar Terapung Lok Baintan sehingga pengunjung yang datang merasa betah dan ingin mengulangi kunjungannya di Lok Baintan.

d. Peran *Linking* dalam Pasar Terapung Lok Baintan

Modal sosial *linking* adalah hubungan formal individu dan atau kelompok dengan pengambil kebijakan daerah dan lembaga yang terkait.

Hubungan *linking* juga terjadi pada pasar ini. petani dan pedagang memiliki keterkaitan hubungan *linking* dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar serta Bappeda Kabupaten Banjar. Masing-masing dinas memiliki kepentingan dengan keberadaan Pasar Terapung Lok Baintan.

Peran *linking* antara petani maupun pedagang di sekitar kawasan Pasar Terapung Lok Baintan dengan dinas-dinas yang terkait memberikan peluang pada petani maupun pedagang berupa bantuan modal, jaringan pemasaran, jaringan promosi dan perencanaan pengelolaan kawasan terpadu untuk sektor pariwisata. Bantuan modal yang sudah diberikan kepada petani di Lok Baintan dan desa sekitarnya Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjar berupa bantuan bibit, pupuk sampai pasca panen. Walaupun saat ini bantuan yang diberikan tidak seperti halnya dulu, namun karena mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan dasar-dasar pembekalan sudah didapatkan, maka biarpun saat ini petani di Lok Baintan dan desa sekitarnya belum mendapat bantuan modal lagi secara swadaya mereka sudah bisa mengelola perkebunannya sendiri.

Perluasan pemasaran ke pasar modern sudah coba di diupayakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjar ke pasar modern yang ada di Banjarmasin seperti supermarket Makro. Namun dikarenakan beberapa syarat sulit untuk diikuti petani maupun pedagang, akhirnya kesepakatan itu tidak bisa berjalan hingga sekarang. Pihak makro menginginkan standar tertentu dari produk pertanian yang masuk ke tempat mereka seperti tingkat kematangan supaya bisa bertahan agak lama, *grade* harus sama dan pembayarannya secara konsinyasi (kisaran antara 2 sampai 3 minggu). Kesepakatan ini tidak bisa berjalan mengingat petani di Lok Baintan dan sekitarnya hanya petani kecil (subsisten). Hal ini yang menyebabkan belum ada titik temu antara keduanya.

Lok Baintan sejak dijadikan objek wisata andalan Kalimantan selatan, maka banyak promosi yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga. Namun sangat disayangkan, promosi yang mulai gencar belum diikuti segenar perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Terapung Lok Baintan. sehingga kesan yang muncul adalah sangat dipaksakan. Namun dibalik permasalahan tersebut dikarenakan pasar ini menawarkan kebersahajaan saja, aktivitas jual beli dan suasana yang masih asri maka kekurangan-kekurangan tersebut menjadi tertutupi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa ketiga jenis hubungan (*bonding*, *bridging* dan *linking*) memberikan arti terhadap eksistensi Pasar Terapung Lok Baintan. Peran ketiga jenis hubungan modal sosial terhadap eksistensi Pasar Terapung Lok baintan memang tidak langsung namun melalui naiknya pendapatan petani dan pedagang, perbaikan sarana dan prasarana berimbas pada kenaikan konsumen dan kenaikan jumlah pengunjung yang datang ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Peran *bonding* dan *bridging* semakin memperkuat tradisi masyarakat berbudaya sungai yang sudah ada sejak berdirinya pasar ini. Masyarakat pesisir sungai Martapura yang masih mempertahankan budaya sungai berasal dari suku yang sama sehingga mereka merasa memiliki ikatan. Ikatan ini terangkum dalam ikatan "bubuhan" dan "papadaan" sehingga jika di antara mereka meminta pertolongan, maka pihak yang dimintai tolong akan memberikan bantuan dengan sukarela sesuai apa yang bisa mereka bantu. Bagi mereka menolong orang lain sebagai bentuk pendapatan yang tidak langsung diterima namun akan dinikmati di hari kemudian.

Peran *bonding* dan *bridging* memiliki hubungan yang saling melengkapi. Di saat pelaku ekonomi memerlukan modal maka pelaku ekonomi yang memiliki modal dengan jaminan kepercayaan akan meminjamkan modal kepada pihak yang memerlukan. Tidak ada sanksi tertulis jika ada pihak yang melanggar kepercayaan yang sudah diberikan. Namun ada sanksi sosial yang diterima bagi pihak yang melanggar kesepakatan berupa rasa bersalah, dan sulit mendapat kepercayaan lagi.

Modal sosial ada dalam tiap bentuk hubungan *bonding*, *bridging* dan *linking*. Interaksi masing-masing hubungan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Hal seperti itu pula yang terjadi di pasar ini. Ketiga hubungan modal sosial ini saling berinteraksi dan melengkapi. Wujud nyata dari hubungan ini adalah keberlanjutan Pasar Terapung Lok Baintan dari gempuran ancaman internal dan eksternal.

Namun begitu dari ketiga bentuk hubungan modal sosial (*bonding*, *bridging* dan *linking*) maka hubungan *bridging* yang paling banyak digunakan petani maupun pedagang. Ini tidak lepas dari hubungan *bridging* memungkinkan petani maupun pedagang mendapatkan modal di luar hubungan *bonding* sedangkan modal yang di dapat dari hubungan *linking* masih sulit untuk digunakan petani maupun pedagang yang eksis di Pasar Terapung Lok Baintan. Hal ini berarti temuan penelitian ini selaras dengan temuan Fisher (2013) menjelaskan modal sosial menjembatani lebih banyak dimanfaatkan petani daripada modal sosial *linking* dikarenakan tingkat kepercayaan petani kepada pemerintah rendah disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakpercayaan dan kurangnya kepercayaan pada informasi yang diberikan.

Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan walaupun penggunaan modal sosial *linking* masih rendah, namun jika modal sosial *linking* ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku pasar maka pelaku ekonomi yaitu petani dan pedagang bisa meningkatkan pendapatannya lebih maksimal dan berdampak pada perbaikan ekonomi keluarga. Ini berarti juga modal sosial *linking* diperkenalkan tanpa ditanamkan modal sosial *bonding* dan *bridging*, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan organisasi menjadi negatif (Kristof Titeca dan Thomas Vervisch, 2008). Oleh karenanya penelitian ini merekomendasikan perlunya pelaku pasar memanfaatkan modal sosial *linking* untuk peningkatan pendapatan yang lebih baik.

Peran Pasar Terapung Lok Baintan sebagai pasar pertanian juga menunjukkan bahwasanya pedagang mengandalkan lembaga informal dalam hal mereka kekurangan masalah keuangan dibandingkan lembaga formal. Beberapa hal menjadi argumen mereka mengandalkan lembaga informal di samping

karena lebih mudah dalam proses mendapatkan modal dan bagi mereka berhubungan dengan lembaga formal terlalu rumit menurut ukuran mereka. Apa yang terjadi di Pasar Terapung Lok Baintan seperti yang terjadi di pasar pertanian Ghana dalam penelitian Lyon (2000). Dalam penelitiannya Lyon (2000) menunjukkan pentingnya hubungan sosial untuk kelangsungan hidup usaha mikro pada kondisi dimana pelaku tidak bisa mengandalkan lembaga hukum formal. Hal ini menunjukkan pentingnya modal sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) dalam membentuk pola pembangunan daerah dan peran hubungan pelanggan dalam menyediakan lokasi tertentu dengan benefit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasar Terapung Lok Baintan tetap eksis dengan segala permasalahan melalui interaksi hubungan *bonding*, *bridging* dan *linking*. Meningkatnya eksistensi di pasar ini dikarenakan masih eksisnya pelaku ekonomi di pasar ini melalui hubungan *bonding*, *bridging* dan *linking* yang terjalin. Namun yang menonjol dari 3 bentuk hubungan sosial ini adalah modal sosial *bridging* karena pelaku ekonomi mendapatkan manfaat yang tidak bisa di dapat dari hubungan *bonding* dan belum bisa memanfaatkan modal sosial *linking* dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh petani dan pedagang.

Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan walaupun penggunaan modal sosial *linking* masih rendah, namun jika modal sosial *linking* ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku pasar maka pelaku ekonomi yaitu petani dan pedagang bisa meningkatkan pendapatannya lebih maksimal dan berdampak pada perbaikan ekonomi keluarga. Oleh karenanya penelitian ini merekomendasikan perlunya perlunya pihak ketiga sebagai pihak yang menjembatani keterbatasan pelaku ekonomi di kawasan Pasar Terapung Lok Baintan dengan pihak pasar modern sehingga jangkauan pemasaran tidak hanya terbatas pada pasar tradisional. Perluasan jaringan pemasaran diharapkan akan membuat pendapatan pelaku di Pasar Terapung Lok Baintan lebih meningkat lagi dan berimbas pada perbaikan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P., (1986). The forms of social capital. In: Baron, S., Field, J., Schuller, T.(Eds.), Social Capital e Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Chamhuri, Norshamliza and Peter J. Batt. (2013). Exploring the Factors Influencing Consumers' Choice of Retail Store When Purchasing Fresh Meat in Malaysia, International Food and Agribusiness Management Review, 16 (3): 99-122
- Chourmain, Imam dan Prihatin. (1994). Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Depdikbud
- Dewi, Isnaini, P, Dwi E. Kusrini, dan Irhamah. (2012). Pemodelan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Surabaya Selatan Terkait Keberadaan Supermarket, Hypermarket, dan Minimarket. Jurnal Sains Dan Seni Its, 1 (1): 141-146
- Diez, S. G. (2013). Measurement of Social Capital with the Help of Time Use Surveys. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 72(0): 23–31.
- Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan. (2010). Analisa Pasar Wisata Kalimantan Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan

- Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. (2013). Hidden Beauty Pesona pariwisata Kab. Banjar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan
- Dufhuesa, Thomas, Gertrud Buchenriedera, Hoang Dinh Quoca dan Nuchanata Munkung. (2011). Social Capital and Loan Repayment Performance in Southeast Asia. *The Journal of Socio-Economics*, 40: 679– 691
- Febrianty, Dessy. (2013). Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Study Case Beringharjo Market, Jogjakarta. *Journal of economics and Sustainable Development*, 4(5):115-124
- Field, J. (2003). *Social Capital*. London: Routledge.
- Fisher, Rhiannon. (2013). A gentleman's handshake': The role of social capital and trust in transforming information into usable knowledge. *Journal of Rural Studies*. 31: 13-22
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and die Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust (Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran)*. Yogyakarta: Qalam.
- Groenewald, Sytske F. (2013). Trust and Livelihood Adaptation: Evidence From Rural Mexico. *Agric Hum Values*, 30:41–55
- Heenan, Deirdre. (2010). Social Capital and Older People in Farming Communities. *Journal of Aging Studies*, 24: 40–46
- Leksono S, (2009). *Kemunduran Kinerja Pedagang Pasar Tradisional pada Era Pasar Modern di Pasar Besar Malang: Perspektif Pedagang selaku Aktor yang perlu Diberdayakan oleh Misi Pasar besar Malang sebagai Pasar Tradisional*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Lyon, F. (2000). Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana. *World Development*, 28(4): 663–681.
- Marten, M. (2010). Benefits of Being a Flea Market Vendor. Retrieved August 18, 2012 from <http://www.helium.com/items/1584386-flea-market-vendor>
- McElroy, M. W., Jorna, R. J., & Engelen, J. Van. (2006). Rethinking social capital theory: a knowledge management perspective. *Journal of Knowledge Management*, 10(5), 124–136. doi:10.1108/13673270610691233
- Mulunga, Selma Ndiwakalunga & Rashad Yazdanifard. (2014). Review of Social Inclusion, Social Cohesion and Social Capital in Modern Organization. *Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management*, 14 (3): 1-7
- Murshid, K.A.S (2011). *Traditional Market Institutions and Complex Exchange*. CPD-CMI working paper (1)
- Putnam, R.(1995). The Prosperous Community Social Capital and Public Life. *American prospec* 13: 35-42 dalam *The world Bank*. 1998 :5-7
- Putnam, R., (2000). *Bowling Alone e The Collapse and Revival of the American Community*. New York: Simon & Schuster

- Syahyuti. (2008). Peran Modal Sosial dalam Perdagangan Hasil Pertanian, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26 (1): 32-43
- Suryadarma, D., A. Paesoro, S. B. Akhmadi, M. Rosfadhila and A. Suryahadi. (2010). Traditional food traders in developing countries and completion from supermarkets: Evidence from Indonesia. *Food Policy*, 35(1): 79-86.
- Titeca, Kristof and Vervisch, Thomas. (2008). The Dynamics of Social Capital and Community Associations in Uganda: Linking Capital and its Consequences. *World Development*, 36 (11): 2205-2222
- Uzuegbunam, F. O. (2012). Sustainable Development for Traditional Market-Places in South- Eastern Nigeria: A Case Study of Nkwo-Ozuluogu Market Oraifite , Anambra State Nigeria.
- Yustika, Ahmad Erani. (2010). *Ekonomi Kelembagaan. Definisi, Teori dan Strategi*, Malang: Bayu Media

APAKAH MIGRASI MERUPAKAN SALAH SATU CARA KELUAR DARI KEMISKINAN ?

Rini Setyastuti
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail: rsetyastuti@gmail.com

ABSTRACT

In developing countries , most people still live in rural areas and are primarily engage in low productivity traditional activities. In the labor economics, labors will do migration if they believe they can get opportunities to increase their income. This paper tries to explore poverty condition and a pathway out of the poverty namely migration, We use a panel data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) for 2000 and 2007, to show whether migration is a pathway out of poverty that was most successful over this period. Using Ordinary Least Square (OLS) and Logistic Regression, we find that migration is not the only one pathway out of poverty over this period , people in rural non farm enterprises is an important pathway out of rural poverty. Nevertheless there are the most of rural agricultural poor that exit poverty still do so while remaining rural and agricultural.

Key word : migration, agriculture, poverty, per capita expenditure, IFLS, household

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan banyak dijumpai di hampir seluruh negara di dunia dan menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Bappenas (2000) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi . Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu : (1) aspek primer, yaitu berupa miskin asset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan ketrampilan, dan (2) aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan ekonomi (Arsyad, 2010 : 299).

Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi, (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat (Arsyad, 2010:300).

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang adalah menurunnya angka kemiskinan. Karakteristik kemiskinan berbeda antar negara, tetapi ada pola umum kemiskinan yang terjadi di setiap negara :(1)biasanya terjadi di pedesaan dengan mata pencaharian utama berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional, (2) umumnya diderita oleh kaum wanita, dan (3) pada umumnya adalah penduduk pribumi di suatu negara.

Seperti pola umum di negara lain mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia berdomisili di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan distribusi penduduk miskin menurut

tempat tinggal yaitu di perkotaan ataupun pedesaan , sedangkan pada tabel 2 ditunjukkan distribusi penduduk miskin menurut sektor ekonomi dan daerah .

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tempat Tinggal

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,20
2000	12,31	26,43	37,87	9,79	24,84	18,41
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
2012	10,51	18,08	28,09	8,60	14,70	11,66
2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37

Sumber : BPS (www.bps.go.id)

Tabel 2
Distribusi Keluarga Miskin Menurut Sektor dan Daerah

Sektor usaha	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
- Pertanian	31,11	69,09
- Kehutanan	0,23	1,34
- Perikanan	1,48	2,23
- Pertambangan	1,25	0,49
- Industri	12,17	4,98
- Listrik	0,10	0,02
- Konstruksi	9,67	3,63
- Perdagangan	14,06	5,00
- Transportasi	8,94	2,73
- Keuangan	0,69	0,08
- Jasa-jasa	8,14	2,40
- Lainnya	0,04	0,06

Sumber : BPS (www.bps.go.id)

Data menunjukkan bahwa penduduk yang sumber pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan dengan penduduk yang sumber pendapatan utamanya dari sektor-sektor lainnya. Beberapa kemungkinan alasan mengapa kemiskinan relatif lebih banyak di pedesaan adalah petani Indonesia masih didominasi oleh petani skala kecil, rendahnya tingkat pendidikan petani, dan rendahnya aksesibilitas petani terhadap modal.

Beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banyaknya rumah tangga miskin di Indonesia, tetapi dengan melihat masih banyaknya penduduk yang masuk dalam kriteria miskin, telah menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu jalan keluar untuk lepas dari kondisi kemiskinan adalah meningkatkan penghasilan keluarga . Penghasilan rumah

tangga (*household income*) sangat mempengaruhi tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengeluaran konsumsinya. Meskipun hubungan tersebut tidak berbanding lurus secara proporsional dan tetap, namun setidaknya kecenderungan itu memang terjadi.

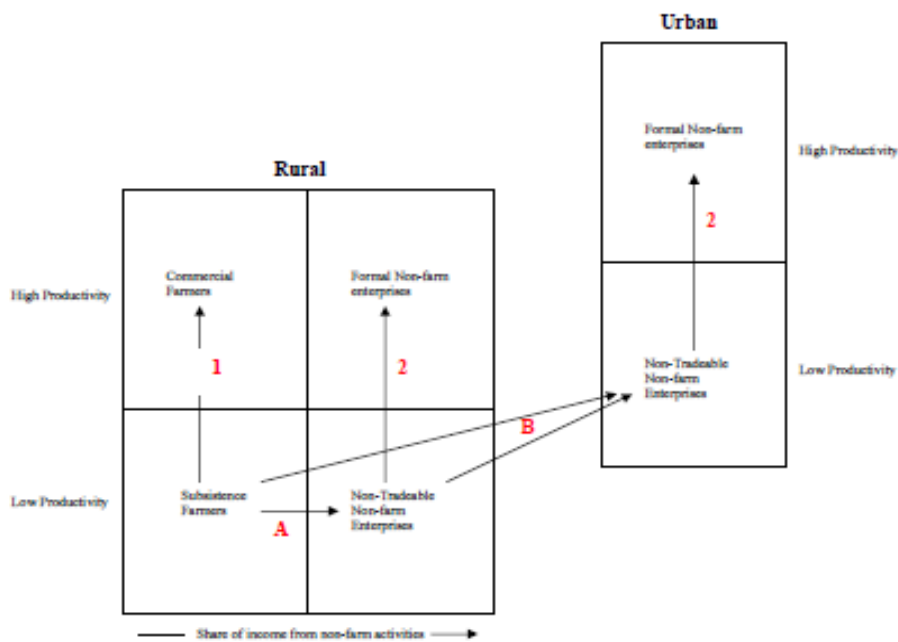
Ada beberapa cara yang ditempuh rumah tangga dalam meningkatkan penghasilannya, antara lain dengan cara : peningkatan produktivitas di pedesaan, baik peningkatan di sektor pertanian ataupun non-pertanian, atau dengan melakukan migrasi (dari desa ke kota, kota ke desa, sektor satu ke sektor lainnya, dan pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya). Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan – apakah migrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu cara yang dilakukan rumah tangga di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan keluarganya dan keluar dari kemiskinan.

TINJAUAN TEORI

Seperti salah satu dari pembahasan Lewis (1954) (dalam Mc.Culloch et al (2007)) dalam ekonomi pembangunan adalah pertanyaan mengenai “transformasi struktural” alamiah yang terjadi di negara yang sedang membangun dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan menurunnya kemiskinan dalam jangka panjang. Di bawah ini ditunjukkan gambar suatu kerangka kerja yang sederhana bagaimana transformasi menjelaskan penurunan angka kemiskinan. Ada dua jalur keluar dari kemiskinan, pertama adalah perpindahan dari usaha pertanian yang produktivitasnya rendah ke usaha pertanian yang produktivitasnya tinggi (jalur 1). Ini termasuk baik intensifikasi dengan melalui peningkatan produktivitas tanaman tradisional maupun diversifikasi ke dalam tanaman yang mempunyai nilai lebih tinggi apakah itu makanan ataupun non-makanan. Jalur ini juga termasuk mereka yang keluar dari kemiskinan dengan mendapatkan upah yang lebih baik dikarenakan sektor pertanian komersial yang produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Dengan demikian tetap bertahan di sektor pertanian tidak berarti bertahan sebagai petani yang bekerja untuk dirinya sendiri.

Kedua, beberapa individu keluar dari kategori miskin karena meningkatnya produktivitas dan profitabilitas pada pekerjaan non-pertanian, atau dengan menemukan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (seringkali lebih formal) dan dimiliki orang lain (jalur 2). Kedua jalur tersebut dapat diterapkan baik untuk aktivitas *non-farm* baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Ada dua “fase transisi” yang kemungkinan dilalui oleh individu dalam membebaskan dirinya dari kemiskinan. Yang pertama adalah bergeser dari kegiatan pertanian subsisten ke perdagangan maupun manufaktur, seperti jasa-jasa (jalur A). Ini terkait dengan pergeseran sektoral dalam jangka panjang dari sektor pertanian ke non pertanian. Sama halnya dengan migrasi dari pedesaan ke perkotaan, di mana dari usaha pertanian yang produktivitasnya rendah dan perdagangan, manufaktur dan jasa-jasa, yang berhubungan dengan pergeseran lokasi aktivitas ekonomi selama transformasi struktural (transisi jalur B).



Sumber : McCulloch, et al (2007:3)

Gambar 1.
Jalur Keluar dari Kemiskinan

Studi Empiris Terkait

McCulloch et al (2007), menggunakan data Susenas dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan IFLS tahun 1993 dan 2000 untuk melihat jalur mana yang dipilih oleh petani miskin untuk keluar dari kriteria kemiskinannya. Dengan menggunakan data kriteria miskin dari BPS dan menggunakan alat analisis regresi OLS dan logistik, ditemukan bahwa petani keluar dari kemiskinannya menggunakan jalur peningkatan usaha non pertanian yang ada di desanya, dan juga ditemukan bahwa banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan meskipun mereka tetap mempertahankan matapencaharian mereka sebagai petani.

Duclos, et al (2003) meneliti tentang perbandingan kemiskinan multidimensi dengan menggunakan berbagai macam indikator. Penelitian ini menurunkan distribusi sampling variasi estimator kemiskinan multidimensi yang bervariasi. Hasilnya digambarkan menggunakan data berbagai negara-negara berkembang.

Jalan, Jyotsna dan Martin Ravallion (1998) meneliti tentang faktor penentu perbedaan kemiskinan sementara dan kronis. Jalan mendekomposisi kemiskinan rumah tangga yang diukur ke dalam komponen sementara ataupun kronis dan menggunakan estimator kuantil bersyarat yang disensor untuk mencari faktor penentu rumah tangga maupun geografis untuk kedua aspek kemiskinan menggunakan panel data untuk setelah reformasi pedesaan di China. Ditemukan bahwa rata-rata kekayaan rumah tangga merupakan faktor penentu kedua kemiskinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan adalah data *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) tahun 2000 dan 2007 (IFLS3 dan IFLS4). Data IFLS merupakan data yang terlengkap dan representatif dari studi longitudinal yang mencakup 13 dari 27 propinsi di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa IFLS merupakan sumber data yang sangat komplit. Variabel yang digunakan meliputi :

Y : pendapatan riil (dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan)

Karakteristik individu (kepala rumah tangga) meliputi :

Age : umur

WH : jam kerja per bulan

WI : pendapatan upah (dummy : apakah responden menerima penghasilan dalam bentuk upah))

Educ : tahun sekolah

Karakteristik Rumah Tangga meliputi:

HHsize: Jumlah anggota keluarga

Numchild : jumlah anak

Nummen : jumlah laki-laki dalam keluarga

Geografi :

Geog : set variabel geografi (provinsi)

Sector:

Sector : set variabel sektor ekonomi

Deskripsi Data

Data yang digunakan adalah data dari IFLS3 dan IFLS4, berikut adalah deskripsi data yang digunakan dalam penelitian ini. Data pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan, dan dirata-rata sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Dapat dilihat di tabel 3, dalam tabel ini ditunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2000 ke 2007. Untuk 20% responden termiskin (kuantil 1) peningkatannya lebih dari dua kali lipat pengeluaran di tahun 2000, demikian juga untuk kuantil yang lainnya.

Tabel 3
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga dan Karakteristik RumahTangga

Variabel	Tahun 2000		Tahun 2007	
	Rata-rata (Rupiah)	Standar error	Rata-rata (Rupiah)	Standar error
Kuantil 1(termiskin)	264.619,6	75.986,87	605.162	167.498
Kuantil 2	466.510,5	53.545,13	1.045.918	113.024
Kuantil 3	673.752,4	69.931,16	1.483.466	142.720
Kuantil 4	1.007.650	135.989,1	2.154.090	269.820
Kuantil 5	2.172.531	896.751,8	4.603.050	2.489.382
Karakteristik Rumah Tangga				
Pendidikan Kepala Rumah Tangga (dalam tahun)	6,577	4,651	7,381	4,515

Umur Kepala Rumah Tangga	45,346	14,900	44,283	15,358
Jumlah Anggota Rumah Tangga	5,408	2,678	6,383	2,897
Jumlah Anak	1,826	1,810	1,578	1,768

Sumber : Hasil Perhitungan, tidak dilampirkan

Dari data karakteristik rumah tangga, ditunjukkan bahwa rata-rata pendidikan kepala rumah tangga juga meningkat meskipun peningkatannya tidak terlalu besar yaitu dari 6 tahun menjadi 7 tahun. Demikian juga untuk jumlah anggota keluarga.

Data kemiskinan dalam hal ini mengacu pada definisi kemiskinan relatif, dengan alasan bahwa tidak tersedia data secara komplit mengenai garis kemiskinan absolut di setiap daerah (daya beli setiap daerah bervariasi). Dengan demikian untuk mengatasinya digunakan kriteria miskin dengan 20% penduduk dengan pendapatan terendah (*bottom twenty*).

Strategi Empirik

Untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan dalam tulisan ini akan digunakan beberapa model ekonometri dengan data *cross-section* tahun 2000 dan 2007 maupun data panel untuk melihat dinamika peningkatan pendapatan keluarga 2000-2007. Model diambil dari McCulloch, at .al(2007) dengan perubahan pada beberapa variabelnya.

Model 1. Cross Sectional Poverty Logit Regression tahun 2000 dan 2007

$$Poor = \alpha_0 + \alpha_1 Age + \alpha_2 Age^2 + \alpha_3 Sex + \alpha_4 WH + \alpha_5 WI + \alpha_6 Educ + \alpha_7 HHSz + \alpha_8 Numchid + \alpha_9 Nummen + \alpha_{10} Geog + \alpha_{11} Sector + \mu$$

Model 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Pendapatan (2000-2007)

$$d \ln y = \vartheta_0 + \vartheta_1 Age + \vartheta_2 Age^2 + \vartheta_3 Sex + \vartheta_4 WH + \vartheta_5 dWH + \vartheta_6 WID + \vartheta_7 Educ + \vartheta_8 HHSz + \vartheta_9 dHHSz + \vartheta_{10} Numchid + \vartheta_{11} dNumchid + \vartheta_{12} Nummen + \vartheta_{13} dNummen + \vartheta_{14} dGeog + \vartheta_{15} dSector + \sigma$$

Model 3. Dinamika Kemiskinan : Model Regresi Logit (keluar dan masuk kategori miskin (2000-2007))

$$exit = \delta_0 + \delta_1 \ln y_{2000} + \delta_2 urban + \delta_3 move\ to\ rural + \delta_4 move\ to\ urban + \delta_5 stay\ non - farm + \delta_6 move\ to\ non - farm + \delta_7 move\ to\ farm + \epsilon$$

$$entry = \theta_0 + \theta_1 \ln y_{2000} + \theta_2 urban + \theta_3 move\ to\ rural + \theta_4 move\ to\ urban + \theta_5 stay\ non - farm + \theta_6 move\ to\ non - farm + \theta_7 move\ to\ farm + \epsilon$$

Persamaan dianalisis menggunakan analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*) dan Regresi Logistik ,dengan demikian parameter untuk masing-masing variabel dapat diestimasi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan estimasi persamaan regresi didapatkan hasil seperti dalam tabel 4 berikut ini. Dari hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai F statistik dari seluruh persamaan yang diestimasi menunjukkan nilai yang relatif besar. Nilai probabilitas value dari nilai F statistik mengindikasikan bahwa model regresi yang diestimasi dapat dikatakan baik karena terbukti bahwa variabel dependen yang digunakan (kriteria miskin, perubahan pengeluaran per kapita, keluar dari kriteria miskin , dan masuk ke kriteria miskin) dapat dijelaskan oleh set variabel independennya

Hasil estimasi regresi logistik model 1, yang ditunjukkan oleh tabel 5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2000 dan 2007, penduduk yang masuk dalam kriteria miskin dipengaruhi oleh faktor usia, jam kerja per bulan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, domisili di perkotaan atau pedesaan. Dari tabel ditunjukkan bahwa penduduk dengan usia yang semakin dewasa, probabilitas untuk miskin menjadi lebih kecil, tetapi pada umur tertentu (ditunjukkan dengan variabel umur dikuadratkan) maka probabilitas untuk jatuh miskin menjadi relatif besar. Semakin besar jam kerja dan semakin tinggi pendidikannya, probabilitas untuk menjadi miskin relatif kecil. Penduduk yang tinggal di kota, probabilitas menjadi miskin relatif kecil dibanding penduduk yang tinggal di pedesaan. Variabel geografi (provinsi) mayoritas signifikan (kecuali Bali), artinya ada perbedaan probabilitas untuk menjadi miskin dilihat dari asal propinsinya. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa dibanding penduduk yang tinggal di provinsi DKI, probabilitas untuk menjadi miskin di daerah relatif lebih besar.

Jika dilihat dari variabel sektor ekonomi, apat ditunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor non pertanian, seperti manufaktur, perdagangan besar dan jasa (untuk tahun 2007 ditambah sektor keuangan dan transportasi) mempunyai probabilitas yang relatif kecil untuk menjadi miskin dibanding dengan penduduk yang hidup dari sektor pertanian.

Tabel 4
Hasil Estimasi Persamaan Regresi Logistik

Variabel Dependen : Dummy Rumah Tangga Miskin=1				
Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan Regresi Logistik			
	2000	2000	2007	2007
Umur KK	-0.1017** (0.0142)	-0.0900** (0.0143)	0.1369** (0.0124)	-0.1254** (0.0126)
Umur ²	0.00103** (0.00014)	0.0009** (0.00001)	0.00132** (0.0001)	0.00123** (0.0001)
Jam kerja per bulan	-0.0013** (0.0003)	-0.00089* (0.0003)	-0.0027** (0.0003)	0.0018** (0.0003)
Dummy menerima upah	-0.0142 (0.1132)	-0.0070** (0.113)	-0.0976 (0.121)	-0.0916 (0.121)
Pendidikan KK	-0.1509** (0.0102)	0.1508** (0.010)	-0.152** (0.0228)	-0.1700** (0.0098)
Jumlah anggota keluarga	-0.2905** (0.0291)	-0.2739** (0.0292)	0.152** (0.224)	-0.134** (0.022)
Jumlah anak < 5 tahun	0.4779 (0.2104)	0.476* (0.212)	0.09677 (0.089)	0.0780 (0.090)
Jumlah Anak 5-10 tahun	0.136 (0.201)	0.0746 (0.201)	-0.246 (0.087)	-0.0254 (0.084)
Jumlah laki-laki dalam keluarga	0.0405 (0.044)	0.0351 (0.0447)	0.8721** (0.0383)	-0.0778* (0.038)
Urban	-0.214** (0.089)	-0.2586** (0.0864)	-0.3933** (0.0760)	-0.347** (0.074)
Sumatera Utara	1.0759** (0.296)	1.037** (0.297)	0.6941** (0.2006)	0.674** (0.201)
Sumatera Barat	0.9133** (0.324)	0.9077** (0.324)	0.694** (0.223)	-0.0541** (0.274)

Sumatera Selatan	1.476** (0.293)	1.405** (0.293)	0.8787** (0.293)	0.826** (0.200)
Lampung	1.441** (0.292)	1.463** (0.292)	0.8839** (0.2002)	0.823** (0.201)
Jawa Barat	0.989** (0.264)	0.987** (0.264)	1.244** (0.1597)	1.235** (0.160)
Jawa Tengah	1.493** (0.265)	1.515** (0.265)	1.311** (0.265)	1.346** (0.165)
DIY	1.504** (0.283)	1.500** (0.283)	1.504** (0.283)	1.323** (0.197)
Jawa Timur	1.371** (0.264)	1.396** (0.264)	1.425** (0.159)	1.452** (0.160)
Bali	0.4977 (0.312)	0.5369 (0.312)	0.241 (0.216)	0.3687* (0.217)
Nusa Tenggara Barat	1.793** (0.276)	1.796** (0.276)	2.047** (0.172)	2,031** (0.0277)
Kalimantan Selatan	1.115** (0.293)	1.176** (0.293)	1.160** (0.214)	0.147** (0.216)
Sulawesi Selatan	1.127** (0.298)	1.079** (0.298)	0.8396** (0.208)	0.803** (0.209.)
Non pertanian	-0.457** (0.085)		-0.507** (0.0766)	
Pertambangan		-0.4588 (0.371)		-0.3387** (0.304)
Manufaktur		-0.216* (0.0943)		-0,4457** (0.0878)
Listrik		-1.1589 (1.037)		-0.646 (0.554)
Konstruksi		0.1304 (0.124)		-0.129 (0.116)
Perdagangan Besar		-0.568** (0.900)		0.820** (0.083)
Transportasi		-0.228 (0.149)		0.431** (0.088)
Jasa sosial		-0.339** (0.0964)		- 1.1510.682* * (0.088)
Keuangan		-1.693** (1.018)		1.543** (0.0475)
Lainnya				0.153 (0.643)g5
Constanta	2.145** (0.4188)	1.7516** (0.0784)	3.554** (0.335)	3.16595** (0.336)
Observasi	7267	7267	9630	9630

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya *standar error*,

**signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya perubahan pendapatan dari tahun 2000 sampai tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5 merupakan hasil estimasi persamaan model 2. Seperti hasil pada estimasi model 1, dalam hasil analisis persamaan regresi ditunjukkan pula bahwa perubahan pendapatan per kapita penduduk dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh besarnya jam kerja per bulan (tahun 2000), perubahan jam kerja per bulan (2000-2007), umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, perubahan jumlah anggota keluarga, dan domisili di perkotaan. Untuk pengeluaran mula-mula (tahun 2000) menunjukkan koefisien yang negatif, ini dapat diartikan bahwa semakin sejahtera seseorang maka tambahan pengeluarannya relatif kecil (secara proporsional) dibandingkan dengan orang yang tingkat pengeluarannya lebih rendah.

Variabel provinsi mayoritas tidak mempunyai nilai koefisien yang berarti, sehingga dapat dikatakan bahwa tempat tinggal penduduk tidak menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan perubahan pengeluaran per kapitanya. Dari hasil regresi ini juga ditunjukkan bahwa penduduk yang melakukan migrasi ke pekerjaan dari pertanian ke non pertanian menghasilkan perubahan pendapatan yang relatif lebih besar dibanding penduduk yang tidak melakukan pindah pekerjaan. Di samping itu juga ditunjukkan bahwa masyarakat yang pindah dari propinsi asal ke propinsi lainnya mendapatkan perubahan tingkat pengeluaran per kapita yang semakin besar.

Tabel 5
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Variabel Dependen : Perubahan Pengeluaran per Kapita 2000-2007				
Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan OLS			
	1	2	3	4
Pengeluaran 2000 (log)	0.641** (0.017)	-0.392** (0.094)	-0.651** (0.017)	-0.405** (0.094)
Umur KK	0.00114** (0.0049)	0.011* (0.0049)	0.0103* (0.005)	0.010** (0.004)
Umur ²	-0.00015** (0.00004)	-0.00015** (0.00004)	-0.00014** (0.00004)	-0.0001** (0.00004)
Jam kerja per bulan	0.00042** (0.00011)	0.000422** (0.00011)	0.00035** (0.0001)	0.0003** (0.0001)
Perubahan jam kerja	0.00035** (0.00008)	0.000349** (0.00008)	0.0003** (0.00008)	0.0003** (0.00008)
Dummy menerima upah	-0.0292 (0.0353)	-0.030 (0.0354)	-0.0247 (0.035)	-0.026 (0.0353)
Pendidikan KK	0.0238** (0.003)	0.0240** (0.003)	0.022** (0.003)	0.0228** (0.003)
Jumlah anggota keluarga	0.0283** (0.007)	0.0279** (0.007)	0.0255** (0.007)	0.0252** (0.007)
Perubahan anggota keluarga	0.0784** (0.0116)	0.0795** (0.011)	0.0774** (0.116)	0.0784 (0.011)
Jumlah anak < 5 tahun	-0.112 (0.0756)	-0.111 (0.075)	-0.100 (0.0755)	-0.100 (0.0755)
Jumlah Anak 5-10 tahun	-0.0628 (0.0577)	-0.0635 (0.0577)	-0.064 (0.0577)	-0.065 (0.0576)

Jumlah laki-laki dalam keluarga	-0.0132 (0.011)	-0.0129 (0.0112)	-0.010 (0.011)	-0.010 (0.011)
Perubahan jumlah laki-laki	-0.00011 (0.017)	0.00056 (0.017)	0.002 (0.017)	0.0032 (0.017)
Urban	0.0766** (0.029)	0.0767** (0.0294)	-0.0708* (0.0295)	0.070* (0.0295)
Sumatera Utara	0.0193 (0.102)	0.0167** (0.1024)	0.033 (0.102)	0.030 (0.102)
Sumatera Barat	0.0675 (0.110)	0.0678 (0.1099)	0.0844 (0.110)	0.0845 (0.110)
Sumatera Selatan	-0.060 (0.104)	-0.0696 (0.104)	-0.060 (0.103)	-0.0699 (0.104)
Lampung	-0.0168 (0.103)	-0.0225 (0.1038)	-0.0213 (0.103)	-0.027 (0.103)
Jawa Barat	-0.299** (0.104)	-0.297** (0.104)	-0.300 (0.104)	-0.298 (0.104)
Jawa Tengah	-0.136 (0.099)	-0.138 (0.099)	-0.138 (0.099)	-0.141 (0.099)
DIY	-0.051** (0.104)	-0.0525 (0.104)	-0.044 (0.104)	-0.045 (0.104)
Jawa Timur	-0.165 (0.099)	-0.166 (0.099)	-0.163 (0.099)	-0.165 (0.099)
Bali	0.122 (0.103)	-0.123 (0.103)	0.117 (0.103)	0.118 (0.103)
Nusa Tenggara Barat	-0.350 (0.103)	-0.355** (0.103)	-0.344** (0.103)	-0.350** (0.103)
Kalimantan Selatan	0.050 (0.102)	0.0504 (0.102)	0.055 (0.1027)	0.0544 (0.102)
Sulawesi Selatan	-0.007 (0.104)	-0.005 (0.104)	0.00007 (0.104)	0.001 (0.104)
Pertambangan			-0.219 (0.121)	-0.222 (0.121)
Manufaktur			-0.0007 (0.0311)	-0.0002 (0.031)
Listrik			0.0314 (0.511)	0.023 (0.5113)
Konstruksi			-0.0556 (0.048)	-0.053 (0.048)
Perdagangan Besar			0.084** (0.027)	0.084 (0.027)
Transportasi			-0.007 (0.057)	-0.0004 (0.057)
Jasa sosial			0.0626 (0.031)	0.0633* (0.0318)
Keuangan			0.412* (0.209)	0.396 (0.2095)
Pindah ke propinsi lain	-0.316** (0.0577)	3.109* (1.307)	-0.316** (0.058)	3.00* (91.306)
Pindah ke kabupaten lain	-0.0804 (0.041)	-0.415 (0.581)	-0.0799 (0.041)	-0.401 (0.580)

Pindah ke kecamatan lain	-0.002 (0.028)	0.412 (0.509)	-0.0045 (0.0287)	0.459 (0.509)
Pindah ke sektor non pertanian	0.114** (0.026)	0.1132** (0.026)	0.1031** (0.264)	0.1016** (0.026)
Pindah provinsi * pengeluaran mula-mula		-0.254** (0.097)		-0.246* (0.096)
Pindah kabupaten * pengeluaran mula-mula		0.0258 (0.0437)		0.0247 (0.043)
Pindah kecamatan* pengeluaran mula-mula		-0.0317 (0.038)		-0.0354 (0.038)
Constanta	9.253** (0.264)	5.894** (0.127)	2.145** (0.4188)	12.585** (0.059)
Nilai R ²	0.388	0.389	0.391	0.392
Observasi	2652	2652	2652	2652

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya standar error, **signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

Di bawah ini akan disajikan hasil regresi ancova mengenai perubahan pengeluaran per kapita antar propinsi. Dari hasil nilai koefisien yang negatif semua menunjukkan bahwa untuk ke duabelas propinsi mempunyai perubahan pengeluaran per kapita yang relatif lebih rendah dibanding penduduk yang tinggal di propinsi DKI. Di samping itu pengeluaran mula-mula di tahun 2000 juga berpengaruh terhadap besarnya perubahan pengeluaran.

Tabel 6
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Variabel Dependen : Perubahan Pengeluaran per Kapita 2000-2007	
Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan Regresi
Pengeluaran tahun2000 (dalam log)	-0.477** (0.0086)
Sumatera Utara	-0.1435** (0.0348)
Sumatera Barat	-0.0664** (0.0374)
Sumatera Selatan	-0.1334** (0.037)
Lampung	-01614** (0.039)
Jawa Barat	-0.316** (0.028)
Jawa Tengah	-0.339** (0.029)
DIY	-0.2777** (0.035)
Jawa Timur	-0.393** (0.029)
Bali	-01224**

	(0.037)
Nusa Tenggara Barat	-0.4799** (0.034)
Kalimantan Selatan	-0.156** (0.037)
Sulawesi Selatan	-0.191** (0.037)
Constanta	7.474** (0.123)
F	246.72
R ²	0.271
Observasi	8595

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya standar error,
**signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

Dari hasil estimasi persamaan model 3 ditunjukkan pada tabel 7 dan 8, Dari penduduk yang keluar dari kriteria miskin di tahun 2007 adalah penduduk yang tetap tinggal di perkotaan. Dari penduduk yang pindah ke kota maupun pindah ke desa tidak terdeteksi bahwa mereka akan dapat keluar dari kriteria miskin. Demikian juga penduduk yang tetap menggeluti pekerjaan awalnya tidak terbukti mempunyai peluang yang berbeda untuk keluar dari kemiskinannya.

Untuk kriteria menjadi penduduk miskin, tidak dapat dibuktikan bahwa pergeseran mata pencaharian ataupun tempat tinggal berpengaruh membuat penduduk menjadi miskin. Dari hasil estimasi dengan menggunakan model secara utuh (variabel independen yang lengkap), dapat ditunjukkan bahwa untuk keluar dari kemiskinan, faktor yang berperan adalah jumlah laki-laki yang ada di rumah tangga dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Semakin banya jumlah laki-laki produktif di dalam rumah tangga, maka probabilitas untuk keluar dari kemiskinan menjadi relatif lebih besar. Orang yang hidup di kota, probabilitas keluar dari kemiskinan menjadi semakin besar dibanding orang yang tinggal di desa.

Dari persamaan kedua (masuk ke kriteria miskin), dapat dijelaskan bahwa penduduk yang usianya semakin dewasa (semakin produktif) probabilitas untuk menjadi miskin relatif kecil, sampai pada usia tertentu kondisi ini akan berbalik karena semakin tua (tidak produktif), probabilitas untuk menjadi miskin menjadi semakin besar. Penduduk yang pendidikannya relatif lebih tinggi akan semakin kecil probabilitasnya untuk menjadi miskin. Demikian juga halnya untuk penduduk kota, probabilitas menjadi miskin relatif lebih kecil dibanding penduduk yang tinggal di desa.

Tabel 7
Hasil Estimasi Persamaan Regresi Logistik

Variabel Dependen : Keluar dari kemiskinan(exit)	
Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan Regresi Logistik
Pengeluaran tahun2000	-2.335** (0.117)
Tetap tinggal di kota	-0.4707* (0.206)
Pindah ke desa	0.0237

	(0.440)
Pindah ke sektor lain	-0.082 (0.137)
Constanta	28.615** (1.511)
Observasi	3537

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya standar error,

**signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

Tabel 8
Hasil Estimasi Persamaan Regresi Logistik

Variabel Dependen : Masuk ke KriteriaMiskin(entry)	
Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan Regresi Logistik
	2000
Pengeluaran tahun2000	0.1803* (0.0705)
Tetap tinggal di kota	0.2364 (01986)
Pindah ke desa	-0.707 (0.501)
Pindah ke sektor lain	-0.0873 (0.108)
Constanta	-4.342** (0.953)
Observasi	3537

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya standar error,

**signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

Tabel9
Hasil Estimasi Persamaan Regresi Logistik

Variabel Independen	Hasil estimasi Persamaan dengan Regresi Logistik	
	exit	Entry
Pengeluaran tahun 2000	-3.137** (0.168)	0.455** (0.0911)
Umur KK	0.0301 (0.029)	-0.049* (0.024)
Umur ²	-0.0004 (0.0002)	0.0006** (0.0002)
Jam kerja per bulan	-0.0007 (0.0007)	0.00006 (0.0004)
Dummy menerima upah	0.0085 (0.2234)	0.290 (0.186)
Pendidikan KK	0.0266 (0.022)	-0.094** (0.017)
Jumlah anggota keluarga	-0.0792 (0.0522)	-0.0305 (0.039)

Jumlah anak < 5 tahun	0.0770 (0.463)	0.227 (0.358)
Jumlah Anak 5-10 tahun	0.286 (0.322)	0.195 (0.261)
Jumlah laki-laki dalam keluarga	0.199* (0.087)	-0.003 (0.061)
Urban	0.402* (0.201)	-0.721** (0.190)
Sumatera Utara	-0.037 (0.863)	13.5733 (586.94)
Sumatera Barat	-0.231 (0.922)	12.339 (586.94)
Sumatera Selatan	-0.062 (0.865)	13.974 (586.94)
Lampung	0.022 (0.865)	13.675 (586.94)
Jawa Barat	-1.147 (0.883)	14.483 (586.94)
Jawa Tengah	-0.497 (0.835)	14.011 (586.94)
DIY	-0.521 (0.885)	13.887 (586.94)
Jawa Timur	-0.149 (0.848)	14.436 (586.94)
Bali	-0.238 (0.895)	12.744 (586.94)
Nusa Tenggara Barat	-0.0444 (0.857)	14.932 (586.94)
Kalimantan Selatan	-0.0687 (0.865)	13.623 (586.94)
Sulawesi Selatan	-0.2144 (0.298)	14.084 (586.94)
Pertambangan		0.0596 (0.0708)
Manufaktur		0.0046 (0.0177)
Listrik		0.2659** (0.0949)
Konstruksi		-0.0538* (0.059)
Perdagangan Besar		0.1706** (0.0160)
Transportasi		0.0438 (0.0269)
Jasa sosial		0.1289** (0.0172)
Keuangan		0.2818** (0.0649)
Pindah ke propinsi lain	0.207	0.828*

	(0.469)	(0.361)
Pindah ke kabupaten lain	-0.5737 (0.271)	0.123 (0.266)
Pindah ke kecamatan lain	-0.0138 (0.192)	0.286 (0.157)
Pindah ke sektor non pertanian	0.100 (0.1678)	-0.025 (0.1304)
Constanta	38.589** (2.337)	-21.809 (586.947)
Observasi	3115	3115

Sumber : Hasil Estimasi, tidak dilampirkan

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan besarnya standar error,

**signifikan pada α 1%, dan * signifikan pada α 5%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis estimasi persamaan regresi dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan regresi logistik dapat ditunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara besarnya usia, jam kerja per bulan, tingkat pendidikan, domisili penduduk dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa pendapatan dari sektor non pertanian relatif lebih besar dari sektor pertanian.

Migrasi yang dilakukan penduduk dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari sektor satu ke sektor lain, maupun perpindahan dari propinsi satu ke propinsi lain tidak mempengaruhi keluarnya rumah tangga tersebut dari kemiskinan. Namun demikian, dari estimasi persamaan model 2 ditunjukkan bahwa migrasi pekerjaan dari pertanian ke non pertanian menghasilkan perubahan yang relatif lebih besar dibanding penduduk yang tidak melakukan pindah pekerjaan. Di samping itu, ditunjukkan pula bahwa masyarakat yang pindah dari propinsi asal ke propinsi yang lain mendapatkan perubahan tingkat pengeluaran per kapita yang semakin besar.

Keluarnya rumah tangga dari kemiskinan ditunjukkan dengan tetap tinggalnya masyarakat di pedesaan dengan melakukan aktivitas baik pertanian maupun non pertanian. Urbanisasi tidak terbukti sebagai jalan untuk keluar dari kemiskinan, meskipun penduduk yang tinggal di kota probabilitasnya lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan penduduk yang tinggal di kota.

Saran

Untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan perlu perhatian pemerintah agar tetap memprioritaskan pemerataan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga masyarakat semakin dapat meningkatkan produktivitasnya dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, UPP STIM YKPN
- Duclos, J.Y., D. Sahn and S. Younger. 2006. "Robust Multidimensional Poverty Comparisons". *Economic Journal*, 116(514): 943-968
- Haughton, Jonathan Henry. *Handbook on Poverty and Inequality*. The World Bank
- Hayami, Yujiro dan Yoshihisa Godo, 2004, *Development Economics : From The Poverty to The Wealth of Nations*, Third Edition, Oxford, New York
- Jalan, J. and Ravallion, M. 1998. "Determinants of Transient and Chronic Poverty: Evidence from Rural China". *World Bank, Policy Research Working Paper No. 1936*.
- Kuncoro, Mudrajad, 2012, *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*, Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2012, *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*, Salemba Empat, Jakarta
- Lanjouw, P., Pradhan, M. Saadah F., Sayed, H., Sparrow R., 2001, *Poverty, Education and Health in Indonesia : Who Benefit from public Spending?*, *Policy Research Working Paper 2739*, World Bank
- McCulloch, Neil, C. Peter Timmer and Julian Weisbrod, 2007, "Pathway out of poverty during an economic crisis : An empirical assessment of rural Indonesia", *Working Paper Number 115*, Center for Global Development, diakses dari <http://ssrn.com> pada tanggal 5 Mei 2012
- Maipita, Indra, 2004, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Narayan, Deepa dan Iant Pritchett, 1999, "Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania" *Economic Development and Culture Change*, Vol.47. No.4, July 1999 diakses dari www.jstor.org
- Said, Ali dan Wenefrida D. Widyanti, 2001, "The impact of Economic Crisis on Poverty and inequality in Indonesia" , *Paper* dalam Symposium on Poverty Analysis and Data Initiative (PADI), Manila, Philippines, 30 April-3 May 2001.
- Todaro, Michael P. And Stephen C. Smith, 2006, *Economic Development*, ninth edition, Pearson
- Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN DI JAWA TIMUR

Ris Yuwono Yudo Nugroho
Mahasiswa Program Doktor FEB Universitas Airlangga Surabaya
Dosen FE Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: risyuwono@gmail.com

ABSTRAK

Komitmen Indonesia menghadapi MEA dengan melakukan liberalisasi sektor keuangan mulai 2015. Penyempurnaan pasar uang adalah hal mendesak, dalam rangka pengembangan sektor keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian bertujuan menganalisis basis sektor perbankan, kondisi Financial Development, serta keterkaitannya dengan sektor lainnya di Jawa Timur, dalam rangka menyusun strategi pengembangan. Metodologi menggunakan analisis Location Quotient (LQ), yaitu SLQ, DLQ, serta pendekatan Input Output (IO) untuk mengetahui keterkaitan antar sektor. Potensi sektor perbankan di Jawa Timur yang terpetakan secara spasial, terdapat 3 daerah unggulan sektor (sub sektor) perbankan, sedangkan dari aspek pengembangan sektor keuangan, terdapat 6 daerah kategori terbaik Kelompok daerah paling tertinggal dengan 2 kriteria yang digunakan, terdapat di 5 daerah, yaitu Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Sampang, dan Sumenep. Faktor pembentuk backward linkage setelah sektor bank sendiri, adalah jasa Informasi dan Komunikasi, sedangkan forward linkage setelah sektor bank sendiri, adalah Jasa Penunjang Keuangan. Strategi pengembangan sektor keuangan disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan, seperti menyediakan jasa informasi dan komunikasi, memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia. Memperluas komunikasi dan kerjasama dengan jasa penunjang keuangan yang telah ada untuk mendukung ekspansi usaha dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem keuangan.

Klasifikasi JEL: R120, G280, R150

Kata Kunci:

Financial Development, Sectoral Linkage, Financial Inclusion, Location Quotient, Input Output

PENDAHULUAN

Sesuai komitmen dalam cetak biru Komunitas Ekonomi Asean, komitmen pada sektor jasa keuangan adalah menghilangkan hambatan pada sektor asuransi, perbankan dan pasar modal. Komitmen tersebut harus ditunjang dengan adanya kawasan yang bersaing dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Selain penguatan stabilitas dan daya tahan kawasan, perhatian juga pada upaya pemulihan ekonomi, dan reformasi sektor keuangan kawasan. Penyempurnaan pasar uang adalah hal mendesak, dalam rangka pengembangan sektor keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Fungsi utama sektor keuangan bagi perekonomian, antara lain menyediakan jasa pembayaran, mempertemukan para penabung dan investor, serta mengalokasikan pinjaman secara efisien. Jumlah keseluruhan uang yang beredar di masyarakat diyakini memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi, yang selanjutnya merangsang perluasan kegiatan ekonomi karena memungkinkan anggota masyarakat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan lebih banyak (Todaro, 2003).

Struktur industri keuangan Indonesia ditinjau dari komposisi total aset pada tahun 2014, masih didominasi oleh perbankan yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebesar 79,8 persen. Total aset perbankan tahun 2014 tersebut mencapai Rp. 5.615,1 triliun, meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 2.678.3 triliun. Jumlah tersebut jauh mengungguli aset lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Kondisi tersebut memungkinkan perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi.

Peningkatan aset perbankan didukung perluasan jaringan usaha. Jumlah kantor Bank Umum dan BPR meningkat masing-masing dari 18.558 dan 4.678 pada tahun 2013 menjadi 19.948 dan 4.895 kantor pada tahun 2014. Rasio densitas perbankan menunjukkan se lama tahun 2014, satu kantor bank melayani sekitar 12 ribu orang, dibandingkan tahun 2010 yang melayani sekitar 18 ribu orang. Peningkatan jaringan kantor bank tersebut, selain mendukung ekspansi usaha juga mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan atau *financial inclusion* (Bank Indonesia, 2015b).

Tantangan yang dihadapi perbankan saat ini adalah terjadi likuiditas ketat yang mengakibatkan ekspansi kredit menjadi terbatas. Terbatasnya ekspansi kredit menekan kinerja perbankan (Damayanti, 2014). Tekanan likuiditas perbankan diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2015. Pengetatan yang kemudian diiringi dengan suku bunga yang tinggi memicu persaingan antar bank memperoleh dana pihak ketiga (Turisman, 2014). Dampak pengetatan likuiditas bagi sektor perbankan adalah melambatnya kredit perbankan.

Pada Desember 2014, kredit hanya tumbuh 11,58 persen (yoy), melambat dibandingkan per tumbuhan triwulan-triwulan sebelumnya, bahkan lebih lambat dari beberapa periode tahun sebelumnya. Secara sektoral selama tahun 2014, berdasarkan *share* dan pertumbuhan kredit, terlihat bahwa melambatnya pertumbuhan kredit sektor perdagangan dan industri memberikan andil terbesar penurunan pertumbuhan kredit di Indonesia, selain sektor lain-lain (Tabel 1).

Tabel 1
Pertumbuhan dan Share Kredit Sektoral

Industri /Agregat	Pertumbuhan Kredit						Share Kredit (%)
	Rerata 2008-2009	Rerata 2010-2013	Maret 2014	Juni 2014	September 2014	Desember 2014	Desember 2014
	24.90	22.10	19.45	17.20	13.16	11.58	100.00
Per Sektor Ekonomi							
Lain-lain	25.80	22.20	8.59	13.93	11.20	12.67	28.09
Perdagangan	22.40	23.80	24.16	18.28	13.87	12.36	21.51
Industri	16.60	19.20	26.20	24.90	16.08	14.30	17.98
Jasa Dunia Usaha	27.60	21.50	19.53	6.18	(1.03)	(3.68)	9.03
Pertanian	24.50	22.50	24.46	25.44	21.66	19.90	5.99
Pengangkutan	53.20	21.00	28.40	28.61	18.21	5.13	4.68
Konstruksi	27.60	15.30	24.75	17.54	18.65	28.86	4.01
Pertambangan	35.50	38.00	13.81	6.97	17.05	11.83	3.86
Jasa Sosial	19.00	53.90	24.35	14.31	19.51	19.22	2.66
Listrik	85.20	36.40	41.41	19.53	21.09	2.06	2.21

Sumber: Bank Indonesia (2015a)

Secara spasial tahun 2014, pertumbuhan ekonomi regional mengalami perlambatan yang terjadi di seluruh kawasan Indonesia. Perlambatan terbesar terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terkait menurunnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Pertumbuhan ekonomi kawasan di Jawa juga melambat disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang lebih rendah. Ekonomi KTI dan Jawa tercatat tumbuh masing-masing 6,0 persen dan 5,5 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2013 kawasan tersebut sebesar 7,9 persen dan 6,1 persen.

Data empiris Indonesia, tahun 2000-2014, menunjukkan adanya pola yang seiring antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian jika ditinjau dari rasio total kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang baru mencapai sekitar 32 persen. Rasio tersebut jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia dan Singapura yang memiliki rasio di atas 100 persen. Rendahnya rasio total kredit terhadap PDB menunjukkan bahwa layanan jasa keuangan formal belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Bank Indonesia, 2015b).

Kondisi makroekonomi dan perbankan nasional juga berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Timur. Kinerja perekonomian Jawa Timur berdasarkan tahun dasar 2010, menunjukkan perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2012 mencapai 6,6 persen kemudian turun 6,1 persen dan tahun 2014 menjadi 5,9 persen (Tabel 2). Meskipun pertumbuhan turun tetapi dari data, angka pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dari nasional, dan kontribusi terhadap nasional, Jawa Timur masih terbesar kedua, setelah Provinsi DKI Jakarta.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi, karena masing-masing daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama rencana pembangunan wilayah di samping pembangunan sosial (Sjafrizal, 2008). Peran jasa keuangan dan asuransi, yang didominasi oleh perbankan, menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi dibandingkan sektor lain di Jawa Timur (Tabel 2).

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jawa Timur 2012-2014

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Per Sektor Ekonomi	2012	2013	2014
PDRB (% yoy)	6.60	6.10	5.90
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.10	3.10	3.60
Pertambangan dan Penggalian	0.30	1.30	3.60
Industri Pengolahan	6.70	5.90	7.70
Pengadaan Listrik dan Gas	(3.30)	2.90	2.40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.90	4.10	0.30
Konstruksi	7.50	8.10	5.40
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.20	6.20	4.60
Transportasi dan Pergudangan	7.20	8.60	6.40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.70	5.60	8.90
Informasi dan Komunikasi	12.40	12.00	6.30
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.70	14.20	7.00
Real Estate	8.00	7.40	7.00
Jasa Perusahaan	3.20	7.50	8.50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.40	1.30	0.60
Jasa Pendidikan	8.70	8.60	6.50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.70	8.00	8.20
Jasa Lainnya	2.80	5.10	5.50

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (2015)

Menurut Bank Indonesia (2015b), berbagai kendala struktural (*enabling factors*) yang menghambat laju perekonomian, dapat diatasi dalam dua hal pokok, yakni reformasi di sektor riil dan reformasi di sektor keuangan. Reformasi di sektor riil difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan institusi, serta upaya pencapaian kedaulatan pangan dan energi. Reformasi di sektor keuangan diarahkan pada upaya untuk melakukan pendalaman pasar keuangan, termasuk modernisasi sistem pembayaran dan inklusi keuangan.

Jhingan (2012) menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas perbankan dan reorganisasi kredit, serta penyempurnaan pasar uang, adalah hal mendesak dalam rangka pengembangan sektor keuangan (*Financial Development*) untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, dan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi wilayah tertentu tentunya akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan serta menyebabkan semakin tertinggalnya daerah yang kurang maju. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah (1) Secara spasial, Kabupaten atau Kota mana di Jawa Timur yang menjadi basis sektor perbankan? (2) Bagaimana hasil pemetaan basis sektor tersebut disandingkan dengan kondisi *Financial Development*? (3) Bagaimana keterkaitan sektor perbankan dengan sektor lainnya dalam membentuk perekonomian Jawa Timur?

LANDASAN TEORI

Menurut Tarigan (2010), perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan, sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spasial dan menjadi jembatan mengkaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Pendekatan sektoral tidak mampu melihat perubahan struktur ruang yang terjadi

akibat dilaksanakannya rencana sektoral tersebut, tidak mampu melihat wilayah mana yang kurang terbangun, akan berkembang dan sebagainya.

Koefisien lokasi (*Location Quotient*) digunakan untuk mengukur relatif derajat spesialisasi yang dimiliki suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Adapun yang digunakan sebagai pembanding adalah wilayah yang lebih luas dari wilayah yang sedang dianalisis (Nugroho dan Dahuri, 2012). Bandavid-Val (1991) mengatakan bahwa pendekatan LQ sangat berguna jika digabungkan dengan analisis yang lain seperti mencari keterkaitan, analisis IO dan lain-lain.

Penelitian Sporria et. all. (2007), meneliti dampak rehabilitas sungai terhadap ekonomi regional menggunakan pendekatan LQ yang dikombinasikan dengan IO, sedangkan Wahudi dan Jantan (2010) meneliti pola industri di Wilayah Jawa, tahun 1998-2007 menggunakan LQ, dengan temuan antara lain bahwa daerah dengan konsentrasi industri tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang tidak memiliki konsentrasi industri. Penelitian menggunakan pendekatan LQ dengan tujuan pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dilakukan oleh Arifien dkk. (2012), sedangkan Kurniawan (2014) menggunakan pendekatan LQ untuk menentukan komoditas palawija unggulan di Kabupaten Nganjuk.

Tarigan (2009) berpendapat bahwa pendekatan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan untuk sektor yang sudah lama berkembang. Untuk sektor yang baru atau sedang tumbuh LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Kuncoro (2012) menggunakan gabungan *Static LQ* dan *Dynamic LQ*, untuk mengklasifikasikan sektor termasuk unggulan, prospektif, andalan, atau tertinggal, demikian pula Widodo (2006).

Keterkaitan dan peran lembaga perantara keuangan perbankan dengan pembangunan ekonomi sudah lama dikaji oleh para ahli, antara lain dimulai dari Goldsmith, Mc. Kinnon dan Shaw (Gregorio dan Guidotti, 1995); Schumpeter, Prescott, King dan Levine, kemudian La Porte (Beck, et. all., 2000). Menurut Fung (2009), hubungan antara *financial development* dan perekonomian terbagi dalam dua pandangan, pertama yang dipelopori oleh Robinson, bahwa permintaan jasa keuangan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan pandangan Schumpeter dan penerusnya, menyatakan sebaliknya.

Penelitian dengan tema *financial development* dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Beck (2000) menganalisis hubungan *financial intermediary development* dengan pertumbuhan ekonomi, dan keduanya terdapat hubungan positif. Onder (2013), meneliti peran kredit dalam pertumbuhan ekonomi, dengan temuan bahwa kredit bank pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Turki. Yang dan Yi (2008), menyimpulkan bahwa di Korea periode 1971-2002 *financial development* menyebabkan pertumbuhan, bukan sebaliknya. Penelitian lain serupa dilakukan oleh Ang (2008), Hassan et. all. (2011), Samargandi et. all (2015), dan Ductor dan Grechyna (2015).

Salah satu jenis informasi yang dapat digunakan melakukan penyusunan perencanaan komprehensif yang meliputi seluruh sektor perekonomian adalah menggunakan tabel input-output. Menurut Todaro, tabel input-output merupakan sarana terbaik menyajikan informasi penting dalam menyusun perencanaan ekonomi. Pendapat demikian juga dikemukakan Glasson bahwa tabel input-output merupakan salah satu metode yang paling luas diterima dalam rangka mendeskripsikan struktur sektoral perekonomian dan memprediksikan perubahan dari struktur tersebut (BPS Jawa Timur, 2010).

Beberapa penelitian menggunakan pendekatan IO untuk meneliti keterkaitan antar sektor. Karagiannis dan Tzouvelekas (2010), meneliti keterkaitan antar sektor industri di 14 negara uni Eropa. Penelitian tersebut dalam rangka merencanakan kebijakan yang efektif untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Cai. et. all. (2006), meneliti keterkaitan ke depan dan ke belakang antara sektor

pariwisata dengan sektor lainnya di Hawaii, sedangkan Ilhan dan Yaman (2011), meneliti keterkaitan ke depan dan ke belakang antara sektor konstruksi dengan sektor lainnya di Turki dan beberapa negara Uni Eropa.

Amir dan Riphath (2005) menggunakan pendekatan IO tahun 2000 untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan di Jawa Timur. Rondhi (2009) menggunakan pendekatan IO tahun 2000 untuk menganalisis struktur dan perilaku ekonomi dan menentukan sektor unggulan di Jawa Timur. Suharjo dan Santoso (2014) meneliti keterkaitan sektor ekonomi di Jawa Timur dengan analisis *forward* dan *backward*, menggunakan IO 2010. Pendekatan IO untuk meninjau peran salah satu sektor dilakukan oleh Sahara dan Resosudarmo (1998), yaitu menganalisis sektor industri pengolahan terhadap perekonomian DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Location Quotient

Location Quotient (LQ) atau koefisien lokasi, digunakan untuk mengukur relatif derajat spesialisasi yang dimiliki suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain, dan yang digunakan sebagai pembanding adalah wilayah yang lebih luas dari wilayah yang sedang dianalisis (Nugroho dan Dahuri, 2012). LQ menunjukkan perbandingan peranan suatu sektor industri suatu tempat terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau daerah acuan yang lebih luas.

Menurut Widodo (2006), analisis LQ dapat menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan suatu sektor di daerah studi, dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensinya. Jika laju pertumbuhan suatu sektor daerah studi lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama daerah referensinya, maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan daerah tersebut dan prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut.

Rumus LQ dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB_{kk}}}{\frac{X_{jt}}{PDRB_{jt}}}$$

Keterangan:

x_i	= Nilai tambah sektor perbankan kabupaten, kota i (Juta Rupiah)
$PDRB_{kk}$	= Produk domestik regional bruto kabupaten, kota i (Juta Rupiah)
X_{jt}	= Nilai tambah sektor perbankan Jawa Timur (Juta Rupiah)
$PDRB_{jt}$	= Produk domestik regional bruto Jawa Timur (Juta Rupiah)

Rumus LQ tersebut bersifat statis sehingga disebut *Static LQ* (SLQ), oleh karena itu perlu digabungkan dengan *Dynamic LQ* (DLQ) untuk menggambarkan kriteria industri atau sektor dalam suatu daerah termasuk kategori unggulan, prospektif, andalan, atau tertinggal. Jika $DLQ > 1$ dan $SLQ > 1$, maka termasuk kriteria **unggulan**, jika $DLQ > 1$ dan $SLQ < 1$, maka termasuk kriteria **andalan**, jika $DLQ < 1$ dan $SLQ > 1$, maka termasuk kriteria **prospektif**, dan terakhir jika $DLQ < 1$ dan $SLQ < 1$, maka termasuk kriteria **tertinggal** (Kuncoro, 2012).

Rumus DLQ dalam penelitian:

$$DLQ_{ir} = \left[\frac{(1+q_{ir})/(1+Q_r)}{(1+q_{in})/(1+Q_n)} \right]^t$$

Keterangan:

- q_{ir} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor perbankan Kabupaten, Kota i
- Q_r = Rata-rata laju pertumbuhan seluruh sektor (PRDB) Kabupaten, Kota i
- q_{in} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor perbankan Jawa Timur
- Q_n = Rata-rata laju pertumbuhan seluruh sektor (PRDB) Jawa Timur
- t = Jumlah tahun analisis → 3 tahun (2010,2011,2012)

Financial Development

Financial Development (FD) didefinisikan sebagai kebijakan, faktor, dan kelembagaan yang mendorong efisiensi intermediasi dan efektifnya pasar keuangan. FD menunjukkan kinerja dan aktifitas lembaga keuangan. Beberapa literatur seperti dalam Beck (2000), Samargandi et. all (2015), dan Ductor & Grechyna (2015) menggunakan jumlah kredit dibagi GDP (Kredit/GDP), untuk menunjukkan nilai pengembangan sektor keuangan (perbankan) (*Financial Development*).

Penelitian menggunakan indikator jumlah kredit dibagi PDRB, tiap kabupaten dan kota untuk menunjukkan FD. Penulis membagi 4 kelompok dari hasil perhitungan FD tersebut. Kriteria: (1) **baik**, jika nilai lebih dari 50 persen dari nilai rata-rata FD, (2) **cukup** jika nilai antara rata-rata dan maksimal 50 persen di atas nilai rata-rata FD, (3) **kurang** jika nilai kurang dari dengan nilai rata-rata FD dan lebih dari 50 persen di bawah nilai rata-rata FD, dan (4) **tertinggal** jika nilai kurang dari 50 persen nilai rata-rata FD.

Pendekatan Input Output

Pendekatan input-output merupakan kerangka komprehensif untuk menganalisis wilayah dan mampu menggambarkan beragam sifat hubungan (*interrelationship*) di antara sektor dan antarsektor dengan komponen ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2012). Salah satu analisis model I-O adalah mengetahui tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor ekonomi.

Keterkaitan antar sektor ekonomi berupa keterkaitan kebelakang (*backward linkages*) berkaitan dengan mekanisme penggunaan input, sedangkan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) berkaitan mekanisme penggunaan output. Keterkaitan ke belakang adalah kemampuan suatu sektor mendorong pertumbuhan output sektor lain melalui jalur permintaan input, sedangkan keterkaitan ke depan adalah penambahan tingkat output perekonomian karena peningkatan suatu output sektor produksi melalui jalur penawaran output (Firmansyah, 2006).

Rumus keterkaitan ke belakang total, yang memasukkan efek langsung dan tidak langsung adalah (Nazara, 2005):

$$B(d+i)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Keterangan:

- $B(d+i)_j$ = Keterkaitan ke belakang total
- a_{ij} = Elemen matrik kebalikan Leontief baris ke-i kolom ke-j
- n = Jumlah sektor (dalam penelitian ini terdapat 110 sektor)

Rumus keterkaitan ke depan total, memasukkan efek langsung dan tidak langsung:

$$F(d+i)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Keterangan:

$F(d+i)_j$	= Keterkaitan ke depan total
a_{ij}	= Elemen matrik kebalikan Leontief baris ke-i kolom ke-j
n	= Jumlah sektor

Nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang total tersebut menunjukkan keterkaitan ke seluruh sektor (110 sektor) dalam perekonomian Jawa Timur. Dari nilai total tersebut dapat diketahui komposisi sektor pembentuk, baik keterkaitan total ke depan maupun ke belakang. Sektor pembentuk tersebut yang menjadi dasar kebijakan pengembangan sektor keuangan di Jawa Timur.

Data

Data LQ berasal dari laporan PDRB berdasarkan lapangan usaha di tiap-tiap Kabupaten atau Kota, menggunakan harga konstan tahun 2000. Data untuk *Financial Development*, yaitu jumlah kredit berasal dari data Bank Indonesia, melalui website www.bi.go.id. Data IO menggunakan tahun 2010, DLQ tahun 2010-2012, sedangkan SLQ dan FD menggunakan data tahun 2012.

Pendekatan keterkaitan antar sektor IO menggunakan menggunakan data IO Jawa Timur 110 sektor dari BPS Jawa Timur (Lampiran 3). Ruang lingkup usaha kegiatan perbankan mencakup antara lain penerimaan dan pemberian pinjaman, penyertaan modal usaha, pemberian jaminan bank dan sebagainya, sedangkan output jasa perbankan meliputi penerimaan provisi dan komisi, penerimaan transaksi devisa, pendapatan operasional lainnya, serta selisih bunga (imputasi) jasa pelayanan bank (BPS Jawa Timur, 2010).

Tahap Analisis

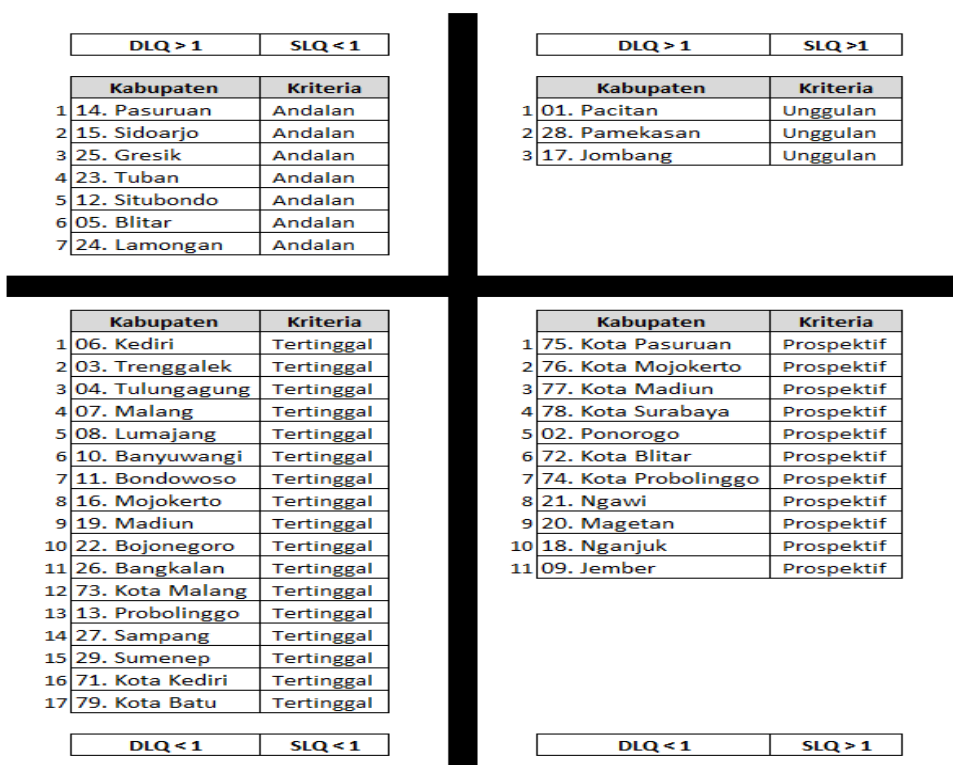
Tahap analisis yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan IO, teknik LQ dan FD adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan DLQ dan SLQ dilakukan secara spasial tiap Kabupaten dan Kota, kemudian dilakukan pemetaan secara grafis dengan menggunakan 4 kuadran.
2. Perhitungan FD dilakukan secara spasial tiap Kabupaten dan Kota, dibagi 2 kategori, baik dan kurang.
3. Pemetaan no 2. dikombinasikan dengan hasil FD secara grafis dengan menggunakan 4 kuadran.
4. Perhitungan *Backward (BL)* dan *Forward Linkage (FL)*, menggunakan analisis IO 110 sektor di Jawa Timur. Hasil perhitungan tersebut kemudian diperoleh komposisi pembentuk BL dan FL.
5. Implikasi kebijakan hasil pemetaan kombinasi LQ dan FD, serta IO.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Disebutkan sebelumnya, perhitungan untuk mengklasifikasikan daerah dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu: (1) **unggulan**, jika $DLQ > 1$ dan $SLQ < 1$, (2) **andalan**, jika $DLQ > 1$ dan $SLQ < 1$, (3) **prospektif**, jika $DLQ < 1$ dan $SLQ > 1$, dan (4) **tertinggal** jika $DLQ < 1$ dan $SLQ < 1$. Perhitungan menggunakan gabungan DLQ dan SLQ tahun 2012, sehingga diperoleh klasifikasi daerah secara grafis. Terdapat 3 daerah dengan kategori unggulan, 7 daerah kategori andalan, 11 daerah prospektif, sedangkan 17 daerah lainnya termasuk kategori tertinggal (Gambar 1).

Klasifikasi tersebut seperti yang dilakukan Kuncoro (2011), dengan modifikasi dilakukan secara spasial per kabupaten kota, untuk sektor perbankan. Tiga daerah termasuk kategori unggulan sektor perbankan dalam periode penelitian adalah Jombang, Pacitan, dan Pamekasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan basis sektor perbankan dan memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Terdapat 17 daerah dengan kategori tertinggal dalam sektor perbankan, yaitu Probolinggo, Bojonegoro, Mojokerto, Sampang, Bondowoso, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang, Malang, Kediri, Kota Batu, Banyuwangi, Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, dan Bangkalan. Daerah tersebut menurut klasifikasi LQ (SLQ dan DSQ) termasuk daerah tidak prospektif dan tidak menjadi andalan untuk pengembangan sektor perbankan.

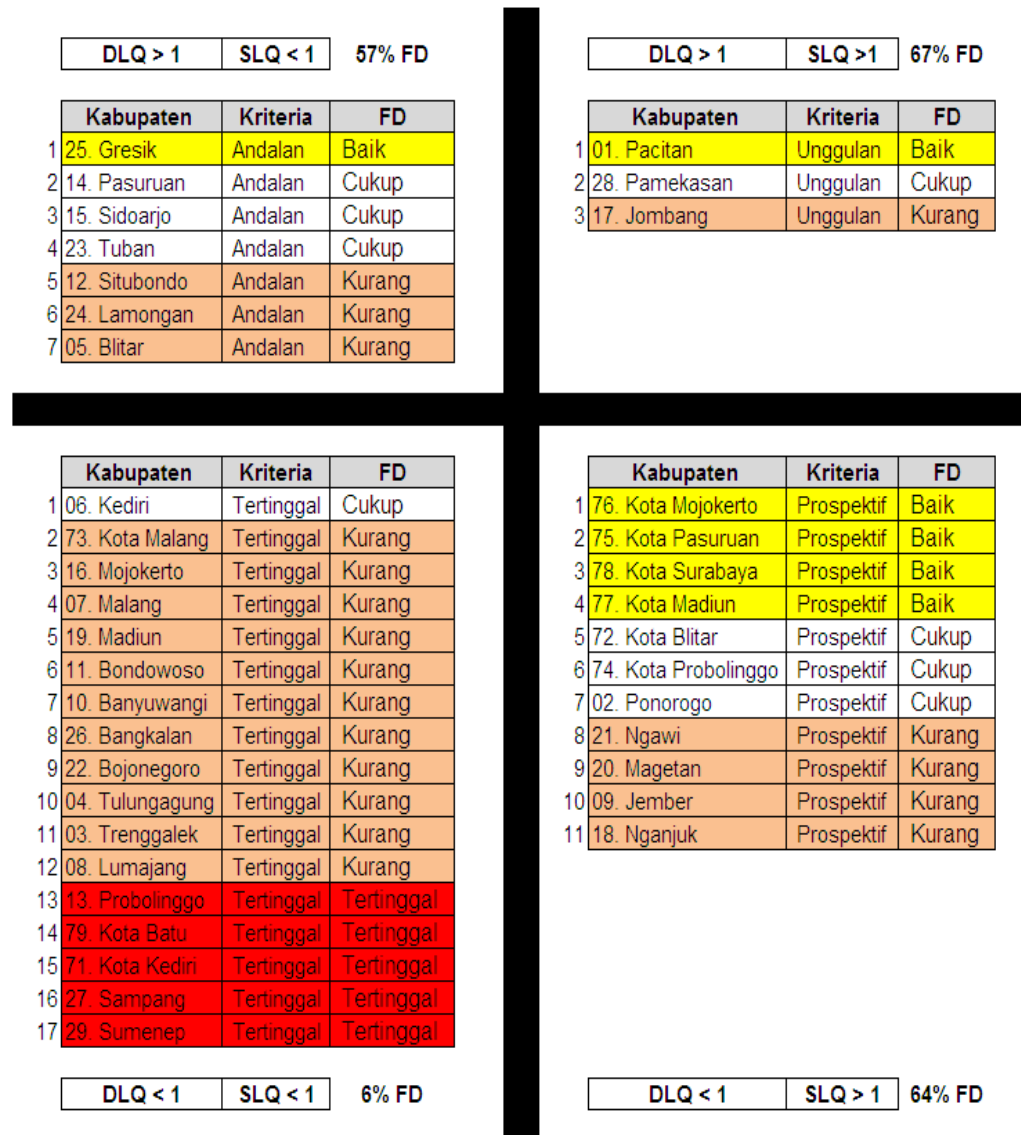


Sumber: PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha, BPS (Lampiran 1), diolah

Gambar 1

Klasifikasi Daerah Berdasarkan LQ

Untuk memperoleh informasi dan analisis yang lebih memadai tentang pengembangan sektor perbankan, maka klasifikasi grafis tersebut disandingkan dengan nilai FD (*Financial Development*). Klasifikasi FD dibagi menjadi 4 yaitu: Baik, Cukup, Kurang, dan Tertinggal (Lampiran 2). Pemetaan secara grafis, yaitu kombinasi DLQ, SLQ dan FD, diperoleh hasil bahwa terdapat **6 daerah** dengan kategori **baik**, yang tersebar dalam 3 kuadran LQ, sedangkan **5 daerah** termasuk kategori **tertinggal** yang semua masuk dalam kuadran kiri bawah (kriteria tertinggal menurut LQ) seperti pada Gambar 2.



Sumber: Data BPS dan BI (Lampiran 2), diolah

Gambar 2
Klasifikasi Daerah Berdasarkan Nilai LQ dan FD

FD dalam kategori **baik**, menunjukkan bahwa kredit per PDRB kabupaten kota tersebut termasuk 25 persen teratas dari rata-rata FD seluruh kabupaten/kota. Daerah dengan kategori **baik** berada di 6 daerah, yaitu Pacitan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Gresik. FD dalam kategori **tertinggal**, menunjukkan kredit per PDRB kabupaten kota tersebut 25 persen terbawah dari rata-rata FD, berada di 5 daerah yaitu Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Sampang, dan Sumenep. Pemetaan tersebut menunjukkan kriteria LQ berkaitan dengan kondisi kemajuan FD di Jawa Timur.

Kriteria FD yang **baik** dan **cukup**, berhubungan erat dengan daerah yang masuk dalam kriteria LQ unggulan (67 persen dari 3 kabupaten dalam kuadran kanan atas), kemudian daerah yang prospektif (64 persen daerah prospektif di kuadran kanan bawah), selanjutnya di daerah andalan (57 persen daerah andalan di

kuadran kiri atas). serta yang terakhir berkriteria daerah andalan (6 persen daerah tertinggal di kuadran kiri bawah).

Potensi sektor perbankan di Jawa Timur yang terpetakan secara spasial adalah terdapat 3 daerah unggulan sektor (sub sektor) perbankan, yaitu Pacitan, Pamekasan dan Jombang, sedangkan dari aspek pengembangan sektor keuangan, terdapat 6 daerah terbaik yaitu Pacitan, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Gresik. Sedangkan kelompok daerah paling tertinggal dengan 2 kriteria yang digunakan, berada di 5 daerah, yaitu Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Sampang, dan Sumenep.

Untuk mengidentifikasi keterkaitan antar sektor digunakan analisis IO, khususnya analisis *Backward Linkage* (BL) dan *Forward Linkage* (FL). Hasil perhitungan BL, atau daya penyebaran atau keterkaitan hulu, antar sektor ekonomi di Jawa Timur, diperoleh urutan bahwa sektor Bank menduduki peringkat 29, dari 110 sektor yang ada, dengan nilai 1,54 (Lampiran 4a). Nilai 1,54 menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit uang output sektor bank akan meningkatkan permintaan inputnya secara langsung maupun dari sektor-sektor dalam perekonomian, termasuk sektor bank sendiri, sebesar 1,54 unit uang.

Nilai BL sebesar 1,54 tersebut, jika dirinci berdasarkan 5 sektor kontributor terbesar, maka diperoleh hasil bahwa nilai BL sektor Bank berasal dari sektor bank sendiri dengan kontribusi sebesar 72,8 persen, kemudian sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8 persen, disusul Real Estat dan Jasa Perusahaan sebesar 2,5 persen, serta 2 persen berasal dari sektor Konstruksi Khusus (Tabel 3).

Tabel 3
Lima Kontributor Terbesar BL Sektor Bank

Terbesar	Nilai BL	Kontribusi	Kode	Sektor
1	1.12	72.8%	100	Bank
2	0.12	8.0%	99	Informasi dan Komunikasi
3	0.04	2.5%	104	Real Estat
4	0.04	2.5%	105	Jasa Perusahaan
5	0.03	2.0%	85	Konstruksi Khusus
Total	1.54			

Sumber: Tabel IO Jawa Timur, data diolah.

Sedangkan dari hasil perhitungan FL, atau daya pendorong atau derajat kepekaan, antar sektor ekonomi di Jawa Timur, diperoleh urutan bahwa sektor Bank menduduki peringkat 5, dari 110 sektor yang ada, dengan nilai 2,53 (Lampiran 2b). Nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit uang output sektor Bank akan meningkatkan output perekonomian sebesar 2,53 unit uang.

Nilai FL sebesar 2,53 tersebut, jika dirinci berdasarkan 5 sektor kontributor terbesar, maka diperoleh hasil bahwa nilai FL sektor Bank berasal dari sektor bank sendiri dengan kontribusi sebesar 44,3 persen, kemudian sektor Jasa Penunjang Keuangan sebesar 2,6 persen, disusul Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani, sebesar 2,6 persen, sektor Asuransi dan Dana Pensiun sebesar 2,3 persen, serta sektor Air, sebesar 2,2 persen (Tabel 4).

Tabel 4
Lima Kontributor Terbesar FL Sektor Bank

Terbesar	Nilai FL	Kontribusi	Kode	Sektor
1	1.12	44.3%	100	Bank
2	0.07	2.6%	103	Jasa Penunjang Keuangan
3	0.06	2.6%	41	Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani
4	0.06	2.3%	101	Asuransi dan Dana Pensiun
5	0.05	2.2%	81	Air
<i>Total</i>	<i>2.53</i>			

Sumber: Tabel IO Jawa Timur, data diolah.

Terkait temuan bahwa terdapat 5 daerah di Jawa Timur yang termasuk kriteria tertinggal baik berdasarkan LQ maupun berdasarkan FD, yaitu Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, Sampang, serta Sumenep, maka identifikasi dan strategi kebijakan dalam rangka pengembangan sektor keuangan hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan, yaitu:

- Kota Kediri memiliki angka penyaluran kredit yang cukup tinggi, tetapi PDRB Kota Kediri adalah tertinggi ketiga setelah Kota Surabaya dan Sidoarjo, sehingga kemampuan kredit perbankan terlihat kurang memadai. Probolinggo memiliki PDRB yang berada pada kisaran rata-rata, sedangkan jumlah kredit yang disalurkan jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan PDRB yang dimiliki. Kota Batu, Sampang, dan Sumenep relatif memiliki pola yang sama, yaitu besaran PDRB dan jumlah kredit pada daerah tersebut relatif kecil dibandingkan PDRB dan jumlah kredit pada kabupaten kota yang ada di Jawa Timur.
- Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Backward Linkage* sektor Bank di Jawa Timur, berkaitan erat dengan peran sektor informasi dan komunikasi, kemudian real estat, jasa perusahaan, dan konstruksi khusus. Implikasi kebijakan jika dikaitkan dengan kondisi 5 daerah tersebut, maka Kota Kediri, Probolinggo dan Kota Batu, dapat segera menyediakan sektor informasi dan komunikasi sebagai penunjang utama pengembangan sektor perbankan atau memanfaatkan jaringan informasi dan komunikasi yang sudah tersedia di kabupaten kota sekitarnya. Adanya akses Jembatan Suramadu diharapkan mampu memacu perkembangan real estat, jasa konstruksi dan beberapa jasa perusahaan di daerah Sampang dan Sumenep sehingga pengembangan sektor perbankan juga ikut tergerak.
- Berkembangnya sektor perbankan, berdasarkan temuan tentang *Forward Linkage* sektor perbankan, akan berdampak kepada Jasa Penunjang Keuangan, dan selanjutnya merata ke seluruh sektor Industri dan Jasa dan tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan perhitungan DLQ dan SLQ tahun 2012, diperoleh klasifikasi 3 daerah termasuk dengan kategori unggulan, 7 daerah kategori andalan, 11 daerah prospektif, sedangkan 17 daerah lainnya termasuk kategori tertinggal. Tiga daerah termasuk kategori unggulan sektor perbankan adalah Jombang, Pacitan, dan Pamekasan.
2. Jika disandingkan dengan nilai FD, terdapat 6 daerah termasuk kategori Baik, yang tersebar dalam 3 kuadran LQ, sedangkan FD dalam kategori tertinggal terdapat di 5 daerah, yaitu Probolinggo, Kota Kediri, Kota Batu, Sumenep, dan Sampang, yang semuanya terdapat di daerah tertinggal dalam kategori LQ.
3. Perhitungan *Backward Linkage* dan *Forward Linkage* sektor Bank, diperoleh hasil bahwa faktor pembentuk *Backward Linkage* sektor Bank, setelah sektor bank sendiri, adalah sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estat, Jasa Perusahaan, dan Konstruksi Khusus. Pembentuk *Forward Linkage* sektor Bank, setelah sektor bank sendiri, adalah Jasa Penunjang Keuangan, kemudian merata ke berbagai sektor industri dan jasa.
4. Prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan sektor keuangan hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan, seperti menyediakan sektor informasi dan komunikasi, atau memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia di kabupaten kota sekitarnya, serta sarana prasarana umum yang telah ada, sebagai penunjang utama pengembangan sektor perbankan di masing-masing daerah.

Saran

Penggunaan variasi indikator FD misalnya jumlah kantor bank per penduduk, atau tabungan per PDRB akan memperkaya analisis. Penelitian berikutnya dapat menggunakan multiplier pendapatan dan tenaga kerja untuk melengkapi analisis keterkaitan antar sektor di Jawa Timur menggunakan Tabel IO. Analisis multi tahun dan data terbaru berguna untuk menggambarkan konsistensi temuan dan evaluasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan sektor keuangan di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hidayat, dan Riphath, Singgih, (2005). Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input-Output 1994 dan 2000. *Jurnal Keuangan dan Moneter-Departemen Keuangan RI*.
- Ang, J.B. (2008). What Are The Mechanisms Linking Financial Development And Economic Growth In Malaysia? *Economic Modelling*, 25, 38–53.
- Arifien M., Fafurida, dan Noekent. (2012). Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13 (2), 288-302.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2010). Tabel I-O Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

- Bandavid-Val, A. (1991). *Regional and Local analysis for practitioners Ed. 4th*. New York: Praeger Publisher.
- Bank Indonesia. (2015a). *Laporan Kebijakan Moneter. Triwulan IV 2014*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2015b). *Laporan Perekonomian Indonesia 2014*. Jakarta.
- Beck, T., Levine, R., dan Loayza, N. (2000). Finance And The Sources Of Growth. *Journal of Financial Economics*, 58, 261-300.
- Cai. J., Leung P., and Mak J. (2006). Tourism's Forward And Backward Linkages, *Journal of Travel Research*, 39, 34-52.
- Damayanti, D. (2014). Tantangan Ekonomi Domestik. *Majalah Infobank*, No.427 Oktober 2014, 38-39.
- Ductor, L. dan Grechyna, D. (2015). Financial Development, Real Sector, and Economic Growth. *International Review of Economics and Finance*, 37 (2015): 393-405.
- Firmansyah. (2006). *Operasi Matrix dan Analisis Input Output (I-O) untuk Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Fung, M.K. (2009). Financial Development and Economic Growth: Convergen or divergen? *Journal of International Money and Finance*, 28 (2009), 56-67.
- Gregorio, J.D. dan Guidotti. (1995). Financial Development and Economic Growth. *World Development*, 23 (3), 433-448.
- Hassan, M. K., Sanchez, B, and Yu, J.S.(2011). Financial Development And Economic Growth: New Evidence From Panel Data. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 51, 88-104.
- Ilhan, B and Yaman, H. A. (2011). Comparative Input-Output Analysis Of The Construction Sector In Turkey And EU Countries. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 18, (3), 248-265.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV. (2015). *Kajian Ekonomi Regional, Triwulan IV 2014*. Surabaya.
- Karagiannis, G., dan Tzouvelekas, V. (2010). Sectoral Linkages And Industrial Efficiency: A Dilemma or A Requisition In Identifying Development Priorities? *Ann Reg Sci*, 45, 207-233.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kurniawan, R. (2014). Aplikasi LQ Sebagai Metode Penentu Komoditas Palawia Ungulan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 1 (2), 114-119.
- Nazara, S. (2005). *Analisis Input-Output*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Onder, Z., dan Ozyildirim, S. (2013). Role Of Bank Credit On Local Growth: Do Politics And Crisis Matter? *Journal Of Financial Stability*, 9, 13-25.
- Rondhi M. (2009). Analisis Struktur Dan Perilaku Ekonomi Untuk Menentukan Sektor Perekonomian Unggulan Di Propinsi Jawa Timur. *J-SEP*, 3 (2), 11-20.
- Sahara dan Resosudarmo, Bp. (1998). Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Analisis Input-Output. *Majalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*, 88, 77-89.

- Samargandi N., Fidrmuc, J., and Ghosh, S. (2015). Is The Relationship Between Financial Development And Economic Growth Monotonic? Evidence From A Sample Of Middle-Income Countries. *World Development*, 68 (2015), 66–81.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sporria, C., Borsukb, M. Petersc, I., dan Reichert, P. (2007). The Economic Impacts Of River Rehabilitation: A Regional Input–Output Analysis. *Ecological Economics*, 62, 341–351.
- Suharjo, O., dan Santoso, E. B. (2014) Keterkaitan Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Teknik Pomits*, 3 (2), 113-118.
- Tarigan, R. (2009). *Ekonomi Regional Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. (2010). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Cetakan kelima. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M P., dan Smith S C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Turisman, T. (2014). Likuiditas Mengganjal Pertumbuhan. *Majalah Infobank*. No.427 Oktober 2014, Hal. 42-43.
- Wahyudi, S.T. and Jantan, M. D. (2010). Complete Regional Patterns of Manufacturing Industries: a Study of manufacTuring industries In java region, Indonesia. *Philippine Journal of Development*, 37 (1), 95-115.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yang, Y.Y. dan Yi, M.H. (2008). Does Financial Development Cause Economic Growth? Implication for Policy in Korea. *Journal of Policy Modelling*, 30 (2008), 827-840.

Lampiran

1. PDRB dan PDRB Sub Sektor Perbankan, Per Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, 2011, 2012 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

Kabupaten	PDRB Sub Sektor Perbankan			PDRB		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
01. Pacitan	35,409.12	39,227.68	42,801.32	1,548,222.77	1,651,466.07	1,762,562.97
02. Ponorogo	49,003.69	53,250.04	57,266.91	3,331,058.41	3,537,868.11	3,768,417.45
03. Trenggalek	30,707.08	33,281.55	36,181.91	3,066,326.52	3,264,436.75	3,480,534.54
04. Tulungagung	47,688.19	51,796.05	56,426.62	7,829,889.53	8,357,114.68	8,941,209.47
05. Blitar	5,182.13	5,680.04	6,240.98	5,720,374.71	6,082,188.80	6,468,467.19
06. Kediri	14,334.41	15,473.47	16,457.57	7,635,063.51	8,108,223.96	8,673,840.51
07. Malang	58,692.06	63,516.55	69,199.50	14,578,967.81	15,624,096.52	16,786,415.78
08. Lumajang	56,954.14	61,812.32	66,676.95	6,369,904.28	6,786,517.45	7,203,528.54
09. Jember	203,327.51	217,995.71	237,578.74	10,891,607.20	11,550,549.44	12,359,522.18
10. Banyuwangi	140,861.24	151,130.03	161,148.44	11,015,195.17	11,788,649.35	12,655,586.32
11. Bondowoso	36,105.53	39,245.24	42,515.74	3,146,982.26	3,341,964.11	3,557,683.76
12. Situbondo	11,663.01	13,642.19	14,675.00	3,522,055.33	3,744,411.60	3,989,292.96
13. Probolinggo	14,296.68	15,558.23	16,939.80	6,752,163.38	7,172,491.80	7,642,065.55
14. Pasuruan	31,183.05	35,430.98	40,010.89	6,790,942.48	7,267,978.60	7,793,273.21
15. Sidoarjo	77,748.20	88,099.61	99,165.52	26,161,612.20	27,966,208.67	29,958,884.64
16. Mojokerto	11,784.25	12,901.79	14,148.79	7,901,925.18	8,457,102.89	9,066,494.89
17. Jombang	99,699.14	112,693.78	127,196.59	6,327,278.13	6,759,495.41	7,230,304.36
18. Nganjuk	47,706.11	51,505.43	55,791.20	5,291,794.80	5,631,764.77	6,008,052.22
19. Madiun	1,786.93	1,874.97	2,011.04	3,071,607.54	3,268,564.19	3,478,780.54
20. Magetan	39,419.62	42,884.61	46,360.50	3,271,278.74	3,472,774.82	3,694,611.37
21. Ngawi	48,728.91	52,609.83	57,500.96	3,121,821.49	3,313,434.98	3,537,199.53
22. Bojonegoro	78,957.56	86,339.69	95,465.79	8,128,233.06	8,875,105.39	9,379,581.33
23. Tuban	35,272.89	38,196.92	42,392.96	8,468,916.06	9,068,212.57	9,650,283.17
24. Lamongan	39,724.95	45,396.53	48,188.29	6,191,066.48	6,625,823.03	7,098,168.75
25. Gresik	105,736.27	118,279.16	129,835.04	16,837,438.37	18,081,043.89	19,424,161.63
26. Bangkalan	25,491.30	26,722.66	28,061.60	3,447,581.93	3,658,621.17	3,896,491.70
27. Sampang	8,323.82	8,995.55	9,765.70	2,907,197.05	3,082,741.14	3,271,497.39
28. Pamekasan	38,086.54	41,461.01	45,167.62	2,172,396.94	2,307,312.71	2,453,150.29
29. Sumenep	35,810.57	38,274.07	42,015.89	5,255,875.27	5,584,051.23	5,937,681.10
71. Kota Kediri	104,320.44	112,151.03	120,275.98	21,967,339.63	23,710,199.90	25,490,225.57
72. Kota Blitar	47,722.55	51,664.44	56,376.23	986,211.85	1,051,197.10	1,122,463.45
73. Kota Malang	80,354.77	85,875.15	91,707.36	14,044,625.15	15,038,460.41	16,176,980.57
74. Kota Probolinggo	43,133.39	47,067.98	51,347.40	2,021,826.54	2,154,854.54	2,303,403.94
75. Kota Pasuruan	32,548.79	35,147.15	37,655.04	1,117,313.37	1,187,591.86	1,264,355.98
76. Kota Mojokerto	20,704.76	21,713.64	22,902.96	1,228,437.25	1,308,084.03	1,400,641.09
77. Kota Madiun	84,145.51	92,610.36	100,510.27	2,114,843.99	2,266,725.63	2,443,200.18
78. Kota Surabaya	2,562,206.64	2,746,856.98	2,977,838.29	87,828,841.77	94,471,049.66	101,671,633.57
79. Kota Batu	1,768.39	1,922.26	2,067.59	1,432,193.90	1,547,387.28	1,674,982.52

Sumber: PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Masing-masing Kabupaten Kota, BPS

2. Hasil Perhitungan Kriteria kabupaten, Kota berdasarkan DLQ, SLQ, dan FD

Kabupaten	DLQ	SLQ	Kriteria LQ	Nilai FD	Kriteria FD
01. Pacitan	1.01	1.68	Unggulan	1.19	baik
02. Ponorogo	0.97	1.05	Prospektif	0.66	cukup
03. Trenggalek	0.98	0.72	Tertinggal	0.37	kurang
04. Tulungagung	0.98	0.44	Tertinggal	0.38	kurang
05. Blitar	1.02	0.07	Andalan	0.39	kurang
06. Kediri	0.94	0.13	Tertinggal	0.84	cukup
07. Malang	0.96	0.29	Tertinggal	0.55	kurang
08. Lumajang	0.98	0.64	Tertinggal	0.33	kurang
09. Jember	0.97	1.35	Prospektif	0.55	kurang
10. Banyuwangi	0.92	0.88	Tertinggal	0.45	kurang
11. Bondowoso	0.98	0.83	Tertinggal	0.53	kurang
12. Situbondo	1.09	0.59	Andalan	0.56	kurang
13. Probolinggo	0.99	0.15	Tertinggal	0.31	tertinggal
14. Pasuruan	1.09	0.36	Andalan	0.93	cukup
15. Sidoarjo	1.09	0.23	Andalan	0.85	cukup
16. Mojokerto	0.99	0.17	Tertinggal	0.60	kurang
17. Jombang	1.09	1.22	Unggulan	0.56	kurang
18. Nganjuk	0.97	1.45	Prospektif	0.40	kurang
19. Madiun	0.92	0.04	Tertinggal	0.55	kurang
20. Magetan	0.98	2.65	Prospektif	0.58	kurang
21. Ngawi	0.98	1.12	Prospektif	0.60	kurang
22. Bojonegoro	0.99	0.70	Tertinggal	0.42	kurang
23. Tuban	1.00	0.30	Andalan	0.65	cukup
24. Lamongan	1.01	0.47	Andalan	0.46	kurang
25. Gresik	1.02	0.46	Andalan	1.50	baik
26. Bangkalan	0.89	0.50	Tertinggal	0.43	kurang
27. Sampang	0.99	0.21	Tertinggal	0.25	tertinggal
28. Pamekasan	1.00	1.27	Unggulan	0.64	cukup
29. Sumenep	0.98	0.49	Tertinggal	0.22	tertinggal
71. Kota Kediri	0.92	0.33	Tertinggal	0.29	tertinggal
72. Kota Blitar	0.98	3.48	Prospektif	0.87	cukup
73. Kota Malang	0.91	0.39	Tertinggal	0.62	kurang
74. Kota Probolinggo	0.99	1.54	Prospektif	0.81	cukup
75. Kota Pasuruan	0.96	2.06	Prospektif	1.31	baik
76. Kota Mojokerto	0.88	1.13	Prospektif	1.36	baik
77. Kota Madiun	0.97	2.85	Prospektif	1.00	baik
78. Kota Surabaya	0.93	2.03	Prospektif	1.03	baik
79. Kota Batu	0.93	0.09	Tertinggal	0.29	tertinggal
				0.64	rata-rata

Indikator FD adalah Jumlah Kredit yang disalurkan perbankan di Kabupaten Kota, dibagi dengan jumlah PDRB tahun tersebut (2012).

Kriteria FD

Kriteria **baik**, jika nilai lebih dari 50 persen dari nilai rata-rata FD (> 0,96), **cukup** jika nilai antara rata-rata dan maksimal 50 persen di atas nilai rata-rata FD (0,64-0,96), **kurang** jika nilai kurang dari dengan nilai rata-rata FD dan lebih dari 50 persen di bawah nilai rata-rata FD (0,32- <0,64), dan **tertinggal** jika nilai kurang dari 50 persen nilai rata-rata FD (<0,32).

3. Klasifikasi Sektor Tabel Input Output Provinsi Jawa Timur, 2010

Kode	Sektor	Kode	Sektor
1	Padi	56	Alas Kaki
2	Jagung	57	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
3	Kedelai	58	Kertas dan Barang Dari Kertas
4	Kacang Tanah	59	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
5	Kacang Hijau	60	Kimia dasar
6	Tanaman Pangan Lainnya	61	Pupuk dan Pestisida
7	Sayur-Sayuran	62	Sabun, Barang Pembersih, dan Kosmetik
8	Buah-Buahan	63	Barang Hasil Kilang Minyak dan Barang-barang Kimia Lainnya.
9	Tanaman Biofarmaka	64	Farmasi dan Obat Tradisional
10	Tanaman Hortikultura Lainnya	65	Karet dan Barang Dari Karet
11	Tebu	66	Barang Dari Plastik
12	Tembakau	67	Kaca dan Barang dari Kaca
13	Kelapa	68	Bahan Bangunan, Keramik, dan Barang-Barang dari Tanah Liat.
14	Kopi	69	Semen, Kapur, dan Barang Lainnya Bukan Logam
15	The	70	Logam dasar
16	Kakao	71	Barang Dari Logam Lainnya
17	Cengkeh	72	Komputer, Barang Elektronik, Komunikasi dan optik
18	Karet	73	peralatan Listrik
19	Perkebunan Lainnya	74	Mesin dan Perlengkapan YTDL
20	Sapi	75	alat Angkutan
21	Kerbau	76	Furnitur
22	Domba dan Kambing	77	Barang Lainnya
23	Ayam	78	Jasa Reparasi
24	Unggas Lainnya	79	Ketenagalistrikan
25	Susu Segar	80	Gas
26	Telur	81	Air
27	Ternak Lainnya	82	Pengelolaan sampah dan daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
28	Jasa Pertanian dan Perkebunan	83	Konstruksi Gedung
29	Kayu Jati	84	Konstruksi Sipil
30	Kayu Rimba	85	Konstruksi Khusus
31	Hasil Hutan Lainnya	86	Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
32	Ikan Laut dan Hasil Perikanan Laut	87	Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.
33	Ikan Darat dan Hasil Perikanan Darat	88	Perdagangan, reparasi dan Perawatan Mobil, Dan Sepeda Motor
34	Minyak dan Gas Bumi	89	Angkutan Rel
35	Garam Kasar	90	Angkutan Bus
36	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	91	Angkutan darat Selain Bus
37	Pemotongan Hewan	92	Angkutan Laut
38	Pengolahan dan Pengawetan Daging	93	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
39	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota	94	Angkutan udara
40	Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran.	95	Pergudangan dan Jasa Penunjang angkutan
41	Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	96	Pos Dan Kurir
42	Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	97	Jasa Perhotelan
43	Beras	98	Penyediaan Makanan dan Minuman
44	Penggilingan Padi-Padian (Kecuali Beras), Tepung dan Pati	99	Informasi dan Komunikasi
45	Roti dan Kue	100	Bank
46	Gula	101	Asuransi dan dana Pensiun
47	Industri Makanan Lainnya	102	Jasa Keuangan Lainnya
48	Pakan Ternak	103	Jasa Penunjang Keuangan
49	Minuman	104	Real Estat
50	Rokok	105	Jasa Perusahaan
51	Tembakau olahan	106	Jasa Pemerintahan
52	Tekstil dan Bahan Tekstil	107	Jasa Pendidikan
53	Permadani, Tali dan tekstil lainnya	108	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
54	Pakaian Jadi	109	Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
55	Kulit dan Barang dari Kulit	110	Jasa Lainnya

4. Rangking Urutan Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi (dari yang terbesar, serta posisi sektor Bank)

a. Keterkaitan Ke Belakang atau Daya Penyebaran (*Backward Linkage*)

Ranking	Kode	Sektor	BL
1	42	Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	2.08
2	48	Pakan Ternak	2.06
3	37	Pemotongan Hewan	1.97
4	43	Beras	1.96
5	39	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota	1.85
6	44	Penggilingan Padi-Padian (Kecuali Beras), Tepung dan Pati	1.84
7	55	Kulit dan Barang dari Kulit	1.83
8	45	Roti dan Kue	1.82
9	102	Jasa Keuangan Lainnya	1.82
10	51	Tembakau olahan	1.80
29	100	Bank	1.54
110	72	Komputer, Barang Elektronik, Komunikasi dan optik	1.03

b. Keterkaitan Ke Depan atau Derajat Kepekaan (*Forward Linkage*)

Ranking	Kode	Sektor	FL
1	87	Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.	6.63
2	34	Minyak dan Gas Bumi	2.99
3	88	Perdagangan, reparasi dan Perawatan Mobil, Dan Sepeda Motor	2.94
4	91	Angkutan darat Selain Bus	2.83
5	100	Bank	2.53
6	105	Jasa Perusahaan	2.51
7	61	Pupuk dan Pestisida	2.41
8	48	Pakan Ternak	2.34
9	99	Informasi dan Komunikasi	2.26
10	57	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk furnitur), & Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	2.17
110	15	Teh	1.00

HUBUNGAN SUN DAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Sa'adah Yuliana
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The aim of this research is to explore the effect of SUN and SBSN or sovereign sukuk to economic growth. The period of this research is 2009-2014. The technical of analysis is multiple regression. The output is SBSN in rupiahs denomination have positif influence and significant to economic growth. SBSN in exchange rate denomination have positive influence and not significance. SUN in rupiahs denomination have positif influence and not significance. SUN in exchange rate denomination have negative influence and not significance

Keywords: SUN, SBSN, Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh SUN dan SBSN atau sukuk negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Periode pengamatan dari 2009 – 2014 dengan menggunakan data kuartalan. Alat analisis yang digunakan regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa SBSN denominasi rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. SBSN denominasi valuta asing berpengaruh positif tidak signifikan. SUN denominasi rupiah berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan SUN denominasi valuta asing berpengaruh negatif tidak signifikan.

Kata kunci: SUN, SBSN, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara. Semua dalam rangka meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan (Sutedi A, 2009).

Beberapa tahun terakhir, kebutuhan APBN yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) semakin mengalami peningkatan, sehingga diperlukan pengembangan instrumen SBN sekaligus diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Komponen SBN yang selama ini ada yaitu Surat Utang Negara (SUN), namun sejak disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menjadikan SBSN atau Sukuk Negara memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Manfaat SBSN yaitu (a) sebagai sumber pembiayaan pemerintah; (b) Diversifikasi basis investor; (c) *Benchmark* bagi penerbitan sukuk korporasi; dan (d) mendorong pertumbuhan industri keuangan terutama industri keuangan syariah karena lebih banyak alternatif produk syariah di pasar (Baridwan, 2008).

Penerbitan sukuk negara (*sovereign sukuk*) biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Inovasi baru dalam keuangan Islam ini telah mengubah dinamika industri keuangan Islam, terutama dalam area *bonds* dan sekuritas.

Dinegara-negara Iran, Sudan, Turki dan Pakistan sukuk dan sejenisnya telah digunakan secara '*substantial creativity*'. *Sovereign sukuk* mencerminkan pentingnya terobosan dan kreativitas kondisi yang ada di lapangan yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan Islam (Adam & Thomas, 2005).

Dilihat dari posisi Surat Berharga Negara, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir nilai SBSN mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Desember 2009 nilai SBSN sebesar Rp17.643 milyar atau Rp 17,6 triliun, dan pada Desember 2014 nilai SBSN meningkat menjadi Rp 172.904 milyar atau Rp 172,9 triliun.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa salah satu potensi sumber pembiayaan pembangunan adalah menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah. SBSN atau Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek, seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Tumbuhnya sektor-sektor tersebut pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan suatu perekonomian, dimana ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan. PDB adalah nilai yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa akhir pada suatu negara dalam periode waktu tertentu. Selama lima tahun terakhir nilai PDB berdasarkan penggunaan atau pengeluaran mengalami peningkatan dari Rp 548,5 Triliun pada Desember 2009 menjadi Rp 734,7 triliun pada Desember 2014 (BPS, 2014).

Pada satu sisi, perkembangan suatu perekonomian memerlukan biaya untuk tumbuhnya sektor-sektor dalam perekonomian, namun pada sisi lain terdapat keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga diperlukan sumber-sumber pembiayaan diantaranya dengan SUN (Surat Utang Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)). SBSN atau sukuk negara merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang relatif baru berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh SUN dan SBSN atau sukuk negara sebagai instrumen fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORI

Utang merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana pendapatan negara lebih kecil dari pengeluaran negara. Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN. Utang atau pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam rupiah dan valuta asing, *tradable* dan *tradable, fixed* dan *variable* (Kemenkeu, 2015).

Surat Berharga Negara terdiri atas :

- Surat Utang Negara (SUN), yang meliputi Surat Perbendaharaan Negara yang merupakan SUN jangka pendek (sampai 12 bulan) dan obligasi negara (lebih dari satu tahun)
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN atau sukuk negara) dalam rupiah dan valuta asing, yang meliputi SBSN jangka pendek (misalnya: sukuk ritel) dan SBSN jangka panjang (misalnya: global sukuk)

Beberapa perbedaan antara SBSN dan SUN yaitu, pertama, SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan terhadap aset SBSN, sementara itu SUN merupakan surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit. Kedua, SBSN memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan, sedangkan SUN umumnya tidak ada *underlying asset*. Ketiga, SBSN memerlukan Fatwa Syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah, sedangkan SUN tidak memerlukan Fatwa. Keempat, penggunaan SBSN untuk sumber pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek pemerintah, sedangkan penggunaan dana SUN untuk sumber pembiayaan. Kelima, *Return* SBSN berupa imbalan, bagi hasil, *margin*, dan *capital gain*, sedangkan *return* SUN berupa bunga dan *capital gain*. Keenam, dasar hukum SBSN yaitu UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, sedangkan dasar hukum SUN yaitu UU nomor 24 tahun 2001 tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan SBSN atau Sukuk Negara diperlukan guna memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

Adapun jenis sukuk negara ada 6 jenis yaitu: (a) Sukuk Negara Ritel, yaitu Sukuk Negara yang khusus dijual untuk investor individu WNI; (b) Sukuk Valas, yaitu sukuk yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing; (c) Sukuk Dana Haji Indonesia, yaitu sukuk yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada Sukuk Negara; (d) Sukuk Seri IFR, yaitu sukuk yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang berdenominasi rupiah; (e) Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun; dan (f) PBS (*Project Based Sukuk*), yaitu sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Penerbitan SBSN atau Sukuk Negara memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena SBSN merupakan bagian dari Surat Berharga Negara yang bertujuan untuk memenuhi pembiayaan APBN. Melalui pengesahan APBN maka DPR memberikan persetujuan atas SBSN sebagai bagian dari nilai bersih Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Penerbitan SBSN harus lebih dahulu mendapatkan Fatwa, dan/ pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah (*sharia compliant endorsement*), untuk menjamin bahwa SBSN telah sesuai prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2008 yang menyatakan bahwa SBSN atau sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Menurut UU nomor 19 tahun 2008 SBSN dapat berupa SBSN Ijarah; SBSN Mudharabah; SBSN Musyarakah; dan SBSN Istishna'.

SBSN ijarah adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, yaitu akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewaan periode sewa yang disepakati.

SBSN mudharabah adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

SBSN musyarakah adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

SBSN istishna' adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istishna', yaitu akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, sukuk bisa dijadikan alternatif untuk membiayai defisit APBN. Pada gilirannya, sukuk juga digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Nanga, 2001).

Dengan demikian, faktor keuangan negara, yang berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan guna menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan dukungan pembiayaan yang cukup.

Penelitian Ryandini (2013) menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek variabel SUN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya positif namun tidak signifikan. Variabel SBSN, dalam jangka pendek memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya negatif dan tidak signifikan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh SUN dan SBSN atau Sukuk Negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik SUN ataupun SBSN dapat dinyatakan dalam denominasi rupiah dan valuta asing, sehingga dalam melihat pengaruh SUN dan SBSN akan dikaji pengaruh dari masing-masing SBSN tersebut.

Penelitian ini menggunakan data time series dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2009 sampai 2014. Alasan penggunaan tahun 2009 mengingat UU tentang SBSN baru diundangkan pada 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data PDB berdasarkan harga konstan, data SUN dan SBSN denominasi rupiah, data SUN dan SBSN denominasi valuta asing. Data PDB bersumber dari penerbitan atau publikasi Badan Pusat Statistik, data SUN dan SBSN bersumber dari penerbitan atau publikasi yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan peralatan analisis regresi berganda, dimana hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$PDB = \alpha_0 + \alpha_1 SBSN_{dom} + \alpha_2 SBSN_{valas} + \alpha_3 SUN_{dom} + \alpha_4 SUN_{valas}$$

PDB merupakan besarnya PDB berdasarkan penggunaan atau pengeluaran. SUN_{dom} dan $SBSN_{dom}$ merupakan SUN dan SBSN dengan denominasi rupiah, sedangkan SUN_{valas} dan $SBSN_{valas}$ merupakan SUN dan SBSN dengan denominasi valuta asing. SUN dan SBSN diukur dari posisi surat berharga negara, yang menggambarkan profil utang pemerintah pusat.

Ketepatan garis regresi dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$, sedangkan untuk uji signifikansi digunakan uji t dan uji F. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Dalam regresi linier berganda akan dijumpai berbagai permasalahan, seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Nachrowi-Usman, 2008). Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah terdapat permasalahan tersebut dalam model linier ganda yang digunakan dalam penelitian ini sehingga memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Utang atau pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam rupiah dan valuta asing. Surat Berharga Negara terdiri atas Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN atau sukuk negara) dalam rupiah dan valuta asing.

Surat Utang Negara denominasi rupiah meliputi Surat Perbendaharaan Negara; Obligasi Negara tanpa kupon; Obligasi negara *fixed rate*; dan Obligasi negara *variable rate*. Surat Berharga Syariah Negara meliputi SBSN *Fixed Rate*, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah. Sementara itu, dalam denominasi valuta asing meliputi SUN valuta asing dalam US\$; SBSN valuta asing dalam US\$; serta SUN valuta asing dalam Yen. Mulai pertengahan Juni 2014 diterbitkan SUN valuta asing dalam Euro (Kemenkeu, 2015). Bertambahnya varian penggunaan valuta asing dalam penerbitan SUN mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menarik untuk berinvestasi.

Selama periode 2009 – 2014 komponen terbesar dari Surat Utang Negara denominasi rupiah, didominasi oleh Obligasi Negara *Fixed Rate*, demikian juga untuk SBSN, selama periode tersebut didominasi oleh SBSN *Fixed Rate*. Komponen terbesar Surat Utang Negara denominasi valuta asing didominasi oleh SUN valas dalam mata uang US\$.

Posisi Surat Berharga Negara pada setiap akhir kuartal yaitu kuartal empat atau posisi SBN pada bulan Desember dari tahun 2009 sampai bulan Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Posisi Surat Berharga Negara

(Rp milyar)

Tahun	SUN		SBSN	
	Denominasi Rupiah	Denominasi valas	denominasi rupiah	denominasi valas
2009	570.215	137.050		11.533
2010	615.498 5.844,15	156.104,2	25.717	
2011	684.618 14.962,2	180.686,6	38.988	
2012	757.231 25.625,5	239.281,85	63.035	
2013	908.078 50.584,35	348.789,46	87.174	
2014	1.099.257 62.200	394.415	110.704	

Sumber: Profil Utang Pemerintah Pusat – Kemenkeu

Tabel 1 menunjukkan bahwa posisi Surat Berharga Negara yang merupakan cerminan dari utang pemerintah baik dalam mata uang domestik (denominasi rupiah) maupun mata uang asing (denominasi valuta asing), selalu mengalami peningkatan. Selama periode kuartal pertama tahun 2009 sampai kuartal empat tahun 2014 untuk SUN denominasi rupiah, peningkatan tertinggi terjadi pada kuartal empat pada tahun 2013 yaitu sebesar 19,92 persen. Demikian juga untuk SUN denominasi valas pada kuartal empat pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan tertinggi yaitu 45,76 persen. Untuk SBSN denominasi rupiah, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal empat pada tahun 2010 dengan

peningkatan sebesar 122,9 persen, sedangkan SBSN denominasi asing, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal empat pada tahun 2011 yaitu dengan peningkatan sebesar 156 persen. Relatif tingginya pertumbuhan SBSN pada tahun 2010 dan 2011 sangatlah wajar, karena Undang-Undang SBSN baru diterbitkan pada tahun 2008 sehingga pada masa-masa awal diberlakukannya perundangan banyak masyarakat yang berminat untuk berinvestasi pada portofolio syariah ini.

Sehubungan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan penggunaan, selama periode kuartal pertama tahun 2009 sampai kuartal empat tahun 2014 pengeluaran terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, dimana rata-ratanya meliputi lebih dari lima puluh persen dari total PDB.

Selanjutnya, hasil estimasi pengaruh SUN dan SBSN terhadap PDB dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$PDB = 550413,3 + 2,490382SBSN_{dom} + 0,067983SBSN_{valas} + 0,016574SUN_{dom} - 0,265899 SUN_{valas}$$

Dari empat variabel tersebut, SBSN domestik merupakan variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob (p-value) variabel SBSN_{dom} yang sebesar 0,0000. Sementara itu, nilai Prob (p-value) untuk tiga variabel lainnya lebih besar dari 0,05, sehinggahal ini mengiindikasikan tidak signifikannya pengaruh variabel SBSN_{valas}, SUN_{dom}, dan SUN_{valas} terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari tanda koefisien menunjukkan bahwa hubungan atau pengaruh SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif, demikian pula pengaruh variabel SBSN_{valas} dan variabel SUN_{dom}.Sementara itu, hubungan atau pengaruh dari variabel SUN_{valas} terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,974527 bermakna bahwa 97,45 persen variasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel SUN dan SBSN. Hasil estimasi secara lengkap dapat dilihat sbb:

Dependent Variable: PDB
 Method: Least Squares
 Sample: 2009Q1 2014Q4
 Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	550413.3	40092.41	13.72862	0.0000
SBSNDOM	2.490382	0.353276	7.049402	0.0000
SBSNVALAS	0.067983	0.567762	0.119738	0.9059
SUNDOM	0.016574	0.082198	0.201631	0.8423
SUNVALAS	-0.265899	0.176894	-1.503158	0.1492
R-squared	0.974527	Mean dependent var		635626.7
Adjusted R-squared	0.969164	S.D. dependent var		65934.33

S.E. of regression	11578.13	Akaike info criterion	21.73468
Sum squared resid	2.55E+09	Schwarz criterion	21.98010
Log likelihood	-255.8161	Hannan-Quinn criter.	21.79979
F-statistic	181.7221	Durbin-Watson stat	1.729424
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, tidak terdapat heteroskedastisitas. Sementara hasil uji autokorelasi menunjukkan pada daerah tidak ada keputusan. Adanya multikolonieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen (Widarjono, 2013). Masalah multikolinearitas biasanya timbul karena jumlah observasi yang sedikit. Dalam kasus ini peneliti tidak mempunyai pilihan selain tetap menggunakan model untuk analisis regresi, dikarenakan keterbatasan observasi yaitu keterbatasan data SBSN dimana Undang-Undang SBSN baru diterbitkan tahun 2008.

SBSN dan SUN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi SUN dan SBSN dengan denominasi rupiah maka makin tinggi pertumbuhan ekonomi, sementara itu hubungan atau pengaruh SUN valas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif

Data empiris menunjukkan bahwa SBSN denominasi rupiah apabila dilihat berdasarkan data per kuartal selama periode 2009 - 2014 maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,5 persen atau dari Rp 21.215 milyar pada kuartal pertama meningkat menjadi Rp 25.717 milyar pada kuartal keempat. Pertumbuhan terendah SBSN denominasi rupiah berdasarkan data per kuartal terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,6 persen atau dari Rp 35.558 milyar menjadi Rp 38.988 milyar. Sementara itu, SUN denominasi rupiah selama 2009 – 2014 pertumbuhannya per kuartal cenderung berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 15,3 persen atau dari Rp 787.330 milyar pada kuartal pertama menjadi sebesar Rp 908.078 pada kuartal keempat. Pada tahun 2014 pertumbuhan SUN denominasi rupiah, kuartal satu sampai empat sebesar 12,6 persen atau mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan kuartal satu sampai empat pada tahun 2013 yang sebesar 15,3 persen.

SBSN denominasi valuta asing, secara empiris juga menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif pada setiap kuartalnya, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 164,3 persen atau dari Rp 5.6660,85 milyar pada kuartal pertama menjadi sebesar Rp 14.962,2 milyar pada kuartal empat. Kondisi ini bertolak belakang dengan SBSN denominasi rupiah dimana pada periode yang sama mengalami pertumbuhan terendah. SUN dengan denominasi valuta asing juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif pada setiap kuartalnya, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 45,9 persen atau dari Rp 239.051,7 milyar pada kuartal pertama menjadi sebesar Rp 348.789,46 milyar pada kuartal empat.

Pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 dilihat pertumbuhannya secara kuartalan baik SUN dominasi valuta asing maupun SUN dominasi rupiah menunjukkan penurunan, dimana pertumbuhan SUN domestik menurun dari 15,3

persen menjadi 12,6 sedangkan SUN valas pertumbuhannya menurun dari 45,9 persen menjadi 9,1 persen . Pertumbuhan SBSN per kuartalan pada tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013 untuk SBSN dominasi valuta asing menunjukkan pertumbuhan yang menurun yaitu dari 96,5 persen menjadi 31,4 persen, sedangkan untuk SBSN denominasi rupiah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat yaitu dari 13persen menjadi 14,4 persen.

Berfluktuasinya pertumbuhan SUN baik denominasi rupiah maupun valuta asing pada setiap kuartal (meskipun secara nominal meningkat) terjadi juga pada SBSN baik denominasi rupiah maupun valuta asing. Namun demikian, adanya kenaikan SUN dan SBSN secara nominal pada setiap kuartal selama periode pengamatan, hal ini mengindikasikan berminatnya masyarakat pada Surat Berharga Negara ini. Fenomena ini sekaligus memberikan peluang pada Pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan sumber pembiayaan pembangunan ini, sehingga adanya kenaikan secara angka nominal dan kenaikan dalam persentase pertumbuhan bisa terwujud. Sosialisasi juga perlu dilakukan mengingat SUN dan SBSN denominasi rupiah nilainya lebih besar dibandingkan dengan SUN dan SBSN denominasi valuta asing. Dengan demikian, kedepan defisit anggaran bisa diatasi oleh sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri.

PENUTUP

Hubungan Sukuk Negara atau SBSN sebagai instrumen fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. SBSN denominasi rupiah memiliki hubungan positif dan signifikan, sedangkan SBSN denominasi valuta asing memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. SUN denominasi rupiah memiliki hubungan positif, sedangkan SUN denominasi valuta asing memiliki hubungan negatif.

Pertumbuhan SUN baik denominasi rupiah maupun valuta asing pada setiap kuartal selama periode pengamatan cenderung berfluktuatif, meskipun secara nominal selalu mengalami peningkatan. Hal demikian terjadi juga pada SBSN baik denominasi rupiah maupun valuta asing. Pada tahun 2014 pertumbuhan SUN denominasi rupiah, SUN denominasi valuta asing, dan SBSN denominasi valuta asing pada kuartal pertama sampai kuartal empat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, sedangkan pertumbuhan SBSN denominasi rupiah kuartal pertama sampai kuartal empat mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan pada kuartal pertama sampai empat pada tahun 2013.

Dengan instrumen Surat Berharga Negara yang berupa Surat Berharga Syariah Negara, diharapkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, reksadana syariah, maupun asuransi syariah

Berpengaruhnya secara positif dan signifikan SBSN denominasi rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga disarankan terus dilakukan dan ditingkatkan sosialisasi terhadap keberadaan portofolio jenis ini agar instrumen fiskal ini benar-benar dikenal masyarakat, dengan demikian bisa mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan yang berasal dari utang luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, N.J & Thomas, A. 2005. *Islamic Bonds*. United Kingdom : Euromoney Books, Nestor House, Playhouse Yard.

Badan Pusat Statistik. 2014. Produk Domestik Bruto

- Baridwan, Anis. 2008. "Prospek Pasar Modal Syariah PascaUU SBSN". Disampaikan pada Seminar Nasional Indonesia Islamic Banking and Finance Updates 2008 – Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Profil Utang Pemerintah Pusat*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Marwadi, M Chalik. 2014. "Error Correction Mechanism". Diakses dari <http://statistikceria.blogspot.co.id>.
- Nachrowi, ND & Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi – Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Ryandini, Tya. 2013. "Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Iqtishad*, Volume VI Nomor 1, Januari 2014
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika*. Edisi Keempat. Jogjakarta: UPP STIM YKPN

QUO VADIS PRIVATISASI DI INDONESIA SEBAGAI SOLUSI KETAHANAN EKONOMI NASIONAL (Kajian Empiris, Permasalahan dan Solusinya)

Sari Narulita
FKIP PGRI Bandar Lampung
e-mail: litalampung@gmail.com

ABSTRACT

"Privatization" became a keyword in a "restructuring" improvement both internally and external to the performance of SOEs that have been considered "inefficient" in all sorts of problems. privatization is the effort made in the framework of restructuring of SOEs is one of the strategic steps to improve the condition of the company to improve performance and enhance shareholder value. Is during this long process and requires a large cost is able to answer the noble objectives of this privatization program. That is the basic study of this writing to find out how far privatization program is able to contribute positively to national economic security of our country.

The main purpose of privatization there are two, namely: first, to reduce the fiscal deficit and / or cover the obligations (debts) with a maturity of government, and second, to promote macro-economic performance or efficiency of the macro. Indonesia to establish long-term perspective that the goal of privatization is for the purpose of macro-economic efficiency as adopted by countries such as Britain, France, and Japan, but now is the purpose of doing privatization program is preferred to cover the fiscal deficit and government obligations maturing. From the various references to literature review and critical evaluation of several experts who are competent, then the program is still needed provatisation and most importantly the privatization process in making improvements and changes in a holistic manner that is the key to the success of stakeholders as a whole as it applies in practice in another country.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

BUMN didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Namun dalam kurun waktu 60-an tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Saat ini, kondisi dan kinerja BUMN dirasakan belum optimal, kegiatan operasional BUMN masih terfragmentasi dan budaya usaha yang birokratis menyebabkan BUMN kurang berorientasi pada pasar, kualitas dan kinerja usaha sehingga produktivitas dan utilitas aset juga sangat rendah. Sebagian BUMN masih memiliki sistem pemasaran dan distribusi yang kurang terkoordinasi dengan baik, khususnya untuk produk ekspor yang terfokus pada komoditas atau industri primer. Di samping itu sumber daya alam dan tenaga kerja murah

dijadikan sebagai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) padahal persaingan saat ini dan ke depan bersifat hiperkompetitif dan menuntut *competitive advantage*.

Harus disadari sepenuhnya bahwa secara umum BUMN masih menghadapi berbagai permasalahan strategis, baik yang berkaitan dengan BUMN itu sendiri maupun yang berkaitan dengan Pemerintah selaku Pemegang Saham maupun regulator. Masalah-masalah strategis tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja, *value* dan daya saing BUMN. Hal tersebut akan semakin terlihat apabila kita melakukan *benchmarking*, baik dengan perusahaan sejenis di Indonesia terlebih dengan industri secara regional/internasional.

Harus diakui sepenuhnya bahwa secara umum kinerja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kinerja sektor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun tingkat global. Hal ini terlihat antara lain dari indikator ROA rata-rata dalam beberapa tahun terakhir sebesar 1,45% - 5,05% dan *Return on Equity* (ROE) yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kisaran 5,40% - 25,15% dalam periode yang sama.

Tabel 1
Permasalahan-permasalahan BUMN

No.	Permasalahan BUMN	Uraian Singkat
1	masih rendahnya produktivitas aset	masih rendahnya utilisasi aset/kapasitas aset dan dalam beberapa hal terjadi karena <i>overpriced investment</i> di masa lampau
2	rendahnya <i>profit margin</i> atau laba	disebabkan antara lain masih tingginya biaya <i>overhead</i> , masih tingginya biaya produksi, serta masih rendahnya tingkat penjualan/pendapatan terkait dengan kualitas, daya saing produk, tingkat pelayanan dan penanganan pemasaran
3	struktur keuangan dan modal yang tidak atau kurang memadai	banyaknya BUMN yang tidak <i>bankable</i> , kemampuan yang terlalu kecil untuk mendapatkan pendanaan untuk keperluan pengembangan, masih rendahnya tingkat pertumbuhan dan laba sehingga kurang menunjang dalam melakukan pemupukan modal untuk berkembang, ekuitas perusahaan yang masih rendah, masih banyak BUMN yang memiliki piutang bermasalah dalam jumlah yang besar sehingga menyulitkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan
4	belum terimplementasikan-prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di sebagian besar BUMN	Pengelolaan BUMN masih cenderung mengikuti pengelolaan perusahaan yang dijalankan secara birokratis sebagaimana <i>legacy</i> pengelolaan badan usaha di bawah departemen teknis di masa lampau
5	belum seimbang antara kualitas dan kuantitas SDM	<i>overstaffing</i> dan pola rekrutmen yang masih perlu diperbaiki, masih perlu ditingkatkannya efektivitas sistem <i>career path planning</i> dan <i>reward and punishment</i> , efektivitas sistem pendidikan dan pengembangan SDM, serta mekanisme pengukuran kinerja yang belum secara spesifik terkait dengan sistem karir

		maupun kompensasi yang diterima
6	masih kurangnya kerja sama dan aktivitas sinergi antar BUMN sendiri	Sebagian masalah-masalah yang dihadapi perusahaan BUMN juga melibatkan perusahaan BUMN lainnya sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMN tidak dapat diselesaikan dalam konteks yang menguntungkan secara nilai bagi Pemerintah selaku Pemegang Saham

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

“Privatisasi” menjadi kata kunci dalam melakukan “restrukturisasi” pembenahan baik secara internal maupun eksternal terhadap kinerja BUMN yang selama ini dianggap “tidak efisien” dalam segala macam permasalahannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, belajar dari upaya pembenahan/program penyehatan BUMN yang selama ini dijalankan dapat dilihat berbagai kondisi objektif yang ada sehingga dapat ditarik beberapa pelajaran berharga dalam kerangka pengelolaan BUMN ke depan.

Permasalahan

Program pembenahan BUMN, merupakan proses yang panjang dan paling tidak sudah berjalan hampir 20 tahun. Proses pembenahan BUMN tersebut sekalipun berhasil meningkatkan beberapa variabel kinerja namun biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil. Pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, tentu dituntut untuk memperoleh peningkatan hasil atas proses pembenahannya. Apakah selama ini proses yang panjang dan memerlukan biaya besar ini mampu menjawab tujuan mulia dari program privatisasi ini? Pro dan kontra atas implementasi program dan contoh kasus proses privatisasi yang dilakukan oleh negara lain mampukah memberikan horison yang holistik atas cita-cita seperti yang diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 tersebut?

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan horison yang holistik atas proses privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat berupa peningkatan penerimaan negara dari dividen dan pajak, serta mampu menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Akhir dari semua ini adalah usaha-usaha yang diupayakan secara terus menerus dalam berbagai aspek untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diharapkan.

KAJIAN TEORITIS

Definisi konsep privatisasi

Secara teknis, privatisasi adalah pemindahan risiko yang biasanya ditanggung Pemerintah kepada pihak swasta, dengan menggunakan skema kompensasi tertentu bagi pihak swasta atas kesediaan menanggung risiko tersebut.

- ✓ Dengan demikian, definisi privatisasi tidak hanya masalah penjualan aset oleh pemerintah kepada pihak swasta, tetapi juga mencakup isu pengelolaan dan pengoperasian, konsesi, investasi baru, sampai masalah divestasi.
- ✓ Masyarakat umumnya memahami privatisasi hanya sebagai penjualan aset oleh pemerintah kepada pihak swasta.

Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta (dalam arti aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta).

- ✓ Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi, membantu terbentuknya pasar bebas (neoliberalisme), mengembangkan kompetisi kapitalis (padahal yang lebih penting adalah kompetisi), yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik.
- ✓ Tetapi teori semacam ini, berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat (swasta) yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk.

Tabel 2
Dimensi Pilihan Antara Swasta/Pemerintah

	Pembayaran Kolektif	Pembayaran Individual
Dihasilkan oleh sektor pemerintah	<i>Jasa keamanan, sekolah, kesehatan</i>	<i>Museum, berbagai produk dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN</i>
Dihasilkan oleh sektor swasta	<i>Pembelian pemerintah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan swasta</i>	<i>Sebagian terbesar dari sektor perekonomian dimana pemerintah terbatas pada mengatur dan memonitor</i>

Sumber: Donahue, 1989 (modifikasi)

Kondisi BUMN di Indonesia

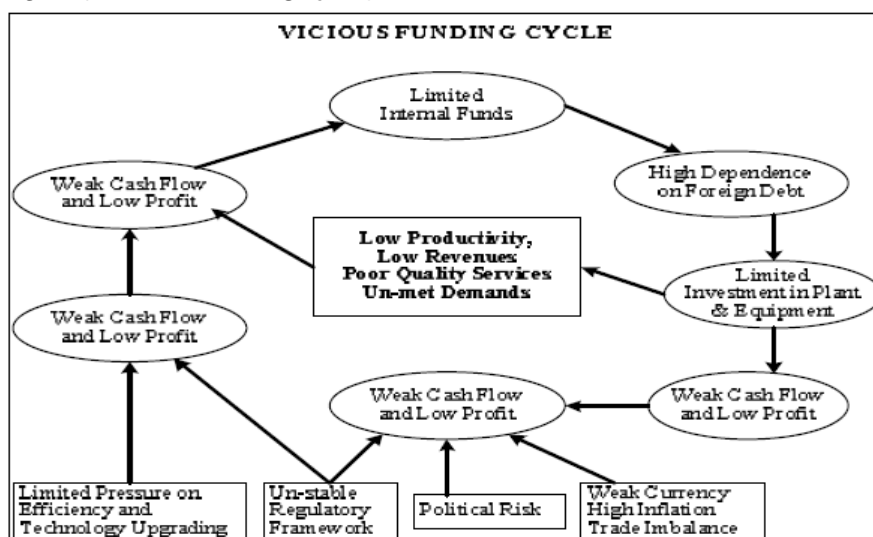
Langkah pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN melalui pelepasan sebagian saham di bursa seringkali dianggap menjual aset negara. Padahal langkah *go public* BUMN ini justru meningkatkan nilai aset BUMN, disampaikan Direktur Utama PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) Kahlil Rowter dalam seminar “Membedah Kinerja BUMN di Pasar Modal” (Mei, 2010).

Dilihat berdasarkan aset, saat ini baru 5 BUMN dengan aset terbesar yang mencatatkan sahamnya di bursa. Jika dijumlahkan, aset lima emiten BUMN itu mewakili 48% dari aset seluruh BUMN. Saat ini, baru 16 dari 139 BUMN yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), atau baru 10%-nya. Menurutnya, keuntungan yang bisa didapat BUMN dengan menjadi perusahaan terbuka antara lain transparansi bisnis dan keuangan, aplikasi tata kelola perusahaan, pengurangan pajak (dengan syarat saham yang dilepas ke pasar di atas 40%), dan *benchmarking* kinerja serta harga saham.

Gambar dibawah ini menunjukkan kondisi BUMN yang karena menghadapi masalah keterbatasan dana internal, menjadi sangat bergantung kepada dana luar negeri. Sementara itu, untuk memperoleh dana luar negeri, BUMN harus menempuh prosedur rumit dan biaya yang tinggi. Akibatnya investasi sarana dan prasarana produksi barang dan jasa menjadi sangat terbatas, sehingga produktivitas, pendapatan, dan kualitas produk yang dihasilkan BUMN tersebut menjadi rendah.

Hal ini menyebabkan BUMN tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau bersaing di pasar. Arus kas (*cash flow*) yang dimiliki dan laba yang dihasilkan pun sangat kecil, bahkan terkadang negatif. Di lain pihak, keterbatasan investasi untuk mengganti peralatan yang aus dan tidak produktif mengakibatkan beban hutang dan biaya modal semakin tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan inefisiensi pengoperasian perangkat usaha yang telah berusia tua tersebut.

Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMN menjadi makin berat dengan adanya berbagai permasalahan eksternal seperti: (1) lemahnya nilai tukar mata uang rupiah; (2) tingkat inflasi yang tinggi; (3) neraca perdagangan yang tidak seimbang; (4) resiko politik; (5) peraturan yang tidak stabil; dan (6) kurangnya tekanan untuk melakukan kegiatan secara lebih efisien atau meningkatkan kemampuan teknologi. Kesemuanya itu menjadikan permasalahan BUMN ibarat lingkaran yang tidak berujung pangkal (*vicious- funding cycle*).



Gambar 1
Vicious Funding Cycle

Sejarah Privatisasi

Berikut ini adalah alur yang bisa mengilustrasikan cikal bakal privatisasi.

Tabel 3
Alur Sejarah Privatisasi menurut berbagai versi

Urutan Uraian Singkat	Keterangan Tambahan
Sejak dilanda depresi 1930-an, telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat tentang peran pemerintah	Pemerintah dianggap bertanggung jawab terhadap pemulihan perekonomian nasional, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja

Kecenderungan membentuk BUMN meningkat selama Perang Dunia II, dan periode sesudahnya	Keberadaan sektor-sektor tertentu dan perekonomian yang memiliki posisi strategis
Ada jenis industri yang memiliki <i>economies of scale</i> yang besar sehingga cenderung harus memonopoli. Bagi <i>natural monopolies</i> yang lazim di bidang <i>public utilities</i>	Pemerintah umumnya suka terjun langsung daripada harus menyerahkannya pada swasta agar keuntungan yang diperoleh langsung pula mengalir ke kas negara
Perkembangan BUMN yang cepat berarti pula perluasan campur tangan pemerintah yang semakin besar dari satu negara ke yang lainnya	Perluasan campur tangan pemerintah yang tak terkendali akan mengakibatkan inefisiensi ekonomi, Tidak efektifnya penyediaan barang dan jasa serta perluasan birokrasi yang cepat akan menambah berat beban anggaran
Tekanan perekonomian dunia dan didorong pula oleh keinginan untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, mengakibatkan pemerintah di banyak negara meninjau kembali BUMN yang dimilikinya	Mulai mengevaluasi kemungkinan menggeser pengelolaan oleh negara ini sedikit demi sedikit ke swasta
Kenyataan ini, menjadi pertimbangan utama lembaga peminjaman internasional IMF mengeluarkan seri <i>research papers</i> yang mempelajari konsekuensi privatisasi	Berkembang menjadi kondisionalitas dalam pinjaman luar negeri pada akhir 1980-an
Mulailah terjadi arus swastanisasi atau lebih populer dengan privatisasi	Gelombang awal privatisasi yang melanda dunia dimulai di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

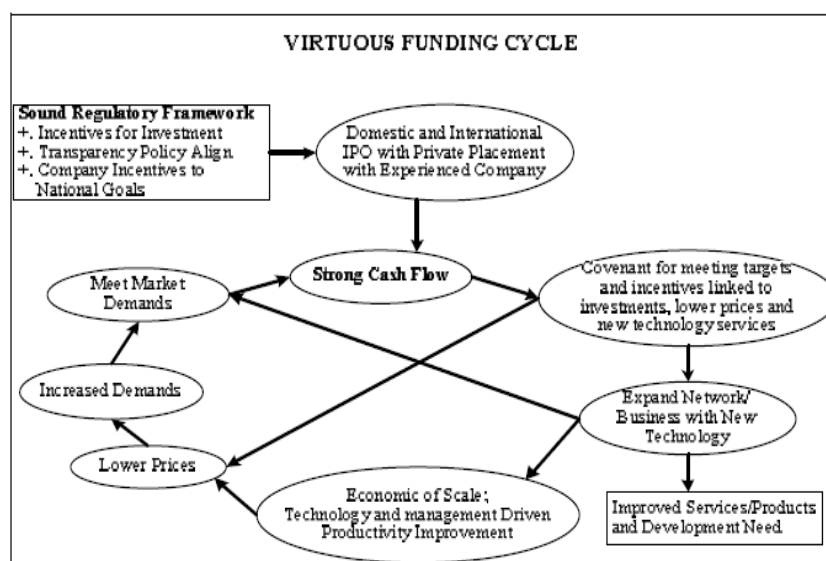
Manfaat Privatisasi

Manfaat dari program privatisasi pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan manfaat bagi perusahaan BUMN itu sendiri, manfaat bagi negara serta manfaat bagi masyarakat.

Bagi perusahaan BUMN yang bersangkutan privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal (a) memperbaiki penerapan dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), (b) mendapat akses dan sumber pendanaan baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan (c) dalam hal privatisasi melalui *Strategic Sale* (SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking dan peningkatan daya saing perusahaan.

Manfaat privatisasi bagi Negara adalah membantu memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi, menjadi sumber pendanaan bagi APBN (dari hasil divestasi), membantu mengembangkan sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Bagi masyarakat, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memperluas kepemilikan (penjualan saham melalui pasar modal), menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas jasa & produk melalui pertumbuhan perusahaan serta peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat investor terhadap perusahaan.



Gambar 2
Virtuous Funding Cycle

Privatisasi akan dapat meningkatkan transparansi (praktik *good corporate governance*), meningkatkan akses pasar, akses dana dari pasar modal serta alih teknologi. Langkah ini pada gilirannya akan mampu meningkatkan arus kas perusahaan, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar serta mampu memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan *Vicious Funding Cycle*

KAJIAN ANALITIS

Berikut ini adalah beberapa pendapat para pakar yang mengomentari tentang hal-hal yang berkaitan dengan Privatisasi.

Tabel 4
Pendapat pakar tentang Privatisasi

No	Pakar dan Sumber media/berita	Komentar/Keterangan tambahan
1	Faisal Basri, tempo interaktif, 23 Maret 2005	Restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) mendesak dilakukan. "Pasar baru harus dibangun tidak hanya dengan penciptaan pasar baru seperti prinsip neo-liberalisme, tapi dengan pengaturan dan penciptaan stabilitas pasar,"
2	Drajad Wibowo; tempo interaktif, 23 Maret 2005	kinerja BUMN yang terus menerus turun harus disikapi dengan restrukturisasi internal dan eksternal "Agar kebijakan tidak mengarah pada <i>free faal liberalization</i> "
3	Revrisond Baswir;	pentingnya reformasi BUMN untuk memperbaiki

	tempo interaktif, 23 Maret 2005	kinerja. "Terutama bagaimana memperbaiki perilaku kekuasaan serta perbaikan pola hubungan antara manajemen BUMN dengan pemerintah dan parlemen". perlu dibentuk sebuah badan independen yang bertanggung jawab khusus dalam mengembangkan BUMN. "Badan itu dapat disebut sebagai Badan Pengembangan BUMN"
4	Aviliani; Kompas, Sabtu, 26 Juli 2008	Tidak selamanya tindakan privatisasi aset negara menguntungkan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Karena itu perlu pengkajian ulang kebijakan ini
5	Ninasapti Triaswati; Kompas, Rabu, 26 November 2008	Seharusnya Pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap aset Indonesia, seperti saham BUMI. Ini merupakan saat yang tepat bagi Pemerintah untuk nasionalisasi aset privat (membeli saham murah di pasar)
6	Sofjan Djalil; Kompas, Kamis, 16 Oktober 2008	Privatisasi tiga perusahaan BUMN tertunda dilakukan akhir tahun ini menyusul adanya kondisi krisis keuangan global
7	Amien Rais; Kompas, Kamis, 12 Juni 2008	Penjualan aset-aset negara yang terus berlanjut dinilai membahayakan bagi kemandirian ekonomi. Dengan menjual aset negara, pemerintah telah membiarkan pihak luar mengontrol Indonesia
8	M Yasin, Kompas, Selasa, 30 Desember 2008	jumlah yang harus diprivatisasi pada 2009 mencapai 44 perusahaan, tetapi karena sejumlah pertimbangan dan situasi ekonomi yang belum pasti maka kemungkinan hanya 30 perusahaan

Sumber: Kompilasi penulis dari berbagai media online, diolah

1.1. Faktor-Faktor Pendorong Privatisasi

Berikut ini adalah hasil tabulasi mengenai faktor-faktor pendorong perlunya privatisasi beserta tujuan dan alasannya.

Tabel 5
Faktor pendorong Privatisasi

Faktor	Tujuan	Alasan
<i>Pragmatic</i>	Pemerintahan yang lebih baik (<i>better government</i>)	Privatisasi dapat mengarahkan pelayanan publik yang lebih <i>cost-effective</i> .
<i>Ideological</i>	Pemerintahan yang lebih ramping (<i>less government</i>)	Pemerintah terlalu besar, terlalu kuat, terlalu mencampuri kehidupan masyarakat, sehingga berbahaya bagi demokrasi. Kebijakan pemerintah bersifat politis, kurang memadai dibandingkan kebijakan yang ditetapkan melalui pasar bebas.
<i>Commercial</i>	<i>More business</i>	Belanja pemerintah merupakan bagian terbesar dari ekonomi. Semua ini dapat dan seharusnya diselenggarakan oleh swasta. BUMN dan assetnya dapat digunakan oleh sektor swasta secara lebih baik.

Populist	Better society	Penduduk mestinya memiliki banyak pilihan dalam pelayanan publik. Mereka harus diberdayakan untuk mendefinisikan dan menentukan kebutuhan umum dan meletakkan <i>sense of community</i> melalui perhatian yang lebih pada keluarga, tetangga, lembaga keagamaan, dan kesukuan serta lembaga-lebaga <i>voluntir</i> dan kurang terhadap struktur birokrasi.
----------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Savas, E., 1987. *The Key to Better Governments*

Metode dan Prosedur Privatisasi BUMN

Privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain melalui;

- a. **Public Offering**, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal.
- b. **Private Sale**, pemerintah menjual semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor tertentu.
- c. **New Private Investment**, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah.
- d. **Sale of Assets**, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMN secara langsung kepada pihak swasta.
- e. **Fragmentation**, BUMN direorganisasi atau dipecahpecah menjadi beberapa perusahaan, atau dibuat suatu *holding company* dengan beberapa anak perusahaan.
- f. **Management/Employee Buy Out**, Pemerintah mengalokasikan sejumlah saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN, atau koperasi karyawan BUMN.
- g. **Kontrak Manajemen**, pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk "mengelola" BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan dalam kontrak kerjasama).
- h. **Kontrak/Sewa Aset**, pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset atau fasilitas yang dimiliki BUMN selama periode tertentu.
- i. **Likuidasi**, alternatif terakhir yang dapat dilakukan pemerintah terhadap BUMN.

Potret Pragmatis Metode Privatisasi BUMN di Indonesia

Di bawah ini adalah merupakan aplikasi pragmatis mengenai metode privatisasi yang dilakukan di Indonesia dari tahun 1999 - 2004, seperti yang ditabelkan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6
Metode Privatisasi yang telah dilakukan sejak tahun 1991 sampai tahun 2004

Tahun	BUMN	Metode privatisasi
1991	PT Semen Gresik Tbk	IPO

1994	PT Indosat, Tbk	IPO
1995	PT Tambang Timah, Tbk	IPO
	PT Telkom, Tbk	IPO
1996	PT BNI, Tbk	IPO
1997	PT Aneka Tambang, Tbk	IPO
1998	PT Semen Gresik, Tbk	SS
1999	PT Pelindo II	SS
	PT Pelindo III	SS
	PT Telkom, Tbk	Placement
2001	PT Kimia Farma, Tbk	IPO
	PT Indofarma, Tbk	IPO
	PT Sucofindo	SS
	PT Telkom, Tbk	Placement
2002	PT Indosat, Tbk	Placement/ SS
	PT Telkom, Tbk	Placement
	PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	IPO
	PT WNI	SS
2003	PT Bank Mandiri, Tbk	IPO
	PT Indocement TP, Tbk	SS
	PT BRI, Tbk	IPO
	PT PGN, Tbk	IPO
2004	PT Pembangunan Perumahan	EMBO
	PT Adhi Karya	EMBO/IPO
	PT Bank Mandiri, Tbk	Placement
	PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	SS

Catatan:

IPO: Initial public offering; SS : Strategic Sales;

EMBO: Employee Managemet Buy Out

Sumber: Riant Nugroho, 2008

Aplikasi Pragmatis Privatisasi Negara Lain

Thailand menjadikan program privatisasi sebagai salah satu bentuk reformasi strukturalnya. Privatisasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah penerimaan pemerintah, sekaligus untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Master plan privatisasi telah membuat garis besar dan komisi provatisasi juga telah bekerja untuk mengatur, menerapkan, dan mengaudit proses penjualan BUMN (2009). BUMN yang akan diprivatisasi antara lain maskapai penerbangan dan perusahaan minyak. Privatisasi juga terganjal oleh belum adanya peraturan atau keputusan penting, seperti berapa penerimaan negara yang wajar dari penjualan suatu BUMN. Rakyat Thailand tentu tidak ingin BUMN yang ada dijual murah kepada pembeli yang biasanya dari luar negeri.

Keberhasilan program privatisasi di **Inggris**, pada masa pemerintahan perdana menteri Margaret Thatcher, swastanisasi perusahaan-perusahaan negara di Inggris memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi Inggris.

Privatisasi perusahaan-perusahaan negara di **Malaysia**, lebih menekankan kepada keikutsertaan pribumi. privatisasi BUMN di Malaysia telah banyak memberikan keuntungan baik bagi BUMN yang diprivatisasi, bagi masyarakat, maupun bagi pemerintah. Bagi BUMN yang diprivatisasi, kebijakan privatisasi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN. Bagi masyarakat, privatisasi telah meningkatkan percepatan penyediaan pelayanan publik. Hal ini karena proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak swasta, dapat selesai dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan jika proyek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sendiri.

Pemerintah **Cina** berhasil membuat privatisasi BUMN tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Privatisasi BUMN di Cina dilakukan dengan minimal PHK. Strategi privatisasi BUMN di Cina yang ditempuh untuk mengurangi PHK adalah melalui penjatahan saham (shareholding) kepada pekerja dan manajemen {*employee stock option plans* (ESOP)} dan {*management stock option plans* (MSOP)}. Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa tujuan utama privatisasi ada dua, yaitu: pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang jatuh tempo, dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro. Tujuan pertama umumnya diadopsi oleh negara-negara maju (industri) dan tujuan kedua umumnya diadopsi oleh negara-negara berkembang utamanya dalam kerangka tujuan jangka pendek.

Negara-negara maju yang menggulirkan program privatisasi dengan tujuan utama adalah efisiensi makroekonomi termasuk: Inggris (1979, 1984, dan 1997); Perancis (1986, 1988, dan 1997); dan Jepang (1980, 1987, dan 1988). State owned enterprises, SOEs, yang mereka privatisasi umumnya dimulai dari sektor telekomunikasi: British Telecom (Inggris); French Telkom (Perancis); dan Nippon Telegraph and Telephone, NTT, (Jepang). Sedangkan negara-negara berkembang yang mengadopsi program privatisasi dengan tujuan utama untuk menutupi defisit fiskal dan atau untuk menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang jatuh tempo, termasuk: RRC (1999); Chile (Telefones de Chile) (1990); Mexico (1982, 1992); Brazil (1998); Bolivia (1998); dan Afrika Selatan (1995). Lihat, Megginson dan Netter (2001).

1.2. Penelitian Terdahulu

“Dampak Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan perusahaan sebelum dan pasca-privatisasi dari 13 BUMN. Pada periode 1991-2003. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan seberapa besar efek privatisasi perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa

perusahaan mengalami inefisiensi signifikan. Terutama ada penurunan signifikan atas profitabilitas, leverage, dividen dan pengeluaran modal. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh D'Souza dan Megginson (1999). Hasilnya meningkatkan efisiensi, profitabilitas BUMN juga meningkat, sementara leverage menurun. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi, profitabilitas, leverage, dividen dan investasi modal semuanya mengalami penurunan (Lubis, 2005).

"Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Indonesia", tulisan ini menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN dengan metode *private placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan memberikan manfaat yang paling optimal (Purwoko, 2002). Beberapa manfaat akan diperoleh dengan privatisasi dengan model ini, antara lain:

- a) peningkatan kemampuan untuk mengakses peluang di pasar internasional,
- b) adanya transfer teknologi,
- c) terjadinya perubahan budaya kerja yang positif,
- d) serta penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMN.

Perluakah Privatisasi BUMN Dilakukan?

Pro dan kontra terhadap kebijakan privatisasi BUMN masih terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing.

SETUJU, berargumentasi bahwa :

1. privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN
2. menutup defisit APBN
3. adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi;
 - a) investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien.
 - b) mampu menciptakan laba yang optimal.
 - c) mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
 - d) mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen.

TIDAK SETUJU, berargumentasi bahwa :

1. kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah.
2. segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
3. defisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil penjualan BUMN;

Kendala / hambatan privatisasi

Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. Rendahnya minat investor, terutama investor asing, terutama dipicu oleh:

1. tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal,
2. kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi,
3. serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

4. Privatisasi tampak berhasil di negara maju, namun di negara berkembang sering terjadi kegagalan (tidak tercapainya harapan), karena beberapa hal:
 - a) Di negara maju, program privatisasi pemerintah memiliki tujuan yang jelas, sebaliknya di negara berkembang, tujuannya sering tidak jelas dan penuh konflik. Jika privatisasi cenderung menyebabkan konsentrasi kekayaan yang lebih besar atau hanya menukar monopoli pemerintah menjadi monopoli swasta, maka jelas akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan.
 - b) Hal kedua adalah *paradox of privatisation* dimana pemerintah biasanya ingin menjual perusahaan yang merugi. Dalam kondisi seperti ini tentunya tidak ada yang mau membelinya, karena investor secara lumrah akan mencari perusahaan yang menguntungkan dimana pemerintah enggan menjualnya.
 - c) Penilaian terhadap asset sering tidak realistis dalam nilai dan *potential earning*, sedangkan investor berharap menikmati dividen dan *capital gain*. Yang sering terjadi adalah pemerintah terlalu konservatif dengan menilai assetnya terlalu tinggi untuk menghindari konsekuensi politik yang negatif.
 - d) Privatisasi yang tidak diikuti dengan perubahan lingkungan bisnis dan manajemen sering tidak berhasil, karena faktor
 - e) manajemen sangat krusial untuk pertumbuhan mendatang. Ini disebabkan karena investor menginginkan efisiensi yang lebih tinggi dan pengendalian birokrasi yang lebih sedikit.
 - f) Belum berkembangnya pasar modal di negara berkembang juga merupakan salah satu faktor penghambat.

Privatisasi BUMN yang Ideal

Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya.

Privatisasi BUMN diharapkan:

- a) mampu meningkatkan kinerja BUMN,
- b) mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMN,
- c) mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,
- d) terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,
- e) terjadinya perubahan budaya kerja, serta
- f) mampu menutup defisit APBN

tabel 7
Kriteria model privatisasi yang ideal

Kriteria Privatisasi yang ideal	Pasar Modal	Privat Investor D.N.		Privat Investor L.N.	
		< 50%	> 50%	< 50%	> 50%
mampu meningkatkan kinerja BUMN	X	X	V	X	V
mampu menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan BUMN	X	X	V	X	V
mampu meningkatkan akses ke pasar internasional	X	X	V	V	V
terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi	X	X	V	X	V
terjadinya perubahan budaya kerja	X	X	V	X	V
mampu memberikan kontribusi menutup defisit APBN	V	V	V	V	V

Agar dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan yang paling tepat, sebelum dilakukan proses *rightsizing* dilakukan proses pemetaan. Proses pemetaan BUMN dilakukan berdasarkan dua kriteria pemetaan pokok yaitu berdasarkan tingkat eksternalitas dan profitabilitas serta pemetaan berdasarkan tingkat urgensi kepemilikan.

Pemetaan berdasarkan eksternalitas dan profitabilitas dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok atau kategori yaitu:

- (1) BUMN Eksternalitas Tinggi dengan Profitabilitas Rendah,
- (2) BUMN Eksternalitas Tinggi dengan Profitabilitas Tinggi,
- (3) BUMN Eksternalitas Rendah dengan Profitabilitas Rendah dan
- (4) BUMN Eksternalitas Rendah dengan Profitabilitas Tinggi.

Pemetaan berdasarkan urgensi kepemilikan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok atau kategori, yaitu

- (1) BUMN yang perlu dimiliki negara secara mayoritas dan
- (2) BUMN yang tidak perlu dimiliki negara secara mayoritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan utama privatisasi ada dua, yaitu: pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang jatuh tempo, dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro. Indonesia dalam perspektif jangka panjangnya menetapkan bahwa tujuan privatisasi adalah untuk tujuan efisiensi makro ekonomi seperti yang diadopsi oleh negara seperti Inggris, Perancis, dan Jepang, tetapi sekarang ini tujuan melakukan program privatisasi adalah diutamakan untuk menutupi defisit fiskal dan kewajiban pemerintah yang jatuh tempo. Sementara itu privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi suatu BUMN dengan memasukkan dalam market condition yang selanjutnya memberi keuntungan bagi pemilik, pelanggan dan karyawannya. Privatisasi dapat dilaksanakan karena berbagai tujuan, yaitu :

1. Memacu pendapatan perusahaan,
2. Mengurangi utang,
3. Memperoleh dana dari pasar modal,
4. Mengurangi peran pemerintah dalam suatu industri,
5. Meningkatkan sebaran pemegang saham.

Tidak bisa dielakkan bahwa privatisasi masih diperlukan dan yang terpenting adalah proses privatisasi dalam melakukan pembenahan dan perubahan secara holistik itulah yang menjadi kunci keberhasilan stakeholder secara keseluruhan seperti yang diaplikasikan dalam prakteknya di negara lain.

Saran

Agar privatisasi yang ditargetkan dapat berhasil lebih baik, saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di BUMN Indonesia, seyogyanya pemerintah menyusun suatu sistem dan prosedur privatisasi BUMN yang baku, dan berlaku untuk semua BUMN yang akan

- diprivatisasi tanpa ada pengecualian.
2. Setiap proses privatisasi, sebaiknya diawali dengan sosialisasi yang memadai untuk pihak-pihak yang terkait dengan privatisasi, seperti karyawan, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, DPR, DPRD dan masyarakat di sekitar BUMN.
 3. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN, seyogyanya mempersiapkan diri dalam rangka pergeseran peran dari penentu kebijakan dan pelaksana kegiatan BUMN menjadi fasilitator dan regulator kegiatan BUMN.
 4. Era globalisasi menuntut negara untuk senantiasa mewaspadaai dan tidak mungkin menutup diri dari perkembangan dan perubahan sistem ekonomi yang mengglobal pula. Oleh karena itu, negara harus mampu mengintegrasikan ekonomi nasional dengan ekonomi global secara adaptif dan dinamis sehingga diperoleh hasil optimal bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H, *Konsep Privatisasi: Privatisasi Ditinjau dari Aspek Ekonomi Makro*, Dalam Seminar Terbatas Kantor Meneg BUMN, Graha Sawala Departemen Keuangan, Jakarta 21 Mei 2002
- Bastian, Indra. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Salemba Empat, 2002
- Edi Swasono, Sri, *Refleksi Sosial Politik dan Sosial Kultural (Go Public vs Privatisasi: Seminar dan Lokakarya Strategi Reformasi BUMN*, Harian Ekonomi Bisnis Bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Jakarta 27 Maret 2002
- <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/02/07/11040/waspada-ledakan-privatisasi-bumn/>
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/03/23/brk,20050323-68,id.htm>
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/26/20092622/kaji.ulang.privatisasi.aset.negara>
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/10561889/Privatisasi.Bukan.Pilihan.Tepat>
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/16/1803530/Privatisasi.BUMN.Terjegal.Krisis.Keuangan.Global>
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/06/12/22374236/Amien.Rais:.Penjualan.Aset.Membahayakan.Negara>
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/12/30/14530446/30.bumn.masuk.daftar.privatisasi.2009>
- Ika, Syahrir dan Samosir, Agunan P., *Analisis Privatisasi BUMN dalam Rangka Pembiayaan APBN*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 6, No. 4 Desember 2002
- Megginson, William L., 2002; *Dampak Privatisasi: Sebuah Kajian dari Pengalaman Empiris*, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol.3, No.2, Desember: 3-10
- Purwoko, SE, MBA, *Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1 Maret 2002

PROBABILITAS KEMISKINAN PENDUDUK DAERAH BANTARAN SUNGAI DAN BUKAN BANTARAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN

Ika Chandriyanti, Muzdalifah, Ahmad Yunani dan Dewi Rahayu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
e-mail:

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the probability of poverty in areas the riverbanks and areas not the river banks in Banjarmasin City. Using a sample of 160 people living in the riverbanks and 400 people living in not the riverbanks and logistic regression analysis, the results showed that in areas the riverbanks, the probability of poverty is significantly influenced by age and gender, while in not the riverbanks, the probability of poverty is influenced by age, education, and business field. In the riverbanks age older workers and woman are most likely to increase poverty. In the area not riverbanks, young workers and low educational are most likely to increase poverty, while the non-formal sector is more likely to reduce poverty. Population living in areas the riverbanks are most likely to reduce poverty than the population living in areas not the riverbanks.

Keywords: Poverty, Probability, Logistic Regression, Riverbanks, Banjarmasin

PENDAHULUAN

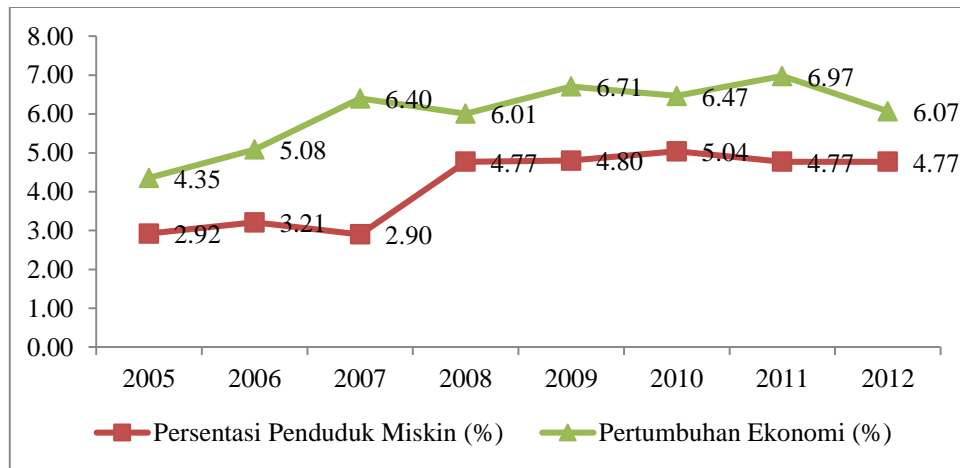
Pembangunan ekonomi yang mengupayakan tercapainya peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan, peningkatan lapangan kerja yang dapat menyerap dan mengurangi tingkat pengangguran, serta perbaikan kualitas hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua hal yang diharapkan baik dapat tercapai secara keseluruhan. Begitu pula hasil dari proses pembangunan ekonomi tidak dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga masalah pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat pengangguran masih merupakan hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah, karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur beberapa urusan, termasuk pembangunan ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan kesejahteraan kepada penduduknya. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri, sehingga proses pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah daerah dan dukungan masyarakat menjadi strategis dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah, selain meratanya tingkat pendapatan dan menurunnya jumlah penduduk miskin. Di sisi lain, pembangunan ekonomi juga selalu menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain kemiskinan, kesenjangan tingkat pendapatan penduduk, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dalam pembangunan yang bersifat multi-dimensi dan terkait dengan berbagai bidang, yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, serta dimensi ruang dan waktu. Hampir semua negara-negara yang sedang membangun, akan selalu berhadapan dengan kemiskinan, karena pembangunan merupakan proses yang sangat kompleks.

Banjarmasin sebagai ibukota Kalimantan Selatan juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan ini. Di Kota Banjarmasin, dari tahun 2005 hingga 2012 terlihat bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Meskipun persentase penduduk miskin masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin, akan tetapi cenderung terjadi peningkatan, kecuali tahun 2007 yang terjadi sedikit penurunan. Ini berarti bahwa capaian dari sisi pertumbuhan masih belum maksimal dalam rangka pengurangan tingkat kemiskinan (lihat Gambar 1).



Gambar 1
Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin

Banyak faktor yang berpeluang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yang menjadi perhatian dari para peneliti. Di antaranya Kakisina (2011), meneliti mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kemiskinan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa umur, tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan keluarga, dan keterampilan sebagai faktor internal dan kebijakan pemerintah, keterbatasan modal, frekuensi kegiatan penyuluhan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga dan merupakan indikator penyebab terjadinya kemiskinan pada Negeri Hatusua. Sementara Hayati (2012) menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kemiskinan rumah tangga di Provinsi Banten adalah lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan, dan lapangan pekerjaan), serta bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, di mana hasilnya berbeda-beda antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Chandriyanti, dkk. (2014) meneliti probabilitas kemiskinan penduduk yang ada di daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin, yang hasilnya menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin kepala rumah tangga yang signifikan dalam peluang terjadinya kemiskinan, di mana usia pekerja tua dan perempuan berpeluang lebih besar dalam terjadinya kemiskinan.

Studi ini merupakan kelanjutan dari penelitian Chandriyanti, dkk (2014),

dengan menambahkan sampel penduduk yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai Kota Banjarmasin. Studi ini ingin mengetahui apakah usia, jenis kelamin, pendidikan, lapangan usaha kepala rumah tangga berpeluang dalam terjadinya kemiskinan di daerah bukan bantaran sungai Kota Banjarmasin. Selain itu, studi ini ingin mengetahui apakah lokasi tempat tinggal (bantaran sungai dan bukan bantaran sungai) juga mempengaruhi peluang terjadinya kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancam posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktural sosial yang mendukung dalam meningkatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Dimensi kemiskinan baik secara lokal maupun nasional, mempunyai empat dimensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low-level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). "Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan"

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Wijayanto (2010) secara sederhana dan umum yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Sayogyo (2009) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tentang pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Beberapa indikator yang umumnya dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga antara lain jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, banyaknya anggota rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang pengeluarannya sebesar Rp. 308.826,-/kapita/bulan tersebut berasal dari perhitungan pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk mencakup kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya yang diakui dalam perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan rasa aman. Penyebab terjadinya kemiskinan di berbagai wilayah berbeda sesuai dengan kondisi wilayah dan kompleksitas kemiskinan yang terjadi. Ada banyak faktor penyebab kemiskinan tersebut. Banyak literatur menyebutkan faktor-faktor tersebut, antara lain tingkat pendidikan, usia, jenis pekerjaan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Perbedaan kecenderungan terjadinya kemiskinan menyebabkan perbedaan kebijakan masing-masing wilayah untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang memberikan peluang sebagai penyebab kemiskinan di antaranya adalah pendidikan, usia, lapangan usaha dan jenis kelamin.

1. Pendidikan

Banyak literatur yang menyebutkan pentingnya pendidikan bagi peningkatan taraf hidup seseorang, karena tingkat pendidikan menentukan tinggi rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka upah/gaji yang diterima pekerja juga akan semakin tinggi (Sumarsono, 2003). Oleh karena itu, tinggi rendahnya pendidikan akan berdampak terhadap kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Pengurangan kemiskinan absolut akan dapat terjadi apabila masyarakat miskin mampu meningkatkan pendidikannya agar dapat bersaing di pasar kerja.

Penduduk miskin sering kesulitan menjangkau fasilitas pendidikan dan kesulitan keuangan untuk membiayai pendidikan anaknya. Motivasi penduduk miskin untuk membiayai sekolah anaknya di negara berkembang sering tidak sejalan dengan ekspektasi manfaat yang diterima di kemudian hari. Biaya yang dikeluarkan sering menjadi penghalang atau tidak sebesar manfaat relatif yang akan diterima di masa depan (Tambunan, 2006).

2. Usia

Dalam ketenagakerjaan, BPS menyatakan bahwa usia kerja penduduk dimulai dari usia 10 tahun ke atas (BPS, 2010). Dengan demikian,

sebagian besar tenaga kerja termasuk dalam usia sekolah. Mereka yang bekerja pada usia-usia produktif (15-34 tahun) sering dihadapkan pada kondisi setengah pengangguran yang akan berdampak pada tingkat upah yang diperoleh dan berdampak pula terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Pada berbagai penelitian, umur sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Semakin bertambah usia seseorang semakin tinggi produktifitas kerja semakin bertambah pula pendapatan yang diperoleh, sehingga secara absolut kemiskinan semakin menurun. Hanya saja, pada satu titik akan terjadi penurunan produktivitas karena meningkatnya umur dan berlaku "*Law of diminishing return*" dalam ketenagakerjaan (Budiarto dan Munir, 1985). Hasil penelitian Chandriyanti, dkk. (2014) terhadap penduduk di daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pekerja usia tua berpeluang lebih besar dalam terjadinya kemiskinan.

3. Lapangan Pekerjaan Utama

Pemilihan pekerjaan utama masyarakat tergantung dari struktur wilayah yang bersangkutan. Sering kali pekerjaan utama ini memberikan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Jenis pekerjaan yang ditekuni merupakan salah satu variabel yang mendapat sorotan penting dalam melihat kondisi kemiskinan wilayah. Pergeseran struktur ekonomi di Indonesia menyebabkan pergeseran jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk. Ada kecenderungan perubahan pekerjaan membawa dampak terhadap kemiskinan. Pergeseran dapat meningkatkan kemiskinan atau sebaliknya menurunkan tingkat kemiskinan (Muzzakir, 2012). Hal ini dikarenakan pergeseran pekerjaan akan menyebabkan penumpukan pekerja pada satu jenis pekerjaan, sehingga terjadi pendapatan terbagi dengan jumlah pekerja yang lebih banyak. Akibatnya, dapat menurunkan tingkat pendapatan dan meningkatkan kemiskinan.

4. Jenis Kelamin

Kemiskinan umumnya terjadi pada penduduk dengan jenis kelamin perempuan karena laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga penduduk perempuan memiliki peluang menjadi miskin lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hasil penelitian Hayati (2012) menunjukkan bahwa kepala rumah tangga perempuan mempunyai resiko 1, 627 kali lebih besar daripada kepala rumah tangga laki-laki di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, begitu pula hasil penelitian Chandriyanti, dkk. (2014) kepala rumah tangga perempuan berpeluang 1,231 kali lebih besar daripada kepala rumah tangga laki-laki di daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *explanatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel, dengan data yang diperoleh secara langsung dari responden (data primer) melalui wawancara terhadap 160 responden yang tinggal di daerah bantaran sungai (berdasarkan data penelitian Chandriyanti, dkk. (2014)) dan 400 responden yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai di

Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis inferensial dengan Regresi Logistik. Penggunaan model logistik karena variabel tidak bebasnya adalah variabel yang bersifat kualitatif (skala nominal atau ordinal). Kategori dari variabel tidak bebasnya harus *mutually exclusive* dan *exhaustive*. Suatu variabel tidak bebas dengan j kategori akan membentuk persamaan logistik sebanyak j-1, di mana masing-masing persamaan ini membentuk regresi logistik biner yang membandingkan suatu kelompok kategori terhadap kategori referensi.

Penduduk miskin atau yang termasuk dalam kategori miskin adalah sebagai variabel terikat yang dilambangkan sebagai $Y = 0$, bila termasuk tidak miskin dan dilambangkan dengan $Y = 1$, bila termasuk miskin. Selanjutnya untuk melihat model regresi logistik dikotomi, variabel terikat dinyatakan dalam fungsi logit untuk $Y = 1$ dibandingkan dengan fungsi logit $Y = 0$. Dengan demikian maka untuk kedua kategori variabel terikat dalam model ini akan dikembangkan menjadi 1 (satu) persamaan fungsi logit (Nuchrowi dan Usman, 1992), yaitu : Fungsi logit untuk $Y = 1$ relatif terhadap fungsi logit untuk kategori $Y = 0$, selanjutnya disebut sebagai kategori rujukan/pembanding (*reference group*). Secara umum kategori di atas dengan p variabel bebas maka dapat dibentuk 1 (satu) fungsi logit yang dinotasikan sebagai berikut :

$$P_i = EY = \frac{1}{X_i} = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_p X_p)}} \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan (1) di atas kemudian di sederhanakan menjadi :

$$P_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} \dots\dots\dots (2)$$

Agar persamaan (2) dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dimanipulasi dengan cara mengalikan $1+e^{-Z_i}$ pada kedua sisi, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$(1 + e - Z_i)P_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} x (1 + e - Z_i) \dots\dots\dots (3)$$

atau $(1+ e-Z_i) P_i = 1$

$$\frac{(1+e-Z_i)P_i}{P_i-1} = \frac{1}{P_i-1} \dots\dots\dots(4)$$

Sehingga,

$$eZ_i = \frac{P_i}{1-P_i} \dots\dots\dots (5)$$

Karena range P_i berkisar antara 0 - 1 dan P_i berhubungan secara non linear dengan Z_i . Jika P_i merupakan notasi penduduk miskin, $1 - P_i$ merupakan notasi penduduk tidak miskin.

Peluang penduduk miskin adalah :

$$1 - P_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} \dots\dots\dots(6)$$

Dengan model statistik *Odds Ratio* dengan menggabungkan persamaan (5) dan persamaan (6) diperoleh persamaan baru sehingga persamaan baru dapat ditulis menjadi:

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{1+eZ_i}{1+eZ_i} = eZ_i \dots\dots\dots (7)$$

Persamaan (7) selanjutnya ditransformasikan menjadi model logaritma natural sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$L_i = Ln \frac{P_i}{1-P_i} = Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon_i \dots\dots\dots (8)$$

Spesifikasi Model

Untuk mengetahui perbedaan probabilitas kemiskinan penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai dan bukan bantaran sungai di Kota Banjarmasin digunakan model regresi logit. Variabel terikatnya adalah seluruh penduduk yang menjadi responden dalam penelitian ini, yang dikategorikan dalam dua klasifikasi, penduduk miskin dan penduduk tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan standard BPS tahun 2013 yakni besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk daerah perkotaan sebesar Rp.308.826,-/kapita/bulan. Sementara variabel bebas adalah faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi peluang kemiskinan. Model empirisnya diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Usia + \beta_2 JK + \beta_3 Edu + \beta_4 LU + \varepsilon_i \dots\dots\dots (9)$$

Persamaan (9) diterapkan untuk kedua kelompok, yaitu penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai dan penduduk yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai, sedangkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan peluang terjadinya kemiskinan antara penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai dan bukan bantaran sungai, seluruh sampel digabung dan ditambahkan variabel lokasi, sehingga persamaan (9) menjadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Usia + \beta_2 JK + \beta_3 Edu + \beta_4 LU + \beta_5 Lok + \varepsilon_i \dots\dots\dots (10)$$

Penjelasan Variabel

1. Variabel Terikat

Penduduk miskin (Y)

Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah penduduk kota Banjarmasin yang berada dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah standard BPS tahun, responden akan didefinisikan menjadi 2 kategori yaitu:

Y = 1; Penduduk miskin

Y = 0; Penduduk tidak miskin.

2. Variabel Bebas

a. Usia

adalah usia kerja yaitu umur penduduk 15 tahun ke atas yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut :

Usia = 1; Usia Pekerja Muda (15-34 tahun)

Usia = 0; Usia Pekerja Tua (35 tahun ke atas)

b. Jenis Kelamin (JK)

Jenis kelamin penduduk yang dikategorikan sebagai berikut:

JK = 1; Perempuan

JK = 0; Laki-laki

c. Pendidikan (Edu)

Adalah jenjang pendidikan formal yang berhasil ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas, dikategorikan sebagai berikut:

Edu = 1; pendidikan SLTP ke bawah

Edu = 0; pendidikan di atas SLTP

d. Lapangan Usaha (LU)

Adalah lapangan pekerjaan di mana penduduk bekerja, dikategorikan sebagai berikut:

LU = 1, sektor non formal

LU = 0; sektor formal

e. Lokasi (Lok)

Adalah lokasi di mana penduduk tinggal, dikategorikan sebagai berikut:

Lok = 1; daerah bantaran sungai

Lok = 0; daerah bukan bantaran sungai

Pengujian Statistik dan Signifikansi Variabel

Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding dengan teknik lain, yaitu :

- a. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam distribusi normal, *linear*, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup.
- b. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel *continue*, diskrit, dan dikotomis.
- c. Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan *non linear* dengan satu atau lebih variabel bebas (Kuncoro, 2001).

Analisis *Regresi Logistik* digunakan untuk menganalisis model pada skenario yang telah dirancang di atas. Model yang dapat memberikan hasil estimasi yang paling baik, dalam arti tingkat signifikansi statistik, kesesuaian tanda koefisien parameter hasil estimasi dengan teori atau kesesuaian implikasinya di lapangan dipilih sebagai model yang sesuai (*best fit*) bagi penelitian ini. Pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan bantuan paket program komputer *Stata 12*.

Uji kelayakan secara keseluruhan (*Overall Fit Test*) dilihat dari nilai *-2 log likelihood*. Nilai *-2 log likelihood* yang semakin rendah dibandingkan dengan nilai awal, menunjukkan bahwa model akan semakin fit secara keseluruhan.

Uji kemaknaan koefisien regresi *overall fit test* dilakukan dengan uji *chi square* apabila sig *chi square* kurang dari 0,05 berarti signifikan dengan taraf nyata 5%, maka model dapat dikatakan baik, secara bersama-sama variabel bebas dapat menjelaskan perbedaan variabel terikat.

Uji secara parsial bertujuan menghubungkan 2 atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Parameter yang digunakan adalah membandingkan antara nilai signifikansi setiap variabel dengan taraf nyata 5%. Apabila nilai signifikansi di bawah 5%, maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, berlaku pula sebaliknya. Apabila nilai koefisien pada variabel bebas adalah positif (+), maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan positif (+) terhadap variabel terikat, berlaku pula sebaliknya. *Odd ratio* menunjukkan nilai besar peluang penduduk miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai sejumlah 160 orang dan yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai sebanyak 400 orang, sehingga total responden adalah 560 orang. Karakteristik responden disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Bantaran Sungai		Bukan Bantaran Sungai		Total		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kemiskinan	Miskin	53	33,13	224	56,00	277	49,46
	Tidak Miskin	107	66,87	176	44,00	283	50,54
Usia	Pekerja Muda	34	21,25	299	74,75	333	59,46
	Pekerja Tua	126	78,75	101	25,25	227	40,54
Jenis Kelamin	Perempuan	72	45,00	146	36,50	218	38,93
	Laki-laki	88	55,00	254	63,50	342	61,07
Pendidikan	< = SLTP	98	61,25	204	51,00	302	53,93
	> SLTP	62	38,75	196	49,00	258	46,07
Lapangan Usaha	Non Formal	152	95,00	361	90,25	513	91,61
	Formal	8	5,00	39	9,75	47	8,39

Sumber: Hasil Olah Data

Secara keseluruhan responden yang masuk ke dalam kategori miskin sebanyak 49,46% dan sisanya sebanyak 50,54% termasuk ke dalam kategori tidak miskin. Apabila dikelompokkan berdasarkan lokasi, dari 160 responden tinggal di daerah bantaran sungai, sebanyak 53 responden (33,13%) dikategorikan sebagai penduduk miskin, sedangkan sisanya 107 responden (66,87%) tergolong tidak miskin. Sementara responden yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai sebanyak 56% tergolong penduduk miskin dan sisanya 44% tergolong tidak miskin.

Dari segi usia, secara keseluruhan ada 59,46% responden yang tergolong pekerja muda dan 40,54% pekerja tua. Di daerah bantaran sungai responden lebih banyak masuk dalam golongan pekerja tua, yaitu 78,75% dan pekerja muda hanya 21,25%. Sementara di daerah bukan bantaran sungai, responden lebih banyak tergolong dalam pekerja muda, yaitu sebanyak 74,75% dan sisanya sebanyak 25,25% responden merupakan penduduk dalam usia pekerja tua.

Secara keseluruhan responden perempuan sebanyak 38,93% dan laki-laki 61,07%, akan tetapi bila dilihat menurut lokasi, maka di daerah bantaran sungai responden perempuan dan laki-laki hampir berimbang, yaitu masing-masing 45% dan 55%. Sementara di daerah bukan bantaran sungai responden laki-laki lebih dominan, yaitu sebanyak 63,5% dan hanya 36,5% perempuan.

Dari segi pendidikan, secara keseluruhan responden lebih banyak berpendidikan SLTP ke bawah, yaitu sebanyak 53,93%. Akan tetapi bila dipecah berdasarkan lokasi, di daerah bantaran sungai persentase responden yang berpendidikan SLTP ke bawah jauh lebih besar, yaitu 61,25% dan hanya 38,75% berpendidikan di atas SLTP, sedangkan di daerah bukan bantaran sungai hampir sama persentase antara responden yang berpendidikan di bawah SLTP dan di atas SLTP, yaitu masing-masing 51% dan 49%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di daerah bantaran sungai di Kota Banjarmasin relatif masih rendah dibandingkan dengan penduduk di daerah bukan bantaran sungai.

Pekerjaan responden yang ditekuni di daerah perkotaan umumnya adalah sektor formal dan non formal, di mana penduduk yang bekerja di sektor non formal jauh lebih banyak dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Dari 560 responden secara keseluruhan, 91,61% bekerja di sektor non formal. Kondisi ini hampir sama setelah dipisah antara responden yang tinggal di daerah bantaran

sungai dan di daerah bukan bantaran sungai. Hal ini menggambarkan bahwa kebanyakan dari penduduk di Kota Banjarmasin sama dengan kebanyakan penduduk di daerah perkotaan yakni bekerja pada sektor non formal mengingat sektor ini adalah merupakan sektor yang mudah dimasuki dan mudah untuk ditinggalkan serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu dan keahlian tertentu.

Hasil Estimasi Regresi Logistik

Pengujian kelayakan pada model regresi logistik, dapat dilihat dari nilai $-2 \log \text{likelihood}$ yang semakin mengecil setiap tahap dan *overall fit test* dapat dilihat dari nilai *chi-square* (χ^2), apabila sig *chi-square* (χ^2) kurang dari 0,05 berarti signifikan, dan model dapat dikatakan baik (*fit*). Dari hasil regresi logistik diketahui bahwa semua model menunjukkan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ yang semakin mengecil yang menunjukkan bahwa model sudah cukup baik. Begitu pula halnya nilai *chi-square* (χ^2) untuk setiap model signifikan dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$. Nilai *chi-square* (χ^2) masing-masing model disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Nilai *Chi-Ssquare* (χ^2) Probabilitas Kemiskinan Penduduk

Lokasi	Nilai <i>chi-square</i> (χ^2)	Sig <i>chi-square</i> (χ^2)	Keputusan
Bantaran Sungai	20,22	0,0005	Signifikan
Bukan Bantaran Sungai	24,63	0,0001	Signifikan
Gabungan (Kota Banjarmasin)	40,92	0,0000	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan *software* Stata adalah uji z, apabila prob(z) kurang dari 0,05 maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$. Hasil uji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Variabel

Daerah	Variabel	Koefisien	<i>Odd Ratio</i>	Prob (z)	Keputusan $\alpha = 5\%$
Bantaran Sungai	Usia	-0,9995	0,3681	0,047	Signifikan
	Jenis Kelamin	1,2327	3,4306	0,001	Signifikan
	Pendidikan	0,2241	1,2512	0,546	Tidak Signifikan
	Lap. Usaha	-1,2790	0,2783	0,252	Tidak Signifikan
Bukan Bantaran Sungai	Usia	0,7127	2,0395	0,005	Signifikan
	Jenis Kelamin	-0,4105	3,4306	0,066	Tidak Signifikan
	Pendidikan	0,7637	1,2512	0,000	Signifikan
	Lap. Usaha	-0,9627	0,2783	0,012	Signifikan
Gabungan (Kota Banjarmasin)	Usia	0,2001	1,2215	0,331	Tidak Signifikan
	Jenis Kelamin	0,1528	1,1651	0,403	Tidak Signifikan
	Pendidikan	0,5587	1,7484	0,002	Signifikan
	Lap. Usaha	-0,9653	0,3809	0,006	Signifikan
	Lokasi	-1,8633	0,1552	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel yang mempengaruhi probabilitas kemiskinan penduduk di daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin adalah Usia dan Jenis Kelamin, sedangkan di daerah bukan bantaran sungai variabel yang mempengaruhi probabilitas kemiskinan penduduk adalah Usia, Pendidikan, dan Lapangan Usaha. Ketika pengolahan data digabung responden di daerah bantaran sungai dan daerah bukan bantaran sungai dengan menambahkan variabel lokasi untuk membedakan antar kelompok, ternyata variabel yang signifikan mempengaruhi probabilitas kemiskinan penduduk adalah pendidikan dan lapangan usaha, serta lokasi tempat tinggal. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel ini akan dibahas satu-persatu.

Variabel Usia

Di daerah bantaran sungai, slope variabel usia tanda - 0,9995, yang berarti bahwa usia pekerja muda berpeluang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kemiskinan Nilai *odd ratio* 0,3681 menunjukkan bahwa usia pekerja muda berpeluang untuk mengurangi terjadinya kemiskinan 0,3681 kali dibandingkan dengan usia pekerja tua. Hal ini bertentangan dengan teori tetapi berdasarkan fakta di lapangan ditemukan hal sebaliknya. Kondisi ini disebabkan karena dari 160 responden yang hidup di daerah bantaran sungai umumnya berada pada kelompok pekerja dengan usia tua dan berpendidikan rendah dan mereka adalah penduduk yang selama ini menerima manfaat yang besar dari anugerah lahan basah, berupa daerah bantaran sungai sebagai tempat mereka menggantungkan hidupnya selama ini. Kondisi ini tidak dapat terus bertahan, karena kualitas lahan yang semakin menurun dan adanya alih fungsi lahan juga perubahan ekosistem, sehingga harus disikapi dengan masuknya penduduk pada pekerjaan di luar sektor pertanian. Hal ini umumnya memerlukan tenaga yang relatif berat, karena sebagian bekerja sebagai buruh sehingga adanya kelompok pekerja usia muda berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Dalam ketenagakerjaan, BPS menyatakan bahwa usia kerja penduduk dimulai dari usia 10 tahun ke atas (BPS, 2010). Dengan demikian, sebagian besar tenaga kerja termasuk dalam usia sekolah. Mereka yang bekerja pada usia-usia produktif (15-34 tahun) sering dihadapkan pada kondisi setengah pengangguran yang berdampak pada tingkat upah yang diperoleh dan berdampak pula terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Pada berbagai penelitian, usia sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Semakin bertambah usia seseorang semakin tinggi produktivitas kerja semakin bertambah pula pendapatan yang diperoleh, sehingga secara absolut kemiskinan semakin menurun. Hanya saja, pada satu titik akan terjadi penurunan produktivitas karena meningkatnya umur dan berlakunya "*law of diminishing return*" dalam ketenagakerjaan (Budiarto dan Munir, 1985).

Di daerah bukan bantaran sungai slope untuk variabel Usia tanda + 0,7127 artinya penduduk yang termasuk dalam pekerja muda punya peluang lebih besar untuk menambah peluang terjadinya kemiskinan penduduk dibandingkan penduduk yang berusia tua. Nilai *Odds Ratio* sebesar 2,039 artinya kemungkinan penduduk usia pekerja muda akan menambah peluang terjadinya kemiskinan adalah 2,039 lebih besar bila dibandingkan dengan variabel lainnya.

Ketika data digabung antara responden yang tinggal di daerah bantaran sungai dan bukan bantaran sungai, variabel usia justru menjadi tidak signifikan dalam mempengaruhi probabilitas kemiskinan.

Variabel Jenis Kelamin (JK)

Variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya kemiskinan penduduk di daerah bantaran sungai, tetapi tidak signifikan di daerah bukan bantaran sungai maupun di Kota Banjarmasin secara keseluruhan. Slope jenis kelamin + 1,2327 yang berarti bahwa penduduk perempuan berpeluang untuk menambah terjadinya kemiskinan penduduk di daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin. Nilai *odd ratio* sebesar 3,4306 berarti bahwa penduduk perempuan berpeluang untuk menjadi miskin 3,4306 kali lebih besar daripada penduduk laki-laki.

Anggapan bahwa penduduk laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama bagi keluarga, dan perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga serta keadaan yang umumnya memomorduakan perempuan dalam hal mendapatkan pendidikan, berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan perempuan pada umumnya sehingga ketika masuk dalam pasar kerja akan bekerja pada pekerjaan yang mendapatkan upah lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Hal ini berakibat pada besarnya peluang penduduk perempuan menjadi miskin dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Variabel Pendidikan (Edu)

Variabel pendidikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kemiskinan penduduk di daerah bantaran sungai, akan tetapi berpengaruh signifikan di daerah bukan bantaran sungai dan secara keseluruhan di Kota Banjarmasin dengan nilai slope bertanda + masing-masing 0,7637 dan 0,5587. Hal ini berarti bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan SLTP ke bawah memiliki peluang menambah kemiskinan penduduk di daerah bukan bantaran sungai dan secara keseluruhan di Kota Banjarmasin. Nilai *Odds Ratio* sebesar 2,1463 artinya kemungkinan penduduk berpendidikan SLTP ke bawah mempunyai peluang menjadi penduduk miskin 2,1463 kali lebih besar di daerah bukan bantaran sungai dan 2,1463 kali lebih besar secara keseluruhan di Kota Banjarmasin bila dibandingkan dengan penduduk berpendidikan di atas SLTP.

Kondisi ini berhubungan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh dan jenis pekerjaan yang ditekuni. Mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung memperoleh pendapatan lebih rendah dan akan menambah tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, mereka yang ingin mendapatkan pendapatan lebih baik harus meningkatkan pendidikan mereka untuk memperoleh spesifikasi pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan laporan dari BPS kota Banjarmasin (2015), 79,61% tingkat pendidikan diisi oleh pendidikan SLTP ke bawah. Ini memberikan gambaran, bahwa secara umum apabila tingkat pendidikan kota Banjarmasin tidak meningkat pada beberapa tahun yang akan datang, maka ada kecenderungan tingkat kemiskinan tidak berkurang.

Variabel Lapangan Usaha (LU)

Variabel lapangan usaha berpengaruh signifikan terhadap peluang terjadinya kemiskinan penduduk di daerah bukan bantaran sungai dan secara keseluruhan di Kota Banjarmasin. Slope untuk variabel Lapangan Usaha (LU) - 0,9627 artinya penduduk yang bekerja pada sektor non formal memiliki peluang mengurangi kemiskinan penduduk bukan bantaran sungai di Kota Banjarmasin dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal, dengan nilai *odds ratio* 0,3819 artinya kemungkinan penduduk bekerja di sektor non formal mempunyai

peluang mengurangi penduduk miskin 0,3819 kali lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor formal. Begitu pula halnya secara keseluruhan di Kota Banjarmasin, slope variabel lapangan usaha (LU) -0,9653 dan *odds ratio* sebesar 0,3809 yang berarti bahwa penduduk yang bekerja di sektor non formal 0,1552 kali lebih besar berpotensi mengurangi kemiskinan di Kota Banjarmasin dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor formal.

Secara teoritis pekerjaan non formal dianggap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan nilai pendapatan yang diterima mereka yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, meningkatnya mereka yang bekerja di sektor non formal akan menambah tingkat kemiskinan atau sebaliknya bertambahnya mereka yang bekerja di sektor formal cenderung akan mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang berlawanan arah antara penurunan kemiskinan dengan penambahan penduduk yang bekerja di sektor non formal. Kecenderungan ini terjadi, karena di kota Banjarmasin, dengan tingkat pendidikan yang sebagian besar SLTP ke bawah, maka peluang mereka untuk bisa masuk ke pasar kerja formal masih rendah, maka pasar kerja non formal menjadi pilihan utama, sehingga pilihan ini justru mengurangi pengangguran secara umum dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Variabel Lokasi (Lok)

Variabel lokasi tempat tinggal ditambahkan dalam model gabungan antara penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai dan di daerah bukan bantaran sungai, hal ini untuk membedakan antar kedua kelompok tersebut. Hasil uji menunjukkan variabel lokasi (Lok) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kemiskinan penduduk di Kota Banjarmasin. Slope variabel lokasi (Lok) -1,8633 dan *odds ratio* 0,1552, ini berarti bahwa penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai berpotensi 0,1552 kali lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai. Hal ini terjadi karena persentase penduduk miskin lebih besar di daerah bukan bantaran sungai dibandingkan dengan di daerah bantaran sungai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) persentase penduduk miskin lebih tinggi di daerah bukan bantaran sungai dibandingkan dengan di daerah bantaran sungai; (2) Variabel yang berpengaruh terhadap probabilitas kemiskinan penduduk di bantaran sungai adalah usia dan jenis kelamin, di daerah bukan bantaran sungai adalah usia, pendidikan dan lapangan usaha, sementara secara keseluruhan di Kota Banjarmasin variabel yang mempengaruhi probabilitas kemiskinan adalah pendidikan, lapangan usaha dan lokasi tempat tinggal; (3) Pekerja muda di daerah bantaran sungai berpotensi lebih besar dalam mengurangi kemiskinan sementara di daerah bukan bantaran sungai pekerja muda justru berpotensi lebih besar dalam menambah kemiskinan; (4) Perempuan berpotensi lebih besar untuk menambah kemiskinan di daerah bantaran sungai. Pendidikan rendah (SLTP ke bawah) berpotensi lebih besar menambah kemiskinan baik di daerah bantaran sungai maupun di daerah bukan bantaran sungai dan secara keseluruhan di Kota Banjarmasin; (5) Penduduk yang bekerja di sektor formal berpotensi lebih besar dalam

mengurangi kemiskinan penduduk di daerah bukan bantaran sungai dan di Kota Banjarmasin secara keseluruhan. (6) Penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai berpeluang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah bukan bantaran sungai.

Saran

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dilihat dari berbagai sudut pandang, kondisi, waktu, dan tempat. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan berbagai hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan ada keterkaitan antara usia, pendidikan, dan lapangan usaha. Untuk itu, maka saran kami adalah: (1) Perlu keterampilan tambahan bagi mereka yang masih produktif tetapi tingkat pendidikan masih rendah dan bekerja di sektor non formal, misalnya menambah keterampilan bengkel mobil, komputer, dan sebagainya, (2) Mereka yang masih bisa belajar, perlu mengambil kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti paket penyetaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. (3) Peranan Pemerintah diperlukan untuk menyediakan tempat-tempat kursus yang biayanya dapat dijangkau oleh kelompok berpendapatan rendah dengan kualitas yang baik dan memberi kesempatan kepada masyarakat berpendidikan rendah untuk mengikuti pendidikan penyetaraan, dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2004). *Data dan Informasi Kemiskinan Nasional*. Jakarta.
- BPS. (2010). *Laporan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan*. Banjarmasin.
- BPS. (2013). *Banjarmasin dalam Angka Tahun 2013*. Banjarmasin.
- Budiarto dan Munir. (1985). *Demografi Tenaga Kerja*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI
- Chandriyanti, Ika, dkk. (2014). Causes of Poverty Population Analysis of the River Plate in Banjarmasin. *Proceeding Book The International Symposium on Wetland Management*. Banjarmasin.
- Hayati, Ainul. (2012). Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Kakisina, Leonard O. (2011) Analisis Faktor -Faktor Penyebab Kemiskinan Pada Masyarakat Adat (Studi Kasus Negeri Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). *Jurnal Agroforestri*, VI (2): 142-152.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Muzzakir. (2012). Probabilitas Penyebab Setengah Pengangguran di Kalimantan Selatan. *Tesis*. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. (tidak dipublikasikan)
- Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008. Semarang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sumarsono, Sony. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tambunan, T. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.

ANALISIS KONFLIK LAHAN DAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN LOKAL (studi kasus Konflik Tanah Di kabupaten Jember)*)

Rafael Purtomo Somaji
Aisah Jumiaty

ABSTRACT

Land conflicts which occurred in Jember even possible in Indonesia is a phenomenon that makes people who involved become poor in terms of structural, social and cultural. The land conflict studies carried out by the method of participant, conducted by the authors through assistance for community groups, especially farmers, who have had conflict for nearly ten years back. Generally, the conflict has been "won" by the second party either Perhutani, PTPN national state, or the Regional Plantation Companies and Private. So what happens is the sustainability of the various local institutions (both local wisdom, or the values of local rules) that are economically, socially until the ecology too expensive. This is a direct impact on the sustainability of the economic life of both groups, individuals within the community. efforts is needed to solve the problem based on the principles of win-win solution and consider community is also part of the Indonesian nation beloved.

Keywords: land conflict, local institutions, the sustainability of welfare, social and ecosystem

ABSTRAK

Konflik tanah yang terjadi Kabupaten Jember bahkan mungkin di Indonesia merupakan fenomena yang membuat masyarakat yang berkonflik menjadi miskin secara struktural, sosial dan budaya. Kajian konflik lahan ini dilakukan dengan metode participant yang dilakukan oleh penulis melalui pendampingan kelompok masyarakat khususnya petani yang mempunyai konflik sudah hampir selama sepuluh tahun ke belakang. Umumnya konflik tersebut selalu "dimenangkan" oleh pihak kedua baik Perhutani, PTPN persero, atau Perusahaan Perkebunan Daerah dan Swasta. Sehingga yang terjadi adalah keberlanjutan berbagai kelembagaan lokal (baik kearifan lokal, atau nilai-nilai aturan main lokal) yang secara ekonomi, sosial hingga ekologi terlalu mahal biayanya. Hal ini berdampak langsung kepada keberlanjutan kehidupan ekonomi baik kelompok, perorangan dalam masyarakat. Perlu upaya pemecahan masalah yang didasari oleh prinsip-prinsip win-win solution dan memandang masyarakat tersebut juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia tercinta.

Kata Kunci : Konflik lahan, kelembagaan lokal, keberlanjutan kesejahteraan, sosial dan ekosistem

LATAR BELAKANG

Konflik tanah di Indonesia sudah lama terjadi dan di hampir daerah terjadi, baik antara rakyat di satu pihak dengan perusahaan swasta perkebunan, BUMN (PTP), Perhutani hingga dengan pemerintah daerah yang umumnya selalu "rakyat dikalahkan". Dampak konflik umumnya bersifat struktural baik secara ekonomi, sosial hingga budaya. Salah satu dampak yang merugikan adalah hilangnya kearifan lokal dan kelembagaan lokal.

Keterangan :

*) Artikel dibuat dalam rangka "Call Paper Universitas Trunojoyo Bangkalan 2015.

***) Staf Pengajar Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Di Kabupaten Jember hingga saat ini ada sekitar tujuh konflik tanah yakni baik yang belum atau sudah selesai. Secara umum konflik tanah di Kabupaten Jember lebih banyak bersifat vertical antara rakyat di satu pihak melain pemerintah (diwakili oleh PTPN, PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan), Perhutani atau bahkan Aparat TNI). Konflik tersebut umumnya berkepanjangan menghabiskan energy besar khususnya pihak rakyat, bahkan kerugian material (finansial, ekonomi) hingga kelembagaan social, ekonomi hingga budaya (pola pikir) bahkan sumberdaya alam hingga bencana (khusus untuk tanah lahan kering di kawasan dataran tinggi).

Menurut Soerjono Soekanto (2007), konflik sosial adalah suatu proses social dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Menurut teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen (masyarakat) khususnya yang terlibat dalam konflik, memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika orang memperebutkan sebuah area (lahan tanah), mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah (misal tanah Ketajek) saja, namun juga sumber daya alam seperti air dan hutan yang terkandung di dalamnya. Upreti (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya orang berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam karena empat alasan utama.

- 1) karena sumber daya alam (Tanah) merupakan "*interconnected space*" yang memungkinkan perilaku seseorang mampu mempengaruhi perilaku orang lain.
- 2) Sumber daya alam (Tanah) juga memiliki aspek "*social space*" yang menghasilkan hubungan-hubungan tertentu diantara para pelaku.
- 3) Sumber daya alam (Tanah) bisa menjadi langka atau hilang sama sekali terkait dengan perubahan lingkungan, permintaan pasar dan distribusi yang tidak merata.
- 4) Sumber daya alam (Tanah) pada derajat tertentu juga menjadi sebagai **simbol** bagi orang atau kelompok tertentu.

Tabel 1
Peta Konflik Tanah dan Dampaknya di Kabupaten Jember

No	Nama	Pelaku	Keterangan
1	Ketajek Desa Pakis dan Suci di Kecamatan Panti	Kasus antara rakyat dan Perusahaan daerah Perkebunan (PDP) Jember	jumlah KK yang menjadi korban perampasan tanah sekitar 400 orang, 710 Ha. Tahun 1999 rekleming selama 8 bulan kemudian dipaksa untuk meninggalkan tanah yang sudah digarap (1200 Ha). Dampak Hancurnya kepemimpinan lokal, keterpecahan kelompok, kemiskinan, TKI, dan merusak hutan, kepercayaan kepada pemerintah

2	Mandigu Desa Mandigu Tempuran, Kecamatan Tempurejo	Kasus antara rakyat dengan Perhutani	740 Ha, perpecahan kelompok dan kelembagaan desa, sulit pengorganisasian, semakin sulit meyakinkan perlunya pemisahan masalah bersama dan pribadi, ketidakpercayaan kepada lembaga pemerintah baik perhutani, polisi dan pengadilan
3	Baban Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo	Kasus antara rakyat dengan Perhutani	Sengketa sekitar 450 Ha jumlah korban 400 KK, keterpecahan kelompok dan sulit memisahkan masalah bersama dan pribadi
4	Curahnongko Desa Curahnongko di kecamatan Tempurejo	Kasus sengketa tanah rakyat dengan PTPN XII	Berasal hutan belantara yang dibuka oleh masyarakat atas perintah tentara Jepang pada masa pendudukannya 1942. Penguasa Perang Daerah Jawa Timur No.Peng.P.2.8/1958 tanggal 13 Oktober 1958. Penguasaan Perang Pusat No.Prt/Peperpu/011/1958 pengambilalihan pihak PTP XXVI tidak ada ganti rugi. PTP XXVI sekarang berubah menjadi PTPN XII. Dampak perpecahan kelompok, merajalelaya kepentingan pribadi atas nama kelompok, kemiskinan dan masuk hutan.
5	Karang baru, Silo	Kasus sengketa tanah rakyat dengan Perhutani	tanah sudah ada dalam penguasaan rakyat (90 Ha) yang kini ditanami tanaman produktif, Masih belum selesai. Sulit memisahkan masalah bersama dan pribadi, individualis, krisis kepemimpinan, masuk hutan, sulit pengorganisasian.
6	Sukorejo Desa Sumbersari Kec. Sumbersari kabupaten Jember	Kasus sengketa tanah rakyat dengan TNI AD	290,75 Ha (154 Ha dikuasai oleh para petani penggarap) dan relokasi lahan semakin timpang.
7	Jenggawah Desa Pancakarya, Desa Wirowongso, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari	Kasus antara rakyat dengan PTPN XII (Tembakau)	Pengelolaan tanah perkebunan seluas 32.746.888 Ha tersebut juga berlaku selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 30 Juni 1995. Kemiskinan, ketimpangan dan sulitnya pengorganisasian. Sulit memisahkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Sumber : Diambil dari berbagai narasumber, 2014

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan (masing-masing berbeda kepentingan), berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya sulit diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang semakin buruk baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, 2001:4). Dalam teori hubungan masyarakat, Fisher menyebutkan bahwa konflik disebabkan oleh **polarisasi yang terus terjadi**, serta **tidak adanya saling percaya dalam masyarakat** yang melahirkan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. selain itu, penyebab konflik dalam masyarakat juga dapat disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (contoh konflik Tanah Ketajek). Dalam teori kebutuhan manusia, Fisher mengatakan bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik), mental dan social yang tidak terpenuhi atau dihargai. Kajian ini mencoba memahami konflik tanah di Kabupaten Jember dari perspektif analisis konflik dinamika konflik seperti luas, intensitas, ketampakan, bagaimana konflik dikelola, oleh siapa ? bagaimana polarisasi pelaku konflik terjadi ? hingga bagaimana dampak konflik dilihat dari perspektif keberlanjutan Kelembagaan Lokal?.

Kilas Balik Konflik Tanah Ketajek

Sengketa antara petani Ketajek dengan pihak PDP Ketajek (salah satu perusahaan milik Pemda Jember) bersumber dari tindakan Bupati Jember waktu itu Abdul Hadi. Saat itu 1974, selaku Bupati Jember, mengajukan permohonan HGU kepada gubernur Jawa Timur atas tanah eks perkebunan Ketajek seluas 487,87 ha dengan alasan tanah tersebut tidak berpenghuni dan terlantar.

Padahal saat itu, tanah eks perkebunan Ketajek menjadi satu pemukiman dan kebun kopi rakyat. Bahkan para petani telah beberapa kali memanen kopi hasil budidaya mereka sendiri. Sejak tahun 1972 itu pula, para petani yang berjumlah 800 KK menentang keputusan Bupati. Bagi petani SK No.50/KA/1964 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria memberikan jaminan hak milik kepada para petani penggarap.

Secara historis para warga Ketajek merupakan pembabat hutan di lereng G. Pasang (kaki pegunungan Argopuro). Setelah NV. LMOD mendapatkan hak erfpacht atas areal hutan di sekitar Gunung Pasang ini tahun 1942, para petani ini meneruskan pembabatan hutan.. Tahun 1951, pelaksanaan operasional areal ini beralih dari NV LMOD ke tangan Tan Tiong Bek. Disepakati pula, para petani tetap menjadi tenaga kerja di perkebunan ini dengan ketentuan upah yang telah ditentukan. Namun hingga 2 tahun bekerja Tan Tiong Bek tidak memberikan upahnya. Akhirnya Tan Tiong Bek meninggalkan perkebunan tersebut.

Areal tersebut telah menjadi perkampungan. Warga perkebunan Ketajek sepakat untuk mengupayakan pemilikan atas tanah tersebut. Salah seorang tokoh petani Ketajek yang gigih memperjuangkan hak milik para petani ini adalah Ahmad Bazeed.

Tahun 1968, terbit SK Kinag Jatim No.1/Agr/6/XI/122/HM/III tanggal 12 Desember 1964 tentang pendistribusian tanah tersebut kepada para petani penggarap. Dan tahun 1968 telah terbit satu sertifikat atas nama salah seorang petani penggarap (P. Sukes).

Namun bagi Pemda Jember, dasar hukum yang dimiliki oleh para petani Ketajek merupakan landasan hukum yang sudah tidak berlaku lagi. "Dasar kami jelas, SK Mendagri No.SK 12/HGU/DA/74, tanggal 29 Agustus 1974. Kalau memang warga menganggap kami salah, tuntutan di pengadilan" kata Bupati Jember, Kolonel (Inf) Winarno selaku Komisaris Utama PDP Ketajek. Selanjutnya Winarno juga menganggap upaya petani untuk merebut tanah perkebunan

Ketajek merupakan tindak kriminal. "Kami selalu berpegang pada aturan hukum" kata mantan Danrem Baladika Jaya/Malang ini dengan yakin.

Pihak Pemda Jember selaku pemilik PDP Ketajek ngotot mempertahankan tanah tersebut. Sebab perkebunan ini merupakan salah satu pilar PAD Jember. Tercatat Rp.15 milyar sebagai laba bersih dari ekspor kopi setiap tahun disumbangkan oleh PDP Ketajek hingga tahun 1999. Disamping itu PDP juga menjadi sumber "rente yang besar". Walaupun keadaan saat ini tidak menggembirakan tetapi beragam kepentingan berada di sana sehingga juga tetap ingin memperpanjang HGU.

Upaya mempertahankan tanah tersebut dengan beragam cara. Antara lain strategi polarisasi petani ketajek yang tergabung dalam "KOMPAK"; merekrut tenaga keamanan 125 preman yang dari sekitar perkebunan dikerahkan sebagai penjaga keamanan kebun, opini hingga yang terbaru adalah mengelola konflik dengan membentuk kelompok petani desa hutan.

Berbagai kelompok kepentingan di luar Pemerintah daerah (dalam hal ini PDP) juga ikut bermain, apalagi ketika akan ada Pemilihan Umum, seperti yang dilakukan oleh beberapa partai, hingga kelompok massa lain.

Ketika HGU pertama akan berakhir tahun 1999 akan berakhir konflik memanas lagi. Petani melakukan upaya perlawanan baik melalui jalan damai dengan mengirimkan surat kepada bupati untuk memohon tanah mereka untuk dikembalikan hingga reclaiming atau menduduki lahan (300 petani menduduki lahan Ketajek pada tanggal 28 Oktober 1998), bersamaan dengan peristiwa reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi upaya rakyat tersebut dihadapi oleh PDP dengan merekrut preman dan terjadilah konflik pertama antara preman dengan petani. Petani tetap melakukan perlawanan dengan mendirikan rumah-rumah semi permanen (150 rumah) bahkan diikutsertakan pula keluarganya untuk mendiami rumah tersebut tepatnya di 4 afdeling (Gudangtengah, Besar, Bendotiga, Kepalan). Konflik dengan kekerasan pecah lagi melibatkan preman, brimob dan petani Ketajek, hingga ada yang meninggal Anwar Cholili, 25 tahun hingga luka-luka 6 orang luka-luka parah terkena tembakan dan diinjak-injak.

Bahkan pressure penahanan juga dilakukan antara lain : (1) H. Samsul Arifin (50 tahun) warga desa Kemiri Kec. Panti, laki-laki: Terkena tembakan di bagian pangkal paha , setelah dirawat langsung dibawa ke Polres Jember dan ditahan. Sampai saat ini menurut keluarganya masih ada satu butir peluru di dalam tubuhnya. (2) Atro al. Pak Syarafah (45 tahun) laki-laki warga desa Pakis Kec. Panti : Terkena hantaman popor senjata laras panjang di leher dan ditendang. (3) Mustofa al P. Pecos (60 tahun) , warga desa Badean Kec. Bangsalsari laki-laki : tertembak dibagian paha. (4) Sirat al P. Nur (36 tahun), laki-laki warga desa Badean Kec. Bangsalsari : Tertembak dan ditendang, (5) Jasman (40 tahun), warga desa Pakis Kec. Panti, laki-laki, mengalami luka tembakan dan memar di bagian kaki dan punggung. (6) Hasan (35 tahun), warga desa Kemiri Kec. Panti laki-laki : Memar di beberapa bagian.

Tahun 2003 saat Gus Dur menjadi presiden, kebijakan populisnya mampu mempengaruhi konflik termasuk konflik tanah Ketajek. Ada upaya mengembalikan tanah kepada petani. Tetapi konflik digeser kearah lebih horizontal dengan melakukan polarisasi kelompok tani dan muncul kelompok tandingan mengatasnamakan kelompok tani pengelola hutan yang umumnya berbasis partai baik PKB, PDI, maupun Golkar, yang muaranya politik kepentingan politik yang semakin menjauhkan penyelesaian konflik secara win-win solution bagi pelaku yang terlibat khususnya pelaku awal yakni petani dan PDP.

Konsepsi Kelembagaan Dan Keberlanjutannya

Konsepsi mengenai kelembagaan telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli. Mengacu pada pendapatan para ahli seperti North (1937 dan 1991), Bardan (1989), Williamson (1985), Schmid, (1973), Pitelis, 1994), Bromley, (1989), Hayami dan Kikuchi (1987), Rutan (1985) dan Thrainn Eggertsson (1990), secara umum kelembagaan (*institutions*) memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the games*) dalam interaksi interpersonal, dan pengertian kedua adalah kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hirarki. Sebagai aturan main kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya. Selanjutnya kelembagaan sebagai suatu organisasi, dalam pengertian ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikordinasikan bukan oleh sistem harga-harga tetapi oleh mekanisme administratif atau kewenangan.

Menurut Eggertsson (1990:82) Seperti layaknya hukum grafitasi, organisasi dan kelembagaan adalah bervariasi baik dilihat dari sisi lokasi, perilaku politik dan struktur hak kepemilikan, teknologi yang diterapkan, dan kualitas sumberdaya, karakteristik barang dan jasa yang dipertukarkan. Dalam kenyataan transformasi produksi tidak hanya merupakan upaya transformasi input menjadi output, tetapi juga transfer hak kepemilikan antara pemilik sumberdaya, komoditas dan tenaga kerja. Dalam proses transfer kepemilikan ini, jika melalui badan usaha atau pasar, pemilik barang akan memaksimalkan fungsi subyektifnya menghadapi kendala dari organisasi atau kelembagaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam analisis ekonomi kelembagaan, kinerja kelembagaan dipengaruhi oleh berbagai variabel endogen. Pada tingkatan pertama, struktur hak kepemilikan (*property rights*) dan bentuk organisasi secara eksplisit terlihat dalam model hanya diperlakukan sebagai variabel eksogen tetapi dampaknya besar terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan. Pada tingkatan kedua, badan usaha pertukaran merupakan faktor endogen, tetapi struktur kepemilikan secara fundamental masih dianggap sebagai faktor eksogen. Pertukaran dengan badan usaha baik melalui pasar formal maupun informal akan selalu dikordinasikan melalui beragam kontrak sesuai dengan kendala ekonomi pemilik barang dan jasa. Sehingga badan usaha tersebut hakekatnya merupakan jaringan kontrak. Pada level ketiga, secara operasional aturan politik dan sosial, serta struktur kelembagaan diintroduksi kedalam biaya transaksi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Coase (1937:9; 1960:21) bahwa biaya transaksi dipergunakan dalam suatu kasus dimana tidak bisa dimasukkan kedalam analisis, sehingga tujuan badan usaha tersebut tidak tercapai, sehingga biaya transaksi harus diintroduksi kedalam analisis.

Suatu kelembagaan menurut Schmid (1987) dicirikan oleh tiga komponen utama, yaitu batas yurisdiksi, hak atas properti dan aturan representasi. Batas yurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan, terkandung makna bahwa batas yurisdiksi berperan dalam mengatur alokasi sumberdaya. Hak atas properti mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Aturan representasi mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu alokasi sumberdaya. Keputusan yang diambil dan akibatnya terhadap kinerja suatu kelembagaan akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Aturan

representasi menentukan jenis keputusan yang dibuat, oleh karena itu aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya.

Kelembagaan sebagai aturan main dapat diartikan sebagai himpunan aturan mengenai tata hubungan diantara orang-orang, dimana ditentukan hak-hak mereka, perlindungan atas hak-haknya, hak-hak istimewa dan tanggung jawabnya (Schmid, 1987). Dipandang dari sudut individu, kelembagaan merupakan himpunan kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Secara operasional untuk mengidentifikasi kelembagaan baik kelembagaan produksi maupun tata niaga, digunakan konsep kelembagaan yang dicirikan oleh tiga hal yaitu:

1. Hak-hak kepemilikan baik yang berupa hak atas benda materi maupun bukan materi (*property right*);
2. Batas-batas yurisdiksi, dan
3. Aturan representasi (Pakpahan, 1989).

Perubahan kelembagaan dicirikan oleh perubahan satu atau lebih dari unsur-unsur kelembagaan tersebut. Dalam kasus konflik tanah ketiga hal tersebut terlanggar sehingga konflik tersebut otomatis menghancurkan kelembagaan yang ada.

Keberlangsungan kelembagaan ditentukan oleh dua hal mendasar yakni (1) *win-win solution*; *simetrik information*, dan memahami *bounded rationality* sebagai dasar pengambilan keputusan individu dan kelompok; (2) keberlanjutan karena human capital dan social capital dapat berkembang lebih besar (Afenndi Anwar, 1998). Sehingga secara dinamik peningkatannya harus lebih tinggi dibandingkan natural capital (yang relative tetap bahkan cenderung berkurang) dan man made capital yang terkenal depresiasi, disamping peningkatan total per kapita.

Secara konseptual faktor-faktor yang melahirkan kondisi semacam itu dapat berupa keanekaragaman cultural yang berinteraksi dengan ekosistem (*pluralism*) antara lain berupa unsure spatial seperti geografis.

Analisis Konflik

Patronase Masyarakat dan Perubahan Nilai-Nilai dasar Kelembagaan

Di lihat dalam perpektif sosial, sering menemukan beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan 'patronase' (*patronage*). Namun demikian, apa sesungguhnya yang dinamakan relasi patronase tersebut?

Istilah 'patron' berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh' (Usman, 2004: 132). Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau *extended family* (Jackson, 1981: 13-14). Setelah itu, bapak harus siap

menyebarkan luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron (Scott, 1993: 7-8 dan Jarry, 1991: 458). Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Palras, (1971: 1) mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas, maka kemudian terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar yang diajukan oleh teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, tepat kiranya jika ada yang mengatakan bahwa hubungan semacam ini seringkali disebut juga sebagai hubungan 'induk semang-klien', di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik. Hal ini karena pada umumnya, induk semang adalah orang atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dan harus memberi perlindungan atau pengayoman semaksimal mungkin kepada klien-kliennya. Sedangkan sebaliknya, para klien harus membalas budi baik yang telah diberikan induk semang dan melakukan pembelaan terhadap pihak lain sebagai saingannya (Koentjaraningrat, 1990: 160-161).

Konflik tanah di Kabupaten Jember pada hakekatnya adalah konflik antar patron dengan masing-masing kliennya. Setiap patron mempunyai struktur kekuasaan baik bersifat ekonomi, politik maupun sosial. Seorang patron yang kuat di ketiga bidang tersebut akan mempunyai kekuasaan besar untuk menggerakkan sumberdaya. Konflik terjadi jika masing-masing patron mempunyai perbedaan kepentingan. Dalam hal ini konflik bisa terjadi baik secara terbuka atau tertutup, meluas atau menyempit bahkan bisa selesai atau sengaja tidak diselesaikan.

Melihat kecenderungan yang ada. Maka secara umum Patronase di Ketajek bisa dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Patronase kelompok tani cenderung terpolarisasi yang akhirnya melemahkan kekompakan patronasi yang benar-benar memperjuangkan hak-hak kelembagaan tanah, dan kebaikan. Apalagi secara ekonomi relative lemah, secara social relative merata tetapi lemah, walaupun secara politik hanya kuat di tingkat lokal tetapi lemah secara vertical. Peta ini cenderung memperlemah kelompok pejuang tanah. Polarisasi dilakukan oleh pihak luar baik pemda (PDP), Perhutani, PTP, Partai, atau partisan non partai bahkan NGO atau LSM. Akibatnya patron mereka menjadi marginal.
- 2) Patronase yang kuat justru yang bermuara kepada pengambil keputusan, kelompok kepentingan kuat, Partai, tokoh agama atau yang dibantu oleh LSM tertentu. Patron ini umumnya berseberangan dengan kelompok idealis petani (tujuan perjuangan semula). Kelompok ini umumnya memperlemah posisi kelompok masyarakat yang memperjuangkan tanah. Secara financial cukup kuat, mempunyai kekuatan politik bahkan social, tetapi umumnya mereka mempunyai tujuan yang saling berseberangan. Di Kabupaten Jember bermunculan beragam patron baru yang umumnya

- disuport oleh pemilik capital, pemerintah, PTP, PDP, Perhutani yang umumnya inclave (tidak mengakar) tetapi kuat secara vertikal.
- 3) Patronase yang bermuara kepada Pemda, PDP, PTP, Perhutani, umumnya mempunyai kekuatan ekonomi paling besar, bahkan secara vertical interaksi sosial dan politiknya kuat. Sehingga patron ini mempunyai kekuasaan besar untuk mengelola sumberdaya, paling tidak pada level status quo. Secara normative patron ini mau melepaskan tanah kepada rakyat, tetapi tetap mengelola konflik untuk kepentingan yang bias bukan kepada upaya penyelesaian konflik win-win solution, tetapi lebih tepat kearah "pencarian rente" bagi patron dan Kleinnya.

Struktur Konflik Kasus Tanah dan Perubahan Kelembagaan

Coser (1956) menunjukkan bahwa konflik mungkin positif sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan. Coser menyatakan bahwa masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan konsensus dasar kelompok itu dari serangan terhadap nilai intinya dengan membiarkan konflik itu berkembang di sekitar masalah-masalah yang tidak mendasar (Poloma, 1994). Dalam konteks Ketajek diduga nilai-nilai inti tersebut termasuk didalamnya adalah masalah tanah atau lahan atau berkaitan dengan sumberdaya yang terbatas.

Dengan demikian berarti, konflik yang menyentuh nilai-nilai inti akan dapat mengubah struktur sosial sedangkan konflik yang mempertentangkan nilai-nilai yang berada di daerah pinggiran tidak akan sampai menimbulkan perpecahan yang dapat membahayakan struktur sosial. Dalam konteks kasus konflik tanah di Kabupaten Jember, yang cenderung mempunyai sifat terbuka bahkan relative berstruktur longgar ada nilai-nilai inti yang dianggap dilanggar, yakni keberadaan PDP, Perhutani, PTP, maupun perusahaan perkebunan swasta Ledokombo, walaupun mereka mempunyai legalitas formal yakni HGU, tetapi tidak di tingkat kearifan lokal. Hal ini bisa diperjelas dengan sumber konflik seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2
Tiga Kategori Sumber Konflik Tanah Di Kabupaten Jember,
Tahun 1972- 2015

No	Sumber Konflik	Pihak Berkonflik	
		Perhutani,PTP dan PDP	Masyarakat
I	Perbedaan Kebutuhan	Keuntungan & rent Seeking, cenderung berstrategi assimetric informasi	Kesejahteraan, Kenyamanan, Keseimbangan ekosistem dan nilai
	Perbedaan Nilai	Quasi Public Goos	Sosial
	Perbedaan Tujuan	Rente	Sosial
II	Langkanya Sumberdaya	Hutan jadi <i>quasi public Goods, mekanisme pasar atau kontraktual</i>	Hutan adalah <i>public goods, diselesaikan melalui kelembagaan</i>
III	Skala Persaingan	Skala ekonomi besar	Skala kecil dan bersifat social

Sumber : Data Primer, 2015

Dalam tabel di tersebut atas tampak bahwa bagi masyarakat ada tiga hal yang berbeda yakni : (1) kebutuhan, nilai dan tujuan; (2) Sumberdaya dan (3) Skala Persaingan. Dilihat dari sisi kebutuhan, secara ekonomi PTP, Perhutani, dan PDP adalah perusahaan milik pemerintah daerah Jember sehingga orientasinya adalah keuntungan atau rente, banyak hak hal yang harus tidak dibuka sehingga ke masyarakat selalu berusaha untuk membuat informasi yang sifatnya asimetri, sebagai contoh Dokumen Laporan produksi, neraca perusahaan, keberadaan dan perkembangan proses produksi hingga kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan. Dalam konteks Indonesia saat ini masih dipandang susah tersentuh hukum. Artinya secara aturan formal baik di tingkat nasional segala aturan undang-undang maupun aturan formal daerah tidak ada pelanggaran. Bahkan untuk jika perlu dilakukan suatu politik konspirasi untuk menggolkan aturan main bahkan surat keputusan, atau peraturan menteri yang bisa melindungi kepentingan rente mereka. Leagalitas sangat dibutuhkan untuk kepastian dan keamanan perolehan rente ini. Hal ini bisa dipahami karena dikalangan pengambil keputusan (pejabat public) konspirasi sudah menjadi budaya. Hal ini akan memperkuat terjadinya fenomena pasar gelap aturan main yang akan menghancurkan pula kelanjutan bisnis baik PTP, PDP atau Perhutani sendiri.

Instilah konspirasi umumnya digunakan dilingkungan akademik yang kemudian menjadi paradikma dalam masyarakat untuk mengacu pada adanya semacam kesepakatan rahasia diantara pihak tertentu dilingkungan birokrasi Negara, aparat pemerintah, kepolisian, militer, parpol dan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu dengan melanggar hokum dan mengorbankan kepentingan publik. Pemikiran konspiratif terwujud ketika masyarakat percaya adanya rencana-rencana tertentu yang direkayasa dan dilaksanakan para konspirator yang umumnya sangat kuat dan berkuasa baikscara politik, hukum, dan uang berlimpah untuk mengendalikan dan memanipulasi ketentuan hukum.

Masyarakat di Kabupaten Jember yang berkonflik diduga kuat juga memahami dan mengetahui bahwa politik konspirasi tersebut sudah terjadi dalam konteks eksplorasi sumberdaya perkebunan milik pemda tersebut. Persepsi masyarakat ini tentang konspirasi bersifat laten, terselubung dalam artian belum terbuka detil informasinya, sehingga belum mampu menjadi **konflik terbuka**. Bahkan bisa digunakan sebagai alat pemecah atau polarisasi. Di lain pihak simpul-simpul masyarakat pemilik modal lokal yang juga menjadi patron lokal pun melakukan hal sama, dengan melakukan konspirasi dengan pejabat lokal baik kemanan (polisi, militer bahkan preman) dalam rangka mengamankan bisnisnya baik yang bersih maupun yang abu-abu seperti pembalakan kayu di pegunungan Argopuro, Taman Nasional Merubetiri. Salah satu dampaknya adalah semakin sedikit sumber air (Data PDAM Kabupaten Jember mengisaratkan bahwa tahun 2000 an terdapat 69 sumber air dan tahun 2015 tinggal 17 sumber air) Konflik akan terbuka jika ada perbedaan kepentingan atau kepentingan mereka terganggu. Mereka membuat beragam isu atau informasi yang membuat konflik tertutup tersebut menjadi terbuka dalam bentuk kekerasan oleh masyarakat seperti reclaiming atau demo.

Secara komunal masyarakat masih menganggap kebutuhan mereka adalah kesejahteraan, kenyamanan, keseimbangan ekosistem hingga keseimbangan nilai-nilai. Secara parsial dalam masyarakat mulai ada pergeseran dalam memandang nilai-nilai kesejahteraan, bukan kesejahteraan kumunal yang didahulukan, tetapi individual, bukan kenyamanan kumunal tetapi individual. Hal yang sama terjadi pada nilai tentang ekosistem, secara individual dan jangka pendek orientasi kesimbangan ekosistem mungkin sudah tidak penting secara pribadi atau individual Pada saat terjadi konflik terbuka kepentingan privat

dibungkus rapat-rapat dan dihembuskan kepentingan bersama seperti yang tersebut diatas untuk membangun musuh bersama.

Mendasarkan diri pada pendapat Cobb dan Elder (1972) mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik sosial: (1) luas konflik; (2) intensitas konflik; dan (3) ketampakan konflik. Luas konflik, menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan menunjuk pula pada skala konflik yang terjadi (misalnya: konflik lokal, konflik etnis, konflik nasional, konflik internasional, konflik agama dan sebagainya). Dalam hal ini konflik antara PDP dan masyarakat lokal dipandang mempunyai luasan konflik yang dalam skope regional atau bisa dilokalisir, yakni sebatas pada masyarakat yang berkonflik. Tetapi jika bisa mengelola informasi maka bisa ditingkatkan hingga kabupaten Jember bahkan nasional. Hal ini terjadi jika konflik menyentuh kepentingan bersama (kesejahteraan), menyetauh nilai-nilai dasar bahkan jika berkaitan etnis.

Tabel 3
Tiga Dimensi Konflik Antara PTP, Perhutani dan PDP dengan Masyarakat di Kabupaten Jember, Tahun 2012-2015

No	Dimensi Konflik	Indikator/Ketrangan
1	Luas koflik	Bisa meluas bisa menyempit tergantung bagaimana dikelola
2	Intensitas Konflik	Tergantung, jika bisa membangun komitmen sosial yang luas, sewaktu-waktu bisa meledak atau berkembang seperti layaknya bom waktu. Tetapi polarisasi patron lokal memperlemah intensitas konflik, Selain polarisasi juga dilakuka upaya membangun opini atau isyu
3	Ketampakan Konflik	Terselubung dan rendah ketampakannya, kerana masyarakat tidak mengetahui secara detil pengetahuan dan informasinya sangat terbatas. Sehingga isyu atau opini kecil bisa mebuat konflik menampak secara luas

Sumber : Data Primer, 2015

Dalam konteks Ketajek, opini bisa membuat ketampakan konflik menjadi jelas. Perang opini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak patron atau *stakeholders* yang merasa kepentingan mereka terganggu.

Pandangan tradisional tentang konflik mengandaikan konflik itu buruk, dipandang secara negatif, dan disinonimkan dengan istilah kekerasan (*violence*), destruksi, dan ketidakrasionalan demi memperkuat konotasi negatifnya. Konflik adalah merugikan, oleh karena itu harus dihindari (Robbins, 1996). Pandangan pada masa kini melihat konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam kehidupan kelompok dan organisasi. Dalam interaksi antara manusia, konflik tidak dapat disingkirkan, tidak terelakkan, bahkan ada kalanya konflik dapat bermanfaat pada kinerja kelompok. Berdasarkan pendekatan interaksionis memandang konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, kaum interaksionis mendorong pemimpin suatu kelompok apapun untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari konflik, sehingga cukup untuk membuat kelompok itu hidup, kritis-diri dan kreatif. Perlu ditegaskan, bahwa pendekatan interaksionis

tersebut tidak berarti memandangkan semua konflik adalah suatu hal yang baik, tetap memandang konflik adalah suatu hal yang tidak baik. Kaum interaksional memandang ada konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok, biasa disebut dengan konflik fungsional, sedangkan ada konflik yang menghalangi kinerja kelompok atau yang disebut dengan konflik disfungsional atau destruktif.

Secara umum konflik terjadi antara PTP, Perhutani dan PDP dengan masyarakat di kabupaten Jember terjadi antara dua pihak bahkan lebih yang berbeda, karena karena kepentingan, dan perspesi yang berbeda. Pihak PTP, Perhutani dan PDP bahkan mungkin pemerintah (Jember, hingga level desa) merasa benar secara hukum karena mengantongi legalitas formal berupa HGU atau surat perjanjian lain. Berdasarkan karekateristik tersebut peta konflik jika dikaitkan dengan keberadaan masyarakat Jember di kawasan konflik diklasifikasikan menjadi dua peta konflik maupun potensi konflik.

Pertama, Lokasi PTP, Perhutani atau PDP, konflik menjadi kawasan potensi konflik yang paling tinggi. Ada beberapa alasan antara lain : (1) Kemajuan TI; (2) kawasan ini berlaku **fenomena pasar gelap aturan main** atau **black market of rule**. Dimana masing-masing pelaku petani atau PTP, Perhutani dan PDP bisa melakukan budidaya yang secara normative dilarang (hutan lindung, kawasan konservasi) sepanjang mematuhi aturan "penguasa" setempat.

Kedua, Kawasan Perhutani, menjadi kawasan potensi konflik kedua karena alasan : (1) struktur kemitraan antara Perhutani dan Masyarakat pengelola hutan masih lemah baik aturan mainnya, maupun implimentasinya (bagi-bagi rente), pengelolaan hutan cenderung kapitalis dan semakin rendahnya kearifan lokal (modal sial), sehingga melemahkan deman kepentingan bersama. Akibatnya loyalitas pada komitmen sulit diprediksi;

Dampak Konflik Terhadap Keberlanjutan Kelembagaan Lokal dan Kesejahteraan

Ada beberapa akibat konflik khususnya dalam perspektif konflik tanah di Kabupaten Jember. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Diawal konflik tahun 1972 hingga 2003 yang paling besar merasakan konflik adalah masyarakat Ketajek. Banyak indicator yang memperlihatkan hal tersebut. Antara lain : (a) kemiskinan karena akses tanah satu-satunya hilang; (b) Masyarakat pada lari menjadi trans baik di Kalimantan, Sumatra bahkan menjadi TKI. Umumnya mereka gagal dan tetap miskin. Bahkan pada saat terjadi peristiwa Sampit, mereka kembali pulang dengan banyak korban jiwa bahkan harta; (c) fenomena pencurian dan perampokan merajalela di kawasan konflik karena fenomena kelaparan, tiada pekerjaan dan tentunya pendapatan; Kerusakan modal social berupa nilai-nilai kearifan lokal, kekerabatan dan budaya saling membantu hilang atau dengan kata lain konflik memperlemah "deman kepentingan bersama dan memperkuat kepentingan pribadi; (d) feniomena kerusakan lingkungan, erosi, banjir karena merobaknya **pasar gelap aturan main**; (e) Salah kelola sumberdaya hutan atau kawasan pegunungan Argopuro, dan Taman nasional Meru Betiri Akibatnya produktivitas dan produksi semakin merosot hingga terjadi inefisiensi sumberdaya bahkan merobaknya fenomena rent seeking atau pencari rente.
- 2) Di era 2003 hingga 2012; (a) Petani Ketajek, Curahnongko pada era Gus Dur merambah hutan sekita 5000 Ha dikelola menjadi perkebunan, akibatnya mampu membuat kesejahteraan petani Ketajek makin meningkat; 7000 Ha di taman nasional Merubetiri, sebagai perambah

hutan hingga saat ini (b) stabilitas ekonomi masyarakat mempengaruhi kondisi keamanan, sehingga terjaga pencurian dan perampokan berkurang hingga tidak ada; (c) Akses terhadap tanah perhutani mampu menjaga konservasi kawasan hutan, hutan menjadi status quo, masing-masing takut menjarah; atau bahkan rusak sama sekali seperti di Taman nasional merubetiri (d) Lahan sengketa dengan PDP, PTP dan Perhutani umumnya menjadi tidak terkelola dengan baik, sehingga membuat lahan semakin jatuh produksi dan produktivitasnya; (e) Dalam kawasan tersebut fenomena kerusakan lingkungan masih parah bahkan bencana banjir Panti tahun 2006 peluang akan terjadi lagi sangat besar, atau erosi tanah yang semakin besar di Taman nasional Meru Betiri sampai saat ini tidak terkendali; (f) Menghadapai tahun 2050 dimana penduduk dunia diramal mencapai 9 milyar, dimana implikasinya adalah bahaya kelaparan, kekurangan air bersih dan lingkungan rusak, maka salah kelola ini perlu direposisi dengan bijaksana.

PENUTUP

Makalah ini tidak punya pretensi propokasi negative, tetapi wujud kegelisahan masyarakat kampus, tentang masa depan kawasan pegunungan Argopuro dan Taman Nasional Merubetiri akibat semakin hancurnya kelembagaan kearifan lokal yang mampu menjaga ekosistem di dua kawasan pegunungan tersebut tempat sentral konflik. yang semakin muram kondisinya. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang, konflik, perburuan rente, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Untuk itu mari kita duduk bersama jika perlu sambil minum kopi. Kita samakan visi kita tentang Pegunungan Argopuro dan Taman Nasioanl Merubetiri di masa datang yang akan kita wariskan kepada pemilik masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar, Affendi, 1992, *Sistem Ekonomi Pasar*, Bahan Mata Kuliah Konsep Ekonomi Mikro PPS-IPB, Bogor.
- Anwar, Affendi. 1997, *Organisasi Ekonomi: Konsep Pilihan Aktivitas Ekonomi Melalui Kelembagaan Pasar atau Organisasi*. Bahan Kuliah Sistem Organisasi Ekonomi dan Sosial Pedesaan PPS IPB. Bogor.
- Anwar, Affendi dan Hermanto Siregar. 1993, *Memahami Kelembagaan Asuransi Pertanian Dalam Kegiatan Agribisnis di Wilayah Pedesaan, dalam* Affendi Anwar. 1995. *Agriculture Planning Volume 1*. Bahan Agriculture - Short Course. Universitas Mataram, Lombok (January 1995).
- Bardan P., 1989, *Alternative Approach to the Theory of Institution in Economic Development*, Clarendon Press, Oxford University Press, New York.
- Burgess, Giles H, Jr, 1989, *Industrial Organization*, Portland State University, Prentice-Haall International, Inc
- Gouiliart, F.J. and J.N. Kelly. 1995. *Transforming the Organization*, New York: McGraw-Hill, Inc.

- Hayami dan Khukici, 1987, *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hobbs J. E., 1997, *Measuring the Importance of Transaction Cost in Cattle Marketing*, Amer. Journal Agri. Ec. 79 (4).
- Kaplan, R.S. and D.P. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*, Boston: Harvard Business School Press.
- North, Douglass C. 1991. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Pearlberg D., 1993, *The Case for Institutional Economic*, Amer. Journal Agri. Ec. 3 (2).
- Pitelis Chistoss, 1994, *Transaction Cost, Market and Hierarchies*, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Ruttan, Vernon W., 1985, *Tiga Kasus Terjadinya Pembaruan Kelembagaan*, dalam Faisal dan Stepanek Joseph F., *Dinamika Pembangunan Pedesaan*, Yayasan Obor Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Ropke, Jochen, 1989, *Economic Theory of Cooperative*, Marburg-West, Germany
- Schmid A. Allan, 1987, *Property, Power, and Public Choice, An Inquiry into Law and Economics*, Praeger, New York.
- Williamson, 1985, *The Economic Institution of Capitalism*, The Free Press

**DESA INDUSTRI MANDIRI PERTANIAN ORGANIK
KEMITRAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DAN GORONTALO UTARA**

Herwin Mopangga

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudiman No. 6 Kota Gorontalo

e-mail: herwin@ung.ac.id

ABSTRAK

State University of Gorontalo (UNG) have initialize an establishment of North to North Regional Cooperation that covers by North Gorontalo Regency (Gorut), North Bolaang Mongondow Regency and Buol Regency to be the National Strategic Area (KSN) for the borders of a country in The Ministry of Public Works on 2014. Cooperation includes aspects of education, research, devotion to society and institutional arrangement. In implementation of cooperation with Gorut, UNG have conducted the village of agricultural industry based on organic agriculture. The role of UNG is create the form of institutional productive economic in community through the development of joint enterprise group (KUB) for the agricultural sector, animal husbandry and fishery that gradually local business development and house of production on agricultural biotechnology.

Keyword: *Biotechnology, Agriculture, Organic, North Gorontalo Regency, State University of Gorontalo*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian-pedesaan menjadi tulang punggung perekonomian. Meskipun telah mengalami beberapa kemajuan penting tetapi pertanian-pedesaan di Indonesia harus diakui relatif tertinggal dibanding negara lain yang justru tidak berbasis agraris. Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan strategi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus berperan sebagai pendukung/pemasok dalam rangka mempercepat tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan (Syah, 2008).

Industrialisasi di Indonesia dengan strategi industri substitusi impor dan berorientasi ekspor ternyata menjadi penyebab timbulnya kesenjangan pendapatan antarsektor dan antardaerah ((*sectoral and spatial disparity*).Tipisnya keterkaitan sektor industri dan pertanian membuat industri modern dalam posisi terasing dari ekonomi rakyat dan menghambat tumbuhnya pelaku usaha sektor informal pertanian tradisional yang memanfaatkan inovasi teknologi.Karena itu perlu adanya revisi kebijakan strategi pengembangan industri di Indonesia dengan menekankan permintaan efektif dalam negeri melalui sektor pertanian (*Agricultural Demand-Led Industrialization/ADLI*) (Mopangga, 2008:38).

Dalam upaya meningkatkan perekonomian melalui potensi lokal pedesaan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) Kementerian Perindustrian sejak tahun 2013 mengembangkan IKM berbasis bioteknologi di desa-desa yang bertujuan menciptakan Desa Industri Mandiri (DIM) lewat inovasi teknologi. Inisiasi DIM didasari oleh masih banyaknya potensi desa yang belum didayagunakan secara optimal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh layanan dasar untuk mengembangkan usaha ekonomi seperti sumber pembiayaan, informasi dan teknologi serta terbatasnya infrastruktur pendukung.

DIM merupakan bentuk hilirisasi industri hijau dengan menciptakan wirausaha baru di pedesaan yang mengembangkan pertanian organik berbasis sumberdaya lokal.Konsep DIM melalui inovasi bioteknologi pertanian diharapkan mendukungeksistensi industri kecil dan koperasi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.Sedangkan konsep organik yang diterapkan pada pertanian, perikanan dan peternakan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan alamiah (*back to nature*) yang bebas bahan kimia berbentuk pengawet, pemanis dan pewarna buatan.Sebagai pionir dan proyek percontohan, Ditjen IKM menggulirkan program DIM tahun 2013 di Gorontalo, menyusul Jawa Timur dan Sulawesi Selatan di tahun 2014.Terpilihnya Gorontalo sebagai titik awal sentra DIM di wilayah timur disebabkan aspek sosial kultural dimana masyarakatnya dinilai patuh pada aturan terutama aturan-aturan alam.

Pembentukan DIMakan melibatkan semua *stakeholder*bidang pertanian dan bidang lain yang menunjang dari aspek penyediaan sarana prasarana, bahan baku, peralatan, pemasaran, pendidikan dan kesehatan yang berbasis potensi sumberdaya lokal. Implementasinya, DIM memberdayakan masyarakat baik dari industri hulu, antara dan hilir, sehingga melahirkan wirausaha baru dari kalangan masyarakat dan mengurangi pengangguran pedesaan.

Kabupaten Gorontalo Utara atau sering disingkat **Gorut**merupakan salah satu sentra produksi dan pemasok beras utama di Sulawesi Utara disamping Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara. Sektor pertaniannya rata-rata berkontribusi lebih dari 30% terhadap PDRB maupun penyerapan angkatan kerja dalam kurun 8 tahun Gorut menjadi daerah otonom. Data produksi, luas panen dan produktivitas padi sawah empat tahun terakhir ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1
Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Sawah Gorut
Tahun 2010-2013

Tahun	Produksi(ton)	Luas Panen(ha)	Produktivitas (ton/ha)
2010	253.563	46.987	5,52
2011	273.921	52.811	5,18
2012	295.786	51.193	4,8
2013	295.913	56.894	5,2

Sumber: BPS, Gorut Dalam Angka berbagai tahun

Meskipun dikenal sebagai salah satu lumbung beras di utara Sulawesi tetapi luasan lahan kritis di Gorut mencapai 71,040 di luar kawasan hutan dan 171,863 di dalam kawasan hutan. Lahan kritis merupakan masalah tersendiri bagi sektor pertanian lokal dibutuhkan inovasi bioteknologi yang lahir dari usaha masyarakat secara terpadu berbentuk pertanian organik yang dapat mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif.

Upaya merealisasikan DIM yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah tentu membutuhkan intervensi kebijakan, program dan anggaran yang memadai dari pemerintah setempat melalui instansi, dinas dan badan teknis serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat mulai dari petani, penyuluh, pelaku usaha hingga perguruan tinggi. Berikut bagan Kerangka Pengembangan DIM Gorut:



Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir Pengembangan Desa Industri Mandiri

Universitas Negeri Gorontalo atau disingkat UNG telah menetapkan Gorut sebagai lokasi fokus kerjasama di tahun 2015 yang meliputi sasaran pelaksanaan KKS-Pengabdian, KKS-Posdaya, Desa Binaan serta Kerjasama Utara-Utara antara UNG dengan 3 kabupaten. Sebagai perguruan tinggi negeri terkemuka di daerah, UNG mengambil peran strategis untuk pengembangan DIM di Gorut. Melalui tenaga tim *task force*, UNG membantu menginisiasi lahirnya

kelembagaan ekonomi produktif dimasyarakat melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang pertanian, peternakan dan perikanan secara bertahap yang akan membentuk usaha pendirian inkubator berupa Rumah Produksi berbasis bioteknologi pertanian. UNG telah menjadi motor penggerak lahirnya inovasi lokal seperti pelatihan dan pendampingan proses produksi POC dan NOC, demplot budidaya POC/NOC, pelatihan manajemen produksi dan pemasaran serta pelatihan wirausaha berbasis POC/NOC. UNG juga secara bertahap berupaya memfasilitasi hadirnya pusat inovasi dan alih teknologi, sentra produksi bioteknologi serta pusat informasi teknologi, produksi dan pemasaran.

Meskipun kegiatan budidaya dan agribisnis padi organik sudah dikenal dan diterapkan jauh sebelum Revolusi Hijau di Indonesia tahun 1970-an tetapi penerapan bagi petani di Gorut merupakan hal yang baru dan menarik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar petani yang tidak familiar dengan istilah, tata cara dan seluk beluk pemanfaatan biopest, benih dan pupuk organik dalam aktivitas pertaniannya.

METODE

Kerjasama Utara-Utara ditetapkan melalui Deklarasi Utara-Utara dan Penandatanganan MoU antara Rektor UNG dengan masing-masing Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara. Aspek kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penataan kelembagaan dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan industri strategis berbasis komoditas lokal serta pengembangan konservasi berbasis ekowisata. Khusus untuk Gorut, mulai triwulan terakhir 2014 ditujukan pada pengembangan DIM pertanian organik yang disponsori oleh Ditjen IKM Kemperin.

Dalam implementasi kerjasama DIM pertanian organik, pihak UNG dan Gorut sepakat untuk mengambil peran masing-masing sebagai berikut:

A. UNG menyiapkan:

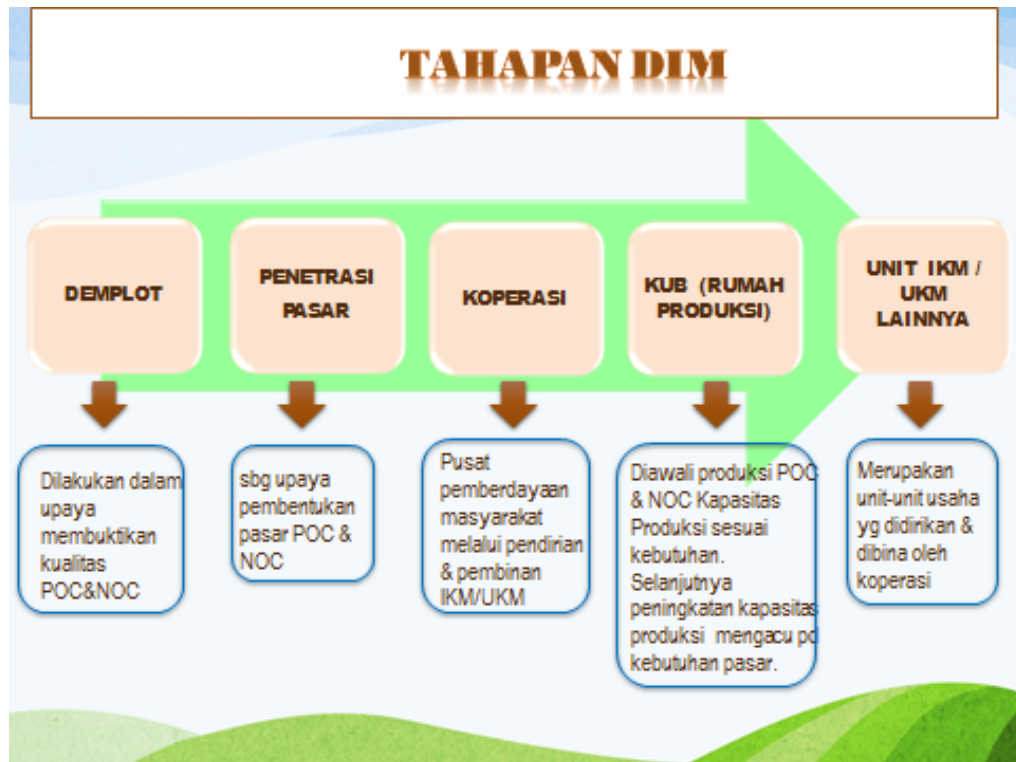
1. Mahasiswa peserta dan Dosen Pembimbing Lapangan KKS Posdaya yang ditempatkan di Gorut. Mahasiswa bersinergi dengan kelompok tani ternak melaksanakan kegiatan belajar dan praktek pembuatan dan penggunaan biopest, bibit dan pupuk organik. Manfaat yang diperoleh dari program ini berupa: i) proses pembelajaran tidak hanya bersifat konseptual tetapi telah berlangsung secara kontekstual, ii) meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha memanfaatkan komoditas lokal dengan bahan-bahan organik, iii) memperluas pasar dan promosi produk-produk pertanian, iv) mahasiswa dapat menyadari manfaat (*benefit*) dan kontribusi nyata (*value*) yang mereka berikan kepada kelompok sosial dan lingkungan disamping keuntungan finansial.
2. Penugasan kepada tim kerja (*task-force*) lintas keilmuan yang adalah dosen dan pengurus harian Sekretariat Bersama KUU untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam rangka pengembangan DIM pertanian organik di Gorut

B. Gorut menyiapkan:

1. Calon petani dan calon lahan (CPCL) untuk implementasi pertanian organik
2. Lokasi dan bangunan rumah produksi (RP) pupuk organik cair (POC) dan nutrisi organik cair (NOC)
3. Tenaga penyuluh pertanian dari unsur dinas pertanian dan badan penyuluh pertanian kabupaten serta perwakilan masyarakat

4. Alokasi dana APBD yang memadai untuk mendukung program DIM pertanian organik.

Rancangan percobaan lapangan (rancangan faktorial), menjadi awal kegiatan penelitian, yakni membandingkan penggunaan pupuk organik cair marolis dengan indikator pertumbuhan dan produksi tanaman padi sawah. Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, warna daun, jumlah anakan produktif dan panjang malai. Sebelumnya, dilakukan uji sampel tanah untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah, baik fisik, kimia dan biologi, melalui uji laboratorium tanah di Universitas Sam Ratulangi Manado, karena ketiadaan fasilitas tersebut di Gorontalo. Selanjutnya, tahapan pengembangan DIM UNG dan Gorut ditunjukkan secara ringkas dalam bagan berikut:



Gambar 2
Langkah-langkah Pelaksanaan DIM di Kab. Gorontalo Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan musim tanam tahun 2014 maka bulan Maret-April 2015 diprediksi menjadi musim panen bagi tanaman padi sawah di Gorut, dan terrealisasi. Bupati beserta jajaran pimpinan SKPD yang memperoleh laporan keberhasilan program DIM berbasis pertanian organik pun antusias untuk melaksanakan kegiatan panen raya di desa-desa percontohan seperti ditunjukkan tabel data hasil panen berikut.

Tabel 2
Perbandingan Lokasi dan Produksi Padi Organik - Non organik Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

Desa	Kecamatan	Hasil panen (ton/ha)	Panen non organik sebelumnya
Gentuma	Gentuma Raya	7,5	4,5 – 5
Iloheluma	Anggrek	7,5	4,5 – 5

Milango	Tomilito	8,3	4,5 – 5
Bubode		8,3	4,5 – 5
Bulalo	Kwandang	7,6	4,5 – 5
Buloila	Sumalata	7,5	4,5 – 5
Puncak Mandiri		7,2	4,5 – 5
Monas	Monano	7,6	4,5 – 5
Ilomangga	Tolinggula	7,8	4,5 – 5
Dulukapa	Sumalata Timur	8,1	4,5 – 5
Biau	Biau	7,48	4,5 – 5

Sumber: Data lapangan panen raya bulan Maret 2014, Dinas Pertanian Gorut, 2015

Bupati Gorut Hi. Indra Yassin, SH. MH dan Wabup Drs. Hi. Roni Imran yang menyempatkan diri melakukan panen raya langsung di enam dari sebelas titik diatas sangat antusias dalam setiap kesempatan konferensi pers. Bupati sering mengemukakan bahwa Gorut memiliki persawahan seluas 7.091 hektar, bila ditunjang produktivitas sawah rata-rata 7,6 ton per hektar maka dirinya optimis mampu memproduksi 59 ton padi dibanding sasaran semula yang hanya 54 ton di tahun 2015 ini. Lebih lanjut beliau sangat mengharapkan dukungan dan peran serta aktif yang berkesinambungan dari pihak UNG.

Masyarakat yang menjadi sasaran program inipun merasakan manfaat dari program ini yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3
Perbandingan sebelum dan setelah penerapan pola pertanian organik tahap awal

No	Kriteria di masyarakat & kelompok tani	Sebelum	Setelah
1	Pemahaman pentingnya pertanian organik	Rendah, tidak peduli	Cenderung meningkat karena dampak yang akan dirasakan petani
2	Kelompok tani lokal	Ada, tidak antusias karena minimnya produktivitas padi non-organik	Ada, peserta dan antusiasme meningkat karena produktivitas padi organik
3	Rumah Produksi Pupuk Organik (RPPO)	Tidak ada	Ada, tahap produksi terbatas
4	Ketersediaan sarana/prasarana; indukan, starter, hormon, vitamin	Ada, terbatas	Bertambah karena intervensi pemda
5	Bahan baku fermentasi; urine dan kotoran sapi dan kambing, bonggol pisang, bekatul, guano, karbon dll	Jarang karena tidak ada sosialisasi dan kegiatan budidaya	Mudah diperoleh karena sudah mulai dibudidayakan
6	Peralatan	Minim	Bantuan pemerintah
7	Aktivitas penjualan dan pemasaran pupuk organik	Tidak ada	Ada, tahap permulaan dengan modal, omzet dan laba terbatas
8	Jumlah dan kegiatan KUB pertanian organik	Sedikit, tidak aktif	Lebih banyak, lebih aktif karena ada dukungan pemda dan pendampingan PT

Meskipun secara umum penggunaan dan pemberdayaan usaha tani dengan pupuk dan nutrisi organik terbilang berhasil meningkatkan hasil panen dan produktivitas lahan sawah di Gorut tetapi masih muncul sejumlah kendala atau faktor penghambat. Sedangkan solusi yang dilakukan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Kendala	Solusi
1	Faktor alam	Banjir karena tinggi curah hujan dan buruknya drainase	Pemisahan (sekat) sawah organik murni, semi dan non-organik
2	Faktor sosio-kultural	Kurangnya pemahaman dan kekhawatiran sulit memproduksi sendiri pupuk organik dan mahal nya harga jual	Mengintensifkan sosialisasi, pelatihan teknis dan pendampingan
3	Kurikulum <i>technopreneurship</i>	Belum tersedia	Aktif mengakses hasil riset dan publikasi online terkait <i>technopreneurship</i> dan TTG
4	Laboratotirum tanah dan pengujian sampel tanaman	Belum tersedia	Jangka pendek masih memanfaatkan milik Unsrat Manado

Patut diperhatikan bahwa banjir yang terjadi sekitar Januari-Februari sempat mengancam panen. Tetapi berkat antisipasi sejak awal yakni menempatkan sawah murni organik, semi organik dan murni non-organik mampu meminimalisir kerugian akibat banjir tersebut. Sosialisasi dan pendampingan kelompok penyuluh juga cukup efektif meredam kekhawatiran dan ketidakpahaman pada keunggulan pertanian organik dibanding non-organik. Ketiadaan kurikulum *technopreneurship* menyebabkan dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan lapangan dan pemberdayaan masyarakat sering mengalami kesulitan. Sedangkan belum tersedianya lab langsung diantisipasi dengan memanfaatkan milik Unsrat Manado.

PENUTUP

Simpulan

- Desa Industri Mandiri kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara melalui inkubator berupa rumah produksi pupuk dan nutrisi organik cair (RPPOC/RPNOC) memanfaatkan bahan baku lokal berhasil meningkatkan produksi padi dan produktivitas lahan sawah sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
- DIM meningkatkan pemahaman, antusias dan keterampilan petani dan anggota KUB sehingga terjadi transfer pengetahuan dan teknologi, tumbuh inovasi local dan melahirkan wirausaha baru berbasis pertanian organik.
- Berdirinya Industri Mikro, Kecil dan Menengah POC/NOC menjadi motor penggerak perekonomian ditinjau dari aspek manfaat, nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kesejahteraan masyarakat
- Efektivitas program dan kegiatan antar lembaga dan peranserta masyarakat akan meningkatkan kinerja dan daya saing perekonomian daerah, sehingga dlm jangka panjang dan aspek makro, DIM “mempersiapkan” *stakeholder*

(UNG, Pemprov, Kab. Gorut) dalam menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Saran

- Pusat Kreativitas Mahasiswa (PKM) UNG menghendaki adanya mentoring program dari RAMP-IPB untuk penguatan *hardskill* dan *softskill* bagi mahasiswa calon wirausaha terutama yang berasal dari Gorontalo utara dan penyusunan kurikulum *technopreneurship* yang akan membantu perkuliahan yang dijalankan oleh dosen UNG
- Perlu sinergi yang lebih erat dan produktif antara para pihak untuk menciptakan ekosistem inovasi misalnya melalui adanya kelembagaan inovasi daerah yang diisi unsur pemerintah (regulator dan fasilitator), perguruan tinggi (riset dan pengembangan) serta sektor swasta sebagai penyerap dan pengguna inovasi pada skala komersial
- Perguruan tinggi dan pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berdampak langsung bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor pertanian, peternakan dan perikanan

DAFTAR PUSTAKA

Bahua, Moh. Ikkal dkk.2014. *Pengembangan Desa Industri Mandiri (DIM) Melalui Pendekatan Inkubasi*. Bahan presentasi pada Workshop I Kerjasama Utara-Utara, Kwandang [tidak dipublikasi]

BPS.Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Berbagai Tahun. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara

Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara. 2015. *Data Hasil Panen Raya* [tidak dipublikasi]

Mopangga.Herwin. 2012. *Rancang Bangun Kawasan Agribisnis Hortikultura Provinsi Gorontalo*. Jurnal Agribisnis Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.Vol. 5 No. 1 Juni 2012 ISSN 1979-4991 hal. 46-62

Syah, D. 2008. *Agroindustri Pangan Lokal; Penggerak Ekonomi Masyarakat dan Diversifikasi Pangan*. Makalah disajikan pada Pra (2) WNPG IX tanggal 11-12 Juni 2008 di Jakarta

DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNA IV PROPINSI JAWA TIMUR

Siswoyo Hari Santosa
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
e-mail: siswoyohari68@gmail.com

ABSTRACT

Regional economic growth structure in Regional Unit Development (RUD) IV East Java Province are different. It is caused by different of natural resources, demography, and different potential of its regional so it can make the disparity of economical development. This research uses secondary data PDRB to know how the economical development structure, the best sector, and the disparity level that is occur in each regional. Shift Share-Esteban Marquillas Analysis showed that in Jember, Bondowoso, and Situbondo Regional occur the changing of dominant sector that dominated by agricultural (primary sector) to tertiary sector due to the conversion of agricultural land to non-agricultural sector . Disparity in development using williamson index analysis , the results fluctuated with a declining trend and has an average inequality is quite low . Overall position of the economy in the district of East Java in the RUD IV included in the relatively underdeveloped regions. Based on the relationship between economic growth and development imbalances stated that the Kuznets hypothesis (curve U - Reversed) turned out to be valid in the RUD IV East Java Province.

Keywords: Disparities, Growth Structure, RUD IV.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000:20). Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah (Rubiarko, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Nurhuda *et al* ;2011:110).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki luas wilayah 46.428,57 km², terbagi menjadi 39 kabupaten/kota, 640 kecamatan dan 8.464 desa yang mempunyai keragaman antar daerah (www.wikipedia.com). Keragaman antar daerah ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Dimana sebaran sumber daya ini tidak merata serta pertumbuhan pusat pertumbuhan perdagangan dan industri hanya terkonsentrasi pada beberapa tempat saja. Hal tersebut membuat pembangunan ekonomi daerah yang memiliki keunggulan pada salah satu bidang menjadi lebih tinggi dari daerah lainnya, sehingga tingkat ketimpangan antar daerah menjadi tinggi (Fitriyah dan Rachmawati, 2013:2).

PDRB kabupaten dan kota Propinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Ada beberapa wilayah kota yang tingkat perkembangan PDRB relatif cukup tinggi, dan ada beberapa wilayah di kabupaten yang memiliki tingkat perkembangan PDRB cukup rendah. Pertumbuhan PDRB ekonomi yang berbeda-beda tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi semakin besar (Sukirno, 1985:24).

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pasal 9 menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) Satuan Wilayah Pengembangan. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV merupakan salah satu wilayah pengembangan (SWP) yang berada di Propinsi Jawa Timur. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Glaeser dan Khan) dalam Fitriyah dan Rachmawati (2013:2) kawasan ini memiliki sektor unggulan industri serta memiliki kedekatan lokasi. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV terdiri dari: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Perda Jatim, 2006).

PDRB kawasan SWP IV Jawa Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, Kabupaten Situbondo memiliki PDRB perkapita sebesar 6.452.619,14; Kabupaten Jember sebesar 6.072.681,28 ; dan terendah pada Kabupaten Bondowoso memiliki PDRB perkapita sebesar 5.022.017,03. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan SWP IV Jawa Timur yang lainnya. Keadaan ini dari tahun 2008-2013 terus mengalami perbedaan yang jauh. Jika keadaan ini masih terus berlanjut, maka tingkat ketimpangannya akan semakin jauh dan pemerataan pembangunan tidak akan merata keseluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di SWP IV Propinsi Jawa Timur, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah untuk mengetahui perubahan struktur pertumbuhan ekonomi dan tingkat disparitas pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan

pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jawa Timur serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif adalah penyajian dan penyusunan data ke dalam tabel ataupun grafik sedangkan pendekatan kuantitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan SSA (Shift Share Analysis), Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Uji Hipotesis U Terbalik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder dari kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten masing-masing wilayah yang masuk pada kawasan SWP IV yang terbentuk pada Propinsi Jawa Timur selama periode 2003-2013.

Metode Analisis Data

Analisis Shift Share Esteban Marquillas

Teknik analisis Shift-Share digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur serta menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi, dimana keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar negeri/pasar global (Robinson, 2005). Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari dampak alokasi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1
Kemungkinan Pada Efek Alokasi

Kode	Kriteria	Aij (Efek Alokasi)	Komponen	
			(Eij-E'ij)	(rij-rin)
1	Competitive disadvantage, specialized	-	+	-
2	Competitive disadvantage, not specialized	+	-	-
3	Competitive advantage, not specialized	-	-	+
4	Competitive advantage, specialized	+	+	+

Sumber: Herzog, H.W dan RJ Olsen, 2007.

Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson lazim digunakan dalam pengukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai ketimpangan regional (*regional inequality*) untuk data dasar (Sjafrizal, 2008:107). Indeks Williamson bernilai antara 0 - 1, dimana semakin mendekati nol artinya pembangunan wilayah tersebut semakin merata. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah.

Analisis Tipologi Klassen

Menurut LeoKlassen (1965) analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi didalam suatu daerah atau wilayah berdasarkan pengelompokkan wilayah yang sudah dibagi dalam kriteria yang telah ditentukan. Pada dasarnya tipologi daerah membagi daerah membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita pada suatu daerah (Emilia, 2008). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan

perkapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi menurut tipologi daerah, yaitu :

- a. Kuadran I yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan suatu daerah yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari pendapatan per kapita Jawa Timur.
- b. Kuadran II yakni daerah maju tetapi tertekan, yaitu suatu daerah yang mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari pendapatan per kapita Jawa Timur.
- c. Kuadran III yakni daerah berkembang cepat, merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari pendapatan per kapita Jawa Timur.
- d. Kuadran IV yakni daerah relatif tertinggal, merupakan suatu daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita Jawa Timur.

Uji Hipotesis U-Terbalik

Kurva U-Terbalik oleh Kuznets (Todaro,2000:207) yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U-terbalik.

Dalam hal ini pembuktian kurva U-Terbalik digunakan sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004) yaitu menghubungkan antara angka indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten yang berada dalam kawasan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN

Analisis Shift-Share Esteban Marquillas

1. Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil analisis Shift Share Esteban Marquillas bahwa kabupaten Jember mengalami perubahan struktur perekonomian karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil perhitungan Dij dapat dibuktikan bahwa dalam kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2003-2009 sektor pertanian masih merupakan sektor yang mengalami kenaikan secara signifikan dan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Jember. Namun, pada tahun 2010-2013 peranan sektor pertanian mengalami kemunduran dalam jangka pendek karena adanya kebijakan pemerintah tentang membuka lapangan usaha.

Tabel 2
Hasil Perubahan Sektoral Ekonomi Wilayah (Dij) Kabupaten Jember

Sektor	2003	2009	2010	2013
Pertanian	138.769	225.051	136.469	247.641
Pertambangan, perdagangan	6.508	24.669	28.403	28.352
Industri dan pengolahan	19.628	42.712	62.172	101.211
Listrik, gas, air bersih	3.336	5.681	7.206	7.029
Bangunan	16.985	18.260	28.972	33.993
Perdagangan, Hotel, Restoran	16.985	112.067	190.550	366.117
Pengangkutan, Komunikasi	16.896	31.861	33.230	48.890
Keuangan, Persewaan, Jasa	31.782	35.730	52.351	46.570

Perusahaan				
Jasa-Jasa	32.977	46.878	83.930	80.120

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab.Jember, 2003-2013.

Selain itu, penurunan peranan sektor pertanian lebih disebabkan oleh percepatan output sektor sekunder dan tersier yang lebih dinamis sehingga menghasilkan nilai tambah yang bagaikan deret ukur pada tiap tahunnya. Kenaikan sektor sekunder dan tersier tentunya dikarenakan sektor pertanian yang kian tangguh dan mantap. Namun diakui terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian juga ikut memberikan andil penurunan sektor pertanian terhadap penciptaan nilai tambah. Oleh karena hal tersebut maka menjadikan sektor perdagangan, hotel dan restoran berkembang pesat mengalahkan sektor pertanian. Kemudian disusul oleh sektor industri dan pengolahan yang juga mengalami pertumbuhan secara signifikan dan beberapa sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perekonomian Kabupaten Jember.

Tabel 3
Kemungkinan Pada Efek Alokasi Kab. Jember

Kode	Kriteria	Aij	Komponen		Sektor
			(Eij-E'ij)	(rij-rin)	
1	Competitive disadvantage, specialized	-	+	-	-Pertambangan dan Penggalian - Bangunan - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
4	Competitive advantage, specialized	+	+	+	- Pertanian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas dan Air Bersih - Perdagangan, Hotel, Restoran - Jasa-Jasa

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab.Jember, 2003-2013.

2. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso mengalami perubahan struktur perekonomian yang fluktuatif dari tahun 2003-2010. Berdasarkan hasil perhitungan dalam kurun tahun enam tahun yaitu tahun 2003-2010 sektor pertanian terus mengalami peningkatan yang signifikan dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Bondowoso. Peranan sektor primer terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso masih merupakan sektor yang paling dominan terhadap total nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian di Kabupaten Bondowoso. Besarnya sektor primer ini menempatkan Kabupaten Bondowoso sebagai daerah yang mempunyai tipe ekonomi agraris dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 4
Hasil Perubahan Sektoral Ekonomi Wilayah (Di) Kabupaten Bondowoso

Sektor	2003	2009	2010	2013
Pertanian	32.666	61.629	55.996	57.254
Pertambangan, perdagangan	103	1.042	836	1.072
Industri dan pengolahan	9.196	22.182	33.332	37.794
Listrik, gas, air bersih	531	864	1.133	1.342

Bangunan	1.617	1.801	3.354	4.451
Perdagangan, Hotel, Restoran	19.043	36.473	74.976	90.377
Pengangkutan, Komunikasi	1.230	2.266	3.9623	4.924
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	8.089	3.706	6.064	7.329
Jasa-Jasa	7.794	12.219	15.292	18.348

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab.Bondowoso, 2003-2013.

Selanjutnya, pada tahun 2010 sektor pertanian mulai mengalami penurunan sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant terus meningkat secara significant sehingga mengalahkan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian. Selain itu juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang kebebasan dalam membuka usaha. Sektor pertanian mengalami penurunan yang terus-menerus dalam jangka pendek sehingga dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor tersebut karena sekecil apapun penurunan setiap sektor akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 5
Kemungkinan Pada Efek Alokasi Kab. Bondowoso

Kode	Kriteria	Aij	Komponen		Sektor
			(Eij-E'ij)	(rij-rin)	
1	Competitive disadvantage, specialized	-	+	-	- Bangunan - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa
4	Competitive advantage, specialized	+	+	+	- Pertanian - Pertambangan, Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas dan Air Bersih - Pergangan, Hotel, Restoran

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab.Bondowoso, 2003-2013.

3. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo mengalami perubahan struktur perekonomian yang fluktuatif dalam kurun waktu sebelas tahun yaitu tahun 2003-2013 dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier. Pada tahun 2003-2004, struktur perekonomian di Kabupaten Situbondo masih menunjukkan hasil bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar, namun pada tahun 2004-2005 sektor perdagangan, hotel dan restaurant mengalami perkembangan hingga kontribusinya dapat mengalahkan sektor pertanian pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2005-2007 sektor pertanian kembali berkembang mengalahkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Hal tersebut terus terjadi secara fluktuatif dimana kedua sektor tersebut lebih dominan dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang berkembang dengan cukup stabil dan konstan.

Tabel 6
Hasil Perubahan Sektoral Ekonomi Wilayah (Dij) Kabupaten Situbondo

Sektor	2003	2009	2010	2013
--------	------	------	------	------

Pertanian	37.608	59.563	53.628	57.389
Pertambangan, perdagangan	1.855	1.848	2.244	2.586
Industri dan pengolahan	9.202	14.679	20.846	28.199
Listrik, gas, air bersih	774	1.291	1.479	2.176
Bangunan	4.943	4.184	3.429	9.427
Perdagangan, Hotel, Restoran	35.271	54.229	86.707	127.581
Pengangkutan, Komunikasi	4.278	7.555	7.185	12.438
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	1.285	4.283	4.130	10.530
Jasa-Jasa	9.311	15.497	11.993	23.640

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab. Situbondo, 2003-2013.

Pada tahun 2010-2013 sektor perdagangan, hotel dan restaurant mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga berada pada tingkat yang paling tinggi dalam peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Situbondo. Hal tersebut, tidak terlepas dari keadaan geografis Kabupaten Situbondo yang memiliki banyak tempat wisata hingga memungkinkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant berkembang pesat di Kabupaten Situbondo sehingga mengalahkan sektor pertanian.

Tabel 7
Kemungkinan Pada Efek Alokasi Kab. Situbondo

Kode	Kriteria	Aij	Komponen		Sektor
			(Eij-E'ij)	(rij-rin)	
1	Competitive disadvantage, specialized	-	+	-	-Pertambangan dan Penggalian -Bangunan - Pengangkutan, Komunikasi - Perdagangan, Hotel, Restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa - Jasa- Jasa
4	Competitive advantage, specialized	+	+	+	- Pertanian -Industri Pengolahan -Listrik, Gas dan Air Bersih

Sumber: Hasil Analisis PDRB Kab. Bondowoso, 2003-2013.

Analisis Indeks Williamson

Tabel 8
Hasil Analisis IW di SWP IV Jawa Timur Periode Tahun 2003-2013

Tahun	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Indeks	0,151	0,152	0,152	0,141	0,142	0,143	0,142	0,152	0,143	0,147	0,147	0,144

Sumber: BPS Jember, Bondowoso, Situbondo, 2003-2014 (diolah).

Analisis Tipologi Klassen di SWP IV Jawa Timur

Kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur berada pada tipologi (IV) yaitu daerah relatif tertinggal merupakan daerah yang laju pertumbuhan ekonominya maupun PDRB Perkapitanya lebih rendah dibandingkan Propinsi Jawa Timur.

Tabel 9
Analisis Tipologi Klassen SWP IV

Kabupaten	Laju Pertumbuhan	Y Perkapita
Jember	5,86	4.581.167

Bondowoso	5,45	3.721.158
Situbondo	5,41	5.035.550
Jawa Timur	100	8.402.724

Sumber: BPS Jember, Bondowoso, Situbondo, 2014 (diolah)

PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama perlahan-lahan menuju ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer. Proses transisi ekonomi antar daerah berbeda kecepatannya, ada yang pelan dan ada pula yang berjalan cepat. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor internal antar daerah seperti : kondisi dan struktur awal ekonomi suatu daerah (basis ekonomi), besarnya pasar suatu daerah, karakteristik dari industrialisasi dan sumber daya alam. Sedangkan, dalam jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan tipe atau corak ekonomi suatu daerah bila sektor primer (*Agriculture*) yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris demikian pula apabila sektor sekunder (manufaktur) yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri.

Analisis Shift-Share digunakan untuk mengetahui perubahan struktur atau kinerja ekonomi daerah (kabupaten atau kota di Propinsi Jawa Timur) terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (Propinsi Jawa Timur) sebagai referensi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis shift share esteban-marquillas bahwa Kabupaten Jember mengalami perubahan sektor dominan yaitu yang awalnya didominasi oleh sektor pertanian (sektor primer) dengan semakin berjalannya waktu dan adanya alih fungsi lahan membuat sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) menjadi lebih dominan sejak tahun 2010-2013. Selanjutnya, di Kabupaten Bondowoso perubahan sektoral atau struktur ekonomi terjadi secara fluktuatif dimana awalnya di dominasi sektor pertanian, namun pada tahun 2010 sektor pertanian mulai mengalami penurunan sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restaurant terus meningkat secara signifikan sehingga mengalahkan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso.

Hal tersebut disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian. Selain itu juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang kebebasan dalam membuka usaha. Sedangkan, di Kabupaten Situbondo mengalami pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian (sektor primer) pada tahun 2010-2013 sektor perdagangan, hotel dan restaurant mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga berada pada tingkat yang paling tinggi dalam peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Situbondo. Perubahan struktur pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur terjadi sebagian besar di tahun 2010 dimana laju pertumbuhan sektor pertanian menurun dikalahkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya krisis ekonomi di tahun 2008 yang mengakibatkan pasar sepi sehingga mengurangi impor dan mengakibatkan pasar di dalam negeri kapasitasnya menjadi berkurang.

Berdasarkan analisis pengaruh efek alokasi (keunggulan kompetitif) memberikan hasil bahwa di Kabupaten Jember total efek alokasi bernilai positif sebesar 1.010.921,73 juta rupiah yang berarti bahwa semakin baik PDRB di distribusikan di antara sektor-sektor tersebut, selain itu terdapat lima sektor yang masuk dalam kriteria 4 yaitu memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi (*Competitive advantage, Specialized*). Keempat sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi adalah sektor pertanian; sektor industri dan pengolahan;

sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa..

Kabupaten Bondowoso juga memiliki total efek alokasi bernilai positif yaitu sebesar 654.018,36 juta rupiah dan terdapat lima sektor yang termasuk dalam kriteria 4 yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri dan pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berbeda dengan kedua kabupaten sebelumnya yang berada dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur, Kabupaten Situbondo berdasarkan analisis tersebut memiliki total efek alokasi yang bernilai negatif yaitu sebesar -69.958,10 juta rupiah sehingga membuat sektor yang termasuk dalam kriteria 1 lebih banyak dibandingkan dengan kriteria 4, hal tersebut dinyatakan dengan terdapat tiga sektor yang berada dalam kriteria 4 yaitu sektor pertanian; sektor industri dan pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih.

Selain itu, pembangunan di kawasan SWP IV Jawa Timur juga telah menimbulkan ketimpangan dalam prosesnya yang diamati dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir (2003-2013), telah memberikan gambaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Rata-rata tingkat ketimpangan antar kabupaten di kawasan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV Jawa Timur cukup rendah yaitu sebesar 0,146. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik hanya akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. Sehingga, kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan tidak dapat dihapuskan, melainkan hanya bisa diminimalisir ketinggian yang bisa ditoleransikan oleh sistem sosial tertentu agar harmoni dalam sistem yang tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.

Tingkat ketimpangan yang cukup rendah di kabupaten dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV Jawa Timur, bukan mengartikan bahwa kondisi perekonomian di SWP IV Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan posisi perekonomian Kabupaten dalam kawasan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV berada pada kategori daerah relatif tertinggal. Sehingga, untuk meminimalkan tingkat ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur diperlukan adanya pengklasifikasian posisi perekonomian di dalam wilayah tersebut.

Selanjutnya analisis yang terakhir yaitu untuk mengetahui hipotesis Kuznets berlaku atau tidak di Kabupaten dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur, maka harus diketahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan hasil hubungan antar kedua variabel tersebut dinyatakan bahwa hipotesis kuznets yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk kurva U terbalik ternyata berlaku dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV pada periode pengamatan tahun 2003-2013. Hal ini terbukti dari hasil analisis menggunakan indeks williamson. Kurva U-Terbalik tersebut mempunyai hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dalam kabupaten di awal pertumbuhan akan membuat semakin tinggi pula ketimpangan pembangunan kabupaten tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: terdapat perubahan struktur pada kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur yaitu dari sektor pertanian beralih ke sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perubahan struktur tersebut membuat ketimpangan di wilayah SWP IV Jawa Timur mengalami penurunan karena faktor produksi yang awalnya hanya terkonsentrasi pada sektor pertanian mulai mengalami pemerataan ke sektor-sektor lainnya. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur menurut tipologi klasen termasuk daerah tertinggal, dimana meskipun ketimpangan pembangunan menurun namun bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur masih merupakan daerah tertinggal. Hipotesis Kuznets berupa kurva U-Terbalik berlaku di SWP IV Jawa Timur karena diawal pertumbuhan ekonomi saat terjadi pertumbuhan yang tinggi makin membuat ketimpangan pembangunan semakin besar namun setelah ketimpangan berada di titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maka ketimpangan pembangunan akan menurun dengan sendirinya sehingga membentuk kurva U-Terbalik.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diajukan, antara lain :

- a. Ketimpangan pembangunan di Kabupaten SWP IV Jawa Timur relatif rendah, akan tetapi posisi perekonomiannya berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal. Oleh karena itu, Kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten tersebut.
- b. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan PDRB harus tepat sasaran terhadap semua sektor-sektor sehingga hasil yang diterima dapat lebih optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- c. Dalam menangani masalah disparitas pembangunan ekonomi, pemerintah daerah harus lebih serius dengan membuat kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPSTIE-YKPN.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2007-2011*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- BPS Jatim. 2013. *PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2008-2012* diakses pada 02 Oktober 2014 di <http://bps.go.id>.
- BPS Kabupaten Jember. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember 2009-2013*. Jember: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Bondowoso. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso 2009-2013*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Situbondo. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso 2009-2013*. Situbondo: Badan Pusat Statistik.
- Emilia dan Imelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi: Universitas Jambi.
- Fitriyah L dan Rachmawati L. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Fakultas Ekonomi. Surabaya: Kampus Ketintang UNESA.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga Jakarta.

- Nurhuda, Muluk dan Prasetyo. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119.
- Rubiarko, Sabda Imani. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis Shift Share Perkembangan dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol VIII. No. 1. Yogyakarta: UGM
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan. Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (terjemahan) Edisi Ketujuh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Wikipedia. 2014. Jawa Timur. Diakses pada 24 September 2014 di http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur.

GRAND DESIGN FOOD ESTATE SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENGEMBANGAN SULAWESI TENGGARA MENJADI GARIS DEPAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP PASAR ASIA TIMUR DALAM SEKTOR PERIKANAN

Ambo Wonua Nusantara, Baheri dan Buyung Sarita
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
e-mail: nusantara.uho@gmail.com

ABSTRAK

Koridor Sulawesi diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi khususnya komoditi pertanian dan perikanan. Bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap propinsi lain, maka Sulawesi tercatat sebagai provinsi dengan persentase kenaikan produksi perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Untuk itu Sulawesi ditetapkan menjadi Kawasan Lumbung Ikan Nasional.

Penelitian ini, mengaplikasikan konsep Food Estate perikanan dengan memfungsikan wilayah-wilayah penghasil perikanan sebagai: (1) sentra produksi/pengolahan produk-produk berbasis ikan; (2) sentra kegiatan perdagangan dan jasa berbasis perikanan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Identifikasi potensi perikanan/kelautan tiap-tiap wilayah administratif Sulawesi Tenggara; (2) Menganalisis kondisi geografis dan penggunaan lahan, yang potensial untuk pengembangan Food Estate industri perikanan; (3) Identifikasi daya-saing wilayah sebagai pengembangan sentra kegiatan perdagangan dan jasa berbasis perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, sentra produksi ikan/pengolahan produk-produk berbasis ikan antara lain: Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, dan Kota Kendari. Kedua, berdasarkan kondisi geografis dan wilayah, maka: (a) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) terdapat di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan; (b) Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan; (c) kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau. Ketiga, peringkat daya saing Kabupaten/Kota di atas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kurang Baik adalah Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, Kota Kendari, Kota Baubau.

Kata Kunci: Food Estate, Sektor Perikanan.

PENDAHULUAN

Dalam Master Plan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Koridor Ekonomi Sulawesi, kegiatan perikanan difokuskan di perairan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan karena potensinya yang sangat besar. Untuk itu dua wilayah ini ditetapkan menjadi Kawasan Lumbung Ikan Nasional. Sedangkan daerah lain di Sulawesi tidak memiliki potensi perikanan sebesar Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Pengembangan perikanan di kedua daerah tersebut akan dirintis dengan mengembangkan Mega Minapolitan sedangkan di daerah lainnya hanya terdapat kegiatan perikanan yang masih kecil sehingga pengembangannya perlu didorong sesuai dengan potensi yang ada.

Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan sebuah grand design food estate industri pengolahan berbasis perikanan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi antara sektor industri perikanan dengan sektor perdagangan dan jasa. Dengan adanya food estate yang terintegrasi diharapkan tercipta efisiensi produksi dan percepatan pertumbuhan sektor perikanan. Konsep ini diharapkan menjadi upaya menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai Lumbung Ikan Nasional dan food estate Indonesia Timur, serta Percepatan dan Perluasan Pembangunan Daerah Sulawesi.

Dengan adanya klaster food estate tersebut, maka manfaat yang bisa diperoleh antara lain: (a) Memberikan informasi bagi pemerintah daerah tentang potensi perikanan/kelautan dan potensi wilayah, (b) Akan memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis pengelolaan secara optimal sektor perikanan, menuju Sulawesi Tenggara Lumbung ikan Nasional dan Food Estate Indonesia Timur.

Untuk mencapai manfaat tersebut, kegiatan penelitian yang akan dilakukan bertujuan antara lain:

1. Identifikasi potensi perikanan/kelautan tiap-tiap wilayah administratif propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis kondisi geografis dan arahan penggunaan lahan serta pengembangan sarana prasarana, yang potensial untuk pengembangan food estate industri perikanan.
3. Menentukan pusat satuan wilayah pengembangan klaster perikanan berdasarkan daya dukung dan daya saing wilayah.

TINJAUAN TEORI

Pendekatan Pembangunan Daerah

Dalam menjelaskan pembangunan daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Adisasmita (1996), setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan daerah, yaitu: Pendekatan sektoral; Pendekatan makro; dan Pendekatan regional.

Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral menganggap perlunya mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sub-sub sektor atau sektor-sektor. Adapun dasar berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan atau sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja maupun investasi dan kredit yang digunakan.

Pendekatan Makro

Pendekatan makro pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial dan kekuatan politik. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, pendekatan makro seperti halnya pendekatan sektoral, tidak ditujukan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

Pendekatan Regional

Aspek lokasi wilayah berkaitan dengan fungsi lindung dan pilihan lokasi untuk tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha yang kesemuanya ditujukan

untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat di wilayah tertentu, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Pada sisi lain, aspek dimensi wilayah berkaitan dengan masalah tata guna tanah seperti petunjuk tentang batas-batas wilayah.

Berdasarkan kedua aspek tersebut di atas, maka pendekatan regional jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral dan bahkan dalam artian peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sumber dorongan tersebut berbeda pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh besar atau sentral yang selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai kemudahan.

Konsep Food Estate

Berdasarkan rumusan hasil seminar nasional yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor tahun 2010 menyatakan bahwa urgensi dari *food estate* dilatarbelakangi beberapa isu di tingkat nasional yaitu pertambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kebutuhan pangan, perubahan iklim dan cadangan minyak/bahan bakar yang menipis. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan produksi melalui perluasan areal *food estate* dengan target penciptaan sentra produksi pangan dan diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian wilayah. Tujuan dari *food estate* adalah (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) menghemat dan menghasilkan devisa Negara, (3) mempercepat pemerataan pembangunan, (4) menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional. Diharapkan bahwa dengan adanya *food estate* ini maka kita mampu *Feed Indonesia and Feed the World*.

Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam pengembangan *food estate* yaitu: (1) Pendekatan Pengembangan Wilayah, (2) Pendekatan Integrasi Sektor dan Sub Sektor, (3) Pendekatan Lingkungan yang Berkelanjutan, dan (4) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan luas wilayah *Food Estate* dibedakan menjadi 2 (dua) model: (1) *Food Estate* skala luas dengan kondisi infrastruktur yang sangat terbatas. Contoh Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Untuk itu perlu pembangunan infrastruktur dasar yang memadai baik oleh pemerintah (pusat/daerah) maupun dukungan swasta. (2). *Food Estate* skala medium dengan luasan sekitar 3.000 – 5.000 Ha, yang infrastrukturnya relatif sudah memadai. Contoh: Bulungan, Sambas, Kuburaya, Pontianak, Singkawang.

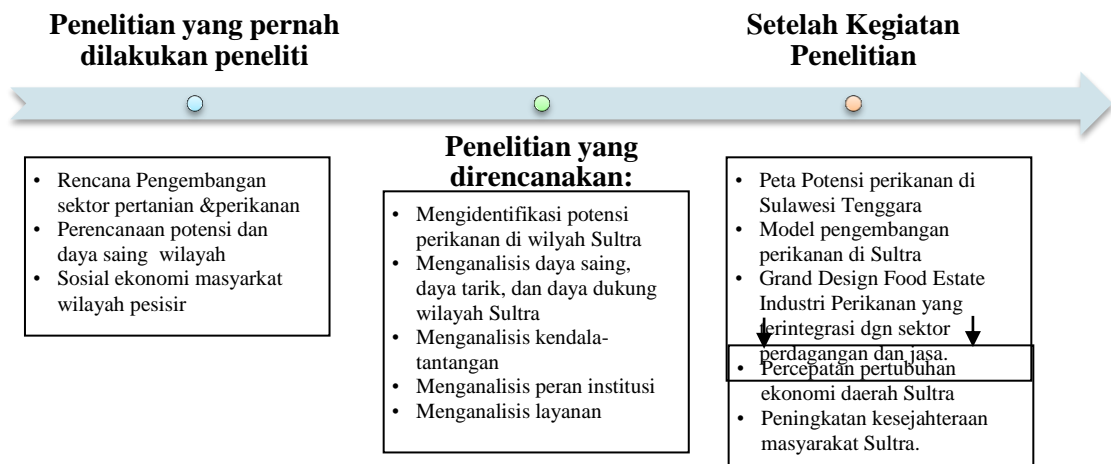
Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar tujuan yang ideal dari *Food Estate* dapat tercapai yaitu: (1) pertimbangan teknis seperti asal usul lahan, pembangunan sarana dan prasarana, ketersediaan dan kapabilitas tenaga kerja, penyediaan input pertanian, pola pengembangan usaha, (2) pertimbangan teknis seperti: jenis teknologi yang akan dikembangkan dan *grand desin* dari rencana pembangunan, (3) pertimbangan ekonomi seperti munculnya minat pemodal asing dan kaitannya dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan. Dengan masuknya modal asing perlu dipertimbangkan jangan sampai timbul kekhawatiran Indonesia semakin terbelenggu oleh kapital asing dan meliberalisasi semuanya yang justru akan mengancam kedaulatan pangan (4) pertimbangan sosial seperti lompatan gaya hidup dari pola meramu menjadi pola industri dan (5) pertimbangan lingkungan seperti potensi dampak negatif terhadap lingkungan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan Grand Strategi Food Estate Industri Perikanan di Propinsi Sulawesi Tenggara meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian potensi ekonomi dan potensi wilayah di masing-masing wilayah yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ).
2. Menentukan wilayah yang paling potensial untuk dijadikan pusat aktivitas sektor perikanan di masing-masing wilayah yang termasuk administratif Propinsi Sulawesi Tenggara. Aspek yang akan dilihat adalah: daya saing dan daya dukung.
3. Dengan mengetahui potensi ekonomi dan potensi wilayah maka akan dibangun model pengembangan Food Estate Industri Perikanan yang berbasis pada potensi ekonomi perikanan dan daya saing wilayah.

Gambaran mengenai peta jalan penelitian mengenai penelitian yang pernah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan disajikan dalam berikut ini.



Gambar 1
Peta Jalan Penelitian

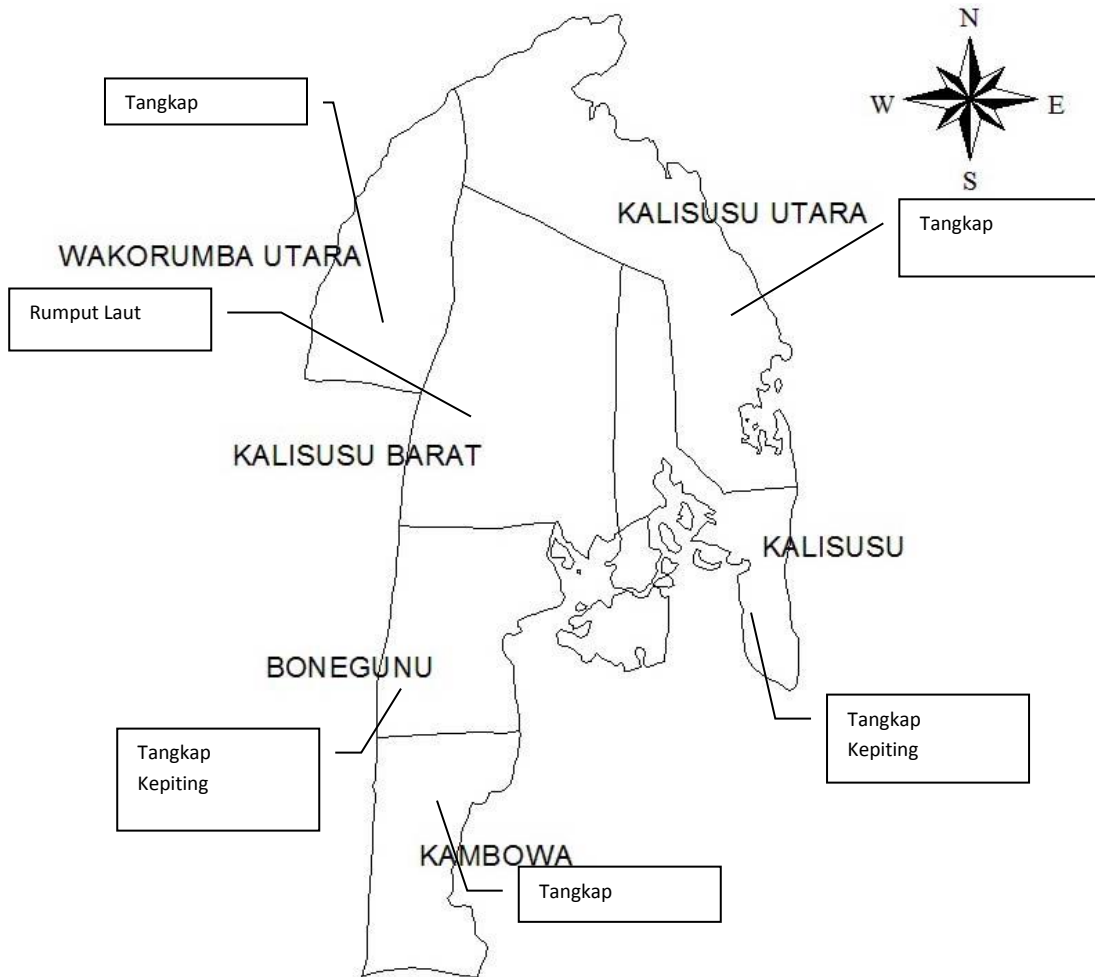
HASIL PENELITIAN

Analisis Potensi Perikanan dan Kelautan

Bagian ini akan menganalisis potensi perikanan/kelautan tiap-tiap wilayah administratif di propinsi Sulawesi Tenggara. Hasil analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana lokasi sumber-sumber penghasil di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan mengetahui lokasi penghasil ikan tersebut, maka akan lebih muda untuk menentukan lokasi pengembangan Food Estate berbasis perikanan.

Sub Sektor Perikanan Unggulan Kabupaten Buton Utara

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Utara, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

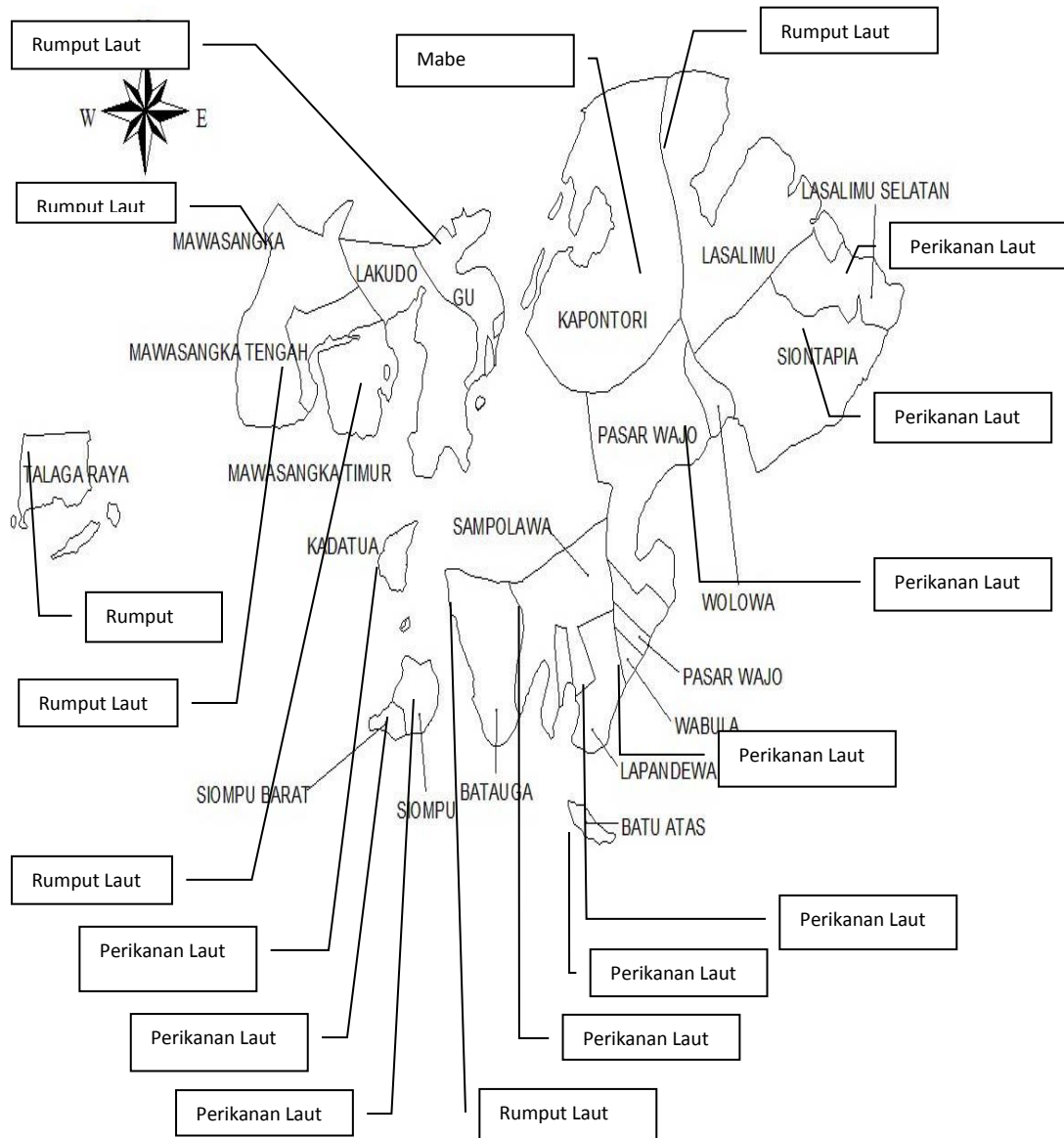


Gambar 2
Peta Kabupaten Buton Utara
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Berdasarkan gambar di atas hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara unggul pada komoditi perikanan tangkap kecuali kecamatan kulisusu barat. Kecamatan yang unggul pada komoditi budidaya kepiting adalah bonegunu, kulisusu, kulisusu utara. Kecamatan yang unggul pada komoditi udang hanya bonegunu, kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut hanya kulisusu barat dan kecamatan yang unggul pada komoditi laut lainnya adalah kecamatan bonegunu, kulisusu dan kulisusu utara.

Sub Sektor Perikanan Unggulan Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Buton, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

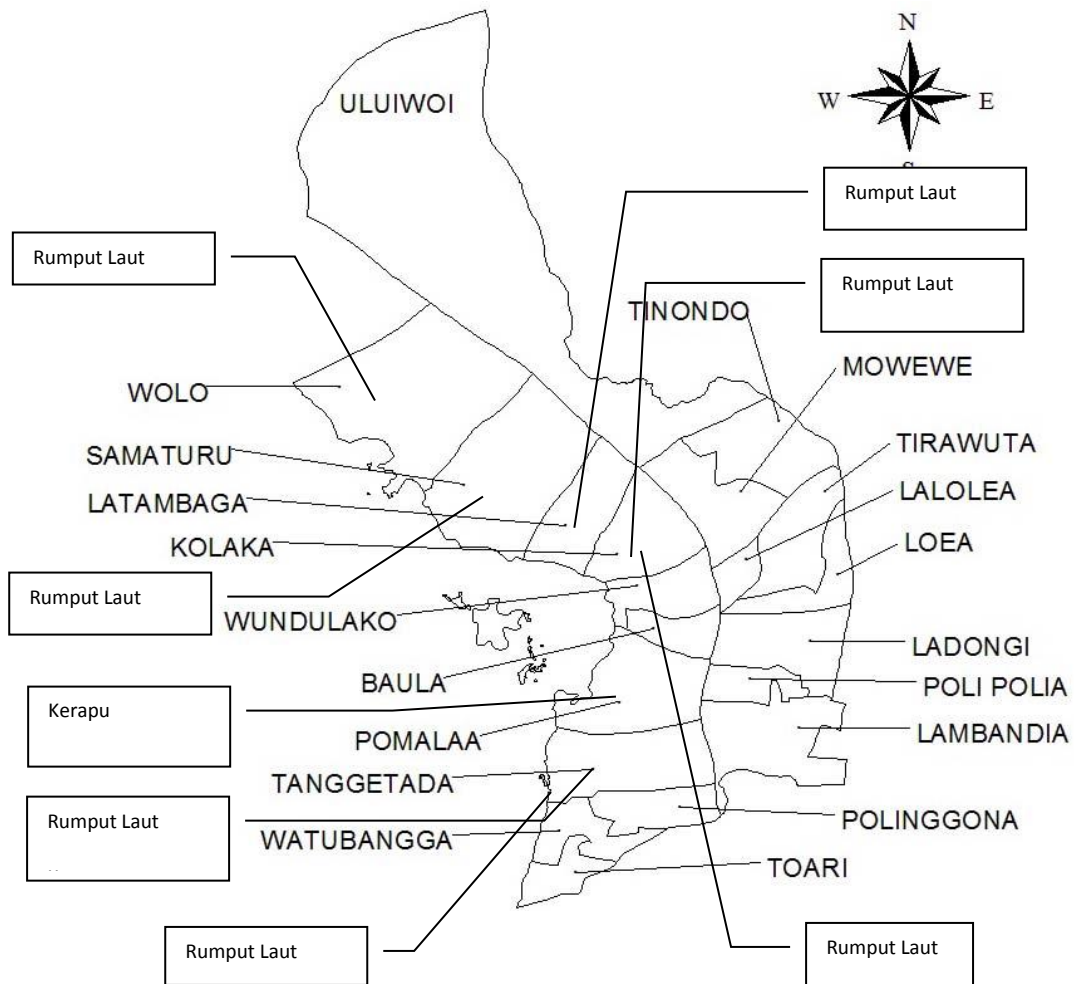


Gambar 3
Peta Kabupaten Buton
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut: Lasalimu Selatan, Siontapia, Pasarwajo, Wabula, Wolowa, Sampolawa, Batu Atas, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua. Kecamatan yang unggul di perikanan budidaya laut kerapu hanya Kecamatan Lakudo, sedangkan perikanan mabe hanya Kecamatan Kapontori, untuk komoditi rumput laut kecamatan unggul yaitu Lasalimu, Batauga, Gu, Sangia Wambulu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Talaga Raya.

Sub Sektor Perikanan Unggulan Kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Kolaka, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

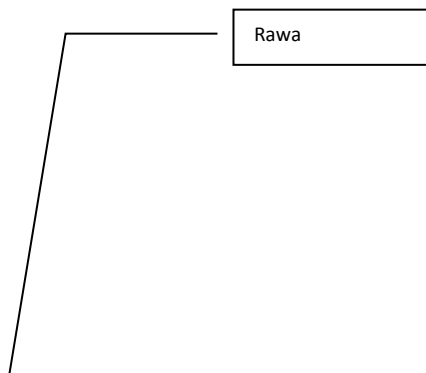


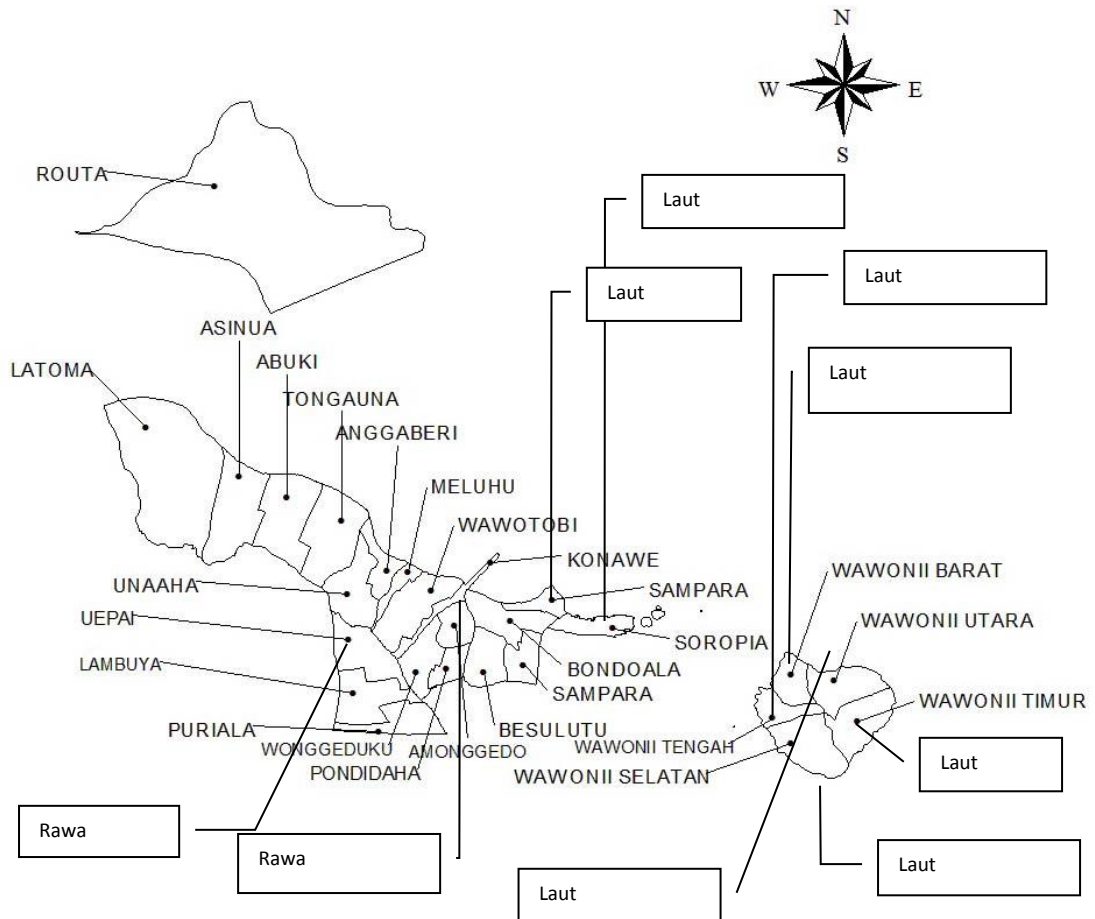
Gambar 4
Peta Kabupaten Kolaka
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut adalah Watabungga, Tanggetada, Wundulako, Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu. Kecamatan yang unggul pada komoditi kerapu adalah Tanggetada, Pomala. Kecamatan yang unggul pada komoditi teripang adalah Pomala.

Sub Sektor Perikanan Unggulan Kabupaten Konawe

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe, maka diperoleh hasil sebagai berikut.



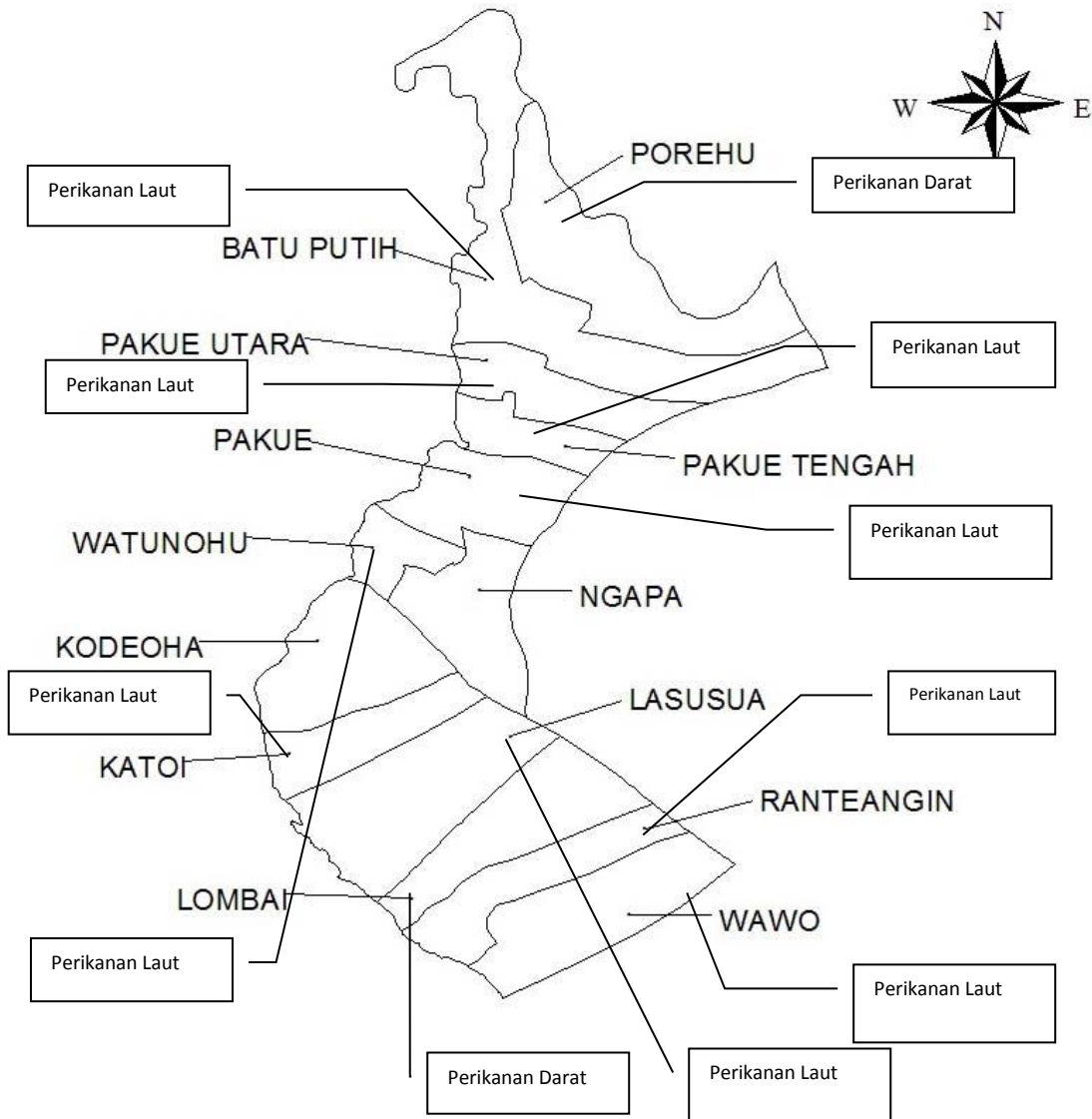


Gambar 5
Peta Kabupaten Konawe
Berdasarkan Komoditi Unggulan Tanaman Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut adalah Wawoni Selatan, Wawoni Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Timur, Wawoni Utara, Soropia. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan rawa adalah Uepai, Puriala, Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Unaha, Anggaber, Abuki, Tongauna, Asinua. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan sungai adalah Sampara, Unaha Dan Asinua.

Subsektor Perikanan Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah admistratif Kabupaten Kolaka Utara, maka diperoleh hasil sebagai berikut.



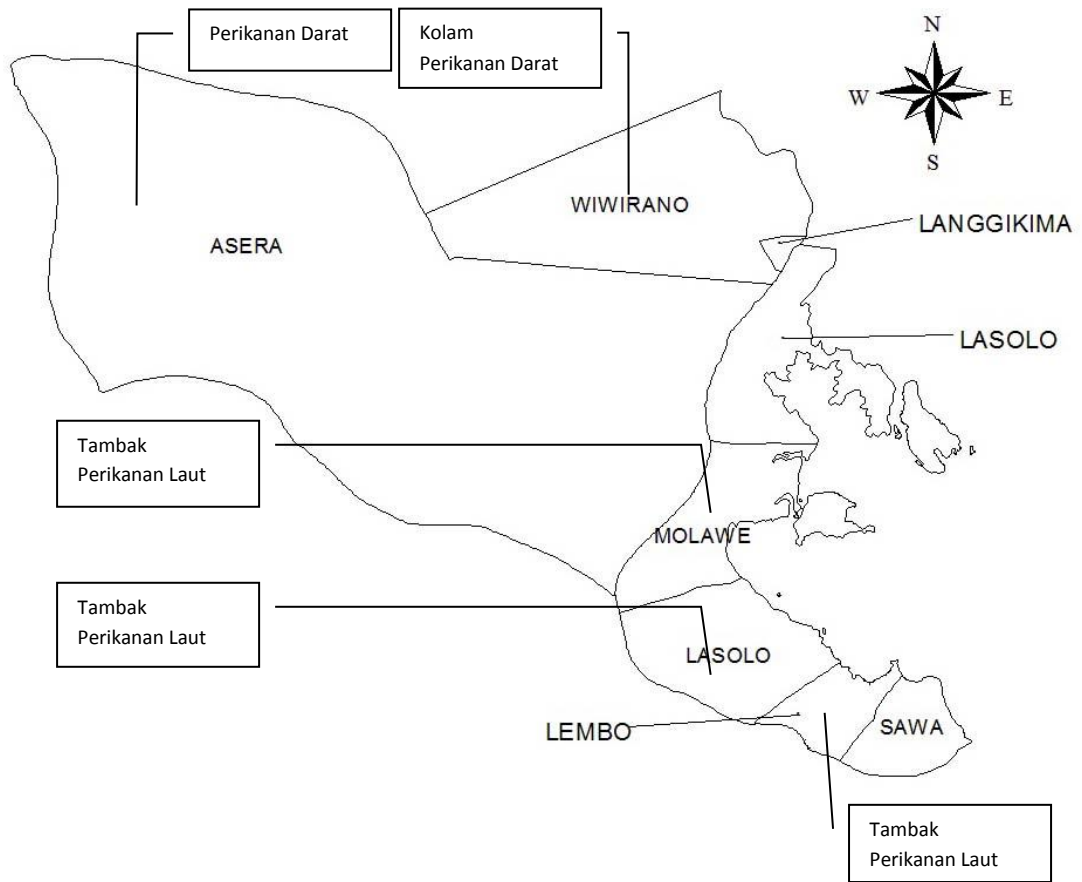
Gambar 6
Peta Kabupaten Kolaka Utara
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut adalah Ranteangin, Wawo, Lasusua, Kato, Kadeoha, Tiwu, Watunohu, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batu Putih, Dan Tolala. Sedangkan untuk komoditi perikanan darat hanya terdapat 3 kecamatan yang unggul yaitu Lambai, Ngapa Dan Porehu.

Subsektor Perikanan Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Utara, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Kolam Perikanan Laut

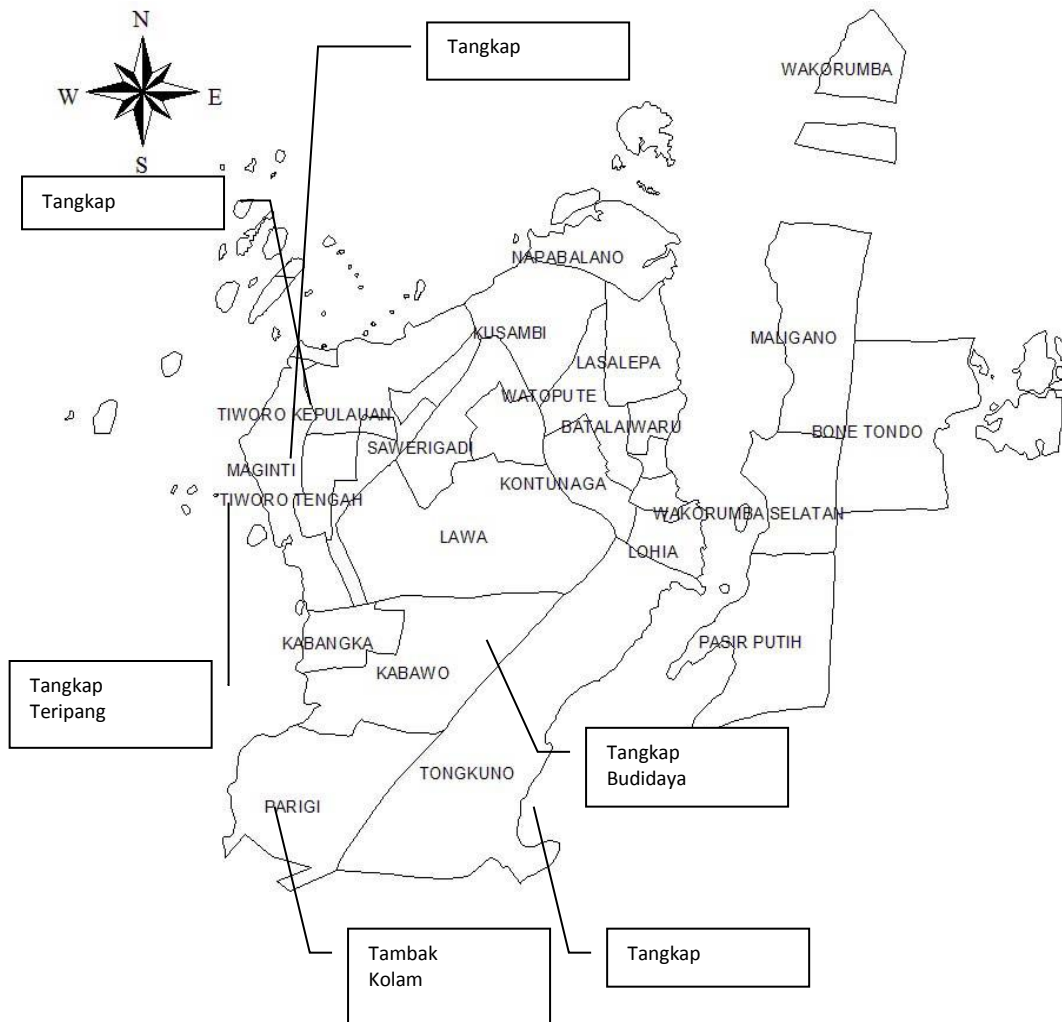


Gambar 7
Peta Kabupaten Konawe Utara
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan budidaya tambak adalah Sawa, Motui, Limbo, Lasolo, Molawe. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan budidaya kolam adalah Andowia, Oheo, Langgikimia, Wiwirano. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut adalah Sawa, Motui, Limbo, Lasolo, Molawe. Kecamatan yang unggul pada komoditi erikanan darat adalah Asera, Andowia, Oheo, Langgikimia, Wiwirano.

Subsektor Perikanan Kabupaten Muna

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah admistratif Kabupaten Muna, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

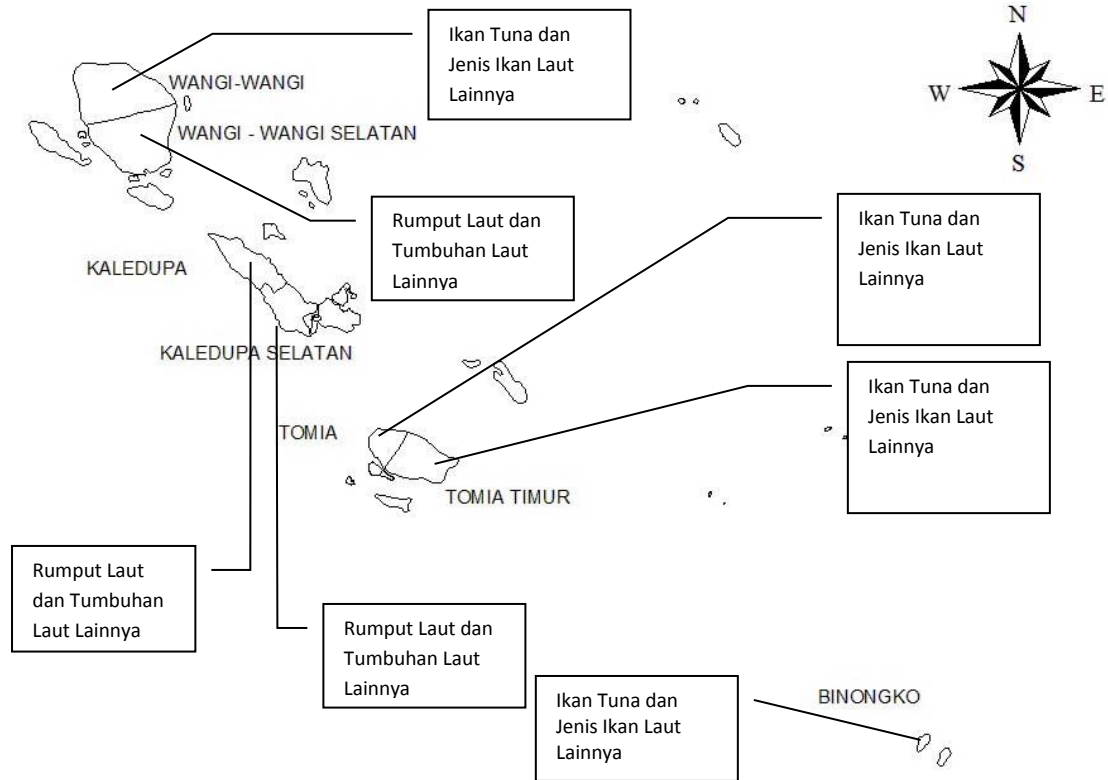


Gambar 8
Peta Kabupaten Muna
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kabupaten yang unggul pada komoditi perikanan tangkap adalah Tongkumo, Marobo, Kabawo, Kanangka, Tikep, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Katobu, Duruka, Bata Loiworu, Napabalano, Lasalepa, Napono Kusambi, Maligano, Batukara. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan budidaya tambak adalah Parigi, Kabawo, Kanangka, Bata Laiworu, Napono Kusambi, Maligano. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan budidaya kolam adalah Parigi, Lawa, Sawerigadi, Barangka, Maligano. Kecamatan yang unggul pada komoditi kepiting adalah Marobo, Tiworo Utara. Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan udang adalah Maligano. Kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut adalah Kontu Kowuna, Tiworo Utara, Kusambi, Lohia, Duruka, Towea, Wakarumbu Selatan, Pasir Putih, Pasi Kolaga. Kecamatan yang unggul pada komoditi teripang adalah Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Bata Loiworu, Napono Kusambi.

Sub Sektor Perikanan Kabupaten Wakatobi

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Wakatobi, maka diperoleh hasil sebagai berikut.



Gambar 9
Peta Kabupaten Wakatobi
Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Kecamatan yang unggul pada komoditi ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya adalah Binongko, Togo Binongko, Tomia, Tomia Timur, Wangiwangi. Sedangkan kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut dan tumbuhan laut lainnya adalah Kaledupa, Kaledupa Selatan, Dan Wangiwangi Selatan.

Analisis Kondisi Geografis dan Lahan Pengembangan Food Estate

Memberikan gambaran mengenai kondisi geografis dan arahan penggunaan lahan yang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber informasi yang dianalisis dalam bagian ini adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama berkaitan dengan: (a) Strategi pengembangan sektor perikanan; (b) Arah kebijakan pengembangan infrastruktur penunjang sektor perikanan; (c) Arah Pengembangan wilayah strategis provinsi.

Strategi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;

- b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pusat pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
- d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
- e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

Arah Pengembangan Sarana Penunjang Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan

Selain strategi di atas, Sulawesi Tenggara sudah menyiapkan rencana Sistem jaringan transportasi laut dalam upaya menunjang pengembangan sektor perikanan, terdiri atas: (a) tatanan kepelabuhanan; (b) trayek angkutan laut.

Tatanan kepelabuhan yang sudah disiapkan untuk menunjang produksi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tenggara terdiri dari:

- a. pelabuhan pengumpul terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari di Kota Kendari;
 - 2. Pelabuhan Bungkutoko di Kota Kendari;
 - 3. Pelabuhan Murhum di Kota Baubau;
 - 4. Pelabuhan Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 - 5. Pelabuhan Pomalaa di Kabupaten Kolaka;
 - 6. Pelabuhan Watunohu/Sapoiha di Kabupaten Kolaka Utara;
 - 7. Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Kabupaten Muna; dan
 - 8. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi.
 - b. pelabuhan pengumpan terdapat di :
 - 1. Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - 2. Kabupaten Muna meliputi Pelabuhan Tampo dan Pelabuhan Maligano;
 - 3. Kabupaten Buton meliputi Pelabuhan Banabungi, Pelabuhan Lasalimu (Nambo), Pelabuhan Siompu, Pelabuhan Lawele dan Pelabuhan Talaga;
- (2) Trayek angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. trayek angkutan pelayaran nasional meliputi :
 - 1. Benoa - Makassar – Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Kolonodale – Luwuk – Gorontalo – Bitung– Gorontalo – Luwuk – Kolonodale – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Lembar - Benoa;
 - 2. Kijang – Jakarta – Surabaya – Makassar – Pelabuhan Murhum – Namlea - Ambon- Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Namlea – Makassar – Surabaya – Jakarta - Kijang;
 - 3. Jakarta – Surabaya - Makassar – Pelabuhan Murhum – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Pelabuhan Murhum – Makassar – Surabaya - Jakarta;

Indikasi Arah Zona Pengembangan Sektor Perikanan

Arahan Zona Kawasan Peruntukan Perikanan, merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan. Kawasan ini diperbolehkan untuk:

- a. Diperbolehkan kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan *ecotourisme* yang tidak merusak lingkungan.
- b. Diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.
- c. Larangan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- d. Larangan pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum.
- e. Pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Pengendalian aktivitas yang mempengaruhi kualitas air/perairan.
- g. Diperbolehkan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah.

Aanalisis Pusat Wilayah Pengembangan Food Estate dan Klaster Perikanan

Bagian ini akan menjelaskan dan menggambarkan lokasi potensial untuk menjadi pusat pengembangan food estate berbasis perikanan. Analisis pusat pengembangan ini didasarkan pada kekuatan daerah dalam mendukung pengembangan food estate, serta indeks spesialisasi wilayah dalam aktivitas ekonomi berbasis perikanan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis daya saing dan daya dukung daerah.

Analisis Daya Saing

Perhitungan dan pemeringkatan daya saing yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi atau potensi wilayah secara relatif suatu Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota lain untuk menjadi pusat pengembangan food estate berbasis perikanan. Indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam analisis ini lebih bersifat indikator non fisik yang bersifat melekat suatu Kabupaten/Kota, indikator tersebut antara lain: 1) Kondisi Geografis, 2) Kesejahteraan, serta 3) Aktivitas Ekonomi.

Indikator Kondisi Geografis

Indikator Kondisi Geografis yang digunakan dalam analisis ini meliputi 1) Luas Daerah, 2) Jumlah Kecamatan, 3) Jumlah Penduduk, serta 4) Kepadatan Penduduk. Dari indikator tersebut akan dilakukan penilaian pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Hasil penilaian Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan analisis daya saing dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat baik, akan berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 1
Nilai Daya Saing dengan Indikator Kondisi Geografis
Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten	Nilai Indikator Kondisi Geografis				Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4		
1	Buton	5	8	8	4	6.25	II
2	Muna	6	12	10	5	8.25	III

3	Konawe	11	11	7	9	9.50	IV
4	Kolaka	12	7	12	7	9.50	IV
5	Konawe Selatan	9	10	9	6	8.50	III
6	Bombana	7	9	6	8	7.50	III
7	Wakatobi	3	3	3	3	3.00	I
8	Kolaka Utara	8	6	4	10	7.00	III
9	Buton Utara	4	1	2	11	4.50	I
10	Konawe Utara	10	5	1	12	7.00	III
11	Kota Kendari	1	4	11	1	4.25	I
12	Kota Baubau	2	2	5	2	2.75	I

Keterangan:

- 1 : Luas Daerah
- 2 : Jumlah Kecamatan
- 3 : Jumlah Penduduk
- 4 : Kepadatan Penduduk

Katogori:

- : Kurang
- I : Baik
- II : Cukup Baik
- III : Baik
- : Sangat
- IV : Baik

Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan yang digunakan dalam analisis ini meliputi 1) Jumlah Penduduk Cacat Tubuh, 2) Jumlah Tuna Netra, 3) Jumlah Tuna Rungu dan Wicara, 4) Jumlah Cacat Mental, 5) Jumlah Jamaah Haji, serta 6) Jumlah Penduduk Tamat Perguruan Tinggi. Dari indikator tersebut akan dilakukan penilaian pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Hasil penilaian Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan analisis daya saing dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat baik, akan berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2
Nilai Daya Saing dengan Indikator Kesejahteraan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten	Nilai Indikator Kesejahteraan						Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4	5	6		
1	Buton	3	10	2	4	7	7	5.50	II
2	Muna	9	9	9	5	10	9	8.50	III
3	Konawe	1	5	10	10	4	10	6.67	II
4	Kolaka	6	2	6	3	2	8	4.50	I
5	Konawe Selatan	5	7	5	8	9	6	6.67	II
6	Bombana	8	6	8	9	5	5	6.83	II
7	Wakatobi	10	8	4	7	6	4	6.50	II
8	Kolaka Utara	7	4	3	6	8	3	5.17	II
9	Buton Utara	12	12	12	11	12	2	10.17	IV
10	Konawe Utara	11	11	11	12	11	1	9.50	IV
11	Kota Kendari	2	3	1	2	1	12	3.50	I
12	Kota Baubau	4	1	7	1	3	11	4.50	I

Keterangan:

- 1 : Jumlah Cacat

Kategori:

- I : Kurang Baik

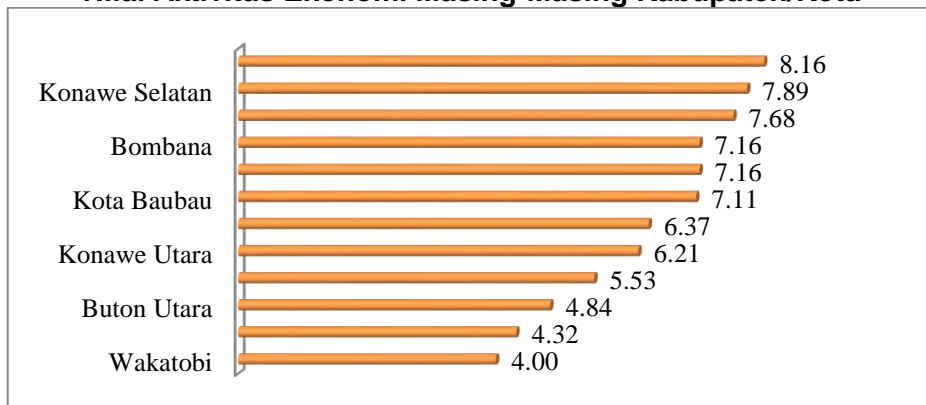
Tubuh			
: Jumlah Tuna			
2 Netra	II	:	Cukup Baik
: Jumlah Tuna Rungu dan			
3 Wicara	III	:	Baik
4 : Jumlah Cacat Mental	IV	:	Sangat Baik
5 : Jumlah Jamaah haji			
6 : Jumlah Penduduk Tamat Perguruan Tinggi			

Indikator Aktivitas Ekonomi

Indikator Aktivitas Ekonomi yang digunakan dalam analisis ini meliputi 1) Produktivitas Padi, 2) Produktivitas Jagung, 3) Produktivitas Ubi Kayu, 4) Produktivitas Ubi Jalar, 5) Produktivitas Kacang Tanah, 6) Produktivitas Kacang Kedelai, 7) Produktivitas Kacang Hijau, 8) Populasi Sapi, 9) Populasi Kerbau, 10) Populasi Kuda, 11) Populasi Kambing, 12) Populasi Domba, 13) Populasi Babi, 14) Populasi Ayam Petelur, 15) Populasi Ayam Pedaging, 16) Populasi Itik, 17) Produksi Ikan, 18) Produksi Telur Ayam Ras, 19) Produksi Telur Itik. Dari indikator tersebut akan dilakukan penilaian pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas, dengan indikator aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Baik yaitu sebanyak 5 Kabupaten/Kota.

Gambar 10
Nilai Aktivitas Ekonomi Masing-Masing Kabupaten/Kota



Dari gambar diatas dapat diketahui, Kabupaten/Kota yang tertinggi rata-rata nilai aktivitas ekonomi adalah Kabupaten Kolaka, yaitu sebesar 8,16. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai terendah, yaitu Kabupaten Wakatobi dengan nilai sebesar 4.

Analisis Daya Dukung

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi peranan suatu kabupaten/kota berdasarkan pada kemampuan kabupaten/kota tersebut memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi. Semakin lengkap pelayanan diberikan menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai tingkatan yang semakin tinggi, dan semakin berpotensi untuk menjadi pusat pengembangan food estate berbasis perikanan di Sulawesi Tenggara.

Fasilitas yang akan dianalisis dengan scalogram dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Fasilitas yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan
2. Fasilitas yang berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan

Formulasi dan hasil perhitungan akan menentukan peringkat kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah hasil akhir yang berupa peringkat masing-masing kabupaten.

Tabel 3
Hasil Analisis Scalogram Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten	Nilai Fasilitas		Total	Peringkat
		Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Pendidikan		
1	Buton	1053	1040	2093	5
2	Muna	1016	1233	2249	1
3	Konawe	1074	1143	2217	2
4	Kolaka	935	1195	2130	3
5	Konawe Selatan	1011	1111	2122	4
6	Bombana	541	608	1149	6
7	Wakatobi	395	726	1121	9
8	Kolaka Utara	410	715	1125	8
9	Buton Utara	346	487	833	11
10	Konawe Utara	245	417	662	12
11	Kota Kendari	536	603	1139	7
12	Kota Baubau	363	526	889	10

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui dan diproyeksikan kabupaten/kota yang bisa dijadikan sebagai pusat pengembangan food estate berbasis perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten/kota yang mempunyai fasilitas terlengkap berdasarkan analisis scalogram yaitu Kabupaten Muna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis potensi sector perikanan, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut: (a) semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara unggul pada komoditi perikanan tangkap kecuali kecamatan kulisusu barat; (b) Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut di Kabupaten Buton Utara antara lain: Lasalimu Selatan, Siontapina, Pasarwajo, Wabula, Wolowa, Sampolawa, Batu Atas, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua; (c) Kecamatan yang unggul pada komoditi kerapu di Kabupaten Kolaka adalah Tanggetada, Pomala. Kecamatan yang unggul pada komoditi teripang adalah Pomala; (d) Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut di Kabupaten Konawe adalah Wawoni Selatan, Wawoni Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Timur, Wawoni Utara, Soropia; (e) Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut di Kabupaten Kolaka Utara adalah Ranteangin, Wawo, Lasusua, Katoi, Kadeoha, Tiwu, Watunohu, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batu Putih, Dan Tolala; (f) Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut di Kabupaten Konawe Utara adalah Sawa, Motui, Limbo, Lasolo, Molawe; (g) Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan udang di Kabupaten Muna adalah Maligano. Kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut adalah Kontu Kowuna, Tiworo Utara, Kusambi, Lohia, Duruka, Towea, Wakarombu

Selatan, Pasir Putih, Pasi Kolaga; (h) Kecamatan yang unggul pada komoditi ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya di Kabupaten Wakatobi adalah Binongko, Togo Binongko, Tomia, Tomia Timur, Wangiwangi. Sedangkan kecamatan yang unggul pada komoditi rumput laut dan tumbuhan laut lainnya adalah Kaledupa, Kaledupa Selatan, Dan Wangiwangi Selatan.

Dari hasil analisis geografis dan rencana pengembangan wilayah, strategi yang dilakukan adalah menyiapkan sistem jaringan transportasi laut dalam upaya menunjang pengembangan sektor perikanan, terdiri atas: (a) tatanan kepelabuhanan; (b) trayek angkutan laut.

Hasil analisis Daya Saing dan daya dukung menunjukkan bahwa daerah yang paling berpotensi untuk menjadi pusat pengembangan food estate adalah daerah: Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono, 2002, **Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia**, BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1997. **Ekonomi Pembangunan** (Edisi Ketiga), Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Arsyad, Lincolin, 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**, BPFE, Yogyakarta
- Blakely, Edward J. (1989), **Planning Local Economic Development: Theory and Practice**, Sage Library of Social Research 168, Sage Publication.
- Daryanto, Arif. **Pembangunan Sektor Perikanan Berbasisan Klaster**.<http://www.mb.ipb.ac.id/> artikel Diakses tanggal 13 Mei 2010.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/MEN/2011. **Tentang Pedoman Umum Minapolitan**
- Kuncoro M., 2003, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)**, Erlangga, Jakarta.
- Maijidi, Nasyith, 1997, **Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah**, *Prisma*, No. 3
- Nugroho. Thomas. 2010. **Rekonstruksi Kebijakan Kelautan**.<http://web.ipb.ac.id/> Diakses tanggal 14 Mei 2010.
- Porter, M.E. (1995). The competitive advantage of Nations. Harvard Business Review, 2 (March/April).
- Satria, Arif 2010. **Minapolitan dan Minapolitik**.<http://fema.ipb.ac.id/> Diakses tanggal 14 Mei 2010.
- Sjafrizal, 1997, **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**,*Prisma*, LP3ES, No.3
- Sjoholm, F. 1999. "Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Investment", **Economic Development and Cultural Change**, 47(3), 559-584
- Soepono, Prasetyo, 1998. **Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Van Thunen yang dimodifikasi di Indonesia**. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No.2
- Soepono, Prasetyo, 2000. **Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur Hinter Land dari Central Place** Tinjauan Teoritik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 15 No. 4
- Soepono, Prasetyo, 1999, **Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah**, *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.4
- Tarigan, Robinson, 2004, **Perencanaan Pembangunan Wilayah**, Bumi Aksara, 2004

_____, 2004, **Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi**, Bumi Aksara, 2004

<http://www.litbang.deptan.go.id>, **Rencana Pengembangan Food Estate Di Indonesia**, 2010

<http://www.scribd.com/doc/98871585/Rumusan-Seminar-Food-Estate>, 2010.

<http://manajemenagb.blogspot.com/2012/12/peran-industri-perikanan-diindonesia.html>. Harik Sarfin, 2012